SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 123);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 325);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 332);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029.

Pasal 3

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. Bab VII : Penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERDISITO, SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19700617 200501 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 810

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2027

BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2026

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas yang akan menjadi landasan bagi semua pihak dalam penentuan perencanaan ke depan;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 memuat kebijakan yang merupakan kesepakatan atau kesatuan pandangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan dan merupakan sinkronisasi penjabaran secara konkrit, sistematis dan terukur dari RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 123);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 325);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 332);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2027.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025–2029.

Pasal 3

Kedudukan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan acuan dalam menyusun KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
g. Bab VII : Penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026 NOMOR 810

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kemampuan dan kelapangan berfikir sehingga dimampukan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Tahunan ini yaitu berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta sekaligus merupakan kesepakatan seluruh Pemangku Kepentingan di daerah yang dihasilkan melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah Tanggal 10 Februari 2026 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Gunung Mas Tanggal 12 Maret 2026 di Kuala Kurun.

Dokumen RKPD adalah merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah sebagai Acuan utama perencanaan teknis operasional masing-masing Perangkat Daerah serta pedoman utama penyusunan APBD. Oleh karena itu kedudukan dan peranannya sangat penting dalam menentukan arah perkembangan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, untuk itu seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas harus mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan rencana program hingga pelaksanaannya.

Kepada berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah berpartisipasi dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas disampaikan ucapan terima kasih dan semoga pelaksanaan pembangunan yang akan kita laksanakan di daerah pada tahun 2027 dapat meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR viii
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen 5
1.4. Maksud dan Tujuan 6
1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 7
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 1
2.1. Kondisi Umum Daerah 1
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2025 91
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 92
BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 2
3.2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025 9
3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 12
3.4. Pendanaan Non-APBD 44
BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ... 1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 5
4.2. Tema Dan Prioritas Pembangunan 12
4.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 13
4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 26
4.5. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Gunung Mas 28
4.6. Usulan Perencanaan Pembangunan Dari Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas 30
4.7. Usulan Perencanaan Pembangunan Dari Kabupaten Gunung Mas Ke Provinsi Kalimantan Tengah 31

4.8. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 dan Keselarasan PRO-SN Tematik Pembangunan 32

BAB. V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 1

5.1. Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2027 1

5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2027 20

BAB. VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 1

BAB. VII PENUTUP 1

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 ..... II-2

Tabel 2.2. Panjang Sungai di Kabupaten Gunung Mas II-5

Tabel 2.3. Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Kabupaten Gunung Mas II-7

Tabel 2.4. Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas II-8

Tabel 2.5. Jenis Tanah di Kabupaten Gunung Mas II-13

Tabel 2.6. Penutupan Lahan di Kabupaten Gunung Mas II-14

Tabel 2.7. Tabel Fungsi Kawasan, Pola Ruang dan Luas Areal Lahan II-16

Tabel 2.8. Daftar Perkebunan Besar Swasta yang Aktif Beroperasi di Wilayah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2025 ..... II-17

Tabel 2.9. Rekapitulasi Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas II-19

Tabel 2.10. Jumlah, Distribusi Kepadatan, dan Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-21

Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas (Ribu Jiwa) Tahun 2024 ..... II-23

Tabel 2.12. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2019 – 2023 ..... II-27

Tabel 2.13. Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2025 ..... II-30

Tabel 2.14. Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-32

Tabel 2.15. Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 – 2025 ..... II-36

Tabel 2.16. Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 – 2025 ..... II-38

Tabel 2.17. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-45

Tabel 2.18. Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 ..... II-47

Tabel 2.19. IDG,IPG, IKD, Capaian KLA, IBangga dan IPA Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-49

Tabel 2.20. Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-51

Tabel 2.21. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, LPE Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Kabupaten Gunung Mas 2021 – 2025 ..... II-53

Tabel 2.22. Capaian Sektor Ekonomi Hijau dan Biru Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-55

Tabel 2.23. Capaian Indeks Infrastruktur, Indeks Konektivitas Wilayah,Penyediaan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dan Rasio Elektrifikasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 – 2025 ..... II-56

Tabel 2.24. Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 ..... II-58

Tabel 2.25. Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-61

Tabel 2.26. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar Penyusunnya Tahun 2022-2025 ..... II-63

Tabel 2.27. Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024–2025 ..... II-63

Tabel 2.28. Alokasi dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-72

Tabel 2.29. Capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-73

Tabel 2.30. Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025 ..... II-74

Tabel 2.31. Capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-77

Tabel 2.32. Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025 ..... II-78

Tabel 2.33. Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-81

Tabel 2.34. Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-81

Tabel 2.35. Target dan Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-82

Tabel 2.36. Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-83

Tabel 2.37. Target dan Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-85

Tabel 2.38. Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-85

Tabel 2.39. Target dan Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-88

Tabel 2.40. Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-89

Tabel 2.41. Dukungan Personil Diluar ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas II-89

Tabel 3.1. Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... III-4

Tabel 3.2. Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 ..... III-6

Tabel 3.3. Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2021 s.d. Tahun 2025 ..... III-7

Tabel 3.4. Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 ..... III-7

Tabel 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2025 ..... III-10

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2025 ..... III-10

Tabel 3.7. Kerangka Pendapatan Daerah III-41

Tabel 3.8. Kerangka Belanja Daerah III-42

Tabel 3.9. Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2027 ..... III-44

Tabel 4.1. 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat IV-2

Tabel 4.2. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 ..... IV-6

Tabel 4.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 ..... IV-24

Tabel 4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas IV-27

Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas V-8

Tabel 5.2. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas V-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Gunung Mas II-2

Gambar 2.2. Peta Topografi (Kiri) dan Peta Kelerengan (Kanan) Kabupaten Gunung Mas II-4

Gambar 2.3. Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas II-6

Gambar 2.4. Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021 ..... II-9

Gambar 2.5. Suhu dan Kelembaban Sepanjang Tahun 2025 ..... II-10

Gambar 2.6. Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Sepanjang Tahun 2025 ..... II-10

Gambar 2.7. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Sepanjang Tahun 2025 ..... II-11

Gambar 2.8. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Gunung Mas, 2021-2025 (Juta Rupiah) II-28

Gambar 2.9. TPT (%) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 – 2025 ..... II-33

Gambar 2.10. Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-35

Gambar 2.11. Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 ..... II-37

Gambar 2.12. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-40

Gambar 2.13. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-41

Gambar 2.14. Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-42

Gambar 2.15. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024 ..... II-43

Gambar 2.16. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2021-2025 ..... II-45

Gambar 2.17. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025 ..... II-54

Gambar 2.18. Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024 ..... II-59

Gambar 2.19. Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunung Mas II-60

Gambar 2.20. Capaian SPM perBidang Urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 ..... II-72

Gambar 3.1. Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2025 ..... III-11

Gambar 4.1. Keselarasan Arah Pembangunan antara Nasional dengan Kabupaten IV-9

Gambar 4.2. Keselarasan Arah Pembangunan antara Provinsi dengan Kabupaten IV-10

Gambar 4.3. Keselarasan tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Gunung Mas IV-13

Gambar 4.4. Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 ..... IV-15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 15 Tahun 2026
TENTANG : RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 disusun sesuai amanat perundangan-undangan yang berlaku, mengacu pada Pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027.

Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan Pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah dan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 123);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2010 Nomor 116);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor 325);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025 Nomor 332);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027;

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra Perangkat Daerah, (4) RKPD dan (5) Renja Perangkat Daerah. Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek.

RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Di samping itu RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rujukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027.

Secara diagramatis keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

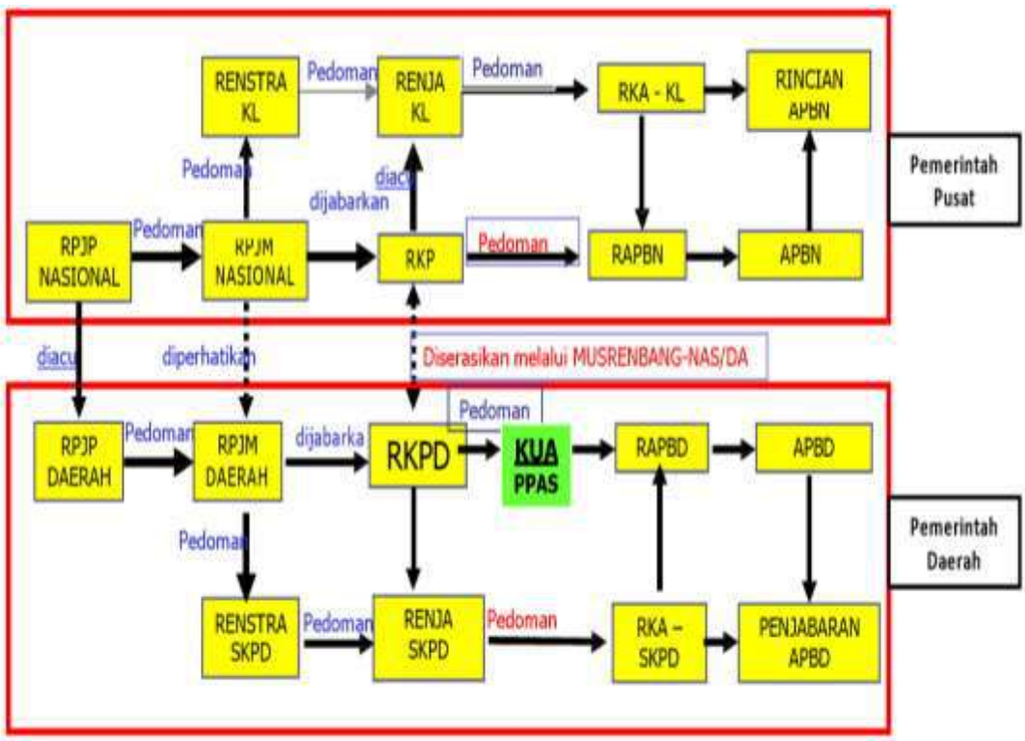

Mengacu pada Gambar 1.1. dapat diketahui bahwa secara rinci hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme Musrenbang.
- RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.
- RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah.
- RKPD nantinya dijabarkan ke dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada Renja Perangkat Daerah.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 adalah agar tersusunnya

dokumen perencanaan periode satu tahun yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan RKPD Tahun 2027 yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2027;
2. Memberikan arah bagi semua pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan tahun 2027;
3. Merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2027;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah

diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kab/kota

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan n.
3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah.
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Hasil Rakortek

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD provinsi dan juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023-2025

Berisikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.4. Pendanaan non-APBD

Berisikan uraian mengenai strategi pembiayaan yang bersumber di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Tema Dan Prioritas Pembangunan

Berisikan uraian mengenai Tema Dan Prioritas Pembangunan. Tema dan prioritas pembangunan yang

didasarkan pada penahapan pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025 2029 serta memperhatikan tema dan fokus RKP Tahun 2027.

4.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun 2027 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

4.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Mengemukakan arah kebijakan pembangunan daerah.

4.5. Usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Gunung Mas

4.6. Usulan Perencanaan Pembangunan dari Kecamatan Se-Kabupaten Gunung Mas

4.7. Usulan Perencanaan Pembangunan Dari Kabupaten Gunung Mas Ke Provinsi Kalimantan Tengah

4.8. Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2026 Dan Keselarasan Pro-SN Tematik Pembangunan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Aspek geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kapuas pada tahun 2002 berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180).

Wilayah administratif Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024, memiliki total luas wilayah mencapai 9.317,115 km². Kecamatan Damang Batu memiliki luas terbesar, yakni 1.824,038 km² atau 19,6% dari total wilayah kabupaten, diikuti oleh Miri Manasa dengan 1.405,197 km² (15,1%). Kecamatan dengan luas terkecil adalah Rungan Barat, hanya 347,091 km² atau 3,7% dari luas kabupaten. Kurun, sebagai ibu kota Kabupaten Gunung Mas, mencakup 772,049 km² atau 8,3% dari total luas. Beberapa kecamatan lain seperti Tewah (9,2%) dan Rungan (10,5%) juga memiliki cakupan wilayah yang cukup besar. Data ini menunjukkan bahwa luas wilayah di Kabupaten Gunung Mas tidak merata, dengan beberapa kecamatan memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan kecamatan lainnya:.

Tabel 2.1
Data Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Total Area (Km²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/Kota
Manuhing	Tumbang Talaken	839,056	9
Manuhing Raya	Tehang	654,627	7
Rungan	Jakatan Raya	977,442	10,5
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	468,570	5
Rungan Barat	Rabambang	347,091	3,7
Sepang	Sepang Simin	368,765	4
Mihing Raya	Kampuri	383,743	4,1
Kurun	Kuala Kurun	772,049	8,3
Tewah	Tewah	854,330	9,2
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	422,206	4,5
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1.824,038	19,6
Miri Minasa	Tumbang Napoi	1.405,197	15,1
Gunung Mas		9.317,115	100

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2025

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Gunung Mas

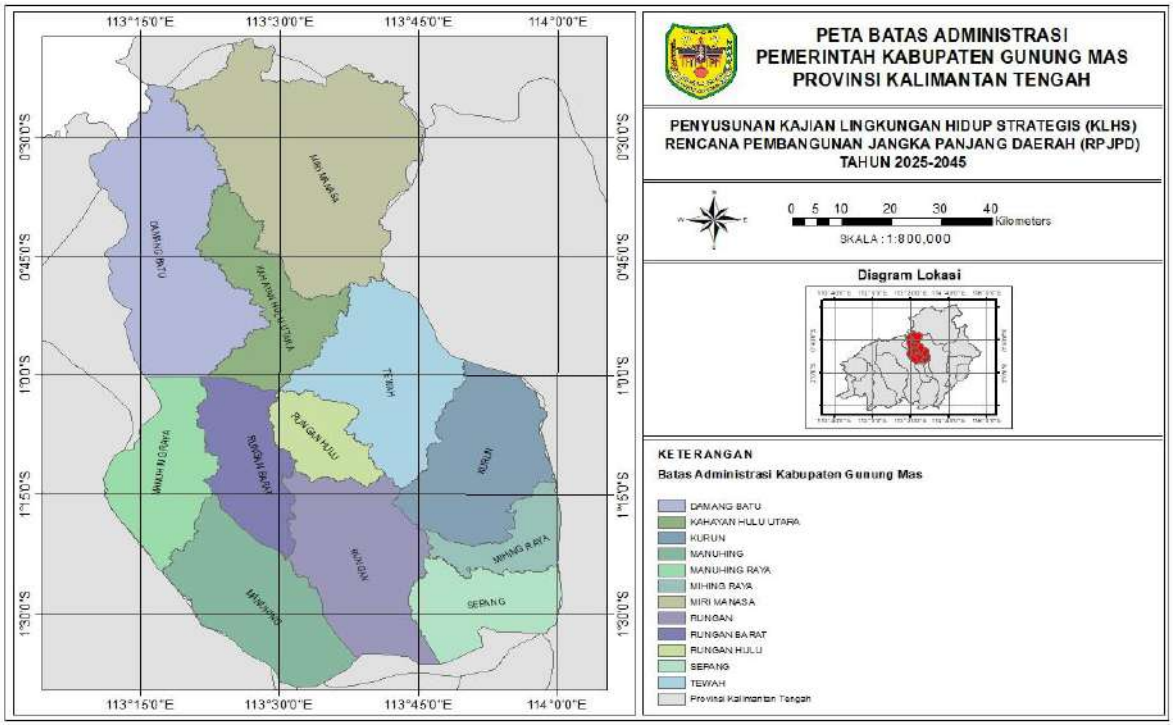

Sumber: Peta Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2025

Adapun secara administrasi Kabupaten Gunung Mas berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya;
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya; dan
4. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

A. Letak

Secara Geografis, Kabupaten Gunung Mas terletak pada posisi ± 00°18”00 Lintang Selatan sampai dengan 01°40”30” lintang selatan dan ± 113°01”00” bujur timur sampai dengan 114°01”00” bujur timur dengan topografis dataran rendah bagian selatan dan daerah utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara ± 200 – 500 meter dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan ± 80 – 150 dan perbukitan tingkat kemiringan ±150-250 dimana terbentang pegunungan Muller & Schwanner dengan puncak tertinggi (Bukit Raya) mencapai 2.278 meter di atas permukaan laut.

Menurut keadaaan wilayahnya Kabupaten Gunung Mas memiliki ketinggian wilayah terhadap permukaan laut yang bervariasi dimana wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari dataran rendah hingga daerah pegunungan. Kabupaten Gunung Mas tidak memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan laut. Wilayah dengan topografi paling rendah berkisar 50-100 meter di atas permukaan laut.

B. Topografis;

Secara umum kondisi topografi di wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu:

1. Wilayah bagian utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100-500 meter dari permukaan air laut dan mempunyai tingkat kemiringinan 8°-15° serta mempunyai daerah pegunungan dengan tingkat kemiringan ± 15°-25°.
2. Wilayah bagian selatan terdiri dari dataran rendah dan rawa-rawa yang berpotensi mengalami banjir cukup besar pada musim-musim hujan, selain itu juga daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki perairan yang meliputi danau, rawa-rawa dan ada empat jalur sungai yang masuk wilayah Kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Rungan, Sungai Manuhing dan Sungai Miri serta anak-anak sungai lainnya.

Gambar 2.2
Peta Topografi (Kiri) dan Peta Kelerengan (Kanan)
Kabupaten Gunung Mas

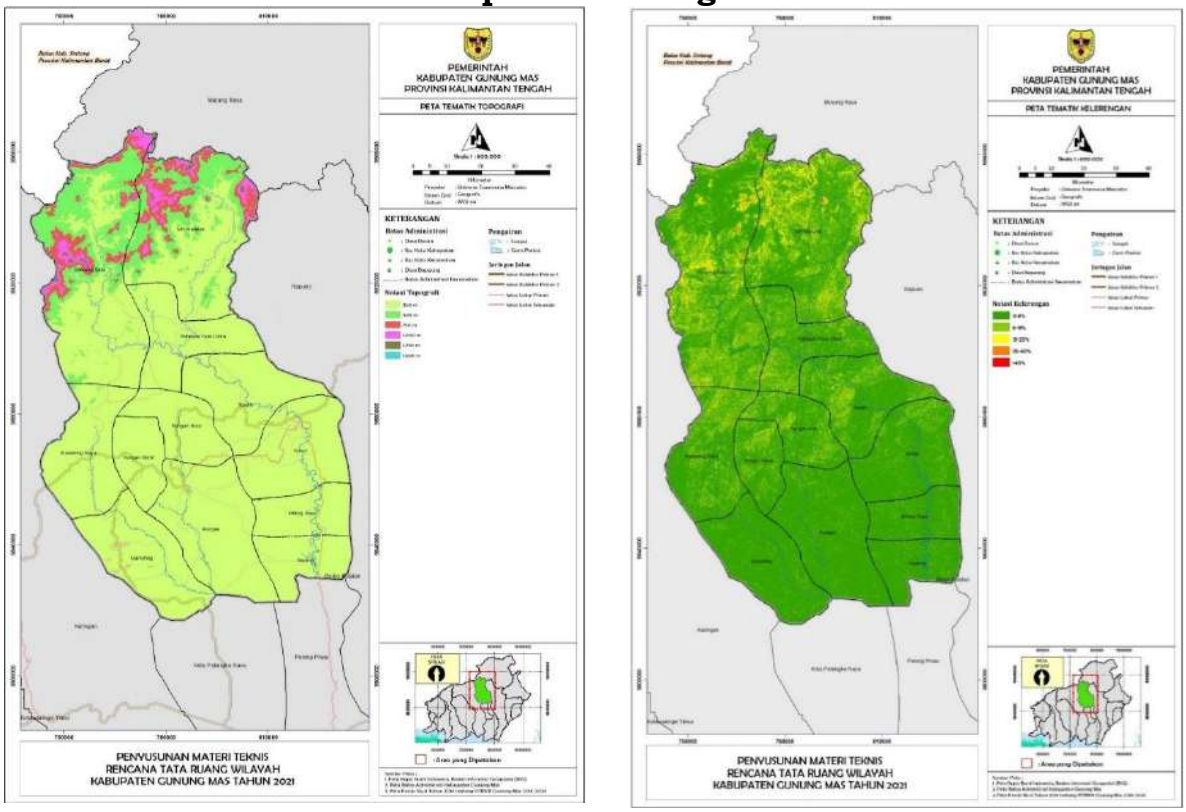

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Dilihat dari topografinya luas lahan di Wilayah Kabupaten Gunung Mas didominasi lahan dengan kondisi topografi 0-250 m seluas 768.761,62 Ha (82,28%) dan interval 250-500 m seluas 102.173,68 Ha (10,94%). Adapun kondisi kelerengan dominan dengan kelerengan 0-8% seluas 677.676,60 Ha (72,53%) dan interval 212.153,52 Ha (22,71%) yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gunung Mas. Kondisi topografi, kondisi kontur dan kondisi kelerengan di wilayah Kabupaten Gunung Mas di tampilkan pada gambar di atas.

C. Hidrologi

Kabupaten Gunung Mas merupakan kabupaten yang sebagian wilayahnya bergantung pada pemanfaatan sungai. Di Kabupaten Gunung Mas terdapat 3 (tiga) cabang sungai yang langsung bermuara ke Sungai Kahayan, yaitu Sungai Rungan, Sungai Miri, dan Sungai Manuhing. Kecamatan yang dilintasi oleh sungai tersebut adalah Manuhing, Manuhing raya, Rungan, Rungan Hulu, Sepang, Mihing Raya, Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu, dan Miri Manasa

Rincian panjang Sungai utama di Kabupaten Gunung Mas seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Panjang Sungai Di Kabupaten Gunung Mas

No.	Nama Sungai	Panjang (km)	Kecamatan yang Dilintasi
1	Manuhing	± 28,75	Manuhing, Manuhing raya
2	Rungan	± 86,25	Rungan, Rungan Hulu
3	Kahayan	± 600	Sepang, Mihing Raya, Kurun, Tewah, Kahayan Hulu Utara, Damang Batu
4	Miri	± 20	Miri Manasa

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Gambar 2.3

Peta Hidrologi Kabupaten Gunung Mas

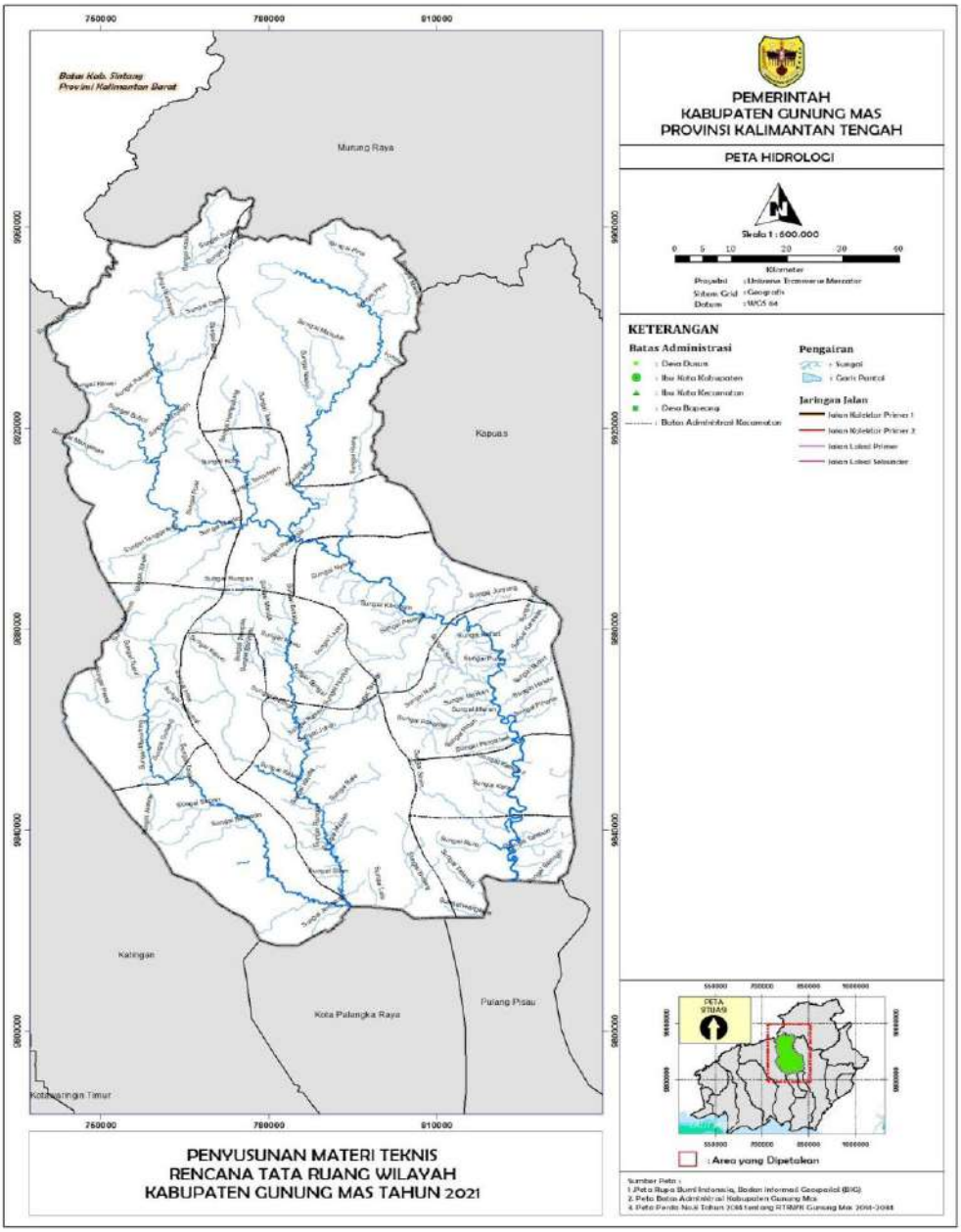

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

Hasil pengukuran status kualitas air sungai di Kabupaten Gunung Mas tahun 2020 dan 2021 yang diambil di beberapa titik sungai berdasarkan kriteria mutu air pada Peraturan Pemerintah 82/2001 kelas II didapatkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indeks Polusi dan Kriteria Mutu Air Sungai di Kabupaten Gunung Mas

Nama Sungai	Titik Sampling	Indeks Polusi		Kriteria Mutu Air	
		2020	2021	2020	2021
Miri	Napoi	5,57	1,89	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Desa Siruk	4,19	1,83	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Tumbang Lapan	3,83	4,03	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Kahayan	Teluk Kanduri	2,91	1,56	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Tewah	2,96	3,42	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Sepang	2,92	4,31	Cemar Sedang	Cemar Ringan
	Tumbang Talaken	3,43	2,48	Cemar Ringan	Cemar Ringan
Manuhing	Luwuk Tukau	5,14	8,84	Cemar Ringan	Cemar Sedang
	Takaras	4,38	2,01	Cemar Ringan	Cemar Ringan
	Bereng Malaka	2,76	8,78	Cemar Ringan	Cemar Sedang
Rungan	Guhung Rawai	4,14	7,09	Cemar Ringan	Cemar Sedang
	Tumbang Rahuyan	3,08	8,77	Cemar Sedang	Cemar Sedang

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

D. Kondisi Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri atas beberapa jenis tanah yaitu Podsolik Merah Kuning, Alluvial, Hydromorfik Kelabu, Alluvial Hydromorfik, Gley Humus dan Kompleks Regosol Podsolik. Jenis tanah yang dominan adalah tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di bagian utara wilayah Gunung Mas dengan ketebalan ± 110 cm. Kemudian pada daerah-daerah pinggir sungai umumnya didominasi oleh tanah alluvial yang berasal dari endapan sungai dengan jenis tanah Aluvial Hydromorfik kelabu, tersebar dan dapat di jumpai di beberapa sungai/anak sungai di wilayah Gunung Mas yaitu Sungai Kahayan, Sungai Miri (anak Sungai Kahayan), Sungai Rungan dan Sungai Manuhing (anak Sungai Rungan).

Berdasarkan Peta Digital Geologi Kalimantan (P3GI, 1995), Wilayah Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 11 (sebelas) formasi geologi, yaitu:

1 Tonalit Sepauk (KIs);
2 Batu Malihan Pinoh (PzTRp);
3 Formasi Tanjung (Tet);
4 Batu Pasir Haloq (Teh);
5 Formasi Mentemoi (Teme);
6 Formasi Montalat (Tomm);
7 Batuan Gunung Api Malasan;
8 Batuan Terobosan Sintang (Toms);
9 Formasi Warukin (Tmw);
10 Formasi Dahor; dan
11 Aluvium (Qa).

Tabel 2.4
Formasi Geologi di Kabupaten Gunung Mas

NO	FORMASI GEOLOGI	LUAS	PERSEN
1	Aluvial	36.079,09	3,86
2	Batu Pasir Haloq	140.231,47	15,01
3	Batuan Gunung Api Malahan	88.496,09	9,47
4	Batuan Malihan Pinoh	104.121,95	11,15
5	Batuan Terobosan Sintang	9.539,62	1,02
6	Formasi Dahor	28.335,47	3,03
7	Formasi Mentalat	5.690,58	0,61
8	Formasi Pembuang	132.004,50	14,13
9	Formasi Tanjung	901,71	0,1
10	Formasi Warukin	134.124,09	14,36
11	Sungai / Danau / Telaga	3.596,29	0,38
12	Tonalit Sepauk	251.085,09	26,88
TOTAL		**934.205,95**	**100**

Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

Gambar 2.4
Peta Persebaran Geologi Kabupaten Gunung Mas 2021

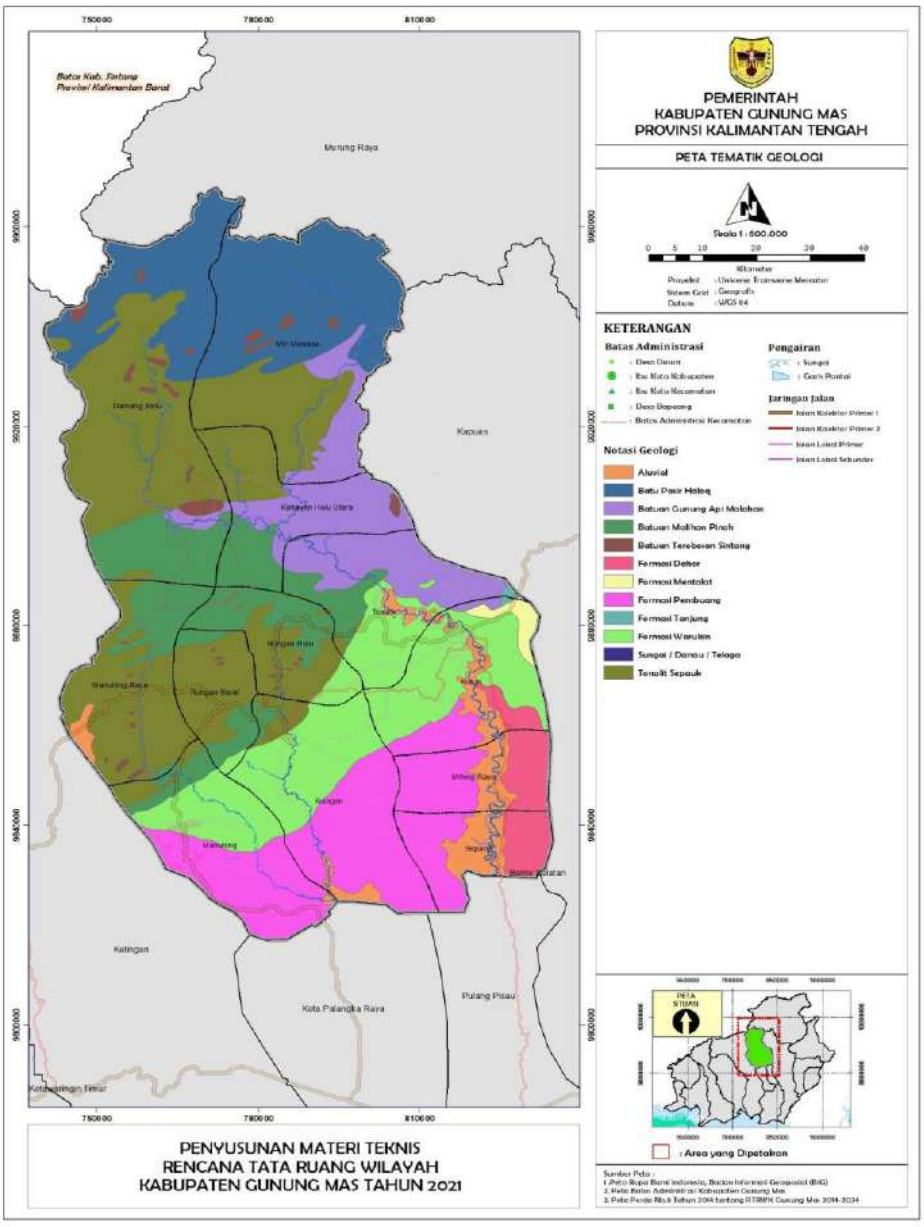

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2025-2029

E. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Gunung Mas memiliki iklim tropis dengan temperatur rata-rata di tahun 2025 sebesar 27,16◦C hingga 28,26◦C. Namun jika dilihat dari minimumnya, suhu di Kabupaten Gunung Mas sempat mencapai 21,60◦C pada bulan Juli. Sedangkan suhu maksimum berada pada bulan Oktober juga dengan maksimal suhu mencapai 36,7◦C. Dari sisi

kelembaban udara, di Kabupaten Gunung Mas secara rata-rata berada pada kelembaban 80,00%-85,00%.

Gambar 2.5
Suhu dan Kelembaban Sepanjang Tahun 2025

Bulan *Month*	Suhu/*Temperature* (°C)			Kelembaban/*Humidity* (%)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/*January*	23,2	27,16	35,3	52	85	98
Februari/*February*	23,3	27,71	35,0	47	83	98
Maret/*March*	23,1	27,74	36,2	50	84	98
April/*April*	23,1	27,69	35,2	52	84	98
Mei/*May*	23,8	28,26	35,6	54	83	98
Juni/*June*	23,0	27,85	35,2	51	82	98
Juli/*July*	21,6	28,08	35,8	46	80	96
Agustus/*August*	22,1	27,45	35,5	48	82	98
September/*September*	22,7	27,90	36,2	45	81	97
Oktober/*October*	22,4	28,05	36,7	47	81	99
November/*November*	23,0	27,60	36,1	48	83	98
Desember/*December*	22,9	27,23	35,7	49	84	98

Sumber: BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2026

Kecepatan angin di Kabupaten Gunung Mas secara umum berada pada rata-rata 3 – 4 knot dengan tekanan udara rata-rata berkisar antara 1.007,13 mbar hingga 1.008,84 mbar.

Gambar 2.6
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Sepanjang Tahun 2025

Bulan *Month*	Kecepatan Angin (knot) *Wind Velocity (knot)*			Tekanan Udara/*Atmospheric Pressure* (mbar)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/*January*	0	3	25	1.002,7	1.007,40	1.012,0
Februari/*February*	0	4	13	1.002,5	1.008,30	1.014,3
Maret/*March*	1	3	17	1.001,3	1.007,54	1.012,4
April/*April*	0	3	20	1.004,0	1.008,23	1.012,6
Mei/*May*	0	3	20	1.002,5	1.007,33	1.011,8
Juni/*June*	0	3	14	1.003,0	1.008,50	1.013,0
Juli/*July*	1	4	13	1.003,3	1.007,94	1.013,0
Agustus/*August*	0	3	18	1.004,1	1.008,84	1.012,4
September/*September*	0	4	16	1.004,0	1.008,61	1.012,5
Oktober/*October*	0	4	15	1.000,9	1.007,94	1.014,0
November/*November*	0	4	17	1.002,8	1.007,79	1.013,4
Desember/*December*	0	4	19	1.002,5	1.007,13	1.011,7

Sumber: BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2026

Dan Untuk curah hujan selama tahun 2025, tertinggi berada di bulan Januari dengan jumlah curah hujan mencapai 611,8 mm/tahun dan jumlah hari hujan terbanyak selama 29 hari dan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebanyak 7 hari hujan.

Gambar 2.7
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Sepanjang Tahun 2025

Bulan *Month*	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun) *Number of Precipitation (mm/year)*	Jumlah Hari Hujan (hari) *Number of Rainy Days (day)*	Penyinaran Matahari (jam) *Duration of Sunshine (hour)*
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/*January*	611,8	29	3,4
Februari/*February*	158,1	13	2,9
Maret/*March*	375,0	25	3,8
April/*April*	410,9	26	4
Mei/*May*	311,3	17	5,3
Juni/*June*	124,6	15	4,7
Juli/*July*	39,0	7	5,1
Agustus/*August*	239,0	14	4,6
September/*September*	177,6	21	4,9
Oktober/*October*	410,6	16	5,1
November/*November*	310,7	22	4,5
Desember/*December*	360,3	21	4,6

Sumber: BPS, Gunung Mas Dalam Angka 2026

F. Jenis Tanah

Gambaran kondisi tanah sangat diperlukan untuk mengidentifikasi bentuk – bentuk pemanfaatan ruang, penggunaan, pengusahaan, dan penguasaan sumber daya tanah selanjutnya berdasarkan analisis geografis, fisiografis, geologi, kemiringan lereng, jenis tanah, serta kesesuaian lahan.

Tanah merupakan salah satu material yang di dalamnya mengandung butiran mineral padat yang tersedimentasi dan berasal dari pelapukan bahan organik serta berisi zat cair dan gas yang mengisi ruang – ruang Pada partikel padat. Secara umum, tanah terbagi atas dua bagian, yaitu tanah berkohesif dan tanah tidak berkohesif. Tanah berkohesif contohnya adalah tanah lempung, sedangkan tanah tak berkohesif adalah tanah berpasir.

Sebagian besar jenis tanah di wilayah Kabupaten Gunung Mas berjenis podsolik yang Tanah podsolik merupakan salah satu jenis tanah yang

banyak tersebar di Indonesia. Tanah ini ini terbentuk karena suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Tanah ini juga termasuk dalam kelompok tanah mineral tua dengan karakteristik warna kemerahan atau kekuningan. Adapun terkait dengan gambaran Jenis tanah dapat dilihat pada table dan Peta berikut :

Tabel 2.5
Jenis Tanah di Kabupaten Gunung Mas

No.	Jenis Tanah	Luas	Persen
1	Aluvial	11.007,61	1,18
2	Glei Humus	22.539,37	2,41
3	Latosol	267.209,44	28,60
4	Podsol	281.385,32	30,12
5	Podsolik	337.419,36	36,11
6	Podsolik Merah Kunig	14.734,14	1,58
7	Renzina	36,67	0,00
Total		**934.331,92**	**100**

Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

G. Tutupan Lahan

Penutupan lahan di Kabupaten Gunung Mas didominasi oleh Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi, hutan yang sudah pernah dibuka lalu ditumbuhi kembali menjadi hutan dan belukar rawa berupa tutupan vegetasi non hutan. Persebaran hutan sekunder ini sudah mencapai daerah utara dan selatan kecamatan ini dengan dominan sebaran di area wilayah tengah dan selatan dari Kabupaten Gunung Mas.

Selanjutnya adalah penutupan lahan berupa area pertambangan dimana area pertambangan ini didominasi oleh karakteristik lahan terbuka, dan area perkebunan kelapa sawit yang didominasi dengan karakteristik lahan terbuka dengan pola penanaman yang rapi dan bersifat grid. Dominasi lainnya adalah penutupan lahan berupa semak belukar. Belukar ini merupakan hasil pembukaan lahan oleh warga ataupun kegiatan industri lainnya, baik oleh perusahaan ataupun oleh masyarakat setempat. Belukar ini sebagian ada yang dimanfaatkan untuk kegiatan padi ladang, perkebunan karet dan perkebunan sawit dalam skala yang kecil.

Penutupan lahan yang berupa hutan primer kerapatan sedang hingga tinggi sebarannya berada di area hulu dari Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya area terbangun berupa penggunaan lahan berupa permukiman didominasi di wilayah pinggiran sungai.

Lebih jelasnya mengenai sebaran penutup lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Penutupan Lahan di Kabupaten Gunung Mas

No	Penutup Lahan	Luas (ha)	Persen
1.	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	7,73	0,00
2.	Bangunan non-permukiman lain	5,18	0,00
3.	Bangunan permukiman desa	1.958,46	0,21
4.	Bangunan permukiman Kota	988,33	0,11
5.	Hamparan batuan/pasir lain	1.938,06	0,21
6.	Hutan lahan rendah primer kerapatan tinggi	20.871,07	2,23
7.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah	106.049,26	11,35
8.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan sedang	147.749,56	15,81
9.	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan tinggi	241.080,63	25,80
10.	Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	35.960,70	3,85
11.	Hutan lahan tinggi primer kerapatan tinggi	90.733,62	9,71
12.	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi	22.840,49	2,44
13.	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan rendah	24,45	0,00
14.	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan sedang	22.039,44	2,36
15.	Hutan rawa/gambut sekunder kerapatan tinggi	18.891,19	2,02
16.	Hutan tanaman (industri) lain	4.155,68	0,44
17.	Kebun campuran	17.093,58	1,83

No	Penutup Lahan	Luas (ha)	Persen
18.	Ladang/tegalan dengan palawija	8.296,78	0,89
19.	Lahan terbuka lain	11.255,56	1,20
20.	Penambangan terbuka lain	522,21	0,06
21.	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	12.129,70	1,30
22.	Perkebunan karet	1.242,70	0,13
23.	Perkebunan kelapa sawit	52.701,48	5,64
24.	Perkebunan lain	3.276,67	0,35
25.	Rawa pedalaman	2.029,07	0,22
26.	Semak	26.512,05	2,84
27.	Semak belukar	76.121,48	8,15
28.	Sungai	4.320,29	0,46
29.	Tubuh air lain	3.536,49	0,38
Total		**34.331,92**	**100**

Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

H. Penggunaan Lahan

1. Pola Penggunaan Lahan Areal Hutan

Kondisi-kondisi fisik wilayah, secara alamiah menentukan bahwa Kabupaten Gunung Mas adalah bioregion hutan. Dengan penduduk yang masih jarang, pola penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Gunung Mas menampilkan dominasi kelompok penggunaan hutan. Hingga tahun 2023, luas hutan yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas dengan luasan total 931.711 Ha meliputi Kawasan Hutan Lindung (HL) 49.745 Ha, Hutan Produksi Tetap 348.300 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 209.754 Ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 108.156 Ha dan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 4.117 Ha, Penggunan lain 207.368 Ha.

Tabel 2.7
Tabel Fungsi Kawasan, Pola Ruang dan Luas Areal Lahan

NO	FUNGSI KAWASAN	POLA RUANG	LUAS (HA)
1	Hutan Adat	Hutan Adat	68.326,625
2	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Pariwisata	349,371
3	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Perikanan Budidaya	23,232
4	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Perkebunan	109.249,900
5	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Perkebunan Rakyat	45.692,802
6	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Permukiman	22.386,699
7	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	5,580
8	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Pertambangan	6.761,657
9	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Pertanian	2.501,904
10	Areal Penggunaan Lain (APL)	Kawasan Peruntukan Industri	110,835
11	Areal Penggunaan Lain (APL)	Sempadan Sungai	6.123,428
12	Areal Penggunaan Lain (APL)	Taman Hutan Raya	0,005
13	Hutan Lindung (HL)	Hutan Lindung (HL)	37.948,729
14	Hutan Lindung (HL)	Kawasan Pertambangan	11.768,932
15	Hutan Lindung (HL)	Sempadan Sungai	9,922
16	Hutan Produksi Tetap (HP)	Hutan Produksi Tetap (HP)	202.074,753
17	Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan Hutan Adat	2,566
18	Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan Perkebunan	49.945,652
19	Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan Perkebunan Rakyat	4.070,519
20	Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan Permukiman	1.297,317
21	Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan Pertambangan	43.824,157
22	Hutan Produksi Tetap (HP)	Kawasan Pertanian	0,002
23	Hutan Produksi Tetap (HP)	Sempadan Sungai	205,681
24	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	62.176,731
25	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan Pariwisata	0,369
26	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan Perikanan Budidaya	13,913
27	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan Perkebunan	51.773,701
28	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan Perkebunan Rakyat	1.105,149
29	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan Permukiman	2.690,314
30	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan Pertambangan	8.087,323
31	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Kawasan Pertanian	1.697,546

NO	FUNGSI KAWASAN	POLA RUANG	LUAS (HA)
32	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Sempadan Sungai	1.965,626
33	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	Taman Hutan Raya	1,011
34	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	157.998,988
35	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan Perkebunan	3,484
36	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan Permukiman	369,875
37	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan Pertambangan	22.002,174
38	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Kawasan Pertanian	5,360
39	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Sempadan Sungai	339,621
40	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	Taman Hutan Raya	699,236
41	Kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA)	Taman Hutan Raya	4.116,798
42	Perairan	Badan Air	3.983,983
TOTAL LUAS (HA)			**931.711,467**

(Sumber: Penyusunan Matek Revisi RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 – 2034, 2021

2. Pola Penggunaan Lahan Areal Non Hutan

Areal non hutan didominasi oleh jenis-jenis penggunaan lahan pertanian. Areal-areal penggunaan pertanian non perkebunan besar, bersama-sama dengan areal pemukiman, secara umum berkembang sepanjang sungai-sungai besar. Areal-areal perkebunan besar yang berkembang kemudian, memulai pola perkembangan berbeda, yakni tidak cenderung mengikuti sungai besar. Jumlah perusahaan perkebunan besar yang sudah beroperasi sebanyak dua belas perusahaan dan tersebar di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.8
Daftar Perkebunan Besar Swasta yang Aktif Beroperasi di Wilayah Kabupaten Gunung Mas sampai dengan Tahun 2025

NO	NAMA PBS	LOKASI
1.	PT. Archipelago Timur Abadi (ATA)	Desa Teluk Nyatu, Kecamatan Kurun
2.	PT. Jaya Jadi Utama (JJU)	Kec. Kahayan Hulu Utara dan Damang Batu

NO	NAMA PBS	LOKASI
3.	PT. Kalimantan Hamparan Sawit (KHS)	Kec. Manuhing dan Kec. Manuhing Raya
4.	PT.Bumi Agro Prima (BAP)	Kec. Sepang dan Kec. Mihing Raya
5.	PT. Agro Lestari Sentosa (ALS)	Kec. Sepang dan Kec. Mihing Raya
6.	PT. Mulia Sawit Agro Lestari (MSAL)	Kec. Manuhing
7.	PT. Prasetya Mitra Muda (PMM)	Kec. Manuhing
8.	PT. Berkala Maju Bersama (BMB) Kec. Manuhing	Kec. Manuhing
9.	PT. Kahayan Agro Plantation (KAP)	Kec. Kahayan Hulu Utara
10.	PT. Tantahan Panduhup Asi (TPA)	Kec. Manuhing

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gunung Mas Tahun 2025

I. Wilayah Rawan Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Berdasarkan Dokumen Laporan Akhir Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten Gunung Mas 2023, terdapat 6 jenis bencana berpotensi terjadi di Kabupaten Gunung Mas yaitu, Banjir, Banjir Bandang, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor (Gerakan Massa), Kekeringan, dan Cuaca Ekstrim.

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) bencana yang terekam di Kabupaten Gunung Mas sejak tahun 2003 yaitu bencana kebakaran hutan dan lahan serta bencana banjir. Terdapat 9

kejadian bencana banjir yang terekam dan 7 kebakaran hutan dan lahan hingga tahun 2023, atau dalam kurun waktu 20 tahun. Bencana tanah longsor atau gerakan massa belum pernah tercatat dalam DIBI, tetapi terdapat beberapa kejadian tanah longsor dengan skala kecil yang terjadi di jalan raya sehingga tidak terdapat elemen yang terpapar bencana. Tanah longsor tersebut hanya mengganggu kegiatan di jalan raya. Bencana banjir bandang juga belum pernah terjadi di Kabupaten Gunung Mas, tetapi potensi tersebut ada karena terdapat bahaya tanah longsor serta berkaitan juga dengan topografi wilayah Gunung Mas yang sebagian besar berbukit (425.494,54 Ha atau sekitar 39,38%). Bencana kekeringan dan cuaca ekstrem juga belum pernah tercatat di Kabupaten Gunung Mas, tetapi adanya perubahan cuaca global yang cukup signifikan akhir-akhir ini menjadikan adanya potensi kekeringan dan cuaca ekstrem di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.9

Rekapitulasi Risiko Bencana Kabupaten Gunung Mas

Jenis Bahaya	LUAS RISIKO (Ha)			TOTAL LUAS (HA)	KELAS
	RENDAH	SEDANG	TINGGI		
Banjir	22.300,02	108.816,30	3.425,13	133.114,41	Tinggi
Banjir bandang	33.482,70	4.419,81		19.602,90	Rendah
Kebakaran hutan dan Lahan	274.312,80	456.525,90	171.203,40	902.042,10	Tinggi
Tanah longsor	385.053,39	44.882,37	0,54	429.936,30	Rendah
Kekeringan	639.229	290.615		929.844	Sedang
Cuaca Ekstrem	468.014,85	88.199,37	12.496,77	568.710,99	Tinggi

Sumber : Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Gunung Mas 2025 - 2029

J. Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Gunung Mas mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Terdapat beragam faktor yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk. Misalnya, wabah penyakit atau epidemi, kelaparan, dan bencana alam. Di lain pihak, kestabilan wilayah, peningkatan gizi, dan kesehatan dapat mengakibatkan jumlah penduduk cenderung naik. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk dari waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu sehingga gejala dinamika penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran (fertilitas atau natalitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi).

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Gunung Mas. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas tercatat sebanyak 148.233 jiwa dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,93 per tahun selama periode 2020–2024. Distribusi penduduk belum merata antar kecamatan. Kecamatan Kurun menjadi pusat konsentrasi penduduk terbesar dengan 38.407 jiwa atau 25,91 persen dari total penduduk, sekaligus memiliki tingkat kepadatan tertinggi yakni 49,83 jiwa per km². Sebaliknya, Miri Manasa hanya dihuni 4.213 jiwa (2,84 persen) dengan kepadatan 3,00 jiwa per km². Secara umum, kepadatan penduduk Gunung Mas tergolong rendah, yakni 15,93 jiwa per km², mencerminkan karakter wilayah yang luas dengan persebaran penduduk yang tidak merata. Rasio jenis kelamin sebesar 110,24 menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, kondisi yang hampir merata di seluruh kecamatan.

Tabel 2.10
Jumlah, Distribusi Kepadatan, dan Rasio Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Manuhing	12.817	8,68	15,36	113,13
2	Manuhing Raya	6.548	4,42	10,01	114,76
3	Rungan	13.833	9,33	14,17	114,93
4	Rungan Hulu	781	5,27	16,71	108,84
5	Rungan Barat	6.823	4,60	19,68	114,97
6	Sepang	10.463	7,06	28,43	105,56
7	Mihing Raya	8.995	6,07	23,48	108,89
8	Kurun	38.407	25,91	49,83	107,11
9	Tewah	23.338	15,74	27,39	108,79
10	Kahayan Hulu Utara	8.878	5,99	21,05	113,16

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
11	Damang Batu	6.045	4,08	3,32	113,53
12	Miri Minasa	4.213	2,84	3,00	116,06
Gunung Mas		**148.233**	**100**	**15,93**	**110,24**

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2026

2. Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur

Dari sisi struktur umur, komposisi penduduk menunjukkan dominasi kelompok usia produktif. Kelompok umur 20–24 tahun (13,75 ribu jiwa), 25–29 tahun (13,09 ribu jiwa), dan 30–34 tahun (14 ribu jiwa) merupakan kelompok terbesar. Struktur ini mengindikasikan bahwa Gunung Mas sedang berada pada fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia kerja lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Kondisi ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh penciptaan lapangan kerja yang memadai.

Jumlah penduduk Kabupaten Gunung Mas dari tahun 2021 hingga 2025, terjadi peningkatan populasi yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 138,40 ribu jiwa, kemudian naik menjadi 142,30 ribu jiwa pada tahun 2022, naik lagi menjasi 142,83 ribu jiwa di tahun 2023, 145,53 ribu jiwa pada tahun 2024, dan menjadi 148,23 ribu jiwa pada tahun 2025.

Tren ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dan positif dalam lima tahun terakhir, yang menandakan adanya dinamika kependudukan yang perlu dikelola secara tepat agar dapat menjadi potensi pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2025 tercatat sebanyak 110.052 orang. Dari jumlah tersebut, 74.367 orang termasuk angkatan kerja, terdiri dari 71.906 orang bekerja dan 2.461 orang pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka relatif rendah, sekitar 3 persen

dari total Angkatan kerja. Sementara itu, penduduk bukan angkatan kerja berjumlah 35.685 orang, yang sebagian besar merupakan perempuan. Aktivitas utama kelompok ini didominasi oleh kegiatan mengurus rumah tangga (25.198 orang), disusul bersekolah (7.149 orang) dan kegiatan lainnya (3.338 orang).

Komposisi angkatan kerja masih didominasi laki-laki sebanyak 51.067 orang, jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan sebanyak 23.300 orang. Sebaliknya, kelompok bukan Angkatan kerja didominasi perempuan (28.599 orang), menunjukkan masih kuatnya peran domestik perempuan dalam struktur sosial ekonomi daerah. Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan Gunung Mas pada 2025 menunjukkan struktur pasar kerja yang relatif stabil dengan tingkat pengangguran rendah, namun tetap menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan tenaga kerja perempuan serta pemerataan kesempatan kerja antar wilayah.

Tabel 2.11

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gunung Mas (Ribu Jiwa) Tahun 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7,32	7,01	14,33
5-9	6,21	5,87	12,07
10-14	6,2	5,9	12,1
15-19	6,28	5,88	12,15
20-24	7,16	6,6	13,75
25-29	6,75	6,34	13,09
30-34	7,37	6,63	14
35-39	6,81	5,91	12,72
40-44	5,94	5	10,94
45-49	4,96	4,09	9,04
50-54	4	3,36	7,36
55-59	3,07	2,55	5,62
60-64	2,26	1,9	4,16
65-69	1,49	1,44	2,92
70-74	0,96	0,98	1,94
75+	7,32	7,01	14,33

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2025	77.73	70,51	148,23
2024	76,4	69,13	145,53
2023	75,0	67,7	142,83
2022	74,9	67,3	142,30
2021	72,9	65,4	138,40

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2026

3. Keberadaan masyarakat Adat

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, yang memiliki kekayaan budaya serta keberagaman masyarakat adat yang masih kuat menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka. Keberadaan masyarakat adat di wilayah ini menjadi bagian penting dari identitas budaya daerah dan warisan bangsa. Beberapa kelompok masyarakat adat yang hidup di Kabupaten Gunung Mas dan memiliki keberagaman budaya serta tradisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suku Dayak Ngaju: Suku Dayak Ngaju merupakan kelompok etnis mayoritas di Kabupaten Gunung Mas. Mereka memiliki budaya yang kaya dan khas, terutama dalam hal bahasa, sistem kepercayaan (seperti Kaharingan), adat istiadat, serta seni tradisional seperti tari, musik, dan kerajinan tangan. Kehidupan masyarakat Dayak Ngaju erat kaitannya dengan alam dan hutan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem kepercayaan dan pola hidup mereka.
2. Suku Dayak Ot Danum: Suku ini juga merupakan bagian dari masyarakat Dayak yang mendiami wilayah Kabupaten Gunung Mas. Mereka memiliki dialek bahasa sendiri, serta berbagai tradisi unik seperti upacara adat dan teknik bercocok tanam tradisional. Suku Dayak Ot Danum dikenal dengan rumah betang (rumah panjang) sebagai bentuk tempat tinggal komunal yang mencerminkan nilai kebersamaan.

3. Suku Jawa dan Bali: Selain masyarakat Dayak, terdapat pula komunitas pendatang seperti suku Jawa dan Bali yang telah lama bermukim di Kabupaten Gunung Mas. Mereka datang melalui program transmigrasi dan membawa serta kebudayaan mereka sendiri, seperti dalam bentuk seni pertunjukan, adat istiadat, dan praktik keagamaan.
4. Suku-suku Minoritas Lainnya: Kabupaten Gunung Mas juga dihuni oleh kelompok etnis lain seperti suku Madura, Bugis, dan Banjar, yang meskipun jumlahnya tidak sebesar kelompok utama, turut menyumbangkan warna dalam keberagaman budaya daerah ini.

Masyarakat adat di Kabupaten Gunung Mas terus berupaya menjaga dan melestarikan nilai-nilai leluhur, termasuk dalam hal agama lokal (seperti Kaharingan), adat istiadat, sistem sosial tradisional, dan pengelolaan sumber daya alam secara arif. Keberadaan mereka menjadi pilar penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan budaya lokal.

Pemerintah daerah bersama dengan berbagai pihak telah melakukan berbagai langkah untuk mendukung hak-hak masyarakat adat, seperti pengakuan wilayah adat, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Namun demikian, tantangan seperti modernisasi, ekspansi perkebunan, penebangan hutan, dan perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, yang melibatkan masyarakat adat sebagai subjek aktif dalam proses pembangunan, serta penghormatan terhadap hak-hak tradisional mereka.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dan sekaligus indikator keberhasilan dalam setiap proses pembangunan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan layak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta jaminan perlindungan sosial. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan menempatkan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga mendorong peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah, terdapat beberapa pembahasan dalam melihat kesejahteraan masyarakat seperti kesejahteraan ekonomi, kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif. Keseluruhan pembahasan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, perencanaan pembangunan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, membuka lapangan kerja yang produktif, serta memperkuat daya saing ekonomi lokal. Kesejahteraan ekonomi tercermin dari meningkatnya pendapatan per kapita, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta tumbuhnya sektor-sektor unggulan daerah. Berikut penjabaran kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam aspek kesejahteraan masyarakat.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gunung Mas mengalami perubahan setiap tahunnya dalam periode 2021–2025. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,09 persen, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda secara global. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pertumbuhan meningkat menjadi 6,47 persen pada 2022, menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Namun pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,25 persen, akan tetapi tahun 2024 kembali mengalami kenaikan menjadi 4,48 persen. Akan tetapi disebabkan kondisi geopolitik yang terjadi sepanjang tahun 2025 serta diberlakukannya tarif impor oleh Amerika Serikat sangat mempengaruhi kondisi perekonomian global dan terlebih secara Nasional, Hal ini juga berpengaruh kepada laju pertumbuhan ekonomi secara regional dimana tahun 2025 Laju pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas turun ke angka 4,53 persen.

Meskipun mengalami perlambatan di beberapa tahun, tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunung Mas secara keseluruhan menunjukkan pergerakan positif seiring dengan upaya pemulihan dan pengembangan sektor ekonomi unggulan

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Harga Berlaku (miliar rupiah)	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
1	2021	7.173,2	3.804,7	5,09
2	2022	8.135,3	4.050,9	6,47
3	2023	8.620,0	4.222,9	4,25
4	2024*	9.761,7	4.412,2	4,48

No	Tahun	Harga Berlaku (miliar rupiah)	Harga Konstan (2010=100)	Pertumbuhan Nyata (%)
5	2025**	10.726,9	4.611,9	4,53

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2026

2. PDRB Perkapita

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat secara makro berdasarkan PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita di Kabupaten Gunung Mas mengalami peningkatan cukup signifikan dalam lima tahun terakhir Pada tahun 2021, PDRB per kapita sebesar Rp.51,8 juta dan meningkat dalam empat tahun menjadi Rp.66,18 juta.

Gambar 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita
Kabupaten Gunung Mas, 2021-2025 (Juta Rupiah)

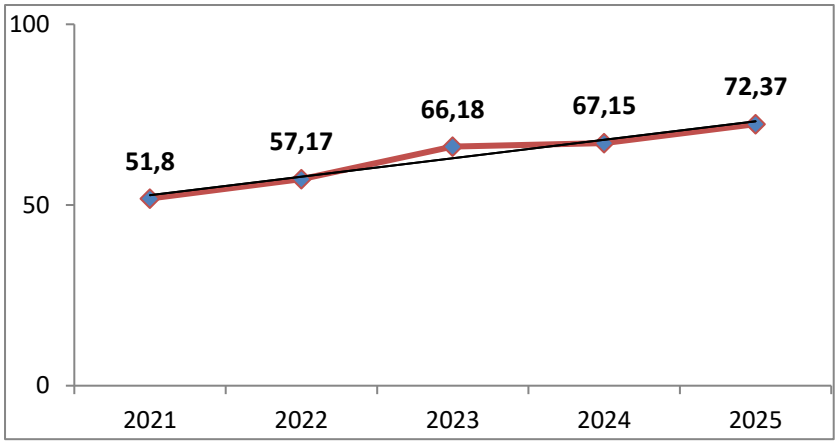

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas dalam angka 2026

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan berdasarkan harga berlaku, yaitu harga pada tahun penghitungan, serta harga konstan, yakni harga yang mengacu pada tahun dasar penghitungan. Kabupaten Gunung Mas memiliki perekonomian yang bergantung pada sektor pertanian, terutama subsektor perkebunan, karena karakteristik wilayahnya yang mendukung kegiatan tersebut. Meskipun pertumbuhan PDRB bersifat naik turun, secara tren terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kabupaten Gunung Mas dalam Angka 2025, distribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB atas harga berlaku tahun 2024 menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyumbang terbesar dengan 33,05 persen, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sektor konstruksi juga berkontribusi cukup besar, yakni 12,63 persen, dan terus menunjukkan peran signifikan selama dua tahun terakhir.

Sementara itu, sektor pertambangan yang pada periode 2020–2022 memiliki kontribusi tinggi, seperti 13,69 persen pada 2020, terus mengalami penurunan hingga hanya 8,33 persen pada 2024. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya lokasi pertambangan emas di Kabupaten Gunung Mas, yang berdampak pada menurunnya kontribusi sektor tersebut terhadap perekonomian daerah. Menyadari bahwa sumber daya tambang semakin lama dapat habis, pemerintah daerah kini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengajarkan praktik usaha pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai alternatif sumber mata pencaharian agar masyarakat tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Secara keseluruhan, distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas mencerminkan dominasi sektor primer dan adanya pergeseran kontribusi antar sektor ekonomi yang perlu diantisipasi demi keberlanjutan ekonomi daerah.

Tabel 2.13
Distribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 – 2025

No	Sektor	2021	2022	2023	2024*	2025**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,86	29,56	31,69	33,03	33,59
2	Pertambangan dan Penggalian	13,08	13,86	8,63	8,36	9,02
3	Industri Pengolahan	8,24	8,20	8,53	8,24	7,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6	Konstruksi	11,90	11,96	12,88	12,72	12,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,59	9,93	10,21	9,98	10,00
8	Transportasi dan Pergudangan	1,79	1,89	2,07	2,17	2,20
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,54	1,66	1,70	1,65	1,66
10	Informasi dan Komunikasi	1,34	1,39	1,45	1,39	1,35
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,52	0,56	0,60	0,57	0,58
12	Real Estate	2,83	2,76	2,90	2,71	2,74
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan social Wajib	6,42	5,86	6,10	6,18	6,33
15	Jasa Pendidikan	7,37	7,79	8,39	8,21	7,70
16	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,80	3,84	4,16	4,03	4,00
17	Jasa Lainnya	0,27	0,27	0,30	0,29	0,28
Distribusi PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka 2026
*Keterangan : *) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*

3. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan merupakan indikator makro untuk melihat sejauh mana tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Kemiskinan merupakan kondisi di mana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Angka kemiskinan diukur berdasarkan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Selama periode 5 (lima) tahun ini garis kemiskinan cenderung meningkat/naik tiap tahunnya, yang mana mempengaruhi juga jumlah Penduduk miskin tiap tahunnya yang ikut naik. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Berdasarkan data tahun 2021–2025, garis kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari Rp 456.984 pada tahun 2021 menjadi Rp 585.476 pada tahun 2025. Seiring dengan itu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunung Mas cukup fluktuatif dimana ditahun 2025 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2021, terdapat 6,29 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase 5,35 persen. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali naik menjadi 6,70 ribu jiwa atau 5,64 persen, dengan garis kemiskinan meningkat menjadi Rp 479.550. Peningkatan ini dikarenakan kenaikan harga kebutuhan pokok serta tantangan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin sedikit menurun menjadi 6,55 ribu jiwa dengan persentase 5,47 persen, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi dan bantuan sosial dari pemerintah. Namun, di tahun 2024, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi

6,86 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,68 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh naiknya garis kemiskinan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, serta faktor ekonomi seperti kenaikan harga barang dan biaya hidup. Akan tetapi pada Tahun 2025 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 6,67 ribu jiwa, dengan persentase penduduk miskin diangka 5,48 Persen. Hal ini dipengaruhi dengan adanya stimulant dari Pemerintahan yang baru yang mana berfokus untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Tabel 2.14
Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

Tahun	Garis kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2025	585.476	6,67	5,48
2024	562.332	6,86	5,68
2023	526.341	6,55	5,47
2022	479.550	6,70	5,64
2021	456.984	6,29	5,35

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas 2026

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, karena secara langsung berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menentukan tingkat pendapatan rumah tangga, yang menjadi faktor utama dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan sektor ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu indikator utama dalam menilai kondisi ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT digunakan untuk mengukur persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan. Indikator ini menjadi tolok ukur

penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi suatu wilayah, karena semakin rendah tingkat pengangguran umumnya mencerminkan adanya peningkatan dalam penyediaan lapangan kerja dan kestabilan ekonomi masyarakat. Tingginya TPT sering kali menjadi indikator adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja, serta mencerminkan tantangan dalam hal kompetensi tenaga kerja dan keterbatasan akses terhadap pelatihan dan bimbingan usaha.

Di Kabupaten Gunung Mas, Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami fluktuasi dengan pola meningkat selama periode tahun 2021 – 2025. Pada tahun 2021 TPT berada di angka 3,11 persen, angka ini sedikit membaik menjadi 2,96 persen Pada tahun 2022, namun kembali naik menjadi 3,24 persen pada tahun 2023, kembali menurun sedikit ke 3,12 persen di tahun 2024, sebelum akhirnya Kembali naik di angka 3,31 persen di tahun 2025. Perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pemulihan ekonomi, tantangan dalam menciptakan kesempatan kerja yang memadai masih cukup besar dan memerlukan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Meskipun begitu, tingkat pengangguran di Kabupaten Gunung Mas tergolong rendah, namun perlu diperhatikan kembali terkait kualitas tenaga kerja dan produktivitasnya untuk memberi dampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.9
TPT (%) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 – 2025

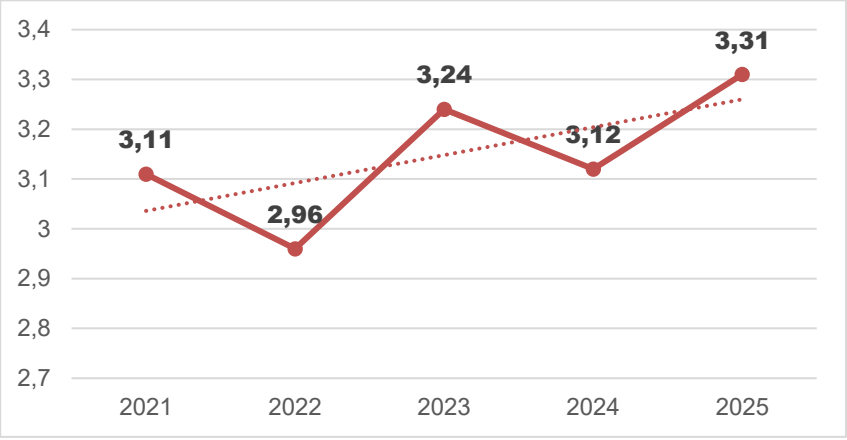

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai indeks ini berkisar antara 0 hingga 1, di mana angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan angka 1 menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi (seluruh pendapatan hanya dimiliki oleh satu orang atau kelompok). Indeks Gini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena semakin rendah nilai indeks tersebut, semakin merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut, yang berarti kesejahteraan masyarakat secara umum lebih baik dan kesenjangan ekonomi lebih kecil.

Di Kabupaten Gunung Mas, capaian Indeks Gini selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan adanya fluktuasi. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 0,278 pada tahun 2021, menurun hingga mencapai angka 0,262 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan ke angka 0,309, akan tetapi menurun menjadi 0,255 di tahun 2024. Dan Kembali menurun di Tahun 2025 diangka 0,235. Kenaikan tajam pada tahun 2023 dapat mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan yang meningkat pada tahun tersebut yang dipengaruhi oleh ketidakseimbangan dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, di mana sebagian kelompok masyarakat lebih cepat pulih dibandingkan kelompok lainnya. Adapun penurunan indeks pada tahun 2025 menjadi sinyal positif bahwa kebijakan pemerataan ekonomi atau bantuan sosial mulai menunjukkan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan.

Gambar 2.10
Indeks Gini Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

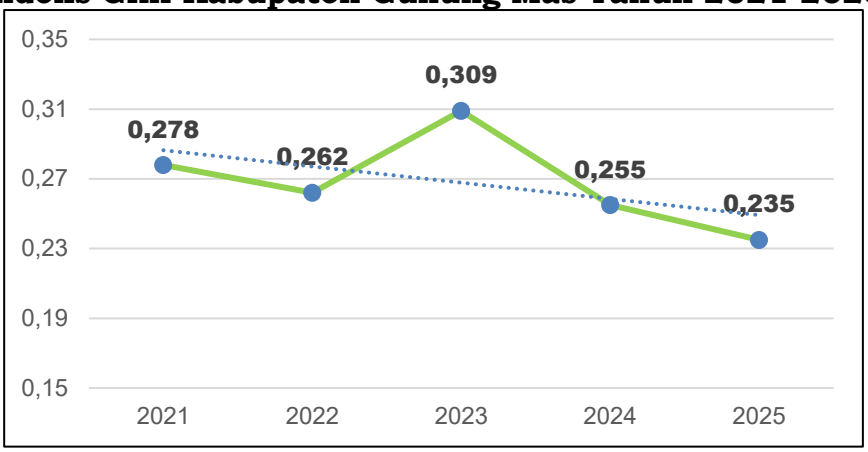

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

6. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dimensi panjang umur dan sehat diukur melalui Angka Harapan Hidup. Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan dimensi kehidupan yang layak diukur melalui Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021-2025, meskipun masih berada dalam kategori sedang dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada 2021, IPM Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 72,22, kemudian mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 74,46 pada 2025.

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai indikator pembangunan manusia, termasuk umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran per

kapita masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah beberapa kabupaten lain di Kalimantan Tengah, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dari sisi indikator penyusun, umur harapan hidup meningkat dari 73,04 tahun pada tahun 2021 menjadi 73,93 tahun pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam sektor kesehatan. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 11,9 tahun pada tahun 2021 menjadi 12,19 tahun pada tahun 2025, menunjukkan semakin banyaknya peluang pendidikan bagi generasi muda. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah yang naik dari 9,18 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,4 tahun pada tahun 2025, menandakan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas semakin lama mengenyam pendidikan formal. Selain itu, pengeluaran per kapita terus meningkat, dari 10.809 ribu/kapita pada tahun 2021 menjadi Rp.12.215 ribu/kapita pada tahun 2025, yang menunjukkan daya beli masyarakat semakin membaik.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Gunung Mas mencerminkan adanya perkembangan positif dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, meskipun masih diperlukan kebijakan yang lebih strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.15
Capaian IPM Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 – 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,04	73,09	73,31	73,58	73,93
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,9	11,91	12,05	12,10	12,19
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,18	9,24	9,25	9,37	9,4
Pengeluaran per Kapita (000 Rp/Kapita)	10.809	10.990	11.462	11.902	12.215
IPM	**72,22**	**72,50**	**73,18**	**73,88**	**74,46**

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

2.1.2.2. Kesehatan untuk Semua

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan di mana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Angka Harapan Hidup (AHH) atau Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2021, dari 73,04 tahun menjadi 73,93 tahun. Artinya, bayi yang lahir pada tahun 2025 diperkirakan memiliki harapan hidup hingga usia 73-74 tahun, dengan asumsi pola kesehatan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan, pola hidup yang lebih baik, serta kesadaran masyarakat dan akses yang lebih luas terhadap fasilitas kesehatan di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.11
Usia Harapan Hidup Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024

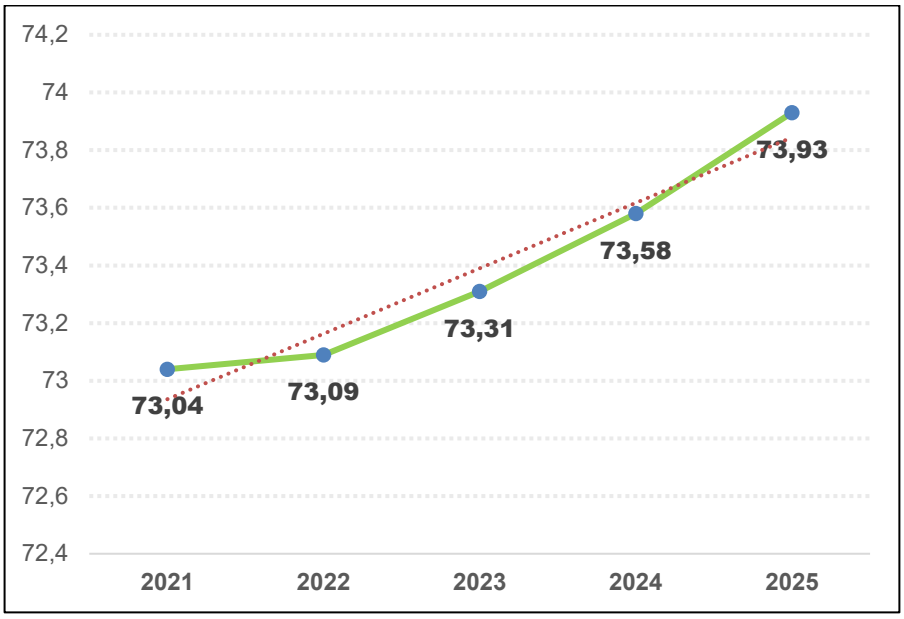

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

Selama periode 2021–2025, indikator pembangunan kesehatan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan berbagai perbaikan signifikan. Angka kematian ibu menurun dari 183 menjadi 43,3 per 100.000 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi juga turun dari 11 menjadi 10,8 per 1.000 kelahiran hidup. Prevalensi stunting mengalami penurunan drastis dari 20,6 persen di tahun 2021 menjadi 10,54 persen di tahun 2025, mencerminkan peningkatan intervensi gizi dan kesehatan anak. Sementara itu, angka gizi buruk tetap rendah, meski meningkat dari 0,074 persen (2022) menjadi 2 persen (2023 dan 2024).

Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten Gunung Mas sedikit menurun dari 2,57 menjadi 2,29, yang sejalan dengan peningkatan Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dari 74,22 persen menjadi 66,2 persen meskipun sempat fluktuatif. Selain itu, unmet need (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) menurun drastis dari 16,1 persen menjadi 5,25 persen, dan pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) meningkat hampir 10 kali lipat dari 2,57 persen menjadi 23,20 persen. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan kemajuan nyata dalam layanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian kelahiran, serta penurunan beban gizi buruk di Kabupaten Gunung Mas. Tren perbaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan intervensi pemerintah daerah di sektor kesehatan, meskipun masih diperlukan perhatian khusus terhadap stabilitas angka gizi buruk dan upaya menjaga konsistensi cakupan pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.16
Indikator Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kesehatan	82,78	77,63	78,03	82	82,4
Angka Kematian Ibu (Per 100.000 LH)	183	135	175	110	43,3
Angka Kematian Bayi (per 1.000 LH)	11	5,8	5,3	8,5	10,8
Prevalensi Stunting (%)	20,6	18,34	16,37	14,1	10,54

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2021	2022	2023	2024	2025
Total Fertility Rate (TFR) (%)	2,57	2,42	2,34	2,34	2,29
Modern Contarceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)	84	57,85	73,37	72,03	66,2
Unmeet Need (%)	8,57	17,13	6,50	5,25	9,1
Peserta Pengguna MKJP (%)	16	8,8	29,60	23,20	23,20

Sumber: Dinas Kesehatan dan Dinas P2KBP3A Kabupaten Gunung Mas, 2026

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas memperlihatkan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

1. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun, proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan ini mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren positif, dengan peningkatan dari 9,18 tahun pada tahun 2021 menjadi 9,4 tahun pada tahun 2025. Angka ini

mengindikasikan bahwa secara rata-rata, penduduk Kabupaten Gunung Mas telah mengenyam pendidikan selama 9,4 tahun pada tahun 2025, setara dengan kelas 1 SMA semester 1. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan dalam data berikut:

Gambar 2.12
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

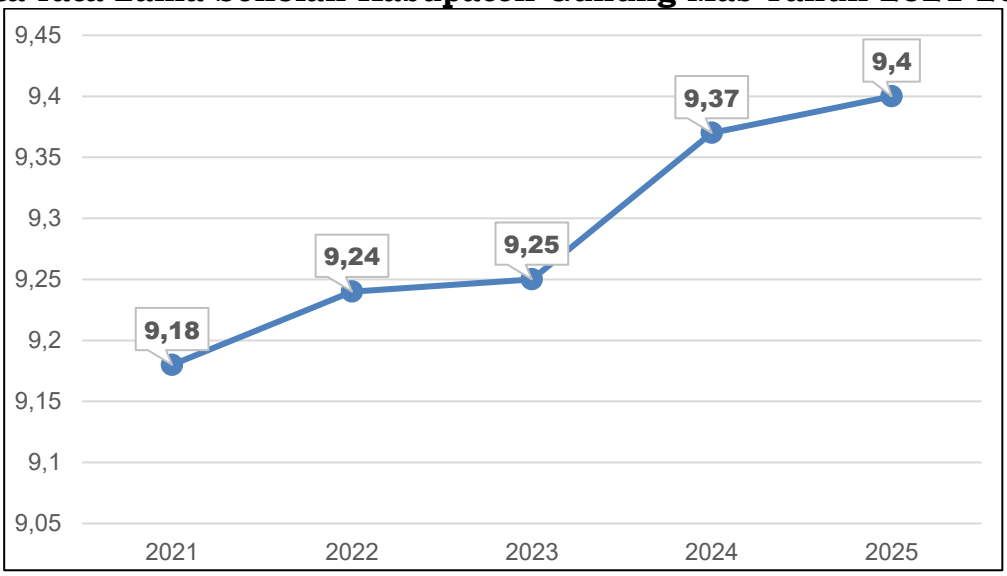

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh). HLS ini dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2025 mencapai 12,19 tahun. Hal ini berarti bahwa seseorang yang berusia 7 tahun pada saat ini, memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga setara dengan jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK) dan telah memasuki perguruan tinggi. Tingginya angka HLS ini mencerminkan harapan masyarakat terhadap akses pendidikan yang lebih baik. Namun, untuk mewujudkan harapan tersebut, diperlukan peningkatan fasilitas pendidikan yang memadai guna mendukung kualitas pembelajaran dan meningkatkan daya saing individu di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.13
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

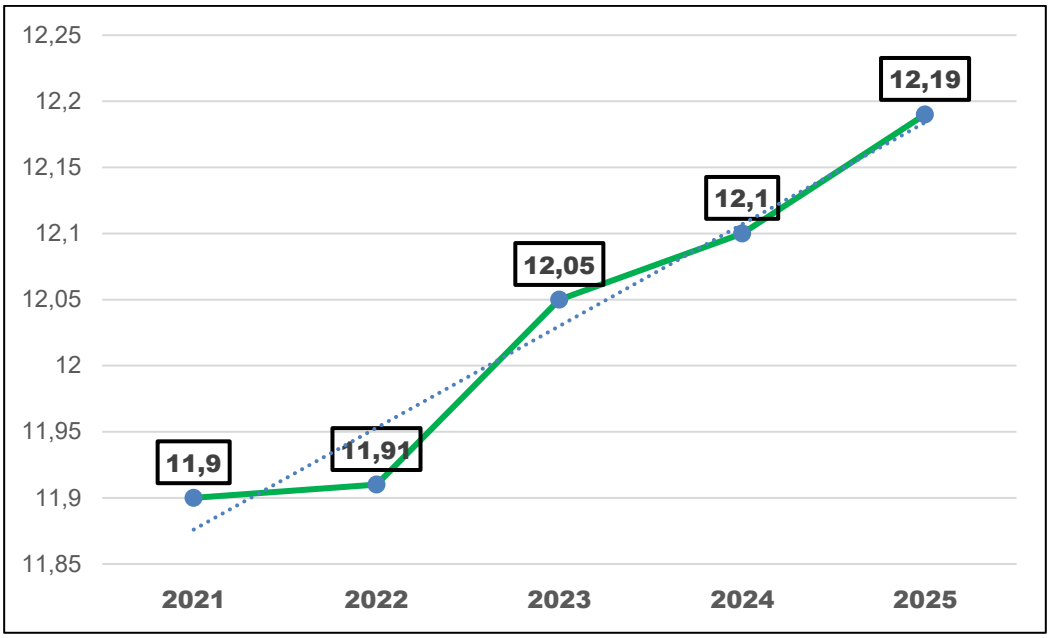

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

3. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki

seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah

Indeks pendidikan merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2025. Pada tahun 2021 indeks pendidikan berada di angka 63,66 dan mengalamai kenaikan di tahun 2022 dengan capaian 63,88, kemudian naik ke 64,31 pada tahun 2023, terus naik lagi ke angka 64,84 pada tahun 2024, dan mencapai titik tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir di angka 65,00 di tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran, meskipun masih dibutuhkan strategi lanjutan untuk mempercepat akselerasi kualitas pendidikan yang merata di seluruh wilayah.

Gambar 2.14
Indeks Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

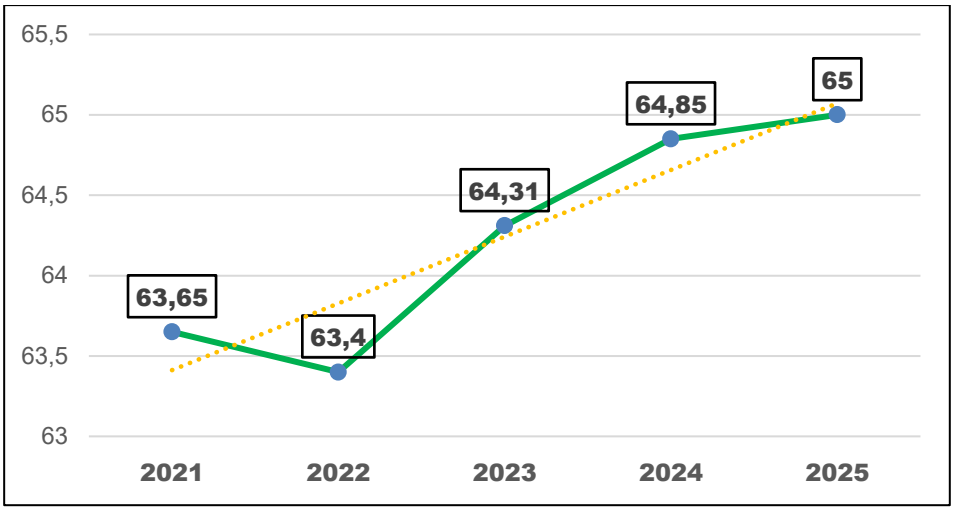

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas (data diolah), 2026

2.1.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial merupakan kunci dalam membangun masyarakat yang tangguh dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Salah satu indikator untuk menilai efektivitas perlindungan sosial, khususnya bantuan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, adalah peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Dalam hal ini, pengeluaran rata-rata per kapita mencerminkan total biaya konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama satu bulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian, maupun produksi sendiri, dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga.

Di Kabupaten Gunung Mas, pengeluaran per kapita disesuaikan menunjukkan tren peningkatan dari Rp10.809 ribu/kapita/tahun pada tahun 2021, menjadi Rp12.215 ribu/kapita/tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan daya beli masyarakat, yang juga dapat mencerminkan perbaikan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.15
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024

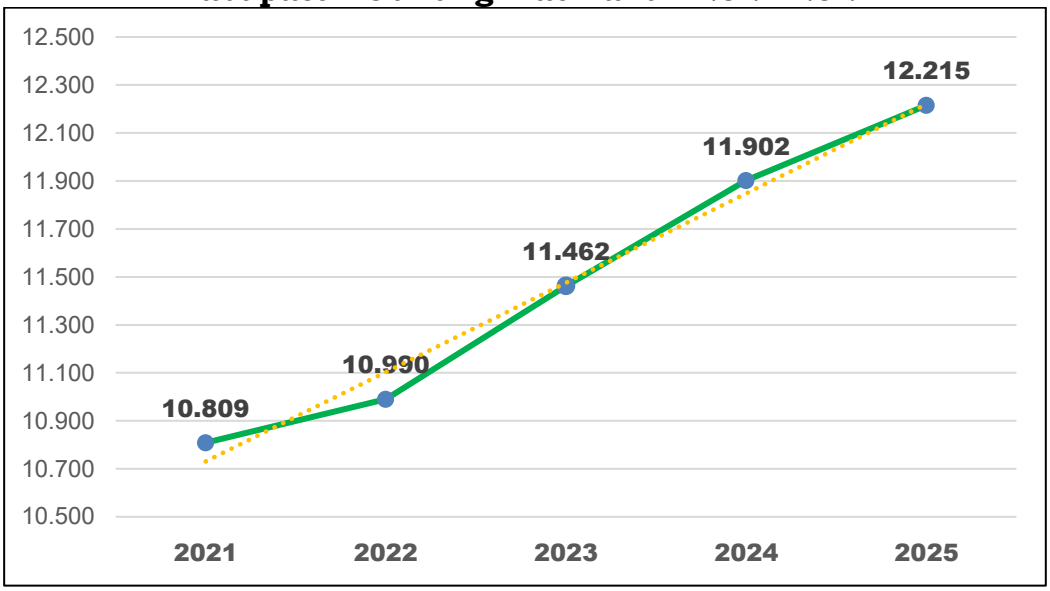

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga dapat mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Penduduk Kabupaten Gunung Mas rata-rata memiliki pendapatan yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan pengeluaran di atas 500.000 rupiah per bulan. Rata – rata pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Gunung Mas pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.584.840. Dimana 53,11 persen adalah pengeluaran untuk makanan dan 46,89 persen lainnya untuk pengeluaran non makanan. Seiring dengan meningkatnya pendapatan, konsumsi baik untuk makanan maupun non-makanan juga mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2021-2025, pengeluaran konsumsi per kapita untuk makanan terus mengalami kenaikan dari Rp741.625 pada tahun 2021 menjadi Rp. 841.708 pada tahun 2025. Sementara itu, pengeluaran untuk non-makanan meningkat dari Rp646.620 pada tahun 2021 menjadi Rp 743.131 pada tahun 2025.

Meningkatnya porsi konsumsi non makanan menunjukkan kecenderungan bahwa masyarakat Kabupaten Gunung Mas mulai mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan lain di luar makanan, seperti perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. Hal ini disebabkan selain dari meningkatnya pendapatan perkapita dari masyarakat Gunung Mas, dipengaruhi juga

oleh Inflasi biaya hidup, Peningkatan Mobilitas, Akses Layanan, Pergeseran Gaya Hidup dan Digitalisasi serta Peningkatan Biaya Pendidikan dan Kesehatan. Pergeseran ini mencerminkan adanya peningkatan kesejahteraan dan perubahan pola konsumsi masyarakat menuju standar hidup yang lebih baik seiring pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar 2.16
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan di Kabupaten Gunung Mas tahun 2021-2025

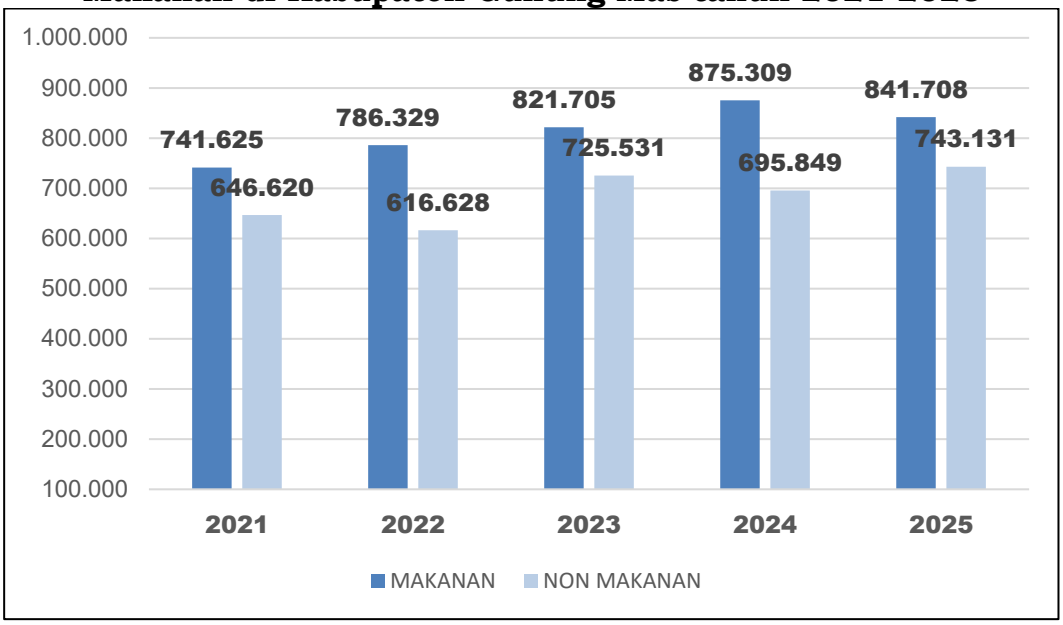

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

Tabel 2.17
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Makanan	741.625	786.329	821.705	875.309	841.708
Bukan Makanan	646.620	616.628	725.531	695.849	743.131
Proporsi (%)					
Makanan	53,42	56,05	53,11	55,71	53,11
Bukan Makanan	46,58	43,95	46,89	44,29	46,89

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

2.1.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Masyarakat yang berkebudayaan maju ditandai dengan upaya pelestarian, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai budaya lokal yang berkelanjutan. Di Kabupaten Gunung Mas, indikator pembangunan kebudayaan selama tahun 2020–2024 menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah budaya daerah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya mengalami penurunan signifikan, dari 20 budaya pada tahun 2020 dan tahun 2021, menjadi hanya 2 pada tahun 2024. Sebaliknya, jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat, dari 28 pada tahun 2021 menjadi 229 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penetapan formal warisan budaya menurun, namun upaya pelestarian kekayaan budaya lokal justru meningkat tajam, menandakan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan ekspresi budaya masyarakat. Adapun Indek Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas berada diangka 58,53 Persen pada tahun 2024.

Tabel 2.18
Indikator Pembangunan Kebudayaan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat budaya daerah yang sudah ditetapkan menjadi warisan budaya	20	20	11	11	2
Jumlah kesenian daerah dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	NA	28	43	45	229

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas, 2025

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender.

Pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender dalam suatu negara atau wilayah. IPG dirancang untuk memberikan gambaran tentang perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa dimensi kunci, seperti kesehatan, pendidikan, dan partisipasi ekonomi.

Berdasarkan data dari BPS Nasional, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Gunung Mas selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan kecenderungan stabil dengan peningkatan bertahap, meskipun terdapat sedikit penurunan di akhir periode pada salah satu indikator. Indeks Pemberdayaan Gender tercatat sebesar 88,20 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan menjadi 89,29 pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun ke angka 88,74 pada tahun 2024. Sementara itu, IPG terus menunjukkan perkembangan positif dari 92,09 di tahun 2020 menjadi 92,40 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pembangunan kesetaraan gender, khususnya dalam hal pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi.

Tren positif juga terlihat dari capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG. IKG yang lebih rendah mengindikasikan ketimpangan gender yang lebih kecil, sehingga penting untuk memastikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak hanya menyasar aspek akses, namun juga mencakup peran dan kualitas keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Capaian IKG Kabupaten Gunung Mas menunjukkan penurunan dari 0,560 pada tahun 2020 menjadi 0,549 pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan menjadi masing-masing 0,572 dan 0,574. Meskipun mengalami kenaikan, namun secara umum IKG masih berada dalam kategori sedang.

Data ini mengindikasikan bahwa pembangunan gender di Kabupaten Gunung Mas telah bergerak ke arah yang semakin setara, namun masih diperlukan penguatan dalam aspek pemberdayaan. Penurunan IDG pada tahun 2024 menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas ekonomi produktif perlu terus dioptimalkan. Sementara IPG yang terus meningkat memberikan sinyal positif bahwa perempuan memiliki akses yang semakin merata terhadap layanan dasar dan peluang pembangunan. Untuk menjaga keberlanjutan capaian ini, dibutuhkan

kebijakan afirmatif dan program yang responsif gender secara konsisten di berbagai sektor, disertai dengan pemantauan ketimpangan agar transformasi menuju keadilan gender dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.19
IDG,IPG, IKD, Capaian KLA, IBangga dan IPA
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	2021	2022	2023	2024	2025
Indek Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	88,22	89,15	89,29	88.74	88,74
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (%)	91,99	92,18	92,38	92,40	92,72
Indeks Ketimpangan Gender (%)	0,553	0,549	0,572	0,574	0,547
Capaian Kabupaten Layak Anak	283,30	214,55		500	586
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	51		59,76	62	62,2
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60	59,78	51,37	51,37	51,37

Sumber: BPS Nasional, Dinas P2KBP3A, 2026

2.1.3. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk mengukur sebuah daerah mampu bersaing atau tidak telah dikeluarkan angka Indeks Daya Saing Daerah oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mana untuk Kabupaten Gunung Mas tahun 2025 di angka 3,30 sedikit rendah dari angka Provinsi Kalimantan Tengah yang diangka 3,59. Selain itu kontribusi PDRB Kabupaten Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan daya saing daerah dalam hal ini untuk

tahun 2025 kontribusi Kabupaten Gunung Mas sebesar 4,45 persen dari total nilai PDRB provinsi Kalimantan Tengah.

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Angka beban ketergantungan (*dependency* ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan yang semakin mengecil dapat menggambarkan adanya kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Pada tahun 2025, angka beban ketergantungan di Kabupaten Gunung Mas tercatat sebesar 47,64, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 47,03. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif masih menanggung beban sekitar 48 penduduk tidak produktif, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Penurunan angka ketergantungan ini mengidentifikasikan adanya pergeseran demografi yang berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi, karena proporsi penduduk usia kerja yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang bergantung pada mereka. Hal ini memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat jika diimbangi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan keterampilan dan kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif.

Tabel 2.20
Rasio Ketergantungan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah penduduk usia <15 tahun	36,6	37,1	37,4	37,97	38,50
Jumlah penduduk usia >64 tahun	5,9	6,46	6,28	6,59	6,90
Jumlah penduduk usia tidak produktif	42,5	43,56	43,68	44,56	45,40
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	95,78	98,76	99,09	100,98	102,83
Rasio ketergantungan	**49,99**	**46,09**	**44,15**	**47,03**	**47,64**

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026 (data diolah)

2.1.3.2. Produktivitas Ekonomi dan Inovasi

Arah pembangunan Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi difokuskan sebagai pendorong utama untuk menjaga sekaligus mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Inovasi diposisikan tidak hanya sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi dalam memperkuat struktur ekonomi daerah secara jangka menengah maupun panjang. Melalui pemanfaatan teknologi tepat guna serta penguatan

ekosistem riset dan pengembangan, Kabupaten Gunung Mas diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi, memperluas nilai tambah, serta mendorong transformasi ekonomi daerah menuju model yang lebih modern dan berdaya saing.

Dalam kerangka akselerasi pembangunan ekonomi daerah, strategi berbasis hilirisasi menjadi langkah penting yang diambil Kabupaten Gunung Mas, khususnya dengan mengembangkan potensi unggulan lokal. Hilirisasi, sebagai proses pengolahan sumber daya menjadi produk bernilai lebih tinggi, diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya hilirisasi, komoditas-komoditas lokal tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki pasar lebih luas dan nilai ekonomi lebih tinggi. Hal ini membuka peluang pertumbuhan industri lokal, memperluas lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan data kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas, sektor industri pengolahan pada tahun 2021 tercatat sebesar 8,24 Persen dan terpantau turun drastis ditahun 2025 yaitu diangka 7,66 persen. Selain itu laju pertumbuhan ekonomi sektor ini menurun yaitu ditahun 2025 menyentuh – 0,70 persen yang menyiratkan bahwa industri dibidang pengolahan ini mengalami kemunduran dan hal ini menjadi perhatian penting untuk Pemerintah Daerah. Selain sektor industri pengolahan, sektor Perdagangan juga memiliki andil dalam Pembangunan Ekonomi daerah. Dimana kontribusi dari sektor Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di tahun 2025 naik sebesar 10,00 persen dari tahun 2024 yaitu sebesar 9,98 persen.

Tabel 2.21
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, LPE Sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Kabupaten Gunung Mas 2021 – 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024*	2025**
LPE Kategori Industri Pengolahan	1,85	4,46	7,97	1,21	-0,70
Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	8,24	8,20	8,53	8,24	7,66
Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,59	9,93	10,21	9,98	10,00
Kontribusi PDRB Akomodasi Makan dan Minum	1,54	1,66	1,70	1,65	1,66
Indeks Harga Konsumen (mengunakan kota Palangka Raya)	107,84	114,86	117,94	106,09	109,60

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

Inovasi daerah merupakan salah satu kunci untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan melibatkan masyarakat, inovasi dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas, capaian tahun 2021 sebesar 9,4 dan tahun 2023 sebesar 24,42 masih tergolong kurang inovatif. Namun, capaian tersebut meningkat signifikan pada tahun 2022 sebesar 49,4 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 50,54 dan Tahun 2025 menjadi 59,83 yang masuk dalam kategori inovatif. Perbedaan capaian ini menunjukkan bahwa tingkat inovasi daerah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kebijakan, komitmen pemerintah daerah, serta efektivitas kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Kenaikan capaian di tahun 2022, 2024 dan tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan perencanaan inovasi dan implementasi program yang lebih terarah.

Gambar 2.17
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

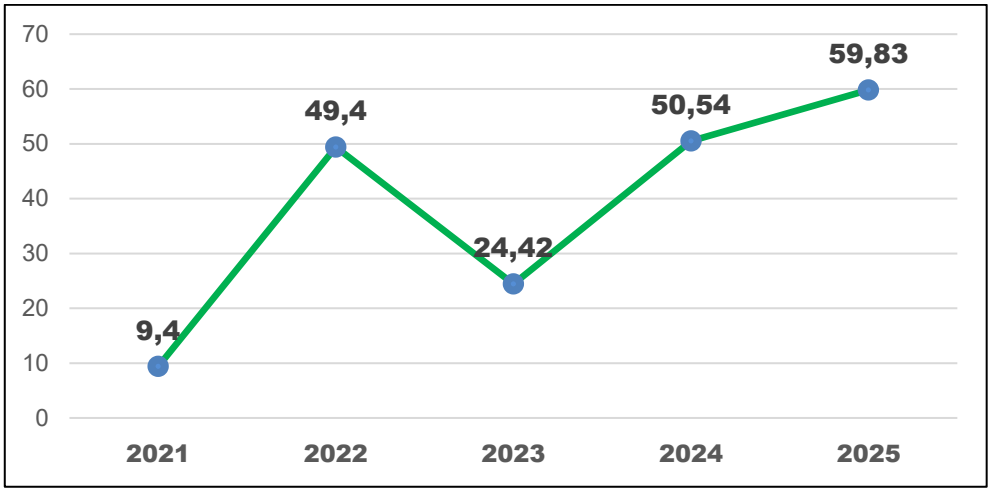

Sumber: BRIN, 2022-2025

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Gunung Mas terus didorong dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Hal ini tercermin dari aktivitas sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sektor ini mengalami pergerakan yang dinamis sepanjang tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, pertumbuhan mencapai 4,97 persen, meningkat di tahun-tahun berikutnya dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 7,21 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi perlambatan dengan hanya mencapai 2,18 persen, dan naik Kembali di tahun 2025 sebesar 4,23 persen.

Meskipun mengalami perlambatan pada sisi pertumbuhan, Distribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Gunung Mas justru mengalami peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, kontribusinya sebesar 30,86 persen dan terus meningkat hingga mencapai 33,59 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi sektor andalan dalam struktur ekonomi daerah. Kenaikan kontribusi ini mengindikasikan adanya

penguatan sektor primer dalam perekonomian lokal, meskipun pertumbuhan tahunan tidak selalu tinggi. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2024 dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca ekstrem atau ketidakstabilan harga komoditas, namun sektor ini tetap memberikan fondasi kuat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Gunung Mas.

Tabel 2.22
Capaian Sektor Ekonomi Hijau dan Biru
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024*	2025**
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,97	5,21	7,23	2,20	4,23
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30,86	29,56	31,69	33,03	33,59

Sumber: BPS, Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka Tahun 2026

2.1.3.4. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

Salah satu indikator untuk melihat pembangunan perkotaan maupun perdesaan adalah indeks kualitas infrastruktur. Indikator ini akan melihat sejauh mana ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Di Kabupaten Gunung Mas, pencapaian indeks kualitas infrastruktur dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, indeks kualitas infrastruktur berada pada angka 46,36, kemudian meningkat secara tajam menjadi 64,38 di tahun 2023. Setelah sebelumnya sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,37. Nilai melonjak tajam di tahun 2024 dan 2025 masing-masing mencapai 65,14 dan 67,80.

Peningkatan tajam yang terjadi sejak tahun 2023 mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mulai menyentuh kebutuhan masyarakat secara merata, baik di kawasan terpadu perkotaan maupun wilayah pedesaan yang sebelumnya terisolasi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas dan meningkatkan akses layanan dasar yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur yang terus membaik ini diharapkan menjadi pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat daya saing wilayah, serta menciptakan ruang hidup yang lebih layak dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Gunung Mas.

Selain peyediaan Infrastruktur Jalan dan jembatan, Pemerintah daerah kabupaten Gunung mas juga gencar demi meningkatkan konektivitas daerah memacu penyediaan listrik, Penyediaan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan yang juga dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestic dan luar negeri yang harapannya dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 2.23
Capaian Indeks Infrastruktur, Indeks Konektivitas Wilayah,Penyediaan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan dan Rasio Elektrifikasi
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 – 2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Infrastruktur	46,36	43,37	64,38	65,14	67,81

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Konektivitas Wilayah	65,00	66,01	78,54	80,12	81,3
Rasio Elektrifikasi	76,97	76,1	88,43	95,55	95,51
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	61,47	57,12	57,97	58,65	52,27
jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	10.524	19.689	25.843	25.011	28.225

Sumber: BAPPERIDA Kabupaten Gunung Mas, 2026 (Data diolah)

Prasarana jalan merupakan infrastruktur transportasi darat yang sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perekonomian dan mobilitas penduduk. Di Kabupaten Gunung Mas, Panjang jalan pada tahun 2025 tercatat sebesar 738,99 km dan relatif stabil dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Berdasarkan tingkat kewenangan pemerintahan, sebagian besar jalan berada di bawah kewenangan kabupaten/kota sepanjang 738,99 km, sedangkan jalan berstatus negara sepanjang 248,22 km dan jalan provinsi sekitar 107,69 km pada tahun 2025. Total panjang jalan secara keseluruhan mencapai 1.094,90km.

Dilihat dari jenis permukaan jalan pada tahun 2025, jalan beraspal mengalami peningkatan menjadi 292,58 km dibandingkan tahun 2023, menunjukkan adanya perbaikan kualitas infrastruktur. Sementara itu, panjang jalan kerikil tercatat 123,46 km dan jalan tanah masih mendominasi dengan 315,64 km. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun peningkatan kualitas jalan terus dilakukan, sebagian wilayah masih bergantung pada jalan dengan permukaan tanah, terutama di daerah pedalaman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun capaian infrastruktur jalan dalam kondisi baik meningkat, masih terdapat tantangan besar terkait perawatan dan peningkatan kualitas jalan yang rusak berat.

Tabel 2.24
Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021-2024

Keadaan Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	231,16	259,928	274,863	282,492	292,580
Kerikil	366,03	135,092	126,293	134,998	123,460
Tanah	2,970	339,477	332,711	317,193	315,640
Tidak Dirinci	-	4,495	4,495	5,295	7,310
Jumlah	**738,99**	**738,99**	**738,992**	**739,978**	**738,990**
Kondisi Jalan					
Baik	184,9	218,759	237,506	232,115	250,140
Sedang	113,06	11,029	9,691	16,442	16,440
Rusak	286,44	2,283	2,483	12,014	12,010
Rusak Berat	154,59	506,921	489,282	478,381	460,400
Jumlah	**738,99**	**738,992**	**738,992**	**738,992**	**738,992**

Sumber: Kabupaten Gunung Mas dalam Angka, 2021-2026

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menilai tingkat kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama: ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan. IDM digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan desa serta identifikasi status desa mulai dari sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju, hingga mandiri.

Berdasarkan data dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (2026), capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren pertumbuhan yang positif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai IDM tercatat sebesar 0,6117 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 0,6113 pada 2021. Namun, tren berbalik naik pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian 0,6229 pada 2022, meningkat signifikan menjadi 0,6568 pada 2023, dan mencapai 0,6691 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, serta menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam mendorong pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ditahun 2025 secara resmi Indeks Desa Membangun (IDM) akan digantikan dengan Indek Desa (ID). Adapun jumlah desa yang berstatus Desa mandiri di Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Indeks Desa Tahun 2025 sampai dengan tahun 2025 ada 6 Desa yakni 4,39 Persen dari total 114 desa di Kabupaten Gunung Mas.

Gambar 2.18
Indeks Desa Membangun (IDM)
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2024

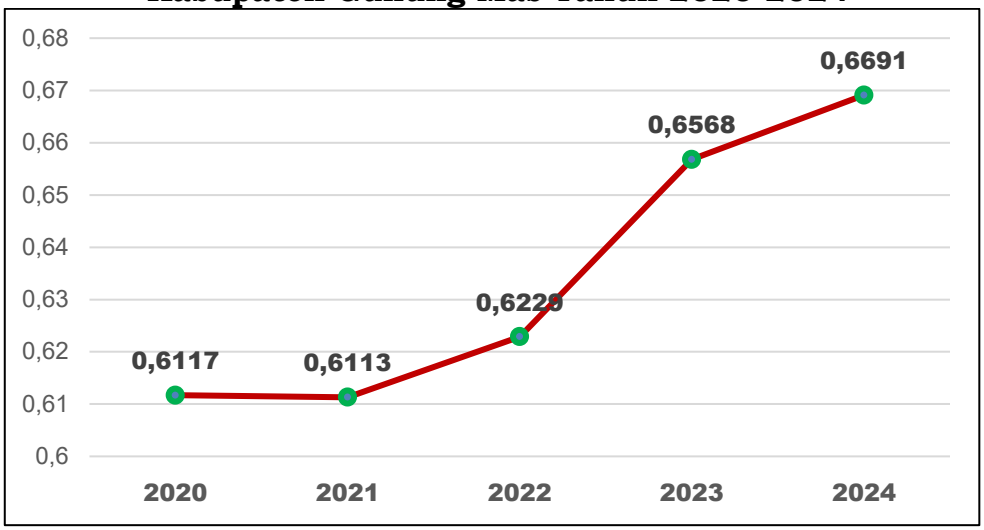

Sumber: *Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 2025*

2.1.3.5. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal serta menjaga kestabilan moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan yang pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Stabilitas ini menjadi fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil yang ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca perdagangan yang dikelola secara efektif, pemerintah memiliki ruang kebijakan yang lebih luas untuk menyusun dan menjalankan program pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Kondisi ini juga menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif di daerah.

Dalam kerangka tersebut, Rasio Pajak terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Gunung Mas selama periode 2021 hingga 2025 menunjukkan kecenderungan yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. Peningkatan rasio pada tahun 2021 terjadi karena penerimaan pajak tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, meskipun PDRB terus meningkat, pertumbuhan pajak berjalan lebih lambat sehingga menyebabkan penurunan rasio. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, disebabkan oleh menurunnya penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap berlangsung. Pada tahun 2024 dan 2025, rasio kembali menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB.

Perubahan rasio tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak agar sejalan dengan perkembangan ekonomi. Rasio yang masih relatif rendah mengindikasikan bahwa kontribusi sektor perpajakan terhadap aktivitas ekonomi daerah belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat tata kelola dan pengawasan fiskal secara berkelanjutan.

Gambar 2.19
Rasio Pajak terhadap PDRB ADHB Kabupaten Gunung Mas

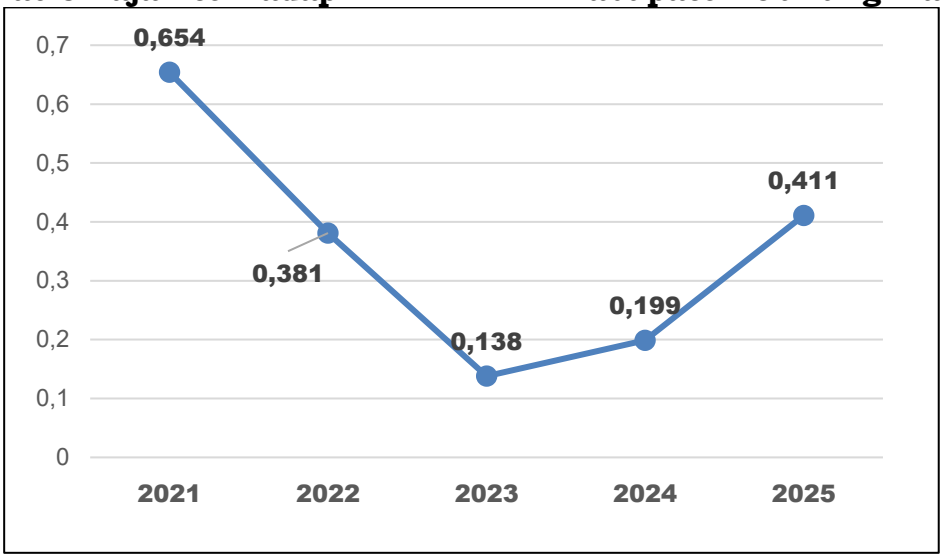

Sumber: BKAD dan BPS Kabupaten Gunung Mas, 2026 (data diolah)

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencerminkan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, serta didasarkan pada pertukaran informasi yang terbuka, transparan, dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui implementasi reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut tercermin dari meningkatnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi, yaitu sebesar 51,66 pada tahun 2022 dan naik menjadi 54,77 pada tahun 2023 dan 58,35 pada tahun 2024 dengan kategori CC. Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga menunjukkan tren positif, dari 81,66 pada tahun 2023 menjadi 83,93 pada tahun 2024. Namun demikian, terdapat penurunan pada nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari 62,14 pada tahun 2023 menjadi 61,68 pada tahun 2024 dan naik 62,15 pada tahun 2025.

Tabel 2.25
Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	50,01	51,66 (CC)	54,77 (CC)	58,35 (CC)	57,3 (CC)
Nilai SAKIP	B	B	B (62,14)	B (61,63)	B (62,15)
Indeks Pelayanan Publik	NA	NA	NA	2,09	3,37
Indeks Integritas Nasional	72,43	71,94	70,97	71,53	74,56
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				76,589	

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang	100	100	100	100	100

Sumber: Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2026 (data diolah)

2.1.4.2. Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gunung Mas menunjukkan tren yang fluktuatif dalam empat tahun terakhir, dari 2,55 pada tahun 2022. 2,63 pada 2023 dan menjadi 3,27 pada tahun 2024 dan menurun ke angka 3,30 ditahun 2025. Peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan daerah, khususnya pada pilar institusi yang menjadi pilar dengan capaian tertinggi selama dua tahun terakhir, yaitu sebesar 4,07 pada tahun 2023 dan naik menjadi 4,34 pada tahun 2024. Sebelumnya, pada tahun 2022, pilar dengan capaian tertinggi adalah dinamisme bisnis dengan nilai 5, yang menunjukkan kekuatan sektor usaha dan iklim bisnis yang kondusif saat itu. Namun demikian, pilar sistem kapabilitas inovasi konsisten menjadi yang terendah sepanjang tahun 2022 hingga tahun2024 dengan nilai berturut-turut sebesar 0,54; 0,67; dan 0,64. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola dan sektor bisnis mengalami kemajuan, kapasitas daerah dalam menghasilkan dan mengelola inovasi masih perlu mendapatkan perhatian serius agar daya saing daerah dapat meningkat secara lebih merata dan berkelanjutan.

Sedangkan ditahun 2025 ada beberapa pilar yang mengalami penurunan dari tahun 2024 yaitu, pilar Infrastruktur sebelumnya 2,29 menjadi 2,24, Pilar Stabilitas ekonomi makro dari sebelumnya 3,67 menjadi 3,62, Pilar Pasar produk sebelumnya 3,28 menjadi 3,15, dan Pilar Dinamisme Bisnis yang sebelumnya 3,71 menjadi 2,96.

Tabel 2.26
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Pilar Penyusunnya Tahun 2022-2025

Nilai Indeks	2022	2023	2024	2025
Pilar Institusi	4,21	4,07	4,34	4,62
Pilar Infrastruktur	2,35	1,41	2,29	2,24
Pilar Adopsi TIK	2,4	3,55	3,94	4,00
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,79	3,51	3,67	3,62
Pilar Kesehatan	3,85	3,89	3,83	3,84
Pilar Keterampilan	3,07	3,37	4,1	4,24
Pilar Pasar Produk	2,37	2,45	3,28	3,15
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,4	2,95	2,9	3,25
Pilar Sistem Keuangan	1,37	0,42	2,78	3,15
Pilar Ukuran Pasar	0,25	3,7	3,72	3,74
Pilar Dinamisme Bisnis	5	1,52	3,71	2,96
Pilar Kapabilitas Inovasi	0,54	0,67	0,64	0,75
Indeks Daya Saing Daerah	**2,55**	**2,63**	**3,27**	**3,30**

Sumber: BRIN, 2022-2026 (data diolah)

2.1.4.3. Kinerja Setiap Urusan

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanakan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Gunung Mas dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27
Indikator Kinerja Kunci Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024– 2025

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	75,59	82,56
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,3	2,3
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,97	98,16
AB	**1.02 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			
1	Angka Kesakitan	Per 1000	401,1	0,6
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	4,9	10,8
AC	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			
1	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	3,32	5,92
2	Rasio rumah layak huni	%	0,19	0,19
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	36,78	37,58
4	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	23,38	40,54
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	7,95	8,84
AD	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Cakupan pelayanan kebakaran	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
3	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	100
4	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100	100
5	Persentase Penanganan	%	100	100

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
	Pasca Bencana			
6	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100
7	Terselesaikannya konflik antar kelompok/umat beragama/suku dan lainnya	Skor	81,68	
8	Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	%	100	100
9	Persentase Penegakan Perda	%	100	100
AE	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			
1	Tingkat penurunan jumlah PPKS	%	90	90
2	Persentase penanganan PPKS	%	81,42	92
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti	%	100	100
AF	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
1	Persentase penempatan tenaga kerja	%	96,68	81,75
2	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	%	0,35	0,54
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,31	1,31
4	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	8	12,9
AG	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	89,43	88,74
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,049	0,00024
3	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100
4	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	0,00024
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,72	44,89
6	Persentase ARG Pada belanja Langsung	%	2,26	1,5

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
7	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	0	5
AH	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100	113,875
AI	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,75	81,75
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,9	67,89
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	72,48	79,71
4	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	%	9,96	15,84
AJ	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	85,39	88,95
2	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	96,41	95,87
3	Persentase penduduk usia di bawah 17 tahun yang wajib memiliki KIA	%	67,56	73,67
4	Pengguna Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Angka	3	11
5	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	at	13,67
AK	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			
1	Terbinanya Masyarakat Desa mendapat Pelatihan Ekonomi Produktif	Orang	50	50
2	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	2,95	14,04
3	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	114	114
AL	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			
1	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,31	2,29
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	73,18	66,2
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun(Age Spesicifik Fertility	Angka	56	41,8

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
	Rate/ASFR 15-19)			
4	Persentase kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi(Unmet need)	%	4,87	9,1
5	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	49,05	55,65
6	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	59	66,9
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,1	81,2
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	10,9	11,81
AM	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			
1	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	60	80
2	Tingkat penurunan jumlah kecelakaan	%	40	45
AN	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96,7	
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	0	0
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,74	2,81
5	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96,7	97,63
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	87,5	90,24
7	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	26,3	23,81
AO	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			
1	Persentase UMKM yang naik skala usaha	%	36	22,8
2	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	0	36,78

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
AP	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			
1	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Rupiah	530.880.000.000	894.918.097.780
2	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (TKI) dan (TKA) melalui Investasi Daerah	Orang	194	3378
3	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Kegiatan	379	489
AQ	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,16	
AR	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	80	55
AS	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			
1	Persentase pelestarian warisan budaya	%	17	14
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	4,6	10,8
AT	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,177	63,905
2	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Orang	6.704	6.925
AU	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			
1	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan	Angka	63,62	67,17
2	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	84,71	94,91
3	Jumlah dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	Angka	8.993	8.993
AV	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			
1	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap	Ton	170	170
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.312	1.277
AW	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			
1	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1,12	1,13
AX	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			
1	PDRB Sektor Pertanian	%	30,38	33,59
2	LPE Sektor Pertanian	%	2,2	4,23

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
AY	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			
1	Indeks Perkembangan Harga	%	0,79	0,79
2	Pertumbuhan nilai neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa)	%	1	1
3	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	%	25	25,5
AZ	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			
1	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Unit Usaha	402	442
2	Jumlah Kewirausahaan IKM Daerah	Wirausaha	402	442
BA	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			
1	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	75	75
2	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kepala Keluarga	300	300
BB	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**			
1	Capaian penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah	Nilai	90,84	83,61
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat	%	96,94	93,33
3	Persentase Reformasi Hukum	Indeks	87,36	76,66
4	Meningkatnya nilai belanja pengadaan barang dan jasa	%	91,03	45,89
5	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	87	82,99
BC	**5.01 - PERENCANAAN**			
1	Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100
3	Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	%	100	100
BD	**5.02 - KEUANGAN**			
1	Rasio PAD	%	3,84	5,81
2	Meningkatnya tata kelola aset daerah	%	0	
3	Opini BPK	Opini	WTP	
4	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	97,125	97,752
BE	**5.03 - KEPEGAWAIAN**			
1	Indeks Merit Sistem	Angka	180	250

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40	65
BF	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70,71	77,23
2	Indeks Profesionalitas PPPK	Indeks	74,8	76,85
3	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	%	8,23	55,28
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Permintaan PD)	%	28	79,53
BG	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			
1	Meningkatnya Inovasi Daerah	Angka	50,54	59,83
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,54	59,83
3	Persentanse Hasil Riset Yang Diimplementasikan Dalam Kebijakan Daerah (Perda/Perkada/Inovasi/Program/Kegiatan)	%	0	0
BH	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**			
1	Meningkatnya kapabilitas APIP (Indeks Kapibilitas APIP)	Skor	3	3
BI	**7.01 - KECAMATAN**			
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,15	80,1
2	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	%	85	86,05
3	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	%	85,73	84,25
4	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	85	85
5	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi	%	100	95,04
6	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	95
BJ	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			
1	Indeks Kerukunan Umat	(%)	58,53	84,61

NO	URAIAN INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN	
			2024	2025
	Beragama (IKUB)			
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		90	91
3	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,13	7,4
4	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	71,64	68
5	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	76,83	0
6	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	90	91
7	Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat	%	90	90

Sumber: Dikutip dari berbagai sumber di lingkup pemerintahan Kabupaten Gunung Mas, 2026

2.1.4.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan menjadi hak setiap warga negara untuk diperoleh secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian, tetapi mengutamakan pendekatan yang berfokus pada: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif pada standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Untuk Tahun 2025 capaian rata – rata persentase Indeks Pencapaian SPM untuk semua bidang berdasarkan aplikasi e-SPM Bina Bangda Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu sebesar 83,61 % dengan rincian per bidang sebagai berikut :

Gambar 2.20
Capaian SPM perBidang Urusan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

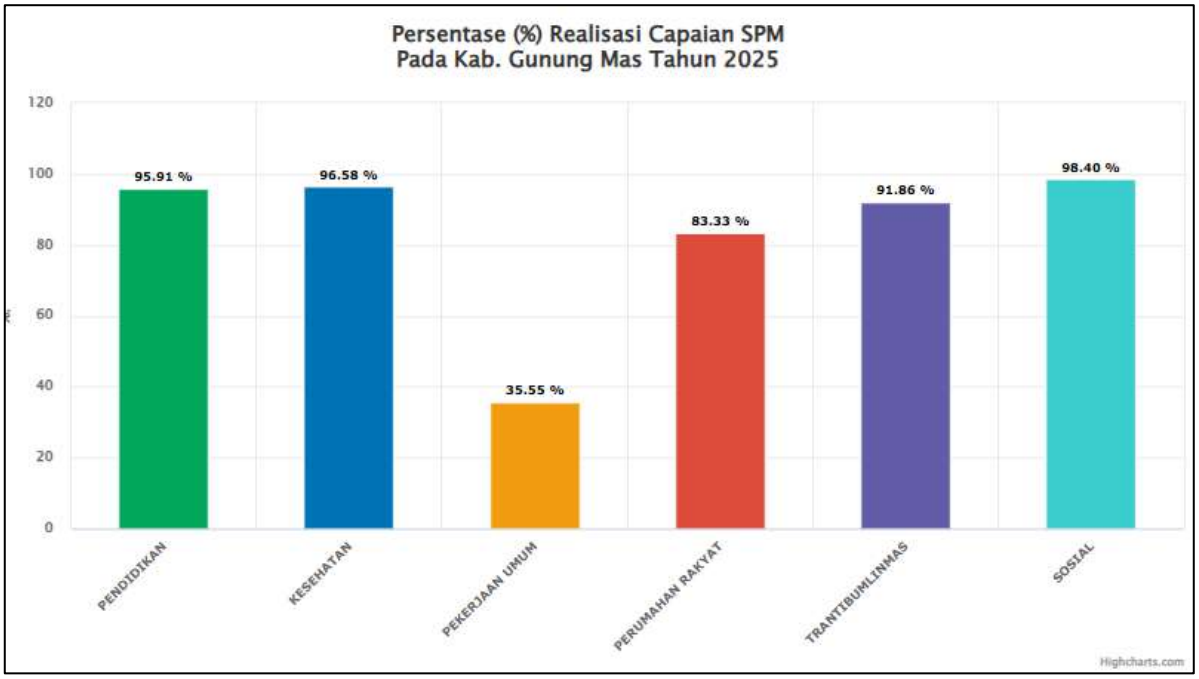

Sumber : e- SPM Bina Bangda Kemendagri, 2026

Selain itu anggaran untuk pemenuhan SPM di Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp. 56.521.095.134,00 dengan realisasi sebesar 93,82 persen.

Tabel 2.28
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pemenuhan SPM
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN SPM	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	Pendidikan	APBD	34.823.222.355	32.604.595.008	93,63
2	Dinas Kesehatan	Kesehatan	APBD	4.374.430.092	4.094.973.971	93,61
3	Dinas Pekerjaaan Umum	Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman	APBD	11.372.741.380	10.974.722.214	96,50
4	Satuan Polisi Pamong Praja	Trantibumlinmas	APBD	3.880.072.068	3.410.119.540	87,89
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Trantibumlinmas	APBD	1.542.628.259	1.432.767.160	92,88
6	Dinas Sosial	Sosial	APBD	528.000.980	512.296.621	97,03
TOTAL				**56.521.095.134**	**53.029.474.514**	**93,82**

Sumber : Bapperida Kabupaten Gunung Mas, 2026 (data diolah)

Ada Enam Bidang urusan SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan diampu oleh enam Perangkat daerah yaitu sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

1.1. Jenis pelayanan dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan Dasar;
b. Pendidikan Kesetaraan;
c. Pendidikan Anak Usia Dini.

1.2. Target dan realisasi Pencapaian SPM

Tabel 2.29
Capaian SPM Urusan Pendidikan
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	TARGET 2025 (%)	REALISASI 2025 (%)
URUSAN PENDIDIKAN		**100**	**95,91**
1	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	82,56	82,56
2	Angka Partisipasi Sekolah (7-15)	99,32	98,97
3	Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Kesetaraan	2,81	2,81
4	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	41,47	33.96
5	Proporsi Guru PAUD dengan Kualikasi S1/D4	48,45	48,21
6	Kemampuan Literasi SD	51.99	49.49
7	Kemampuan Numerasi SD	47.34	44.44
8	Iklim Keamanan SD	69.74	68.84
9	Iklim Kebhinekaan SD	68.47	67.47
10	Iklim Inkluvitas SD	56.31	53.81
11	Kemampuan Literasi SMP	64.73	63.63
12	Kemampuan Numerasi SMP	59.05	57.55
13	Iklim Keamanan SMP	72.43	70.93
14	Iklim Kebhinekaan SMP	72.37	71.37
15	Iklim Inkluvitas SMP	59.82	57.42

Sumber : e- SPM Bina Bangda Kemendagri, 2026

1.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas adalah, sebagai berikut:

Tabel 2.30
Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
APBD	34.823.222.355,04	32.604.595.008,00	93,63

Sumber : Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, 2026

1.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan untuk urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, dengan Formasi Eselon, sebagai berikut:

Eselon lI.b = 1 orang
Eselon III.a = 1 orang
Eselon III.b = 4 orang
Eselon IV.a = 15 orang
Total = 21 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pada tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:

Pasca Sarjana = 8 orang
Sarjana (Sl) = 27 orang
Diploma 3 (D3) = 2 orang
SLTA = 12 orang
Total = 49 orang

Jumlah Tenaga Pendidik pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut:

Guru PAUD/TK (PNS dan Honor)	=	640 orang
Guru SD/MI (PNS dan Honor)	=	1697 orang
Guru SMP/MTs (PNS dan Honor)	=	652 orang
Total	=	2989 orang

1.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Belum terapainya target APK dan APM Jenjang PAUD dan Dikdas;
2) Masih rendahnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi);
3) Distribusi Pendidik yang belum merata;
4) Sarana prasarana minimal pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs belum 100 persen tercukupi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
5) Masih ada anak putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs.

b. Solusi

1) Optimalisasi Pemanfaatan Pendanaan Pendidikan;
2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan;
3) Penguatan Lembaga (Satuan Pendidikan) PAUD;
4) Mendorong pemerintah desa/kelurahan berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas PAUD;
5) Meningkatkan aksesibilitas penduduk mendapatkan pelayanan Pendidikan (sekolah), jenjang PAUD, SD, dan SMP;
6) Pengembangan profesionalisme guru dengan lebih aktif mengikuti KKG (Kelompok Kerja Guru) dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran);

7) Mengikutsertakan dalam pelatihan yang mendukung kualitas pembelajaran;
8) Melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi;
9) Asistensi guru yang telah bersertikat pendidik terhadap guru yang belum bersertifikat pendidik;
10) Update data Pendidik disetiap Satuan Pendidikan;
11) Pendistribusikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara berkala, dengan tujuan pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di setiap Satuan Pendidikan;
12) Pengangkatan tenaga Pendidik melalui PPPK untuk mengisi kekurangan guru;
13) Diterbitkannya regulasi (Peraturan Bupati) tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
14) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang sudah ada di setiap Satuan Pendidikan;
15) Optimalisasi pendanaan dari berbagai sumber dana seperti DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DID (Dana Insentif Daerah);
16) Menguatkan manajemen sekolah yakni Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dengan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pengelolan Pendidikan (sekolah);
17) Pembebasan Biaya Sekolah;
18) Bantuan perlengkapan siswa;
19) Edukasi orang tua/wali siswa, tentang pentingnya Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
d. Pelayanan Kesehatan Balita;
e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar;
f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis;
l. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodefici ency Virus).

2.2. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 2.31

Capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	TARGET 2025		REALISASI 2025		%
URUSAN KESEHATAN		**100**		**96,58**		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2353	Orang	2353	Orang	100
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2246	Orang	2050	Orang	91,22
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2139	Orang	2139	Orang	100
4	Pelayanan kesehatan balita	8593	Orang	8593	Orang	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	24310	Orang	20336	Orang	83,65
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	61022	Orang	61022	Orang	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	11061	Orang	11061	Orang	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	6875	Orang	6875	Orang	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	92	Orang	92	Orang	100
10	Pelayanan Kesehatan orang Dengan	222	Orang	222	Orang	100

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	TARGET 2025		REALISASI 2025		%
	Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	1945	Orang	1945	Orang	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	2360	Orang	2360	Orang	100

Sumber : e- SPM Bina Bangda Kemendagri, 2026

2.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 2.32

Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
APBD	4.374.430.091,94	4.094.973.971,00	93,61

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas, 2026

2.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas memiliki formasi Eselon sebagai berikut :

Eselon II.b = 1 orang
Eselon III.a = 1 orang
Eselon III.b = 3 orang
Eselon IV.a = 12 orang
Eselon IV.b = 0 orang
Jumlah = 17 orang

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pada tingkat pendidikannya adalah, sebagai berikut:

Dokter = 35 orang
Dokter Spesialis = 11 orang

Dokter Gigi	= 1	orang
Apoteker	= 11	orang
Perawat	= 455	orang
Bidan	= 259	orang
Perawat Gigi	= 9	orang
Kesmas	= 13	orang
Kesling	= 9	orang
Pranata Labkes	= 25	orang
Nustrisionis	= 19	orang
Ass. Apoteker	= 30	orang
Non Kes	= 169	orang
Jumlah	= 1.1011	orang

2.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

1. Keterbatasan anggaran APBD terutama bersumber DAU mengakibatkan anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana kesehatan sebagian besar didanai dari Dana DAK yang penggunaannya telah ditentukan dan dibatasi oleh Juknis serta hanya pada Tingkat Puskesmas (tidak pada Leve Desa/Pustu/Poskesdes) sehingga penerapan SPM di ujung tombak pelayanan kurang optimal;
2. Penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas belum merata untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik ke masyarakat sehingga pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan masih belum bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh nasional;
3. Penetapan target, sistem pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan serta Koordinasi baik itu pada level petugas Kesehatan di lapangan, Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng bahkan pada level Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan RI yang belum terpadu dan konsisten;

4. Pemahaman Petugas Kesehatan Definisi Operasional dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang belum sempurna saat melakukan pelayanan kepada masyarakat;
5. Perilaku hidup masyarakat, budaya serta yang ada seringkali menjadi kendala petugas kesehatan di lapangan sehingga pencapaian target suatu kegiatan menjadi kurang maksimal. Misalnya : pada pelayanan kesehatan usia produktif atau hipertensi banyak masyarakat yang tidak memeriksakan kesehatan (upaya promotif) saat sehat tetapi akan berkunjung saat sakit;

b. Solusi :

1. Melakukan efektifitas anggaran serta berorientasi pada pencapaian SPM dengan melakukan Perencanaan yang tepat, sesuai kebutuhan dan terarah;
2. Penambahan Tenaga Kesehatan di daerah melalui program nusantara sehat, pengangkatan tenaga kontrak daerah serta menggiatkan kegiatan luar gedung yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian SPM;
3. Penetapan Target sasaran serta petunjuk pelaksanaan SPM di bidang kesehatan dibuat pada awal tahun serta dengan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPM diPuskesmas;
4. Sosialisasi tentang Definisi Operasional SPM pada Pemegang program yang ada di Dinas Kesehatan maupun Puskesmas;
5. Koordinasi dengan Lintas Sektor, pihak pemerintah desa untuk memberikan pelayanan dasar terutama yang berkaitan dengan SPM serta memodifikasi pelayanan sesuai dengan kearifan lokal daerah.

3. Urusan Pekerjaan Umum

3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

3.2. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 2.33

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET	REALISASI	%
URUSAN PEKERJAAN UMUM			**100 %**	**36,53%**	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	142.835 jiwa	63.652 Jiwa	43,08
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	142.835 jiwa	33.652 Jiwa	29,97

Sumber : e- SPM Bina Bangda Kemendagri, 2026

3.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 2.34

Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
APBD	11.159.044.400	10.773.006.214	96,54

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, 2026

3.4. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan P3K Paruh waktu sebanyak 116 orang.

3.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Terbatas;
2. Kapasitas pengolahan air (IPA) yang masih kecil kapasitasnya;
3. Kurangnya pemanfataan dan pemeliharaan saranan penunjang air bersih yang telah dibangun.

b. Solusi

1. Instalasi Pengolahan Air (IPA) Terbatas;
2. Kapasitas pengolahan air (IPA) yang masih kecil kapasitasnya;
3. Kurangnya pemanfataan dan pemeliharaan saranan penunjang air bersih yang telah dibangun.

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten;
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten.

4.2. Target dan Realisasai Capaian SPM

Tabel 2.35

Target dan Realisasi Capaian SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET (%)	REALISASI (%)
URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN			**100**	**83,33**
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	83,33
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	83,33

Sumber : e- SPM Bina Bangda Kemendagri, 2026

4.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 2.36

Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
APBD	213.696.980,00	201.716.000,00	94,39

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas, 2026

4.4. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) dan P3K Paruh waktu sebanyak 116 orang.

4.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Jenis Pelayanan dasar Penyedian & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten di tahun 2025 pembiayaan hanya untuk belanja penunjang;

2. Hingga saat ini di Kabupaten Gunung Mas tidak terdapat masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten.

b. Solusi

1. Untuk pembiayaan jenis pelayanan dasar Penyedian dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten untuk capaian SPM rumah yang layak huni di anggarkan di tahun 2026;
2. Bila terdapat masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten akan segera dianggarkan.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
b. Pelayanan informasi rawan bencana;
c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Adapun untuk pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh dua perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

5.2. Target dan Realisasi Capaian SPM

Tabel 2.37
Target dan Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET	REALISASI	%
URUSAN TRANTIBUMLINMAS			**100**	**91,86**	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	40 Orang	40 Orang	86,97
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	62.683 orang	62.683 orang	90,83
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	62.683 orang	62.683 orang	92,17
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	13.607 orang	13.607 Orang	96,97
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	1 Orang	1 Orang	93,75

Sumber : e- SPM Bina Bangda Kemendagri, 2026

5.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 2.38
Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

PERANGKAT DAERAH	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	APBD	3.880.072.068	3.410.119.540	87,89
BPBD	APBD	1.542.628.259	1.432.767.160	92,88
TOTAL		**5.422.700.327**	**4.842.886.700**	**89,31**

Sumber : SATPOL PP dan BPBD Kabupaten Gunung Mas, 2026

5.4. Dukungan Personil

Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas sebanyak 35 personil, dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 16 personil. Personil tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah dilatih sesuai tugas, pokok dan fungsinya.

5.5. Permasalahan dan Solusi

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas

  a. Permasalahan

  1. Kurangnya kualitas dan kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Gunung Mas;
  2. Sarana dan Prasarana ketentraman dan ketertiban dan Pemadam Kebakaran belum memadai.

  b. Solusi

  1. Meningkatkan kualitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengikuti pendidikan/pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Untuk sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran akan diusulkan.

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas

  a. Permasalahan

  1. Belum tersedianya dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Perencanaan Kontinjensi (PK);

2. Kurangnya sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
3. Kurangnya koordinasi yang humanis dan sinergi pada saat perencanaan kegiatan;
4. Belum pernah dilaksanakan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Gunung Mas.

b. Solusi

1. Agar di tahun mendatang dalam menyusun dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Perencanaan Kontinjensi (PK);
2. Agar mengusulkan sarana dan prasarana serta terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) selaku Tenaga Teknis bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
3. Diharapkan agar dilaksanakan rapat koordinasi Pra penyusunan program sebelum pelaksanaan input kegiatan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
4. Perlu diusulkan kegiatan pelatihan kebencanaan bagi tenaga TRC Kabupaten Gunung Mas.

6. Urusan Sosial

6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.

6.2. Target dan Realisasi Capaian SPM

Tabel 2.39

Target dan Realisasi Capaian SPM Urusan Sosial

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET	REALISASI	%
URUSAN SOSIAL			**100**	**98,40**	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	637 Orang	637 Orang	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	637 Orang	637 Orang	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial Diluar panti	637 Orang	637 Orang	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	637 Orang	637 Orang	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	584 Orang	584 Orang	100

Sumber : e- SPM Bina Bangda Kemendagri, 2026

6.3. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 2.40

Alokasi dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp.)	%
APBD	528.000.980	512.296.621	97,03

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, 2026

6.4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

PNS = 23 orang

Non-PNS = 22 orang

Selain pegawai yang pendukung administrasi, dalam pogram kegiatan dibantu oleh petugas lapangan sebagai pendamping program, baik itu program kabupaten maupun program nasional, dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.41

Dukungan Personil Diluar ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan (KSK)	12 Orang	Bertugas di Wilayah Kecamatan
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	145 Orang	Bertugas di Wilayah Kecamatan
3	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	10 Orang	Bertugas di Wilayah Kecamatan
4	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	10 Orang	Bertugas di Wilayah Kecamatan
Total		**177 Orang**	

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas, 2026

6.5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum Tuntasnya penanganan Penyandang Disabilitas Mental;
2. Belum adanya SDM Pekerja Sosial dalam penanganan Penerapan SPM;
3. Kurangnya Alokasi Anggaran untuk menerapkan standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal yan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 59 Tahun 2021.

b. Solusi

1. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Mas mengenai permasalahan penyandang Disabilitas Mental pasca rujukan;
2. Mengusulkan Penerimaan CPNS/P3K untuk formasi Pekerja Sosial apabila memungkinkan.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2025

Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah capaian Kinerja pada predikat tinggi yaitu 85,83% dengan capaian Realisasi Keuangan diangka 87,81% atau predikat Tinggi. Hal tersebut dapat Kita Lihat pada tabel dibawah ini.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap arah kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauh mana efisiensi dan efektivitas kebijakan pembangunan di masa lalu dalam memecahkan berbagai permasalahan. Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan pada tahun pelaksanaan pembangunan 2021-2025 maupun sebelumnya, maka permasalahan utama Kabupaten Gunung Mas adalah **"Belum meratanya kesejahteraan pada seluruh wilayah Kabupaten Gunung Mas".** Beberapa permasalahan makro yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam pengelolaan pembangunan daerah tersebut adalah :

1. Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah;
2. Masih rendahnya kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat;
3. Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah;
4. Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata pemerintahan yang baik; dan
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

1) Urusan Pendidikan
   a. Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah, sekitar 9,4 Tahun
   b) Terbatasnya ketersediaan SMA/SMK/MA Negeri
   c) Tidak meratanya pendistribusian Guru
   d) Rendahnya mutu dan tata kelola pendidikan dasar
   e) Keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah dan tinggi

2) Urusan Kesehatan
   a. Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standard akreditasi nasional
   b) Keterbatasan fasilitas kesehatan yang melayani rawat inap dikarenakan jumlah tempat tidur yang kurang mencukupi kebutuhan pelayanan masyarakat
   c) Keterbatasan tenaga kesehatan terutama Dokter Spesialis di RSUD dan tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
   d) Belum optimalnya pengelolaan limbah medis dan non medis di puskesmas dan jaringannya
   e) Belum optimalnya promosi kesehatan terutama masih rendahnya cakupan desa siaga aktif
   f) Belum tersedianya RSUD yang representatif setingkat tipe B

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a) Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum oleh PDAM
   b) Belum termanfaatkannya sumber-sumber air baku baru
   c) Rendahnya persentase jumlah rumah yang menggunakan air bersih yang layak
   d) Lemahnya perlindungan sumber mata air
   e) Rendahnya kepedulian masyarakat dan swasta/dunia usaha terhadap bidang kesanitasian

f) Cakupan pelayanan persampahan sampai saat ini baru melayani daerah-daerah yang termasuk wilayah perkotaan
g) Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
h) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan
i) Belum adanya TPS ataupun TPS3R di tiap kecamatan
j) Terbatasnya cakupan pelayanan jaringan jalan dan belum bisa mengimbangi pergerakan barang dan orang
k) Rendahnya kualitas jalan perdesaan
l) Masih banyak jembatan yang rusak dan belum terbangun
m) Belum memadainya infrastruktur sumber daya air dan irigasi dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat

4) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
   a) Pelanggaran peraturan daerah
   b) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
   c) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
   d) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS

5) Sosial
   a) Data PMKS dan penduduk miskin belum akurat dan aktual
   b) Belum ada kebijakan pagu indikatif anggaran kemiskinan dan pronangkis sesuai karakteristik kemiskinan daerah
   c) Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah

6) Tenaga Kerja
   a) Terbatasnya kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pelatihan serta terbatasnya paket kegiatan bimbingan usaha
   b) Rendahnya pembukaan lapangan kerja baru

7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih rendahnya pemberdayaan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
b. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam pembangunan
c. Makin meningkatnya jumlah dan jenis kasus KDRT, serta belum optimalnya peran lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak
d. Belum terintegrasinya pengarusutamaan gender dalam pembangunan

8) Pertanahan
   a. Makin sulit dan mahalnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum
   b. Banyak tanah/lahan kosong terlantar tak termanfaatkan
   c. Masih ada potensi sengketa dan konflik pertanahan

9) Lingkungan Hidup
   a) Degradasi sumber daya alam khususnya air dan lahan, yang ditandai dengan deplesi sumber air (air permukaan dan air bawah tanah, baik kuantitas maupun kualitasnya), semakin meluasnya lahan kritis, penurunan produktifitas lahan, semakin meluasnya kerusakan lahan (terutama karena penambangan liar)
   b) Permasalahan Pencemaran yang meliputi pencemaran air, udara maupun tanah
   c) Lemahnya fungsi pengendalian
   d) Masih rendanya tingkat kesadaran para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup

10) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
   a) Keterbatasan akses layanan dan tertib administrasi pengelolaan kependudukan dokumen kependudukan dan catatan sipil
   b) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan dan catatan sipil

11) Pemberdayaan Masyarakat Desa
    a) Masih rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan desa
    b) Terbatasnya tingkat kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
    c) Belum optimalnya peran lembaga desa dan lembaga masyarakat desa
    d) Masih terbatasnya prasarana dan sarana pendukung penyelenggaraan pemerintah desa
    e) Masih terbatasnya infrastruktur dasar perdesaaan
    f) Menurunnya nilai-nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa
    g) Belum ditetapkannya target PADes

12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    a) Keterbatasan tenaga penyuluh program KB
    b) Rendahnya usia perkawinan pertama
    c) Lemahnya institusi KB
    d) Terbatasnya pembinaan ketahanan keluarga
    e) Lemahnya data kependudukan

13) Perhubungan
    a) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu-lintas dan angkutan jalan
    b) Belum optimalnya rekayasa lalu lintas terutama di ibu kota Kabupaten

14) Komunikasi dan Informatika
    a) Terbatasnya cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi kabel
    b) Terbatasnya akses dan kemampuan masyarakat menikmati layanan telekomunikasi nirkabel

c) Belum terintegrasinya layanan pemerintah berbasis teknologi informasi
d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan *E Goverment*

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
a) Masih rendahnya kualitas/pengelolaan manajemen Koperasi
b) Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian
c) Masih rendahnya Qualifikasi/kualitas SDM koperasi
d) Terabatasnya akses terhadap potensi pasar dan sumber produktif lainya
e) Masih terbatasnya kemampuan akses permodalan
f) Masih kurangnya pemahaman tentang manajemen usaha
g) Masih rendahnya tingkat keterampilan pelaku UKM
h) Masih kurangnya inovasi dan penerapan TTG yang berdampak pada kemampuan daya saing produk

16) Penanaman Modal
a) Rendahnya investasi karena iklim investasi kurang mendukung
b) Belum semua kewenangan perizinan diselenggarakan secara terpadu
c) Kurangnya daya dukung regulasi dan kebijakan investasi
d) Lemahnya data dan informasi penanaman modal
e) Rendahnya promosi investasi penanaman modal

17) Kepemudaan dan Olah Raga
a) Pembinaan olahraga yang belum terpadu antara olahraga pendidikan di lingkungan persekolahan, olahraga rekreasi di lingkungan masyarakat, dan olahraga prestasi untuk kelompok atlit

b) Keterbatasan peran pemerintah daerah dalam proses penjaringan, panyaluran dan kompetisi atlet potensial secara berjenjang
c) Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga
d) Rendahnya prestasi olah raga daerah pada kompetisi regional dan nasional

18) Statistik
a) Belum tingginya kesadaran pentingnya data statistik
b) Rendahnya ketersediaan statistik sektoral yang dimiliki pemerintah daerah

19) Kebudayaan
a) Rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global
b) Belum optimalnya proses regenerasi dalam rangka pewarisan budaya daerah
c) Belum termanfaatkannya produk budaya sebagai potensi industri kreatif
d) Masih rendahnya sumber Daya Manusia yang kompeten dalam Bidang Kebudayaan

20) Perpusatakaan
a) Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat
b) Keterbatasan sarana dan prasarana perpustakaan
c) Terbatasnya tenaga pengelola perpustakaan (Pustakawan)

21) Kearsipan
a) Keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan
b) Terbatasnya tenaga pengelola kearsipan (Arsiparis)

22) Kehutanan

a) Rusaknya sumber mata air karena penebangan pohon di sekitarnya
b) Nilai tambah komoditas kehutanan yang rendah karena dijual dalam bentuk barang mentah

23) Kelautan dan Perikanan
a) Masih rendahnya produktivitas perikanan budidaya air tawar, dan payau
b) Rendahnya kualitas induk ikan yang digunakan masyarakat pembenih ikan
c) Masih kurangnya sarana dan prasarana pembenihan ikan

24) Pariwisata
a) Aksesibilitas, Fasilitas, Sarana dan Prasarana serta atraksi wisata yang belum optimal
b) Masih rendahnya minat pihak ke tiga untuk mengelola potensi pariwisata
c) Belum optimalnya startegi pemasaran pariwisata
d) Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata

25) Pertanian
a) Sektor pertanian bukan lagi pilihan utama sebagai sumber mata pencaharian
b) Penurunan kesuburan tanah akibat praktek pertanian intensif bertahun-tahun
c) Menurunnya kualitas infrastruktur pertanian terutama jaringan irigasi tersier
d) Input produksi pertanian relatif terbatas pada umumnya disebabkan masih lemahnya kemampuan finansial untuk pengembangan usaha
e) Penerapan teknologi tepat guna masih terbatas
f) Masih terbatasnya sarana dan prasarana panen dan pasca panen

g) Rendahnya kualitas dan nilai tambah produk yang dihasilkan
h) Kelembagaan kelompok tani belum mandiri
i) Kurangnya sumber daya penyuluh pertanian
j) Belum diterapkannya pembangunan pertanian yang menerapkan sistem pertanian terpadu (*Integrated farming System*)/belum terintegrasinya tanaman dan ternak dalam penyediaan bahan pupuk organik
k) Masih kurangnya/lemahnya penelitian-penelitian yang berorientasi pada produk-produk unggulan pertanian/inovasi produk pertanian
l) Distribusi subsidi pupuk masih kurang lancar
m) Belum tersertifikasinya produk buah-buahan lokal
n) Sistem agribisnis dari sub sistem pemasaran masih lemah dan infrastruktur penunjang belum ada (terminal agribisnis)
o) Kawasan hortikultura baik sayuran maupun buah-buahan belum terkelola dengan baik
p) Masih lemahnya aspek permodalan (aspek sub sistem penyediaan jasa agribisnis masih lemah)
q) Belum konsistennya dan terbatasnya pelaksanaan sistem pertanian organik

26) Perdagangan
a) Belum terbentuknya lembaga kemetrologian
b) Masih kurangnya kualitas produk unggulan yang berdaya saing
c) Belum adanya pasar induk kabupaten
d) Belum ada penataan dan pemberdayaan PKL

27) Perindustrian
a) Masih Rendahnya struktur industri dan pemberdayaan IKM untuk dapat mendorong sektor ekonomi daerah
b) Kurangnya sarana dan prasarana bagi sentra-sentra industri

c) Belum memadainya peralatan produksi dan keterbatasan bahan baku
d) Akses teknologi terbatas

28) Administrasi Pemerintahan
a) Kelembagaan OPD masih belum sepenuhnya berdasarkan prinsip organisasi yang efektif dan efisien, sehingga struktur organisasi belum tepat fungsi dan tepat ukuran
b) Reformasi birokrasi belum optimal
c) Belum optimalnya tata laksana/sistem kerja
d) Belum optimal dan proporsionalnya pemberian tunjangan kinerja

29) Perencanaan
a) Inkonsistensi perencanaan dan penganggaran
b) Kurangnya data dan informasi pembangunan
c) Akses ke Aplikasi SIPD Kemendagri terkendala jaringan yang sering lambat dan server down serta pemuktahiran data yang membuat penginputan ulang dari awal baik itu satuan standar harga, Program Renstra dan Renja.
d) Masih rendahnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

30) Keuangan
a) PAD rendah sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi
b) Sebagian aset belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sumber pendapatan
c) Terbatasnya personalia pengelola keuangan daerah dengan latar belakang pendidikan akuntansi
d) Terbatasnya pemutakhiran penilaian objek pajak secara massal

31) Kepegawaian
    a) Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan remunerasi yang adil dan layak sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
    b) Masih rendahnya sarana dan prasarana pemerintahan Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi pegawai dan proporsional
    c) Masih rendahnya disiplin aparatur
    d) Belum memiliki sarana dan prasarana pengembangan aparatur
    e) Cakupan peserta Diklat masih kecil, 5% dari total pegawai per tahun
    f) Kekurangan pegawai untuk formasi tertentu

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**345.292.596.915**		**272.669.531.212**	**127,96**	**78,97**		
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**279.833.507.009**		**209.951.519.674**	**68,66**	**75,03**	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya kinerja urusan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi 100 Persen baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu (Persen)	100				0,00			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik Persentase pegawai disiplin; Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu (%)	100				0,00			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; 100 Persen Persentase pegawai disiplin; Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu (Persen)	100				0,00			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase Aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu (Persen)	100				0,00			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		72		0,00			
2.	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.108.475		44.811.000	43,33	99,34		
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
3.	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.910.186		7.878.000	100,00	99,59		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100,00			
4.	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			7.904.000		7.869.000	10,00	99,56		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	10		1		10,00			
5.	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			7.904.000		7.845.000	0,00	99,25		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	10		0		0,00			
6.	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.304.000		8.274.000	6,67	99,64		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	15		1		6,67			
7.	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			13.086.289		12.945.000	100,00	98,92		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
8.	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			275.082.350.889		205.256.170.196	42,00	74,62		
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
9.	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			275.006.015.369		205.182.118.096	100,00	74,61		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2225		2.225		100,00			
10.	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			65.135.520		64.452.100	1,00	98,95		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	100		1		1,00			
11.	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			11.200.000		9.600.000	25,00	85,71		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		3		25,00			
12.	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			35.916.599		34.290.000	100,00	95,47		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
13.	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			10.858.799		9.580.000	100,00	88,22		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
14.	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			19.749.200		19.540.000	100,00	98,94		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
15.	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			5.308.600		5.170.000	100,00	97,39		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
16.	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2.522.571.153		2.520.263.341	122,50	99,91		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
17.	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			2.491.032.913		2.459.654.324	200,00	98,74		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		2		200,00			
18.	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			31.538.240		60.609.017	45,00	192,18		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		9		45,00			
19.	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.062.010.245		1.427.109.197	94,17	134,38		
		Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
20.	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			39.207.326		38.579.000	100,00	98,40		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
21.	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			212.973.480		46.000.000	100,00	21,60		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
22.	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			71.359.949		71.182.000	100,00	99,75		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
23.	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			120.000.000		102.842.001	100,00	85,70		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
24.	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13.248.000		8.340.000	100,00	62,95		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		4		100,00			
25.	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			156.144.000		156.131.500	100,00	99,99		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
26.	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			127.070.000		127.070.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3		3		100,00			
27.	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			322.007.490		876.964.696	53,33	272,34		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1500		800		53,33			
28.	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86.970.000		-	0,00	0,00		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah									
29.	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			86.970.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
30.	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			703.800.000		290.728.340	75,00	41,31		
		Persentase pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
31.	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000		15.000.000	25,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100		25		25,00			
32.	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			192.720.000		132.127.700	100,00	68,56		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		24		100,00			
33.	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			496.080.000		143.600.640	100,00	28,95		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
34.	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			294.779.648		378.147.600	31,25	128,28		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah									
35.	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			109.894.607		163.373.000	50,00	148,66		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		5		50,00			
36.	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			16.500.261		14.228.600	50,00	86,23		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		5		50,00			
37.	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			168.384.780		200.546.000	25,00	119,10		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		5		25,00			
38.	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0,00			
39.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**			**65.298.904.206**		**62.587.211.538**	**160,93**	**95,85**	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah	â€¹1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas (%)	100				0,00			
			(1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas (Persen)	100				0,00			
			Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	0		99,12		0,00			
			"â€¹1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas" (%)	100				0,00			
40.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			34.950.321.062		34.272.190.257	170,62	98,06		
		Persentase meningkatnya pengelolaan pendidikan tingkat sekolah dasar									
41.	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			37.500.000		-	0,00	0,00		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0		0		0,00			
42.	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.203.731.270		2.442.973.555	366,67	110,86		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3		11		366,67			
43.	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			2.760.000.000		2.737.978.000	1.000,00	99,20		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		10		1.000,00			
44.	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			690.000.000		686.376.900	150,00	99,47		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		3		150,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
45.	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			200.000.000		195.910.000	33,33	97,96		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	15		5		33,33			
46.	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			356.618.100		91.273.816	100,00	25,59		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	50		50		100,00			
47.	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			307.899.430		149.560.000	100,00	48,57		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	66		66		100,00			
48.	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			2.057.012.476		2.176.018.325	50,00	105,79		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	10		5		50,00			
49.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			18.944.530.175		18.418.568.240	100,00	97,22		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	179		179		100,00			
50.	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			240.208.000		513.328.882	100,00	213,70		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	179		179		100,00			
51.	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0		0		0,00			
52.	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			401.474.814		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	179		0		0,00			
53.	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			112.362.240		252.422.448	100,00	224,65		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		100,00			
54.	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			520.234.005		165.706.200	100,00	31,85		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		1		100,00			
55.	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			247.508.351		1.315.353.934	0,00	531,44		
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0		1		0,00			
56.	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			82.680.000		82.584.000	100,00	99,88		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		100		100,00			
57.	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			2.005.656.000		2.002.472.796	100,00	99,84		
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1333		1.333		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
58.	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			751.853.021		288.141.661	100,00	38,32		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	174		174		100,00			
59.	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			324.303.180		90.155.000	71,19	27,80		
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	236		168		71,19			
60.	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.290.750.000		2.265.216.500	400,00	98,89		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		8		400,00			
61.	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			416.000.000		398.150.000	100,00	95,71		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	3		3		100,00			
62.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			20.077.906.679		18.550.424.673	231,71	92,39		
		Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar									
63.	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			45.000.000		-	0,00	0,00		
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0		0		0,00			
64.	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			3.487.000.000		3.716.363.232	1.100,00	106,58		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		11		1.100,00			
65.	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			592.250.000		502.483.500	0,00	84,84		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0		3		0,00			
66.	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.971.150.000		1.635.350.000	166,67	82,96		
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		5		166,67			
67.	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			253.350.000		250.450.000	100,00	98,86		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		1		100,00			
68.	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			207.000.000		204.600.000	66,67	98,84		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	3		2		66,67			
69.	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			250.000.000		248.845.013	66,67	99,54		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	3		2		66,67			
70.	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			89.810.950		26.439.000	100,00	29,44		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	10		10		100,00			
71.	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			1.677.631.328		199.090.600	1.666,67	11,87		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	3		50		1.666,67			
72.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			9.066.399.825		9.502.521.000	100,00	104,81		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	58		58		100,00			
73.	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			36.977.000		113.749.600	100,00	307,62		
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	58		58		100,00			
74.	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			131.899.680		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0		0		0,00			
75.	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			56.044.180		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0,00			
76.	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			40.572.280		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		0,00			
77.	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			42.674.616		193.150.400	100,00	452,61		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100,00			
78.	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			237.298.080		250.468.000	66,67	105,55		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	3		2		66,67			
79.	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			354.572.740		202.302.500	5,80	57,06		
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	1000		58		5,80			
80.	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			55.120.000		55.056.000	100,00	99,88		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100		100		100,00			
81.	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			1.005.156.000		1.003.496.328	100,00	99,83		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	666		666		100,00			
82.	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			478.000.000		446.059.500	100,00	93,32		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	6		6		100,00			
83.	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			9.722.175.060		9.514.569.808	97,31	97,86		
		Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini									
84.	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			773.750.000		1.030.405.000	150,00	133,17		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2		3		150,00			
85.	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			148.779.460		144.842.900	100,00	97,35		
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	3		3		100,00			
86.	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			730.664.256		530.239.520	100,00	72,57		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	15		15		100,00			
87.	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			237.432.000		180.730.000	100,00	76,12		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	155		155		100,00			
88.	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			2.691.978.000		2.537.755.910	0,00	94,27		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	0		155		0,00			
89.	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			320.556.000		320.139.740	100,00	99,87		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	155		155		100,00			
90.	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			242.448.000		220.824.600	100,00	91,08		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	155		155		100,00			
91.	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			169.930.540		163.693.240	100,00	96,33		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		100,00			
92.	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			153.005.426		148.105.000	100,00	96,80		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		1		100,00			
93.	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			173.990.750		171.253.000	0,00	98,43		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0		1		0,00			
94.	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi			146.061.550		171.253.000	100,00	117,25		
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1		1		100,00			
95.	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			146.309.490		186.135.000	15,00	127,22		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	200		30		15,00			
96.	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.029.339.800		1.018.970.000	0,00	98,99		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0		2		0,00			
97.	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD			1.177.716.000		1.166.320.598	100,00	99,03		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	2		2		100,00			
98.	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			230.213.788		189.260.300	100,00	82,21		
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	155		155		100,00			
99.	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			1.350.000.000		1.334.642.000	100,00	98,86		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4		4		100,00			
100.	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			548.501.405		250.026.800	50,80	45,58		
		Persentase Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan									
101.	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			139.000.000		133.180.000	100,00	95,81		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2		2		100,00			
102.	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			89.729.150		13.106.800	4,00	14,61		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	50		2		4,00			
103.	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			122.762.650		95.965.000	100,00	78,17		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		1		100,00			
104.	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			108.918.225		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0,00			
105.	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			88.091.380		7.775.000	50,00	8,83		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100		50		50,00			
106.	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			-		-	0,00	0,00		
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0		0		0,00			
107.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0		0		0,00			
108.	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-	0,00	0,00		
		Kurikulum Muatan Lokal pendidikan yang ditetapkan									
109.	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-	0,00	0,00		
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya (Orang)	0		0		0,00			
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						0,00			
110.	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									
111.	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0		0		0,00			
112.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**			**160.185.700**		**130.800.000**	**100,00**	**81,66**	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0		83		0,00			
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	0		83		0,00			
113.	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			160.185.700		130.800.000	100,00	81,66		
		Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									
114.	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			160.185.700		130.800.000	100,00	81,66		
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1		1		100,00			
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**233.389.202.287**		**223.068.408.206**	**146,27**	**95,58**		
115.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**137.628.909.440**		**131.477.128.428**	**90,97**	**95,53**	DINAS KESEHATAN	
		Presentase Cakupan Layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		89,78		0,00			
116.	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			306.176.062		407.391.452	125,60	133,06		
		Tersusunnya Dokumen Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja									
117.	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			230.360.183		305.472.932	28,57	132,61		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	14		4		28,57			
118.	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			24.829.009		24.818.694	200,00	99,96		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		2		200,00			
119.	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			8.810.669		9.659.200	400,00	109,63		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		4		400,00			
120.	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			22.972.500		22.913.000	25,00	99,74		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4		1		25,00			
121.	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			819.101		810.000	100,00	98,89		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
122.	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			18.384.600		43.717.626	0,00	237,79		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0,00			
123.	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			109.727.561.382		99.213.881.782	90,41	90,42		
		Tersusunya dokumen Keuangan Perangkat Daerah									
124.	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			109.628.949.035		99.117.336.182	114,16	90,41		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	876		1.000		114,16			
125.	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		0,00			
126.	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			98.612.347		96.545.600	66,67	97,90		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		2		66,67			
127.	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			164.063.415		193.105.350	100,00	117,70		
		peningkatan Administrasi Aset yang tercatat dengan baik pada Perangkat daerah									
128.	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		0,00			
129.	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			164.063.415		193.105.350	100,00	117,70		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		2		100,00			
130.	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100.573.219		82.625.048	36,59	82,15		
		Meningkatnya Kinerja ASN pada Perangkat daerah									
131.	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0		0,00			
132.	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		0,00			
133.	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		0,00			
134.	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0		0		0,00			
135.	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			100.573.219		82.625.048	73,17	82,15		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	41		30		73,17			
136.	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0,00			
137.	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.215.419.771		2.621.842.025	67,06	118,35		
		Terlaksananya Administrasi Umum perangkat Daerah									
138.	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			50.752.191		91.391.400	100,00	180,07		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
139.	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20.000.000		19.966.000	100,00	99,83		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
140.	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			337.282.400		387.253.500	100,00	114,82		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
141.	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			70.018.800		80.213.700	100,00	114,56		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
142.	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			29.967.999		22.930.000	80,00	76,51		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		4		80,00			
143.	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			42.879.369		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		0		0,00			
144.	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			24.980.550		24.936.800	50,00	99,82		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		1		50,00			
145.	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.639.538.462		1.995.150.625	6,45	121,69		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	31		2		6,45			
146.	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.417.200.000		1.381.421.001	60,00	97,48		
		Terlaksanyanya Cakupan Layanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah									
147.	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.417.200.000		1.381.421.001	60,00	97,48		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		3		60,00			
148.	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			
149.	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
150.	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.288.862.964		6.575.700.021	58,01	90,22		
		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan									
151.	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.196.000		6.173.000	16,67	60,54		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		2		16,67			
152.	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.151.418.536		1.123.907.105	15,38	97,61		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	13		2		15,38			
153.	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.000.000		115.320.000	100,00	115,32		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100,00			
154.	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.027.248.428		5.330.299.916	100,00	88,44		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
155.	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.554.288.497		1.478.738.572	73,28	95,14		
		Terpeliharanya Fasilitas Penunjang Kinerja perangkat daerah									
156.	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			121.179.045		110.146.492	100,00	90,90		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100,00			
157.	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.054.792.442		990.360.475	73,53	93,89		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	34		25		73,53			
158.	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			228.317.010		228.301.605	19,61	99,99		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	153		30		19,61			
159.	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			150.000.000		149.930.000	100,00	99,95		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		100,00			
160.	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD			14.850.000.000		19.517.691.377	100,00	131,43		
		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD									
161.	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			14.850.000.000		19.517.691.377	100,00	131,43		
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1		100,00			
162.	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi			4.764.130		4.731.800	400,00	99,32		
		Keterlibatan organisasi, kelompok, keagaman dan masyarakat dalam peningkatan kapasitas lembaga masyarakat									
163.	1.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			4.764.130		4.731.800	400,00	99,32		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	1		4		400,00			
164.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**			**84.702.482.146**		**82.535.392.408**	**196,78**	**97,44**	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatnyanya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (per 100.000 penduduk)	0		43,3		0,00			
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	0		10,54		0,00			
165.	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			26.131.728.316		26.210.700.819	268,05	100,30		
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota									
166.	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			-		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	0		0		0,00			
167.	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			-		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0		0		0,00			
168.	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			5.447.184.000		5.313.860.459	100,00	97,55		
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	6		6		100,00			
169.	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			408.388.000		406.967.000	100,00	99,65		
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	1		1		100,00			
170.	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			4.620.177.000		4.651.455.699	100,00	100,68		
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5		5		100,00			
171.	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.577.406.086		2.573.876.501	250,00	99,86		
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	4		10		250,00			
172.	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit			194.873.925		194.842.000	200,00	99,98		
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	16		32		200,00			
173.	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	0		0		0,00			
174.	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			824.037.079		816.019.000	100,00	99,03		
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1		1		100,00			
175.	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			19.265.378		19.220.000	100,00	99,76		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	14		14		100,00			
176.	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			2.079.706.019		2.086.486.565	76,92	100,33		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	130		100		76,92			
177.	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Unit)	0		0		0,00			
178.	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			729.699.840		751.100.109	11,95	102,93		
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	293		35		11,95			
179.	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0		0		0,00			
180.	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan			7.802.983.880		8.347.923.644	100,00	106,98		
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	100		100		100,00			
181.	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	0		0		0,00			
182.	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)			501.862.108		139.973.100	1.700,00	27,89		
		Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan (Layanan)	1		17		1.700,00			
183.	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			926.145.000		908.976.742	377,78	98,15		
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	18		68		377,78			
184.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			58.343.281.429		56.192.497.379	179,31	96,31		
		Tercapainya Standar Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
185.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1.257.656.400		1.183.733.000	73,33	94,12		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3299		2.419		73,33			
186.	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			291.067.623		227.663.000	65,06	78,22		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3151		2.050		65,06			
187.	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			100.836.401		95.983.001	76,13	95,19		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	3000		2.284		76,13			
188.	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			57.892.820		56.706.820	66,07	97,95		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	14239		9.407		66,07			
189.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			983.419.200		976.659.400	360,44	99,31		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5642		20.336		360,44			
190.	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			136.435.120		134.703.700	83,40	98,73		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	81044		67.594		83,40			
191.	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			143.849.000		143.401.000	100,89	99,69		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	12846		12.960		100,89			
192.	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			125.865.800		125.828.100	79,43	99,97		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	11403		9.057		79,43			
193.	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			174.787.109		171.851.790	178,26	98,32		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	69		123		178,26			
194.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			546.385.800		434.754.000	298,67	79,57		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	75		224		298,67			
195.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			427.529.459		413.647.200	115,47	96,75		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	1939		2.239		115,47			
196.	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			130.232.760		130.042.960	657,29	99,85		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	377		2.478		657,29			
197.	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	0		0		0,00			
198.	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	0		0		0,00			
199.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.644.179.060		2.106.360.242	200,00	79,66		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	2		4		200,00			
200.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			240.807.300		222.874.400	400,00	92,55		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1		4		400,00			
201.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			600.316.674		570.156.300	380,00	94,98		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	5		19		380,00			
202.	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			527.018.343		373.211.372	100,00	70,82		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	4		4		100,00			
203.	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	0		0		0,00			
204.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			588.536.800		513.464.000	566,67	87,24		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	3		17		566,67			
205.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			184.204.000		154.138.000	66,81	83,68		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	238		159		66,81			
206.	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			244.800		244.800	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	228		228		100,00			
207.	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	0		0		0,00			
208.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.783.533.745		1.704.838.502	950,00	95,59		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2		19		950,00			
209.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			37.088.292.867		37.080.969.890	100,00	99,98		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	25		25		100,00			
210.	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	0		0		0,00			
211.	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional			33.219.500		33.167.800	100,00	99,84		
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	3		3		100,00			
212.	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			209.784.000		209.770.000	100,00	99,99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	2		2		100,00			
213.	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	0		0		0,00			
214.	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			3.637.437.405		3.371.911.283	25,00	92,70		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	4		1		25,00			
215.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas			3.279.956.288		2.669.348.917	100,00	81,38		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	17		17		100,00			
216.	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			630.124.394		557.750.390	100,00	88,51		
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	4		4		100,00			
217.	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota			237.105.652		442.506.412	100,00	186,63		
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	18		18		100,00			
218.	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	0		0		0,00			
219.	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah			123.699.800		123.598.440	100,00	99,92		
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	2		2		100,00			
220.	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)			-		-	0,00	0,00		
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	0		0		0,00			
221.	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis			94.167.400		94.085.000	51,71	99,91		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	1868		966		51,71			
222.	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)			14.000.000		13.880.000	100,00	99,14		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	377		377		100,00			
223.	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria			133.361.000		109.392.000	91,67	82,03		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1200		1.100		91,67			
224.	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok (Tatanan)	0		0		0,00			
225.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi			217.183.270		205.016.300	89,47	94,40		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	19		17		89,47			
226.	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0,00			
227.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak			287.967.840		149.605.360	100,00	51,95		
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	21		21		100,00			
228.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan			462.231.600		458.119.000	100,00	99,11		
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	17		17		100,00			
229.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi			949.952.200		933.115.000	100,00	98,23		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	17		17		100,00			
230.	1.02.02.2.02.0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dokumen)	0		0		0,00			
231.	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	0		0		0,00			
232.	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			159.626.822		64.508.230	50,00	40,41		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi									
233.	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			159.626.822		64.508.230	50,00	40,41		
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	2		1		50,00			
234.	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			67.845.580		67.685.980	100,00	99,76		
		Terbitnya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot									
235.	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			67.845.580		67.685.980	100,00	99,76		
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	1		1		100,00			
236.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**			**9.490.864.235**		**7.710.561.824**	**30,05**	**81,24**	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatkan mutu dan distribusii tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0		97,88		0,00			
237.	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota									
238.	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
239.	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	0		0		0,00			
240.	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			8.234.391.000		6.442.304.913	15,46	78,24		
		Merencanakan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota									
241.	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	0		0		0,00			
242.	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			8.234.391.000		6.442.304.913	15,46	78,24		
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	194		30		15,46			
243.	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	0		0		0,00			
244.	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.256.473.235		1.268.256.911	44,64	100,94		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tigkat Daerah Kabupaten/ Kota									
245.	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.256.473.235		1.268.256.911	44,64	100,94		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	112		50		44,64			
246.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**			**509.000.700**		**399.896.045**	**90,00**	**78,56**	DINAS KESEHATAN	
		Meningkatmya kualitas dan distribusisediaan farmasi,alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	0		90		0,00			
247.	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			130.538.800		123.681.100	100,00	94,75		
		Terlaksanananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
248.	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			130.538.800		123.681.100	100,00	94,75		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	15		15		100,00			
249.	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			-		-	0,00	0,00		
		persentase Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
250.	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	0		0		0,00			
251.	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			118.922.000		65.499.500	80,00	55,08		
		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga									
252.	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			118.922.000		65.499.500	80,00	55,08		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	50		40		80,00			
253.	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			21.756.900		20.870.000	100,00	95,92		
		Terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)									
254.	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			21.756.900		20.870.000	100,00	95,92		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	3		3		100,00			
255.	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			-		-	0,00	0,00		
		jumlah Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
256.	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	0		0		0,00			
257.	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			237.783.000		189.845.445	80,00	79,84		
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga									
258.	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan			237.783.000		189.845.445	80,00	79,84		
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50		40		80,00			
259.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**			**1.057.945.766**		**945.429.501**	**56,67**	**89,36**	DINAS KESEHATAN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0		95,43		0,00			
260.	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			455.632.832		455.061.253	26,67	99,87		
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko									
261.	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			455.632.832		455.061.253	26,67	99,87		
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	15		4		26,67			
262.	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	0		0		0,00			
263.	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			104.518.400		104.477.048	50,00	99,96		
		Terlaksananya Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
264.	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			104.518.400		104.477.048	100,00	99,96		
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	5		5		100,00			
265.	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	300		0		0,00			
266.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			497.794.534		385.891.200	100,00	77,52		
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
267.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			497.794.534		385.891.200	100,00	77,52		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	4		4		100,00			
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**206.275.497.341**		**153.654.981.917**	**65,78**	**74,49**		
268.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**24.759.439.091**		**22.877.619.950**	**63,73**	**92,40**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		100		0,00			
269.	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			35.766.110		50.171.450	47,50	140,28		
		Meningkatnya keterpaduan Perencanaan, penganggaran & realisasi Anggaran									
270.	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8.800.000		7.955.200	40,00	90,40		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		2		40,00			
271.	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.400.000		1.995.000	100,00	83,13		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5		5		100,00			
272.	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.400.000		1.995.000	0,00	83,13		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5		0		0,00			
273.	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.900.000		2.499.700	20,00	86,20		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5		1		20,00			
274.	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.900.000		2.485.000	100,00	85,69		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5		5		100,00			
275.	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			16.366.110		33.241.550	25,00	203,11		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		3		25,00			
276.	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.255.810.341		10.184.734.591	52,78	90,48		
		meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD									
277.	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.210.615.451		10.086.777.743	25,00	89,98		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	120		30		25,00			
278.	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.500.000		1.500.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
279.	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			43.694.890		96.456.848	33,33	220,75		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		4		33,33			
280.	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			37.500.000		80.012.600	70,00	213,37		
		Meningkatnya Tertib BMD Perangkat Daerah									
281.	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			10.000.000		25.806.800	100,00	258,07		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
282.	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			27.500.000		54.205.800	40,00	197,11		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	5		2		40,00			
283.	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			62.610.000		88.399.327	50,00	141,19		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Profesionalitas ASN									
284.	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		10.500.000	50,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2		1		50,00			
285.	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			10.000.000		12.036.000	100,00	120,36		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		2		100,00			
286.	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			27.610.000		65.863.327	50,00	238,55		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2		1		50,00			
287.	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			25.000.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0,00			
288.	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			405.510.400		766.851.246	75,00	189,11		
		Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik									
289.	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000		19.980.000	0,00	99,90		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
290.	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.000.000		24.929.000	100,00	99,72		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
291.	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			191.344.000		341.826.000	100,00	178,64		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
292.	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.500.000		9.825.000	100,00	131,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
293.	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000		10.140.000	100,00	84,50		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100,00			
294.	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			10.566.400		71.655.997	100,00	678,15		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
295.	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			139.100.000		288.495.249	100,00	207,40		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2		2		100,00			
296.	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
297.	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.424.535.850		10.230.196.710	75,00	89,55		
		Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
298.	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
299.	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar			11.413.175.000		9.991.359.700	100,00	87,54		
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1		1		100,00			
300.	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		82.700.011	100,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		6		100,00			
301.	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			11.360.850		156.136.999	100,00	1.374,34		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		100,00			
302.	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			
303.	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.195.423.340		971.750.626	100,00	81,29		
		meningkatnya jasa penunjang urusan perangkat daerah									
304.	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.650.000		10.550.000	100,00	99,06		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
305.	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			261.429.410		190.042.716	100,00	72,69		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
306.	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			923.343.930		771.157.910	100,00	83,52		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
307.	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			342.283.050		505.503.400	45,88	147,69		
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik									
308.	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			38.012.400		32.975.000	26,32	86,75		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	38		10		26,32			
309.	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			232.839.650		291.768.400	25,00	125,31		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	12		3		25,00			
310.	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0		0		0,00			
311.	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			71.431.000		71.120.000	32,20	99,56		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	59		19		32,20			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
312.	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		109.640.000	100,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
313.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**			**7.188.700.500**		**7.336.103.620**	**50,00**	**102,05**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	0		23,38		0,00			
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	0		8,84		0,00			
314.	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.936.200.500		4.936.115.000	50,00	100,00		
		meningkatnya luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota									
315.	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			200.000.000		296.949.000	100,00	148,47		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	2		2		100,00			
316.	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku			-		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun (Unit)	2		0		0,00			
317.	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			4.736.200.500		4.639.166.000	100,00	97,95		
		Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun (KM)	0.2		0,2		100,00			
318.	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir			-		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun (KM)	0		0		0,00			
319.	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		0		0,00			
320.	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2.252.500.000		2.399.988.620	50,00	106,55		
		luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi									
321.	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa			-		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	0.25		0		0,00			
322.	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			700.000.000		688.979.500	0,00	98,43		
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0.25		0		0,00			
323.	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			350.000.000		386.610.000	100,00	110,46		
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0.4		0,4		100,00			
324.	1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi			-		-	0,00	0,00		
		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (Bendung)	1		0		0,00			
325.	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			1.152.500.000		1.247.129.540	100,00	108,21		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	31.2		31,2		100,00			
326.	1.03.02.2.02.0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa			50.000.000		77.269.580	100,00	154,54		
		Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan	Jumlah Daerah Rawa yang mendapatkan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan (DI)	1		1		100,00			
327.	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi			-		-	0,00	0,00		
		Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	0		0		0,00			
328.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**			**8.162.032.500**		**7.597.411.720**	**73,33**	**93,08**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	0		54,83		0,00			
329.	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			8.162.032.500		7.597.411.720	73,33	93,08		
		meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum									
330.	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			2.139.410.000		2.116.560.800	100,00	98,93		
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Liter/Detik)	2		2		100,00			
331.	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			335.000.000		325.859.920	66,67	97,27		
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	3		2		66,67			
332.	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			370.000.000		-	0,00	0,00		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	1		0		0,00			
333.	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			3.600.000.000		3.564.000.000	100,00	99,00		
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	1		1		100,00			
334.	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			1.717.622.500		1.590.991.000	100,00	92,63		
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	100		100		100,00			
335.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST (%)	0				0,00			
336.	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Persentase peningkatan sampah yang dikelola di TPA/TPST									
337.	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			-		-	0,00	0,00		
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	0		0		0,00			
338.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**			**3.277.005.900**		**3.175.594.494**	**100,00**	**96,91**	DINAS PEKERJAAN UMUM	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	0		37,58		0,00			
339.	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			3.277.005.900		3.175.594.494	100,00	96,91		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman dan layak									
340.	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			62.500.000		56.740.000	100,00	90,78		
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi (Unit)	1		1		100,00			
341.	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			-		-	0,00	0,00		
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	0		0		0,00			
342.	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			2.514.505.900		2.575.822.494	100,00	102,44		
		Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Rumah Tangga)	120		120		100,00			
343.	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			700.000.000		543.032.000	100,00	77,58		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	3		3		100,00			
344.	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0		0		0,00			
345.	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0		0		0,00			
346.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**			**8.914.887.175**		**8.758.672.155**	**100,00**	**98,25**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan (Unit)	0		1		0,00			
347.	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			8.914.887.175		8.758.672.155	100,00	98,25		
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan									
348.	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			8.750.772.825		8.647.295.976	100,00	98,82		
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	7		7		100,00			
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota									
349.	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			164.114.350		111.376.179	100,00	67,86		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	20		20		100,00			
350.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Jumlah Bangunan Beserta Lingkungannya yang terbangun dan tekelola dengan baik (Unit)	0		0		0,00			
351.	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah bangunan gedung dan lingkungannya yang tertata dengan baik									
352.	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0,00			
353.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**			**153.386.538.190**		**103.345.909.277**	**66,68**	**67,38**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota (%)	0		36,07		0,00			
354.	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			153.386.538.190		103.345.909.277	66,68	67,38		
		meningkatnya tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota									
355.	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan			12.912.493.615		4.926.718.475	100,00	38,15		
		Tergantinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti (Jembatan)	1		1		100,00			
356.	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			20.560.939.604		14.911.971.544	100,00	72,53		
		Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	10		10		100,00			
357.	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			95.155.379.825		66.899.669.193	100,00	70,31		
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	10		10		100,00			
358.	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			-		-	0,00	0,00		
		Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0.9		0		0,00			
359.	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan			2.001.834.830		667.336.400	100,00	33,34		
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	5		5		100,00			
360.	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan			-		-	0,00	0,00		
		Terehabilitasinya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi (Jembatan)	3		0		0,00			
361.	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			18.960.000.000		11.049.697.323	100,00	58,28		
		Terbangunnya Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun (Jembatan)	1		1		100,00			
362.	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			500.000.000		492.497.000	0,10	98,50		
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	732.992		738,9		0,10			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
363.	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			3.295.890.316		4.398.019.342	100,00	133,44		
		Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1		1		100,00			
364.	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	0		0		0,00			
365.	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0		0		0,00			
366.	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	0		0		0,00			
367.	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	0		0		0,00			
368.	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	0		0		0,00			
369.	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0		0		0,00			
370.	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan			-		-	0,00	0,00		
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin (Jembatan)	0		0		0,00			
371.	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	0		0		0,00			
372.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**			**275.893.985**		**271.113.219**	**80,00**	**98,27**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	0		12,2		0,00			
			Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	0		100		0,00			
			Jumlah Ketersediaan Data layanan Jasa Konstruksi (Dokumen)	0		1		0,00			
373.	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			110.848.736		37.931.300	0,00	34,22		
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan									
374.	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			110.848.736		37.931.300	0,00	34,22		
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	25		0		0,00			
375.	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			122.504.239		190.500.919	100,00	155,51		
		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya									
376.	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			105.350.573		150.195.919	100,00	142,57		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	2		2		100,00			
377.	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI			11.109.750		11.032.400	100,00	99,30		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	2		2		100,00			
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan									
378.	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi			6.043.916		29.272.600	100,00	484,33		
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	1		1		100,00			
379.	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			42.541.011		42.681.000	100,00	100,33		
		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan									
380.	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota			42.541.011		42.681.000	100,00	100,33		
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	15		15		100,00			
381.	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0,00			
382.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**			**311.000.000**		**292.557.482**	**66,67**	**94,07**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	0		95		0,00			
383.	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			221.625.000		229.157.482	66,67	103,40		
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota									
384.	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota			181.625.000		206.112.682	100,00	113,48		
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
385.	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0,00			
386.	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			40.000.000		23.044.800	100,00	57,61		
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1		1		100,00			
387.	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			40.000.000		-	0,00	0,00		
		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan									
388.	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0,00			
389.	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			40.000.000		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	4		0		0,00			
390.	1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Kegiatan)	0		0		0,00			
391.	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			49.375.000		63.400.000	100,00	128,41		
		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang									
392.	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			23.717.000		23.390.000	100,00	98,62		
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1		1		100,00			
393.	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			25.658.000		40.010.000	100,00	155,94		
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	5		5		100,00			
394.	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan									
395.	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	0		0		0,00			
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**8.748.940.780**		**8.342.377.444**	**120,02**	**95,35**		
396.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**			**173.085.630**		**201.716.000**	**90,00**	**116,54**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	0		0,18		0,00			
397.	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			24.890.730		23.821.000	100,00	95,70		
		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi									
398.	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			24.890.730		23.821.000	100,00	95,70		
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
399.	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			148.194.900		177.895.000	80,00	120,04		
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi									
400.	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			148.194.900		177.895.000	80,00	120,04		
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	5		4		80,00			
401.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**			**1.771.671.590**		**1.767.576.500**	**241,94**	**99,77**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						241,94			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
402.	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			1.771.671.590		1.767.576.500	241,94	99,77		
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki									
403.	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			1.771.671.590		1.767.576.500	241,94	99,77		
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	31		75		241,94			
404.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**			**6.804.183.560**		**6.373.084.944**	**104,55**	**93,66**	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0		0,04		0,00			
405.	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			6.804.183.560		6.373.084.944	104,55	93,66		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan									
406.	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			53.945.745		75.479.000	100,00	139,92		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		1		100,00			
407.	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			2.718.669.655		2.339.555.099	18,18	86,06		
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	11		2		18,18			
408.	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			37.604.760		44.377.930	100,00	118,01		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1		1		100,00			
409.	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			3.993.963.400		3.913.672.915	200,00	97,99		
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	1		2		200,00			
410.	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	0		0		0,00			
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**19.850.496.820**		**18.585.027.566**	**66,69**	**93,62**		
411.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**8.443.835.356**		**7.953.309.661**	**68,65**	**94,19**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0		25		0,00			
412.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			153.848.059		162.215.900	100,00	105,44		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
413.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			131.293.770		101.196.200	100,00	77,08		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		1		100,00			
414.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			22.554.289		61.019.700	0,00	270,55		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		4		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
415.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.981.646.465		6.369.198.351	100,00	91,23		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN									
416.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.973.246.465		6.365.698.351	100,00	91,29		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		20		100,00			
417.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.400.000		3.500.000	100,00	41,67		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
418.	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			16.450.900		33.022.600	100,00	200,73		
		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah padaPD									
419.	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			16.450.900		33.022.600	100,00	200,73		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		4		100,00			
420.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			231.706.200		18.113.500	16,67	7,82		
		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
421.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0,00			
422.	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			176.894.400		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		0		0,00			
423.	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			54.811.800		18.113.500	50,00	33,05		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6		3		50,00			
424.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			852.678.540		990.711.475	81,43	116,19		
		Persentase penyediaan bahan/barang administrasi umum									
425.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			21.650.400		14.535.000	0,00	67,14		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0,00			
426.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			194.727.220		276.345.500	100,00	141,91		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		4		100,00			
427.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.200.000		10.718.200	50,00	48,28		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		2		50,00			
428.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.555.500		3.240.000	25,00	42,88		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		1		25,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
429.	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			22.266.045		7.227.000	100,00	32,46		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	10		10		100,00			
430.	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.017.000		9.961.000	95,00	99,44		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	20		19		95,00			
431.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			188.163.000		289.244.775	100,00	153,72		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		60		100,00			
432.	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			386.099.375		379.440.000	100,00	98,28		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4		4		100,00			
433.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78.818.575		69.096.550	52,78	87,67		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
434.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000		4.980.000	8,33	99,60		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1		8,33			
435.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			70.175.000		42.778.050	58,33	60,96		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		7		58,33			
436.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.643.575		21.338.500	91,67	585,65		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		11		91,67			
437.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.686.618		310.951.285	65,83	241,63		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									
438.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			77.485.759		92.003.340	93,33	118,74		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		14		93,33			
439.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		0		0,00			
440.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.700.930		31.400.000	70,00	87,95		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		14		70,00			
441.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0,00			
442.	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.499.929		187.547.945	100,00	1.209,99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (0)	3		3		100,00			
443.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**3.674.968.100**		**3.410.119.540**	**77,78**	**92,79**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	0		2,5		0,00			
444.	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.521.407.100		3.279.585.460	60,00	93,13		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota									
445.	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			3.133.874.320		2.852.239.200	83,33	91,01		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		10		83,33			
446.	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			35.923.880		10.181.860	100,00	28,34		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		12		100,00			
447.	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat			25.261.900		24.656.400	16,67	97,60		
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	6		1		16,67			
448.	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional			31.239.000		40.490.100	100,00	129,61		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	10		10		100,00			
449.	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			295.108.000		352.017.900	0,00	119,28		
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	20		0		0,00			
450.	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	0		0		0,00			
451.	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			153.561.000		130.534.080	100,00	85,00		
		Terselenggaranya Penegakan Perda dn Perkada									
452.	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			32.800.000		16.853.000	100,00	51,38		
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
453.	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			13.566.800		13.208.780	100,00	97,36		
		Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	12		12		100,00			
454.	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			46.644.500		45.277.100	0,00	97,07		
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0		1		0,00			
455.	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			23.774.300		20.712.400	100,00	87,12		
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	4		4		100,00			
456.	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			36.775.400		34.482.800	100,00	93,77		
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12		12		100,00			
457.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**			**304.095.878**		**293.954.750**	**100,00**	**96,67**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Responsef Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penangganan Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	0		100		0,00			
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	0		100		0,00			
458.	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			304.095.878		293.954.750	100,00	96,67		
		Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran serta Non Kebakaran									
459.	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			180.716.942		180.417.950	0,00	99,83		
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0		3		0,00			
460.	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		0,00			
461.	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0		0		0,00			
462.	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			26.663.400		24.985.800	0,00	93,71		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0		0		0,00			
463.	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			96.715.536		88.551.000	100,00	91,56		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12		12		100,00			
464.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.412.488.185**		**5.003.990.384**	**38,68**	**92,45**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0		96,98		0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0		0		0,00			
			Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0		90,28		0,00			
			Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0		99,09		0,00			
			Persentasi Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0		93,44		0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0		99,81		0,00			
465.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			56.148.845		71.682.202	29,17	127,66		
		Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
466.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.209.430		4.204.000	0,00	99,87		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
467.	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6.067.430		6.062.000	0,00	99,91		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
468.	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.651.430		5.536.400	100,00	151,62		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
469.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			42.220.555		55.879.802	16,67	132,35		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		2		16,67			
470.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.339.950.468		3.884.072.046	58,33	89,50		
		Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
471.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.330.516.468		3.873.215.046	100,00	89,44		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	41		41		100,00			
472.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			9.434.000		10.857.000	16,67	115,08		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		2		16,67			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
473.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			65.164.820		-	0,00	0,00		
		Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
474.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	67		0		0,00			
475.	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			65.164.820		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	19		0		0,00			
476.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			362.023.655		496.328.309	18,88	137,10		
		Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
477.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			12.430.190		12.403.500	0,00	99,79		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0,00			
478.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			73.964.850		73.960.350	0,00	99,99		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0,00			
479.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			23.079.000		28.355.000	0,00	122,86		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0,00			
480.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			13.141.400		22.598.200	0,00	171,96		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		0		0,00			
481.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.182.140		10.950.000	26,03	97,92		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1460		380		26,03			
482.	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			29.305.200		6.265.000	100,00	21,38		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
483.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			187.537.200		330.412.584	25,00	176,19		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		3		25,00			
484.	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			11.383.675		11.383.675	0,00	100,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	12		0		0,00			
485.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			368.885.790		319.706.127	55,56	86,67		
		Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
486.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000		8.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
487.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			88.500.000		41.991.674	66,67	47,45		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		2		66,67			
488.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			272.385.790		269.714.453	0,00	99,02		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0,00			
489.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			220.314.607		232.201.700	100,00	105,40		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
490.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			177.089.146		189.641.700	100,00	107,09		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	21		21		100,00			
491.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.794.200		23.510.000	100,00	98,81		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29		29		100,00			
492.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			19.431.261		19.050.000	100,00	98,04		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
493.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0,00			
494.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**			**2.015.109.301**		**1.923.653.231**	**98,23**	**95,46**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Terlaksananya pemulihan Sarana dan prasarana umum pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, penanganan serta pemulihan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan	Jumlah Aparatur BPBD Kab/Kota dan lintas perangkat daerah Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana (Orang)	0		96,24		0,00			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0		97,06		0,00			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	0		92,21		0,00			
			Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	0		90,03		0,00			
495.	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			213.285.085		177.580.570	0,27	83,26		
		Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten									
496.	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			213.285.085		177.580.570	0,27	83,26		
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	62683		170		0,27			
497.	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.021.238.636		989.080.485	145,00	96,85		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									
498.	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			392.611.675		387.211.500	625,00	98,62		
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	4		25		625,00			
499.	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota			16.738.170		5.430.500	100,00	32,44		
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	100		100		100,00			
500.	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			13.529.281		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	35		0		0,00			
501.	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0		0		0,00			
502.	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			357.438.060		362.307.860	0,00	101,36		
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1		0		0,00			
503.	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			240.921.450		234.130.625	0,00	97,18		
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	25		0		0,00			
504.	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			325.848.560		300.973.805	162,50	92,37		
		Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									
505.	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			30.531.940		19.456.940	100,00	63,73		
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1		1		100,00			
506.	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			248.925.660		257.505.865	550,00	103,45		
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	12		66		550,00			
507.	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota			21.064.560		-	0,00	0,00		
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	4		0		0,00			
508.	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			25.326.400		24.011.000	0,00	94,81		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	600		0		0,00			
509.	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			454.737.020		456.018.371	0,00	100,28		
		Terwujudnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana									
510.	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			5.352.260		5.339.000	0,00	99,75		
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	1		0		0,00			
511.	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			33.831.600		49.866.000	0,00	147,39		
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1		0		0,00			
512.	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota			32.174.310		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	12		0		0,00			
513.	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			383.378.850		400.813.371	0,00	104,55		
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	2		0		0,00			
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**9.475.545.292**		**9.714.850.094**	**130,29**	**102,53**		
514.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.591.939.706**		**5.566.538.191**	**87,18**	**99,55**	DINAS SOSIAL	
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						87,18			
515.	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			32.562.800		46.315.650	70,00	142,23		
		Persentase Terlaksannya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
516.	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			10.000.000		9.990.000	40,00	99,90		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	60		24		40,00			
517.	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			22.562.800		36.325.650	100,00	161,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24		24		100,00			
518.	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.905.840.445		3.647.002.536	106,63	93,37		
		Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah									
519.	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.875.711.845		3.606.198.242	86,57	93,05		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67		58		86,57			
520.	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.980.000		1.938.300	100,00	97,89		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
521.	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			28.148.600		38.865.994	133,33	138,07		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		16		133,33			
522.	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		2.296.800	8,33	0,00		
		Persentase Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah									
523.	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		2.296.800	8,33	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		1		8,33			
524.	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Persentase Aparatur Yang Bersertifikasi									
525.	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	36		0		0,00			
526.	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6		0		0,00			
527.	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			235.826.200		452.136.967	83,29	191,72		
		Persentase Tersediannya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum									
528.	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.678.500		5.600.000	85,71	98,62		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		6		85,71			
529.	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			45.848.000		55.920.000	100,00	121,97		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	27		27		100,00			
530.	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			19.730.000		22.531.000	100,00	114,20		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		100,00			
531.	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			23.039.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	15		0		0,00			
532.	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			141.530.700		368.085.967	130,73	260,07		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	179		234		130,73			
533.	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			937.855.030		863.799.866	216,67	92,10		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah									
534.	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			844.102.830		669.959.966	200,00	79,37		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		4		200,00			
535.	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			93.752.200		193.839.900	233,33	206,76		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		14		233,33			
536.	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			143.273.109		127.881.712	100,00	89,26		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah									
537.	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		1.500.000	100,00	50,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		150		100,00			
538.	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			53.250.000		42.475.503	100,00	79,77		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		12		100,00			
539.	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			87.023.109		83.906.209	100,00	96,42		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100,00			
540.	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			251.407.413		312.398.520	66,67	124,26		
		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan									
541.	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			106.224.900		152.371.920	100,00	143,44		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	17		17		100,00			
542.	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.727.000		19.570.000	100,00	110,40		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	24		24		100,00			
543.	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			127.455.513		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6		0		0,00			
544.	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		140.456.600	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		5		0,00			
545.	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi			85.174.709		114.706.140	100,00	134,67		
		Persentase Penataan Organisasi									
546.	1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			85.174.709		114.706.140	100,00	134,67		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	12		12		100,00			
547.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**			**692.855.741**		**657.664.471**	**125,00**	**94,92**	DINAS SOSIAL	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kompentensinya Dalam Pelayanan Sosial						125,00			
548.	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			692.855.741		657.664.471	125,00	94,92		
		Persentase Terlaksananya kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									
549.	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			433.200.000		428.684.250	100,00	98,96		
		Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	133		133		100,00			
550.	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			97.437.641		66.521.421	100,00	68,27		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		12		100,00			
551.	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			136.522.900		136.979.400	100,00	100,33		
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	12		12		100,00			
552.	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			25.695.200		25.479.400	200,00	99,16		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1		2		200,00			
553.	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0		0		0,00			
554.	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	0		0		0,00			
555.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**504.177.889**		**512.005.621**	**198,97**	**101,55**	DINAS SOSIAL	
		persentase penyadang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						198,97			
556.	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			372.629.556		390.496.621	190,29	104,79		
		Persentase Tercapainya pemenuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial									
557.	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			73.863.285		67.636.000	66,67	91,57		
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150		100		66,67			
558.	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			15.820.100		15.078.700	24,00	95,31		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		12		24,00			
559.	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			109.894.350		96.204.500	77,78	87,54		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	45		35		77,78			
560.	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			38.076.500		49.842.200	125,00	130,90		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12		15		125,00			
561.	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			13.033.600		8.000.000	62,50	61,38		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8		5		62,50			
562.	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			7.867.200		17.920.000	80,00	227,78		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5		4		80,00			
563.	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			4.742.000		4.590.000	250,00	96,79		
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8		20		250,00			
564.	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			9.594.600		16.500.500	137,50	171,98		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8		11		137,50			
565.	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			43.667.600		43.564.500	200,00	99,76		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		500		200,00			
566.	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			10.226.600		10.179.400	1.200,00	99,54		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6		72		1.200,00			
567.	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			5.750.400		5.545.600	0,00	96,44		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8		0		0,00			
568.	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			40.093.321		55.435.221	60,00	138,27		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20		12		60,00			
569.	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0,00			
570.	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			131.548.333		121.509.000	225,00	92,37		
		Persentase Tercapainya pemenuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
571.	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			75.814.550		62.670.000	300,00	82,66		
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		150		300,00			
572.	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			25.784.175		25.425.400	400,00	98,61		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	25		100		400,00			
573.	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			11.323.008		11.304.000	100,00	99,83		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	40		40		100,00			
574.	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			18.626.600		22.109.600	100,00	118,70		
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		12		100,00			
575.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**			**2.426.147.656**		**2.701.858.044**	**108,23**	**111,36**	DINAS SOSIAL	
		Persentase Tercapainya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota						108,23			
576.	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.426.147.656		2.701.858.044	108,23	111,36		
		Persentase Tercapainya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota									
577.	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.254.633.256		2.540.147.124	24,68	112,66		
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	38500		9.500		24,68			
578.	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			31.800.000		23.000.000	100,00	72,33		
		Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	500		500		100,00			
579.	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			139.714.400		138.710.920	200,00	99,28		
		Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	350		700		200,00			
580.	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			-		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0,00			
581.	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0		0		0,00			
582.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**			**260.424.300**		**276.783.767**	**98,67**	**106,28**	DINAS SOSIAL	
		Persentase KLB yang tertangani						98,67			
583.	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			130.880.000		153.003.767	97,33	116,90		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana									
584.	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			130.880.000		153.003.767	97,33	116,90		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	600		584		97,33			
585.	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			129.544.300		123.780.000	100,00	95,55		
		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiaagaan Bencana Kabupaten/Kota									
586.	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			129.544.300		123.780.000	100,00	95,55		
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	8		8		100,00			
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			**310.264.168**		**5.915.482.869**	**86,67**	**1.906,60**		
587.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**5.623.469.778**	**0,00**	**0,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		95,5		0,00			
588.	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		29.804.900	0,00	0,00		
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
589.	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		24.660.900	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		3		0,00			
590.	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		987.800	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		1		0,00			
591.	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		988.200	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		1		0,00			
592.	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		2.114.600	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		1		0,00			
593.	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		1.053.400	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		1		0,00			
594.	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		4.678.730.559	0,00	0,00		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
595.	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			-		4.571.457.881	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0		48		0,00			
596.	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			-		77.999.078	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		1		0,00			
597.	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		27.484.400	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		1		0,00			
598.	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			-		1.789.200	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0		1		0,00			
599.	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		43.090.900	0,00	0,00		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
600.	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		40.105.500	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		1		0,00			
601.	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		2.985.400	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0,00			
602.	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		371.060.684	0,00	0,00		
		Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah									
603.	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		9.515.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		1		0,00			
604.	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		21.054.500	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		1		0,00			
605.	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		10.860.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		3		0,00			
606.	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		51.435.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		1		0,00			
607.	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		269.260.784	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		1		0,00			
608.	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		8.935.400	0,00	0,00		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0		1		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
609.	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		28.240.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
610.	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		28.240.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		4		0,00			
611.	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		362.197.235	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
612.	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		1.400.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0		1		0,00			
613.	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-		87.491.175	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		1		0,00			
614.	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		273.306.060	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		1		0,00			
615.	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		107.955.300	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
616.	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		43.154.100	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		2		0,00			
617.	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		45.075.200	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		8		0,00			
618.	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		19.726.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		8		0,00			
619.	2.07.01.2.13	Penataan Organisasi			-		2.390.200	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah									
620.	2.07.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			-		2.390.200	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	0		1		0,00			
621.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**			**17.607.300**		**16.847.300**	**0,00**	**95,68**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	0		95,68		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
622.	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			17.607.300		16.847.300	0,00	95,68		
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)									
623.	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			17.607.300		16.847.300	0,00	95,68		
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0,00			
624.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**			**163.774.290**		**162.924.290**	**120,00**	**99,48**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	0		1,31		0,00			
625.	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			163.774.290		162.924.290	120,00	99,48		
		Meningkatnya minat tenaga kerja untuk mengikuti Pelatihan									
626.	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			163.774.290		162.924.290	120,00	99,48		
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	25		30		120,00			
627.	2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0		0		0,00			
628.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**			**4.000.000**		**2.240.000**	**100,00**	**56,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	0		0		0,00			
629.	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			4.000.000		2.240.000	100,00	56,00		
		Terkelolanya informasi pasar kerja									
630.	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			4.000.000		2.240.000	100,00	56,00		
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	5		5		100,00			
631.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**			**124.882.578**		**110.001.501**	**100,00**	**88,08**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	0		13.928		0,00			
632.	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			47.864.668		43.347.706	100,00	90,56		
		Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja									
633.	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
634.	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			47.864.668		43.347.706	100,00	90,56		
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1		1		100,00			
635.	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			77.017.910		66.653.795	100,00	86,54		
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis pada Perusahaan									
636.	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			67.775.410		62.948.095	100,00	92,88		
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	5		5		100,00			
637.	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			9.242.500		3.705.700	100,00	40,09		
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	5		5		100,00			
638.	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	0		0		0,00			
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**6.004.856.558**		**5.958.832.350**	**49,94**	**99,23**		
639.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.308.016.268**		**5.270.099.431**	**39,47**	**99,29**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Terpenuhinya Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0		100		0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0		99,71		0,00			
			Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0		92,4		0,00			
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0		97,46		0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0		100		0,00			
			Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah (Kegiatan)	4				0,00			
			Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	0		100		0,00			
			Nilai SAKIP (Nilai)	78				0,00			
			Presentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	0		93,55		0,00			
640.	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.029.800		6.139.900	1,00	87,34		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianyan dan terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
641.	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0,00			
642.	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			837.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
643.	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			867.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		0		0,00			
644.	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.275.000		2.269.900	0,00	99,78		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	20		0		0,00			
645.	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.531.000		3.870.000	5,00	152,90		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	20		1		5,00			
646.	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			519.800		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		0		0,00			
647.	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.451.724.711		4.380.082.239	84,00	98,39		
		Tersedianya dan Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
648.	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.435.183.711		4.371.743.239	92,00	98,57		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		46		92,00			
649.	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			516.000		514.000	100,00	99,61		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
650.	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			16.025.000		7.825.000	60,00	48,83		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	10		6		60,00			
651.	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			6.000.000		6.000.000	0,00	100,00		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang akan di laksanakan									
652.	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	110		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
653.	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0,00			
654.	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			6.000.000		6.000.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0,00			
655.	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			236.007.281		331.320.672	68,33	140,39		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di laksanakan									
656.	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.916.200		6.396.000	100,00	92,48		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
657.	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
658.	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.185.715		6.085.715	33,33	98,38		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		1		33,33			
659.	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.176.000		6.840.000	25,00	95,32		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		1		25,00			
660.	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			19.761.720		19.071.425	100,00	96,51		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
661.	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			195.967.646		292.927.532	83,33	149,48		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12		10		83,33			
662.	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			160.062.000		149.740.000	0,00	93,55		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan									
663.	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
664.	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	20		0		0,00			
665.	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			160.062.000		149.740.000	0,00	93,55		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0,00			
666.	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			261.195.870		261.530.774	66,67	100,13		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan di laksanakan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
667.	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200.000		1.200.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0,00			
668.	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.940.000		43.340.925	100,00	85,08		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
669.	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			209.055.870		216.989.849	100,00	103,80		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
670.	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			185.996.607		135.285.846	56,90	72,74		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan									
671.	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			41.171.871		41.245.640	200,00	100,18		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		2		200,00			
672.	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			81.930.254		78.455.206	13,79	95,76		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29		4		13,79			
673.	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.619.698		15.585.000	13,79	99,78		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29		4		13,79			
674.	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			47.274.783		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0,00			
675.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**			**397.500.000**		**397.236.000**	**100,00**	**99,93**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) () (Indeks)	89,82				0,00			
			Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	2		1,5		75,00			
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	92,57				0,00			
			Persentase anggaran responsif gender (ARG) (%)	0		100		0,00			
676.	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			47.500.000		47.236.000	100,00	99,44		
		Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									
677.	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			47.500.000		47.236.000	100,00	99,44		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
678.	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0		0		0,00			
679.	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			350.000.000		350.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pemberdayan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota									
680.	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			350.000.000		350.000.000	100,00	100,00		
		Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Organisasi)	4		4		100,00			
681.	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga)	0		0		0,00			
682.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**			**42.511.510**		**39.117.789**	**42,86**	**92,02**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase anak korban kekerasan yang di tangani instansi terkait (%)	100		100		100,00			
			Persentase kekerasan terhadap Perempuan,TPPO (100.000) Penduduk perempuan (%)	0,009				0,00			
			Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	0		100		0,00			
683.	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
684.	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0,00			
685.	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			42.511.510		39.117.789	85,71	92,02		
		Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota									
686.	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			42.511.510		39.117.789	85,71	92,02		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Orang)	7		6		85,71			
687.	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0		0		0,00			
688.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**			**23.979.095**		**22.242.500**	**50,00**	**92,76**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar (Indeks)	0		5		0,00			
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) () (Indeks)	67,55				0,00			
689.	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		3.970.700	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
690.	2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0		0,00			
691.	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			-		3.970.700	0,00	0,00		
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		1		0,00			
692.	2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)	0		0		0,00			
693.	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0,00			
694.	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
695.	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			23.979.095		18.271.800	100,00	76,20		
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
696.	2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			23.979.095		18.271.800	100,00	76,20		
		Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
697.	2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0		0		0,00			
698.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**96.642.420**		**98.050.041**	**100,00**	**101,46**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya peningkatan data gender dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	89,82				0,00			
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0		0,57		0,00			
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) () (Indeks)	92,57				0,00			
699.	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			96.642.420		98.050.041	100,00	101,46		
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota									
700.	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			96.642.420		98.050.041	100,00	101,46		
		Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		1		100,00			
701.	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	0		0		0,00			
702.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**			**60.045.830**		**59.756.200**	**100,00**	**99,52**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	67,55		51,37		76,05			
703.	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			60.045.830		59.756.200	100,00	99,52		
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									
704.	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			60.045.830		59.756.200	100,00	99,52		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
705.	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0		0		0,00			
706.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**			**76.161.435**		**72.330.389**	**92,86**	**94,97**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dam perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait (%)	100		0		0,00			
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	67,55				0,00			
707.	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			51.169.935		47.432.889	100,00	92,70		
		Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									
708.	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			51.169.935		47.432.889	100,00	92,70		
		Terlaksanaya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu (Kegiatan)	1		1		100,00			
709.	2.08.07.2.01.0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0		0		0,00			
710.	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.991.500		24.897.500	85,71	99,62		
		Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
711.	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.991.500		24.897.500	85,71	99,62		
		Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	7		6		85,71			
712.	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0,00			
713.	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
714.	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota			-		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	0		0		0,00			
715.	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota			-		-	0,00	0,00		
		terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	0		0		0,00			
716.	2.08.07.2.03.0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		0,00			
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**7.296.819.754**		**184.670.486**	**8,00**	**2,53**		
717.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.683.734.134**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Peringkat)	A(>80)		100		125,00			
718.	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			68.750.865		-	0,00	0,00		
719.	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.968.850		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		0		0,00			
720.	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			45.782.015		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4		0		0,00			
721.	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.633.251.359		-	0,00	0,00		
722.	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.575.445.449		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	532		0		0,00			
723.	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			57.805.910		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0,00			
724.	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.174.380		-	0,00	0,00		
725.	2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			1.174.380		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	20		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
726.	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			75.872.985		-	0,00	0,00		
727.	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	74		0		0,00			
728.	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			42.232.610		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		0		0,00			
729.	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			33.640.375		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0,00			
730.	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			285.758.070		-	0,00	0,00		
731.	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		0,00			
732.	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			59.575.920		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0,00			
733.	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.000.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		0,00			
734.	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.350.990		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6		0		0,00			
735.	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.000.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		0		0,00			
736.	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			57.079.247		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		0,00			
737.	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.163.950		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		0		0,00			
738.	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			122.587.963		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		0		0,00			
739.	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			263.736.000		-	0,00	0,00		
740.	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
741.	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			263.736.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
742.	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.675.800		-	0,00	0,00		
743.	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.260.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		0		0,00			
744.	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			72.035.750		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		0,00			
745.	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			147.380.050		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		0,00			
746.	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131.514.675		-	0,00	0,00		
747.	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100.764.711		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23		0		0,00			
748.	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.000.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	15		0		0,00			
749.	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			7.749.965		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0,00			
750.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (%)	100				0,00			
751.	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
752.	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	5		0		0,00			
753.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**			**418.228.130**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%)	100				0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	0		90		0,00			
754.	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			325.152.630		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Daerah Kabupaten									
755.	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			244.728.100		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	20		0		0,00			
756.	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	10		0		0,00			
757.	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota			80.424.530		-	0,00	0,00		
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0,00			
758.	2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya informasi harga dan pasokan pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan (Dokumen)	2		0		0,00			
759.	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan (Beras) Daerah									
760.	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	50		0		0,00			
761.	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			93.075.500		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang berkualitas									
762.	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			93.075.500		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	10		0		0,00			
763.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**			**117.272.835**		**100.905.826**	**100,00**	**86,04**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	12				0,00			
			Terlaksananya Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (Kegiatan)	0		17		0,00			
764.	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			117.272.835		100.905.826	100,00	86,04		
		Terlaksananya Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan									
765.	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			69.168.325		65.021.500	100,00	94,00		
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		12		100,00			
766.	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota			48.104.510		35.884.326	100,00	74,60		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	12		12		100,00			
767.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**			**77.584.655**		**83.764.660**	**40,00**	**107,97**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	0		40		0,00			
			Persentase sampel aman Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (%)	90				0,00			
768.	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			77.584.655		83.764.660	40,00	107,97		
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah									
769.	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	5		0		0,00			
770.	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan			77.584.655		83.764.660	80,00	107,97		
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	10		8		80,00			
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**395.512.700**		**1.254.579.976**	**33,33**	**317,20**		
771.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**			**395.512.700**		**1.254.579.976**	**100,00**	**317,20**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan						100,00			
772.	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			395.512.700		1.254.579.976	100,00	317,20		
		Jumlah dokumen ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan									
773.	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			395.512.700		1.254.579.976	100,00	317,20		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
774.	2.10.05.2.01.0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan (Laporan)	0		0		0,00			
775.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						0,00			
776.	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah bidang tanah yang menjadi subjek dan objek redistribusi tanah									
777.	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0,00			
778.	2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		0		0,00			
779.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Tersedianya dokumen fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi izin membuka tanah						0,00			
780.	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah									
781.	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	0		0		0,00			
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**13.867.589.912**		**13.551.029.016**	**97,06**	**97,72**		
782.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.089.188.742**		**8.294.620.757**	**84,21**	**91,26**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0				0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0				0,00			
			Persentasi Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	0				0,00			
			Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	0				0,00			
			Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0				0,00			
			Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0				0,00			
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0				0,00			
783.	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.099.619.471		2.010.145.405	100,00	95,74		
		Meningkatnya capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									
784.	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2.099.619.471		2.010.145.405	100,00	95,74		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7		7		100,00			
785.	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.113.795.705		5.406.015.248	100,00	88,42		
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
786.	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.100.695.705		5.394.715.248	100,00	88,43		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		100,00			
787.	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			13.100.000		11.300.000	100,00	86,26		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		1		100,00			
788.	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			23.652.700		23.632.700	100,00	99,92		
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
789.	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			23.652.700		23.632.700	100,00	99,92		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
790.	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			47.899.996		18.280.000	100,00	38,16		
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
791.	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			14.074.800		14.040.000	100,00	99,75		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		50		100,00			
792.	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			33.825.196		4.240.000	100,00	12,54		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3		3		100,00			
793.	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			372.218.700		464.894.288	85,71	124,90		
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
794.	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16.511.250		16.511.000	0,00	100,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
795.	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
796.	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			54.635.088		61.235.088	100,00	112,08		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
797.	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			3.243.000		3.240.000	100,00	99,91		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		12		100,00			
798.	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			80.352.900		80.352.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
799.	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.724.910		8.618.000	100,00	316,27		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100,00			
800.	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			184.736.451		264.923.099	100,00	143,41		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
801.	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			30.015.101		30.015.101	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
802.	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			240.191.544		152.757.916	100,00	63,60		
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
803.	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000.000		12.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
804.	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			177.973.000		119.357.916	100,00	67,07		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
805.	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			50.218.544		21.400.000	100,00	42,61		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
806.	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			191.810.627		218.895.200	33,33	114,12		
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
807.	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			111.641.162		139.006.200	100,00	124,51		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100,00			
808.	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			72.240.798		71.961.000	0,00	99,61		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		0		0,00			
809.	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.928.668		7.928.000	0,00	99,99		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0,00			
810.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**91.414.955**		**66.131.900**	**100,00**	**72,34**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	0		28,89		0,00			
811.	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			91.414.955		66.131.900	100,00	72,34		
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota									
812.	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD			91.414.955		66.131.900	100,00	72,34		
		Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	1		1		100,00			
813.	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
814.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**169.842.437**		**205.356.246**	**75,00**	**120,91**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	0		67,89		0,00			
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	0		81,75		0,00			
815.	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			169.842.437		205.356.246	100,00	120,91		
		Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									
816.	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			70.614.000		69.160.296	100,00	97,94		
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	1		1		100,00			
817.	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan			-		-	0,00	0,00		
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	0		0		0,00			
818.	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota			19.373.750		14.893.949	100,00	76,88		
		Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim (Laporan)	1		1		100,00			
819.	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota			79.854.687		121.302.001	100,00	151,90		
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	1		1		100,00			
820.	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
821.	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi			-		-	0,00	0,00		
		kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2		0		0,00			
822.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**19.373.750**		**19.373.750**	**100,00**	**100,00**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						100,00			
823.	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			19.373.750		19.373.750	100,00	100,00		
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									
824.	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			-		-	0,00	0,00		
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	0		0		0,00			
825.	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			19.373.750		19.373.750	100,00	100,00		
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	1		1		100,00			
826.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**62.414.400**		**69.252.166**	**400,00**	**110,96**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	0		32,32		0,00			
827.	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3			62.414.400		69.252.166	400,00	110,96		
		Tersedianya penyimpanan sementara B3									
828.	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			62.414.400		69.252.166	400,00	110,96		
		Terlaksananya Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 (Laporan)	1		4		400,00			
829.	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)			-		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	0		0		0,00			
830.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**123.953.711**		**146.579.532**	**100,00**	**118,25**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	0		63,63		0,00			
831.	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			123.953.711		146.579.532	100,00	118,25		
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
832.	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			-		-	0,00	0,00		
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0		0		0,00			
833.	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			-		-	0,00	0,00		
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0		0		0,00			
834.	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			123.953.711		146.579.532	100,00	118,25		
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	30		30		100,00			
835.	2.11.06.2.01.0011	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup			-		-	0,00	0,00		
		Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
836.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**56.066.666**		**42.997.000**	**100,00**	**76,69**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0		70		0,00			
837.	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			56.066.666		42.997.000	100,00	76,69		
		Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH									
838.	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			56.066.666		42.997.000	100,00	76,69		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)	1		1		100,00			
839.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**16.588.400**		**21.811.900**	**100,00**	**131,49**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	0		70		0,00			
840.	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			16.588.400		21.811.900	100,00	131,49		
		Meningkatnya lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunikasi/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH									
841.	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat			16.588.400		21.811.900	100,00	131,49		
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	1		1		100,00			
842.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**4.238.746.851**		**4.684.905.765**	**100,00**	**110,53**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0		100		0,00			
843.	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			4.238.746.851		4.684.905.765	100,00	110,53		
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah									
844.	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			28.446.600		27.363.100	100,00	96,19		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	1		1		100,00			
845.	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			911.581.500		1.042.708.500	100,00	114,38		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	1		1		100,00			
846.	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota			33.322.000		41.726.200	100,00	125,22		
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		1		100,00			
847.	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan			-		-	0,00	0,00		
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	0		0		0,00			
848.	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah			20.969.521		67.008.021	100,00	319,55		
		Kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah yang dilaksanakan	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	1		1		100,00			
849.	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah			-		-	0,00	0,00		
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0		0		0,00			
850.	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			3.244.427.230		3.439.091.923	100,00	106,00		
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	5		5		100,00			
851.	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			-		-	0,00	0,00		
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0		0		0,00			
852.	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah			-		67.008.021	0,00	0,00		
		Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	0		1		0,00			
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**6.481.081.873**		**5.951.086.175**	**38,61**	**91,82**		
853.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.981.531.073**		**5.471.044.150**	**41,52**	**91,47**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		95		95,00			
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Adminstrasi Kantor, Persentase Disipilin Pegawai, Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Selesai Tepat Waktu, Persentase Data Aset, Persentase Pelayanan Dinas (%)	100		95		95,00			
			Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		97,02		97,02			
			Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100		91,97		91,97			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0				0,00			
			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100		88,03		88,03			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
			Persentase Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (%)	100		0		0,00			
			Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100				0,00			
			Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja (%)	100				0,00			
854.	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.693.600		7.760.000	20,00	89,26		
		Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun									
855.	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		0		0,00			
856.	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.600.000		1.534.400	0,00	95,90		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	25		0		0,00			
857.	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.520.000		1.327.200	0,00	87,32		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	25		0		0,00			
858.	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.242.400		2.108.800	0,00	94,04		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	25		0		0,00			
859.	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.731.200		1.643.200	100,00	94,92		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	25		25		100,00			
860.	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.600.000		1.146.400	0,00	71,65		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	15		0		0,00			
861.	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.760.456.070		3.312.971.673	37,96	88,10		
		Jumlah Administrasi Keuangan yang dilaporkan									
862.	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.750.756.070		3.303.985.673	88,89	88,09		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63		56		88,89			
863.	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.600.000		1.011.200	0,00	63,20		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	20		0		0,00			
864.	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.100.000		7.974.800	25,00	98,45		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		5		25,00			
865.	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			49.319.080		45.360.000	0,00	91,97		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang disediakan									
866.	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			45.376.800		45.360.000	0,00	99,96		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	68		0		0,00			
867.	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			3.942.280		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0,00			
868.	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			509.161.260		558.357.613	55,29	109,66		
		Jumlah Penyediaan Penunjang Administrasi Umum yang diadakan									
869.	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.955.000		1.795.000	33,33	91,82		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		1		33,33			
870.	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			121.177.680		95.329.729	40,00	78,67		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		2		40,00			
871.	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
872.	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			12.687.000		11.817.000	100,00	93,14		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
873.	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.365.830		26.244.600	100,00	99,54		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
874.	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.452.000		6.480.000	100,00	86,96		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		100,00			
875.	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			56.619.230		55.282.500	0,00	97,64		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6		0		0,00			
876.	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.064.000		3.064.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0,00			
877.	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			275.766.600		323.911.000	24,24	117,46		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	165		40		24,24			
878.	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			4.073.920		34.433.784	100,00	845,22		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		5		100,00			
879.	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah Kebutuhan Barang Milik Daerah yang diadakan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
880.	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
881.	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			
882.	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			849.073.053		754.474.209	59,19	88,86		
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di laporkan									
883.	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.400.000		5.400.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
884.	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			97.861.500		72.621.641	100,00	74,21		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		100,00			
885.	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.440.000		57.119.001	11,76	125,70		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	17		2		11,76			
886.	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			700.371.553		619.333.567	25,00	88,43		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		3		25,00			
887.	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			803.868.011		791.237.455	55,63	98,43		
		Jumlah Kendaraan, Peralatan dan Gedung yang dipelihara									
888.	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			59.608.350		59.460.000	12,50	99,75		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16		2		12,50			
889.	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			20.036.861		26.590.300	50,00	132,71		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		1		50,00			
890.	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			22.522.800		22.392.155	60,00	99,42		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		3		60,00			
891.	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		0		0,00			
892.	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			701.700.000		682.795.000	100,00	97,31		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
893.	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0,00			
894.	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi			960.000		883.200	33,33	92,00		
		Jumlah Penataan Organisasi disampaikan dan dilaporkan									
895.	2.12.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0		0		0,00			
896.	2.12.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0		0		0,00			
897.	2.12.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	0		0		0,00			
898.	2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			960.000		883.200	33,33	92,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	3		1		33,33			
899.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**			**221.595.300**		**201.074.145**	**36,17**	**90,74**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk (Persentase)	0		0		0,00			
			Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan, Penataan dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	750				0,00			
			Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)	0		0		0,00			
900.	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			109.556.500		97.314.289	79,00	88,83		
		Jumlah Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk									
901.	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	750		0		0,00			
902.	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			20.479.700		19.975.000	304,00	97,54		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	750		2.280		304,00			
903.	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)	150		0		0,00			
904.	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			89.076.800		77.339.289	12,00	86,82		
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	25		3		12,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
905.	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)	0		0		0,00			
906.	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	0		0		0,00			
907.	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)	0		0		0,00			
908.	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)	0		0		0,00			
909.	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			45.500.000		35.461.725	25,69	77,94		
		Jumlah Layanan Penataan Pendaftaran Penduduk									
910.	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)	0		0		0,00			
911.	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan			45.500.000		35.461.725	25,69	77,94		
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	25300		6.500		25,69			
912.	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			66.538.800		68.298.131	4,00	102,64		
		umlah Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
913.	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0		0		0,00			
914.	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk			66.538.800		68.298.131	20,00	102,64		
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	25		5		20,00			
915.	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	3		0		0,00			
916.	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	70		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
917.	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0		0		0,00			
918.	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	200		0		0,00			
919.	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	20		0		0,00			
920.	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk									
921.	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	0		0		0,00			
922.	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	0		0		0,00			
923.	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	0		0		0,00			
924.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**			**171.563.100**		**174.493.636**	**42,22**	**101,71**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencataran Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0		0		0,00			
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0		0		0,00			
			Peningkatan Pelayanan Dokumen Kependudukan Akta Pencatatan Sipil (Laporan)	5				0,00			
			Tercapainya Administrasi Kependudukan Melalui Tertibnya Dokumen Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian (Layanan)	5				0,00			
			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0		0		0,00			
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0		0		0,00			
925.	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			22.930.600		29.000.500	50,00	126,47		
		Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil									
926.	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dokumen)	0		0		0,00			
927.	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			22.930.600		29.000.500	100,00	126,47		
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	5		5		100,00			
928.	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	0		0		0,00			
929.	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	0		0		0,00			
930.	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	5		0		0,00			
931.	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			142.359.800		139.323.136	40,00	97,87		
		Jumlah Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Pencatatan Sipil									
932.	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	0		0		0,00			
933.	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		0,00			
934.	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	0		0		0,00			
935.	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil			82.933.400		81.612.336	100,00	98,41		
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	5		5		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
936.	2.12.03.2.02.0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	0		0		0,00			
937.	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			59.426.400		57.710.800	20,00	97,11		
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	5		1		20,00			
938.	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	24		0		0,00			
939.	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	0		0		0,00			
940.	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	0		0		0,00			
941.	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	0		0		0,00			
942.	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0		0		0,00			
943.	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			6.272.700		6.170.000	33,33	98,36		
		Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaporkan									
944.	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	0		0		0,00			
945.	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		
		Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	0		0		0,00			
946.	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil			6.272.700		6.170.000	33,33	98,36		
		Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)	3		1		33,33			
947.	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	0		0		0,00			
948.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**			**95.685.800**		**93.808.544**	**30,00**	**98,04**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan Oleh Lembaga/Instansi Pengguna Melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) (Dokumen)	15				0,00			
			Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	0				0,00			
			Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemahaman Pentingnya Dokumen Adminduk serta Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Teknis Informasi Data Kependudukan (%,Kali,Orang)	90,3,3				0,00			
949.	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			17.497.300		17.199.300	0,00	98,30		
		Jumlah Penyajian Database Kependudukan yang sajikan dapat dimanfaatkan									
950.	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	1		0		0,00			
951.	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			17.497.300		17.199.300	0,00	98,30		
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	15		0		0,00			
952.	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	0		0		0,00			
953.	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah Dokumen Informasi Administrasi Kependudukan dapat di kelola									
954.	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	0		0		0,00			
955.	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			78.188.500		76.609.244	50,00	97,98		
		Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dapat dilaporkan									
956.	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0		0		0,00			
957.	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri			7.116.600		7.028.800	50,00	98,77		
		Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	2		1		50,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
958.	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0		0		0,00			
959.	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	0		0		0,00			
960.	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	3		0		0,00			
961.	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	0		0		0,00			
962.	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			71.071.900		69.580.444	100,00	97,90		
		Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	25		25		100,00			
963.	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dapat dilaporkan									
964.	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	0		0		0,00			
965.	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	0		0		0,00			
966.	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	0		0		0,00			
967.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**			**10.706.600**		**10.665.700**	**0,00**	**99,62**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Meningkatnya kualitas profil Kependudukan	Tersedianya Informasi Kependudukan berupa Buku Profil Kependudukan (Buku)	35				0,00			
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	0		0		0,00			
968.	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			10.706.600		10.665.700	0,00	99,62		
		Jumlah Data dan Profil Kependudukan yang dapat disajikan									
969.	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0,00			
970.	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain			10.706.600		10.665.700	0,00	99,62		
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	35		0		0,00			
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**8.311.962.307**		**8.051.796.949**	**38,61**	**96,87**		
971.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.179.071.474**		**4.857.734.849**	**36,40**	**93,80**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana dalam kondisi pegawai aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat Minat Pengunjung Pameran Pembangunan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		25		0,00			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; Jumlah pengunjung pameran pembangunan (Persen)	100		100		100,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0		31		0,00			
			Presentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	0		0		0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0		25		0,00			
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0		31		0,00			
			Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor; Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik; Persentase pegawai disiplin; Persentase aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis; Persentase laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat waktu; (Persen)	95		92		96,84			
			Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	0		25		0,00			
			Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0		25		0,00			
972.	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.206.480.909		3.872.309.452	50,00	92,06		
		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Bulanan									
973.	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.197.971.309		3.870.809.452	100,00	92,21		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55		55		100,00			
974.	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.509.600		1.500.000	0,00	17,63		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	14		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
975.	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.010.700		3.745.700	33,33	9,36		
		Terlaksananya Pakaian PDH untuk ASN dan Hitam Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bimtek pada DPMD Kab. Gunung Mas									
976.	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	62		0		0,00			
977.	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20.004.480		560.000	0,00	2,80		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2		0		0,00			
978.	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			20.006.220		3.185.700	100,00	15,92		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		10		100,00			
979.	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			364.045.590		400.726.669	41,84	110,08		
		Terlaksananya Kebutuhan Administrasi dalam mendukung Tupoksi pada DPMD Kab. Gunung Mas									
980.	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.190.689		9.146.000	50,00	99,51		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		5		50,00			
981.	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			108.364.860		17.700.000	100,00	16,33		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7		7		100,00			
982.	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.074.136		67.267.000	26,15	216,47		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	65		17		26,15			
983.	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.015.179		17.362.000	100,00	102,04		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
984.	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.798.500		7.980.000	33,33	73,90		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6		2		33,33			
985.	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			22.237.740		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
986.	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165.364.486		281.271.669	25,25	170,09		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	305		77		25,25			
987.	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
988.	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya sarana kerja									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
989.	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
990.	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			390.872.495		363.982.565	27,78	93,12		
		Terlaksananya Kebutuhan dan Administrasi DPMD Kab. Gunung Mas									
991.	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.420.000		10.420.000	33,33	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9		3		33,33			
992.	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			77.444.100		68.789.649	25,00	88,82		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		3		25,00			
993.	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			303.008.395		284.772.916	25,00	93,98		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	8		2		25,00			
994.	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			177.661.781		216.970.463	36,61	122,13		
		Terlaksananya Pemeliharaan gedung Peralatan mesin kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Kab. Gunung Mas									
995.	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			56.402.466		86.572.463	0,00	153,49		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0,00			
996.	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			50.144.023		101.183.000	21,43	201,78		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14		3		21,43			
997.	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			51.072.687		9.175.000	100,00	17,96		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
998.	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20.042.604		20.040.000	25,00	99,99		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		1		25,00			
999.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	0		0		0,00			
1000.	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa									
1001.	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	0		0		0,00			
1002.	2.13.02.2.01.0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa (Desa)	0		0		0,00			
1003.	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	40		0		0,00			
1004.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0		0		0,00			
			Jumlah desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa (Desa)	0		0		0,00			
1005.	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama antar Desa									
1006.	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		0,00			
1007.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**			**2.663.945.762**		**2.511.944.732**	**44,21**	**94,29**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah BUMDes Aktif; Status Klasifikasi Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Swasembada); Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan; Persentase Pelayanan Kesehatan Aparatur Desa (Persen)	95		92		96,84			
			Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		30		0,00			
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	0		25		0,00			
			Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0		31		0,00			
1008.	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.663.945.762		2.511.944.732	44,21	94,29		
		Terlaksana Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
1009.	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			97.423.780		97.000.508	26,32	99,57		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	114		30		26,32			
1010.	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			41.704.700		41.576.400	26,32	99,69		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	114		30		26,32			
1011.	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			203.610.682		239.029.884	26,32	117,40		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	114		30		26,32			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1012.	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			1.814.061.572		1.656.467.240	50,88	91,31		
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	114		58		50,88			
1013.	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			72.581.126		70.953.300	28,00	97,76		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	25		7		28,00			
1014.	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			8.958.400		8.706.200	75,44	97,18		
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	114		86		75,44			
1015.	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			25.318.700		25.258.400	50,88	99,76		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	114		58		50,88			
1016.	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa			226.850.155		208.344.100	100,00	91,84		
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		100,00			
1017.	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			91.846.747		84.227.200	50,88	91,70		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	114		58		50,88			
1018.	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa			36.162.700		35.402.300	26,32	97,90		
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	114		30		26,32			
1019.	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			45.427.200		44.979.200	25,00	99,01		
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	12		3		25,00			
1020.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**			**468.945.071**		**682.117.368**	**44,41**	**145,46**	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	0		31		0,00			
			Jumlah kelompok usaha perempuan aktif; Jumlah kelompok usaha aktif; Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat akses TTG; Status perkembangan Desa di Kabupaten Gunung Mas (Desa Tertinggal) (Persen)	95		92		96,84			
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0		0		0,00			
			Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		492		0,00			
1021.	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			468.945.071		682.117.368	44,41	145,46		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
1022.	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0		0		0,00			
1023.	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			78.287.150		98.452.600	26,32	125,76		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	114		30		26,32			
1024.	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			51.609.100		50.876.238	100,00	98,58		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	1		1		100,00			
1025.	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			63.007.300		57.964.700	25,00	92,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	8		2		25,00			
1026.	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			276.041.521		474.823.830	26,32	172,01		
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	114		30		26,32			
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**4.013.347.021**		**3.931.409.442**	**100,03**	**97,96**		
1027.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**			**303.000.000**		**299.398.800**	**60,00**	**98,81**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR (Total Fertility Rate) (%)	0		2,29		0,00			
1028.	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk									
1029.	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)	12		0		0,00			
1030.	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			303.000.000		299.398.800	75,00	98,81		
		Tersedianya data terpilah kependudukan cakupan daerah									
1031.	2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dokumen)	1		0		0,00			
1032.	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga			60.000.000		56.398.800	100,00	94,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)	12		12		100,00			
1033.	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			99.000.000		99.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	12		12		100,00			
1034.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			144.000.000		144.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1		1		100,00			
1035.	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)	0		0		0,00			
1036.	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain			-		-	0,00	0,00		
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)	0		0		0,00			
1037.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**			**2.513.561.949**		**2.360.842.766**	**140,92**	**93,92**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Unmet Need (persen)	6,15		9,1		52,03			
			Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) (%)	0		66,2		0,00			
			Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (persen)	74,83		66,2		88,47			
			Total Fertility Rate (TFR) (persen)	2,30		2,29		100,43			
			iBangga () (Indeks)	66,35		62,2		93,75			
1038.	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			977.342.579		879.054.297	80,00	89,94		
		Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									
1039.	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	2		0		0,00			
1040.	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)	0		0		0,00			
1041.	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana			528.000.000		520.426.000	100,00	98,57		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	12		12		100,00			
1042.	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			178.258.680		172.132.812	100,00	96,56		
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	12		12		100,00			
1043.	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			125.000.000		105.000.000	100,00	84,00		
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1		1		100,00			
1044.	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			146.083.899		81.495.485	100,00	55,79		
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	30		30		100,00			
1045.	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.162.502.366		1.125.354.595	100,00	96,80		
		Meningkatnya kapasitas SDM tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB									
1046.	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			786.460.421		785.234.650	100,00	99,84		
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	254		254		100,00			
1047.	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			376.041.945		340.119.945	100,00	90,45		
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	2		2		100,00			
1048.	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	0		0		0,00			
1049.	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			193.446.105		182.650.574	270,51	94,42		
		Tercukupinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB									
1050.	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			32.748.340		31.280.268	100,00	95,52		
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	6		6		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1051.	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			113.647.000		105.689.505	848,69	93,00		
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	343		2.911		848,69			
1052.	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)	0		0		0,00			
1053.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			22.050.000		20.762.118	66,67	94,16		
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	3		2		66,67			
1054.	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			25.000.765		24.918.683	66,67	99,67		
		Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)	3		2		66,67			
1055.	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			180.270.900		173.783.300	75,00	96,40		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB									
1056.	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB			79.470.900		77.636.300	100,00	97,69		
		Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	23		23		100,00			
1057.	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas			100.800.000		96.147.000	50,00	95,38		
		Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	48		24		50,00			
1058.	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			-		-	0,00	0,00		
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0		0		0,00			
1059.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**			**1.196.785.072**		**1.271.167.876**	**63,19**	**106,22**	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta massyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Prevalensi Stunting (undefined)	12,35				0,00			
			Menurunnya Angka melahirkan pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR) (undefined)	45,00		41,8		92,89			
			Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	0		55,65		0,00			
			iBangga (Indeks)	66,35		62		93,44			
1060.	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			358.585.072		442.867.876	52,67	123,50		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1061.	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			33.600.000		132.194.900	16,67	393,44		
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	6		1		16,67			
1062.	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	0		0		0,00			
1063.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			19.200.000		19.049.600	50,00	99,22		
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	2		1		50,00			
		Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
1064.	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			66.182.663		113.929.805	100,00	172,14		
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1		1		100,00			
1065.	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			130.000.000		122.509.996	90,00	94,24		
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	20		18		90,00			
1066.	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			93.279.424		39.885.550	12,00	42,76		
		Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)	150		18		12,00			
1067.	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			16.322.985		15.298.025	100,00	93,72		
		Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	60		60		100,00			
1068.	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)	127		0		0,00			
1069.	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			838.200.000		828.300.000	100,00	98,82		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga									
1070.	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			381.000.000		376.500.000	100,00	98,82		
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	10		10		100,00			
1071.	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)			457.200.000		451.800.000	100,00	98,82		
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	10		10		100,00			
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**752.047.368**		**819.201.691**	**100,00**	**108,93**		
1072.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			**723.072.368**		**776.111.691**	**100,00**	**107,34**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						100,00			
1073.	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia									
1074.	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	0		0		0,00			
1075.	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			190.489.005		216.748.295	100,00	113,79		
		tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tresedia									
1076.	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			190.489.005		216.748.295	100,00	113,79		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	9		9		100,00			
1077.	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			532.583.363		559.363.396	100,00	105,03		
		Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota									
1078.	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			160.410.825		189.450.686	100,00	118,10		
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100,00			
1079.	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			12.172.538		12.144.000	100,00	99,77		
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100,00			
1080.	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			360.000.000		357.768.710	100,00	99,38		
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1081.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			28.975.000		43.090.000	100,00	148,71	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi laut	Konektivitas Laut (Unit)	0				0,00			
1082.	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			28.975.000		43.090.000	100,00	148,71		
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian rutin LLASP									
1083.	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			28.975.000		43.090.000	100,00	148,71		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		1		100,00			
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**13.311.615.842**		**11.549.572.589**	**139,01**	**86,76**		
1084.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.674.326.844**		**5.372.141.903**	**153,62**	**94,67**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Meningkatnya Pelaksanaan Adminsitrasi dan Pelayanan Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	(2). Persentase pelaksanaan administrasi dan pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran ()	(2). 100 %		90		4.285,71			
			(1). Nilai Akuntabilitas Kinerja ()	(1). 79 (BB)				0,00			
			Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan (%)	0		95		0,00			
1085.	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.535.978.973		4.038.292.996	149,81	89,03		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1086.	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.493.933.971		4.002.865.716	82,76	89,07		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58		48		82,76			
1087.	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1.651.680		6.001.680	200,00	363,37		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		2		200,00			
1088.	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.393.322		29.425.600	166,67	72,85		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		5		166,67			
1089.	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
1090.	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1091.	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			46.790.482		24.242.500	61,11	51,81		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1092.	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			22.727.250		21.367.500	100,00	94,02		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100,00			
1093.	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			24.063.232		2.875.000	22,22	11,95		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	9		2		22,22			
1094.	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			293.455.402		551.614.971	215,83	187,97		
		Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah									
1095.	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4.999.500		4.993.000	200,00	99,87		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		10		200,00			
1096.	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.625.800		281.427.500	160,00	310,54		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		8		160,00			
1097.	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			16.871.332		8.935.000	200,00	52,96		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		4		200,00			
1098.	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.000.000		2.364.800	200,00	15,77		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		4		200,00			
1099.	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.812.800		11.550.000	300,00	97,78		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		3		300,00			
1100.	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			34.819.209		24.684.145	166,67	70,89		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3		5		166,67			
1101.	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		4.800.000	100,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100,00			
1102.	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			119.326.761		212.860.526	400,00	178,38		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		4		400,00			
1103.	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		-	0,00	0,00		
1104.	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
1105.	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
1106.	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			659.657.117		598.596.700	224,81	90,74		
		Terselenggaranya Pelayanan Operasional dan Administratif Perkantoran									
1107.	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.840.000		4.840.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		12		100,00			
1108.	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			95.000.000		69.428.009	250,00	73,08		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		30		250,00			
1109.	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			38.768.637		42.149.500	258,33	108,72		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		31		258,33			
1110.	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			521.048.480		482.179.191	290,91	92,54		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	11		32		290,91			
1111.	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107.250.523		129.008.136	201,92	120,29		
		Tersedianya Laporan Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Properti Pemerintah Daerah									
1112.	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			93.588.736		120.869.136	253,85	129,15		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13		33		253,85			
1113.	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			13.661.787		8.139.000	150,00	59,57		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		3		150,00			
1114.	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi			1.000.000		1.000.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tata Kerja Organisasi									
1115.	2.16.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1.000.000		1.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		100,00			
		Mewujudkan Kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, relevan, dan dapat dievaluasi dengan hasil yang jelas dan terukur.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Predikat)	0		80,42		0,00			
1116.	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			30.194.348		29.386.600	120,00	97,32		
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan EValuasi Kinerja Perangkat Daerah									
1117.	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			12.623.400		12.264.800	100,00	97,16		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1118.	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.567.000		1.463.600	100,00	93,40		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1119.	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.106.000		4.103.200	100,00	99,93		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1120.	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.040.200		3.030.800	200,00	99,69		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		2		200,00			
1121.	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			8.857.748		8.524.200	100,00	96,23		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		100,00			
1122.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**			**3.436.313.853**		**1.785.908.035**	**106,12**	**51,97**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Pubik Pemerintah Daerah	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	0		90,24		0,00			
			NIlai Keterbukaan Informasi Publik (Renstra 2025-2026) (Nilai)	30,25				0,00			
			Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0		20		0,00			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten (Permendagri 18 tahun 2020) (Persen)	75				0,00			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	0		72,98		0,00			
1123.	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			3.436.313.853		1.785.908.035	106,12	51,97		
		Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah									
1124.	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media			4.000.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2		0		0,00			
1125.	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1		0		0,00			
1126.	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik			40.930.350		31.543.950	100,00	77,07		
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2		2		100,00			
1127.	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi			2.810.516.900		1.582.440.465	142,86	56,30		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	70		100		142,86			
1128.	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			154.544.593		105.396.720	400,00	68,20		
		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1		4		400,00			
1129.	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten			387.164.890		66.526.900	100,00	17,18		
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2		2		100,00			
1130.	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik			39.157.120		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	6		0		0,00			
1131.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**			**4.200.975.144**		**4.391.522.651**	**122,73**	**104,54**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	(1). Indeks SPBE (IKU RPD 2025-2026) (Nilai)	(1). 2,65		2,81		22,21			
			(2). Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Permendagri 18 tahun 2020/IKK RPD 2025-2026) (%)	(2). 73				0,00			
			(2). Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (Permendagri 18 tahun 2020/IKK RPD 2025-2026) / Persentase Layanan Publik dan Layanan Adminitrasi Pemerintah dalam satu portal (Renstra 2025-2026) ()	(2). 73%/30%				0,00			
			(1). Indeks SPBE (IKU RPD 2025-2026) / Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (Permendagri 18 tahun 2020/IKK RPD 2025-2026) / Cakupan Layanan Telekomunikasi (Permendagri 86 tahun 2017) ()	(1). 2,65/73%/80%				0,00			
			Cakupan Layanan Telekomunikasi (%)	0		97		0,00			
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	0		2,81		0,00			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	0		23,81		0,00			
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	0		71		0,00			
1132.	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			24.425.775		27.172.243	300,00	111,24		
		Terselenggaranya Penyediaan Nama Domain Resmi dan Sub-Domain untuk Instansi Pemerintah Daerah									
1133.	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa			24.425.775		27.172.243	300,00	111,24		
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	1		3		300,00			
1134.	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			4.176.549.369		4.364.350.408	105,00	104,50		
		Terselenggaranya Layanan Publik Berbasis Elektronik yang mempermudah akses masyarakat kepada layanan pemerintahan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1135.	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			5.477.851		42.237.000	100,00	771,05		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda (Laporan)	2		2		100,00			
1136.	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			164.596.820		130.873.500	100,00	79,51		
		Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional (Dokumen)	2		2		100,00			
1137.	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			353.876.308		339.721.800	100,00	96,00		
		Terlaksananya koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan (Dokumen)	2		2		100,00			
1138.	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			13.469.580		9.115.000	100,00	67,67		
		Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2		2		100,00			
1139.	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			318.544.360		294.397.600	400,00	92,42		
		Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan aplikasi khusus SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah (Aplikasi)	1		4		400,00			
1140.	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			26.360.000		29.143.000	50,00	110,56		
		Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2		1		50,00			
1141.	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			174.271.450		214.519.038	100,00	123,09		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	38		38		100,00			
1142.	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2		0		0,00			
1143.	2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan (Aplikasi)	4		0		0,00			
1144.	2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			3.119.953.000		3.304.343.470	100,00	105,91		
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	38		38		100,00			
1145.	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	0		0		0,00			
1146.	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1147.	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0		0		0,00			
1148.	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	0		0		0,00			
1149.	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0		0		0,00			
1150.	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0		0		0,00			
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			**6.454.939.198**		**215.084.239**	**3,64**	**3,33**		
1151.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**6.234.115.189**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
								0,00			
1152.	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			24.617.978		-	0,00	0,00		
1153.	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			19.456.558		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0,00			
1154.	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			991.100		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
1155.	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			988.900		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
1156.	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.122.120		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
1157.	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.059.300		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
1158.	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.247.126.599		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1159.	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.147.879.780		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74		0		0,00			
1160.	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			69.102.220		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0,00			
1161.	2.17.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			28.348.400		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		0		0,00			
1162.	2.17.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.796.199		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1		0		0,00			
1163.	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			149.271.430		-	0,00	0,00		
1164.	2.17.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5.571.400		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		0,00			
1165.	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			143.700.030		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0,00			
1166.	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			276.715.264		-	0,00	0,00		
1167.	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.040.730		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1168.	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.820.530		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1169.	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.258.730		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		0		0,00			
1170.	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			81.722.540		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1171.	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			158.947.534		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		0,00			
1172.	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2.925.200		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1173.	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.611.350		-	0,00	0,00		
1174.	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			38.611.350		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0,00			
1175.	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			391.542.768		-	0,00	0,00		
1176.	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.300.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0,00			
1177.	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			96.074.412		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0,00			
1178.	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			292.168.356		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0,00			
1179.	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			103.833.400		-	0,00	0,00		
1180.	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			44.618.400		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		0,00			
1181.	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			39.913.600		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		0		0,00			
1182.	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			19.301.400		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		0,00			
1183.	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0,00			
1184.	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi			2.396.400		-	0,00	0,00		
1185.	2.17.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			2.396.400		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0,00			
1186.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**			**72.560.610**		**68.888.923**	**100,00**	**94,94**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0				0,00			
1187.	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			72.560.610		68.888.923	100,00	94,94		
		Terselenggaranya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi									
1188.	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			72.560.610		68.888.923	100,00	94,94		
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	10		10		100,00			
1189.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0				0,00			
1190.	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian									
1191.	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	0		0		0,00			
1192.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	0		32		0,00			
1193.	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi									
1194.	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	0		0		0,00			
1195.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**			**148.263.399**		**146.195.316**	**2,00**	**98,61**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	0		0		0,00			
1196.	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			148.263.399		146.195.316	2,00	98,61		
		Terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan UMKM									
1197.	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			148.263.399		146.195.316	2,00	98,61		
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	500		10		2,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1198.	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0		0		0,00			
1199.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	0				0,00			
1200.	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya skala usaha menjadi usaha kecil									
1201.	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			-		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	0		0		0,00			
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			**4.965.610.288**		**4.472.823.195**	**89,45**	**90,08**		
1202.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.121.490.148**		**3.817.395.101**	**89,68**	**92,62**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		93,47		0,00			
1203.	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.366.400		22.547.600	114,29	116,43		
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah									
1204.	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2.066.400		3.547.600	100,00	171,68		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		3		100,00			
1205.	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.700.000		3.400.000	100,00	200,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1206.	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.400.000		1.400.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3		3		100,00			
1207.	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.500.000		2.500.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1208.	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.400.000		1.400.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3		3		100,00			
1209.	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.200.000		6.200.000	100,00	100,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		100,00			
1210.	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.100.000		4.100.000	200,00	100,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		2		200,00			
1211.	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.812.488.657		2.471.130.246	96,83	87,86		
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu									
1212.	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.803.607.857		2.462.453.046	90,48	87,83		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	21		19		90,48			
1213.	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			723.200		1.579.600	100,00	218,42		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1214.	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			8.157.600		7.097.600	100,00	87,01		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2		100,00			
1215.	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			1.062.800		1.062.800	100,00	100,00		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat SKPD									
1216.	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1.062.800		1.062.800	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		2		100,00			
1217.	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat SKPD									
1218.	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0		0,00			
1219.	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	13		0		0,00			
1220.	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			255.442.000		339.436.457	87,50	132,88		
		Persentase pelaksaanaan pelayanan administrasi umum SKPD									
1221.	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.907.800		5.639.000	100,00	81,63		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1222.	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.451.400		4.100.000	100,00	75,21		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1223.	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			8.774.800		8.462.500	100,00	96,44		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1224.	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.796.500		6.540.000	100,00	96,23		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		4		100,00			
1225.	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			51.521.300		49.937.000	100,00	96,92		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1226.	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.771.400		17.275.000	100,00	196,95		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		4		100,00			
1227.	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			167.218.800		247.482.957	100,00	148,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	79		79		100,00			
1228.	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
1229.	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			251.679.600		190.024.072	50,00	75,50		
		Jumlah paket unit pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya									
1230.	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
1231.	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			251.679.600		190.024.072	100,00	75,50		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100,00			
1232.	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			471.131.100		467.206.996	100,00	99,17		
		Jumlah Laporan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang SKPD									
1233.	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			67.750.500		43.989.333	100,00	64,93		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		100,00			
1234.	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			34.029.300		30.878.000	100,00	90,74		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		3		100,00			
1235.	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			369.351.300		392.339.663	100,00	106,22		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
1236.	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			307.519.591		323.186.930	150,00	105,09		
		Jumlah unit kendaraan yang dipelihara dan dilunasi pajaknya									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1237.	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			201.404.400		147.117.000	100,00	73,05		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14		14		100,00			
		Jumlah paket pemeliharaan/Rehabilitasi Sapras Gendung Kantor atau Bangunan Lainnya									
1238.	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			106.115.191		176.069.930	200,00	165,92		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		2		200,00			
1239.	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi			2.800.000		2.800.000	50,00	100,00		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi									
1240.	2.18.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1.400.000		1.400.000	50,00	100,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	2		1		50,00			
1241.	2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1.400.000		1.400.000	50,00	100,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		1		50,00			
1242.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**			**39.769.200**		**33.345.400**	**100,00**	**83,85**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	0		90,69		0,00			
1243.	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah									
1244.	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0		0		0,00			
1245.	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			39.769.200		33.345.400	100,00	83,85		
		Realisasi Total terhadap Target Investasi									
1246.	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			19.690.300		14.486.600	100,00	73,57		
		Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
1247.	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			20.078.900		18.858.800	100,00	93,92		
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
1248.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**			**372.350.640**		**204.468.600**	**100,00**	**54,91**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	0		83,97		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1249.	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			372.350.640		204.468.600	100,00	54,91		
		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi									
1250.	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			203.948.750		69.507.400	100,00	34,08		
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
1251.	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			168.401.890		134.961.200	100,00	80,14		
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		1		100,00			
1252.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**			**229.119.500**		**218.490.185**	**91,67**	**95,36**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	0		95,36		0,00			
1253.	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			229.119.500		218.490.185	91,67	95,36		
		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan									
1254.	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik			129.439.700		128.340.145	75,00	99,15		
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	200		150		75,00			
1255.	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			35.174.800		30.969.262	100,00	88,04		
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	4		4		100,00			
1256.	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			64.505.000		59.180.778	100,00	91,75		
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	25		25		100,00			
1257.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**174.590.200**		**189.468.909**	**67,36**	**108,52**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	0		98,13		0,00			
1258.	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			174.590.200		189.468.909	67,36	108,52		
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha									
1259.	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			66.177.600		58.566.300	80,65	88,50		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	217		175		80,65			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha									
1260.	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya			32.252.800		31.538.609	50,00	97,79		
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	8		4		50,00			
		Pengawasan Penanaman Modal									
1261.	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			76.159.800		99.364.000	71,43	130,47		
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	14		10		71,43			
1262.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**			**28.290.600**		**9.655.000**	**100,00**	**34,13**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	0		98,6		0,00			
1263.	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			28.290.600		9.655.000	100,00	34,13		
		Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelauanan Perizinan Berusaha yang Terintegrasi secara Elekstronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan									
1264.	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			28.290.600		9.655.000	100,00	34,13		
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	3		3		100,00			
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			**8.740.615.000**		**8.246.893.826**	**94,44**	**94,35**		
1265.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**			**1.412.917.080**		**1.579.736.590**	**100,00**	**111,81**	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0		92		0,00			
1266.	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			1.362.917.080		1.529.736.590	100,00	112,24		
		Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor ,Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Tingkat Daerah									
1267.	2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota			223.661.000		305.052.002	100,00	136,39		
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1268.	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota			311.258.200		568.184.200	0,00	182,54		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	0		50		0,00			
1269.	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda			430.877.000		134.807.388	0,00	31,29		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	0		50		0,00			
1270.	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota			156.150.000		284.581.000	0,00	182,25		
		Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	0		1		0,00			
1271.	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota			240.970.880		237.112.000	0,00	98,40		
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	0		50		0,00			
1272.	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000		50.000.000	0,00	100,00		
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota									
1273.	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			50.000.000		50.000.000	0,00	100,00		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	0		1		0,00			
1274.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**			**6.927.697.920**		**6.267.157.236**	**100,00**	**90,47**	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Peningkatan Prestasi Oahraga (%)	100				0,00			
			(1) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (2) Tingkat Prestasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan (3) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (4) Peningkatan Prestasi Olahraga (%)	100				0,00			
			Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0		95		0,00			
1275.	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			393.810.000		789.206.516	0,00	200,40		
		Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah									
1276.	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota			393.810.000		789.206.516	0,00	200,40		
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	0		1		0,00			
1277.	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			779.462.000		285.166.000	100,00	36,58		
		jumlah kejuaraan yang diselenggarakan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1278.	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			473.587.000		285.166.000	100,00	60,21		
		Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1		1		100,00			
1279.	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga			305.875.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	0		0		0,00			
1280.	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			1.566.571.306		401.616.032	25,00	25,64		
		persentase atlet berprestasi									
1281.	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah			572.112.237		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	125		0		0,00			
1282.	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga			349.999.895		401.616.032	100,00	114,75		
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	5		5		100,00			
1283.	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			262.448.188		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science) (Pelatda)	1		0		0,00			
1284.	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			382.010.986		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	50		0		0,00			
1285.	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			1.700.000.000		1.700.000.000	400,00	100,00		
		peningkatan prestasi, daya saing, dan partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta pengembangan industri keolahragaan dan pemanfaatan sarana prasarana.									
1286.	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			1.700.000.000		1.700.000.000	400,00	100,00		
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		4		400,00			
1287.	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			2.487.854.614		3.091.168.688	100,00	124,25		
		Jumlah Prasarana dan Sarana Olahraga kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan									
1288.	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan			2.487.854.614		3.091.168.688	100,00	124,25		
		Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	5		5		100,00			
1289.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**			**400.000.000**		**400.000.000**	**50,00**	**100,00**	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0		100		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
			(1) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (2) Tingkat Prestasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan (3) Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (4) Peningkatan Prestasi Olahraga () (%)	100				0,00			
1290.	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			400.000.000		400.000.000	50,00	100,00		
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya									
1291.	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			400.000.000		400.000.000	50,00	100,00		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya (Organisasi)	2		1		50,00			
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**118.918.202**		**254.964.980**	**155,86**	**214,40**		
1292.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**			**118.918.202**		**254.964.980**	**155,86**	**214,40**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	(2). Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Permendagri 18 tahun 2020) (Persen)	(2). 100				0,00			
			(1). Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Nilai)	(1). 2				0,00			
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	0		2,16		0,00			
			(3). Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (Permendagri 18 tahun 2020) (Persen)	(3). 100				0,00			
1293.	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			118.918.202		254.964.980	155,86	214,40		
		Terlaksananya Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik yang akurat dan terperinci untuk sektor-sektor tertentu, yang mendukung Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.									
1294.	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			20.912.882		38.704.500	98,68	185,07		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	76		75		98,68			
1295.	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			46.736.600		42.279.200	88,89	90,46		
		Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu (Persentase)	90		80		88,89			
1296.	2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			51.268.720		51.287.220	280,00	100,04		
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik (Dokumen)	5		14		280,00			
1297.	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0		0		0,00			
1298.	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	0		0		0,00			
1299.	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			-		122.694.060	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0		9		0,00			
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**85.111.769**		**176.194.344**	**125,00**	**207,02**		
1300.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**			**85.111.769**		**176.194.344**	**125,00**	**207,02**	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	(1). Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (RPD 2025-2026) (Persen)	(1). 35				0,00			
			(3). Persentase pelaksanaan prosedur pengamanan informasi pada perangkat daerah (Renstra 2025-2026) (Persen)	(3). 10,25				0,00			
			(3). Persentase pelaksanaan prosdur pengamanan informasi pada perangkat daerah (Renstra 2025-2026) (Persen)	(3). 10,25				0,00			
			(2). Persentase penilaian resiko keamanan informasi (Renstra 2025-2026) (Persen)	(2). 18,72				0,00			
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	0		55		0,00			
1301.	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			85.111.769		176.194.344	166,67	207,02		
		Terselenggaranya Pengembangan Sistem Keamanan untuk Pengamanan Data Elektronik Pemerintah Daerah									
1302.	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-		8.056.500	100,00	0,00		
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	2		2		100,00			
1303.	2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			62.305.221		91.885.284	300,00	147,48		
		Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		3		300,00			
1304.	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			22.806.548		21.061.140	100,00	92,35		
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	2		2		100,00			
1305.	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	0		0		0,00			
1306.	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			-		55.191.420	0,00	0,00		
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	0		3		0,00			
1307.	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1308.	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
1309.	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Operasioalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Perangkat Daerah)	1		0		0,00			
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**9.661.228.324**		**10.255.183.129**	**55,46**	**106,15**		
1310.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.867.775.194**		**5.557.406.163**	**29,71**	**94,71**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						29,71			
1311.	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			17.311.400		15.928.950	75,00	92,01		
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1312.	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.135.100		4.115.000	100,00	99,51		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1313.	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.135.100		3.843.400	100,00	92,95		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1314.	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			5.940.000		5.240.000	0,00	88,22		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
1315.	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.101.200		2.730.550	100,00	88,05		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1316.	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.955.098.069		4.713.393.087	33,33	95,12		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1317.	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.942.072.569		4.683.481.687	100,00	94,77		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		50		100,00			
1318.	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.825.500		5.325.000	0,00	91,41		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0,00			
1319.	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			7.200.000		24.586.400	0,00	341,48		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		0,00			
1320.	2.22.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1321.	2.22.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7		0		0,00			
1322.	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.884.560		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1323.	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0,00			
1324.	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			7.884.560		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0		0,00			
1325.	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			258.616.900		381.828.946	29,72	147,64		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1326.	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			24.962.900		9.310.000	6,67	37,30		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15		1		6,67			
1327.	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58.282.000		73.436.000	100,00	126,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1328.	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.967.600		32.235.000	50,00	201,88		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50,00			
1329.	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.706.800		6.540.000	20,00	97,51		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		1		20,00			
1330.	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1331.	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			152.697.600		260.307.946	1,67	170,47		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		1		1,67			
1332.	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.800.000		62.700.000	80,00	165,87		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1333.	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			
1334.	2.22.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1335.	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			37.800.000		62.700.000	80,00	165,87		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		8		80,00			
1336.	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			406.509.520		365.684.180	8,33	89,96		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1337.	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			145.246.050		125.239.524	8,33	86,23		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		1		8,33			
1338.	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			46.020.000		34.367.028	8,33	74,68		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		1		8,33			
1339.	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			215.243.470		206.077.628	8,33	95,74		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		1		8,33			
1340.	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			179.683.745		13.000.000	0,00	7,23		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1341.	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			166.603.800		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9		0		0,00			
1342.	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		0,00			
1343.	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		13.000.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0,00			
1344.	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			13.079.945		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0,00			
1345.	2.22.01.2.13	Penataan Organisasi			4.871.000		4.871.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Penataan Organisasi									
1346.	2.22.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			4.871.000		4.871.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		0		0,00			
1347.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**			**2.927.860.000**		**4.296.379.100**	**71,11**	**146,74**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0		99,85		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1348.	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.265.860.000		1.105.864.100	13,33	87,36		
		Meningkatnya presentasi pelaku kebudayaan Dalam Daerah									
1349.	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			1.265.860.000		1.105.864.100	13,33	87,36		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	15		2		13,33			
1350.	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.662.000.000		3.190.515.000	100,00	191,97		
		Meningkatnya presentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1351.	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			162.000.000		503.615.000	100,00	310,87		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		1		100,00			
1352.	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			1.500.000.000		2.686.900.000	100,00	179,13		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2		2		100,00			
1353.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**			**48.683.200**		**56.374.000**	**0,00**	**115,80**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						0,00			
1354.	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			48.683.200		56.374.000	0,00	115,80		
		Presentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1355.	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			48.683.200		56.374.000	0,00	115,80		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	80		0		0,00			
1356.	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1		0		0,00			
1357.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**			**188.629.920**		**205.723.686**	**50,00**	**109,06**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0		263,51		0,00			
1358.	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			188.629.920		205.723.686	50,00	109,06		
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Akses Masyarakat terhadap data dan Informasi Sejara									
1359.	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	20		0		0,00			
1360.	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah			188.629.920		205.723.686	100,00	109,06		
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1361.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**			**615.317.610**		**38.819.100**	**200,00**	**6,31**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	0		99,78		0,00			
1362.	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			64.864.000		38.819.100	400,00	59,85		
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan									
1363.	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			12.100.800		12.082.000	400,00	99,84		
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	10		40		400,00			
1364.	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			52.763.200		26.737.100	400,00	50,67		
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	4		16		400,00			
1365.	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			550.453.610		-	0,00	0,00		
1366.	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			265.636.410		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	14		0		0,00			
1367.	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			284.817.200		-	0,00	0,00		
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	1		0		0,00			
1368.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**			**12.962.400**		**100.481.080**	**100,00**	**775,17**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	0		99,99		0,00			
1369.	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			12.962.400		100.481.080	100,00	775,17		
		Terpeliharanya Museum yang dikelola									
1370.	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			7.406.500		7.403.400	100,00	99,96		
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2		2		100,00			
1371.	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			5.555.900		93.077.680	100,00	1.675,29		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		1		100,00			
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**6.641.831.354**		**6.143.453.691**	**31,80**	**92,50**		
1372.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.535.855.314**		**4.988.022.387**	**42,80**	**90,10**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		45		0,00			
1373.	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.603.600		69.580.300	66,67	129,81		
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
1374.	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			24.223.730		29.026.500	33,33	119,83		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		2		33,33			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1375.	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			29.379.870		40.553.800	100,00	138,03		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6		6		100,00			
1376.	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.193.603.645		3.778.336.230	71,67	90,10		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1377.	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.180.817.645		3.766.951.230	43,33	90,10		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		13		43,33			
1378.	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.786.000		11.385.000	100,00	89,04		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1379.	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			481.950		14.310.800	100,00	2.969,35		
		Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1380.	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			481.950		14.310.800	100,00	2.969,35		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1381.	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.444.399		44.109.041	1,92	97,06		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1382.	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30		0		0,00			
1383.	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			2.223.219		1.957.875	0,00	88,06		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		0,00			
1384.	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			2.438.248		1.907.600	0,00	78,24		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2		0		0,00			
1385.	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40.782.933		40.243.566	7,69	98,68		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	13		1		7,69			
1386.	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			412.343.862		470.972.409	52,42	114,22		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1387.	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.692.509		20.619.249	0,00	99,65		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1388.	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			149.233.986		143.793.003	100,00	96,35		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1389.	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			30.000.000		29.972.250	38,46	99,91		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	13		5		38,46			
1390.	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			30.611.360		30.573.490	0,00	99,88		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0,00			
1391.	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			7.493.832		7.488.032	0,00	99,92		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1392.	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			10.267.200		5.540.000	33,33	53,96		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		1		33,33			
1393.	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			30.011.625		29.934.424	100,00	99,74		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	42		42		100,00			
1394.	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			125.740.300		195.137.161	100,00	155,19		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	114		114		100,00			
1395.	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			8.293.050		7.914.800	100,00	95,44		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100		100		100,00			
1396.	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			731.094.058		521.464.507	23,33	71,33		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1397.	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2.500.000		2.500.000	20,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		30		20,00			
1398.	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			280.806.698		110.857.857	50,00	39,48		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		1		50,00			
1399.	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			447.787.360		408.106.650	0,00	91,14		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0,00			
1400.	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			99.283.800		89.249.100	29,17	89,89		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1401.	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			40.073.721		37.949.300	25,00	94,70		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		1		25,00			
1402.	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			31.956.801		35.394.800	33,33	110,76		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6		2		33,33			
1403.	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			27.253.278		15.905.000	0,00	58,36		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		0,00			
1404.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**			**988.788.240**		**1.004.118.590**	**13,37**	**101,55**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase Program Pembinaan Perpustakaan (%)	0		27		0,00			
1405.	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			414.003.890		424.265.902	12,20	102,48		
		Persentase Progrram Pembinaan Perpustakaan									
1406.	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0		0		0,00			
1407.	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	5		0		0,00			
1408.	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	0		0		0,00			
1409.	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat			26.770.600		26.544.102	5,40	99,15		
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	500		27		5,40			
1410.	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi			-		-	0,00	0,00		
		Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	1		0		0,00			
1411.	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		0,00			
1412.	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan			75.000.000		74.868.700	0,00	99,82		
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	1		0		0,00			
1413.	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan			202.378.290		219.554.300	80,00	108,49		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	10		8		80,00			
1414.	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota			100.000.000		93.443.800	0,00	93,44		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	50		0		0,00			
1415.	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			9.855.000		9.855.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	1		0		0,00			
1416.	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			574.784.350		579.852.688	15,00	100,88		
		Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1417.	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			104.648.750		134.252.100	16,67	128,29		
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	6		1		16,67			
1418.	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			104.990.600		104.974.888	33,33	99,99		
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	6		2		33,33			
1419.	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			15.145.000		15.145.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Perpustakaan)	1		0		0,00			
1420.	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			150.000.000		149.722.854	0,00	99,82		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	20		0		0,00			
1421.	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat			200.000.000		175.757.846	25,00	87,88		
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	4		1		25,00			
1422.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**			**117.187.800**		**151.312.714**	**0,00**	**129,12**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno (%)	0		28		0,00			
1423.	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			76.208.250		111.009.164	0,00	145,67		
		Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota									
1424.	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			76.208.250		111.009.164	0,00	145,67		
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	0		0		0,00			
1425.	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			40.979.550		40.303.550	0,00	98,35		
		Persentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
1426.	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	0		0		0,00			
1427.	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			40.979.550		40.303.550	0,00	98,35		
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	100		0		0,00			
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**608.195.782**		**658.071.159**	**34,05**	**108,20**		
1428.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**			**608.195.782**		**658.071.159**	**39,72**	**108,20**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Program Pengelolaan Arsip (%)	0		40		0,00			
1429.	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			573.718.646		623.282.520	50,83	108,64		
		Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota									
1430.	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			125.857.451		113.931.182	8,33	90,52		
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	300		25		8,33			
1431.	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			3.628.900		11.615.000	55,00	320,07		
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	300		165		55,00			
1432.	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			194.232.295		250.112.859	40,00	128,77		
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	10		4		40,00			
1433.	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis			250.000.000		247.623.479	100,00	99,05		
		Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	1		1		100,00			
1434.	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			34.477.136		34.788.639	35,00	100,90		
		Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota									
1435.	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			34.477.136		34.788.639	35,00	100,90		
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	200		70		35,00			
1436.	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota									
1437.	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		0,00			
1438.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Terpenuhinya Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	0				0,00			
1439.	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Terpenuhinya Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip									
1440.	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	150		0		0,00			
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**			**1.551.812.705**		**7.603.601.379**	**52,69**	**489,98**		
1441.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**-**		**6.027.557.197**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perikanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		100		0,00			
1442.	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		62.056.739	0,00	0,00		
		Terlaksananya dan Tersusunnya Kegiatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1443.	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		10.784.300	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0		2		0,00			
1444.	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		51.272.439	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		4		0,00			
1445.	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-		4.965.487.162	0,00	0,00		
		Tersedianya dan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1446.	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			-		4.907.535.210	0,00	0,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0		480		0,00			
1447.	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		57.951.952	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		2		0,00			
1448.	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		964.600	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1449.	3.25.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			-		964.600	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		1		0,00			
1450.	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		76.477.427	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1451.	3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1452.	3.25.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-		42.837.052	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		10		0,00			
1453.	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-		33.640.375	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		5		0,00			
1454.	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-		338.650.942	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1455.	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		3.830.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		4		0,00			
1456.	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		67.659.002	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		4		0,00			
1457.	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-		9.605.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		4		0,00			
1458.	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			-		11.415.950	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		6		0,00			
1459.	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			-		7.980.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0		6		0,00			
1460.	3.25.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		55.769.840	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		5		0,00			
1461.	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			-		3.336.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0		9		0,00			
1462.	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			-		179.055.150	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0		70		0,00			
1463.	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-		261.400.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1464.	3.25.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		261.400.000	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		1		0,00			
1465.	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		197.024.699	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1466.	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			-		4.260.000	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0		2		0,00			
1467.	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-		38.891.965	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		12		0,00			
1468.	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			-		153.872.734	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		2		0,00			
1469.	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-		125.495.628	0,00	0,00		
		Tersedia dan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1470.	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		96.917.990	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		25		0,00			
1471.	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		22.584.800	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		23		0,00			
1472.	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		5.992.838	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0,00			
1473.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**			**146.338.340**		**139.721.538**	**58,33**	**95,48**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	175		170,06		97,18			
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah PUD (Ton)	0		170,06		0,00			
1474.	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			86.467.180		134.051.538	37,50	155,03		
		Meningkatnya Tangkapan Ikan di Wilayah PUD									
1475.	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			86.467.180		134.051.538	75,00	155,03		
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	20		15		75,00			
1476.	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	10		0		0,00			
1477.	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			59.871.160		5.670.000	100,00	9,47		
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil									
1478.	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			59.871.160		5.670.000	100,00	9,47		
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	50		50		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1479.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**			**1.185.269.245**		**1.211.541.715**	**41,88**	**102,22**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	0		1.277,37		0,00			
			Jumlah Produksi Benih (Ekor)	150.000		67.200		44,80			
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.350		1.277,37		94,62			
1480.	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			148.765.890		134.360.156	26,67	90,32		
		Meningkatnya Pengetahuan Tentang Budidaya Perikanan dan Pembentukan/Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan									
1481.	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5		0		0,00			
1482.	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			148.765.890		134.360.156	80,00	90,32		
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	5		4		80,00			
1483.	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	2		0		0,00			
1484.	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.036.503.355		1.077.181.559	51,00	103,92		
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya									
1485.	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			66.573.760		81.433.652	75,00	122,32		
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	20		15		75,00			
1486.	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			169.857.313		163.764.139	40,00	96,41		
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		2		40,00			
1487.	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			587.305.132		631.485.388	40,00	107,52		
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		2		40,00			
1488.	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			-		-	0,00	0,00		
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	1		0		0,00			
1489.	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			212.767.150		200.498.380	100,00	94,23		
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	5		5		100,00			
1490.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**			**220.205.120**		**224.780.929**	**87,50**	**102,08**	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)	35		35,41		101,17			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	0		37,2		0,00			
1491.	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			72.786.220		85.744.504	75,00	117,80		
		Meningkatnya Produksi Hasil Usaha Perikanan									
1492.	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko			72.786.220		85.744.504	75,00	117,80		
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	20		15		75,00			
1493.	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			147.418.900		139.036.425	100,00	94,31		
		Meningkatnya Konsumsi Olahan Ikan untuk Masyarakat									
1494.	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			147.418.900		139.036.425	100,00	94,31		
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	35		35		100,00			
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**			**538.275.435**		**421.469.174**	**47,69**	**78,30**		
1495.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**			**68.625.213**		**74.159.744**	**19,79**	**108,06**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0		228,03		0,00			
1496.	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			52.615.800		74.159.744	26,39	140,95		
		Persentase Pengalolaan Kawasan Strategis Pariwisata									
1497.	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0,00			
1498.	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			39.435.800		60.980.288	66,67	154,63		
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	3		2		66,67			
1499.	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			13.180.000		13.179.456	12,50	100,00		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	8		1		12,50			
1500.	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			16.009.413		-	0,00	0,00		
1501.	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			16.009.413		-	0,00	0,00		
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		0		0,00			
1502.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**			**215.241.082**		**224.690.300**	**50,00**	**104,39**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	0		9,44		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1503.	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			215.241.082		224.690.300	50,00	104,39		
		Promosi Pariwisata yang berkelanjutan									
1504.	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			13.745.100		23.211.400	50,00	168,87		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	2		1		50,00			
1505.	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			201.495.982		201.478.900	100,00	99,99		
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2		2		100,00			
1506.	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	4		0		0,00			
1507.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**			**27.284.910**		**27.284.000**	**100,00**	**100,00**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0		99,99		0,00			
1508.	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifÂ			27.284.910		27.284.000	100,00	100,00		
		Presentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif									
1509.	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif			27.284.910		27.284.000	100,00	100,00		
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif (Promosi)	1		1		100,00			
1510.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**			**227.124.230**		**95.335.130**	**100,00**	**41,97**	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						100,00			
1511.	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			227.124.230		95.335.130	100,00	41,97		
		Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar									
1512.	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI			-		-	0,00	0,00		
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	0		0		0,00			
1513.	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			227.124.230		95.335.130	100,00	41,97		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	4		4		100,00			
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**19.835.392.680**		**18.453.864.249**	**88,05**	**93,04**		
1514.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.738.166.754**		**12.636.092.938**	**86,18**	**91,98**	DINAS PERTANIAN	
		TERPENUHINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		91,98		0,00			
1515.	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.136.134		41.881.615	50,00	126,39		
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1516.	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.136.134		37.905.615	0,00	130,10		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		0		0,00			
1517.	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1.500.000		1.493.600	100,00	99,57		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
1518.	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.500.000		2.482.400	100,00	99,30		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
1519.	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0,00			
1520.	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.512.169.591		10.284.175.221	100,00	89,33		
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan									
1521.	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.488.378.541		10.256.159.721	100,00	89,27		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	86		86		100,00			
1522.	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			23.791.050		28.015.500	100,00	117,76		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
1523.	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42.578.500		52.789.700	100,00	123,98		
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1524.	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			42.578.500		52.789.700	100,00	123,98		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1525.	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			25.687.565		26.222.400	87,50	102,08		
		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1526.	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		2.250.000	100,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100,00			
1527.	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			25.687.565		23.972.400	75,00	93,32		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		3		75,00			
1528.	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			357.189.934		439.388.655	83,33	123,01		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1529.	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.335.000		29.815.000	100,00	194,42		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1530.	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			71.250.000		69.435.385	0,00	97,45		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1531.	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.573.776		15.573.600	100,00	100,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1532.	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.984.000		9.984.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		100,00			
1533.	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			19.516.550		7.016.550	100,00	35,95		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1534.	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			225.530.608		307.564.120	100,00	136,37		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100		100		100,00			
1535.	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			272.757.900		266.237.899	80,00	97,61		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1536.	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			141.450.000		135.854.999	60,00	96,04		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		3		60,00			
1537.	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			131.307.900		130.382.900	100,00	99,30		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		100,00			
1538.	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			536.978.980		517.671.888	111,11	96,40		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1539.	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000		5.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
1540.	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			147.180.000		143.269.835	133,33	97,34		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		4		133,33			
1541.	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			384.798.980		369.402.053	100,00	96,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
1542.	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			957.668.150		1.007.725.560	100,00	105,23		
		Tersedia dan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1543.	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			220.794.450		258.252.183	100,00	116,96		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	25		25		100,00			
1544.	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			600.000.000		614.998.377	100,00	102,50		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	1		1		100,00			
1545.	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.873.700		36.746.000	100,00	99,65		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		20		100,00			
1546.	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000		97.729.000	100,00	97,73		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
1547.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**			**2.928.624.680**		**2.898.277.883**	**66,67**	**98,96**	DINAS PERTANIAN	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	0		1.092,83		0,00			
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase)	0		476,42		0,00			
			Peningkatan Produksi Peternakan (Ton)	0		5.242,91		0,00			
1548.	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2.479.749.455		2.436.379.983	100,00	98,25		
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									
1549.	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			2.142.610.392		2.112.491.783	100,00	98,59		
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1		1		100,00			
1550.	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			337.139.063		323.888.200	100,00	96,07		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1		1		100,00			
1551.	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota									
1552.	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman			-		-	0,00	0,00		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB))	0		0		0,00			
1553.	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			448.875.226		461.897.900	0,00	102,90		
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain									
1554.	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			432.515.226		445.576.900	0,00	103,02		
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	0		10		0,00			
1555.	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			16.360.000		16.321.000	0,00	99,76		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	10000		0		0,00			
1556.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**			**1.673.504.942**		**1.588.823.951**	**147,00**	**94,94**	DINAS PERTANIAN	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN	Persentase Terlaksananya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	0		94,94		0,00			
			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	0		1.298,02		0,00			
1557.	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			1.130.814.942		1.042.678.521	244,00	92,21		
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian									
1558.	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			355.381.942		327.209.321	100,00	92,07		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	1		1		100,00			
1559.	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian			737.833.000		707.205.800	532,00	95,85		
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan (Ha)	250		1.330		532,00			
1560.	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota			37.600.000		8.263.400	100,00	21,98		
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	1		1		100,00			
1561.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			542.690.000		546.145.430	50,00	100,64		
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian									
1562.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			240.000.000		237.412.830	25,00	98,92		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4		1		25,00			
1563.	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			236.380.000		234.193.000	25,00	99,07		
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4		1		25,00			
1564.	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			66.310.000		74.539.600	100,00	112,41		
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	1		1		100,00			
1565.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**			**290.071.796**		**265.268.843**	**75,00**	**91,45**	DINAS PERTANIAN	
		PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase)	0		100		0,00			
			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms) (%)	0		100		0,00			
1566.	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			235.583.900		210.988.843	100,00	89,56		
		Terlaksananya Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota									
1567.	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis			161.862.750		140.566.343	100,00	86,84		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis (Orang)	1		1		100,00			
1568.	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			73.721.150		70.422.500	100,00	95,53		
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan)	3		3		100,00			
1569.	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			54.487.896		54.280.000	50,00	99,62		
		Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner									
1570.	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan			35.543.086		35.423.000	100,00	99,66		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan (Orang)	1		1		100,00			
1571.	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan			18.944.810		18.857.000	0,00	99,54		
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik (Unit Usaha)	1		0		0,00			
1572.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**			**72.266.150**		**70.433.500**	**100,00**	**97,46**	DINAS PERTANIAN	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	0		97,46		0,00			
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	0		100		0,00			
1573.	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			72.266.150		70.433.500	100,00	97,46		
		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									
1574.	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			55.651.850		54.096.400	100,00	97,21		
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	5		5		100,00			
1575.	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			16.614.300		16.337.100	100,00	98,33		
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	5		5		100,00			
1576.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**			**111.171.533**		**98.903.067**	**50,00**	**88,96**	DINAS PERTANIAN	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian (%)	0				0,00			
1577.	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			111.171.533		98.903.067	50,00	88,96		
		Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota									
1578.	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	1		0		0,00			
1579.	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian			111.171.533		98.903.067	100,00	88,96		
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1580.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**			**1.021.586.825**		**896.064.067**	**60,00**	**87,71**	DINAS PERTANIAN	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan (%)	0				0,00			
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi (%)	0				0,00			
1581.	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			1.021.586.825		896.064.067	60,00	87,71		
		Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									
1582.	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			323.206.925		242.069.377	0,00	74,90		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		0		0,00			
1583.	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			326.084.300		315.943.290	100,00	96,89		
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	2		2		100,00			
1584.	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			35.526.600		31.125.800	0,00	87,61		
		Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	1		0		0,00			
1585.	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			80.269.000		73.225.600	100,00	91,23		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	6		6		100,00			
1586.	3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian			256.500.000		233.700.000	100,00	91,11		
		Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	44		44		100,00			
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**			**804.024.299**		**789.481.209**	**90,00**	**98,19**		
1587.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**804.024.299**		**789.481.209**	**90,00**	**98,19**	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	
		meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Poin)	0				0,00			
1588.	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			804.024.299		789.481.209	90,00	98,19		
		meningkatnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota									
1589.	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota			554.368.026		570.230.900	100,00	102,86		
		Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti (Permohonan)	1		1		100,00			
1590.	3.28.04.2.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota			74.229.166		4.103.400	100,00	5,53		
		Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif (Desa)	2		2		100,00			
1591.	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA			49.429.914		42.851.178	100,00	86,69		
		Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	3		3		100,00			
1592.	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			71.821.686		101.156.131	100,00	140,84		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan (Ha)	1		1		100,00			
1593.	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota			54.175.507		71.139.600	50,00	131,31		
		Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem (Ha)	40		20		50,00			
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			**130.478.506**		**-**	**0,00**	**0,00**		
1594.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**			**130.478.506**		**-**	**0,00**	**0,00**	SEKRETARIAT DAERAH	
								0,00			
1595.	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah			130.478.506		-	0,00	0,00		
1596.	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah			130.478.506		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)	1		0		0,00			
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			**5.206.934.654**		**5.266.448.874**	**65,69**	**101,14**		
1597.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.717.644.474**		**3.714.822.474**	**61,67**	**99,92**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0				0,00			
1598.	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			11.573.100		11.573.100	100,00	100,00		
		Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1599.	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.736.000		3.736.000	100,00	100,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		35		100,00			
1600.	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.755.000		3.755.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	35		35		100,00			
1601.	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.706.500		1.706.500	0,00	100,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		1		0,00			
1602.	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2.375.600		2.375.600	100,00	100,00		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2		2		100,00			
1603.	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.126.615.406		3.126.615.406	100,00	100,00		
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1604.	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.110.739.906		3.110.739.906	0,00	100,00		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	0		0		0,00			
1605.	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.611.500		11.611.500	0,00	100,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		0,00			
1606.	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			4.264.000		4.264.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2		2		100,00			
1607.	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
1608.	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		0		0,00			
1609.	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.822.000		-	0,00	0,00		
		Terpenuhinya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah									
1610.	3.30.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			2.822.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0		0		0,00			
1611.	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	0		0		0,00			
1612.	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			60.432.120		60.432.120	0,00	100,00		
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1613.	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan ()	0		0		0,00			
1614.	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			60.432.120		60.432.120	0,00	100,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		0,00			
1615.	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			225.641.700		225.641.700	0,00	100,00		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1616.	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.540.000		8.540.000	0,00	100,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
1617.	3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			27.227.500		27.227.500	0,00	100,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
1618.	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.582.500		5.582.500	0,00	100,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0		0		0,00			
1619.	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			184.291.700		184.291.700	0,00	100,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	55		0		0,00			
1620.	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			81.313.398		81.313.398	50,00	100,00		
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1621.	3.30.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
1622.	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			81.313.398		81.313.398	100,00	100,00		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100,00			
1623.	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.800.000		58.800.000	16,67	100,00		
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1624.	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			58.800.000		58.800.000	16,67	100,00		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		2		16,67			
1625.	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148.546.750		148.546.750	100,00	100,00		
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1626.	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			106.513.750		106.513.750	0,00	100,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0		0		0,00			
1627.	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			42.033.000		42.033.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3		3		100,00			
1628.	3.30.01.2.13	Penataan Organisasi			1.900.000		1.900.000	0,00	100,00		
		Persentase Penataan Organisasi									
1629.	3.30.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1.900.000		1.900.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	0		0		0,00			
1630.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**			**17.617.400**		**17.617.400**	**100,00**	**100,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0				0,00			
1631.	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			1.070.000		1.070.000	100,00	100,00		
		Terpenuhinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan									
1632.	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1.070.000		1.070.000	100,00	100,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	35		35		100,00			
1633.	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	0		0		0,00			
1634.	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			16.547.400		16.547.400	100,00	100,00		
		Terpenuhinya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat									
1635.	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C			16.547.400		16.547.400	100,00	100,00		
		Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	50		50		100,00			
1636.	3.30.02.2.05.0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (dokumen)	0		0		0,00			
1637.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**			**1.044.119.180**		**1.106.455.400**	**60,00**	**105,97**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	0				0,00			
1638.	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			21.909.700		21.909.700	100,00	100,00		
		Persentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
1639.	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat			21.909.700		21.909.700	100,00	100,00		
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1		1		100,00			
1640.	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			1.021.945.480		1.084.545.700	100,00	106,13		
		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
1641.	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			26.468.000		26.468.000	100,00	100,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	1		1		100,00			
1642.	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			995.477.480		1.058.077.700	100,00	106,29		
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	12		12		100,00			
1643.	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			264.000		-	0,00	0,00		
1644.	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan			-		-	0,00	0,00		
		Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	6		0		0,00			
1645.	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			264.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	12		0		0,00			
1646.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**			**211.788.401**		**211.788.401**	**0,00**	**100,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	0				0,00			
1647.	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			211.788.401		211.788.401	0,00	100,00		
		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									
1648.	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			114.787.200		114.787.200	0,00	100,00		
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	0		0		0,00			
1649.	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			97.001.201		97.001.201	0,00	100,00		
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	0		0		0,00			
1650.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**			**215.765.200**		**215.765.200**	**0,00**	**100,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0				0,00			
1651.	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			215.765.200		215.765.200	0,00	100,00		
		Terpenuhinya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									
1652.	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Orang)	0		0		0,00			
1653.	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			215.765.200		215.765.200	0,00	100,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	0		0		0,00			
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			**837.875.784**		**261.752.789**	**46,15**	**31,24**		
1654.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**576.122.995**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
								0,00			
1655.	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.450.000		-	0,00	0,00		
1656.	3.31.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			1.450.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12		0		0,00			
1657.	3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			11.070.500		-	0,00	0,00		
1658.	3.31.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			7.406.500		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		0		0,00			
1659.	3.31.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3.664.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		0		0,00			
1660.	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			38.265.000		-	0,00	0,00		
1661.	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			25.940.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
1662.	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			12.325.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
1663.	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			455.551.302		-	0,00	0,00		
1664.	3.31.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0,00			
1665.	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			452.551.302		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		0,00			
1666.	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			68.004.193		-	0,00	0,00		
1667.	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			68.004.193		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		0,00			
1668.	3.31.01.2.13	Penataan Organisasi			1.782.000		-	0,00	0,00		
1669.	3.31.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1.782.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	35		0		0,00			
1670.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**			**182.263.375**		**182.263.375**	**100,00**	**100,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	0				0,00			
1671.	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			182.263.375		182.263.375	100,00	100,00		
		Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota									
1672.	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			102.535.577		102.535.577	100,00	100,00		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	2		2		100,00			
1673.	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			19.767.300		19.767.300	100,00	100,00		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	2		2		100,00			
1674.	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			59.960.498		59.960.498	100,00	100,00		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	2		2		100,00			
1675.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	0				0,00			
1676.	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian									
1677.	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			-		-	0,00	0,00		
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1678.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**			**79.489.414**		**79.489.414**	**100,00**	**100,00**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	0				0,00			
1679.	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			79.489.414		79.489.414	100,00	100,00		
		Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									
1680.	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			22.176.000		22.176.000	100,00	100,00		
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	2		2		100,00			
1681.	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			43.758.714		43.758.714	100,00	100,00		
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	2		2		100,00			
1682.	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			13.554.700		13.554.700	100,00	100,00		
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	10		10		100,00			
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**			**103.882.920**		**110.015.037**	**100,00**	**105,90**		
1683.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**60.363.648**		**60.363.648**	**100,00**	**100,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0				0,00			
1684.	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			60.363.648		60.363.648	100,00	100,00		
		Terlaksananya pencadangan tanah kawasan transmigrasi									
1685.	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi			33.218.048		33.218.048	100,00	100,00		
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain (Dokumen)	1		1		100,00			
1686.	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan			27.145.600		27.145.600	100,00	100,00		
		Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi (Kawasan Transmigrasi)	1		1		100,00			
1687.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya kualitas pembangunan di kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)	0		70		0,00			
1688.	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terwujudnya penataan persebaran penduduk									
1689.	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Lokasi)	0		0		0,00			
1690.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**			**43.519.272**		**49.651.389**	**100,00**	**114,09**	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	0		75		0,00			
1691.	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			43.519.272		49.651.389	100,00	114,09		
		Terselenggaranya kegiatan satuan pemukiman									
1692.	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman			43.519.272		49.651.389	100,00	114,09		
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina (Kepala Keluarga)	300		300		100,00			
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**			**43.952.077.274**		**46.613.913.866**	**101,52**	**106,06**		
1693.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**31.503.314.232**		**35.746.099.842**	**97,95**	**113,47**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten						97,95			
1694.	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			286.149.710		283.801.400	54,17	99,18		
		Dokumen perencanaan, anggaran dan realisasi belanja pemerintah daerah									
1695.	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			63.681.530		81.459.800	100,00	127,92		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100,00			
1696.	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.746.590		3.402.900	50,00	59,22		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0,5		50,00			
1697.	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.746.590		3.360.000	100,00	58,47		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1698.	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.500.670		3.499.500	0,00	99,97		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
1699.	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.500.670		3.490.500	50,00	99,71		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0,5		50,00			
1700.	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			203.973.660		188.588.700	25,00	92,46		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		3		25,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1701.	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.990.515.922		11.719.104.060	166,67	97,74		
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah									
1702.	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.887.340.058		11.623.486.460	100,00	97,78		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	89		89		100,00			
1703.	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.827.720		7.806.000	200,00	99,72		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		2		200,00			
1704.	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			95.348.144		87.811.600	200,00	92,10		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		2		200,00			
1705.	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			66.390.700		46.919.100	100,00	70,67		
		Meningkatnya tata kelola administrasi Barang Milik Daerah									
1706.	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			25.000.000		10.240.000	100,00	40,96		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	3		3		100,00			
1707.	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			14.975.400		13.927.800	100,00	93,00		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1708.	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			26.415.300		22.751.300	100,00	86,13		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1709.	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			148.497.205		65.736.300	65,33	44,27		
		Meningkatnya tatakelola dan administrasi kepegawaian perangkat daerah									
1710.	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			41.446.550		41.103.300	100,00	99,17		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100,00			
1711.	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			9.990.000		11.655.000	100,00	116,67		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		100,00			
1712.	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			5.328.000		5.328.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		100,00			
1713.	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			32.598.455		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	40		0		0,00			
1714.	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			59.134.200		7.650.000	26,67	12,94		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		4		26,67			
1715.	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4.564.522.572		7.381.335.439	100,00	161,71		
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1716.	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			33.590.799		36.760.000	100,00	109,43		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1717.	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.432.953.052		1.819.794.480	100,00	127,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
1718.	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.093.448.880		1.959.192.699	100,00	179,18		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
1719.	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			89.937.750		78.669.200	100,00	87,47		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
1720.	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			134.714.151		145.495.350	100,00	108,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		4		100,00			
1721.	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			37.895.000		36.829.200	100,00	97,19		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
1722.	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			318.547.000		627.034.399	100,00	196,84		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100,00			
1723.	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.421.162.600		2.664.057.711	100,00	187,46		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		120		100,00			
1724.	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			2.273.340		13.502.400	100,00	593,95		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1725.	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			5.686.711.764		5.484.813.000	166,67	96,45		
		Tersedianya kendaraan dinas dan operasional perangkat daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah dan pemerintah daerah									
1726.	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			5.093.944.014		5.250.400.000	400,00	103,07		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		4		400,00			
1727.	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			259.767.750		234.413.000	100,00	90,24		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		8		100,00			
1728.	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			333.000.000		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
1729.	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.604.113.570		3.592.160.994	100,00	99,67		
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjangan Urusan Perangkat Daerah									
1730.	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			30.000.000		30.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		100,00			
1731.	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			694.944.000		592.260.999	100,00	85,22		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100,00			
1732.	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			2.879.169.570		2.969.899.995	100,00	103,15		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100,00			
1733.	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.833.890.417		2.949.157.432	100,00	160,81		
		Terpeliharanya Aset Perangkat Daerah									
1734.	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			267.536.690		267.535.163	100,00	100,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10		10		100,00			
1735.	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			615.869.711		592.260.999	100,00	96,17		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	60		60		100,00			
1736.	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			101.834.963		259.510.000	100,00	254,83		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	75		75		100,00			
1737.	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			848.649.053		1.829.851.270	100,00	215,62		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		100,00			
1738.	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			869.508.610		981.109.884	100,00	112,83		
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
1739.	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			651.052.210		499.492.046	100,00	76,72		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2		2		100,00			
1740.	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			79.856.400		71.418.000	100,00	89,43		
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
1741.	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			138.600.000		410.199.838	100,00	295,96		
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2		2		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1742.	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.328.109.626		1.656.458.243	83,33	124,72		
		Efektivitas Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									
1743.	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			632.880.000		961.429.573	100,00	151,91		
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		12		100,00			
1744.	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			573.732.604		573.628.670	50,00	99,98		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	12		6		50,00			
1745.	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			121.497.022		121.400.000	100,00	99,92		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	12		12		100,00			
1746.	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			583.620.640		642.654.899	100,00	110,12		
		Nilai SAKIP									
1747.	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			250.181.750		240.116.599	100,00	95,98		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	3		3		100,00			
1748.	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			173.242.790		245.260.400	100,00	141,57		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	3		3		100,00			
1749.	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			68.858.600		67.746.600	100,00	98,39		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	1		1		100,00			
1750.	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			91.337.500		89.531.300	100,00	98,02		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		100,00			
1751.	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			541.283.496		942.849.091	100,00	174,19		
		Meningkatnya Layanan dan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan									
1752.	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			461.558.400		726.626.126	100,00	157,43		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	12		12		100,00			
1753.	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			79.725.096		216.222.965	100,00	271,21		
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	12		12		100,00			
1754.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**			**11.096.986.625**		**9.617.262.808**	**90,91**	**86,67**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat						90,91			
1755.	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			895.057.738		1.171.505.834	100,00	130,89		
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan									
1756.	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			390.000.000		440.230.861	100,00	112,88		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	3		3		100,00			
1757.	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			89.522.459		164.414.973	100,00	183,66		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	1		1		100,00			
1758.	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			415.535.279		566.860.000	100,00	136,42		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	5		5		100,00			
1759.	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			9.837.409.973		8.029.579.425	100,00	81,62		
		Efiktifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat									
1760.	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			8.401.903.473		7.158.490.060	100,00	85,20		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	5		5		100,00			
1761.	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			47.629.000		155.394.366	100,00	326,26		
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1		1		100,00			
1762.	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat			380.180.500		416.208.366	100,00	109,48		
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	4		4		100,00			
1763.	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			1.007.697.000		299.486.633	100,00	29,72		
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	10		10		100,00			
1764.	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			309.974.489		362.619.660	66,67	116,98		
		Meningkatnya efektivitas dan aksesibilitas dalam pengelolaan dokumen peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta fasilitasi bantuan hukum									
1765.	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			105.197.400		166.281.800	100,00	158,07		
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	40		40		100,00			
1766.	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum			203.542.860		196.337.860	100,00	96,46		
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	4		4		100,00			
1767.	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			1.234.229		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	40		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1768.	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah			54.544.425		53.557.889	100,00	98,19		
		Meningkatnya kerjasama antar daerah yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan daerah.									
1769.	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			54.544.425		53.557.889	100,00	98,19		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	1		1		100,00			
1770.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**			**1.351.776.418**		**1.250.551.216**	**137,50**	**92,51**	SEKRETARIAT DAERAH	
		Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						137,50			
1771.	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			552.568.412		648.583.808	100,00	117,38		
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pertumbuhan perekonomian serta pengendalian distribusi perekonomian									
1772.	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			496.995.350		541.102.760	100,00	108,87		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2		2		100,00			
1773.	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			55.573.062		107.481.048	100,00	193,40		
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	5		5		100,00			
1774.	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)	0		0		0,00			
1775.	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			117.555.010		176.776.200	100,00	150,38		
		Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi administrasi pembangunan yang merata dan berkeadilan									
1776.	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			82.823.200		101.842.300	100,00	122,96		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	1		1		100,00			
1777.	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			34.731.810		74.933.900	100,00	215,75		
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1		1		100,00			
1778.	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			636.997.364		339.499.108	100,00	53,30		
		Tingkat kematangan UKPBJ									
1779.	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			341.221.428		85.494.055	100,00	25,06		
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	150		150		100,00			
1780.	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			181.584.536		93.084.700	100,00	51,26		
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	5		5		100,00			
1781.	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			114.191.400		160.920.353	100,00	140,92		
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	14		14		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1782.	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			44.655.632		85.692.100	400,00	191,90		
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.									
1783.	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	0		0		0,00			
1784.	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			44.655.632		85.692.100	400,00	191,90		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	1		4		400,00			
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**			**37.859.732.105**		**43.076.566.953**	**92,04**	**113,78**		
1785.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**26.198.213.161**		**25.510.165.041**	**99,63**	**97,37**	SEKRETARIAT DPRD	
		Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		99		0,00			
1786.	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.427.188		102.867.800	100,00	216,90		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
1787.	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			23.898.815		80.288.800	100,00	335,95		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		5		100,00			
1788.	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.652.335		6.412.000	100,00	96,39		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
1789.	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		0,00			
1790.	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.519.914		8.303.000	100,00	97,45		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
1791.	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.356.124		7.864.000	100,00	94,11		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
1792.	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.269.988.495		3.811.380.362	100,00	89,26		
		Presentase ASN yang terlayani									
1793.	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.116.304.895		3.535.764.882	100,00	85,90		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		25		100,00			
1794.	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			66.747.200		125.748.240	100,00	188,39		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1795.	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			86.936.400		149.867.240	100,00	172,39		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
1796.	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			222.870.996		199.970.108	100,00	89,72		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1797.	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			155.644.200		132.840.000	100,00	85,35		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		3		100,00			
1798.	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			67.226.796		67.130.108	100,00	99,86		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		25		100,00			
1799.	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.125.951.949		1.688.574.011	100,00	149,97		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1800.	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.330.984		18.009.000	100,00	98,24		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
1801.	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			53.435.400		51.630.000	100,00	96,62		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
1802.	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			17.324.000		16.960.000	100,00	97,90		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	22		22		100,00			
1803.	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.922.400		17.760.000	100,00	162,60		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		5		100,00			
1804.	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			261.648.000		230.672.000	100,00	88,16		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	22		22		100,00			
1805.	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			121.723.400		133.350.600	100,00	109,55		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		5		100,00			
1806.	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			67.384.548		132.700.000	100,00	196,93		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3		3		100,00			
1807.	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			528.514.122		934.999.518	100,00	176,91		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		3		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1808.	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			46.669.095		152.492.893	100,00	326,75		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	13		13		100,00			
1809.	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			419.512.290		509.006.002	300,00	121,33		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1810.	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			
1811.	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			419.512.290		509.006.002	300,00	121,33		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		12		300,00			
1812.	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.691.598.510		1.595.215.637	100,00	94,30		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1813.	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.000.000		11.250.000	100,00	125,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		100,00			
1814.	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			329.653.250		191.406.058	0,00	58,06		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		15		0,00			
1815.	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.352.945.260		1.392.559.579	100,00	102,93		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	13		13		100,00			
1816.	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.691.156.307		2.571.375.396	72,05	95,55		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1817.	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			305.273.733		292.207.083	100,00	95,72		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22		22		100,00			
1818.	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			179.280.109		95.097.100	68,18	53,04		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22		15		68,18			
1819.	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			87.322.576		116.842.920	0,00	133,81		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0		264		0,00			
1820.	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.721.600.500		1.671.521.793	100,00	97,09		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		3		100,00			
1821.	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			397.679.389		395.706.500	20,00	99,50		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		1		20,00			
1822.	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			325.220.389		486.805.183	100,00	149,68		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1823.	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			325.220.389		486.805.183	100,00	149,68		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	2		2		100,00			
1824.	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			14.133.158.083		13.331.066.042	100,00	94,32		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1825.	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			13.270.178.490		12.475.205.664	100,00	94,01		
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	25		25		100,00			
1826.	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			325.368.750		320.000.000	100,00	98,35		
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
1827.	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			537.610.843		535.860.378	100,00	99,67		
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	25		25		100,00			
1828.	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			1.271.328.954		1.213.904.500	66,67	95,48		
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah									
1829.	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	5		0		0,00			
1830.	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			215.912.760		164.842.000	100,00	76,35		
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	2		2		100,00			
1831.	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD			1.055.416.194		1.049.062.500	100,00	99,40		
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
1832.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**			**11.661.518.944**		**17.566.401.912**	**82,69**	**150,64**	SEKRETARIAT DPRD	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota (%)	0				0,00			
1833.	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			1.221.984.741		1.527.366.793	91,67	124,99		
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota									
1834.	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			10.245.744		10.027.920	100,00	97,87		
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	2		2		100,00			
1835.	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			307.358.940		324.545.914	66,67	105,59		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	15		10		66,67			
1836.	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			462.537.031		639.121.882	100,00	138,18		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	2		2		100,00			
1837.	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			441.843.026		553.671.077	100,00	125,31		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2		2		100,00			
1838.	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			196.465.230		201.501.900	60,00	102,56		
		ersedianya Rencana Kerja Tahuan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota									
1839.	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			18.165.085		18.154.000	0,00	99,94		
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	2		0		0,00			
1840.	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			18.933.611		17.579.800	0,00	92,85		
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	2		0		0,00			
1841.	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			87.638.345		97.578.000	100,00	111,34		
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1		1		100,00			
1842.	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			48.643.200		45.682.800	100,00	93,91		
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1		1		100,00			
1843.	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			23.084.989		22.507.300	100,00	97,50		
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1		1		100,00			
1844.	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			1.435.232.600		2.465.995.760	75,00	171,82		
		Tersedianya Rencana Kerja Tahuan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota									
1845.	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			442.595.260		710.316.293	100,00	160,49		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	25		25		100,00			
1846.	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			493.778.285		898.313.594	0,00	181,93		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	0		15,14		0,00			
1847.	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			442.595.260		838.318.498	100,00	189,41		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	15		15		100,00			
1848.	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			30.911.900		2.176.000	0,00	7,04		
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1		0		0,00			
1849.	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			25.351.895		16.871.375	100,00	66,55		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1		1		100,00			
1850.	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			4.131.566.336		4.978.565.676	76,67	120,50		
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota									
1851.	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD			-		-	0,00	0,00		
		Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	5		0		0,00			
1852.	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD			1.855.540.470		2.630.176.073	100,00	141,75		
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	25		25		100,00			
1853.	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			216.000.000		216.000.000	83,33	100,00		
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	6		5		83,33			
1854.	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			52.807.251		20.525.000	100,00	38,87		
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	18		18		100,00			
1855.	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD			8.798.415		84.600.336	0,00	961,54		
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	0		1		0,00			
1856.	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			1.998.420.200		2.027.264.267	100,00	101,44		
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	74		74		100,00			
1857.	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			1.306.145.168		1.862.797.700	100,00	142,62		
		Tersedianya Rencana Kerja Tahuan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota									
1858.	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			494.899.980		738.096.000	100,00	149,14		
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	22		22		100,00			
1859.	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			38.042.100		10.951.200	100,00	28,79		
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	1		1		100,00			
1860.	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			773.203.088		1.113.750.500	100,00	144,04		
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	25		25		100,00			
1861.	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			69.993.139		151.372.914	100,00	216,27		
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota									
1862.	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			60.589.885		150.172.914	100,00	247,85		
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1		1		100,00			
1863.	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			9.403.254		1.200.000	100,00	12,76		
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	25		25		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1864.	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			3.300.131.730		6.378.801.169	100,00	193,29		
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota									
1865.	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			2.955.846.576		5.560.867.444	100,00	188,13		
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	13		13		100,00			
1866.	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0		0		0,00			
1867.	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			12.478.730		27.255.000	100,00	218,41		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	48		48		100,00			
1868.	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			331.806.424		790.678.725	100,00	238,30		
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	5		5		100,00			
	5.01	**PERENCANAAN**			**10.696.439.456**		**9.391.701.224**	**90,31**	**87,80**		
1869.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**7.725.289.194**		**6.747.631.705**	**86,90**	**87,34**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		91		0,00			
1870.	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.230.432		74.297.842	100,00	117,50		
		Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah									
1871.	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.760.012		21.431.000	100,00	167,95		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100,00			
1872.	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			9.716.899		9.635.000	100,00	99,16		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1873.	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.880.008		8.829.000	100,00	99,43		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1874.	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			12.631.808		12.449.800	100,00	98,56		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2		2		100,00			
1875.	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19.241.705		21.953.042	100,00	114,09		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12		12		100,00			
1876.	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.914.721.421		4.847.543.938	100,00	81,96		
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1877.	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.880.760.500		4.816.725.736	100,00	81,91		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		35		100,00			
1878.	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9.210.501		9.067.782	100,00	98,45		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1879.	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			24.750.420		21.750.420	100,00	87,88		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1880.	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.567.772		7.567.772	100,00	100,00		
		Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada PD									
1881.	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			7.567.772		7.567.772	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1882.	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35.697.680		6.130.500	0,00	17,17		
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah									
1883.	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	75		0		0,00			
1884.	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			6.130.580		6.130.500	0,00	100,00		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		48		0,00			
1885.	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			29.567.100		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	4		0		0,00			
1886.	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			562.176.434		684.767.218	100,00	121,81		
		Terlaksananya kegiatan administrasi umum PD									
1887.	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			42.031.260		42.031.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		100,00			
1888.	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10.626.697		10.621.000	100,00	99,95		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	9		9		100,00			
1889.	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.474.838		44.755.100	100,00	218,59		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9		9		100,00			
1890.	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.798.062		9.750.000	100,00	99,51		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		1		100,00			
1891.	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			73.548.211		71.535.142	100,00	97,26		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	9		9		100,00			
1892.	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.235.532		15.397.000	100,00	150,43		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5		5		100,00			
1893.	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			378.977.024		474.261.676	100,00	125,14		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	110		110		100,00			
1894.	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			16.484.810		16.416.300	100,00	99,58		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1895.	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			370.644.103		375.515.650	100,00	101,31		
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah									
1896.	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			352.236.973		327.355.650	100,00	92,94		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100,00			
1897.	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.407.130		48.160.000	100,00	261,64		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		100,00			
1898.	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			391.583.440		364.558.885	77,78	93,10		
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah									
1899.	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.000.000		7.000.000	33,33	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		1		33,33			
1900.	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			103.148.460		126.075.890	100,00	122,23		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		2		100,00			
1901.	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			281.434.980		231.482.995	100,00	82,25		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100,00			
1902.	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			379.667.911		387.249.900	75,00	102,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1903.	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			41.171.871		41.083.900	100,00	99,79		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100,00			
1904.	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			162.551.391		176.961.000	100,00	108,86		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	21		21		100,00			
1905.	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			67.459.584		79.395.000	100,00	117,69		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25		25		100,00			
1906.	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			108.485.064		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0,00			
1907.	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		89.810.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0,00			
1908.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.289.323.343**		**1.326.443.385**	**95,45**	**102,88**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan daerah	Persentanse Dokumen Perencanaan Daerah dan perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada selesai tepat waktu (Dokumen)	0		96		0,00			
1909.	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			1.185.198.980		1.239.052.503	92,86	104,54		
		Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA									
1910.	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			432.884.346		478.641.103	100,00	110,57		
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	2		2		100,00			
1911.	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			18.098.036		12.047.900	100,00	66,57		
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2		2		100,00			
1912.	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			17.330.940		14.929.750	100,00	86,15		
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2		2		100,00			
1913.	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			45.511.688		54.596.450	100,00	119,96		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	2		2		100,00			
1914.	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			92.306.960		62.768.550	50,00	68,00		
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2		1		50,00			
1915.	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			61.966.100		59.875.400	100,00	96,63		
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1128		1.128		100,00			
1916.	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			517.100.910		556.193.350	100,00	107,56		
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4		4		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1917.	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			8.340.940		8.329.000	100,00	99,86		
		Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah									
1918.	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			8.340.940		8.329.000	100,00	99,86		
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	205		205		100,00			
1919.	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			73.630.379		57.628.082	100,00	78,27		
		Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah									
1920.	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			57.965.369		42.113.040	100,00	72,65		
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	6		6		100,00			
1921.	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			15.665.010		15.515.042	100,00	99,04		
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	3		3		100,00			
1922.	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			22.153.044		21.433.800	100,00	96,75		
		Terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan manusia									
1923.	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			22.153.044		21.433.800	100,00	96,75		
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	2		2		100,00			
1924.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**			**1.681.826.919**		**1.317.626.134**	**100,00**	**78,34**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA	Persentanse Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (%)	0		78		0,00			
1925.	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			743.844.104		448.899.466	100,00	60,35		
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia yang disusun									
1926.	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			236.642.547		69.386.342	100,00	29,32		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	6		6		100,00			
1927.	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			507.201.557		379.513.124	100,00	74,82		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	6		6		100,00			
1928.	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			478.803.440		493.820.083	100,00	103,14		
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan bidang SDA yang disusun									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1929.	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian			178.138.485		169.336.972	0,00	95,06		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	0		0		0,00			
1930.	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			300.664.955		324.483.111	100,00	107,92		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1		1		100,00			
1931.	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			459.179.375		374.906.585	100,00	81,65		
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan bidang kewilayahan yang disusun									
1932.	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur			230.680.337		262.141.800	100,00	113,64		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	6		6		100,00			
1933.	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			228.499.038		112.764.785	0,00	49,35		
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	0		0		0,00			
	5.02	**KEUANGAN**			**226.675.905.543**		**205.109.110.519**	**93,90**	**90,49**		
1934.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**10.320.607.615**		**9.945.123.978**	**90,04**	**96,36**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	0		90		0,00			
1935.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			18.034.308		17.997.025	100,00	99,79		
		Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1936.	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6.025.628		6.025.025	100,00	99,99		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1937.	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			6.001.680		6.000.000	100,00	99,97		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
1938.	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			6.007.000		5.972.000	100,00	99,42		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3		3		100,00			
1939.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.381.236.064		4.955.667.302	110,66	77,66		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1940.	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.332.219.064		4.873.562.302	109,30	76,96		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43		47		109,30			
1941.	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.795.500		370.000	100,00	13,24		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1942.	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			43.885.500		79.285.000	100,00	180,66		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
1943.	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.336.000		2.450.000	133,33	104,88		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12		16		133,33			
1944.	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.185.888		6.600.000	100,00	38,40		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
1945.	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			6.660.000		6.600.000	200,00	99,10		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		2		200,00			
1946.	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			10.525.888		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12		0		0,00			
1947.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.563.059.745		2.107.111.133	78,89	134,81		
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1948.	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.354.070		44.390.000	100,00	218,09		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1949.	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			416.102.370		819.749.998	100,00	197,01		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1950.	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			40.040.808		86.291.000	100,00	215,51		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
1951.	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.530.671		25.291.000	100,00	123,19		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
1952.	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			18.388.500		41.580.000	100,00	226,12		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6		6		100,00			
1953.	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			13.530.678		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
1954.	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			26.650.648		61.353.000	100,00	230,21		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
1955.	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			272.462.000		1.012.706.135	100,00	371,69		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10		10		100,00			
1956.	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			735.000.000		15.750.000	10,00	2,14		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	15000000		1.500.000		10,00			
1957.	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			680.874.000		595.400.000	8,33	87,45		
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1958.	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			680.874.000		595.400.000	8,33	87,45		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12		1		8,33			
1959.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			924.262.615		730.347.098	100,00	79,02		
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1960.	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.324.000		23.357.000	100,00	250,50		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
1961.	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			342.726.720		605.914.098	100,00	176,79		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	8		8		100,00			
1962.	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			572.211.895		101.076.000	100,00	17,66		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100,00			
1963.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			735.954.995		1.532.001.420	100,00	208,17		
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1964.	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			343.490.867		1.020.922.620	100,00	297,22		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	30		30		100,00			
1965.	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			392.464.128		511.078.800	100,00	130,22		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		100,00			
1966.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			**203.988.939.640**		**183.540.480.538**	**90,40**	**89,98**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		.Meningktnya tata kelola keuangan daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	0		90		0,00			
1967.	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			868.062.171		1.771.918.114	99,45	204,12		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
1968.	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			69.846.972		133.270.000	100,00	190,80		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		100,00			
1969.	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			68.914.794		137.919.000	100,00	200,13		
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2		2		100,00			
1970.	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			26.658.870		51.458.100	100,00	193,02		
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	42		42		100,00			
1971.	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			44.139.150		86.174.800	100,00	195,23		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	42		42		100,00			
1972.	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			14.611.485		26.053.200	92,86	178,31		
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	42		39		92,86			
1973.	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			30.734.801		45.543.000	100,00	148,18		
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	42		42		100,00			
1974.	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			179.932.152		411.074.650	100,00	228,46		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2		2		100,00			
1975.	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			154.783.170		329.606.820	100,00	212,95		
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2		2		100,00			
1976.	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			102.550.517		288.473.584	100,00	281,30		
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	4		4		100,00			
1977.	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan			8.791.000		29.234.200	100,00	332,55		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	2		2		100,00			
1978.	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			21.299.000		90.415.660	100,00	424,51		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	42		42		100,00			
1979.	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			10.506.000		29.415.400	100,00	279,99		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (Dokumen)	2		2		100,00			
1980.	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			135.294.260		113.279.700	100,00	83,73		
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	10		10		100,00			
1981.	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			750.330.376		1.880.945.889	87,50	250,68		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
1982.	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			84.437.840		240.153.986	100,00	284,42		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	24		24		100,00			
1983.	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			15.178.140		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	39		0		0,00			
1984.	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			66.257.940		154.909.334	100,00	233,80		
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	10		10		100,00			
1985.	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank			7.125.090		23.208.400	100,00	325,73		
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	39		39		100,00			
1986.	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			82.690.596		309.901.684	100,00	374,77		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	10		10		100,00			
1987.	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			10.243.080		36.084.300	100,00	352,28		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5		5		100,00			
1988.	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			151.660.680		419.292.424	100,00	276,47		
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	39		39		100,00			
1989.	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			332.737.010		697.395.761	100,00	209,59		
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	39		39		100,00			
1990.	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			573.898.768		835.860.652	75,00	145,65		
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
1991.	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			38.894.940		148.889.400	100,00	382,80		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	39		39		100,00			
1992.	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			16.443.450		31.473.200	100,00	191,40		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	4		4		100,00			
1993.	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			92.883.576		277.525.768	100,00	298,79		
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	39		39		100,00			
1994.	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			111.563.652		264.211.684	100,00	236,83		
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		4		100,00			
1995.	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1		0		0,00			
1996.	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			19.753.560		25.142.400	100,00	127,28		
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		1		100,00			
1997.	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			14.464.790		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0,00			
1998.	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			279.894.800		88.618.200	100,00	31,66		
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	100		100		100,00			
1999.	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			201.530.758.790		178.696.256.583	100,00	88,67		
		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
2000.	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			190.280.758.790		173.438.394.965	100,00	91,15		
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)	1		1		100,00			
2001.	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			11.250.000.000		5.257.861.618	100,00	46,74		
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1		1		100,00			
2002.	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			265.889.535		355.499.300	100,00	133,70		
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah									
2003.	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			265.889.535		355.499.300	100,00	133,70		
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	4		4		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2004.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**			**1.030.393.036**		**1.760.720.097**	**100,00**	**170,88**	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	0		360		0,00			
2005.	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.030.393.036		1.760.720.097	100,00	170,88		
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah									
2006.	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			28.942.572		38.818.300	100,00	134,12		
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		1		100,00			
2007.	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			7.886.434		12.500.700	100,00	158,51		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		5		100,00			
2008.	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			10.911.564		32.551.700	100,00	298,32		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100,00			
2009.	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah			83.988.100		54.876.707	100,00	65,34		
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100,00			
2010.	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			545.478.977		920.634.387	100,00	168,78		
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	39		39		100,00			
2011.	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			107.477.897		105.610.380	100,00	98,26		
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		5		100,00			
2012.	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			175.800.845		427.609.217	100,00	243,24		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	1		1		100,00			
2013.	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			69.906.647		168.118.706	100,00	240,49		
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		100,00			
2014.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**9.178.220.988**		**7.662.357.064**	**96,43**	**83,48**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam mendukung peningkatan PAD						96,43			
2015.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			80.405.906		104.429.415	100,00	129,88		
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja									
2016.	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.674.212		53.978.195	100,00	181,90		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100,00			
2017.	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.939.500		4.939.190	100,00	99,99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2018.	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.717.500		4.717.440	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2019.	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.939.056		4.938.750	100,00	99,99		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2020.	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.308.576		4.308.540	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2021.	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			31.827.062		31.547.300	100,00	99,12		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		5		100,00			
2022.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.057.502.060		5.646.671.843	100,00	80,01		
		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2023.	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.943.054.472		5.487.344.283	100,00	79,03		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	35		35		100,00			
2024.	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			105.952.092		150.832.440	100,00	142,36		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	24		24		100,00			
2025.	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.222.440		4.222.320	100,00	100,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
2026.	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			4.273.056		4.272.800	100,00	99,99		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
2027.	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.247.758		30.783.500	100,00	332,88		
		Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah									
2028.	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2.264.178		7.665.800	100,00	338,57		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
2029.	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.983.580		23.117.700	100,00	331,03		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
2030.	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			47.459.640		46.996.200	50,00	99,02		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Fasilitas administrasi kepegawaian perangkat daerah									
2031.	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	67		0		0,00			
2032.	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			47.459.640		46.996.200	100,00	99,02		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	7		7		100,00			
2033.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			532.321.291		654.055.114	100,00	122,87		
		Fasilitas Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2034.	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			38.013.615		38.013.490	100,00	100,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2035.	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			12.196.680		25.538.000	100,00	209,38		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2036.	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			120.820.380		127.057.773	100,00	105,16		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2037.	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			17.629.500		8.280.000	100,00	46,97		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5		5		100,00			
2038.	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			161.586.240		162.408.893	100,00	100,51		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
2039.	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			182.074.876		292.756.958	100,00	160,79		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		50		100,00			
2040.	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0		0		0,00			
2041.	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.051.165.199		830.919.200	100,00	79,05		
		Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2042.	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1.017.199.199		797.264.000	100,00	78,38		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		3		100,00			
2043.	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			33.966.000		33.655.200	100,00	99,08		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100,00			
2044.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			152.676.000		98.053.972	100,00	64,22		
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2045.	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			16.500.000		16.500.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
2046.	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			136.176.000		81.553.972	100,00	59,89		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		4		100,00			
2047.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			231.009.235		234.190.240	100,00	101,38		
		Laporan Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2048.	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			157.794.800		161.090.240	100,00	102,09		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	26		26		100,00			
2049.	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			65.464.470		65.390.000	100,00	99,89		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	120		120		100,00			
2050.	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.749.965		7.710.000	100,00	99,48		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
2051.	5.02.01.2.13	Penataan Organisasi			16.433.900		16.257.580	100,00	98,93		
		Susunan struktur organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah									
2052.	5.02.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			16.433.900		16.257.580	100,00	98,93		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	3		3		100,00			
2053.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**			**2.157.744.264**		**2.200.428.842**	**100,00**	**101,98**	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah						100,00			
2054.	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			2.157.744.264		2.200.428.842	100,00	101,98		
		Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah									
2055.	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah			266.987.932		262.950.544	100,00	98,49		
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	5		5		100,00			
2056.	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			184.033.407		185.006.158	100,00	100,53		
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	21		21		100,00			
2057.	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			122.331.400		141.949.200	100,00	116,04		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	3		3		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2058.	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			327.806.000		326.772.000	100,00	99,68		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	7		7		100,00			
2059.	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			96.915.400		113.414.800	100,00	117,02		
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	21		21		100,00			
2060.	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			306.727.280		310.439.940	100,00	101,21		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	21		21		100,00			
2061.	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			238.372.500		255.487.764	100,00	107,18		
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	35000		35.000		100,00			
2062.	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			14.226.000		13.440.000	100,00	94,47		
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	21		21		100,00			
2063.	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			75.266.300		68.259.978	100,00	90,69		
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	7		7		100,00			
2064.	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			65.478.455		66.767.389	100,00	101,97		
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	21		21		100,00			
2065.	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			359.428.490		359.834.686	100,00	100,11		
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	21		21		100,00			
2066.	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			11.450.900		11.085.394	100,00	96,81		
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	2		2		100,00			
2067.	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			60.187.000		56.592.889	100,00	94,03		
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	21		21		100,00			
2068.	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			28.533.200		28.428.100	100,00	99,63		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	4		4		100,00			
2069.	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	0		0		0,00			
	5.03	**KEPEGAWAIAN**			**7.803.796.140**		**8.029.554.546**	**158,53**	**102,89**		
2070.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**5.869.187.920**		**5.876.921.011**	**138,51**	**100,13**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Terlaksanannya Kebutuhan Adminitrasi Penunjang Pemerintah Daerah						138,51			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2071.	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			72.349.809		169.112.400	160,00	233,74		
		Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2072.	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			22.529.522		68.193.000	400,00	302,68		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5		20		400,00			
2073.	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			8.514.867		11.478.000	100,00	134,80		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
2074.	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			8.500.000		14.903.000	100,00	175,33		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3		3		100,00			
2075.	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			8.500.000		23.561.000	100,00	277,19		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3		3		100,00			
2076.	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			24.305.420		50.977.400	100,00	209,74		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16		16		100,00			
2077.	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.383.608.467		3.916.888.808	100,00	89,35		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2078.	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.318.315.667		3.818.238.308	100,00	88,42		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	100		100		100,00			
2079.	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8.500.000		15.296.000	100,00	179,95		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4		4		100,00			
2080.	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.700.000		59.270.700	100,00	145,63		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100,00			
2081.	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			16.092.800		24.083.800	100,00	149,66		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	3		3		100,00			
2082.	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			17.617.944		19.376.000	0,00	109,98		
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
2083.	5.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			17.617.944		19.376.000	0,00	109,98		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3		0		0,00			
2084.	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			246.995.700		286.001.484	160,00	115,79		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2085.	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	100,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		100,00			
2086.	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			47.945.900		47.803.600	400,00	99,70		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		4		400,00			
2087.	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			110.800.400		90.225.404	100,00	81,43		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1		1		100,00			
2088.	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			68.538.000		59.007.916	100,00	86,10		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		1		100,00			
2089.	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			19.711.400		88.964.564	100,00	451,34		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	12		12		100,00			
2090.	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			309.029.105		481.243.766	86,11	155,73		
		Tersedianya Barang Perlengkapan Perkantoran									
2091.	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.511.480		10.969.000	100,00	128,87		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		25		100,00			
2092.	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.099.445		13.399.000	100,00	120,72		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
2093.	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			43.297.250		55.197.500	100,00	127,49		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2094.	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.175.000		5.100.000	16,67	98,55		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		2		16,67			
2095.	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			67.488.830		91.277.000	100,00	135,25		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2096.	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			173.457.100		305.301.266	100,00	176,01		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50		50		100,00			
2097.	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80.540.831		101.150.000	100,00	125,59		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2098.	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			80.540.831		101.150.000	100,00	125,59		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100,00			
2099.	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			543.511.730		544.141.813	100,00	100,12		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Gedung kantor, Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2100.	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.200.000		8.200.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		5		100,00			
2101.	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			84.660.000		108.831.399	100,00	128,55		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		3		100,00			
2102.	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			450.651.730		427.110.414	100,00	94,78		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		1		100,00			
2103.	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			206.234.333		295.462.128	333,33	143,27		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2104.	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			65.416.100		99.794.368	100,00	152,55		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		2		100,00			
2105.	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			29.709.000		43.710.000	500,00	147,13		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		5		500,00			
2106.	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1		0,00			
2107.	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			111.109.233		151.957.760	400,00	136,76		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		4		400,00			
2108.	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi			9.300.000		63.544.612	100,00	683,28		
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan									
2109.	5.03.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			9.300.000		63.544.612	100,00	683,28		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	1		1		100,00			
2110.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**			**1.934.608.220**		**2.152.633.535**	**200,00**	**111,27**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas						200,00			
2111.	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			522.114.526		540.914.768	225,00	103,60		
		Terlaksananya Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
2112.	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			39.747.710		126.742.195	100,00	318,87		
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	2		2		100,00			
2113.	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			450.371.816		330.373.973	100,00	73,36		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2		2		100,00			
2114.	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			20.000.000		49.115.100	400,00	245,58		
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	1		4		400,00			
2115.	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian			11.995.000		34.683.500	300,00	289,15		
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	2		6		300,00			
2116.	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			570.810.650		587.051.256	100,00	102,85		
		Jumlah Pegawai yang Mutasi dan Promosi ASN									
2117.	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN			17.739.650		47.855.989	100,00	269,77		
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	2		2		100,00			
2118.	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			57.736.000		57.624.137	100,00	99,81		
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1		1		100,00			
2119.	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN			495.335.000		481.571.130	100,00	97,22		
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5		5		100,00			
2120.	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			769.142.594		922.335.831	325,00	119,92		
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya									
2121.	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			417.814.569		423.497.628	100,00	101,36		
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	125		125		100,00			
2122.	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			274.305.600		273.734.900	100,00	99,79		
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	20		20		100,00			
2123.	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			22.107.300		59.322.400	100,00	268,34		
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	3		3		100,00			
2124.	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			54.915.125		165.780.903	1.000,00	301,89		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	20		200		1.000,00			
2125.	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			72.540.450		102.331.680	100,00	141,07		
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur									
2126.	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			21.304.500		20.501.200	100,00	96,23		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	50		50		100,00			
2127.	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN			23.771.750		50.552.832	100,00	212,66		
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	25		25		100,00			
2128.	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			27.464.200		31.277.648	100,00	113,89		
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	10		10		100,00			
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			**3.510.057.200**		**2.448.466.335**	**100,00**	**69,76**		
2129.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**			**3.510.057.200**		**2.448.466.335**	**100,00**	**69,76**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Terlaksananya program Pengembangan Sumber Daya Manusia						100,00			
2130.	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			3.510.057.200		2.448.466.335	100,00	69,76		
		Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional									
2131.	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional			3.510.057.200		2.448.466.335	100,00	69,76		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	1		1		100,00			
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**862.068.217**		**852.674.733**	**66,67**	**98,91**		
2132.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**			**862.068.217**		**852.674.733**	**66,67**	**98,91**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil Penelitian yang di tindak lanjuti (%)	0		86		0,00			
2133.	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			8.775.600		-	0,00	0,00		
2134.	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			8.775.600		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	1		0		0,00			
2135.	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			85.075.490		211.282.968	100,00	248,35		
		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2136.	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial			85.075.490		211.282.968	100,00	248,35		
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1		1		100,00			
2137.	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			514.282.650		389.558.028	0,00	75,75		
		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									
2138.	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			514.282.650		389.558.028	0,00	75,75		
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0		1		0,00			
2139.	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			253.934.477		251.833.737	100,00	99,17		
		Tersedia Pengembangan Inovasi dan Teknologi									
2140.	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			237.536.277		235.591.895	0,00	99,18		
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	0		1		0,00			
2141.	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			16.398.200		16.241.842	100,00	99,05		
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	3		3		100,00			
2142.	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	0		0		0,00			
2143.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
		Meningkatnya Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Riset dan Inovasi Daerah yang di manfaatkan Perangkat Daerah (%)	0				0,00			
2144.	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Invensi dan Inovasi									
2145.	5.05.03.2.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0		0		0,00			
2146.	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0		0		0,00			
2147.	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0		0		0,00			
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**17.417.746.880**		**16.460.151.565**	**50,37**	**94,50**		
2148.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**13.772.531.458**		**13.428.338.753**	**48,37**	**97,50**	INSPEKTORAT	
		Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0				0,00			
2149.	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			106.730.600		31.014.406	40,00	29,06		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi									
2150.	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			106.730.600		31.014.406	40,00	29,06		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		2		40,00			
2151.	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.511.216.760		7.556.183.358	118,33	100,60		
		Persentase efesiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan									
2152.	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.427.546.760		7.502.534.958	216,67	101,01		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42		91		216,67			
2153.	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			83.670.000		53.648.400	20,00	64,12		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5		1		20,00			
2154.	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.742.713.989		1.895.742.273	56,74	108,78		
		Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapabilitas APIP									
2155.	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			312.687.000		294.451.650	101,11	94,17		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	90		91		101,11			
2156.	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1.125.377.069		1.338.003.229	40,54	118,89		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	37		15		40,54			
2157.	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			304.649.920		263.287.394	28,57	86,42		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		10		28,57			
2158.	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			971.426.990		802.574.575	29,44	82,62		
		Persentase efesiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi umum									
2159.	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			160.217.400		221.843.000	66,67	138,46		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		2		66,67			
2160.	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			88.856.277		127.396.000	25,00	143,37		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	20		5		25,00			
2161.	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			62.204.400		43.066.500	20,00	69,23		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		2		20,00			
2162.	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			11.385.000		9.810.000	25,00	86,17		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	40		10		25,00			
2163.	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			64.955.813		46.033.478	30,00	70,87		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	30		9		30,00			
2164.	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			583.808.100		354.425.597	10,00	60,71		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		3		10,00			
2165.	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.439.863.378		2.390.028.000	100,00	97,96		
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2166.	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.439.863.378		2.390.028.000	100,00	97,96		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		1		100,00			
2167.	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223.064.300		204.858.971	27,73	91,84		
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2168.	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			143.438.300		134.303.208	10,00	93,63		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20		2		10,00			
2169.	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			79.626.000		70.555.763	45,45	88,61		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	22		10		45,45			
2170.	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			777.515.442		547.937.170	35,00	70,47		
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2171.	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			321.727.455		255.820.200	33,33	79,51		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		2		33,33			
2172.	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			255.819.474		212.575.010	40,00	83,10		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25		10		40,00			
2173.	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			35.225.064		14.886.000	16,67	42,26		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	30		5		16,67			
2174.	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			164.743.449		64.655.960	50,00	39,25		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		50,00			
2175.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**			**2.516.464.104**		**2.260.716.864**	**58,16**	**89,84**	INSPEKTORAT	
		Menurutnnya penyelewenangan atau penyimpangan, baik yang bersifat angaran ataupun proses dan kewenangan						58,16			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2176.	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2.093.538.784		1.671.544.364	61,92	79,84		
		Persentase Pemenuhan Program Penyelenggaraan Pengawasan									
2177.	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			297.784.148		270.775.300	100,00	90,93		
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	1		1		100,00			
2178.	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			204.583.320		108.448.800	35,14	53,01		
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	37		13		35,14			
2179.	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			269.981.530		296.882.434	33,33	109,96		
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6		2		33,33			
2180.	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			156.181.910		211.258.200	100,00	135,26		
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	1		1		100,00			
2181.	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			505.593.200		330.492.600	45,00	65,37		
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	60		27		45,00			
2182.	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			195.304.368		136.751.028	100,00	70,02		
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	2		2		100,00			
2183.	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			464.110.308		316.936.002	20,00	68,29		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	5		1		20,00			
2184.	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			422.925.320		589.172.500	45,00	139,31		
		Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									
2185.	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			92.334.240		61.200.000	50,00	66,28		
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	10		5		50,00			
2186.	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			330.591.080		527.972.500	40,00	159,71		
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	30		12		40,00			
2187.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**			**1.128.751.318**		**771.095.948**	**42,32**	**68,31**	INSPEKTORAT	
		Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						42,32			
2188.	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			189.744.580		124.711.120	50,00	65,73		
		Persentase Pemenuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan									
2189.	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			189.744.580		124.711.120	50,00	65,73		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2		1		50,00			
2190.	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			939.006.738		646.384.828	39,77	68,84		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Pemenuhan Pendampingan dan Asistensi									
2191.	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			137.048.542		128.795.800	26,32	93,98		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	38		10		26,32			
2192.	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			251.103.955		107.748.801	26,32	42,91		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	38		10		26,32			
2193.	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			390.050.605		360.475.227	66,67	92,42		
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	3		2		66,67			
2194.	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			160.803.636		49.365.000	0,00	30,70		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	0		15		0,00			
	7.01	**KECAMATAN**			**45.423.041.956**		**41.493.482.252**	**80,45**	**91,35**		
2195.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.396.764.997**		**4.409.556.964**	**81,77**	**100,29**	KECAMATAN KURUN	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profisional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (persen)	100		100		100,00			
			Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PERSEN)	100		100		100,00			
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (persen)	100		100		100,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0		100		0,00			
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya (persen)	100		100		100,00			
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (p)	100		100		100,00			
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (persen)	100		100		100,00			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		100		0,00			
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0		100		0,00			
			Presentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	0		100		0,00			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	100		100		100,00			
			Presentase Meningkatkan Keseragaman dan SDM ASN (%)	0		100		0,00			
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah (persen)	100		100		100,00			
			Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan (%)	0		100		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
			Tersediannya Anggaran Kebutuhan Umum Kantor (persen)	100		100		100,00			
			Persentase Program Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Persen)	100		100		100,00			
			Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	0		100		0,00			
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (PERSEN)	100		100		100,00			
			TERCAPAINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (PERSEN)	100		100		100,00			
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (PERSEN)	100		100		100,00			
			Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	0		100		0,00			
2196.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			36.117.450		19.644.700	80,00	54,39		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2197.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.538.760		4.538.700	100,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2198.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.160.380		3.160.100	100,00	99,99		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2199.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.852.570		3.852.300	100,00	99,99		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2200.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.160.380		3.160.100	100,00	99,99		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2201.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			21.405.360		4.933.500	0,00	23,05		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		0		0,00			
2202.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.148.290.472		3.109.036.986	75,00	98,75		
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkualitas									
2203.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.126.749.068		3.089.695.986	100,00	98,81		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30		30		100,00			
2204.	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			750.000		750.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1		1		100,00			
2205.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.105.780		3.105.600	0,00	99,99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0,00			
2206.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			17.685.624		15.485.400	100,00	87,56		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
2207.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			29.450.594		20.340.004	59,09	69,06		
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian yang berkualitas									
2208.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		20.340.004	118,18	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	11		13		118,18			
2209.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			29.450.594		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	15		0		0,00			
2210.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			391.553.043		475.278.876	67,88	121,38		
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkayt Daerah yang Berkualitas									
2211.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			164.537.484		195.776.664	100,00	118,99		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	19		19		100,00			
2212.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.202.735		44.514.900	100,00	113,55		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		7		100,00			
2213.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			9.232.200		8.610.000	100,00	93,26		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3		3		100,00			
2214.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			21.282.284		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
2215.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			157.298.340		226.377.312	39,39	143,92		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	33		13		39,39			
2216.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			185.303.568		204.722.000	60,00	110,48		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan									
2217.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			140.177.238		159.820.000	20,00	114,01		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		1		20,00			
2218.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2219.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			45.126.330		44.902.000	100,00	99,50		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		8		100,00			
2220.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			372.907.692		348.543.298	77,78	93,47		
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2221.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.700.000		9.900.000	100,00	102,06		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		3		100,00			
2222.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			89.760.000		78.721.671	33,33	87,70		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	15		5		33,33			
2223.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			273.447.692		259.921.627	100,00	95,05		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		100,00			
2224.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			233.142.177		231.991.100	139,39	99,51		
		Terwujudnya Administrasi Barang Milik yang Berkualitas									
2225.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			71.547.899		72.346.000	63,64	101,12		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11		7		63,64			
2226.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			45.467.211		44.357.100	100,00	97,56		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		2		100,00			
2227.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.210.078		45.140.000	100,00	99,84		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	32		32		100,00			
2228.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			52.661.009		52.619.000	400,00	99,92		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		8		400,00			
2229.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			18.255.981		17.529.000	33,33	96,02		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		1		33,33			
2230.	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			-		-	0,00	0,00		
2231.	7.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	2		0		0,00			
2232.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**1.085.480.046**		**1.000.822.300**	**57,14**	**92,20**	KECAMATAN KURUN	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (persen)	100		100		100,00			
			TERLAKSANANYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (PERSEN)	100		100		100,00			
			TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (PERSEN)	100		100		100,00			
			Presentase Kegiatan Forum Musyawarah di Ttingkat Desa/Kelurahan (%)	0		100		0,00			
			Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan (persen)	100		100		100,00			
			Presentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Program Desa/Kelurahan (%)	0		100		0,00			
			Presentase Kinerja keterlibatan organisasi, kelompok, keagaman dan masyarakat dalam peningkatan kapasitas lembaga masyarakat (%)	0		100		0,00			
2233.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			12.139.150		-	0,00	0,00		
2234.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			12.139.150		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0,00			
2235.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			702.305.206		636.596.800	64,29	90,64		
		Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan									
2236.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.803.260		6.541.600	100,00	96,15		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		2		100,00			
2237.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			695.501.946		630.055.200	28,57	90,59		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	14		4		28,57			
2238.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			371.035.690		364.225.500	100,00	98,16		
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
2239.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			371.035.690		364.225.500	100,00	98,16		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	9		9		100,00			
2240.	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		0,00			
2241.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**48.347.100**		**49.200.000**	**50,00**	**101,76**	KECAMATAN KURUN	
		Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan	Presentase Efisiensi Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi, Koordinasi, dan Pembinaan yang tertib (%)	0		100		0,00			
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa (persen)	100		100		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2242.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			48.347.100		49.200.000	50,00	101,76		
		Meningkatnya Efisiensi Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi, Koordinasi, dan Pembinaan									
2243.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			45.511.050		49.200.000	100,00	108,11		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		1		100,00			
2244.	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			2.836.050		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1		0		0,00			
2245.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.386.477.851**		**2.898.202.044**	**77,82**	**85,58**	KECAMATAN TEWAH	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Kantor	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		70,93		0,00			
2246.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			12.356.976		11.031.600	91,67	89,27		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2247.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3.028.800		2.929.000	50,00	96,70		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		1		50,00			
2248.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.734.200		2.546.400	100,00	93,13		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2249.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1.674.600		1.530.200	100,00	91,38		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2250.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.273.288		994.000	100,00	78,07		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2251.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			1.990.800		1.702.000	100,00	85,49		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2252.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.655.288		1.330.000	100,00	80,35		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
2253.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.315.695.732		1.950.668.485	69,04	84,24		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									
2254.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.289.318.152		1.923.259.485	96,00	84,01		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25		24		96,00			
2255.	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			14.222.780		16.751.000	88,89	117,78		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	90		80		88,89			
2256.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			12.154.800		10.658.000	22,22	87,69		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		4		22,22			
2257.	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			2.751.400		2.713.000	50,00	98,60		
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah									
2258.	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			2.751.400		2.713.000	50,00	98,60		
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	12		6		50,00			
2259.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.681.792		5.820.000	8,33	49,82		
		Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Putih Hitam untuk Pegawai Kantor Kecamatan									
2260.	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			2.109.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0,00			
2261.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			4.053.600		5.820.000	25,00	143,58		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12		3		25,00			
2262.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5.519.192		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3		0		0,00			
2263.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			232.874.194		193.515.100	83,73	83,10		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
2264.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.033.400		5.982.500	100,00	99,16		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
2265.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
2266.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			84.290.700		87.331.800	70,00	103,61		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		7		70,00			
2267.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			6.446.842		6.142.000	66,67	95,27		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3		2		66,67			
2268.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			18.088.029		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3		0		0,00			
2269.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			7.567.000		7.566.000	50,00	99,99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		1		50,00			
2270.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			110.448.224		86.492.800	215,73	78,31		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	89		192		215,73			
2271.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			250.200.939		234.456.903	94,44	93,71		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2									
2272.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			
2273.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			106.415.700		90.878.901	100,00	85,40		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		3		100,00			
2274.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			39.480.924		37.938.002	100,00	96,09		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		2		100,00			
2275.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			104.304.315		105.640.000	83,33	101,28		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		5		83,33			
2276.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			436.452.970		388.260.356	61,11	88,96		
		Tersedianya Materai									
2277.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.120.000		3.060.000	33,33	98,08		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		1		33,33			
2278.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.165.500		22.923.034	50,00	33,63		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6		3		50,00			
2279.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			365.167.470		362.277.322	100,00	99,21		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		2		100,00			
2280.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			124.463.849		111.736.600	113,89	89,77		
		Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, dan Pajak Kendaraan									
2281.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			31.497.690		33.048.700	83,33	104,92		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6		5		83,33			
2282.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			41.066.409		41.065.900	150,00	100,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		3		150,00			
2283.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.201.678		13.000.000	88,89	47,79		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	9		8		88,89			
2284.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			24.698.071		24.622.000	133,33	99,69		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		4		133,33			
2285.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN TEWAH	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan PublikUrusan Pemerintah Umum	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	0		0		0,00			
2286.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									
2287.	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0		0		0,00			
2288.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**673.577.875**		**645.974.700**	**77,08**	**95,90**	KECAMATAN TEWAH	
		Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		64,53		0,00			
2289.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			73.652.196		62.326.000	77,78	84,62		
		Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Desa									
2290.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			16.637.120		16.391.000	33,33	98,52		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3		1		33,33			
2291.	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			15.079.250		17.064.000	100,00	113,16		
		Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	5		5		100,00			
2292.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			41.935.826		28.871.000	100,00	68,85		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		100,00			
2293.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			402.012.878		393.693.200	70,83	97,93		
		Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kelurahan									
2294.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8.134.400		5.709.400	33,33	70,19		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		1		33,33			
2295.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			-		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		0,00			
2296.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			389.882.878		383.254.800	150,00	98,30		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	4		6		150,00			
2297.	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan			3.995.600		4.729.000	100,00	118,36		
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	6		6		100,00			
2298.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			197.912.801		189.955.500	100,00	95,98		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan									
2299.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			197.912.801		189.955.500	100,00	95,98		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	4		4		100,00			
2300.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN TEWAH	
		Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0		0		0,00			
2301.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-	0,00	0,00		
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
2302.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		0,00			
2303.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**91.721.380**		**82.790.000**	**2,22**	**90,26**	KECAMATAN TEWAH	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0		93,57		0,00			
2304.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			91.721.380		82.790.000	2,22	90,26		
		Terselenggaranya Kegiatan 17 Agustus untuk Paskibra dan Pramuka di Kecamatan									
2305.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			91.721.380		82.790.000	2,22	90,26		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	45		1		2,22			
2306.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**73.320.400**		**80.438.000**	**120,83**	**109,71**	KECAMATAN TEWAH	
		Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		42,16		0,00			
2307.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			73.320.400		80.438.000	120,83	109,71		
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
2308.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			2.390.400		3.220.000	250,00	134,71		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	6		15		250,00			
2309.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			62.720.800		69.064.000	100,00	110,11		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15		15		100,00			
2310.	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			3.217.800		3.172.000	100,00	98,58		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	6		6		100,00			
2311.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			4.991.400		4.982.000	33,33	99,81		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	15		5		33,33			
2312.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.496.285.790**		**2.155.304.770**	**74,45**	**86,34**	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
		Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah						74,45			
2313.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41.335.900		36.262.100	100,00	87,73		
		&Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah&									
2314.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7.667.200		7.485.000	100,00	97,62		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4		4		100,00			
2315.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.833.600		3.425.000	100,00	89,34		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2316.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			3.833.600		3.670.000	100,00	95,73		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2317.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.833.600		3.425.000	100,00	89,34		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2		2		100,00			
2318.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		0,00			
2319.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			14.500.700		10.667.100	100,00	73,56		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8		8		100,00			
2320.	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			7.667.200		7.590.000	100,00	98,99		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	8		8		100,00			
2321.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.659.742.217		1.306.557.100	48,15	78,72		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		&Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan&									
2322.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.659.742.217		1.300.957.100	100,00	78,38		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		12		100,00			
2323.	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	29		0		0,00			
2324.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			-		5.600.000	44,44	0,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18		8		44,44			
2325.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.708.800		5.470.000	100,00	81,53		
		&Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan&									
2326.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.708.800		5.470.000	100,00	81,53		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	10		10		100,00			
2327.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
2328.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	42		0		0,00			
2329.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			243.781.478		285.211.387	43,33	116,99		
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2330.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.605.018		14.328.500	12,50	98,11		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	16		2		12,50			
2331.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			82.781.297		82.126.667	17,57	99,21		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	74		13		17,57			
2332.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			20.077.413		19.385.820	114,29	96,56		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7		8		114,29			
2333.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
2334.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			126.317.750		169.370.400	72,28	134,08		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	202		146		72,28			
2335.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100.510.500		85.729.000	37,50	85,29		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		&Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah&									
2336.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.510.500		85.729.000	37,50	85,29		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		3		37,50			
2337.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			286.077.390		290.874.214	100,00	101,68		
		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2338.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.500.000		4.500.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	450		450		100,00			
2339.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			28.794.500		24.028.798	100,00	83,45		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		5		100,00			
2340.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			252.782.890		262.345.416	100,00	103,78		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9		9		100,00			
2341.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158.129.504		145.200.969	97,06	91,82		
		&Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah&									
2342.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			24.058.248		21.500.000	100,00	89,37		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100,00			
2343.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.983.894		74.545.969	100,00	155,36		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		100,00			
2344.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.704.936		19.040.000	88,24	74,07		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	34		30		88,24			
2345.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.382.426		30.115.000	100,00	49,87		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		4		100,00			
2346.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
		Persentase kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kahayan Hulu Utara						0,00			
2347.	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			-		-	0,00	0,00		
		Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah									
2348.	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	0		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2349.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**702.322.808**		**612.084.184**	**100,00**	**87,15**	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						100,00			
2350.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			36.474.840		25.274.700	100,00	69,29		
		"Presentase efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan Desa "									
2351.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			11.039.340		11.039.340	100,00	100,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2352.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			25.435.500		14.235.360	100,00	55,97		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3		3		100,00			
2353.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			492.406.301		413.563.567	100,00	83,99		
		"Presentase efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan Desa "									
2354.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.441.555		3.441.555	100,00	100,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2355.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			288.964.746		286.150.000	100,00	99,03		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		100,00			
2356.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			200.000.000		123.972.012	100,00	61,99		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	6		6		100,00			
2357.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			173.441.667		173.245.917	100,00	99,89		
		Presentase kinerja, keterlibatan masyarakat, dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat									
2358.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			147.428.379		147.428.379	100,00	100,00		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3		3		100,00			
2359.	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			26.013.288		25.817.538	100,00	99,25		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2360.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
		terlasanaknya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)						0,00			
2361.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah									
2362.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		0,00			
2363.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**160.938.678**		**135.150.319**	**66,67**	**83,98**	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						66,67			
2364.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			160.938.678		135.150.319	66,67	83,98		
		Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja									
2365.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			124.519.834		124.513.439	100,00	99,99		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	65		65		100,00			
2366.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			25.781.964		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	5		0		0,00			
2367.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			10.636.880		10.636.880	100,00	100,00		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		1		100,00			
2368.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**48.988.980**		**52.438.980**	**37,50**	**107,04**	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						37,50			
2369.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			48.988.980		52.438.980	37,50	107,04		
		Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, serta persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi									
2370.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	11		0		0,00			
2371.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			48.988.980		52.438.980	150,00	107,04		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	4		6		150,00			
2372.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	4		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2373.	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12		0		0,00			
2374.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.495.313.926**		**3.173.819.965**	**98,33**	**90,80**	KECAMATAN SEPANG	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0		90,72		0,00			
2375.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43.162.840		43.101.400	151,67	99,86		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2376.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.680.000		12.651.500	133,33	99,78		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		4		133,33			
2377.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			9.650.000		9.647.000	400,00	99,97		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		4		400,00			
2378.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			10.422.040		10.394.800	100,00	99,74		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2379.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			5.149.800		5.147.100	100,00	99,95		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
2380.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.261.000		5.261.000	25,00	100,00		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	4		1		25,00			
2381.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.401.049.602		2.066.485.254	119,44	86,07		
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkaulitas									
2382.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.368.856.882		2.035.975.254	158,33	85,95		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		19		158,33			
2383.	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			22.392.720		22.110.000	100,00	98,74		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12		12		100,00			
2384.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			9.800.000		8.400.000	100,00	85,71		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
2385.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			7.134.000		7.092.000	100,00	99,41		
		Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2386.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			7.134.000		7.092.000	100,00	99,41		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2		2		100,00			
2387.	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			6.968.000		6.923.500	300,00	99,36		
		Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah									
2388.	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			6.968.000		6.923.500	300,00	99,36		
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4		12		300,00			
2389.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			292.642.148		353.879.700	63,02	120,93		
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas									
2390.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			19.631.000		23.870.000	50,00	121,59		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50,00			
2391.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			11.501.000		11.490.000	100,00	99,90		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2392.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.740.000		16.740.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2393.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			82.546.133		135.218.000	50,00	163,81		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		1		50,00			
2394.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			22.358.865		22.344.800	50,00	99,94		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		1		50,00			
2395.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			21.774.590		21.735.900	100,00	99,82		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2396.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.928.000		2.910.000	50,00	99,39		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2		1		50,00			
2397.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			115.162.560		119.571.000	4,17	103,83		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	24		1		4,17			
2398.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			413.570.469		379.458.000	50,00	91,75		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan									
2399.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			413.570.469		379.458.000	50,00	91,75		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		2		50,00			
2400.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			228.542.270		215.865.811	46,88	94,45		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2401.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6.500.000		6.500.000	75,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	16		12		75,00			
2402.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			21.628.800		14.093.999	12,50	65,16		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		3		12,50			
2403.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			5.589.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	16		0		0,00			
2404.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			194.824.470		195.271.812	100,00	100,23		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100,00			
2405.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			102.244.597		101.014.300	100,00	98,80		
		Terwujudnya Administrasi Barang Milik yang berkualitas									
2406.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			26.310.225		25.581.900	100,00	97,23		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100,00			
2407.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			75.934.372		75.432.400	100,00	99,34		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7		7		100,00			
2408.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**25.074.600**		**25.007.800**	**200,00**	**99,73**	KECAMATAN SEPANG	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik (%)	0		182,37		0,00			
2409.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.428.200		12.420.100	100,00	99,93		
		Pelaksanaan monitoring dan koordinasi antar perangkat daerah di Kecamatan									
2410.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			12.428.200		12.420.100	100,00	99,93		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	12		12		100,00			
2411.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			12.646.400		12.587.700	300,00	99,54		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
2412.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			12.646.400		12.587.700	300,00	99,54		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		12		300,00			
2413.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**445.042.984**		**416.762.400**	**150,16**	**93,65**	KECAMATAN SEPANG	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		65,33		0,00			
2414.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			9.049.000		9.049.000	100,00	100,00		
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan Desa									
2415.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			9.049.000		9.049.000	100,00	100,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2416.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			253.575.364		251.284.600	33,65	99,10		
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan									
2417.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			4.873.800		4.872.000	62,50	99,96		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	8		5		62,50			
2418.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			-		-	0,00	0,00		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	2		0		0,00			
2419.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			248.701.564		246.412.600	38,46	99,08		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	13		5		38,46			
2420.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			182.418.620		156.428.800	350,00	85,75		
		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan									
2421.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			166.256.780		149.950.000	700,00	90,19		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		7		700,00			
2422.	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			16.161.840		6.478.800	0,00	40,09		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0,00			
2423.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**107.367.900**		**107.274.900**	**62,50**	**99,91**	KECAMATAN SEPANG	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0		106,29		0,00			
2424.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			107.367.900		107.274.900	62,50	99,91		
		Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan									
2425.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			94.663.500		94.575.500	100,00	99,91		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	34		34		100,00			
2426.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			12.704.400		12.699.400	25,00	99,96		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	4		1		25,00			
2427.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**67.259.000**		**73.813.000**	**166,67**	**109,74**	KECAMATAN SEPANG	
		Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		99,7		0,00			
2428.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			67.259.000		73.813.000	166,67	109,74		
		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, serta Pembinaan Pemerintahan Desa									
2429.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			42.600.000		49.200.000	100,00	115,49		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		12		100,00			
2430.	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			12.656.000		12.653.000	300,00	99,98		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	4		12		300,00			
2431.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			12.003.000		11.960.000	100,00	99,64		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	12		12		100,00			
2432.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.307.114.696**		**3.004.217.107**	**60,13**	**90,84**	KECAMATAN MANUHING	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		86,45		0,00			
2433.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.080.825		5.460.000	50,00	41,74		
		Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah									
2434.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			10.902.025		5.460.000	100,00	50,08		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		1		100,00			
		Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah									
2435.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.178.800		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
2436.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.385.619.324		2.161.334.190	100,00	90,60		
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2437.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.383.386.524		2.152.934.190	100,00	90,33		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24		24		100,00			
		Persentasi terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD									
2438.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			2.232.800		8.400.000	100,00	376,21		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		1		100,00			
2439.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			9.109.728		7.875.000	75,00	86,45		
		Pesentase Tersediannya Inventirisasi barang milik daerah di Kecamatan Manuhing&									
2440.	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			9.109.728		7.875.000	75,00	86,45		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		3		75,00			
2441.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.665.030		15.340.000	50,00	44,25		
		Persentase terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi ASN/PTT Kantor Kecamatan Manuhing dan Kel. Tumbang Talaken									
2442.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			34.665.030		15.340.000	100,00	44,25		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2		2		100,00			
		Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran lebih berkualitas									
2443.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0,00			
2444.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			582.215.021		586.493.819	83,69	100,73		
		Persentase Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor									
2445.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.182.190		8.340.000	100,00	74,58		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
		persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor kecamatan dan kelurahan									
2446.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			107.908.182		129.533.392	100,00	120,04		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
		persentase terlaksananya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd									
2447.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			131.366.775		164.082.600	18,46	124,90		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	650		120		18,46			
		persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan dan kelurahan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2448.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			166.185.123		151.586.126	100,00	91,22		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		3		100,00			
		persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan kantor kecamatan dan kelurahan									
2449.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			18.786.456		13.688.726	100,00	72,86		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
		persentase terlaksananya penyediaan bahan/material									
2450.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			146.786.295		119.262.975	0,00	81,25		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		1		0,00			
2451.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			99.746.820		61.000.010	0,00	61,15		
		Persentase terlaksananya pengadaan barang mebel									
2452.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			64.448.820		61.000.010	0,00	94,65		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		20		0,00			
		Persentase terlaksananya pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan									
2453.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			35.298.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
2454.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			17.685.000		12.592.240	18,75	71,20		
		Tersedianya jasa penunjang kantor									
2455.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			17.685.000		12.592.240	18,75	71,20		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48		9		18,75			
2456.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			164.992.947		154.121.848	36,67	93,41		
		Persentase terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas									
2457.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			71.813.997		69.463.000	100,00	96,73		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	15		15		100,00			
		persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya									
2458.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			93.178.950		84.658.848	10,00	90,86		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10		1		10,00			
		Tersedianya dan terpelihara prasarana kantor									
2459.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0,00			
2460.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**238.608.220**		**255.753.588**	**50,00**	**107,19**	KECAMATAN MANUHING	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						50,00			
2461.	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			238.608.220		255.753.588	50,00	107,19		
		persentase terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan									
2462.	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			238.608.220		255.753.588	50,00	107,19		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	2		1		50,00			
2463.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**480.002.641**		**465.460.506**	**95,00**	**96,97**	KECAMATAN MANUHING	
		Meningkatnya Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						95,00			
2464.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.985.565		13.985.565	0,00	100,00		
		Persentase terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrengbang di Desa									
2465.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			13.985.565		13.985.565	0,00	100,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0		1		0,00			
2466.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			420.045.724		418.674.821	93,33	99,67		
		Persentase terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang di Kelurahan									
2467.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			10.386.740		10.386.740	80,00	100,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5		4		80,00			
		persentase terlaksananya Pembagunan srana dan prasarana kelurahan									
2468.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			164.752.380		159.929.770	100,00	97,07		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		100,00			
		Persentase terlaksananya pemberdayaan masyarakat di kelurahan									
2469.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			244.906.604		248.358.311	100,00	101,41		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		1		100,00			
2470.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			45.971.352		32.800.120	100,00	71,35		
		persentase terlaksananya penyelengaraan lembaga kemasyarakatan									
2471.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			45.971.352		32.800.120	100,00	71,35		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2472.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**80.643.870**		**69.530.000**	**50,00**	**86,22**	KECAMATAN MANUHING	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						50,00			
2473.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			80.643.870		69.530.000	50,00	86,22		
		persentase terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna aset desa									
2474.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			80.643.870		69.530.000	50,00	86,22		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	6		3		50,00			
2475.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.412.103.861**		**3.033.256.209**	**104,01**	**88,90**	KECAMATAN RUNGAN	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Meningkatkan kesejahteraan Pegawai (tahun)	1		1		100,00			
			Tersedianya Kebutuhan pemeliharaan Kantor Kelurahan (tahun)	1		1		100,00			
			Meningkatkan wawasan Pegawai (tahun)	1		0		0,00			
			Tersedianya Kebutuhan Pemeliharaan kantor Kecamatan (tahun)	1		1		100,00			
			Tersedianya Kebutuhan kantor Kecamatan (tahun)	1		1		100,00			
			Tersedianya Kebutuhan kantor Kelurahan (tahun)	1		1		100,00			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		84,35		0,00			
2476.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4.978.600		6.252.500	66,67	125,59		
		Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2477.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	12		0		0,00			
2478.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.061.800		1.647.500	100,00	53,81		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	12		12		100,00			
2479.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.916.800		4.605.000	100,00	240,24		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
2480.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.454.560.149		2.191.426.355	630,00	89,28		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
2481.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.441.960.149		2.180.626.355	60,00	89,30		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	20		12		60,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									
2482.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			12.600.000		10.800.000	1.200,00	85,71		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		12		1.200,00			
2483.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			46.900.160		-	0,00	0,00		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
2484.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20		0		0,00			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
2485.	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			46.900.160		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0,00			
2486.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			477.215.356		476.216.952	97,36	99,79		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
2487.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			184.241.290		173.810.861	240,00	94,34		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		12		240,00			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
2488.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.058.350		8.058.350	120,00	100,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	10		12		120,00			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
2489.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.318.371		3.318.371	24,00	100,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		12		24,00			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu									
2490.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			20.034.945		25.785.345	100,00	128,70		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12		12		100,00			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
2491.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			261.562.400		265.244.025	2,79	101,41		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	430		12		2,79			
2492.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.114.000		46.842.000	8,13	43,33		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2493.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			60.162.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
		Pengadaan Mebel									
2494.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	50		0		0,00			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
2495.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			28.860.000		28.194.000	12,50	97,69		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		1		12,50			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
2496.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			19.092.000		18.648.000	20,00	97,67		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		2		20,00			
2497.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			189.324.781		177.409.522	73,81	93,71		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
2498.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			500.000		500.000	0,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12		0		0,00			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
2499.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			23.189.521		7.165.499	50,00	30,90		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		50,00			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
2500.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			165.635.260		169.744.023	171,43	102,48		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7		12		171,43			
2501.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131.010.814		135.108.880	29,17	103,13		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
2502.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			76.124.383		86.035.000	87,50	113,02		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8		7		87,50			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
2503.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
2504.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			54.886.432		49.073.880	0,00	89,41		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		0,00			
2505.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**297.637.937**		**309.319.147**	**432,00**	**103,92**	KECAMATAN RUNGAN	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (undefined)	undefined		0		0,00			
			Peningkatan Pemberdayaan Kelurahan (tahun)	1		1		100,00			
			Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		61,86		0,00			
			Peningkatan Partisipasi lembaga Kemasyarakatan (tahun)	1		1		100,00			
2506.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			6.069.147		6.069.147	0,00	100,00		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
2507.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			6.069.147		6.069.147	0,00	100,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	14		0		0,00			
2508.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			226.036.491		302.410.000	520,00	133,79		
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
2509.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.403.260		114.575.000	120,00	3.366,62		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	10		12		120,00			
2510.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			-		-	1.200,00	0,00		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		12		1.200,00			
2511.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			222.633.231		187.835.000	240,00	84,37		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		12		240,00			
2512.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			65.532.299		840.000	600,00	1,28		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
2513.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			65.532.299		840.000	600,00	1,28		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		12		600,00			
2514.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**219.772.540**		**198.319.860**	**2,27**	**90,24**	KECAMATAN RUNGAN	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0		90,23		0,00			
			Peningkatan kesadaran masyarakat berbangsa dan bernegara (kegiatan)	1		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2515.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			219.772.540		198.319.860	2,27	90,24		
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional									
2516.	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			146.759.040		125.306.360	3,43	85,38		
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	350		12		3,43			
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia									
2517.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			73.013.500		73.013.500	1,11	100,00		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	90		1		1,11			
2518.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**29.179.250**		**28.530.650**	**53,85**	**97,78**	KECAMATAN RUNGAN	
		Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (tahun)	1		1		100,00			
			Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		97,78		0,00			
2519.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			29.179.250		28.530.650	53,85	97,78		
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa									
2520.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			-		-	7,69	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	13		1		7,69			
2521.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			29.179.250		28.530.650	100,00	97,78		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12		12		100,00			
2522.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.125.884.010**		**2.637.487.108**	**78,15**	**84,38**	KECAMATAN MIHING RAYA	
		Terlaksananya urusan pemerintahan daerah	Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah (%)	0		100		0,00			
2523.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.565.600		6.340.000	100,00	96,56		
		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2524.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1.490.000		1.490.000	100,00	100,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2		2		100,00			
2525.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			3.742.800		3.518.000	100,00	93,99		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6		6		100,00			
2526.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1.332.800		1.332.000	100,00	99,94		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9		9		100,00			
2527.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.945.526.661		1.513.050.363	100,00	77,77		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2528.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.934.145.661		1.503.069.363	100,00	77,71		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	18		18		100,00			
2529.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.381.000		9.981.000	100,00	87,70		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	14		14		100,00			
2530.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			4.770.360		3.956.000	100,00	82,93		
		Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah									
2531.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			4.770.360		3.956.000	100,00	82,93		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
2532.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			53.916.070		38.120.106	50,00	70,70		
		Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah									
2533.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	22		0		0,00			
2534.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			53.916.070		38.120.106	100,00	70,70		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	8		8		100,00			
2535.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			536.480.141		527.045.600	85,31	98,24		
		Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah									
2536.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.176.000		14.076.000	80,00	271,95		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		4		80,00			
2537.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			242.471.000		207.839.500	78,26	85,72		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	23		18		78,26			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2538.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			35.977.875		37.920.000	100,00	105,40		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
2539.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.083.000		42.009.500	100,00	99,83		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	23		23		100,00			
2540.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.000.000		14.950.000	100,00	99,67		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
2541.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			25.452.000		25.362.000	88,89	99,65		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	18		16		88,89			
2542.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			170.320.266		184.888.600	50,00	108,55		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	120		60		50,00			
2543.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			91.912.440		86.715.000	66,67	94,35		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2544.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			35.152.590		39.350.000	100,00	111,94		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		4		100,00			
2545.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			56.759.850		47.365.000	100,00	83,45		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		2		100,00			
2546.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
2547.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			349.003.770		332.268.489	96,30	95,20		
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah									
2548.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		3.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
2549.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			32.933.760		26.426.100	88,89	80,24		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	27		24		88,89			
2550.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			313.070.010		302.842.389	100,00	96,73		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		6		100,00			
2551.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137.708.968		129.991.550	61,46	94,40		
		Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah									
2552.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			73.775.100		72.686.400	83,33	98,52		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		10		83,33			
2553.	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			3.600.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3		0		0,00			
2554.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			24.213.700		21.300.000	62,50	87,97		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	16		10		62,50			
2555.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			36.120.168		36.005.150	100,00	99,68		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
2556.	7.01.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			-		-	0,00	0,00		
2557.	7.01.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	20		0		0,00			
2558.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**363.723.127**		**330.252.100**	**48,08**	**90,80**	KECAMATAN MIHING RAYA	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		100		0,00			
2559.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			13.505.295		9.970.000	92,31	73,82		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
2560.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			13.505.295		9.970.000	92,31	73,82		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	13		12		92,31			
2561.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			216.080.295		208.740.000	0,00	96,60		
		Persentase terwujudnya Pemberdayaan Kelurahan									
2562.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			216.080.295		208.740.000	0,00	96,60		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	8		0		0,00			
2563.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			134.137.537		111.542.100	50,00	83,16		
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan Tingkat Kecamatan									
2564.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			111.867.988		111.542.100	100,00	99,71		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5		5		100,00			
2565.	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			22.269.549		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2566.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**145.278.220**		**133.489.500**	**80,80**	**91,89**	KECAMATAN MIHING RAYA	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0		100		0,00			
2567.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			145.278.220		133.489.500	80,80	91,89		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									
2568.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			15.955.320		15.820.000	80,00	99,15		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	10		8		80,00			
2569.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			18.785.725		7.128.500	43,21	37,95		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	81		35		43,21			
2570.	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa			77.028.975		76.980.000	100,00	99,94		
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Orang)	17		17		100,00			
2571.	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			33.508.200		33.561.000	100,00	100,16		
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	35		35		100,00			
2572.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**72.535.250**		**62.384.500**	**45,83**	**86,01**	KECAMATAN MIHING RAYA	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		99		0,00			
2573.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			72.535.250		62.384.500	45,83	86,01		
		Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan di Bidang Pemerintahan Desa									
2574.	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			8.091.530		1.086.000	41,67	13,42		
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12		5		41,67			
2575.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			55.992.240		54.398.000	100,00	97,15		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	5		5		100,00			
2576.	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Dokumen)	1		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2577.	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa			8.451.480		6.900.500	41,67	81,65		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12		5		41,67			
2578.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**3.030.716.239**		**2.790.371.131**	**85,75**	**92,07**	KECAMATAN RUNGAN HULU	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi (%)	0		91,34		0,00			
2579.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			25.593.270		24.712.200	100,00	96,56		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2580.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			9.820.200		9.548.000	100,00	97,23		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3		3		100,00			
2581.	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			10.294.870		9.789.200	100,00	95,09		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	10		10		100,00			
2582.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5.478.200		5.375.000	100,00	98,12		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
2583.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.789.949.617		1.600.923.824	100,00	89,44		
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkaulitas									
2584.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.780.149.617		1.592.523.824	100,00	89,46		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	36		36		100,00			
2585.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			9.800.000		8.400.000	100,00	85,71		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		12		100,00			
2586.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.775.600		17.774.940	50,00	100,00		
		Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan									
2587.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	30		0		0,00			
2588.	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			17.775.600		17.774.940	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		10		100,00			
2589.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			334.821.093		321.874.025	80,00	96,13		
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2590.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			16.709.920		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	11		0		0,00			
2591.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			63.473.248		77.335.235	100,00	121,84		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	86		86		100,00			
2592.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			3.836.400		3.576.800	100,00	93,23		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	36		36		100,00			
2593.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			22.725.654		22.725.654	100,00	100,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	17		17		100,00			
2594.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			228.075.872		218.236.336	100,00	95,69		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		150		100,00			
2595.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			121.790.310		112.135.000	100,00	92,07		
		& Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan &									
2596.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			45.009.390		38.144.000	100,00	84,75		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		1		100,00			
2597.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			76.780.920		73.991.000	100,00	96,37		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		5		100,00			
2598.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			640.739.080		575.701.502	76,44	89,85		
		& Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah &									
2599.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		2.555.000	96,00	85,17		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		48		96,00			
2600.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20.712.000		20.524.500	33,33	99,09		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36		12		33,33			
2601.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			617.027.080		552.622.002	100,00	89,56		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		12		100,00			
2602.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100.047.268		137.249.640	100,00	137,18		
		& Terwujudnya Administrasi Barang Milik yang berkualitas &									
2603.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			80.641.357		79.049.640	100,00	98,03		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13		13		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2604.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			19.405.911		19.400.000	100,00	99,97		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		2		100,00			
2605.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		38.800.000	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		2		0,00			
2606.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**27.034.900**		**27.150.325**	**100,00**	**100,43**	KECAMATAN RUNGAN HULU	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat (%)	0		100		0,00			
2607.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			27.034.900		27.150.325	100,00	100,43		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
2608.	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			27.034.900		27.150.325	100,00	100,43		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	3		3		100,00			
2609.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**451.020.480**		**448.887.047**	**100,00**	**99,53**	KECAMATAN RUNGAN HULU	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		99,53		0,00			
2610.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			14.825.160		14.736.327	100,00	99,40		
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan Desa									
2611.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			14.825.160		14.736.327	100,00	99,40		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12		12		100,00			
2612.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			428.719.800		426.675.200	100,00	99,52		
		Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan									
2613.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			252.169.800		249.597.200	100,00	98,98		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		100,00			
2614.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			176.550.000		177.078.000	100,00	100,30		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	12		12		100,00			
2615.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			7.475.520		7.475.520	100,00	100,00		
		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan									
2616.	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan			7.475.520		7.475.520	100,00	100,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan (Unit)	5		5		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2617.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**10.969.500**		**5.490.000**	**100,00**	**50,05**	KECAMATAN RUNGAN HULU	
		Meningkatnya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0		100		0,00			
2618.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			10.969.500		5.490.000	100,00	50,05		
		Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
2619.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			10.969.500		5.490.000	100,00	50,05		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		100,00			
2620.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**265.831.070**		**252.304.620**	**100,00**	**94,91**	KECAMATAN RUNGAN HULU	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah						100,00			
2621.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			265.831.070		252.304.620	100,00	94,91		
		Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan									
2622.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			265.831.070		252.304.620	100,00	94,91		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	300		300		100,00			
2623.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**42.600.000**		**49.200.000**	**150,00**	**115,49**	KECAMATAN RUNGAN HULU	
		Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		100		0,00			
2624.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			42.600.000		49.200.000	150,00	115,49		
		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, serta Pembinaan Pemerintahan Desa									
2625.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			42.600.000		49.200.000	150,00	115,49		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	8		12		150,00			
2626.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.708.060.448**		**2.059.690.879**	**63,24**	**76,06**	KECAMATAN DAMANG BATU	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kantor	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0		84,93		0,00			
2627.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.541.492.601		1.182.550.125	150,00	76,71		
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan									
2628.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.531.692.601		1.174.150.125	150,00	76,66		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	10		15		150,00			
2629.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			9.800.000		8.400.000	0,00	85,71		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		5		0,00			
2630.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			53.495.996		-	0,00	0,00		
2631.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			53.495.996		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0,00			
2632.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			677.886.705		657.798.620	49,30	97,04		
		Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan									
2633.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		0,00			
2634.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			71.689.600		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4		0		0,00			
2635.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1.190.900		17.081.900	100,00	1.434,37		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2636.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			84.618.617		84.618.155	42,86	100,00		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7		3		42,86			
2637.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.634.038		14.696.000	25,00	94,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8		2		25,00			
2638.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			220.458.400		175.577.765	100,00	79,64		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1		1		100,00			
2639.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.130.000		25.130.000	50,00	100,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4		2		50,00			
2640.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			259.165.150		340.694.800	27,27	131,46		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	44		12		27,27			
2641.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			64.829.550		20.491.000	16,67	31,61		
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2642.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			37.656.750		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
2643.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			27.172.800		20.491.000	33,33	75,41		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		1		33,33			
2644.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			290.384.000		178.778.734	144,44	61,57		
		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2645.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.775.000		23.775.000	33,33	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6		2		33,33			
2646.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.750.000		9.580.000	100,00	51,09		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		24		100,00			
2647.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		0,00			
2648.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			247.859.000		145.423.734	300,00	58,67		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		12		300,00			
2649.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79.971.596		20.072.400	25,00	25,10		
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah									
2650.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0		0		0,00			
2651.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			18.141.983		20.072.400	50,00	110,64		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		2		50,00			
2652.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			61.829.613		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0,00			
2653.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**391.958.335**		**143.972.800**	**80,00**	**36,73**	KECAMATAN DAMANG BATU	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		100		0,00			
2654.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			21.902.200		40.201.000	100,00	183,55		
		Presentase efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan Desa									
2655.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	0		0		0,00			
2656.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			21.902.200		40.201.000	100,00	183,55		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2		2		100,00			
2657.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			370.056.135		103.771.800	73,33	28,04		
		Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang efektif									
2658.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			3.086.050		2.836.000	100,00	91,90		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2659.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			242.028.485		69.963.300	20,00	28,91		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	5		1		20,00			
2660.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			124.941.600		30.972.500	100,00	24,79		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	3		3		100,00			
2661.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**52.865.000**		**56.395.000**	**37,50**	**106,68**	KECAMATAN DAMANG BATU	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		99,55		0,00			
2662.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			52.865.000		56.395.000	37,50	106,68		
		Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
2663.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			45.000.000		32.800.000	66,67	72,89		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	12		8		66,67			
2664.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			7.865.000		23.595.000	8,33	300,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	12		1		8,33			
2665.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.055.870.873**		**1.750.751.006**	**0,00**	**85,16**	KECAMATAN MANUHING RAYA	
								0,00			
2666.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
2667.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0,00			
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel						0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2668.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.591.603		33.086.600	0,00	85,74		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2669.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			12.086.202		8.116.000	0,00	67,15		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1		0		0,00			
2670.	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			9.174.401		8.810.000	0,00	96,03		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
2671.	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			7.063.000		5.897.800	0,00	83,50		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
2672.	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			1.093.600		1.093.600	0,00	100,00		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0,00			
2673.	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			9.174.400		9.169.200	0,00	99,94		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0,00			
2674.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.309.163.171		1.162.573.502	0,00	88,80		
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkaulitas									
2675.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.299.363.171		1.152.773.502	0,00	88,72		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12		0		0,00			
2676.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			9.800.000		9.800.000	0,00	100,00		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		0,00			
2677.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			553.015.071		470.603.800	0,00	85,10		
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas									
2678.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.201.800		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
2679.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			286.874.359		246.694.000	0,00	85,99		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		0,00			
2680.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.020.800		14.020.800	0,00	100,00		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		0,00			
2681.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			28.865.000		28.825.000	0,00	99,86		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		0		0,00			
2682.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			165.053.112		181.064.000	0,00	109,70		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3		0		0,00			
2683.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			53.420.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan									
2684.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			53.420.000		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0,00			
2685.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			57.578.421		50.896.578	0,00	88,40		
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2686.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			57.578.421		50.896.578	0,00	88,40		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		0,00			
2687.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.515.808		32.055.526	0,00	75,40		
		Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan									
2688.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			42.515.808		32.055.526	0,00	75,40		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9		0		0,00			
2689.	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi			1.586.800		1.535.000	0,00	96,74		
		Meningkatnya Penyusunan Laporan Kinerja pelayanan									
2690.	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1.586.800		1.535.000	0,00	96,74		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	1		0		0,00			
2691.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**46.029.200**		**34.490.000**	**0,00**	**74,93**	KECAMATAN MANUHING RAYA	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik						0,00			
2692.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			46.029.200		34.490.000	0,00	74,93		
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
2693.	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0		0		0,00			
2694.	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			46.029.200		34.490.000	0,00	74,93		
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		0,00			
2695.	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			-		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	0		0		0,00			
2696.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**634.432.517**		**490.901.388**	**0,00**	**77,38**	KECAMATAN MANUHING RAYA	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						0,00			
2697.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			17.410.400		66.670.000	0,00	382,93		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa									
2698.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			17.410.400		66.670.000	0,00	382,93		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0,00			
2699.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			423.225.829		269.573.700	0,00	63,70		
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									
2700.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.018.059		6.010.000	0,00	99,87		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0,00			
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
2701.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			248.111.881		94.590.700	0,00	38,12		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		0		0,00			
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
2702.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			169.095.889		168.973.000	0,00	99,93		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1		0		0,00			
2703.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			193.796.288		154.657.688	0,00	79,80		
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan									
2704.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			159.707.688		154.657.688	0,00	96,84		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		0		0,00			
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan									
2705.	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			34.088.600		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	3		0		0,00			
2706.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**33.998.000**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN MANUHING RAYA	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah						0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2707.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			33.998.000		-	0,00	0,00		
		Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan									
2708.	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			33.998.000		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	7		0		0,00			
2709.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.625.662.459**		**2.399.315.355**	**94,04**	**91,38**	KECAMATAN MIRI MANASA	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah (%)	0		86,69		0,00			
			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	0		91,85		0,00			
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		93,01		0,00			
			Persentase Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah (%)	0		94,97		0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0		99,87		0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	0		99,97		0,00			
			Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	0		99,69		0,00			
2710.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.408.073.650		1.240.196.260	118,18	88,08		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2711.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.385.053.033		1.217.262.560	136,36	87,89		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	11		15		136,36			
2712.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			23.020.617		22.933.700	100,00	99,62		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4		4		100,00			
2713.	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			6.065.000		5.760.000	200,00	94,97		
		Tersedianya Data Pendapatan Daerah Lingkup Kecamatan									
2714.	7.01.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			6.065.000		5.760.000	200,00	94,97		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	2		4		200,00			
2715.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			34.266.714		19.600.000	50,00	57,20		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2716.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		0,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2717.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			34.266.714		19.600.000	100,00	57,20		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3		3		100,00			
2718.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			266.488.578		297.957.000	96,60	111,81		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2719.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			41.798.048		43.924.000	23,08	105,09		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13		3		23,08			
2720.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			27.926.490		27.879.000	200,00	99,83		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2		4		200,00			
2721.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			62.496.330		106.785.000	83,33	170,87		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	6		5		83,33			
2722.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			134.267.710		119.369.000	80,00	88,90		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	150		120		80,00			
2723.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			330.080.700		119.776.998	87,50	36,29		
		Tersedianya Sarana menunjang urusan Pemerintah Daerah yang memadai									
2724.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			140.770.200		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0,00			
2725.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			189.310.500		119.776.998	175,00	63,27		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		7		175,00			
2726.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		0,00			
2727.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			452.479.685		588.219.097	75,00	130,00		
		Tersedianya Jasa menunjang urusan Kecamatan									
2728.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3.000.000		3.000.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		1		100,00			
2729.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16.659.450		14.980.000	25,00	89,92		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		1		25,00			
2730.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			432.820.235		570.239.097	100,00	131,75		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		5		100,00			
2731.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			128.208.133		127.806.000	92,50	99,69		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah									
2732.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			63.170.850		63.160.000	200,00	99,98		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		2		200,00			
2733.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			42.116.538		42.116.000	100,00	100,00		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		5		100,00			
2734.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			15.372.279		15.030.000	20,00	97,77		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		1		20,00			
2735.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			7.548.465		7.500.000	50,00	99,36		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		1		50,00			
2736.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**			**-**		**-**	**0,00**	**0,00**	KECAMATAN MIRI MANASA	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik (%)	0				0,00			
2737.	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			-		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat									
2738.	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	0		0		0,00			
2739.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**527.741.887**		**535.814.280**	**78,67**	**101,53**	KECAMATAN MIRI MANASA	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		98,08		0,00			
			Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		99,9		0,00			
2740.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			375.912.342		385.078.280	86,67	102,44		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan									
2741.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			9.026.217		8.710.000	100,00	96,50		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2742.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			195.649.932		221.840.280	100,00	113,39		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1		1		100,00			
2743.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			171.236.194		154.528.000	60,00	90,24		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		3		60,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2744.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			151.829.545		150.736.000	66,67	99,28		
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan									
2745.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			145.594.545		144.536.000	100,00	99,27		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		2		100,00			
2746.	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			6.235.000		6.200.000	33,33	99,44		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3		1		33,33			
2747.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**4.064.655**		**4.035.000**	**100,00**	**99,27**	KECAMATAN MIRI MANASA	
		Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0		99,27		0,00			
2748.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4.064.655		4.035.000	100,00	99,27		
		Terlaksananya Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
2749.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			4.064.655		4.035.000	100,00	99,27		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		1		100,00			
2750.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**69.133.350**		**87.259.000**	**100,00**	**126,22**	KECAMATAN MIRI MANASA	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0		99,78		0,00			
2751.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			69.133.350		87.259.000	100,00	126,22		
		Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Umum									
2752.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			69.133.350		87.259.000	100,00	126,22		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	17		17		100,00			
2753.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**76.788.550**		**87.977.400**	**36,67**	**114,57**	KECAMATAN MIRI MANASA	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		99,39		0,00			
2754.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			76.788.550		87.977.400	36,67	114,57		
		Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
2755.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			52.259.000		63.840.000	100,00	122,16		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	10		10		100,00			
2756.	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			8.375.000		8.053.800	50,00	96,16		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	2		1		50,00			
2757.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	3		0		0,00			
2758.	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			6.941.000		7.128.800	33,33	102,71		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	3		1		33,33			
2759.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			9.213.550		8.954.800	0,00	97,19		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	1		0		0,00			
2760.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**2.579.800.731**		**3.011.428.066**	**60,21**	**116,73**	KECAMATAN RUNGAN BARAT	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kantor	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan LayananPenyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD (persen)	98		83,05		84,74			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, CakupanProgram Peningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan LayananPenyusunan Laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD (persen)	98				0,00			
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	0				0,00			
			Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran, Cakupan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Cakupan ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur, Cakupan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Cakupan Layanan PenyusunanLaporan Renstra, Renja, RKA dan DPA-SKPD (persen)	98				0,00			
2761.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksanannya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2762.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	45		0		0,00			
2763.	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0		0		0,00			
2764.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.448.081.327		1.173.718.831	58,33	81,05		
		Terwujudnya administrasi keuangan yang berkualitas									
2765.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1.438.281.327		1.165.318.831	100,00	81,02		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	16		16		100,00			
2766.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			9.800.000		8.400.000	16,67	85,71		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		2		16,67			
2767.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.012.760		-	0,00	0,00		
		Meningkatnya Penguatan Kapasitas SDM Pegawai Kantor Kecamatan Rungan Barat									
2768.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	32		0		0,00			
2769.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			17.012.760		-	0,00	0,00		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0,00			
2770.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			435.554.988		1.190.196.694	41,48	273,26		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik									
2771.	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.451.526		15.007.000	100,00	131,05		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		2		100,00			
2772.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			106.271.000		24.318.000	3,92	22,88		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	51		2		3,92			
2773.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			86.988.900		237.828.345	10,67	273,40		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	75		8		10,67			
2774.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.031.172		214.849.949	40,00	2.141,82		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		2		40,00			
2775.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			19.401.690		-	0,00	0,00		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	9		0		0,00			
2776.	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			28.360.500		64.385.000	100,00	227,02		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1		1		100,00			
2777.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			173.050.200		633.808.400	35,75	366,26		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	179		64		35,75			
2778.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			206.324.000		138.957.200	150,00	67,35		
		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah									
2779.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			47.150.000		-	0,00	0,00		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0,00			
2780.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			159.174.000		138.957.200	300,00	87,30		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		3		300,00			
2781.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			400.786.524		436.558.241	84,24	108,93		
		tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2782.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.100.000		4.100.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		2		100,00			
2783.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			9.000.000		8.939.000	50,00	99,32		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4		2		50,00			
2784.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			7.864.794		7.830.000	100,00	99,56		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		4		100,00			
2785.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			379.821.730		415.689.241	86,96	109,44		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	46		40		86,96			
2786.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			72.041.132		71.997.100	100,00	99,94		
		Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah kantor Kecamatan Rungan Barat									
2787.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			72.041.132		71.997.100	100,00	99,94		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		3		100,00			
2788.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**			**523.866.346**		**634.381.874**	**85,14**	**121,10**	KECAMATAN RUNGAN BARAT	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	0		97,29		0,00			
			Cakupan Layanan Perencanaan Pembangunan Daerah, Cakupan Layanan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan,Cakupan Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan peran serta Kepemudaan,Cakupan Layanan Program Pembinaan Daerah Bawahan, Cakupan Layanan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalamnegeri (persen)	98				0,00			
2789.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			32.404.198		45.912.900	10,81	141,69		
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Rungan Barat									
2790.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			32.404.198		45.912.900	10,81	141,69		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	37		4		10,81			
2791.	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			407.622.658		509.445.684	100,00	124,98		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									
2792.	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			6.588.584		6.588.584	100,00	100,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	2		2		100,00			
2793.	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			208.048.024		308.300.000	100,00	148,19		
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	3		3		100,00			
2794.	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			192.986.050		194.557.100	100,00	100,81		
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5		5		100,00			
2795.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			83.839.490		79.023.290	100,00	94,26		
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
2796.	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			11.626.200		6.810.000	100,00	58,57		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1		1		100,00			
2797.	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			72.213.290		72.213.290	100,00	100,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	2		2		100,00			
2798.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**			**19.248.200**		**15.040.000**	**100,00**	**78,14**	KECAMATAN RUNGAN BARAT	
		Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	0		98,61		0,00			
			Persentase Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (persen)	100				0,00			
2799.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			19.248.200		15.040.000	100,00	78,14		
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
2800.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			19.248.200		15.040.000	100,00	78,14		
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4		4		100,00			
2801.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**			**111.021.530**		**91.178.730**	**70,83**	**82,13**	KECAMATAN RUNGAN BARAT	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0		99,95		0,00			
			Porsentase Program Peningkatan peran serta Kepemudaan, Cakupan Layanan Program Pembinaan Sosial, Keagamaan danKemasyarakatan (persen)	100				0,00			
2802.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			111.021.530		91.178.730	70,83	82,13		
		Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2803.	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			54.263.000		54.263.000	100,00	100,00		
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	32		32		100,00			
2804.	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			56.758.530		36.915.730	41,67	65,04		
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	60		25		41,67			
2805.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**			**57.559.750**		**70.807.750**	**83,33**	**123,02**	KECAMATAN RUNGAN BARAT	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	0		100		0,00			
			CAKUPAN LAYANAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA (persen)	100				0,00			
2806.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			57.559.750		70.807.750	83,33	123,02		
		Terfasilitasinya, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
2807.	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			47.952.000		61.200.000	66,67	127,63		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	60		40		66,67			
2808.	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif			9.607.750		9.607.750	100,00	100,00		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Dokumen)	11		11		100,00			
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**			**8.187.417.323**		**7.546.963.799**	**111,59**	**92,18**		
2809.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			**4.458.192.778**		**4.046.651.561**	**150,24**	**90,77**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Persentase kebutuhan Administrasi penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0		100		0,00			
2810.	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			29.968.922		36.584.200	200,00	122,07		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
2811.	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.968.922		36.584.200	200,00	122,07		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6		12		200,00			
2812.	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.585.651.760		3.167.024.729	75,00	88,32		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									
2813.	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			3.562.050.516		3.144.454.629	100,00	88,28		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45		45		100,00			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
2814.	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			23.601.244		22.570.100	50,00	95,63		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12		6		50,00			
2815.	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			6.582.403		6.577.400	50,00	99,92		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									
2816.	8.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			6.582.403		6.577.400	50,00	99,92		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	24		12		50,00			
2817.	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-		2.775.000	2,22	0,00		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2818.	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		2.775.000	2,22	0,00		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	45		1		2,22			
2819.	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			236.071.786		282.458.698	250,82	119,65		
		Tercapainya administrasi umum PD									
2820.	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.303.000		5.280.000	0,00	99,57		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0,00			
2821.	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			19.553.538		19.536.400	360,00	99,91		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		18		360,00			
2822.	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			11.903.928		13.266.000	320,00	111,44		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		16		320,00			
2823.	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.000.000		14.998.800	300,00	99,99		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4		12		300,00			
2824.	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000		3.600.000	600,00	30,00		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		24		600,00			
2825.	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			19.013.500		7.971.900	93,33	41,93		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	45		42		93,33			
2826.	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			153.297.820		217.805.598	82,40	142,08		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	250		206		82,40			
2827.	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			63.515.900		41.570.950	0,00	65,45		
		Tercapainya pengadaan Barang Milik Daerah									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2828.	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			63.515.900		41.570.950	0,00	65,45		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		0,00			
2829.	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			382.757.603		361.048.484	88,24	94,33		
		Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2830.	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.000.000		6.996.000	150,00	99,94		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2		3		150,00			
2831.	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			64.593.000		40.973.990	50,00	63,43		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24		12		50,00			
2832.	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			311.164.603		313.078.494	64,71	100,62		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	17		11		64,71			
2833.	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.644.403		148.612.100	145,51	96,72		
		Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah									
2834.	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			42.072.900		41.814.400	100,00	99,39		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		1		100,00			
2835.	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			88.750.900		88.192.700	115,38	99,37		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13		15		115,38			
2836.	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			17.103.600		17.005.000	266,67	99,42		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6		16		266,67			
2837.	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			5.717.003		1.600.000	100,00	27,99		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		1		100,00			
2838.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**			**1.377.887.747**		**1.920.816.438**	**66,67**	**139,40**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	0		7,4		0,00			
			Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	0		90		0,00			
2839.	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.377.887.747		1.920.816.438	66,67	139,40		
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
2840.	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			50.069.800		49.157.000	100,00	98,18		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen)	20		20		100,00			
2841.	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			215.164.200		213.516.800	50,00	99,23		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	200		100		50,00			
2842.	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka			1.112.653.747		1.658.142.638	50,00	149,03		
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	500		250		50,00			
2843.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**			**1.560.565.200**		**907.348.191**	**66,97**	**58,14**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Persentase pendidikan Politik pada kader Partai Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	0		364		0,00			
			Indeks Demokrasi Indonesia (indeks)	0		91		0,00			
2844.	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.560.565.200		907.348.191	66,97	58,14		
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik									
2845.	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			7.328.000		7.313.100	100,00	99,80		
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	9		9		100,00			
2846.	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			13.045.200		11.832.500	100,00	90,70		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	9		9		100,00			
2847.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			1.540.192.000		888.202.591	0,90	57,67		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	1000		9		0,90			
2848.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**			**193.101.780**		**148.144.982**	**50,00**	**76,72**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktip	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	0		100		0,00			
			Indeks Kinerja Ormas (Nilai)	0		68		0,00			
2849.	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			193.101.780		148.144.982	50,00	76,72		
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan									
2850.	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			57.996.300		34.417.414	50,00	59,34		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	100		50		50,00			
2851.	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			135.105.480		113.727.568	50,00	84,18		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	20		10		50,00			
2852.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**			**133.016.165**		**122.322.275**	**50,00**	**91,96**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Persentase kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	0		84,61		0,00			
2853.	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			133.016.165		122.322.275	50,00	91,96		
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
2854.	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			97.481.365		87.257.775	50,00	89,51		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1000		500		50,00			
2855.	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			35.534.800		35.064.500	50,00	98,68		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	1000		500		50,00			
2856.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**			**464.653.653**		**401.680.352**	**60,00**	**86,45**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		Persentase konflik sosial yang di selesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	0		100		0,00			
2857.	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			464.653.653		401.680.352	60,00	86,45		
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7 = 6 / 5 x 100%		8	9
				K	Rp	K	Rp	K	%		
2858.	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			73.146.728		69.037.200	50,00	94,38		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	12		6		50,00			
2859.	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			114.428.080		100.844.300	50,00	88,13		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	100		50		50,00			
2860.	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			20.317.925		7.920.000	50,00	38,98		
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	100		50		50,00			
2861.	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			18.314.420		17.871.300	50,00	97,58		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12		6		50,00			
2862.	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			238.446.500		206.007.552	100,00	86,40		
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12		12		100,00			
	JUMLAH				**1.352.450.785.931**		**1.187.554.725.048**				
	Rata-rata capaian kinerja (%)							**85,83**	**87,81**		
	Predikat kinerja							**Tinggi**	**Tinggi**		

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi dan keselarasan rencana pembangunan dari tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Dalam implementasinya, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 akan berpedoman dan mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2045
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029
7. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

Bab ini menyajikan gambaran kondisi perekonomian Kabupaten Gunung Mas tahun 2026 dan proyeksi perekonomian untuk tahun 2027. Untuk mewujudkan kerangka ekonomi yang tangguh, disusun pula prioritas pembangunan yang terukur serta pengambilan kebijakan strategis. Hal ini bertujuan untuk menjawab tantangan pembangunan yang ada dan menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar di Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2027.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan fiskal, akan dilakukan optimalisasi perkiraan sumber pendapatan daerah. Penentuan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial menjadi landasan utama kebijakan anggaran dalam mengalokasikan rencana kerja berbasis

kinerja yang efektif dan efisien. Fokus ini disinergikan dengan penguatan efisiensi fiskal atas Transfer ke Daerah (TKD). Dengan mengoptimalkan pemanfaatan TKD, diharapkan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih disiplin, tepat sasaran, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan, guna memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional menjadi pedoman utama dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan. Ini juga memandu penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Pendekatan yang digunakan dalam proses ini meliputi aspek politik, teknokratik, partisipatif, *bottom-up*, dan *top-down*. Keberhasilan pembangunan nasional diukur dari pencapaian seluruh sasaran, prioritas, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Implementasi nyata dari rencana ini oleh semua pemangku kepentingan menjadi kunci utama keberhasilan tersebut.

Sinkronisasi dan keselarasan rencana pembangunan pada setiap level hierarki menjadi sangat krusial. Salah satu dokumen acuan utama bagi RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di tingkat nasional. Dokumen RKP ini memuat penjabaran arah kebijakan, program, serta arahan dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah pusat. Ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan. Terwujudnya keselarasan dan sinkronisasi ini merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi rencana pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Bagaimanapun juga, pencapaian target nasional sejatinya adalah akumulasi dari keberhasilan pembangunan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gunung Mas.

Tema dan prioritas RKP 2027 sebagian besar mempertahankan arah strategis luas dari rencana pembangunan nasional sebelumnya. Namun, RKP 2027 juga secara jelas mengintegrasikan program-program dan area penekanan spesifik yang menjadi ciri khas pemerintahan yang baru, seperti program "Makan Bergizi Gratis" (MBG) yang merupakan

inisiatif unggulan. Hal ini menunjukkan upaya yang disengaja untuk memastikan kesinambungan dalam lintasan pembangunan nasional jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menggabungkan dan mengoperasionalkan mandat spesifik, inovasi kebijakan, dan program unggulan dari kepemimpinan baru. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas tata kelola, memastikan prediktabilitas kebijakan, dan membangun pencapaian masa lalu. Ada pun pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Prioritas Nasional 1

   Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Prioritas Nasional 2

   Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3

   Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4

   Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5

   Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6

   Membangun dari Desa dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8

   Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Tahun 2027 sebagai tahun ketiga RPJMN Tahun 2025–2029 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen (8%) pada tahun 2029, dengan sasaran 2027 sebesar 5,9–7,5 persen. Pertumbuhan ini diharapkan meningkatkan gross national income (GNI) per kapita ke US$5.900–5.990, mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas, serta mendukung agenda transisi hijau melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta peningkatan Indeks Modal Manusia. Selain itu, kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi indikator utama untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.1

Sasaran Makro Pembangunan Nasional Tahun 2027

No.	Sasaran dan Indikator	Tahun 2027
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9–7,5
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–6,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30–4,87
4.	Rasio Gini	0,362–0,367
5.	Indeks Modal Manusia	0,575

Sumber: Buku II Arah Pembangunan Pusat dan Daerah – Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, 7 Mei 2026.

Kebijakan Program Strategis Nasional (Pro-SN) dalam RKP Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah. Pro-SN diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas, mengembangkan wilayah berbasis potensi unggulan, dan memperluas akses terhadap infrastruktur serta layanan

dasar. Pro-SN mencakup tiga kelompok utama: Pro-SN Direktif Presiden, Pro-SN Usulan Baru, dan Pro-SN Lanjutan. PSN Direktif Presiden merupakan proyek strategis yang ditetapkan langsung oleh Presiden berdasarkan urgensi, dampak strategis, dan kebutuhan percepatan pelaksanaan agenda prioritas nasional. Pro-SN Direktif Presiden meliputi:

1. Pro-SN Makan Bergizi Gratis;
2. Pro-SN Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
3. Pro-SN Sekolah Rakyat;
4. Pro-SN Kartu Usaha Afirmatif;
5. Pro-SN Kartu Kesejahteraan;
6. Pro-SN Digitalisasi Pendidikan;
7. Pro-SN Pengelolaan Sampah Terpadu;
8. Pro-SN Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit; dan
9. Pro-SN Pengembangan Mobil Nasional.

Pro-SN usulan baru tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan sektor prioritas, peningkatan konektivitas, serta penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Penetapannya dilakukan secara selektif berdasarkan kontribusi terhadap Prioritas Nasional, trisula pembangunan, dan kesiapan proyek. Sementara itu, Pro-SN lanjutan difokuskan pada kesinambungan pelaksanaan dan optimalisasi manfaat proyek lintas tahun.

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, Pro-SN didukung oleh percepatan perizinan, pembiayaan, pengadaan tanah, fasilitasi proyek, penyederhanaan administrasi, serta penguatan pemantauan dan evaluasi berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Persebaran Pro-SN juga diarahkan lebih merata ke luar Jawa untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru.

3.1.2 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PROVINSI

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 adalah "**Peningkatan Skala Aktivitas Ekonomi Daerah dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**". Arah kebijakan ekonomi daerah akan difokuskan pada berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi lokal

melalui penguatan sektor unggulan, perluasan investasi, dan peningkatan layanan publik yang transparan serta akuntabel. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, tangguh, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah di tahun 2027 diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran pembangunan krusial. Ini termasuk mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka, menurunkan Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan, serta mengurangi intensitas emisi gas rumah kaca. Seluruh target ini akan dicapai melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jika target pertumbuhan ini berhasil terealisasi, diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat ketimpangan, dan pada akhirnya mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Tabel 3.2

Sasaran Makro Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2027

No.	Sasaran dan Indikator	RKP Tahun 2027	RKPD 2027 (Prov. Kalteng)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9–7,5	5,1
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–6,5	4,5
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30–4,87	3,79
4.	Rasio Gini	0,362–0,367	0,281
5.	Indeks Modal Manusia	0,575	0,565

Sumber: SIPD-RI (diolah), Mei 2026

3.1.3 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI KABUPATEN

3.1.3.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Tahun 2027

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dianalisis melalui indikator ekonomi makro dan perekonomian lokal. Penting untuk diingat bahwa ekonomi suatu daerah selalu terkait erat dengan perekonomian regional, nasional, dan bahkan global.

Ada beberapa faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah. Ini termasuk kebijakan pemerintah pusat terkait sektor moneter dan sektor riil. Efisiensi fiskal nasional saat ini menuntut adanya sinergi antara kemampuan pemerintah pusat dalam menjaga

stabilitas makro dengan kemampuan pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola keuangan yang produktif. Dimana secara faktual, banyak daerah di Indonesia masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, termasuk Kabupaten Gunung Mas.

Kabupaten Gunung Mas dengan basis ekonomi terbatas masuk dalam pola pengeluaran yang hanya bersifat administratif (belanja pegawai dominan) dibandingkan belanja modal yang bersifat produktif. Efisiensi fiskal nasional menuntut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, dinamika perekonomian global, seperti fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, juga memiliki dampak signifikan. Capaian indikator ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Makro Ekonomi
Tahun 2021 s.d. Tahun 2025

	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024	Capaian 2025	Target 2027
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,09 *	6,47**	4.25	4.48	4,53	5.4
2.	Tingkat/ Angka kemiskinan	%	5.35	5.64	5.47	5.68	5,48	4,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.11	2.96	3.24	3.12	3,31	2.80
4.	Indeks Gini (Gini Ratio)	-	0.278	0.262	0.309	0.255	0,235	0,23
5.	IPM	Indeks	71.03	71.40	73.18	73.88	74,46	75,12

Sumber: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2026

Keselarasan sasaran indikator makro Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Sasaran Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027

No.	Sasaran dan Indikator	RKP Tahun 2027	RKPD 2027 (Prov. Kalteng)	RKPD 2027 (Kab. Gunung Mas)
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9–7,5	5,1	5.4
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0–6,5	4,5	4,9
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30–4,87	3,79	2.80
4.	Rasio Gini	0,362–0,367	0,281	0,23
5.	Indeks Modal Manusia	0,575	0,565	75,12

Sumber: Buku II Arah Pembangunan Pusat dan Daerah – Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, 7 Mei 2026.
SIPD-RI (diolah), Mei 2026

3.1.3.2 Tantangan dan Peluang Ekonomi Daerah Tahun 2027

Memasuki tahun 2027, perekonomian Kabupaten Gunung Mas akan dihadapkan pada dinamika global, nasional, dan regional yang kompleks, menghadirkan baik tantangan maupun peluang signifikan. Pemahaman mendalam terhadap kedua aspek ini krusial untuk perumusan kebijakan pembangunan yang efektif.

1. Tantangan Ekonomi
    a. Salah satu tantangan utama adalah fluktuasi harga komoditas global, terutama sektor pertambangan dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Gunung Mas. Ketergantungan yang tinggi pada komoditas ini membuat daerah rentan terhadap perubahan harga di pasar internasional, yang bisa berdampak langsung pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik atau gejolak pasar finansial juga berpotensi memengaruhi investasi dan perdagangan.
    b. Keterbatasan infrastruktur dasar di beberapa wilayah masih menjadi hambatan dalam pengembangan sektor-sektor potensial, seperti pariwisata dan industri pengolahan.
    c. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum merata, terutama dalam hal keterampilan teknis dan inovasi, juga menjadi tantangan dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan mendorong diversifikasi usaha.
    d. Perubahan iklim yang berpotensi memengaruhi sektor pertanian dan perkebunan, memerlukan adaptasi dan mitigasi yang serius.
2. Peluang Ekonomi
    a. Di sisi lain, Kabupaten Gunung Mas memiliki peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pertanian dan perkebunan tetap menjadi lokomotif dengan potensi hilirisasi yang belum tergarap optimal. Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan nilai jual produk lokal.

b. Potensi pariwisata alam dan budaya Kabupaten Gunung Mas juga sangat menjanjikan. Dengan pengelolaan yang tepat dan promosi yang gencar, sektor ini mampu menarik wisatawan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan aksesibilitas dan pengembangan sarana prasarana penunjang pariwisata akan mempercepat realisasi potensi ini.
c. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang mendorong pemerataan pembangunan dan investasi di daerah juga menjadi peluang. Pemanfaatan dana transfer dan program strategis nasional, seperti pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi menciptakan efek limpahan ekonomi, dapat dimaksimalkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor-sektor prioritas di Kabupaten Gunung Mas.
d. Peningkatan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi juga membuka peluang bagi pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.

Dengan menyadari tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Kabupaten Gunung Mas dapat merumuskan strategi pembangunan yang adaptif dan proaktif guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2027.

3.2. REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2023-2025

Bagian ini menyajikan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama periode tiga tahun terakhir, yakni tahun 2023 s.d. tahun 2025. Sepanjang periode tahun 2023 s.d. tahun 2025, realisasi APBD menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kebijakan fiskal dan pemulihan ekonomi daerah. Pada tahun 2023 dan 2024, fokus utama anggaran diarahkan pada penguatan infrastruktur dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Memasuki tahun 2025, realisasi anggaran lebih dioptimalkan untuk mendukung program-program strategis yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara umum, tren realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan tingkat kepatuhan dan efisiensi yang terjaga. Data

terperinci mengenai komposisi pendapatan, penyerapan belanja, serta capaian surplus atau defisit selama tiga tahun tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini sebagai acuan evaluasi kinerja keuangan daerah.

Tabel 3.5
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2023 (Juta Rupiah)	Realisasi 2024 (Juta Rupiah)	Realisasi 2025 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2026 (Juta Rupiah)
4	**Pendapatan Daerah**	**1.176.119**	**1.441.538**	**1.211.649**	**1.085.876**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**35.992**	**58.708**	**80.479**	**113.700**
4.1.1	Pajak Daerah	11.889	19.378	44.053	82.778
4.1.2	Retribusi Daerah	5.824	3.942	24.618	18.630
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	81	3.942	3.409	5.139
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	18.198	30.445	8.398	7.152
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.135.525**	**1.139.766**	**1.091.447**	**964.976**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.078.210	1.087.918	1.044.685	924.142
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.315	51.848	46.762	40.834
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah**	**4.603**	**243.064**	**39.722**	**7.200**
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	4.603	243.064	39.722	7.200
6	**Pembiayaan Daerah**	**135.547**	**49.817**	**49.200**	**42.294**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**135.547**	**49.817**	**49.200**	**42.294**
TOTAL PENERIMAAN DAERAH		**1.311.753**	**1.491.355**	**1.260.848**	**1.128.170**

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 s.d. Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi 2023 (Juta Rupiah)	Realisasi 2024 (Juta Rupiah)	Realisasi 2025 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2026 (Juta Rupiah)
5	**Belanja Daerah**	**1.250. 221**	**1.430.971**	**1.250.613**	**1.128.170**
5.1	**Belanja Operasi**	**796.281**	**959.681**	**882.013**	**896.303**
5.1.1	Belanja Pegawai	412.033	506.018	540.647	609.761
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	335.530	398.461	326.043	273.899
5.1.4	Belanja Subsidi	0	19	673	818
5.1.5	Belanja Hibah	48.514	54.903	14.445	10.025
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	203	279	203	0
5.2	**Belanja Modal**	**276.130**	**260.127**	**193.568**	**65.635**
5.2.1	Belanja Tanah	360	3.459	989	1.750
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.301	61.532	41.317	24.706
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	62.576	49.167	36.263	9.641

No	Uraian	Realisasi 2023 (Juta Rupiah)	Realisasi 2024 (Juta Rupiah)	Realisasi 2025 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2026 (Juta Rupiah)
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	169.522	143.030	109.604	23.694
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.666	2.161	2.974	4.604
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	705	778	2.419	1.240
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**212**	**197**	**1.593**	**6.595**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	212	197	1.593	6.595
5.4	**Belanja Transfer**	**177.598**	**210.966**	**173.438**	**159.636**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.392	7.115	8.586	8.656
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	172.206	203.850	164.852	150.980
6	**Pembiayaan Daerah**	**11.968**	**11.159**	**0**	**0**
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.968	11.159	0	0
TOTAL PENGELUARAN DAERAH		**1.262.189**	**1.442.130**	**1.250.613**	**1.128.170**

Gambar 3.1
Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah
Tahun 2023 s.d. Tahun 2025

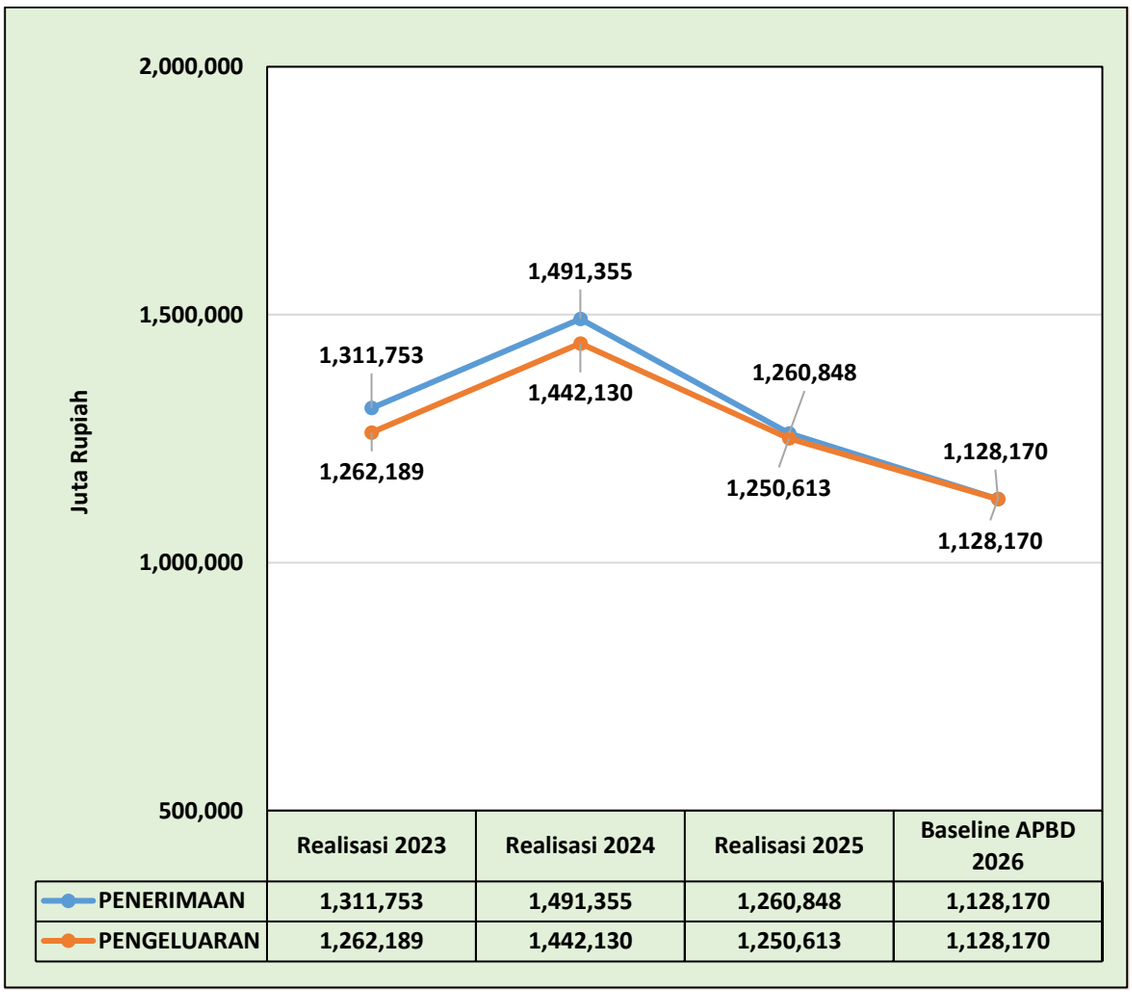

3.3. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, Dana Bagi Hasil serta Dana Alokasi Khusus.

Kapasitas fiskal daerah pada dasarnya akan tercermin dalam volume Rancangan APBD tahun 2027. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah).

Untuk **Pendapatan Daerah** akan bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-Lain Pendapatan Asli Daerah;
2) Pendapatan Transfer terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer Antar Daerah;
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat, Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

Untuk **Belanja Daerah** akan diklasifikasikan atas :

1) Belanja operasi terinci atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
2) Belanja modal dirinci atas belanja modal;
3) Belanja tidak terduga dirinci atas belanja tidak terduga;
4) Belanja transfer dirinci atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk **Pembiayaan Daerah** diklasifikasikan atas :

1) Penerimaan pembiayaan dirinci atas SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
2) Pengeluaran pembiayaan dirinci atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan

3.3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :
   a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
   b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
   c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besamya pajak daerah dan

retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten, sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah kabupaten untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.

g) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam Peraturan Daerah.

i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.

j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.

l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.

m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2027 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :

a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat
   a) Dana perimbangan
      1. Dana Transfer Umum
         a. Dana Bagi Hasil (DBH)

            Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak, dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam.

         b. Dana Alokasi Umum (DAU)

            DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2027 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2027 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan :

a. DAK Fisik
b. DAK Non Fisik

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

d) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah

Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2027;

b) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi.

- Upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah untuk meningkatkan APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027.

  Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan secara keseluruhan meningkatkan APBD Kabupaten Gunung Mas tahun 2027, diperlukan sejumlah strategi yang komprehensif dan terukur. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan :

  1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
     a) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi:
        - Penguatan sistem administrasi perpajakan:
          Melakukan digitalisasi sistem perpajakan, mempermudah pembayaran pajak, dan meningkatkan transparansi.
        - Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Melakukan pengawasan secara berkala terhadap wajib pajak, memberikan sanksi tegas bagi penunggak pajak, dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
        - Ekstensifikasi basis pajak: Menemukan sumber-sumber pendapatan baru yang belum tergarap secara optimal, seperti pajak potensial dari sektor UMKM dan pariwisata.
     b) Pengembangan Sektor Unggulan Daerah:
        - Pariwisata: Mengembangkan destinasi wisata baru, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mempromosikan potensi wisata daerah melalui berbagai media.
        - Pertanian: Meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian, dan memperkuat pemasaran produk pertanian.
     c) Peningkatan Investasi:
        - Penyederhanaan birokrasi perizinan: Mempermudah proses perizinan bagi investor, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.
        - Promosi potensi investasi: Mengadakan kegiatan promosi investasi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
     d) Pengelolaan Aset Daerah:

- Inventarisasi aset daerah: Melakukan pendataan dan penilaian aset daerah secara komprehensif.
- Optimalisasi pemanfaatan aset: Memanfaatkan aset daerah secara produktif, misalnya melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau pengembangan usaha sendiri.

2) Peningkatan Pendapatan Transfer
   a) Meningkatkan kinerja dalam pengelolaan dana transfer: Memastikan penggunaan dana transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, dan melaporkan penggunaan dana secara transparan.
   b) Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran: Menyusun rencana pembangunan daerah yang realistis dan terukur, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.
   c) Memperkuat kerjasama dengan pemerintah pusat: Membangun hubungan yang baik dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk dana transfer.
3) Peningkatan Pendapatan Lain-lain
   a) Optimalisasi pendapatan dari hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Meningkatkan kinerja BUMD, melakukan diversifikasi usaha, dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap PAD.
   b) Pengembangan potensi pendapatan dari sektor lain: Misalnya, pendapatan dari hasil pengelolaan hutan, perikanan, dan jasa lingkungan.
4) Penguatan Kelembagaan
   a) Peningkatan kapasitas aparatur: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.
   b) Penguatan sistem pengendalian internal: Menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.
   c) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Melakukan publikasi laporan keuangan secara berkala, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas secara konsisten dan terukur, diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Gunung Mas dan secara keseluruhan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.3.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana

Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja daerah sebagaimana tercantum pada diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

   Belanja operasi dirinci atas jenis :

   1) Belanja Pegawai

      Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :

a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD;
c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2027.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada

APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur

perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

f) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada :
   1. Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

g) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
   1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
   2) pimpinan dan anggota DPRD; dan
   3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten yang bersangkutan.

h) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

k) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

l) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk halhal sebagai berikut :

   1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

m) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan

n) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
   1) hadiah yang bersifat perlombaan;
   2) penghargaan atas suatu prestasi;
   3) beasiswa kepada masyarakat;
   4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2027 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2027 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

Belanja subsidi kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penerima subsidi yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027, harus terlebih dahulu dilakukan audit keuangan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Audit keuangan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kantor akuntan publik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk penganggaran pemberian subsidi.

Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang

diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

Pemerintah Daerah menganggarkan belanja subsidi tersebut dalam APBD Tahun Anggaran 2027 pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Terhadap pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali :
    a. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial

dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2027 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria :

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2027 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas :
   a) belanja modal tanah;
   b) belanja modal peralatan dan mesin;
   c) belanja modal bangunan dan gedung;
   d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
   e) Belanja modal aset tetap lainnya;
   f) Belanja modal aset tidak berwujud.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2027 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

1) bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

   Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari :

   a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten.

      Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

      1. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 30%;

2. hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;
3. hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten sebesar 70%;
4. hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten sebesar 50%.

   Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten yang bersangkutan sebesar 80%.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dianggarkan secara bruto.

b) pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

   Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten pada Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi dianggarkan secara bruto.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas :

a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten;
c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten di luar wilayahnya;
d) bantuan keuangan daerah kabupaten ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau

e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kepada desa.

Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten Tahun Anggaran 2027 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah kabupaten harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2027 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.3 Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.3.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari :

1) SiLPA

   Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari :

   a) pelampauan penerimaan PAD;
   b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
   c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
   d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
   e) penghematan belanja;
   f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
   g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

2) Pencairan Dana Cadangan

   Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

   Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

   Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
2) Penyertaan Modal Daerah
3) Pembentukan Dana Cadangan
4) Pemberian Pinjaman Daerah
5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.3.5 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2027 bersaldo nihil. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang

bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3.6 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kerangka APBD Kabupaten Gunung Mas dapat di rinci sesuai tabel berikut :

Tabel 3.7
Kerangka Pendapatan Daerah

No	Uraian	Realisasi 2025 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2026 (Juta Rupiah)	Proyeksi 2027 (Juta Rupiah)
4	**Pendapatan Daerah**	**1.211.649**	**1.085.876**	**1.085.876**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**80.479**	**113.700**	**113.700**
4.1.1	Pajak Daerah	44.053	82.778	82.778
4.1.2	Retribusi Daerah	24.618	18.630	18.630
4.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	3.409	5.139	5.139
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	8.398	7.152	7.152

No	Uraian	Realisasi 2025 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2026 (Juta Rupiah)	Proyeksi 2027 (Juta Rupiah)
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.091.447**	**964.976**	**964.976**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.044.685	924.142	924.142
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	46.762	40.834	40.834
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah**	**39.722**	**7.200**	**7.200**
4.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan	39.722	7.200	7.200
6	**Pembiayaan Daerah**	**49.200**	**42.294**	**42.294**
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**49.200**	**42.294**	**42.294**
TOTAL PENERIMAAN DAERAH		**1.260.848**	**1.128.170**	**1.128.170**

Tabel 3.8
Kerangka Belanja Daerah

No	Uraian	Realisasi 2025 (Juta Rupiah)	Baseline APBD 2026 (Juta Rupiah)	Proyeksi 2027 (Juta Rupiah)
5	**Belanja Daerah**	**1.250.613**	**1.128.170**	**1.128.170**
5.1	**Belanja Operasi**	**882.013**	**896.303**	**896.303**
5.1.1	Belanja Pegawai	540.647	609.761	609.761
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	326.043	273.899	273.899
5.1.4	Belanja Subsidi	673	818	818
5.1.5	Belanja Hibah	14.445	10.025	10.025
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	203	0	0
5.2	**Belanja Modal**	**193.568**	**65.635**	**65.635**
5.2.1	Belanja Tanah	989	1.750	1.750
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.317	24.706	24.706
5.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	36.263	9.641	9.641
5.2.4	Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	109.604	23.694	23.694
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.974	4.604	4.604
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	2.419	1.240	1.240
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**1.593**	**6.595**	**6.595**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.593	6.595	6.595
5.4	**Belanja Transfer**	**173.438**	**159.636**	**159.636**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.586	8.656	8.656
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	164.852	150.980	150.980
6	**Pembiayaan Daerah**	**0**	**0**	**0**
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0
TOTAL PENGELUARAN DAERAH		**1.250.613**	**1.128.170**	**1.128.170**

Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas berkomitmen penuh terhadap penyesuaian porsi belanja pegawai sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Dalam RKPD tahun 2027, belanja daerah sebesar Rp.1.128.170juta dengan alokasi untuk belanja pegawai sebesar Rp.609.761juta. Sehingga diperoleh rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah sebesar 54,05%. Pemerintah daerah menyadari bahwa tantangan fiskal saat ini menuntut langkah-langkah strategis untuk melakukan efisiensi birokrasi dan optimalisasi belanja operasional. Oleh karena itu, percepatan penurunan rasio belanja pegawai akan dilakukan secara bertahap melalui kebijakan belanja yang lebih selektif serta upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.

3.3.7 Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2027

Memasuki tahun anggaran 2027, kapasitas riil keuangan daerah mencerminkan kemampuan nyata pemerintah daerah dalam membiayai belanja wajib dan pembangunan prioritas setelah dikurangi dengan kewajiban mendesak serta beban utang masa lalu. Kapasitas ini menjadi indikator kesehatan fiskal yang lebih akurat dibandingkan sekadar melihat total pendapatan, karena berfokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketersediaan dana bebas yang dapat dialokasikan untuk program inovatif setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja wajib (*mandatory spending*).

Pada tahun 2027, fokus utama adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang tersedia benar-benar memiliki "daya ungkit" tinggi bagi kesejahteraan masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kas daerah.

Tabel 3.9
Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2027

I	**PENERIMAAN DAERAH**		**1,128,170,000,000.00**
II	**BELANJA WAJIB**		**786,835,527,792.38**
	Belanja Pegawai	609,760,925,053.38	
	Belanja Subsidi	818,021,288.00	
	Belanja Hibah	10,024,803,091.00	
	Belanja Bantuan Sosial	0.00	
	Belanja Tidak Terduga	6,595,600,000.00	
	Belanja Bagi Hasil	8,655,818,560.00	
	Belanja Bantuan Keuangan	150,980,359,800.00	
	Pengeluaran Pembiayaan	0.00	
III	**KAPASITAS RIIL KEUANGAN**		**341,334,472,207.62**
		PRIORITAS 1 (30%)	**102,400,341,662.29**
		PRIORITAS 2 (40%)	**136,533,788,883.05**
		PRIORITAS 3 (30%)	**102,400,341,662.29**
PRIORITAS 1 (30%) Belanja langsung wajib dan pelayanan dasar			
PRIORITAS 2 (40%) Belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah			
PRIORITAS 3 (30%) Belanja urusan pemerintahan lainnya			

3.4 PENDANAAN NON-APBD

Dalam upaya mempercepat pencapaian target pembangunan daerah yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menerapkan skema pendanaan non-APBD melalui optimalisasi peran sektor swasta dalam pembangunan melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Langkah ini bertujuan untuk memperluas ruang fiskal melalui kolaborasi lintas sektor.

Melalui sinergi pendanaan ini, Pemerintah Daerah berupaya menutup kesenjangan anggaran sekaligus memastikan keberlanjutan program pembangunan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat tanpa membebani keuangan daerah.

Pada tahun 2027, fokus utama kemitraan ini diarahkan pada penyelesaian pekerjaan yang berdampak langsung pada kualitas hidup dan konektivitas masyarakat, yakni:

1. Pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah - Reduce, Reuse, Recycle).

   Melalui dukungan CSR, dilakukan penguatan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat serta mengubah paradigma pengelolaan limbah dari sekadar dibuang menjadi bernilai ekonomi (sirkular).
2. Program Bedah Rumah (RLTH)

Sebagai wujud kepedulian sosial, skema CSR disinergikan untuk menuntaskan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH). Fokus program ini adalah memberikan hunian yang aman, layak, dan sehat bagi keluarga prasejahtera, sehingga mampu meningkatkan martabat serta kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Penyelesaian Jembatan Sepang

   Sebagai instrumen konektivitas vital, percepatan penyelesaian Jembatan Sepang melalui pendanaan non-APBD menjadi prioritas. Dukungan dari sektor swasta diprioritaskan untuk memastikan jembatan segera berfungsi, sehingga arus distribusi barang dan aksesibilitas warga dapat terhubung kembali guna menunjang produktivitas ekonomi daerah.

Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha ini menjadi model kolaborasi strategis untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal daerah, sekaligus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan secara berkelanjutan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) yang meliputi:

1. Prioritas Nasional 1
   Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
2. Prioritas Nasional 2
   Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Prioritas Nasional 3
   Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Prioritas Nasional 4
   Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Prioritas Nasional 5
   Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Prioritas Nasional 6
   Membangun dari Desa dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7. Prioritas Nasional 7
   Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8

   Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor Langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional, kegiatan prioritas utama serta proyek strategis nasional.

Tabel 4.1

17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanaan negara pemeliharaan dan hubungan interansional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. 2. Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan rumah sakit membangun lengkap berkualitas di kabupaten. 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. 4. Membangun sekolah sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten memperbaiki dan sekolah sekolah yang perlu renovasi. 5. Melanjutkan dan menambahkan kartu-kartu program kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota kota inovatif, karateristik mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Selain kegiatan prioritas utama, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas juga memperhatikan dan mendukung proyek strategis nasional dan delapan (8) Klaster Program Kerja Prioritas Nasional. Dukungan pada 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional dimaksud adalah:

1. Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).
   b. Fasilitasi Sekolah Rakyat (SR).
   c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
   d. Penuntasan Tuberkolosis.
   e. Bantuan Perlengkapan Sekolah.
   f. Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
   g. Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan.

2. Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
3. Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Pemanfaatan SDI.
   b. Pemanfaatan DSSD.
4. Regulasi dan Hukum.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Pemberantasan Narkoba
5. Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Elektrifikasi Desa
6. Industri Nasional.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu
7. Hilirisasi SDA Strategis.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Hilirisasi Industri Strategis (hilirisasi berbasis produk agro).
8. Swasembada Pangan, Energi, dan Air.
   Bentuk dukungan berupa:
   a. Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
   b. Pengembangan kawasan pangan terintegrasi.
   c. Pengembangan Kawasan Perkebunan.
   d. Peningkatan produksi daging, susu, dan telur.
   e. Gerakan ASRI: Penghijauan.

Selain selaras dengan Prioritas Nasional, perencanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas juga harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Ada pun Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Prioritas 1:
   Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung Pembangunan.
2. Prioritas 2:
   Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Prioritas 3:
   Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat
4. Prioritas 4:

Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau

5. Prioritas 5:
   Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi
6. Prioritas 6:
   Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat
7. Prioritas 7:
   Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah
8. Prioritas 8:
   Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial
9. Prioritas 9:
   Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan
10. Prioritas 10:
    Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraannya, untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang berfokus pada sasaran strategis atau sejauh mana Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah telah tercapai, ditetapkan dengan Indikator Tujuan dan Sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029:

Tabel 4.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027

VISI:	"MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI".					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TARGET PEMBANGUNAN**		
				Satuan	**Baseline 2024**	**2027**
MISI 1: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	**Tujuan 1. Menyediakan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas**		**Indeks Infrastruktur**	**Poin**	**65,13**	**72,63**
		Sasaran 1.1 Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	-	54,75
		Sasaran 1.2 Meningkatnya kapasitas dan kualitas aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	80,12	82,56
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana pembangunan di seluruh wilayah	Persentase Desa Mandiri	%	8,77	14,04
	Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup		**Penurunan Intensi tas Emisi GRK**	**Ton Co2 eq**	-	**974,049. 19**
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69,33	78,68
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas antisipasi dan penanganan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Poin	121,85	120,14

VISI:	"MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI".					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TARGET PEMBANGUNAN**		
				Satuan	**Baseline 2024**	**2027**
MISI 2: Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	**Tujuan 3. Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing**		**Indeks Pembangunan Manusia**	**Indeks**	**73,88**	**75,12**
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Poin	64,84	67,66
		Sasaran 3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	82,43	83,01
		Sasaran 3.3 Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,570	0,54
		Sasaran 3.4 Meningkatnya pembangunan SDM yang berbudaya dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	58,24	59,12
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,74	65,60
MISI 3: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	**Tujuan 4: Meningkatkan pembangunan ekonomi wilayah yang berkeadilan dalam rangka mendukung transformasi ekonomi**		**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**%**	**4,48**	**5,40**
			PDRB per kapita	**Rp. Juta / Kapita**	**67,08**	**72,00**
		Sasaran 4.1 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,18	6,54
		Sasaran 4.2 Meningkatnya pemberdayaan perekonomian	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,54	3,77

VISI:	"MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI".					
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN**	**TARGET PEMBANGUNAN**		
				Satuan	**Baseline 2024**	**2027**
		kerakyatan berbasis hilirisasi				
		Sasaran 4.3. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Kab, Gunung Mas terhadap PDRB Prov, Kalimantan Tengah*	%	4,38	4,39
	Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat		**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**5,68**	**4,90**
		Sasaran 5.1 Meningkatnya pemerataan ke sejahteraan masyarakat	Gini Rasio	Poin	0,25	0,23
		Sasaran 5.2 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja berkualitas	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,12	2,80
MISI 4: Peningkatan Reformasi Birokrasi	**Tujuan 6. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang profesional, bersih, dan akuntabel**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**58,35**	**64,00**
			Indeks Daya Saing Daerah	**Poin**	**3,27**	**3,52**
		Sasaran 6.1 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Poin	61,63	65,82
		Sasaran 6.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2,09	2,75

VISI:	"MEWUJUDKAN GUNUNG MAS YANG MAJU, BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN MANDIRI".					
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET PEMBANGUNAN		
				Satuan	Baseline 2024	2027
		Sasaran 6.3 Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan berkualitas	Indeks Integritas Nasional	Poin	73,53	76,75

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2027 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Gambar 4.1
Keselarasan Arah Pembangunan
antara Nasional dengan Kabupaten

Gambar 4.2
Keselarasan Arah Pembangunan
antara Provinsi dengan Kabupaten

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut :

1. Standart Pelayanan Minimal (SPM)

   Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Kepala Daerah menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

   a) Pendidikan

      Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

      - pendidikan anak usia dini;
      - pendidikan dasar; dan

- pendidikan kesetaraan

b) Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pelayanan kesehatan ibu hamil;
- pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- pelayanan kesehatan balita;
- pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

d) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

e) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- pelayanan informasi rawan bencana;
- pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana; dan
- pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran

f) Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

2. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perkada tentang RKPD Tahun 2027.

4.2 TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Pembangunan Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2027 menandai sebuah fase krusial dalam mengakselerasi transformasi daerah menuju masyarakat yang lebih berdaya saing. Tema RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 adalah ***"PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH"***. Tema ini dipilih sebagai komitmen strategis untuk memastikan bahwa kemajuan pembangunan tidak hanya dirasakan di pusat pemerintahan, namun merata hingga ke pelosok desa dan kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menempatkan fondasi infrastruktur sebagai akselerator peningkatan kualitas SDM. Kualitas

SDM yang "Unggul" diwujudkan melalui penguatan akses dan mutu pendidikan yang inklusif, serta pelayanan kesehatan yang responsif. SDM yang "Produktif" dipersiapkan melalui penguasaan keterampilan berbasis kompetensi yang relevan dengan potensi lokal, seperti sektor pertanian modern, pariwisata, hingga pengolahan industri kreatif. Tujuannya jelas yaitu menciptakan generasi yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga memiliki daya cipta untuk mendorong kemandirian ekonomi.

Gambar 4.3

Keselarasan tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Gunung Mas

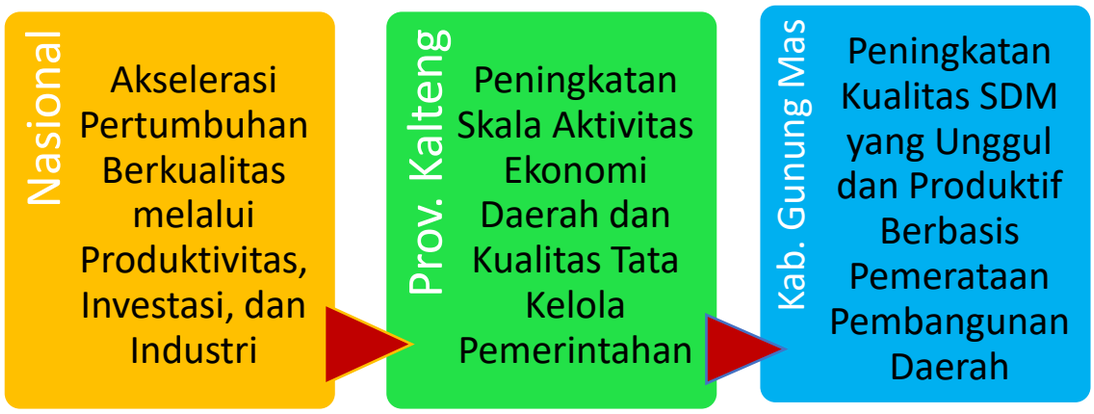

4.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027

Dengan tema ***"PENINGKATAN KUALITAS SDM YANG UNGGUL DAN PRODUKTIF BERBASIS PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAERAH",*** Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal.
2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan.
3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan.
4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai.
5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas.
6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran.

7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas).
8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal.
9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas.
10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif.

Adapun 10 Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas tersebut sudah selaras dan berkesinambungan dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu :

1) Tanpa Kemiskinan
2) Tanpa Kelaparan
3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera
4) Pendidikan berkualitas
5) Kesetaraan Gender
6) Air Bersih dan sanitasi layak
7) Energi bersih dan terjangkau
8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9) Industri, inovasi dan infrastruktur
10) Berkurangnya kesenjangan
11) Kota dan komunikasi berkelanjutan
12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
13) Penanganan perubahan iklim
14) Ekosistem laut/air (Wilayah Gunung Mas tidak ada Laut)
15) Ekosistem daratan
16) Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Selain Prioritas Pembangunan di atas, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, Kepala Daerah terpilih Kabupaten Gunung Mas periode 2025-2029 telah mengusulkan sejumlah kebijakan, program, dan kegiatan prioritas. Rencananya, program-program ini akan diimplementasikan secara bertahap selama lima tahun masa jabatannya.

Program prioritas Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.4

Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029

Kepala Daerah terpilih Kabupaten Gunung Mas periode 2025-2029 hadir dengan visi pembangunan yang kuat dan terukur, diwujudkan melalui serangkaian program prioritas strategis. Program-program ini dirancang berdasarkan analisis mendalam terhadap potensi dan tantangan daerah, serta aspirasi masyarakat. Ini adalah manifestasi nyata dari komitmen untuk membawa Kabupaten Gunung Mas menuju era kemajuan dan kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif.

Program prioritas strategis Kepala Daerah dirancang dengan cermat, memadukan **kearifan lokal** dalam penamaannya agar selaras dengan semangat pembangunan kebudayaan. Program prioritas strategis ini menggunakan idiom "**Tambun Bungai**", nama dua tokoh bersaudara legendaris yang dikenal cerdas, lemah lembut, ramah, suka menolong, banyak memberi, bijaksana, dan pantang menyerah membela kebenaran. Untuk mengenang semangat kepahlawanan mereka, sebuah monumen berupa patung lengkap dengan riwayat dan profil Tambun dan Bungai telah dibangun di Desa Tumbang Pajangei Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas.

Program Tambun Bungai ini terbagi menjadi lima pilar utama, yaitu:

1. **Tambun Bungai Maju** berbicara tentang kemajuan infrastruktur yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Maju diperuntukan untuk mencapai misi pertama

yaitu peningkatan pembangunan Infrastruktur, wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan program sebagai berikut:

1. Jalan Kabupaten Fungsional dan mantap.

   Melalui program ini, ruas jalan kabupaten yang dibangun mampu melayani lalu lintas sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan dasar untuk operasi, berada dalam kondisi baik dan prima, memenuhi standar teknis jalan yang ditetapkan, serta mampu melayani volume dan beban lalu lintas secara optimal dengan tingkat kenyamanan dan keamanan yang tinggi.
2. Penyelesaian Jembatan Sepang Simin - Sepang Kota.

   Jembatan Sepang Simin - Sepang Kota yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sepang (menghubungkan Sepang Simin dan Sepang Kota) telah rampung konstruksinya dan fungsional sepenuhnya.
3. Penyediaan Rumah Layak Huni.

   Jumlah unit rumah yang berhasil ditingkatkan kualitasnya (melalui program rehabilitasi atau bedah rumah) atau dibangun baru, sehingga memenuhi standar minimum kelayakan huni berdasarkan aspek keselamatan bangunan, kecukupan luas, dan kesehatan penghuni. Pendanaan untuk program ini diupayakan melalui dukungan skema Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility*.
4. Pemenuhan kebutuhan Air bersih.

   Terpenuhinya akses fisik dan ketersediaan air minum yang aman, cukup, dan terjangkau bagi individu atau komunitas, untuk keperluan rumah tangga, higiene pribadi, dan kebutuhan dasar lainnya.
5. Seluruh Desa di Gunung Mas Berlistrik.

   Kondisi di mana setiap desa administratif yang terdaftar secara resmi dalam wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, memiliki akses pasokan listrik yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara aktif oleh sebagian besar rumah tangga dan fasilitas publik di dalamnya.
6. Penyediaan Jaringan Telekomunikasi di seluruh wilayah Gunung Mas.

   Kondisi di mana setiap desa dan kelurahan yang secara administratif berada di Kabupaten Gunung Mas memiliki akses dan ketersediaan layanan telekomunikasi.

7. Peningkatan Bandar Udara Kuala Kurun.

   Peningkatan Bandar Udara Kuala Kurun akan diukur dan diidentifikasi melalui beberapa indikator yaitu : Dimensi Fisik Runway, Fasilitas Pendukung Runway, dan Kapasitas Operasional Bandara. Peningkatan ini dapat berupa perbaikan fisik landasan, peningkatan fasilitas yang berkontribusi pada fungsi bandara secara menyeluruh, pembebasan lahan dan penyediaan ruang terbuka hijau.

2. Tambun Bungai Sehat berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang sehat secara jasmani dan rohani serta diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Sehat diperuntukan untuk mencapai misi peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan program sebagai berikut:

1. UHC untuk layanan kesehatan.

   Semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan esensial berkualitas yang mereka butuhkan, kapanpun dan di manapun, tanpa mengalami kesulitan finansial yang berarti. Ini mencakup seluruh spektrum layanan kesehatan, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, hingga perawatan paliatif. Kabupaten Gunung Mas sudah UHC sejak tahun 2023. Target Kabupaten Gunung Mas adalah mempertahankan UHC ini pada tahun 2026 s.d. 2029 dan target tahun 2030 adalah UHC Prioritas. Untuk mencapai target UHC Prioritas adalah, pemerintah harus berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) minimal 95% dari total penduduk dan tingkat keaktifan peserta minimal 75%.
2. Penurunan Angka Prevalensi Stunting.

   Menurunnya persentase balita (anak usia 0-59 bulan) yang mengalami stunting (tinggi badan menurut usia kurang dari -2 standar deviasi WHO) di suatu wilayah atau populasi tertentu selama periode waktu yang telah ditentukan. Sejak tahun 2023 Kabupaten Gunung Mas merupakan Kabupaten dengan angka prevalensi stunting terendah se-Provinsi Kalimantan Tengah dan diupayakan tetap menjadi yang terendah.
3. Fasilitasi Program 1 Desa 1 Ambulance.

Fasilitasi Program Provinsi Kalimantan Tengah "1 Desa 1 Ambulans" adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung dan memperlancar implementasi program penyediaan satu unit ambulance di setiap desa, dengan tujuan utama meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan pelayanan kegawatdaruratan medis bagi seluruh masyarakat desa, dengan Kabupaten Gunung Mas sebagai fasilitator utama (sinergi).

4. Revitalisasi dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan.
   Mengembalikan dan meningkatkan fungsi serta kinerja Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) dan Pustu (Puskesmas Pembantu) agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, merata, dan berkualitas kepada masyarakat sesuai dengan standar yang berlaku. Upaya ini mencakup aspek fisik, sumber daya manusia, manajemen, dan layanan.

3. Tambun Bungai Cerdas berbicara tentang kemajuan Sumber daya Manusia yang memiliki kemampuan intelektual unggul yang diharapkan dapat tercapai dalam 5 tahun pembangunan. Tambun Bungai Sehat diperuntukan untuk mencapai misi peningkatan kualitas pembangunan SDM yang unggul, berbudaya dan berdaya saing dengan program prioritas sebagai berikut

1. PAUD,SD,SMP Gratis.
   Batasan yang jelas mengenai kriteria dan implementasi pendidikan gratis pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Gunung Mas. Pelaksanaan program PAUD,SD,SMP Gratis ini secara utama difokuskan pada seluruh sekolah negeri yang merupakan kewenangan administratif Pemerintah Kabupaten.
2. Beasiswa Tidak Mampu.
   Berupa bantuan finansial yang diberikan kepada mahasiswa yang menghadapi kendala ekonomi untuk menunjang kelancaran studi mereka. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa berpotensi yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan finansial tetap memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan tinggi.
3. Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fasilitasi Program Pemerintah Pusat "Makan Bergizi Gratis (MBG)" adalah serangkaian kegiatan terstruktur yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan konsumsi makanan bergizi secara gratis bagi kelompok sasaran yang telah ditentukan, dalam rangka meningkatkan status gizi dan kesehatan mereka, dengan Kabupaten Gunung Mas sebagai fasilitator utama (sinergi).

4. Fasilitasi Sekolah Rakyat (SR).

   Fasilitasi Program Pemerintah Pusat "Sekolah Rakyat (SR)" adalah serangkaian aktivitas terencana dan sistematis yang bertujuan untuk mendukung pembentukan, pengembangan, dan keberlanjutan Sekolah Rakyat sebagai wadah pembelajaran kolektif dan pemberdayaan masyarakat, dengan Kabupaten Gunung Mas sebagai fasilitator utama (sinergi).

5. Peningkatan Kompetensi Guru.

   Suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional guru agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan.

6. Peningkatan kemampuan literasi dan Numerasi.

   Peningkatan numerasi di Rapor Pendidikan mengacu pada peningkatan capaian peserta didik dalam aspek numerasi, yang direfleksikan melalui indikator-indikator yang termuat dalam Rapor Pendidikan.

4. Tambun Bungai Mandiri berbicara tentang kemandirian ekonomi yang diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dengan dengan program prioritas sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Bertambahnya penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dalam suatu periode fiskal tertentu dibandingkan dengan periode fiskal sebelumnya.

   Strategi peningkatan PAD dari sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (P3) akan dioptimalkan melalui sinergi antara Koperasi Merah Putih dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai tambah dari

sumber daya alam yang ada di daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan adil.

Kabupaten Gunung Mas, dengan kekayaan alam yang melimpah, memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD. Salah satu sektor yang paling menonjol namun belum tergarap optimal adalah pertambangan emas rakyat. Potensi cadangan emas yang signifikan di Kabupaten Gunung Mas, yang saat ini banyak dikelola secara informal, merupakan "harta karun" yang harus segera diangkat ke permukaan melalui legalisasi dan tata kelola yang tepat. Kabupaten Gunung Mas memiliki potensi pertambangan emas rakyat yang besar, produksi dua Desa di Kecamatan Kurun saja mencapai 1,4 kg emas aluvial per bulan dari luas lahan 393 hektar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat masih banyak melakukan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan hukum sehingga diperlukan penguatan kebijakan daerah untuk mendorong pengelolaan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK) secara legal, ramah lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat melakukan percepatan penyusunan Peraturan Daerah untuk mengatur IPERA dalam meningkatkan pendapatan daerah segera setelah WPR ditetapkan. Dalam penyusunan peraturan daerah tersebut ada koordinasi dengan kabupaten untuk menyepakati pembagian hasil usaha pertambangan rakyat. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menyusun Peraturan Kepala Daerah yang mengatur pengelolaan IPERA melalui pemanfaatan Koperasi Merah Putih sehingga memberikan peningkatan pendapatan daerah. Implementasi kebijakan tersebut dapat didukung kegiatan-kegiatan pada aspek berikut ini:

a) aspek penguatan kerangka hukum dan administratif PESK yaitu terkait percepatan penetapan WPR berkoordinasi aktif dengan Kementerian ESDM berdasarkan kajian teknis komprehensif terkait kondisi potensi tambang emas Kabupaten Gunung Mas serta penguatan implementasi peraturan daerah

terkait pemanfaatan perusahaan daerah untuk sektor pertambangan emas;

b) aspek peningkatan kontribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertambangan emas rakyat. Aspek ini terdiri dari percepatan penerbitan IPR, penguatan pembinaan dan pengawasan pertambangan emas rakyat, peningkatan kuantitas dan kualitas inspektur tambang, pembentukan tim khusus untuk koordinasi izin usaha pertambangan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait ketentuan perizinan tambang emas rakyat yang legal; dan

c) aspek penerapan pertambangan ramah lingkungan dan bebas merkuri yang terdiri dari kegiatan. Aspek ini terdiri dari pelaksanaan program MAHANTIS secara berkelanjutan, penyusunan kajian yang komprehensif terkait pengelolaan tambang emas rakyat ramah lingkungan seperti Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri, pendampingan teknis dan transfer teknologi melalui program pelatihan bagi penambang rakyat tentang penggunaan teknologi bebas merkuri dan sosialiasai terkait penegakan hukum dalam pemulihan akibat kerusakan lingkungan akibat pasca tambang emas.

2. Percepatan Pembangunan Kebun Sawit Plasma Masyarakat.

   Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui kemitraan yang berkelanjutan dengan perusahaan inti. Program ini berfokus pada efisiensi dan efektivitas dalam setiap tahapan, mulai dari persiapan lahan hingga masa produksi, dengan menekankan pada aspek keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Optimalisasi LP2B, Peningkatan Produksi Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan.

   Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah serangkaian upaya terencana dan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan fungsi lahan pertanian secara holistik.

   Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura merujuk pada bertambahnya jumlah atau kuantitas hasil panen (berat, volume, atau unit) dari komoditas tanaman pangan dan

hortikultura per satuan luas lahan (hektar) atau per unit waktu (musim tanam/tahun) dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan produksi peternakan adalah bertambahnya jumlah atau kuantitas output yang dihasilkan dari usaha peternakan, baik dalam bentuk produk primer (daging, telur, susu) maupun populasi ternak itu sendiri, per unit ternak atau per periode waktu tertentu dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan produksi perkebunan adalah bertambahnya jumlah atau kuantitas hasil panen (berat atau volume) dari komoditas perkebunan per satuan luas lahan (hektar) atau per unit pohon/tanaman dibandingkan periode sebelumnya.

4. Pembinaan Koperasi Merah Putih di 127 Desa/Kelurahan.

   Merupakan serangkaian kegiatan sistematis dan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan anggota koperasi, serta memperkuat peran koperasi sebagai soko guru perekonomian di tingkat desa/kelurahan.

5. **Tambun Bungai Bermartabat** berbicara tentang peningkatan ekonomi kepariwisataan yang berbudaya dan diharapkan sesuai misi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dengan dengan program prioritas sebagai berikut:

   1. Napak Tilas Perdamaian Tbg. Anoi sebagai event tetap 2 tahunan.

      Napak Tilas Perdamaian Tumbang Anoi (event 2 tahun sekali) merupakan kegiatan peringatan dan revitalisasi historis yang diselenggarakan secara periodik setiap dua tahun sekali di lokasi historis Tumbang Anoi, Kalimantan Tengah. Event ini bertujuan untuk mengenang, memahami, dan mempromosikan nilai-nilai perdamaian, persatuan, dan kebhinekaan yang terkandung dalam Perjanjian Tumbang Anoi 1894. Penyelenggaraan *event* ini selain sebagai upaya pelestarian dan revitalisasi nilai sejarah dan budaya, juga sebagai katalisator bagi pertumbuhan dan peningkatan perekonomian daerah.

   2. Penguatan Kelembagaan MHA dan tata Kelola Hutan Adat.

      Penguatan Kelembagaan MHA adalah serangkaian upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan keberdayaan institusi adat (baik formal maupun informal) dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial, budaya, ekonomi, dan

politiknya, terutama terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk hutan adat.

Tata Kelola Hutan Adat adalah sistem pengaturan dan praktik-praktik yang ditetapkan dan dijalankan oleh Masyarakat Hukum Adat secara mandiri atau dengan dukungan pihak lain untuk mengelola, memanfaatkan, melindungi, dan melestarikan wilayah hutan adatnya secara berkelanjutan, berdasarkan nilai-nilai, norma, dan hukum adat yang berlaku.

3. Peningkatan Kapasitas Damang dan Mantir.

   Untuk memperkuat peran Damang (pemimpin adat tingkat kecamatan) dan Mantir (pemimpin adat tingkat desa/kelurahan) dalam menjaga dan melestarikan adat Dayak, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap pembangunan di wilayahnya.

   Peningkatan insentif Damang dan Mantir adalah upaya terukur untuk memberikan penghargaan finansial dan/atau non-finansial yang lebih besar kepada Damang dan Mantir sebagai bentuk apresiasi atas peran dan kontribusi mereka dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, hukum adat, serta keharmonisan sosial di wilayahnya.

Selain mengkaji hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan, penting juga untuk memahami kaitan antara prioritas pembangunan nasional tahun 2027, prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas pada tahun yang sama.

Integrasi ini bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan keselarasan arah pembangunan dari pusat hingga daerah. Prioritas nasional memberikan panduan umum dan kerangka besar, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh provinsi sesuai dengan karakteristik dan potensinya, dan akhirnya diimplementasikan secara spesifik di tingkat kabupaten. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan di daerah akan berkontribusi pada pencapaian tujuan nasional, menciptakan orkestrasi pembangunan yang harmonis.

Pencapaian sasaran pembangunan nasional sejatinya adalah akumulasi dari keberhasilan pembangunan di seluruh daerah. Dengan integrasi prioritas, daerah tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek aktif yang berkontribusi langsung pada target-target nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan daya saing, atau

pemerataan infrastruktur. Ini mempercepat tercapainya agenda pembangunan nasional secara keseluruhan. Integrasi juga memungkinkan optimalisasi potensi dan karakteristik unik setiap daerah. Daerah dapat menerjemahkan prioritas nasional ke dalam konteks lokal, mengembangkan sektor unggulan yang relevan, dan mengatasi tantangan spesifik.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas 8: Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial Prioritas 9: Mewujudkan penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat lokal dalam kehidupan sosial dan tata kelola pemerintahan	Prioritas 10: Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif.
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi	Prioritas 2: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru Prioritas 6: Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat	Prioritas 3: Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi Prioritas 6: Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran. Prioritas 7: Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas).

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kerwirausahaan, mengembangkan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Prioritas 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi	Prioritas 1: Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal. Prioritas 3: Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi Prioritas 9: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas.
Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Prioritas 4: Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang inklusif, berkarakter Belom Bahadat, mudah diakses, dan terjangkau Prioritas 7: Mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas, inklusif, mudah diakses, dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh wilayah	Prioritas 4: Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai. Prioritas 5: Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas. Prioritas 8: Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal. Prioritas 9: Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas.
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Prioritas 2: Mewujudkan pemanfaatan sumber daya lokal berbasis hilirisasi berlandaskan prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru	Prioritas 6: Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran. Prioritas 7: Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas).
Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	Prioritas 3: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat Prioritas 5: Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukung transformasi ekonomi	Prioritas 2: Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan. Prioritas 3: Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi Prioritas 6: Penyediaan sarana dan prasarana pertanian

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunung Mas
		berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran. Prioritas 8: Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal.
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Prioritas 1: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan stabilitas ekonomi dalam mendukung Pembangunan. Prioritas 10: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berbasis inovasi dan digitalisasi	Prioritas 10: Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif.
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Prioritas 6: Meningkatkan ketahanan ekologi untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Prioritas 8: Meningkatkan kemajuan dan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kebudayaan lokal pada berbagai aspek kehidupan guna mendukung kesejahteraan sosial	Prioritas 2: Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan. Prioritas 3: Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan.

Untuk mencapai prioritas pembangunan tersebut sudah dirumuskan sasaran-sasaran yang perlu dilaksanakan agar capaian prioritas pembangunan dapat tercapai.

4.4 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Arah kebijakan pembangunan merupakan instrumen perencanaan esensial yang memandu pemerintah daerah dalam menentukan dan mencapai tujuannya. Kebijakan ini menetapkan tahapan dan prioritas yang harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan, dengan mempertimbangkan pengaturan waktu yang tepat. Lebih dari itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan yang ada.

Pada dasarnya, ini adalah peta jalan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program dan memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya strategi dan arah kebijakan yang jelas, setiap langkah yang diambil akan lebih terarah dan efisien, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada tahap pertama RPJPD, Kabupaten Gunung Mas memiliki fokus dalam peningkatan infrastruktur pembangunan sosial ekonomi yang berkualitas dan merata. Arah kebijkan dalam mewujudkan strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Gunung Mas, dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 4.4

Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Gunung Mas

Tahun 2027

Misi RPJMD	Strategi	Arah Kebijakan
MISI 1 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	1. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah yang merata dan terintegrasi	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal
	2. Optimalisasi pembangunan, sarana prasarana permukiman, kawasan perekonomian dan infrastruktur pelayanan public	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan
		3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan
MISI 2 : Peningkatan Kualitas Pembangunan SDM yang Unggul, Berbudaya dan Berdaya Saing	3. Meningkatkan pendidikan menuju masyarakat yang unggul	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai
		5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas
MISI 3 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif	4. Peningkatan hilirisasi potensi SDA unggulan dengan memperhatikan kondisi social budaya Masyarakat	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran
		7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)
	5. Pemanfaatan program perlindungan sosial yang adaptif dan integrative	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal
		9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas
MISI 4 : Peningkatan Reformasi Birokrasi	6. Optimalisasi pelayanan publik yang mudah diakses, terjangkau, berkualitas dan prima	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif

Dalam rangka optimalisasi potensi yang ada Kabupaten Gunung Mas, berikut beberapa kegiatan strategis yang menjadi fokus utama pada tahun 2027:

1. Sektor Pendidikan
    - Peningkatan Mutu Pendidikan: Melalui program pelatihan guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, serta pengembangan kurikulum yang relevan.
    - Peningkatan Akses Pendidikan: Membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi.
2. Sektor Kesehatan
    - Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Melengkapi fasilitas kesehatan dengan peralatan medis yang modern dan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan.
    - Pencegahan Penyakit: Melakukan program imunisasi, penyuluhan kesehatan, dan pemberantasan penyakit menular.
3. Sektor Infrastruktur
    - Peningkatan Kualitas Jalan: Memperbaiki dan membangun jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan pemukiman.
    - Pembangunan Jembatan: Membangun jembatan di daerah-daerah yang sulit dijangkau untuk meningkatkan aksesibilitas.
    - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum: Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

4.5 USULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN GUNUNG MAS

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Gunung Mas merupakan wujud dari peran legislatif dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara umum, ini adalah kajian permasalahan pembangunan wilayah yang berhasil dihimpun oleh DPRD melalui penyerapan aspirasi masyarakat. Hasil kajian ini kemudian diusulkan ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam bentuk program atau kegiatan.

Lebih dari sekadar identifikasi masalah, pokok-pokok pikiran DPRD juga mencakup pandangan dan pertimbangan strategis DPRD sebagai representasi rakyat daerah. Ini berkaitan erat dengan arah

prioritas pembangunan dan rumusan usulan kebutuhan program atau kegiatan yang didasarkan pada skala prioritas rencana pembangunan. Oleh sebab itu, setiap usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah telah melalui penyelarasan linear dengan prioritas rencana pembangunan. Proses ini turut mempertimbangkan substansi dari dokumen perencanaan lain seperti RPJPN, RPJPD, RPJMN, RPJMD, dan RKP, demi memastikan koherensi pembangunan.

Berikut adalah pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Gunung Mas terkait dengan penyusunan RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027:

Validasi Pokir Tahun 2026 di SIPD

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	1962641	26-02-2026	ESPRIADI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0	0, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Dibatalkan	BELUM FIX	-	-	-	-	-	UNIT	-	-	-
2	1962667	26-02-2026	ESPRIADI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	0	0, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Dibatalkan	BELUM FIX	-	-	-	-	-	Jalur	-	-	-
3	1962695	26-02-2026	ESPRIADI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	0	0, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	-	-	Dibatalkan	BELUM FIX	-	-	-	-	-	unit	-	-	-
4	2008112	03-03-2026	ICEU PURNAMASARI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan lanjutan mesjid di desa Tumbang danau	Tumbang danau, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian pembangunan masjid di desa tumbang danau sebagai sarana ibadah masyarakat.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Diproses dengan memperhatikan kondisi awal struktur bangunan yang telah ada	-	1	UNIT	300000000	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
5	2008142	03-03-2026	HERDA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jambatan sungei baringei	Desa tbg kuayan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian pembangunan Infrastruktur jembatan disungai baringai	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Kondisi Jembatan rusak berat prioritas untuk ditangani	-	1	UNIT	6000000000	-	Penggantian Jembatan
6	2008188	03-03-2026	HERDA	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pengadaan mobil jenazah alt. Resort rungan baringei	Rungan baringei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Pengadaan mobil jenazah alt. Resort rungan baringei	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	-	-	1	UNIT	-	Non Belanja Transfer	-
7	2008217	03-03-2026	HERDA	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan rumah dinas guru smp 1 atap rungan barat	desa tbg kuayan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Pembangunan rumah dinas guru smp 1 atap rungan barat	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	-	-	5	UNIT	-	Non Belanja Transfer	-
8	2008244	03-03-2026	HERDA	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan balai hindu alt desa tbg langgah	desa tbg langgah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM	Ditolak	Belum adanya data kondisi terhadap lokasi usul bangunan tersebut	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Pembangunan Pembangunan balai hindu alt desa tbg langgah.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	-	-	1	UNIT	-	Non Belanja Transfer	-
9	2008269	03-03-2026	HERDA	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan balai hindu. Alt desa tbg bahanei	desa tbg bahanei, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Pembangunan balai hindu. Alt desa tbg bahanei	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Diproses dengan memperhatikan kondisi existing lokasi bangunan	-	1	UNIT	300000000	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan
10	2008286	03-03-2026	HERDA	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangun gareja gke asi desa tbg kuayan	tbg kuayan, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Pembangunan gareja gke asi desa tbg kuayan	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	diproses dengan memperhatikan kondisi existing lokasi bangunan	-	1	UNIT	400000000	-	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan
11	2026231	04-03-2026	TUAH	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembukaan jalan baru kel. Marikoi	kel. Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Ditolak	lokasi masih belum dilakukan survey lapangan	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Pembukaan jalan baru kel. Marikoi	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	-	-	1	JALUR	-	Non Belanja Transfer	-
12	2026308	04-03-2026	CARLES FRENKI	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan jalan perumahan rakyat Kel tewah	Kelurahan tewah, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Perbaikan jalan perumahan rakyat Kel.tewah	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Kondisi ruas jalan sebagian besar rusak sehingga perlu ditangani	-	279	Meter	1000000000	-	Rekonstruksi Jalan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
13	2026368	04-03-2026	HERBERT Y.ASIN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkat jalan soekarno,, kel. Tampang tbg anjir.	kelurahan. Tampang tbg anjir., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Peningkat jalan soekarno,, kel. Tampang tbg anjir.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Jalan belum fungsional karena 2 rencana Box Culvert belum dibangun dan sebagian jalan rusak berat/setapak . Diusulkan lanjutan pekerjaan penanganan agar jalan dapat	-	3.5	Km	5000000000	-	Pembangunan Jalan
14	2026384	04-03-2026	HERBERT Y.ASIN	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Tambal sulam Ruas jln kuala kurun-pilang munduk.	kuala kurun-pilang munduk., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Ditolak	ditolak karena belum adanya verifikasi terhadap lokasi dan kelayakan penggunaan jalan	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Tambal sulam Ruas jln kuala kurun-pilang munduk.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	-	-	1	Jalur	-	Non Belanja Transfer	-
15	2026454	04-03-2026	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan jalan soekarno,, kel. Tampang tbg anjir.	kel. Tampang tbg anjir., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Peningkatan jalan soekarno,, kel. Tampang tbg anjir.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Jalan belum fungsional karena 2 rencana Box Culvert belum dibangun dan sebagian jalan rusak berat/setapak . Diusulkan lanjutan pekerjaan penanganan agar jalan dapat	-	3.5	Km	5000000000	-	Pembangunan Jalan
16	2026468	04-03-2026	SELSIUS APRIANUS	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Tambal sulam Ruas jln kuala kurun-pilang munduk	jln kuala kurun-pilang munduk, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Tambal sulam Ruas jln kuala kurun-pilang munduk	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Beberapa titik jalan rusak ringan dan rusak berat, diusulkan pekerjaan pemeliharaan berkala dan rutin jalan	-	23	Km	5000000000	-	Pemeliharaan Rutin Jalan
17	2026503	04-03-2026	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Penyambungan cor beton badan jalan Laudi I. Nuhan Tbg. Talaken. (Jalan yang menuju ke Rumah Sakit Pratama Tbg. Talaken).	Laudi I. Nuhan Tbg. Talaken, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Ditolak	ditolak karena belum adanya verifikasi terhadap lokasi dan kelayakan penggunaan jalan	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Penyambungan cor beton badan jalan Laudi I. Nuhan Tbg. Talaken. (Jalan yang menuju ke Rumah Sakit Pratama Tbg. Talaken).	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	-	-	1	JALUR	-	Non Belanja Transfer	-
18	2026526	04-03-2026	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehab berat jembatan gantung penghubung Desa Jalemu ke Desa Jalemu Gohong.	Desa Jalemu ke Desa Jalemu Gohong., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Rehab berat jembatan gantung penghubung Desa Jalemu ke Desa Jalemu Gohong.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Jembatan lama sudah relatif tua dengan kondisi rusak berat maka perlu dilakukan penanganan TA. 2027	-	1	Unit	6000000000	-	Pembangunan Jembatan
19	2026537	04-03-2026	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehab berat jembatan gantung di Desa Tumbang Jutuh ke Kelurahan Jakatan Raya.	Desa Tumbang Jutuh ke Kelurahan Jakatan Raya., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Rehab berat jembatan gantung di Desa Tumbang Jutuh ke Kelurahan Jakatan Raya.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Jembatan lama sudah relatif tua dengan kondisi rusak berat maka perlu dilakukan penanganan TA. 2027	-	1	Unit	6000000000	-	Pembangunan Jembatan
20	2026547	04-03-2026	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor beton jalan lingkungan di Kuluk Gohong Desa Tumbang Jutuh.	Kuluk Gohong Desa Tumbang Jutuh., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Cor beton jalan lingkungan di Kuluk Gohong Desa Tumbang Jutuh.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	diproses untuk diverifikasi lapangan	-	120	Meter	300000000	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
21	2026551	04-03-2026	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor beton jalan menuju Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Tbg. Talaken.	Kelurahan Tbg. Talaken., Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Cor beton jalan menuju Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Tbg. Talaken.	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	diproses untuk dilakukan verifikasi lapangan	-	200	Meter	500000000	-	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
22	2026570	04-03-2026	BINARTHA	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Jalan lingkungan di Kelurahan Tehang. (mengingat akan diselenggarakan kegiatan Pesparawi).	di Kelurahan Tehang, Kab. Gunung Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Direkomendasikan Untuk di pertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelesaian Peningkatan Jalan lingkungan di Kelurahan Tehang. (mengingat akan diselenggarakan kegiatan Pesparawi).	Agar dilakukan verifikasi dan pertimbangan teknis serta anggaran sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.	Sebagian Jalan dalam Kota Tehang belum beraspal dan kondisi sebagian jalan rusak maka perlu ditangani TA. 2027	-	1	Km	5500000000	-	Rekonstruksi Jalan

4.6 USULAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI KECAMATAN SE-KABUPATEN GUNUNG MAS

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 dilakukan dengan memegang teguh prinsip perencanaan *bottom-up*, sekaligus diselaraskan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi seperti RPJPN, RPJMN, RPJPD, dan RPJMD.

Oleh karena itu, dalam proses ini, Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dengan memberikan usulan kebutuhan perencanaan pembangunan. Usulan ini diajukan dengan tetap mempertimbangkan garis besar prioritas pembangunan. Berikut adalah usulan perencanaan pembangunan dari Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas:

Usulan DU RKP Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
1	2594545	17-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Laptop, Printer yang bisa photocopy, alat tensi digital dan operasional Nakes.	RT.002 Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-
2	2594547	17-12-2025	IDEN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya pengadaan penerangan lampu penerangan jalan sebanyak 4 unit karena jalan yang melintasi Desa Tumbang Lampahung tidak ada lampu penerangan jalan membuat suasana jalan gelap pada malam hari rawan terjadi kecelakaan	Jalan Lintas Kabupaten Lintas Kurun-Sepang Simin Desa Tumbang Lampahung., Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
3	2594550	17-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pemasangan Lampu penerangan jalan Lintas Desa	Desa Batu Nyapau, Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas., Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2594563	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Bak Sampah SDN-1 (6 Buah)	RT. 03 Desa Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2594564	17-12-2025	INDA SARIANA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pagar-pagar sekolah	Jl. Tambun bungai, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut Jenjang sekolah agar diperjelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	2594566	17-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penimbunan Halaman SDN 1 Batu Nyapau	RT.001 Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	2594568	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembuatan Sumur Bor Beserta Jaringannya	RT 03 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
8	2594570	17-12-2025	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Bedah Rumah	Desa Tumbang Miwan Wilayah RT. 001 dan RT.002, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Sampaikan proposal ke Dinas Pekerjaan Umum untuk diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku (anggaran belum dapat di tentukan karena jumlah rumah yang akan diberikan bantuan belum disampaikan melalui proposal)	-	-	-	-	-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
9	2594572	17-12-2025	MALIS IPPUN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Belum meratanya penyaluran Air Bersih kerumah rumah masyarakat (pipanisasi) 1.000 meter	RT I sampai RT IV, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
10	2594574	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembuatan Tower/Tempat Tandon Air	RT. 03 Desa Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
11	2594579	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Kendaraaan Ambulance 1 unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
12	2594581	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penimbunan Halaman Sekolah SDN-1	RT. 03 Desa Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	2594583	17-12-2025	IDEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	Perlu adanya pembangunan Tower Jaringan Telekomunikasi disebabkan jaringan internet di desa tumbang lampahung kurang baik/jelek sehingga sangat membutuhkan tower jaringan telekomunikasi	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas	-	1	Unit	70000000	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
14	2594585	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembuatan Jembatan Penyebrangan Sei Rungan Rangka Baja atau Beton sebagai Penghubung RT 01, RT 02 dengan RT 04 dan RT 05	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
15	2594586	17-12-2025	MALIS IPPUN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)	Banyaknya masyarakat yg belum terdaftar BPJS kesehatan (UHC) 100 org	Desa Tanjung Karitak, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	Di lakukan penginputan data dari usulan penerima bantuan iuran jamkesda yang diberikan usulan dari kecamatan sepang simin	-	100	Orang	5000000	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
16	2594589	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Pagar Keliling SDN 2	RT. 03 Desa Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	2594591	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan siring/Pembuatan dinding penahan tanah	RT. 02 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
18	2594593	17-12-2025	WARTEL, S.SINDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Jalan Lintas Kabupaten Kelurahan Tampang Tumbang Anjir-Desa Tanjung Riu-Tumbang Lampahung Jalan banyak berlubang parah kurang lebih kedalaman 30cm dan saat hujan kondisi jalan berlubang tergenang air yang cukup lama	JL. lintas kabupaten antara Desa Tanjung Riu, Tumbang Lampahung dan Kelurahan Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
19	2594594	17-12-2025	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Relokasi Rumah yang terdampak Longsor dan Banjir	Desa Tumbang Miwan wilayahRT.002 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
20	2594595	17-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pengembangan Potensi Wisata Air Terjun Sei Bahandang dan Goa batu Pondan	RT.001 Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
21	2594597	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengecoran Halaman TK Kalampangan	RT. 05 Desa Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
22	2594601	17-12-2025	MALIS IPPUN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Banyaknya Pemuda/ Pemudi yang Belum Bekerja dan Membutuh Kan Pelatihan Ketrampilan (Perbengkelan, Tata Rias) 10 orang	Desa Tanjung Karitak, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Dibahas di Musrenbang Kecamatan Sepang	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	Pelatihan Tata Rias	-	10	orang	33000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
23	2594602	17-12-2025	INDA SARIANA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kerna sering hujan dan banjir, sampah sering masuk kelas	RT. 05 Jln. Tambun Bungai SD 1 Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut Usulan kegiatan agar diperjelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	2594603	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Plang/Papan Nama PUSTU (1 Buah) Perkiraan Biaya Rp. 10.000.000	RT. 03 Desa Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	2594604	17-12-2025	DONI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	jalan melewati jembatan talaga berbahan kayu banyak rusak dan berlobang.	jalan Suka Maju RT.01/RW.001 Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
26	2594607	17-12-2025	WANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Ambulance sebanyak 1 unit	Desa Tumbang Manyangan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
27	2594610	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Laptop dan Printer untuk Nakes (1 Paket) Perkiran Biaya Rp. 20.000.000	Desa Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
28	2594618	17-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jalan Produksi Pertanian (Pembangunan Rabat Beton jalan desa ke areal pertanian SAKATA), Volume 500 m x 4 m x 20 cm	RT. 02 Desa Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
29	2594620	17-12-2025	GALODIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Pagar Keliling PUSTU	Batu Nyiwuh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyiwuh	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	2594621	17-12-2025	MEMET HARYANTO (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Mobiler SDN Desa Pamatang Limau	SDN-1 Desa Pamatang Limau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
31	2594625	17-12-2025	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	karena kondisi jalan rusak berlubang dan berlumpur	jalan seberang desa lintas desa tumbang tambirah ke kuala kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
32	2594626	17-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Bantuan Bibit ternak Babi, Ayam, Bebek dan Kambing	Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	proses di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	2594627	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Tidak adanya Gedung Lab	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
34	2594628	17-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Belum adanya ruang guru di SDN Tanjung Untung, masih satu ruang dengan Kepala Sekolah	RT 04 Desa Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
35	2594630	17-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PELEBARAN JALAN LINTAS KECAMATAN 1 METER KIRI KANAN JALAN SEPANJANG 1 KM DI RT.06/RW.02 DESA SEPANG KOTA.	JLN.LINTAS KECAMATAN RT.06/RW.02 DESA SEPANG KOTA, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
36	2594631	17-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan BOX CULVERT Jalan Pertanian ke areal pertanian SAKATA, Uk. P x L x T (8 m x 4 m x 3 m)	RT. 02 Desa Teluk Lawah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung MAs, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
37	2594633	17-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	COR BETON JEMBATAN RAWA RT 001 RW 001 karena jembatan rusak parah dan tidak bisa dilewati	JL SINGA RAZA RT 001 RW 001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
38	2594634	17-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum adanya perpustakaan di SDN Tanjung Untung	RT 04 Desa Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
39	2594635	17-12-2025	WARTEL, S.SINDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan Desa yang status kepemilikan masih aset Dinas PU yang terbengkalai dan sering banjir disaat kondisi sungai kahayan naik/dalam	Jl. Desa Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
40	2594637	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kurangnya peralatan olahraga sokolah	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
41	2594638	17-12-2025	MALIS IPPUN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Pendidikan dan Pelatihan Kader Kesehatan Desa 5 Org	Tanjung Karitak, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
42	2594639	17-12-2025	IDEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Untuk meningkatkan siswa dalam menggunakan Teknologoi berbasis Komputer dan pelaksanaan ANBK Sekolah Setiap Tahun maka perlu adanya 5 Unit Komputer set	Jalan Ngantung RT 01 Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
43	2594644	17-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Bantuan Bibit Ikan Lele, Nila dan Bibit Ikan Patin	Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	2594645	17-12-2025	RODI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	untuk melancarkan proses pengambilan dan pemakaian air maka kami usulkan pembangunan tower/tandon air Pustu Tumbang Tariak	Jalan Lintas RT.01 Desa Tumbang Tariak, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
45	2594646	17-12-2025	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	karena jalan rusak dan berlumpur	daerah rawa haringkin, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
46	2594647	17-12-2025	BRAHIM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum Memadainya Mobiler Sekolah SDN Tampelas (72 Buah Meja/ Kursi)	Jalan Pelajar Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
47	2594651	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Tidak adanya WC Guru dan Siswa SDN Tumbang Manange yang lengkap dengan tong air	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
48	2594657	17-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kurangnya Fasilitas siswa siswi untuk menunjang dalam melaksanakan ujian dan simulasi	RT 04 desa Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut Usulan kegiatan agar diperjelas	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
49	2594661	17-12-2025	WANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Permasalahan aksesibilitas pelayanan kesehatan desa dan pemenuhan layanan kesehatan yang memadai sehingga perlu Pembangunan Pustu di Desa Tumbang Manyangan. Sudah dipersiapkan lahan.	Desa Tumbang Manyangan RT 03 Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
50	2594666	17-12-2025	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Drainase Jalan Lintas Kabupaten dengan Panjang 400 Meter	Desa Tumbang Miwan wilayah RT.004 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
51	2594667	17-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar SDN-1 Desa Teluk Lawah, 1 Unit (P= 700 m x T= 1,5 m)	Jln Tambun Bungan RT. 002 Desa Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	2594671	17-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya pengaspalan jalan di jalan singa mantir wilayah RT 01 Kelurahan Tewah, dengan P = 500 L=4,20	KELURAHAN TEWAH RT.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	2594675	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembukaan jalan Produksi Tani Menuju Proyek Karet Unggul Kebitin Raya	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	2594679	17-12-2025	DEDIYANTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	SDN-2 Desa Petak Bahandang Memerlukan Gorong-Gorong Pembuangan Air Hujan, Karena Kalau Musim Pengujan Kawasan Lingkungan Sekolah Becek karena tidak adanya Gorong-Gorong untuk pembuangan air, Oleh Karena itu SDN-2 Desa Petak Bahandang Mengusulkan Gorong-Gorong dengan Panjang Kurang Lebih 40 Meter	Desa Petak Bahandang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Petak Bahandang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	2594680	17-12-2025	RODI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	kurangnyaa kelengkapan penunjang pekerjaan di pustu, untuk itu kepada dinas terkait untuk dapat membantu dalam pengadaan Komputer (PC, Printer, meja kerja) sebagai salah satu upaya membantu pegawai pustu optimal dalam bekerja	jalan. lintas desa Rt.01 Desa Tumbang Tariak, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
56	2594681	17-12-2025	WANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan Jalan Lintas Desa Tumbang Manyangan Menuju Desa Tumbang Tambirah dikarenakan jalan lintas Desa tumbang Manyangan Menuju Tumbang Tambirah rusak parah sehingga anak-anak sekolah dari desa Tumbang Tambirah kesulitan Melewati jalan tersebut	Desa Tumbang Manyangan Rt 02 Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
57	2594684	17-12-2025	IDEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	untuk memanfaatkan lahat kosong milik masyarakat maka perlu adanya pengadaan bibit sapi sebanyak 20 ekor bagi kelompok ternak yang nantinya untuk usaha ternak sapi	Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
58	2594693	17-12-2025	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Pembangunan Drainase untuk Pembuangan Limbah Rumah Tangga di Samping Bangunan Gereja GPDI Eben Haezer	Desa Tumbang Miwan wilayah RT.004 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
59	2594696	17-12-2025	SULIANTO L. LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengadaan Jembatan Penyebrangan Desa Tumbang Lapan Rt.02, dengan ukuran lebar 4 Meter x Panjang 50 Meter	Jl. Matan Duhuk Desa Tumbang Lapan Kec. Rungan Hulu Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	2594701	17-12-2025	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	jembatan mulai rusak dan perlu pemiliharaan	sei manyangan jembatan layang , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
61	2594709	17-12-2025	WANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jembatan Gantung Melintasi Sungai Kahayan untuk mengurangi permasalahan dan meningkatkan Aksesibilitas, Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan, Budaya dan Pariwisata dan bermanfaat untuk Desa Manyangan dan desa tetangganya. Sudah disiapkan Lahan untuk pekerjaan jembatan dari Pemerintah Desa	Desa Tumbang Manyangan Rt. 03 Kabupaten Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
62	2594710	17-12-2025	GASIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	PARIT/DRAINASE JALAN LINTAS 1 PAKET	DESA JANGKIT, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
63	2594712	17-12-2025	BRAHIM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Belum Tersedia Mobil Ambulance Desa Tampelas (1 Unit)	Jalan M. T. Luhing Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
64	2594714	17-12-2025	SURIADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembangunan Peningkatan Sarana Air Bersih (Sumur bor) 1 Paket	Desa Rangan Mihing, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Rangan Mihing	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
65	2594716	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pengerasan Jalan menuju tempat Wisata Suran	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Dibahas ke musrenbang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	2594720	17-12-2025	WANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum Tersedianya Bangunan WC guru dan Murid di SDN Tumbang Manyangan	Desa Tumbang Manyangan Rt. 02 Kabupaten Gunung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
67	2594724	17-12-2025	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Tidak ada sumber air bersih bagi warga masyarakat Desa Penda Pilang	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
68	2594725	17-12-2025	DEDIYANTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	DiDesa Petak Bahandang Belum Memiliki Tempat Pembuangan Sampah Rumah Tangga, Banyak sampah yang dibuang secara sembarangan di berbagai tempat, oleh karena itu Desa Petak Bahandang Mengusulkan Tempat Pembuangan Sampah Di Desa Sebanyak 2 Buah	Desa Petak Bahandang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Petak Bahandang	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Dapat diproses kalo memang ada anggaran dari pemerintah daerah dengan memperhatikan Operasional terhadap pengangkutan angkutan sampah tersebut otomatis anggaran dan bertambah dan tenaga untuk mengangkut sampah dari tps dimaksud	-	2	buah	80000000	-	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
69	2594726	17-12-2025	IDEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	untuk menunjanng sarana prasarana transportasi Kesehatan di desa terutam bagi masyarakat yang sakit dan perlu dirujuk ke rumah sakit maka diperlukan 1 unit Ambulance Desa.	Jalan Ngantung Nomor 6 RT 01 Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
70	2594728	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Perembukaan jalan Baru menuju Dam Air Bersih	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	2594729	17-12-2025	JEKMON (Kades Antar Waktu)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	kondisi jembatan desa Teluk Nyatu yaitu Sei Burak Burau mengalami kerusakan dan tidak memadai sehingga menghambat aksesibilitas transportasi masyarakat serta mobilitas warga desa teluk nyatu perlunya pembangunan jembatan Sei Burak Burau dengan Culvert Box dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 4 meter	RT.01 Jalan K.T. RABA Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	2594731	17-12-2025	KRISTIAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Bedah Rumah 10 Rumah 4X6 Dana Berkisar 300 Juta	Desa Tumbang Mujai, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
73	2594734	17-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Pengadaan Tiang Listrik, (sebanyak kurang lebih 10 Tiang)	Jln. Kahayan, RT. 01 dan Jln. Walet RT. 03 Desa Teluk Lawah , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Buatkan Proposal untuk ditandaklanjuti dan disampaikan ke UPT. PLN Kuala Kurun	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
74	2594740	17-12-2025	RESEP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Rehab Rumah Tidak Layak Huni 20 Unit	Tajah Antangt Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
75	2594742	17-12-2025	KRISTIAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Guru Agama Kristen SDN 1 Tumbang Mujai,dan Guru TK PAUD Tumbang Mujai	Desa Tumbang Mujai, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
76	2594743	17-12-2025	BRAHIM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum Tersedia Jalan yang layak menuju Jalan SDN Tampelas (60 m)	Jalan Pelajar Desa Tampelas Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tampelas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
77	2594745	17-12-2025	WARTEL, S.SINDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Timbunan dan siring halaman Puskesdes karena tidak memiliki lahan parkir didepan Puskesdes	Dekat/samping Kantor Desa Tanjung Riu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
78	2594752	17-12-2025	MALIS IPPUN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Bantuan Mobil Ambulance Desa (1 Unit)	Desa Tanjung Karitak, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tanjung Karitak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
79	2594754	17-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Jalan Antang Toai Kelurahan Rt 06/ Rw 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	2594755	17-12-2025	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Gedung Baru TK Harapan Mulia Desa Tumbang Miwan	Gg. Idul Agan RT.004 Desa Tumbang Miwan , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
81	2594757	17-12-2025	RODI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	sebagai upaya menciptakan keamanan dan kenyaman pengunjung yang mau berobat di pustu maka kami usulkan pagar pustu desa tumbang tariak	jln. lintas rt.01 desa tumbang tariak , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tariak	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
82	2594758	17-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bantuan Pupuk Pertanian/Perkebunan Bagi Masyarakat	Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	150000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
83	2594762	17-12-2025	KRISTIAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Rumah Jabatan Guru SDN 1 Tumbang Mujai,3 bh Berkisar 600 jt	Desa Tumbang Mujai, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
84	2594769	17-12-2025	WARTEL, S.SINDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Mobil Ambulance digunakan membawa masyarakat kondisi sakit dan meninggal	Desa Tanjung Riu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
85	2594770	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Tani Menuju Sarangon	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai dengan Arah Kebijakan dan dapat diteruskan untuk dibahas di Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	2594781	17-12-2025	SULIANTO L. LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan pagar SDN Tumbang Lapan Rt.01/Rw.01 Desa Tumbang lapan Kecamatan Rungan Hulu dengan ukuran Panjang 300 Meter Tinggi 2 Meter	Jl. Matan Duhuk Rt.01/Rw.01 Desa Tumbang Lapan kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	2594782	17-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Gedung PUSTU Desa Teluk Lawah, Volume 1 Unit	Jln Lintas RT. 02 Desa Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Proses Lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
88	2594796	17-12-2025	KRISTIAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Pembangunan Gereja GKE Parawei Tumbang Mujai Berkisar 200 jt	Desa Tumbang Mujai, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Mujai	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GKE Parawei Tumbang Mujai	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
89	2594799	17-12-2025	JEKMON (Kades Antar Waktu)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jembatan Sei Lunuk Desa Teluk Nyatu saat ini rusak dan sudah tidak layak sehingga menghambat akses transportasi masyarakat yang dibutuhkan bangun baru dengan kebutuhan volume/ukuran Panjang 25 Meter lebar 4 Meter permanen (kayu)	RT.01 Jalan K.T. RABA Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
90	2594809	17-12-2025	IDEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Lanjutan Pembangunan GKE Imanuel Tumbang Lampahung Pekerjaan Plester dan acian dinding samping kiri dan kanan serta bagian belakang dan pekerjaan penataan halaman /pembangunan pagar keliling halaman Gereja.	Jalan Ali Nomor 6 RT 02 Desa Tumbang Lampahung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	buatkan proposal usulan GKE Imanuel Tumbang Lampahung	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
91	2594816	17-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan/Rehabilitasi Gereja GKE PANENGA Desa Teluk Lawah , Volume 1 Unit	Jln Gereja RT. 002 Desa Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Buatkan proposal usulan GKE PANENGA Desa Teluk Lawah	-	1	unit	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
92	2594821	17-12-2025	PANCASONA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Sering terjadi banjir di lingkungan sekitar Rt 1	RT 1, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
93	2594822	17-12-2025	IDEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Penataan Halaman GBI Desa Tumbang Lampahung dengan Luas 100x100 Meter atau Pembangunan Pagar Keliling GBI.	Jalan LIntas Desa Tumbang Lampahung RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Lampahung	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	buatkan proposal usulan GBI Desa Tumbang Lampahung	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
94	2594840	17-12-2025	WANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Lanjutan Pembangunan Rumah Ibadah GPT Desa Tumbang Manyangan 1 Unit	Desa Tumbang Manyangan, Rt 03 Kabupaten Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Manyangan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan diproses dan ditanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan GBI Desa Tumbang Lampahung	-	1	unit	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
95	2595102	17-12-2025	JEKMON (Kades Antar Waktu)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai di Pustu Desa Teluk Nyatu, sehingga kendaraan pengunjung sering parkir sembarangan yang menganggu akses ambulance dan kenyamanan pasien serta aktivitas lainnya	RT.03 Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	2595134	17-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Tidak tersedianya Jaringan Internet Di Sekolah Dasar Negeri Karason Raya, Hal ini menyebabkan keterbatasan akses informasi dan metode belajar, membuat guru sulit menerapkan metode modern seperti e-learning, menghambat pengembangan literasi digital, dan mengurangi interaksi sosial dan pengalaman belajar langsung yang penting untuk perkembangan karakter. Maka dari hal tersebut, kami bermaksud hendak mengajukan Permohonan berupa Penyediaan Fasilitas Internet "STARLINK" Untuk SDN Karason Raya.	Jl. Pasak Suling RT.001 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	2595178	17-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	belum terlatih pengurus koperasi merah putih	tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	2595182	17-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
99	2595213	17-12-2025	JHON BENI MENTENG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum adan Jalan Antar Desa dan Kecamatan, hanya jalur sungai.	Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
100	2595229	17-12-2025	JHON BENI MENTENG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum ada Jembatan Penghubung antar Desa Tumbang Bunut- Luwuk Kantor.	Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
101	2595248	17-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengajuan 1 (Satu) Paket Buku Bacaan dan Buku Pelajaran Siswa(i) di Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Karason Raya, untuk mendapatkan dukungan, persetujuan, dan dana guna memenuhi kebutuhan bahan bacaan dan sumber belajar, meningkatkan literasi serta wawasan siswa, mendukung proses pembelajaran guru, serta memperkaya koleksi perpustakaan agar kualitas pendidikan dan pencapaian visi-misi sekolah meningkat secara optimal.	Jl. Pasak Suling RT.001 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	2595261	17-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	PENINGKATAN KAPASITAS GURU PAUD	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
103	2595267	17-12-2025	DARGO, A.Md. Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	DXMHGDCHIVKJVJK	DESA BERENG MALAKA DESA BERENG MALAKA, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	2595272	17-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Relokasi 34 Rumah Karena terdampak banjir dan longsor karena wilayah pinggir sungai	Jl. RT.001 dan RT.002, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
105	2595276	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	SPAM Perpipaan	Jln. Jaga Asang Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	2595277	17-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	PEMBANGUNAN RUMAH DINAS GURU SLTP-SATAP 2	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
107	2595278	17-12-2025	SEANLY NOVIANTI, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Belum ada Listrik Pustu Desa Talangkah	Desa Talangkah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Talangkah	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
108	2595280	17-12-2025	RAWAN, S.Pd, MM (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan unit komputer/laptop untuk kegiatan UNBK 15 Paket	SDN 2 Fajar Harapan , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
109	2595281	17-12-2025	TOPAN YULIWANTO, S.Hut (Penjabat)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pemeliharaan Rutin dan Peningkatan Kualitas jalan Penghubung antar desa karetau sarian dan Tumbang mahuroi 4 km	Desa karetau sarian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetau Sarian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Karena sangat dibutuhkan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
110	2595283	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Irigasi, Penyediaan Air Bersih (sumur bor, DAM, Box Culvert, DAM	Jln. Jaga Asang. Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
111	2595284	17-12-2025	SEANLY NOVIANTI, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Gedung Perpustakaan Sekolah Dasar Desa Talangkah	Desa Talangkah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Talangkah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
112	2595285	17-12-2025	JHON BENI MENTENG	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Belum adanya Tenaga Kesehatan di Desa	Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
113	2595286	17-12-2025	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pagar Sekolah SDN 1 Karya Bhakti P 100 M x T 1,5 M	RT.6 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	2595288	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan Jln.Antang Djungan 1000 Meter (1 KM)	RT 01,02,03 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
115	2595292	17-12-2025	YULIGISON	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kursi meja siswa SMPN 3 SATAP KAHUT banyak yang rusak, memerlukan 50 pasang kursi meja.	Tumbang Pasangon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
116	2595293	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penerangan Jalan Umum/Lampu Jalan Umum	Jln. Jaga Asang. Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	2595294	17-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlunya perbaikan jalan berlubang RT. 004	Perbaikan Jl.Temanggung Panji, samping KANTOR POS Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
118	2595296	17-12-2025	SEANLY NOVIANTI, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Bantuan Rumah layak Huni untuk Masyarakat Tidak mampu atau Belum Punya Rumah	Desa talangkah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Talangkah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
119	2595298	17-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan Gorong-gorong SMAN 2 Kurun (2 buah)	Jl. Swadaya RT.005, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
120	2595299	17-12-2025	TOPAN YULIWANTO, S.Hut (Penjabat)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	pemeliharan rutin dan peningkatan kualitas jalan desa lintas kabupaten dari desa Tumbang Mahuroi ,karetau sarian dan tumbang anoi 7,2 Km	karetau sarian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetau Sarian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Untuk meningkatkan aksesbilitas masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
121	2595302	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan Jln. Herdulin Bundung 1000 Meter (1 KM)	RT 04,05,06 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
122	2595303	17-12-2025	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kegiatan bermain merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran anak usia dini. Melalui permainan, anak dapat mengembangkan kemampuan motorik, kognitif, sosial, dan emosional. Saat ini, alat bermain di TK Sambelum Kampuri masih terbatas baik dari segi jumlah maupun variasi, sehingga belum sepenuhnya mendukung kebutuhan perkembangan peserta didik.	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
123	2595309	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Jln. Jaga Asang. Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Di khususkan bagi masyarakat desil 1-3	-	-	-	-	-	-	-
124	2595310	17-12-2025	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pagar Sekolah TK Negeri Tunas Harapan	RT. 06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	2595311	17-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Lanjutan semenisasi jalan ke SMAN 2 Kurun	Jl. Swadaya RT.005, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
126	2595312	17-12-2025	RAWAN, S.Pd, MM (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan meja dan kursi belajar 20 paket	SDN 2 Fajar Harapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di forum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-
127	2595313	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pebaikan Jalan Antar Desa 4 km	Desa Harowu- Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	dapat dilanjutkan ke forum rkpd tingkat kab. gunung mas	-	-	-	-	-	-	-
128	2595317	17-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Gedung Lab SDN	RT.003 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
129	2595318	17-12-2025	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Ruang Bermain dan Ruang Tunggu TK Negeri Tunas Harapan RT.06	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	2595321	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jembatan Penyeberangan Sungai Posu	Jln. Jaga Asang. Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dibutuhkan sebagai akses menuju TPU desa	-	-	-	-	-	-	-
131	2595322	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan Jln. Gasan Injeng 200 Meter	RT 005 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
132	2595323	17-12-2025	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Cor Lapangan Bermain TK Tunas Harapan L 25 M x P 8 M	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
133	2595324	17-12-2025	SEANLY NOVIANTI, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perbaikan Gorong -Gorong 2 titik dan 1 jalan (Lintas wilayah Desa kabupaten)	jalan Lintas kabupaten Desa talangkah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Talangkah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
134	2595326	17-12-2025	SEMSUHADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan Jalan dan Jembatan Antar Desa Dari Koroi-Buntoi-Mangkuhung	Desa Buntoi RT 01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Bontoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
135	2595327	17-12-2025	TOPAN YULIWANTO, S.Hut (Penjabat)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	pembangunan dan Rehap berat jembantan penghubung jalan lintas desa Tumbang Mahuroi , karetau sarian dan tumbang anoi 11 unit	karetau sarian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetau Sarian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Untuk memperlancar akses transportasi masyarakat	-	-	-	-	-	-	-
136	2595329	17-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan tanggul sei hakau RT.004 (Apabila sudah memasuki musim hujan, air sungai hakau sering meluap ke pemukiman warga, Gereja, Sekolah)	RT.004, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
137	2595331	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)	Jaminan Sosial bagi Masyarakat Desa Tidak mampu	Jln. Jaga Asang. Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan	Di lakukan penginputan data dari usulan penerima bantuan iuran jamkesda yang diberikan usulan dari desa tumbang posu	-	50	Orang	5000000	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
138	2595334	17-12-2025	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pembukaan Jalan Ladang Usaha 2 P 3000 M x L 4 M	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	2595338	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan Jalan menuju ke Pemakaman umat Hindu Kaharingan	Komplek Pemakaman Lama RT 02 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
140	2595347	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan Tenaga Kerja	Jln.Jaga Asang.Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	mengoptimalnya pengembangan kualitas SDM	Pelatihan Tenaga Kerja	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
141	2595348	17-12-2025	RAWAN, S.Pd, MM (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	pembangunan perumahan dinas guru SMPN 4 Manuhing 5 unit	Desa Fajar Harapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut di forum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
142	2595352	17-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Pelatihan Pemilahan Sampah dan Pemilahan Jenis Sampah	Jln. Jaga Asang.Rt.01 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Pelatihan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup	Bisa dilaksanakan asalkan anggaran mencukupi untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi melalui pemilahan dan pengolahan sampah	-	12	kecamatan	240000000	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan
143	2595353	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan 50 Pasang Meja dan Kursi untuk Siswa SDN 2 Tumbang Rahuyan	SDN 2 Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
144	2595356	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehab Total 1 Unit Rumah Jabatan Kepala Sekolah SDN 2 Tumbang Rahuyan	SDN 2 Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
145	2595357	17-12-2025	YULIGISON	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan)	Siswa SMPN 3 SATAP KAHUT banyak meminati olahraga badminton. Memerlukan lapangan olahraga badminton di SMPN 3 SATAP KAHUT.	Tumbang Pasangon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Pasangon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
146	2595364	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangun Baru Gedung Sekolah Lantai 2 dengan 6 (enam) ruang belajar	SDN 1 Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
147	2595366	17-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlunya pengaspalan Jalan di wilayah RT. 006	1. Pengaspalan Jalan Gg. IBAS MAJAT, antara jalan Sangkurun dan jalan Patendu 100. m (Kompleks Balai Kaharingan); 2. Pengaspalan Jalan Gg. MIMING (100 m); 3. Pengaspalan Jalan Gg. DURIS GARANG (50 m), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
148	2595368	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Meja dan Kursi Siswa sebanyak 60 Pasang SDN 1 Tumbang Rahuyan	SDN 1 Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
149	2595372	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehab Total 3 Ruang Belajar dan Selasar SDN 1 Tumbang Rahuyan	SDN 1 Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
150	2595374	17-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Rehab Sedang 1 unit ruang guru SDN 1 Tumbang Rahuyan	SDN 1 Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
151	2595378	17-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlunya penimbunan/peningkatan jalan dan Pembuatan Gorong-gorong Wilayah RT. 008	Penimbunan jalan Jl. Sangkurun (P. 150 m; L. 8 M dan T. 60 cm) dan Pembuatan Gorong-gorong Jl. Sangkurun , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
152	2595396	17-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	RELOKASI SDN BATU PUTER AGAR TIDAK REKENA BANJIR 1 UNIT NILAI USULAN Rp. 700.000.000	DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
153	2595398	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum adanya WC Sekolah SD Desa Teluk Kanduri Pembangunan WC Sekolah 1 Paket Perkiraan Dana (Rp. 10.000.000)	Desa Teluk Kanduri RT.002 Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
154	2595401	17-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kualitas Keluarga)	Pembangunan pastori gereja HAPAKAT RT.04 JANGKANG 1 UNIT dengan total nilai Rp. 200.000.000	rt 04 DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan gereja HAPAKAT RT.04 JANGKANG desa batu puter	-	1	unit	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
155	2595402	17-12-2025	TOPAN YULIWANTO, S.Hut (Penjabat)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Tidak Ada Listri PLN	karetau sarian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetau Sarian	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Sangat dibutuhkan masyarakat di 2 desa ujung	Ditindaklanjuti dengan menyurati PT. PLN Persero untuk percepatan pembangunan/pemasangan jaringan listrik PLN di Desa Karetau Sarian	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
156	2595405	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Kurangnya Perumahan Guru diharapkan Penambahan 2 Ruang 1 Couple Perumahan Guru SD Perkiraan Dana (Rp. 150.000.000)	Desa Teluk Kanduri RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
157	2595406	17-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	1 UNIT PEMASANGAN PLAPON MUSHOLA NURUL IMAN DESA BATU PUTER DENGAN NILAI TOTAL RP.50.000.000	RT.01 DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan MUSHOLA NURUL IMAN DESA BATU PUTER	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
158	2595410	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Belum Layaknya/Belum ada Kantor Ruang Kepala Sekolah dan Guru SD Pembangunan Kantor Sekolah 1 Ruang Perkiraan Dana (Rp.50.000.000)	Desa Teluk Kanduri RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
159	2595412	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Kurangnya dan Banyak Rusak Mobiler Guru & Murid SD Pengadaan Mobiler 1 Paket Perkiraan Dana (Rp. 20.000.000)	Desa Teluk Kanduri RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
160	2595413	17-12-2025	TOPAN YULIWANTO, S.Hut (Penjabat)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	bibit sapi 150 ekor	karetau sarian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetau Sarian	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	2595417	17-12-2025	TOPAN YULIWANTO, S.Hut (Penjabat)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	bibit ayam petelor 3000 ekor dan pakan	karetau sarian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetau Sarian	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	2595419	17-12-2025	TOPAN YULIWANTO, S.Hut (Penjabat)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Guru AGAMA ,Kristen AGAMA HINDU Kaharingan 2 orang	karetau sarian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Karetau Sarian	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	2595421	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Kurang Layaknya Ruang Kelas Banyak sudah Rusak Rehab Berat Plapon Ruang Kelas 4, 3, 5 (1 Paket) Perkiraan Dana (Rp. 30.000.000)	Desa Teluk Kanduri RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
164	2595426	17-12-2025	TISON (Kades Antarwaktu)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Masyarakat Desa Sangal sangat mengharapkan bantuan/penyuluhan tentang lahan sawah untuk keperluan adanya lahan sawah di desa dalam menunjang kebutuhan pangan masyarakat karena masyarakat sebagian berprofesi sebagai petani. maka harapan masyarakat bisa terwujud lahan persawahan yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa	Desa Sangal, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	200000000	-	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota
165	2595431	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Pupuk Herbisida, Pertisida, Pupuk Urea 1 Paket Perkiraan Dana (Rp. 6.000.000)	Desa Teluk Kanduri RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	10000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
166	2595437	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Penyediaan dan Pengadaan Bibit Buah-buahan (192 Bibit) dan Sayur-sayuran (192 Bibit) Perkiraan Dana RP. 10.000.000	Desa Teluk Kanduri RT.01 Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	100000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
167	2595439	17-12-2025	TISON (Kades Antarwaktu)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Masalah yang terjadi di desa sangal adalah masalah air bersih pada musim kemarau mohon untuk pemerintah kabupaten melakukan tindak lanjut dari sumur bor desa sangal. karena DAM Sungai amba hanya akan ada bila pada musim hujan dan butuh perbaikan atau pembangunan untuk lebih besar dalam menampung air dalam mencukupi pasokan air bersih masyarakat	Desa Sangal, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Sangal	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
168	2595440	17-12-2025	TANTI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Penyedian Pengadaan Alat Kesenian Sosial dan Budaya (Kecapi 2 Buah, Rebab 3 Buah, Gong 4 Buah, Kangkanong 1 Paket) Perkiraan Dana Rp. 30.000.000	Desa Teluk Kanduri RT.02 Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
169	2595453	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Tidak ada pagar/tembok keliling di sekolah SDN Tumbang Manange	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
170	2595454	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kurangnya 3 gedung ruang kelas SDN Tumbang Manange	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
171	2595455	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rusaknya plapon SMPN Satu Atap 3 Tewah 2 Ruang	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
172	2595457	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Cor beton halaman SMPN Satu Atap 3 Tewah	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	2595458	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kurangnya Meja dan Kursi Guru SMPN Satu Atap 3 Tewah	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
174	2595461	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Laptop 3 Unit SMPN Satu Atap 3 Tewah	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
175	2595462	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penambahan pembangunan 2 ruang kelas SMPN Satu Atap 3 Tewah	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
176	2595463	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penambahan 1 Ruang Lab SMPN Satu Atap 3 Tewah	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	2595464	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu penambahan bangunan ruang Kantor SMPN Satu Atap 3 Tewah	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
178	2595468	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Cor Halaman Pustu 12x8 Meter	RT 01 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	2595469	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Dapur Pustu 5x6 Meter	RT 02 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	2595473	17-12-2025	ISASKAR	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Tidak adanya tandon penampungan air di Pustu	RT 02 Desa Upon Batu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Upon Batu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	2595531	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	PLN	Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan proposal ke PLN oleh Bagian Ekobang pada Setda Kabupaten Gunung Mas	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas dan Usulan Proposal ke Bagian Ekobang pada Setda Kab. Gunung Mas	Kepala Desa Harowu agar membuat Proposal Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
182	2595547	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Pembangunan Pastori	Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Buatkan proposal usulan Pembangunan Pastori Desa Harowu	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
183	2595555	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Ruang Kelas 2 Ruang	SDN Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
184	2595563	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Ruang Guru 1 Ruang	SDN Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
185	2595572	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Mobiler Pustu	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
186	2595574	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Alat Pemeriksaan Medis 1 Set	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
187	2595595	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Tenaga Surya untuk Penerangan 1 set	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
188	2595601	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Alat Bedah minor Pustu	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
189	2595602	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Bidan 1 Orang	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
190	2595606	17-12-2025	SUANDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Perawat 1 Orang	Pustu Desa Harowu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Harowo	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
191	2595638	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Gedung 4 Ruang Kelas SDN Tubang Habaon dan Pengadaan Tanah 1 hektar untuk SDN Tumbang Habaon	RT 01 Desa Tumbang Habaon , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	2595640	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar Keliling 250 Meter dan Pembangunan WC 1 unit untuk SDN Tumbang Habaon	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
193	2595641	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Cromebook 1 paket untuk SDN Tumbang Habaon	RT .01 Desa Tumbang Habaon , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
194	2595642	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar Keliling dan WC TK Rangan Mumpung 1 Paket	RT 01 Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	2595644	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembanguan Pagar Keliling 352 Meter untuk SMPN 4 Tewah	RT.04 Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
196	2595645	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penempatan 2 Orang Guru TK Rangan Mumpung	RT .01 Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	2595647	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembanguan gedung pustu 1 Paket	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
198	2595649	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Medis untuk PUSTU 1 paket	Desa Tumbang Habaon , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	2595651	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan WC untuk PUSKESDES 1 Paket	RT O1 Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	2595654	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Perlengkapan Alat Kesehatan 1 Paket untuk PUSKESDES	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Proses lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
201	2595659	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan Kendaraan Operasional Angkut sampah (Tosa) 1 unit	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Bisa di proses, akan tetapi sampah tersebut diangkut darimana dan diangkut kemana, karena mengingat bahwa TPA yang ada di kabupaten Gunung Mas terletak di kota kuala kurun, menghitung jarak dari dari Desa Tumbang habaon ke Kuala Kurun cukup jauh.	-	1	unit	45000000	-	Penanganan sampah melalui pengangkutan
202	2595662	17-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan Tong Sampah Feber Organik,Non Organik dan B3 27 Unit	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Bisa di Proses dengan Ketersediaan Anggaran	-	27	Unit	54000000	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
203	2595670	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Pembangunan Rumah untuk Masyarakat yang tidak memiliki rumah (Rumah Tangga Miskin) 32 Unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	2595671	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Rehab rumah masyarakat Tidak Layak Huni (Rumah Tangga Miskin) 23 unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
205	2595672	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan Pembangunan /Rehabilitas Rumah Ibadah 3 Sekte (GKE,GBI dan KATHOLIK)	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan diproses dan ditanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	Proses	Buatkan proposal usulan gereja GKE, GBI dan KATHOLIK DESA TUMBANG HABAON	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
206	2595690	18-12-2025	MULIADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Tidak Adanya Jembatan Penghubung RT.01 dan RT. 02 (L = 3,5 m x p = 30 m) Desa Hantapang	Desa Hantapang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
207	2595691	18-12-2025	MULIADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum Adanya Pembangunan Gedung SD Desa Hantapang (L = 6 m x P = 12 m)	Desa Hantapang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
208	2595692	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Pengadaan Bibit Sapi untuk masyarakat 150 Ekor	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas di Musrenbang TK. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	2595695	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Penngadaan Bibit ikan dan Pakan masyarakat 20.000 Ekor Masyarakat	Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas di Musrenbang TK. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	2595696	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Pengadaan Bibit Ayam Petelur dan Pakan 6.000 Ekor untuk masyarakat (Kelompok)	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas di Musrenbang TK. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	2595698	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Penyediaan Bibit Babi 200 ekor	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas di Musrenbang TK. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	2595702	18-12-2025	MULIADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Program Administrasi Pemerintahan Desa)	Kurang Paham dalam Tugas dan Fungsi Sebagai Anggota BPD	Desa Hantapang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai Arah Kebijaka, dan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
213	2595938	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Mengingat jalan nyai balau RT.02 kelurahan tewah kerusakannya sudah sangat memprihatinkan kerana masa usia aspalnya sudah cukup lama kurang lebih 30 tahun dan satu satunya jalan menuju lingkungan sekolah. dengan P = 800 m x L = 4 m	Jl. Nyai Balau RT.02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
214	2596013	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Penataan Halaman dan Tembok Beton Keliling Gereja GKE "Kahandjak" Tumbang Rahuyan	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GKE "Kahandjak" Tumbang Rahuyan	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
215	2596028	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pengadaan Meubiler berupa Kursi+meja kapasitas 4 orang sebanyak 50 pasang.	Gereja GKE Kahandjak Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan meubeler Gereja GKE Kahandjak Tumbang Rahuyan	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
216	2596061	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Penataan Halaman Gereja GKE "Sangkakala" Tumbang Rahuyan dan Pembuatan Pagar Keliling Gereja	RT 07 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Penataan Halaman Gereja GKE "Sangkakala" Tumbang Rahuyan dan Pembuatan Pagar Keliling Gereja	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
217	2596076	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pengadaan 1 (satu) unit Soundsystim untuk Gereja GKE "Kahanjak" Tumbang Rahuyan	Gereja Kahanjak Tumbang Rahuyan RT 07, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan pengadaan soundsistim Gereja GKE "Kahanjak" Tumbang Rahuyan	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
218	2596088	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	mengingat jembatan kayu tersebut sudah lapuk dimakan jaman kuran lebuh usia 20 tahun dan belum tersentuh perbaikan guna pembuatan box coulvert di RT. 03, jalan menteng 2, kelurahan tewah dengan panjang 3 m x 1,5 m T. 3 m	jalan menteng 2, kelurahan tewah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	2596100	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembuatan Pagar Keliling Balai Kaharingan dan Komplek Sandung 1 unit	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan propsal usulan Pembuatan Pagar Keliling Balai Kaharingan Kelurahan Tumbang Rahuyandan Komplek Sandung	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
220	2596142	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Mengingat jalan tersebut masih sering banjir karena berupa tanah dan perlu adanya pengaspalan atau cor beton P= 200m x L = 4 m	Kelurahan Tewah RT.04 ujung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	2596161	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Mengingat jalan gang tersebut masih karena berupa tanah dan perlu adanya pengaspalan atau cor beton P= 102m x L = 3 m	Kelurahan Tewah RT05, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	2596168	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Mengingat jalan gang tersebut masih karena berupa tanah dan perlu adanya pengaspalan atau cor beton P= 100 m x L = 3 m	Kelurahan Tewah RT.06, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	2596183	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	perlu adanya perbaikan atau pembuatan jalan atau jembatan menjadi Rel BOX Coulvert, kerana jalan tersebut sudah sangat rusak berat dan hal itu berlangsung selama 40 tahun dengan ukuran P=55m x L =4 m T=5 m	Kelurahan Tewah RT,10, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
224	2596219	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	perlu dibikin drainase jalan h.yasin karena musim penghujan maka jalan tergenang air/ bajir sampa ke rumah warga hal itu berlansung selama 20 tahun, P=100 m L =1 M T=80 cm	Kelurahan Tewah RT,11, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	2596261	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	jalan tersebut berupa tanah dan perlu adanya penanganan peningkatan berupa aspal dan jembatan menuju lingkungan sekolah dan pertanian warga, ukuran jalan P=250 M L= 3 M , ukuran Jembatan box coulvert P= 5 M, L= 4 M, T=5 M	Kelurahan Tewah RT. 12, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
226	2596263	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pengadaan 100 buah Kursi Plastik untuk Balai Kaharingan Tumbang Rahuyan	Balai Kaharingan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Pengadaan Balai Kaharingan Tumbang Rahuyan	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
227	2596285	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan tersebut rusak berat dan sudah berlangsung sangat lama mengingat salah satu akses menuju DAM Biwit (Pertanian warga) P= 1000 M L= 6 M	Kelurahan Tewah RT.14, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	2596302	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya Pembuatan Jembatan cor beton besi di sungai karungen Tugu Tewah, mengingat jalan tersebut termasuk jalan induk dan rusak berat , P = 93 M L= 5 M, T=15 M	Kelurahan Tewah RT.14, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	2596310	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Pengadaan 1 hektar Tanah tempat pemakaman umum	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
230	2596337	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Penambahan 3 orang ASN	Kantor Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
231	2596349	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya Pembuatan Jembatan sei biwit kayu menjadi tri box coulvert , mengingat jalan tersebut termasuk jalan induk dan rusak berat , P = 6 M L= 4 M, T=12.05 M	kelurahan Tewah RT. 15, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	2596357	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan Pengadaan 75 buah kursi jemaat untuk beribadah	Gereja GPDI Tumbang Rahuyan RT 03 Jln. Lintas Tbg,Rahuyan Tbg. Jutuh., Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GPDI Tumbang Rahuyan RT 03 Jln. Lintas Tbg,Rahuyan Tbg. Jutuh	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
233	2596365	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan 1 unit Sound Sistem	Gereja GPDI Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GPDI Tumbang Rahuyan	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
234	2596373	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	1 buah Kipas Angin Besar Gantung	Gereja GPDI Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GPDI Tumbang Rahuyan	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
235	2596383	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Rehab Gereja GSJA Tumbang Rahuyan	RT 07 Gereja GSJA Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GSJA Tumbang Rahuyan	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
236	2596396	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Rehab Atap 1 (satu) unit Gedung Puskesmas Tumbang Rahuyan	RT 03 Puskesmas Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
237	2596398	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya peningkatan jalan gg. Mulia berupa aspal atau cor beton , mengingat jalan pemukiman masih berupa tanah , Ukuran P= 200 L=3 M	Kelurahan Tewah RT,16, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
238	2596400	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya peningkatan jalan gg. amin berupa aspal atau cor beton , mengingat jalan pemukiman masih berupa tanah , Ukuran P= 200 L=3 M	Kelurahan Tewah RT,17, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
239	2596401	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan 2 (dua) unit Rumah Dinas baru	Puskesmas Tumbang Rahuyan RT 03, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
240	2596403	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya peningkatan jalan gg. Tua berupa aspal atau cor beton , mengingat jalan pemukiman masih berupa tanah , Ukuran P= 200 L=3 M	Kelurahan Tewah RT.17, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
241	2596407	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya peningkatan jalan gg. Keluarga II, berupa aspal atau cor beton , mengingat jalan pemukiman masih berupa tanah , Ukuran P= 150 L=3 M	Kelurahan Tewah RT.19, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
242	2596417	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembuatan Parkir Kendaraan Beroda 4	Puskesmas Tumbang Rahuyan RT 03, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
243	2596421	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Bantuan Pengadaan 2 (dua) buah Kendaraan Roda 2 (Jupiter Z)	Puskesma Tumbang Rahuyan RT 03, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
244	2596435	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Tembok/Pagar SMKN 1 Rungan Hulu	SMKN 1 Rungan Hulu RT 07 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Bukan kewenangan Kabupaten,, Usulkan ke Provinsi	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
245	2596448	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Relokasi 3 unit Rumah Dinas Guru SMKN 1 Rungan Hulu karena banjir	RT 07 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Bukan kewenangan Kabupaten,, Usulkan ke Provinsi	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
246	2596453	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangun baru 2 (dua) unit Rumah Dinas Guru SMKN 1 Rungan Hulu	RT 07 Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Bukan kewenangan Kabupaten,, Usulkan ke Provinsi	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
247	2596469	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehab Total 1 (satu) unit Ruang Kelas SMPN 1 Rungan Hulu yang terbuat dari kayu diganti dengan bahan Beton	SMPN 1 Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
248	2596480	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan 100 Pasang Meja dan Kursi Siswa SMPN 1 Rungan Hulu	SMPN 1 Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
249	2596581	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangun Baru 1 (satu) unit Rumah Dinas Guru SMPN 1 Rungan Hulu	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
250	2596583	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu dilanjutkan pembangunan Pagar SMPN -3 Tewah mengingat masih terbukanya pagar guna terciptanya Kamtibmas demi menjaga aset dan rasa nyaman dan aman bagi siswa . P= 100 M	Kelurahan Tewah RT,20, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
251	2596588	18-12-2025	DARMADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangun Baru Jalan Sirkulasi / penghubung antar ruangan bahan Beton SMPN 1 Rungan Hulu	SMPN 1 Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
252	2596606	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	perlu adanya pengaspalan di jalan pintu masuk dan keluar serta halaman UPT-Puskesmas Tewah karena hal tersebut sangat menyulitkan warga yang mau berobat dikarenakan halaman masih berupa tanah P= 500 M L=4 M	Kelurahan Tewah RT.20, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
253	2596612	18-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya Pembangunan Parkir di UPT- Kecamatan Tewah, guna manjaga aset-aset kendaraan dinas agar tidak terkena panas /hujan saat tidak digunakan . P= 12 M l = 4 M	Kelurahan Tewah RT,20, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
254	2596619	18-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pengadaan Peralatan Penyedap Karet 527 unit	Desa Tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai dengan Arah Kebijakan dan dapat diteruskan untuk dibahas di Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
255	2596622	18-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlunya pembuatan drainase dan pembuatan jalan di wilayah RT. 012	Pembuatan Jalan di Jl. Kopri tembusan Jl. Damang Gaman (50 Meter) danPembuatan Jalan di Jl. Kopri (50 Meter), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
256	2596667	18-12-2025	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemberdayaan & Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	kurangnya SDM Masyarakat	desa tumbang tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Sangat penting untuk peningkatan SDM kader pada TRIBINA (BKB,BKR dan BKL) mendukung program banggakancana pada indikator iBangga,dengan sasaran 12 kecamatan	-	100	orang	180000000	-	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
257	2596749	18-12-2025	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	kurangnya air bersih	desa tumbang tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
258	2596961	18-12-2025	SEMSUHADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum Ada Alternatif Penyebrangan Jembatan Gantung	Desa Buntoi RT.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Bontoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
259	2597140	18-12-2025	YEDIERSHEN, SE (Pj. Kades)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Desa Batu Nyapau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Batu Nyapau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
260	2597195	18-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Jalan Lintas Sepang Simin Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	2597204	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Tidak tersedianya bangunan PUSTU di Desa Karason Raya, maka dalam hal ini kami bermaksud mengajukan Permohonan untuk Pembangunan 1 Unit Bangunan Pustu dan Perlengkapan Alat Kesehatan.	Desa Karason Raya, Kecamatan Tewah (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
262	2597209	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Tidak tersedianya Ambulance di Desa Karason Raya, hal ini menyebabkan Warga harus menempuh jarak jauh ke rumah sakit / Puskesmas dengan biaya transportasi pribadi yang mahal, terutama bagi yang kurang mampu. Maka dalam hal ini kami mengajukan kembali Permohonan kami sebelumnya yaitu berupa Pengadaan 1 (Satu) Unit Ambulance untuk Desa Karason Raya	Desa Karason Raya, Kecamatan Tewah (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
263	2597212	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Terhambatnya aktivitas ekonomi dan sosial warga di malam hari, maka dalam hal ini kami mengajukan Permohonan Berupa Pengadaan 14 (Empat Belas) Titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Karason Raya	RT.001 dan RT.002 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	2597217	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Tidak adanya jaringan Listrik PLN di Desa Karason Raya, hal ini berdampak pada Aspek Ekonomi dan Sosial dimasyarakat, Maka dari hal tersebut kami mengajukan Permohonan Berupa Penyediaan / Pengadaan PLTS Bagi Masyarakat Desa Sebanyak 96 Rumah Warga Desa Karason Raya	RT.001 dan RT.002 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses	Ditindak lanjuti dengan menyurati Dinas ESDM Provinsi Kalteng terkait penyediaan PLTS untuk tahun 2027	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
265	2597218	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN sebanyak 18 Rumah bagi masyarakat Tidak Mampu (Prasejahtera)	RT.001 dan RT.002 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	2597219	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Pembangunan Drainase (Sistem Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga) Sei Karason dengan ukuran : Panjang = 25 M x Lebar Bentangan = 10 M x Tinggi = 1,5 M	RT.001 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	2597221	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Permohonan Bantuan untuk Pembangunan / Rehabiltasi / Peningkatan Rumah Ibadah Gereja GKE Tetean Salamat - Desa Karason Raya.	RT.001 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Buatkan proposal usulan Gereja GKE Tetean Salamat - Desa Karason Raya.	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
268	2597223	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Permohonan Bantuan untuk Pembangunan / Rehabiltasi / Peningkatan Rumah Ibadah Gereja GPT Anugerah - Desa Karason Raya.	RT.002 Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Buatkan proposal usulan Gereja GPT Anugerah - Desa Karason Raya.	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
269	2597226	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Permohonan Pengadaan Bibit Babi Bagi Masyarakat dan Kelompok Tani Bidang Peternakan Di Desa Karason Raya Sebanyak 70 Ekor/ bibit, yang diharapkan sebagai salah satu aktivitas masyarakat desa untuk meningkat Perekonomian masyarakat Desa	Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	2597228	18-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	2597229	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Permohonan Pengadaan Bibit Sapi Bagi Masyarakat dan Kelompok Tani Bidang Peternakan Di Desa Karason Raya Sebanyak 30 Ekor/ bibit, yang diharapkan sebagai salah satu aktivitas masyarakat desa untuk meningkat Perekonomian masyarakat Desa	Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	2597232	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Permohonan Bantuan Pengadaan Bibit Ikan Patin dan Ikan Lele Dumbo Bagi Masyarakat dan Kelompok Tani Bidang Perikanan Di Desa Karason Raya Sebanyak 10.000 Ekor/ bibit, yang diharapkan sebagai salah satu aktivitas masyarakat desa untuk meningkat Perekonomian masyarakat Desa	Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	2597236	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Permohonan Pengadaan Bibit Sawit Bagi Masyarakat dan Kelompok Tani Bidang Perkebunan Di Desa Karason Raya Sebanyak 5.000 bibit, yang diharapkan sebagai salah satu aktivitas masyarakat desa untuk meningkat Perekonomian masyarakat Desa	Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
274	2597240	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Penanggulangan Bencana)	Sarana prasarana tanggap darurat bencana, berupa : 1. Bantuan 1 (Satu) Unit Kendaraan Operasional Petugas / Masyarakat Peduli Api Skala Desa"; 2. Sarana Prasarana Berupa 1 (Satu) Set Perlengkapan untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta lainnya yang ada di Desa.	Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
275	2597241	18-12-2025	YERMINAE, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Permohonan Pengadaan Bibit Kambing Bagi Masyarakat dan Kelompok Tani Bidang Peternakan Di Desa Karason Raya Sebanyak 30 Ekor/ bibit, yang diharapkan sebagai salah satu aktivitas masyarakat desa untuk meningkat Perekonomian masyarakat Desa.	Desa Karason Raya (74552), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Karason Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	2597370	19-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	PEmbangunan Kantor Guru dan Kantor Kepala Sekolah SDN 1 Tumbang Malahoi	Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
277	2597372	19-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pengadaan Sarana Air Bersih di SDN 1, 2 dan 3 Tumbang Malahoi	Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
278	2597402	19-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Penambahan Lokasi/Tempat Pemakaman Umum	Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
279	2597406	19-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pengadaan Ambulance Desa	Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
280	2597791	19-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah	Jalan Damai Sejahtera Rt 05/ Rw 02. Kelurahan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	2597900	19-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	dibutukan Bibit ikan Gurami guna menunjang kegiatan kelompok tani di kelurahan tewah sebanyak 15.000 ekor , sebab selama ini kebutuhan ikan gurami di kelurahan tewah masih didatangkan dari ibu kota provinsi kalimantan tengah	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	2597934	19-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner)	diperlukan adanya pengadaan bibit babi di kelurahan tewah , mengingat sektor di pembibitan babi di kelurahan tewah sangat menjanjikan bagi pera kelompok tani khususnya di ternak babi dan di butuhkan 200 ekor	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
283	2597941	19-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner)	diperlukan adanya pengadaan bibit babi di kelurahan tewah , mengingat sektor di pembibitan Sapi di kelurahan tewah sangat menjanjikan bagi pera kelompok tani khususnya di ternak sapi dan di butuhkan 100 ekor	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	2597978	19-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	perlu adanya perahu karet mengingat bencana banjir khususnya diwilayah kelurahan tewah sangat sering terjadi dan memudahkan proses evakuasi warga teruntuk di wilayah bantaran sungai. dibutuhkan sebanyak 3 buah perahu karet	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	1 buah perahu karet	-	1	buah	35000000	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
285	2597991	19-12-2025	NOOR IFAN SYAH, S.IP, MM	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	mengingat jarak antara ibu kota kabupaten Gunung Mas dan Kelurahan Tewah sangat jauh ,maka perlu segera ditangani apabila terjadi kebakaran serta rumah rumah penduduk yang semakin lama semakin padat dan rapat. dibutuhkan 1 (satu) unit mobil DAMKAR	Kelurahan Tewah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tewah	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
286	2598539	20-12-2025	NAHPA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Mobil Ambulan (4WD) (2 Unit)	Desa Tumbang Masukih, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
287	2598555	20-12-2025	NAHPA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Penambahan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (4 pintu 6×10 M)	Desa Tumbang Masukih, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
288	2598556	20-12-2025	NAHPA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Tabung Oksigen (4 Buah)	Desa Tumbang Masukih, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
289	2598654	20-12-2025	NAHPA	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Wc/ Toilet Sekolah (1 Unit)	Desa Tumbang Masukih, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
290	2598656	20-12-2025	NAHPA	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Relokasi/Pemindahan Sekolah SMPN 1 Atap 1 Miri Manasa (1 Unit)	Desa Tumbang Masukih, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
291	2598657	20-12-2025	NAHPA	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perbaikan Jalan Antar Desa	Desa Tumbang Masukih, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
292	2598659	20-12-2025	NAHPA	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Program PLN (239 Unit Rumah)	Desa Tumbang Masukih, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Kepala Desa Tumbang Masukih agar membuat Proposal Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
293	2598831	21-12-2025	SARADIN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	sungai yang dijadikan untuk sumber air bersih desa...tdk mengalir lagi apabila musim kemarau	Jl. Desa Tbg. Koroi, RT.001 RW.000 Kec. Miri Manasa Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dibahas dalam Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
294	2598832	21-12-2025	SARADIN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	jalan dan jembatan antar desa banyak yang rusak	Jl. Antar Desa Diwilayah Desa Tumbang Koroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dibahas dalam Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
295	2598834	21-12-2025	SARADIN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	banyak masyarakat yang tinggal dirumah kumuh dan tidak layak huni	Jl Desa Tumbang KOroi, RT.001 RW.000 Kecamatan Miri Manasa, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dibahas dalam Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
296	2598839	21-12-2025	SARADIN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Belum ada Bangunan Postu	Jl. Desa Tumbang Koroi RT.001 RW.000, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Koroi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
297	2599052	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penambahan Meja Kursi Guru	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
298	2599053	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Pembangunan WC Sekolah SDN Negeri Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
299	2599054	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan Pastori Gereja GKE Eka Kaharap Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Buatkan proposal usulan Gereja GKE Eka Kaharap Rangan Hiran	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
300	2599055	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Rehab Gedung Poskesdes/Pustu Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
301	2599058	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Peningkatan Akses Jalan Antar Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiranb, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
302	2599060	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembanguanan Sarana Prasarana Listrik PLN Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Kepala Desa Rangan Hiran agar membuat Proposal Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
303	2599061	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Cor Box Beton Antar Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
304	2599062	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembanguanan/Peningkatan Aspal Jalan Antar Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
305	2599067	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Pengadaan Pelatihan dan Peralatan TIM SARS Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
306	2599069	22-12-2025	SONTO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Pengadaan Alat Pemadam API Ringan/ APAR Desa Rangan Hiran	Desa Rangan Hiran, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Rangan Hiran	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
307	2599588	22-12-2025	TOBIE U. JIRAU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Mobil Ambulance Desa Tenaga Kesehatan Moubiler Pustu Motor Dinas Pegawai Pustu	Desa Tumbang Siruk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Siruk	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
308	2599613	22-12-2025	TOBIE U. JIRAU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rumah Jabatan Kepala Sekolah SDN 1 Tumbang Siruk Kantor SDN Tumbang Siruk Penambahan Guru Agama Kristen Moubiler SDN Tumbang Siruk	Desa Tumbang Siruk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Siruk	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
309	2599682	22-12-2025	TOBIE U. JIRAU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pemeliharaan Dam air Bersih Peningkatan /Pemeliharaan Jalan Antar Desa	Desa Tumbang Siruk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Siruk	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
310	2599719	22-12-2025	TOBIE U. JIRAU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Bibit Durian Bibit Rambutan Bibit Jeruk Bibit Kalengkeng Bibit Mangga Bibit Jambu Kristal	Desa Tumbang Siruk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Siruk	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	50000000	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
311	2600696	22-12-2025	ANTON	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan ASPAL jalan antar Lintas Desa Tumbang Manyoi	Desa Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
312	2600704	22-12-2025	ANTON	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pengadaan Sumur Bor Desa Tumbang Manyoi	Desa Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
313	2600717	22-12-2025	ANTON	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Pastori Gereja GBI Desa Tumbang Manyoi	Desa Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
314	2600722	22-12-2025	ANTON	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pengadaan Sarana Prasaran Listrik PLN di Desa Tumbang Manyoi	Desa Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Kepala Desa Tumbang Manyoi agar membuat Proposal Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
315	2600724	22-12-2025	ANTON	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningakatan BOK Cor Beton Antar Lintas Desa Tumbang Manyoi	Desa Tumbang Manyoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Manyoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
316	2607306	25-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Penambahan ruang belajar 7x8 M2 SDN NEGERI Desa Mangkuhung	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
317	2607309	25-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Rehab 2 ruangan 7x8 m2 SDN Desa Mangkuhung	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
318	2607313	25-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Penambahan Mobiler sekolah meja 25 dan korsi 25 buah SDN Desa Mangkuhung	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
319	2607315	25-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	peningkatan jalan lintas Desa Mangkuhung 4.500 meter	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
320	2607316	25-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	belum adanya peningkatan jembatan/gorong gorong antar batas jalan Desa	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
321	2607335	25-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Bantuan keagamaan untuk 3 sekte GKE,GBI dan Hindu	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Buatkan proposal usulan gereja GKE,GBI dan Hindu Desa Mangkuhung	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
322	2608217	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pengembangan Daerah Wisata "Sahai Hatoan" 1 Paket	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas dan diharapkan status Lahan sudah selesai didesa dan dapat diproses kelanjutan pengembangannya	-	-	-	-	-	-	-
323	2608223	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pemeliharaan Jalan Lintas Kabupaten Gunung Mas 1 Paket	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
324	2608224	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan Jembatan Gantung 1 Paket (P : 60 M dan L : 1,5 M)	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
325	2608232	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Moubiler Pustu 1 Paket	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
326	2608233	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Bidan Kit Pustu 1 Set	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
327	2608234	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Set Poli Umum Pustu 1 Set	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebiih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
328	2608235	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Alat Bedah Minor Pustu 1 Set	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
329	2608237	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Rehap Berat Pustu 1 Paket	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
330	2608241	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rujab Kepala Sekolah 1 Unit	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut Jenjang sekolah diperjelas	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
331	2608242	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Moubiler Kursi, Meja, dan Lemari Guru 6 Set	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut Jenjang sekolah diperjelas	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
332	2608244	26-12-2025	HORDIANTO.	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Penambahan Tenaga Kesehatan Perawat 1 Orang	Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
333	2608277	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	belum adanya Pembangunan Aliran listrik 4.500 M	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Kepala Desa Mangkuhung agar membuat Proposal Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
334	2608320	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	1 paket listrik/PLTS Postu	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
335	2608321	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	1 set bidan KIT	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
336	2608328	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	1 set poli umum Postu	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
337	2608330	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	1 set alat bedah Minor	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
338	2608336	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	pengadaan mobiler alat postu 1 set	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
339	2608338	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Penetapan Tenaga Kesehatan/Bidan 1 Orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
340	2608341	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Penetapan Tenaga Kesehatan/Perawat 2 Orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
341	2608372	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	90 Kg Bibit Sayur-sayuran	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	25000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
342	2608376	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	7.200 Kg Bibit Padi	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	150000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
343	2608379	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Perlu pelatihan Menjahit untuk 25 Orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Pelatihan Menjahit	-	25	orang	85000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
344	2608382	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan Anyan-anyaman 20 orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Pelatihan Anyaman Rotan	-	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
345	2608384	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan Mobiler /Molding 15 Orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Pelatihan Mobileur/Molding	-	15	orang	50000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
346	2608386	26-12-2025	YUNANTO, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pelatihan Perbengkelan Sepeda Motor 20 orang	Desa Mangkuhung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Mangkuhung	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Pelatihan Perbengkelan	-	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
347	2609628	27-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan Jalan Baru Lingkar Luar Ukuran Panjang 2000 m Lebar 4 m	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
348	2609635	27-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor Beton Jalan Dambung Bangun Lanjutan jalan (Sei Nanap) Panjang 100 M lebar 4 M	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
349	2609638	27-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan gang dan Cor Beton Gang Keluarga RT 02 panjang 100 M lebar 2 M	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
350	2609643	27-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan Theo E Ganti (samping Kuburan) Panjang 100 M Lebar 3 M	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
351	2609661	27-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Kopel Rumah Dinas 2 Pintu Ukuran 6 x 16	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
352	2609667	27-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Penambahan Pegawai 4 perawat dan 4 Bidan	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Untuk ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
353	2609688	27-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Tanaman Padi	Tumbang napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	50000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
354	2610448	28-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Meja Kursi Guru TK pembina 5 Set	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
355	2610450	28-12-2025	ARDIUS, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penimbunan Halaman TK Pembina	Tumbang Napoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
356	2611628	29-12-2025	PRATUNAS, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Belum Adanya Jalan Produksi Di Desa Tumbang Danau	RT. 003 RW.001 Desa Tumbang Danau Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Danau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat diproses sesuai dengan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
357	2611953	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlunya pembangunan Gedung Baru Sekolah Dasar Negeri 1 Sei Riang di Desa Sei Riang Jalur Lintas karena lokasi lama rawan bencana banjir.	Desa Sei Riang jln Patahu RT.001 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
358	2612027	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum tersedianya lahan untuk pembangunan Gedung Sekolah Dasar di lokasi yang tidak rawan bencana banjir	Desa Sei RiangJl. Patahu RT.001 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
359	2612111	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Masih banyak prasarana jalan antar wilayah kecamatan dan desa yang rusak	Jalan Lintas kecamatan tewah dan kecamatan kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
360	2612164	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tidak tersedianya fasilitas Kesehatan di Wilayah Desa Sei Riang Jalur lintas dan kondisi gedung Pustu Lama Yang Rusak Berat	Desa Sei Riang Jalur Lintas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
361	2612246	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Tidak tersedianya sarana air bersih dan sebagian besar masyarakat masih menkonsumsi air sungai sebagai sumber air minum	Desa Sei Riang RT 001 &. RT.002, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
362	2612337	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Kurang tersedianya SDM yang berkualitas khususnya di wilayah Desa Sei Riang	Desa Sei Riang RT.001 & 002, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Pelatihan Tenaga Kerja	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
363	2612368	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Masih banyak terdapat Rumah Tidak Layak Huni di wilayah Desa Sei Riang RT.001 & RT.002	Desa Sei Riang RT001 & RT.002, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
364	2612398	29-12-2025	MULYADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat)	Kurangnya pengembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya di bidang pertanian dan peternakan	Desa Sei Riang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sei Riang	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
365	2614085	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Rusaknya jembatan penghubung diruas jalan Jutuh - Bereng Jun sepanjang 35 meter.	RT.001/RW.001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
366	2614104	29-12-2025	GEMBIRA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	perlu perbaikan WC SDN Hujung Pata dan penyedian Sumber air bersih	RT.003/RW.001 Desa Hujung Pata, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Hujung Pata	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
367	2614124	29-12-2025	GEMBIRA	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	terdapat 3 rumah tidak layak huni dengan status pemilik adalah masyarakat kurang mampu	Desa Hujung Pata, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Hujung Pata	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
368	2614138	29-12-2025	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jembatan Sei Lunuk yang masih menggunakan material kayu telah mengalami pelapukan dan penurunan kekuatan struktur sehingga rawan ambruk dan membahayakan masyarakat. dibutuhkan pembangunan sei lunuk berbahan kayu(permanen) dengan panjang 25 meter dan lebar 4 meter	Jalan K.T. Raba RT.01 Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
369	2614163	29-12-2025	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Daya listrik yang tersedia di Pustu Desa Teluk Nyatu belum mencukupi untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan dan penggunaan peralatan medis. bangunan gedung pustu membutuhkan penambahan daya	jl. Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT.03 Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat ditanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
370	2614168	29-12-2025	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pustu Desa Teluk Nyatu belum memiliki mobil ambulans sehingga pelayanan rujukan pasien darurat menjadi terhambat. membutuhkan pengadaan sarana mobilisasi 1 unit mobil ambulance	Jalan Kurun-Palangka Raya RT.03 Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
371	2614173	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pemeliharaan Air Bersih (Pembuatan DAM Baru)	RT 01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372	2614177	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengaspalan Jalan Tambung Bungai (Pajangei - Tewah)	RT 01, 02 Dan 03, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
373	2614179	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sei Pajangei	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
374	2614188	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penimbunan Sirtu Halaman SDN Tumbang Pajangei	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Proses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
375	2614199	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar SDN Tumbang Pajangei	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Proses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
376	2614209	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Pembangunan Gorong-Gorong PUSTU	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
377	2614211	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Cor Beton Halaman PUSTU	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
378	2614215	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Tower Air PUSTU	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
379	2614220	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Pengadaan Kursi Ruang Tunggu PUSTU	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
380	2614224	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan PUSTU	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
381	2614229	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Penyediaan Air Bersih Untuk PUSTU	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
382	2614238	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Pengadaan Lemari Arsip Untuk PUSTU	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
383	2614257	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehap Atap dan Plapon Gereja GKE Pandohop Tumbang Pajangei	RT 01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
384	2614267	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Rehap Tembok Monumen Tabun Bungai	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
385	2614277	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pemeliharaan Taman di Monumen Tambun Bungai	RT 02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
386	2614285	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pembangunan Tangga di Situs Bukit Rombak Haramaung	RT 01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
387	2614286	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor Beton Jembatan Rawa-Rawa Karena sudah tidak bisa dilewati mobil dan motor hanya bisa dilewati pejalan kaki dan memang rusak parah	Jl Singa Raza RT 001 RW 001 Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
388	2614294	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Drainase Jl Baru RT 003 dan Jl Bukit Putan RT 004 dari depan Gereja GBI sampai Batas RT 004 karena sering terjadi banjir dan membuat Sampai tertumpuk	Jl Baru RT 003 dan Jl Bukit Putan RT 004 Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-
389	2614303	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Ternak sapi	RT. 01,02 Dan 03, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
390	2614313	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Ternak Babi	RT. 01, 02 Dan 03, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	2614319	29-12-2025	SITI PANENAH, A.Md.Kom (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan Antara Desa Tumbang Malahoi ke Desa Tumbang Kuayan belum pengaspalan	Tumbang Kuayan-Tumbang Malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
392	2614322	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehab Sekolah TK Tunas Harapan Desa Tewai Baru	Jl Singa Raza RT 001/RW 001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Proses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
393	2614325	29-12-2025	KARDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Bantuan Untuk Korban Banjir	RT 01, 02 Dan 03, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Pajangei	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	Akan dilakukan penyediaan makanan untuk masyarakat yang terkena banjir.	-	100	keluarga	30000000	-	Penyediaan Makanan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
394	2614326	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	100 Kursi+Meja untuk SMP SATAP 2 SEPANG	Jl Singa Raza RT 001/RW 001 Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
395	2614332	29-12-2025	SITI PANENAH, A.Md.Kom (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan antara Desa Tumbang Kuayan ke Ibukota Kecamatan Rungan Barat belum ada perbaikan dan Pengaspalan	Tumbang Kuayan - Ibukota Kecamatan Rungan Barat, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
396	2614333	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehab Pagar Sekolah TK TUNAS HARAPAN Desa Tewai Baru	Jl Singa Raza RT 001/RW 001 Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
397	2614336	29-12-2025	MADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	Jaringan Telekomunikasi	RT.001/RW.001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas (Starlink)	-	1	Unit	70000000	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
398	2614341	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	100 Kursi + Meja Untuk SD Negeri 1 Tewai Baru	Jl Singa Raza RT 001/ RW 001 Desa Tewai baru, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
399	2614364	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penambahan Guru untuk SMPN SATAP 2 Sepang	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
400	2614373	29-12-2025	SIGO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Meminta 1 Unit Mobil Ambulan untuk Desa	Desa Tewai Baru, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Tewai Baru	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
401	2614390	29-12-2025	MADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengaspalan Jalan Tbg. Mantuhe ke Desa Luwuk Tukau	RT.001, RT.002, RT.004/ RW.001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
402	2614400	29-12-2025	MADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Renovasi flapond ruangan Kelas 1, 2 SDN Luwuk Tukau	JL. Pelajar RT.004/ RW.001 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
403	2614410	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Bantuan sembako utuk korban bencana	Desa tumbang Habaon, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	Akan dilakukan penyediaan makanan untuk masyarakat yang terkena banjir.	-	100	keluarga	30000000	-	Penyediaan Makanan
404	2614411	29-12-2025	MADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Kursi, Meja Belajar untuk 2 ruangan SDN Luwuk Tukau	JL. Pelajar RT.004/ RW.001 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
405	2614423	29-12-2025	MADI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pembangunan Jembatan Penghubung danBox Culvert RT.002 ke RT.003	RT.002 dan RT.003 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
406	2614433	29-12-2025	MADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan Rumah Ibadah	RT.003, RT.002, RT.001 Desa Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Luwuk Tukau	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan dengan nama rumah ibadah yang jelas di desa luwuk tukau	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
407	2614447	29-12-2025	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Mobiler SDN Negeri Desa Pematang Limau Sebanyak 1 Paket	Jalan Hiut Permai RT.002/RW.001 Desa Pamatang Limau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
408	2614450	29-12-2025	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembuatan Gedung Baru SD Negeri Pematang Limau Sebanyak 3 Ruangan	Jl. Hiut Permai RT.002/RW.001 Desa Pamatang Limau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
409	2614452	29-12-2025	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Keterbatasan rumah dinas guru berdampak pada kenyamanan dan efektivitas kinerja tenaga pendidik. SMPN 5 Kurun membutuhkan pembangunan bangunan permanen (kontruksi/cor beton) Rumah Dinas Guru SMPN 5 Kurun sebanyak 5 unit masing-masing berukuran 5x7 meter	Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT.03 Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas (Area Komplek Sekolah SMPN 5 Kurun), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
410	2614463	29-12-2025	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembuatan Gedung Baru SD Negeri Pematang Limau Sebanyak 3 Ruangan	Jl.Hiut Permai RT.002/RW.001 Desa Pamatang Limau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
411	2614476	29-12-2025	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pengadaan Mobiler SMPN SATAP 1 Sepang Desa Pamatang Limau Sebanyak 1 Paket	Jln. Pelajar T.002/RW.001 Desa Pamatang Limau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
412	2614509	29-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlunya pembangunan Aula dan penambahan tembok pagar kantor Kelurahan Kuala Kurun	Kantor Kelurahan Kuala Kurun Jl. Cjilik Riwut No.47, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
413	2614511	29-12-2025	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Mobiler GPdI Desa Pamatang Limau Sebanyak 1 Paket	Jalan Lintas Kuala Kurun - Palangkaraya RT.002/RW.001 Desa Pamatang Limau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	Buatkan proposal usulan GPdI Desa Pamatang Limau	-	1	paket	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
414	2614516	29-12-2025	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Rumah Pastori GPdI Sebanyak 1 Paket	Jalan Lintas Kuala Kurun - Palangkaraya RT.002/RW.001 Desa Pamatang Limau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	Buatkan proposal usulan GPdI Desa Pamatang Limau	-	1	paket	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
415	2614530	29-12-2025	MEMET HARYANTO, S.Sos (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Bibit Sayur, Jagung Manis, Kacang, Lombok, Terong, Tomat dan Pupuk Serta Pestisida GAPOKTAN RIAK PENDEM Desa Pamatang Limau	Desa Pamatang Limau RT.001/RW.001 dan RT.002/RW.001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Pamatang Limau	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	50000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
416	2614551	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlunya Penambahan Meubelair Kantor Guru dan Siswa SMPN 4 Rungan	RT.003/RW.001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
417	2614556	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlunya penambahan ruang kelas SDN Luwuk langkuas	RT.003/RW.001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
418	2614561	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu dibangunnya Gedung Perpustakaan SDN Luwuk Langkuas	RT.003/RW.001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
419	2614571	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Rumah Tidak Layak Huni	RT.001/002/002/RW.001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
420	2614577	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Ambulance Desa	Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
421	2614601	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	KWH Listrik Pustu	RT.003/RW.001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
422	2614604	29-12-2025	MULIADI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Program Administrasi Pemerintahan Desa)	Kurang Paham dalam Tugas dan fungsi Sebagai Anggota BPD	Desa Hantapang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Hantapang	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai Arah Kebijaka, dan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
423	2614607	29-12-2025	SUHADI TAWAR (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Box Culvert Jalan Lintas Jutuh Bereng Jun	RT.003/RW.001 Desa Luwuk Langkuas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Langkuas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
424	2614628	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Bantuan Sembako untuk Korban Bencana	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Proses lebih Lanjut	Akan dilakukan penyediaan makanan untuk masyarakat yang terkena banjir.	-	100	keluarga	30000000	-	Penyediaan Makanan
425	2614632	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan Pengurus BUMDES	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Pelatihan Pengurus BUMDes	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
426	2614634	29-12-2025	SITI PANENAH, A.Md.Kom (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Masil belum pernah dilaksankan kegiatan Pembinaan Usaha Kecil Menengah di Desa Tumbang Kuayan	Tumbang Kuayan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan UMKM	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
427	2614648	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan Pengurus Koperasi Merah Putih,	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Pelatihan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
428	2614655	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan Bengkel, Mebeller dan pengadaan Peralatan	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Pelatihan Perbengkelan, Meubeller dan pengadaan Peralatan	-	20	orang	50000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
429	2614663	29-12-2025	SITI PANENAH, A.Md.Kom (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyuluhan Pertanian)	Masih belum adanya pelatihan untuk kelompok Tani supaya dapat meningkatkan Kapasitas kelompok Tani di Desa Tumbang Kuayan	Tumbang Kuayan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	30000000	-	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
430	2614672	29-12-2025	SITI PANENAH, A.Md.Kom (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Di Desa Tumbang Kuayan memerlukan sarana prasarana pertanian berupa Mesin Perontok Padi	Tumbang Kuayan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	25000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
431	2614679	29-12-2025	JHON BENY MENTENG	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Belum adanya listrik di Desa, sangat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk ke kota	Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Kepala Desa agar membuat Proposal Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
432	2614680	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyuluhan Pertanian)	Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian dan Peternakan	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	null	-	1	Paket	30000000	-	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
433	2614721	29-12-2025	SITI PANENAH, A.Md.Kom (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Ada sebagian Kecil Rumah Masyarakat yang tidak layak huni perlu perbaikan /Rehab	Tumbang Kuayan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
434	2614736	29-12-2025	SITI PANENAH, A.Md.Kom (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jembatan penyeberangan di Sei Baringei Desa Tumbang Kuayan perlu adanya perbaikan	Tumbang Kuayan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
435	2614743	29-12-2025	JHON BENY MENTENG	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Belum baiknya sarana ibadah baik Agama Islam dan Kristen.	Desa Luwuk Kantor, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Untuk dikoordinasikan/ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh Bagian/Bidang yang menangani pada perangkat daerah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan sarana ibadah islam dan kristen desa luwuk kantor	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
436	2614747	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan Peralatan Penyedap Karet	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	2614764	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Peyediaan Bibit Ikan 20.000 Ekor dan Pakan	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	2614785	29-12-2025	JHON BENY MENTENG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Banyaknya Rumah tidak layak Huni	Desa Luwuk Kantror, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Luwuk Kantor	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
439	2614796	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	PenYediaan Bibit Babi 200 Ekor, Bibit Ayam Petelur 6.000 Ekor, Bibit Sapi 150 Ekor dan Pakan	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440	2614805	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Rehab rumah Tidak Layak Huni 24 unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	2614814	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan Pembangunan /Rehabilitas Rumah Ibadah 3 Sekte : GKE,GBI dan Katholik	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses lebih lanjut	Buatkan proposal usulan gereja GKE,GBI dan Katholik DESA TUMBANG HABAON	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
442	2614818	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Pembangunan 34 unit Rumah untuk masyarakat tidak memilik rumah	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	2614824	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan Tong Sampah Feber Organik , Non Organik dan B3 28 Unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
444	2614827	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan Kendaraan Operasional angkut Sampah (Tosa) 1 Unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445	2614832	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Pengadaan Perlengkapan Alat Kesehatan untuk PUSKESDES 1 paket	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
446	2614842	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Pembangunan WC untuk PUSKESDES 1 Paket	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
447	2614848	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Gedung PUSTU 1 Paket	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	2614856	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penempatan 2 Orang Guru TK Rangan Mumpung	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
449	2614872	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar Keliling SPMN 4 Tewah 357 Meter	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
450	2614882	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar Keliling TK Rangan Mumpung 260 meter dan WC 1 Unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
451	2614887	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Cromebook 1 paket untuk SDN Tumbang Habaon	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
452	2614893	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar Keliling 250 Meter dan Pembangunan WC 1Unit untuk SDN Tumbang Habaon	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
453	2614897	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Gedung 4 Ruang Kelas untuk SDN Tumbang Habaon	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
454	2614905	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan)	Penadaan tanah lapangan olahraga 1 Hektar	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
455	2614916	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pembukaan Jalan Tani baru Menuju Dam Air Bersih 2 KM	DESA TUMBANG HABAON RT 4, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	2614919	29-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Menuju Tempat Wisata Suran 7 KM	DESA TUMBANG HABAON , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	2614925	30-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Kendaraan (mobil) Ambulance 1 Unit	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	2614931	30-12-2025	SUDIRMAN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pembukaan Jalan Produksi Tani (Menuju Proyek Karet Unggul Kebitin Raya) 16 KM	DESA TUMBANG HABAON, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tumbang Habaon	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	2615030	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum Ada nya Siring	RT04 - RT 05 Kelurahan Rabambang 3x150 M, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
460	2615034	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jembatan Penghubung	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
461	2615037	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Baru	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
462	2615038	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembangunan PDAM / Air Bersih	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
463	2615041	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Bangunan Baru Puskesmas / Tambah Ruang	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
464	2615043	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pagar Samping dan Belakang Puskesmas	RT. 8 Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
465	2615045	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Gorong - gorong Puskesmas	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
466	2615048	30-12-2025	GELVIA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehab Kantor SDN-2 Rabambang	Kelurahan Rabambang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
467	2615053	30-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Rehab Sarpras Kesehatan, Pengadaan Alkes, obat - obatan,Pelayanan Kesehatan	Desa Tumbang Posu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	2615065	30-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Pengadaan Bibit Ikan dan Pakan	Jln. Jaga Asang Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	2615066	30-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan	Jln.Jaga Asang. Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
470	2615067	30-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	kontribusi tenaga kesehatan (dokter, Perawat dan bidan)	Jln.Jaga Asang.Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	2615070	30-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan Jalan Lintas Tumbang Posu- Tumbang Marikoi, dan Tumbang Posu-Tumbang Maraya	Jln.Jaga Asang.Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Sangat diperlukan adanya peningkatan kualitas jalan kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
472	2615071	30-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	SPAM Perpipaan	Jln.Jaga Asang.Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	2615072	30-12-2025	BATTU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Irigasi, Penyediaan Air Bersih (sumur bor, DAM, Box Culvert, DAM	Jln.Jaga Asang.Rt.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Posu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	2615193	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlunya pembangunan ruang kepala sekolah dan tiolet sekolah	Ruangan Kepala sekolah (1 ruangan, U. 3 x 4 m) dan WC (3 ruangan, 2 x 2 m) TK. Kristen Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	2615240	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penambahan ruangan TB dan penataan halaman taman Puskesmas Kurun	(P. 4 X 3. m) Puskesmas Kurun , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	2615281	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlunya Penambahan ruangan TB dan penataan halaman taman Puskesmas Kurun	Penambahan ruangan (P. 4 X 3. m) Puskesmas Kurun , Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	2615439	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlunya pembangunan ruang kepala sekolah dan tiolet sekolah	Ruangan Kepala sekolah (1 ruangan, U. 3 x 4 m) dan WC (3 ruangan, 2 x 2 m) TK. Kristen Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas, Kurun, Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
478	2615446	30-12-2025	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Sarana meja dan kursi belajar dari SDN 1 Teluk Nyatu belum mencukupi dan sebagian telah rusak sehingga mengganggu proses belajar mengajar. membutuhkan pengadaan mebeler yaitu masing-masing meja dan kursi 150 buah	Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya Desa Teluk Nyatu RT.03 Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
479	2615607	30-12-2025	SETIAWAN KRISBIANTORO, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Bedah Rumah	Desa Tumbang Miwan wilayahRT.002 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Miwan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
480	2615734	30-12-2025	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Kegiatan Sekolah Hari Minggu belum didukung gedung permanen khusus sehingga pembinaan anak kurang optimal. Jemaat GKE Nazaret Desa Teluk Nyatu membutuhkan 1 paket kegiatan berupa pembangunan Gedung Sekolah Hari Minggu dengan ukuran panjang 9 meter dan lebar 7 meter	Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka RT.03 Desa Teluk Nyatu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan GKE Nazaret Desa Teluk Nyatu	-	1	paket	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
481	2615747	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pelebaran Jalan Lintas Kecamatan 1 Meter Kiri Kanan Jalan Sepanjang 1 KM di Lingkungan RT.06	Jln.Penghubung Kecamatan RT.06/RW.02 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
482	2615748	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penambahan Guru P3K SDN 1 Tumbang Sian	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
483	2615803	30-12-2025	BERJOALDI, S.Sos.,M.A.P	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Halaman gereja masih berupa tanah sehingga menyulitkan jemaat ketika parkir kendaraan terutama saat musim hujan. Jemaat GKE Nazaret membutuhkan 1 paket kegiatan pengerasan keliling halaman gereja dengan ukuran kurang lebih 150 meter	Jalan Lintas Kuala Kurun-Palangka Raya RT.03 Desa Teluk Nyatu Kecamatam Kurun Kabupaten Gunung Mas (Area Komplek Gereja GKE Nazaret Desa Teluk Nyatu), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Teluk Nyatu	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan GKE Nazaret Desa Teluk Nyatu	-	1	paket	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
484	2615873	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlunya pembangunan Sarana dan Prasarana SDN 4 Kuala Kurun	Pagar sekolah (100 m), penimbunan halaman, WC (4 buah) dan ruang belajar (3 ruangan), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
485	2615939	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlunya Pembangunan Sarana dan Prasarana SDN. 5 Kuala Kurun	WC Guru dan Siswa (2 Buah), Ruangan Lab Kumputer (1 Buah) dan 20 unit FC Kumputer jl. Perjuangan No. 51 Kurun seberang , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
486	2616002	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan Pastori, dan Plapon Gereja GKE GLORIA Tumbang Sian	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan GKE GLORIA Tumbang Sian	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
487	2616065	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Baru Rumah Dinas Guru SMPN 2 Sepang sebanyak 2 Unit	Jln.kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
488	2616092	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan WC Baru SMPN 2 Sepang sebanyak 4 Unit	Jln.Kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
489	2616145	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 2 Sepang Kota sebanyak 2 Unit.	Jln.Kota RT.07/RW.02 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
490	2616157	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Perlunya pengadaan sarana prasarana UPT. Puskesmas Kurun	Pengadaan Kursi Kerja (20 buah), Meja kerja (15 buah), Kursi tunggu pasien (6 buah),Lemari Berkas (5 buah), Laptop/FC (5 buah), AC Unit (3 buah), Ruang TB, Ruang Poned, Gedung tempat pembuangan sampah medis berijin, Perbaikan IPAL rusak., Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
491	2616163	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penambahan 3 Ruang kelas baru SDN 2 Sepang Kota	Jln.Kartini RT.04/RW.01 Desa sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
492	2616198	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan 3 Ruang Kelas Baru SDN 1 SEPANG KOTA	Jln.Kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
493	2616207	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembebasan lahan TPU Desa Tumbang Sian	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
494	2616249	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Instalasi Listrik PUSTU	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
495	2616263	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlunya pengadaan sarana prasarana UPT. Puskesmas Kurun	Pemeliharaan Gedung puskesmas (Kunci jendela dan pintu rusak, Plafon ruangan tunggu bocor, perbaikan WC), Pengadaan tensi anak (5 buah), Tensi dewasa (5 Buah), Thermometer Gun/ Tembak (5 buah), Sanitarian Kit/Kesling, dan Antropometri (5 buah), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	2616267	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Lanjutan Bedah Rumah	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
497	2616305	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pambangunan Gedung Lab. IPA SMP 5 Negeri Tewah uk. 8 x 10 (Beton)	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	2616341	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar/Tembok Keliling Sekolah SMPN 5 Tewah 400 m (P 200 x L 200) keteban tembok 20 cm x Ketinggian 220 cm	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	2616354	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan 1 Unit Ambulance Desa	Jln.Bugan RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
500	2616361	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Perlunya pengadaan sarana prasarana UPT. Puskesmas Kurun	Pemeliharaan Gedung puskesmas (Kunci jendela dan pintu rusak, Plafon ruangan tunggu bocor, perbaikan WC), Pengadaan tensi anak (5 buah), Tensi dewasa (5 Buah), Thermometer Gun/ Tembak (5 buah), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
501	2616470	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar Sekolah SDN 1 Taja Urap P 60 m x L 55 m	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	2616482	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Percepatan pengaspalan jalan aspal ujung jembatan gorong gorong	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
503	2616500	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Perlunya pelatihan (UKS) dan Pelatihan dokter kecil SDN- 3 Kuala Kurun, tujuan agar para siswa memperoleh pentingya pengetahuan kesehatan di sekolah	SDN -3 Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
504	2616509	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Pemasangan jaringan listrik baru sebanyak 21 rumah	Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	membuat Proposal Pemasangan Jaringan PLN 21 Rumah dan disampaikan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
505	2616516	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehabilitasi WC Guru dan Murid SDN 1 Taja Urap P 2 m X L 2 m	Jl.PT.Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
506	2616517	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pemeriksaan Kesehatan SMKN- 1 Kuala Kurun	2 x Setahun, serta pemberian paket penambah darah untuk para siswa, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
507	2616532	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Peningkatan Kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih	Jln.Kartini RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	Pelatihan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
508	2616541	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes	JLn. Bugan RT.04/RW.01 Desa sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah Untuk Tujuan Rencana Usulan Desa diperbaiki tempat SKPD usulan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pelatihan bagi Pengurus BUMDes	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
509	2616562	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehap Pelapon Kantor dan Kelas 7 Unit/Ruang	Jl.Pl.Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
510	2616568	30-12-2025	DIHING,SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Peningkatan Kapasitas Linmas Desa	Jln.Bugan RT.04/RW.01 Desa Sepang Kota, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Kota	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
511	2616586	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Selasar Penghubung Ruangan dan Kantor SDN 1 Taja Urap pjg 12 m Lbr 2 m	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
512	2616616	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Perlunya pengadaan Alat- alat Pendukung Budaya, Mantir Adat Kuala Kurun	Gendang/Katambung, Gong/Garantung,Tikar Ayaman Rotan, dan Sangku Bulau , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
513	2616618	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembangunan PAMSIMAS	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
514	2616634	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Gedung Perpustakaan SDN 1 Taja Urap P = 6m X L = 6m	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-
515	2616653	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Sosilisasi bahaya Narkoba dan Sosialisasi 7 KAIH (Kebiasaan anak indonesia Hebat)	SDN- 4 Kuala Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
516	2616660	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Alkes Untuk Postu 1 Paket	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
517	2616694	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Penempatan Bidan Dan Perawat 1 Bidan, 1 Perawat	Jl. PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
518	2616705	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Pembangunan Siring/bronjong TPU	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
519	2616715	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pemasangan Rambu-Rambu Jalan	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Bisa di Proses Sesuai dengan Ketersediaan Anggaran	-	1	Paket	400000000	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
520	2616733	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Ambulance 1 Unit	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
521	2616735	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan Marka Jalan kabupaten Desa Tumbang Sian	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Bisa di Proses Sesuai Ketersediaan Anggaran	-	20	Kilometer	350000000	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
522	2616768	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Operasi Katarak Gratis	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
523	2616769	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan Penghubung Antar Desa 5 KM	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
524	2616772	30-12-2025	WILNA ELITA, M.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan petugas keamanan dan Penyediaan Laptop di wilayah RT. 002	RT. 002 , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dimasukan dalam usulan di mesrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
525	2616786	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan pengurus koperasi merah putih dan BUMDES	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
526	2616800	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Bedah Rumah Warga 50 Unit	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
527	2616824	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Seminar sosialisasi dan pecegahan Narkoba untuk pemuda dan remaja	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
528	2616848	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Jaringan Listrik PLN Ke-Desa 18 KM	Jl.PT. Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Mengajukan Proposal Percepatan Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
529	2616894	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Pelatihan penyuluhan tupoksi bagi Mantir Adat dan Hukum Adat	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
530	2616897	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan Bagi Pemuda Pemudi yang Ada di Desa Pelatihan Bagi Pemuda Pemudi yang Ada di Desa Pelatihan Bagi Pemuda Pemudi yang Ada di Desa Pelatihan Bagi Pemuda Pemudi Remaja yang ada di Desa	Jl.PT.Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Proses lebih Lanjut	Pelatihan Perbengkelan	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
531	2616929	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Perencanaan dan Pembangunan Industri)	Pelatihan perbengkelan bagi anak putus sekolah	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
532	2616943	30-12-2025	JOHAN SUPIANOR, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Penanggulangan Bencana)	Mobil Pemedam Kebakaran Damkar 1 Paket	Jl.PT.Bumi Mas Permata Abadi RT.001 Desa Taja Urap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Taja Urap	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
533	2616982	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pelatihan tari bagi siswa SD dan SLTP	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
534	2617029	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Beasiswa bagi siswa SD, SLTP, SMU, Mahasiswa	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut untuk SD dan SMP untuk SMA di usulkan ke Provinsi	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
535	2617037	30-12-2025	YUYU.L.MANIJAE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyuluhan Pertanian)	pebukaan jalan prudusi tani	sandung tambun menuju desa tajaurap, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sesuai dengan arah kebijakan dan dapat dibahas di Musrenbang kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
536	2617078	30-12-2025	YUYU.L.MANIJAE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembersihan jln.tani puruksi menuju hajo dan hiang	sandung tambun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih dilanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
537	2617128	30-12-2025	YUYU.L.MANIJAE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PEMBAGUNAN LISTRIK	SANDUNG TAMBUN, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	Mengajukan Proposal Percepatan Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
538	2617145	30-12-2025	YUYU.L.MANIJAE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Pembangunan Gedung TK Tampung Tawar	SANDUNG TAMBUN, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
539	2617190	30-12-2025	YUYU.L.MANIJAE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	penngadaan laptob dan printer PUSTU	sandung tambun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
540	2617269	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Pengadaan Bibit buah petai 1000 Batang dan Bibit Rambutan 1000 batang	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	100000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
541	2617340	30-12-2025	LINSON	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Terapu Listrik	Jalan karuhei RT 002 RW 001 Desa Rabauh, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Rabauh	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	Mengajukan Proposal ke PT. PLN Persero Kuala Kurun dengan melampirkan KTP dan KK warga Jalan Karuhei Desa Rabauh	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
542	2617373	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Pengadaan pupuk kandang Urea 50 Karung	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	50000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
543	2617391	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Pengadaan bibit durian Musang King 2000 pohon	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	100000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
544	2617448	30-12-2025	DEHEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Penanggulangan Bencana)	Pengadaan Perahu Karet bermesin 1 set	Desa Tumbang Sian, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Sian	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
545	2617903	30-12-2025	PANJUNG, S.Hut (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kurangnya meubeler untuk SD dan SMP	Desa Parempei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Parempei	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
546	2617919	30-12-2025	PANJUNG, S.Hut (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	penambahan gedung kelas untuk SMP	Desa Parempei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Parempei	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dibahas di Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
547	2618071	30-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum optimalnya penataan infrastruktur dan estetika di Bundaran Sepang Simin mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas serta kurangnya ruang terbuka publik yang representatif bagi masyarakat, sehingga diperlukan revitalisasi total untuk meningkatkan keamanan dan keindahan kawasan.	Jalan Anatang Taoi. Km.3 Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
548	2618373	30-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Kurangnya sarana prasarana pengamanan berupa pagar beton mengakibatkan lingkungan kantor UPTD Kelurahan Sepang Simin terlihat tidak tertata dan kurang representatif sebagai pusat pelayanan masyarakat di wilayah tersebut.	Jalan Pemda. RT 05/ RW 02 Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
549	2618407	30-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Kondisi Jalan Damai Sejahtera saat ini masih berupa tanah rendah yang belum rata, sehingga sulit dilalui kendaraan terutama saat musim hujan karena jalan menjadi berlumpur dan licin, yang menghambat mobilitas ekonomi warga.	Jalan Damai Sejahtera. RT 06 RW 02 Kelurahan Sepang Simin, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
550	2618483	30-12-2025	JUANG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Banyak tenaga pengajar di SMP N 1 Sepang yang berdomisili jauh dari lokasi sekolah dan belum memiliki tempat tinggal tetap di wilayah tersebut, sehingga menghambat efektivitas waktu mengajar dan pelayanan pendidikan kepada siswa, terutama untuk kegiatan di luar jam sekolah	Kelurahan Sepang simin Kecamatan Sepang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Sepang Simin	Sepang Simin	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dilanjutkan Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
551	2618576	30-12-2025	GASIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan)	PEMBANGUNAN PAGAR DAN TEMBOK SEKOLAH SDN JANGKIT DAN SMP 1 ATAP RUNGAN HULU DENGAN UKURAN 200 X 140 M	DESA JANGKIT, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	2618932	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan Jalan Berlobang Menggunakan Aspal sepanjang Jl. Damang sawang dan Jl. jenderal Sudirman	RT. 02, RT. 03, & RT. 05, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
553	2618935	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Lanjutan Pemasang Pipa Air PDAM	RT.03 Tampang Tbg. Anjir, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
554	2618938	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penerangan Jalan Umum di JL. Jenderal Sudirman	RT. 01 & RT. 05 Jl. Jenderal Sudirman, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
555	2618973	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Usulan Peningkatan Jalan Langsat P = 500 m L = 4 m	Jl. Langsat RT. 05 Kel. TTA, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
556	2618985	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembuatan Drainas antara jalan D.I. Panjaitan dan Jalan Rambutan	RT. 05 Jalan Rambutan dan D.I. Panjaitan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
557	2618995	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Usulan Tempat Bak Sampah	Jalan Jambu RT. 06, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Bisa diproses dengan ketersediaan anggaran	-	3	unit	6000000	-	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
558	2619007	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Usulan Pemadam Kebakaran Tosa	Karang Taruna Kelurahan Tampang Tbg. Anjir, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
559	2619022	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Usulan Lanjutan Pengaspalan Jalan Piere Tendean II	Jl. Piere Tendean II RT. 07 Kel TTA, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
560	2619057	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Tempat Parkir Ambulan Puskesmas Tampang Tbg. Anjir	Jl. Damang Sawang RT. 02 Kelurahan TTA, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
561	2619110	30-12-2025	AGUS SEFFENI, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penambahan Ruang Belajar SDN-3 TTA	RT. 05 Kel. TTA, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Anjir	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
562	2619125	30-12-2025	GARING	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan Masuk Desa Tumbang Kajuei RT 003 RW 001 Milik Dinas PU (Pekerjaan Umum) tidak pernah diperbaiki selama 6 Tahun terakhir, jalan banyak mengalami kerusakan, diharapkan untuk melakukan semenisasi/pengaspalan jalan. jika PU tidak memperbaiki desa siap menerima hibah jalan tersebut kepada desa.	desa tumbang kajuei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Kajuei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
563	2619183	30-12-2025	GARING	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	bantuan untuk sekolah berupa lemari, meja dan kursi, dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Sekolah Kajuei Datah, Tumbang Kajuei, dan Trans Kajuei SP 1, kemudian Pembuatan Pagar Sekolah	desa tumbang kajuei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Kajuei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
564	2619221	30-12-2025	GARING	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	tidak adanya tempat pembuangan Air Besar, dan Kecil untuk pustu desa Tumbang Kajuei	desa tumbang kajuei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Kajuei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
565	2619367	30-12-2025	GASIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	Pembangunan Tower Sinyal 1 Paket Dengan nilai dana Rp. 300.000.000	Desa Jangkit, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas (Starlink)	-	1	Unit	70000000	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
566	2619454	30-12-2025	GASIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Pembangunan Menara Dan Pastori Gereja GKE Desa Jangkit 1Paket dengan Nilai Dana Rp.200.000.000	Desa Jangkit, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Jangkit	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GKE Desa Jangkit	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
567	2619626	31-12-2025	PENDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlunya Penambahan Alat Permainan Untuk Murid Serta Perbaikan Pagar Pada Paud/TK PGRI Dahian Tambuk	PAUD/TK PGRI Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
568	2619629	31-12-2025	PENDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu Adanya Penambahan Kursi dan Meja Sebanyak 50 Paket	SD-N Dahian Tambuk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
569	2619634	31-12-2025	PENDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu adanya meubiler Kursi dan meja Murid sebanyak 50 Paket serta cor beton jalan masuk sekolah	SMP Satap 1 Mihing Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
570	2619651	31-12-2025	PENDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Perlu Penambahan Pipa Jaringan Indu PDAM	JL Lintas Provinsi RT.01 dan RT.02, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
571	2619660	31-12-2025	PENDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlunya adanya cor beton sepanjang 100 M	Jl. Parukat RT.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
572	2619662	31-12-2025	PENDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu adanya pembuatan lampu penerangan jalan sebanyak 5 buah	RT.01-RT.05, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
573	2619698	31-12-2025	PENDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Kurangya Perlengkapan alat sanggar tari Penyang Hantampung	Sanggar Tari Penyang Hatampung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Dahian Tambuk	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
574	2619755	31-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembangunan sarana air bersih/sumur bor wilayah rt 01 desa batu puter dengan pagu anggaran Rp.700.000.000,-	Desa Batu Puter, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
575	2619759	31-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	pembangunan PASTORI GEREJA HAPAKAT di Rt 4 desa batu puter dengan nilai pagu anggaran Rp.300.000.000	rt 4 Desa Batu Puter, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
576	2619760	31-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	PEMASANGAN PLAPON MUSHOLA NURUL IMAN DESA BATU PUTER RT.01 DENGAN PAGU ANGGARAN Rp. 50.000.000,-	RT.01 DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
577	2619762	31-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penyediaan Guru SMP SATAP WILAYAH DESA BATU PUTER RT.01 dengan kebutuhan 5 orang tenaga pendidik	rt.01 desa batu puter, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
578	2619767	31-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	pembangunan jaringan tower baru rt 1 desa batu puter pagu anggaran 1.000.000.000,-	RT.01 DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas (Starlink)	-	1	Unit	70000000	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
579	2619768	31-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	PEMBANGUNAN PUSTU SET WILAYAH RT.01 DESA BATU PUTER 1 UNIT 400.000.000	BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
580	2619771	31-12-2025	SALIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Pembangunan sanggar seni di desa batu puter 1 unit dengan pagu Rp. 500.000.000	DESA BATU PUTER, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Batu Puter	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
581	2619863	31-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan/Rehabilitasi Gereja GPT MORIA Desa Teluk Lawah, 1 unit	Jln. Lintas RT. 002 Desa Teluk Lawah Kec. Tewah Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Gereja GPT MORIA Desa Teluk Lawah	-	1	unit	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
582	2619866	31-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan/Rehabilitasi Masjid Daarus Syakirien Desa Teluk Lawah, 1 unit	Jln. Lintas RT. 002 Desa Teluk Lawah Kec. Tewah Kab. Gunung Mas, Kab. Gunung Mas, Tewah, Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Buatkan proposal usulan Masjid Daarus Syakirien Desa Teluk Lawah	-	1	unit	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
583	2619867	31-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Perencanaan dan Pembangunan Industri)	Pelatihan Menjahit Untuk Ibu Rumah Tangga, 15 KK	Desa Teluk Lawah Kec. Tewah Kab. Gunung Mas 74552, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan pada musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	Pelatihan Menjahit	-	15	orang	50000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
584	2619872	31-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri)	Pelatihan Kerajinan Tangan Ibu2 PKK Desa Teluk Lawah, 15 KK	Desa Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat dilanjutkan pada musrenbang Kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
585	2619875	31-12-2025	ANTEL	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pembangunan/Perbaikan DAM Sumber Air Minum Milik Desa, 1 unit	Desa Teluk Lawah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Teluk Lawah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
586	2619997	31-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Relokasi 34 rumah karena terdampak banjir dan longsor wilayah pinggir sungai	RT.001 dan RT.002, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	2620012	31-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembuatan Gorong - gorong SMAN 2 Kurun (2buah)	Jl. Swadaya RT.005, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Bukan kewenangan Kabupaten dapat di usulkan ke Provinsi	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
588	2620071	31-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan tanggul sei hakau RT.004 (Apabila musim hujan air sungai hakau sering meluap ke pemungkiman warga, Gereja, Sekolah)	RT.004, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	2620133	31-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Lampu Penerang Jalan untuk setiap muara jalan masuk kampung	Desa Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
590	2620240	31-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembuatan pagar/tembok SMA (Untuk keamanan sekolah)	RT.005, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	usulkan ke provinsi	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
591	2620249	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Tidak adanya Gorong-gorong sehingga banjir masih sering terjadi	Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Sangat dibutuhkan guna memperbaiki kualitas jalan kabupaten yang sering terendam air	-	-	-	-	-	-	-
592	2620257	31-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembuatan Rumah Dinas Guru (2buah)	RT.005, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
593	2620405	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Tidak Adanya Pembuangan Air Hujan yang terkandung di jalan Umum	Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Sangat dibutuhkan guna memperbaiki kualitas jalan kabupaten yang sering terendam air	-	-	-	-	-	-	-
594	2620439	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Tidak adanya jalan penguhubung Menuju Keramat Bukit Rapan dan Korong Henjan	Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Untuk menunjang obyek wisata budaya di desa	-	-	-	-	-	-	-
595	2620456	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tidak adanya Rumah Singgah untuk Wisata Korong Henjan Desa Tumbang Anoi	Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	2620511	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kurang terawatnya Pustu sehingga di bidang kesehatan sangat kurang terpenuhi	Desa Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Kebutuhan menyesuaikan perkembangan desa dan jumlah penduduk	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
597	2620562	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tidak Adanya Pagar Pembatas SDN Tumbang Anoi dengan Rumah Warga	SDN Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	2620639	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Masih terdapat Kekuarangan Bangunan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Datah Embak Di RT.003 Desa Kasintu, Kecamatan Tewah. Maka dalam hal ini kami ajukan permohonan berupa Penambahan Pembangunan 1 Unit Bangunan Ruang Guru, 1 Unit Bangunan Perpustakaan dan 1 Unit Tambahan Ruang Kelas / Mengajar siswa(i).	RT.003 Datah Embak - Desa Kasintu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
599	2620656	31-12-2025	AMPUNG	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Perencanaan dan Pembangunan Industri)	Pelatihan Menjahit	Tumbang Hakau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Kabupaten / Kota	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Menjahit	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
600	2620685	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Masih belum adanya Sarana dan Prasarana Air Bersih SMPN Satap 1 Damang Batu	SMPN 1 ATAP SATU DAMANG BATU DESA TUMBANG ANOI, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	2620689	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Tidak tersedianya Bangunan Pagar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Datah Embak - RT.003 Desa Kasintu, Kecamatan Tewah. Maka dalam hal ini kami mengajukan permohonan untuk Pembangunan Pagar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Datah Embak dengan luas bangunan 60 m2. Besar harapan kami agar Permohonan ini dapat dikabulkan demi Keamanan dan Ketertiban di Sekolah kami. Demikian, Terimakasih	RT.003 DATAH EMBAK - DESA KASINTU, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	2620717	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	terdapat bangunan yang kurang baik di Ruang Kelas SD 1 Tumbang Anoi	SDN 1 Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Kondisi ruang kelas yang memperihatinkan	-	-	-	-	-	-	-
603	2620745	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Masih kurangnya Guru SMP Stap 1 Danang Batu Tumbang Anoi 1 Orang PPKN, Guru Penjas dan Guru Impormasi	SMP Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	2620754	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Masih Kurangnya Sarana dan Prasarana Ruang TIK dan Kantor Kepala Sekolah SDN Tumbang Anoi	SD Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Sarana dan Prasarana Ruang TIK dan Kantor Kepala Sekolah SDN perlu diperhatikan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
605	2620781	31-12-2025	CUMBIE, AMd.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Masih Kurangnya Tenaga Pendidik/Guru SD Tumbang Anoi 1 Orang agama Kristen, 1 Orang Guru Agama Hindu dan Guru Bahasa Inggris	SD Tumbang Anoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Anoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	2620831	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Masih kurang tersediaanya sarana prasarana di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Datah Embak - RT.003 Desa Kasintu, Maka dalam hal ini kami ajukan Permohonan : a. Pembangunan 1 (SATU) Set Pintu Gerbang; b. Pembangunan 2 (DUA) Unit WC Guru dan Siswa	RT.003 DATAH EMBAK DESA KASINTU, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-
607	2620882	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tumbang Beren - RT.002 Desa Kasintu, Kecamatan Tewah. Maka dalam hal ini kami mengajukan permohonan untuk Pembangunan Pagar di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tumbang Beren - RT.002 Desa Kasintu dengan luas bangunan 120 m2. Besar harapan kami agar Permohonan ini dapat dikabulkan demi Keamanan dan Ketertiban di Sekolah kami. Demikian, Terimakasih	Tumbang Beren - RT.002 Desa Kasintu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-
608	2620922	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengajuan Permohonan Rehabilitasi/Peningkatan bangunan Teras Gedung PUSTU Desa Kasintu, Kecamatan Tewah.	Desa Kasintu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
609	2620947	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Permohonan untuk Peningkatan Dan Rehabilitasi Bangunan PUSTU, Pagar Pustu dan Cor Halaman Gedung PUSTU Desa Kasintu, Kecamatan Tewah.	DESA KASINTU, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
610	2620997	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Untuk Meningkatkan dan Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam hal Usaha Budi Daya Peternakan, maka dalam hal ini kami bermaksud hendak mengajukan Permohonan Bantuan Penyediaan dan Pengadaan Bibit BEBEK PETELOR sebanyak 1.000 Ekor	DESA KASINTU, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
611	2621010	31-12-2025	DARSANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Untuk Meningkatkan dan Mendukung Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam hal Usaha Budi Daya Peternakan, maka dalam hal ini kami bermaksud hendak mengajukan Permohonan Bantuan Penyediaan dan Pengadaan Bibit KAMBING sebanyak 100 Ekor	DESA KASINTU, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Kasintu	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
612	2621037	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Permohonan : Peningkatan/Pengerasan Jalan Antar Wilayah Desa 6 KM Desa Tumbang Hatung	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
613	2621085	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Permohonan : Pembuatan Jembatan Desa dengan panjang 30 Meter Desa Tumbang Hatung	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	2621223	31-12-2025	RESEP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehap Plafon SDN Tajah Antang Raya	RT. 001 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
615	2621242	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Permohonan Pengadaan Listrik Desa Tumbang Hatung	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	Kepala Desa Tumbang Hatung agar membuat Proposal Pembangunan/Pemasangan Jaringan PLN dan disampaikan ke Bag. Ekobang Setda untuk ditindaklanjuti/diteruskan ke PT. PLN Persero	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
616	2621243	31-12-2025	RESEP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Gedung Baru/Tambah Ruang SDN Tajah Antang Raya	RT. 001 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
617	2621295	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Permohonan Peningkatan/Pengerasan Jalan Antar Wilayah Desa 6 KM	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
618	2621302	31-12-2025	RESEP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	Pembangunan menara jaringan Komunikasi	RT. 002 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Usulan proposal pembangunan/penambahan BTS ke provider oleh Diskominfo Kabupaten Gunung Mas (Starlink)	-	1	Unit	70000000	-	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota
619	2621312	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Permohonan Tenaga Medis Perawat dan Bidan di Desa Tumbang Hatung	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Agar ditelaah/dianalisis lebih lanjut oleh perangkat daerah terkait	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
620	2621338	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Permohonan Pengadaan 1 Set Alat Medis Untuk Postu Desa Tumbang Hatung	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
621	2621348	31-12-2025	RESEP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)	Penyediaan BPJS Kesehatan untuk Keluarga tidak mampu	RT. 001, RT. 002 dan RT. 003 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Di lakukan penginputan data dari usulan penerima bantuan iuran jamkesda yang diberikan usulan dari desa tajah antang raya kecamatan rungan barat	-	20	Orang	5000000	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
622	2621383	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Permohonan Pengadaan Kursi, Meja dan Lemari SDN Tumbang Hatung	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
623	2621418	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Permohonan Pembangunan Kantor SDN Tumbang Hatung 1 Unit	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
624	2621429	31-12-2025	RESEP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyuluhan Pertanian)	Sosialisasi dan Pelayanan Pembuatan STDB untuk Pertani/ Pekebun Kelapa Sawit	RT. 002 Desa Tajah Antang Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Tajah Antang Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	50000000	-	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
625	2621433	31-12-2025	SAGARLI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Permohonan Pembangunan WC SDN Tumbang Hatung 2 kopel	Tumbang Hatung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Hatung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Dapat dilanjutkan ke Forum Gabung tkt Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-
626	2621589	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Masih ada ruang kelas yang kodisinya dalam keadaan rusak	RT 04 Tanjung Untung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut. Tambahkan nama sekolah yang dimaksud.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	2621619	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	fasilitas belajar mengajar terbatas terutama meja dan kursi siswa	RT 04 Tanjung Untung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut. Tambahkan nama sekolah yang dimaksud.	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
628	2621672	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Belum adanya pagar untuk menjaga keamanan pustu	Tanjung Untung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	2621704	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Masih ada rumah masyarakat yang tidak layak huni	Desa Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-
630	2621738	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Perekonomian masyarakat masih kurang sehingga diperlukannya upaya untuk memajukan Perekonomian masyarakat dengan mengelola potensi wisata yang ada	Desa Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
631	2621821	31-12-2025	DIMAN JADER	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehab Rumah Dinas SDN 1 Sumur Mas	Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
632	2621839	31-12-2025	DIMAN JADER	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Seatap 2 Tewah	Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
633	2621850	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum adanya ruang guru di SDN Tanjung Untung dan masih satu ruangan dengan kepala sekolah	RT 04 Tanjung Untung , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	2621862	31-12-2025	DIMAN JADER	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan WC Umum untuk masyarakat	Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
635	2621866	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum adanya perpustakaan di SDN Tanjung Untung	RT 04 Tanjung Untung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	2621874	31-12-2025	DIMAN JADER	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembagian bibit babi untuk masyarakat	Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	2621881	31-12-2025	DIMAN JADER	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Belum adanya tenaga kesehatan (Perawat)	Desa Sumur Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sumur Mas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	2621882	31-12-2025	EROE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kurangnya Fasilitas untuk menunjang kegiatan administrasi sekolah	RT 04 Tanjung Untung, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Tanjung Untung	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut. Tambahkan detail informasi jenjang sekolah yang dimaksud dan jenis fasilitas yang dibutuhkan.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	2622587	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu adanya Pengadaan AC Pendingin Ruangan Sebanyak 3 unit Ac	Kantor Korwil Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
640	2622618	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu Perbaikan dan Peningkatan Jalan Damang Batu sebanyak 117 Meter	RT.004/RW.001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
641	2622633	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu Perbaikan/ Peningkatan Jalan Amir Sinyuh sebanyak 1,5 Meter	RT.006/RW.001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
642	2622643	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perlu adanya Perbaikan dan Peningkatan Jembatan Jalan Tamanggung Pandung sebanyak 10 Meter (Rusak Berat)	RT.007/RW.002, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
643	2622684	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu Pembangunan Rumah Dinas Guru Sebanyak 3 Unit	Guru SDN 1 Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
644	2622705	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu Pembangunan Ruang Kantor Guru sebanyak 1 Unit	SDN 2 Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
645	2622717	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu Pembangunan Rumah Dinas Guru Sebanyak 3 Unit	Guru SDN 2 Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
646	2622732	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Perlu Penambahan Tenaga Pengajar / Guru Sebanyak 2 Orang	TK Pembina Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
647	2622754	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu adanya Pengadaan Alat Permainan Anak-anak sebanyak 2 Set	TK Pembina Tumbang Miri , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
648	2622766	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu Pembanguan/ penambahanRuang kelas Sebanyak 2 Ruang	TK Pembina Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
649	2622900	31-12-2025	YURIAN ROPOT GANDI (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehap Perumahan Guru (Rehap Berat) Sebanyak 1 Paket	RT.001 Desa Batu Tangkoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Batu Tangkoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
650	2622922	31-12-2025	YURIAN ROPOT GANDI (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Perlu adanya Pengadaan Pelatihan Perbengkelan Sebanyak 15 Orang	Desa Batu Tangkoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Batu Tangkoi	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Perbengkelan	-	15	orang	50000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
651	2623061	31-12-2025	INDA SARIANA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Pembangunan Pagar BETON Sekolah SMPN SATAP 4 TEWAH SARERANGAN guna agar ketika banjir sampah-sampah tidak masuk dalam halaman dan lapangan sekolah	Jln. Tambun Bungai RT. 005 Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	2623085	31-12-2025	INDA SARIANA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Pembangunan Pagar BETON SDN 1 Sarerangan	Jln. Tambun Bungai RT. 005 Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	2623089	31-12-2025	INDA SARIANA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Pembangunan Pagar BETON SDN 2 Sare Rangan	Jln. Nyangun RT. 004 Sare Rangan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	2623096	31-12-2025	INDA SARIANA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Rumah Dinas Guru SDN 2 Sare Rangan	Jln. Nyangun RT. 004 Ssre Rangan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sarerangan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Proses Lebih Lanjut	-	-	-	-	-	-	-
655	2623451	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pembukaan Jalan Menuju Kuta Mandehan	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
656	2623462	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jembatan Sei Elok	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
657	2623464	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan Gedung Gereja GKE	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Gereja GKE desa tumbang malahoi	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
658	2623465	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembuatan Pagar Balai Hindu Kaharingan	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Balai Hindu Kaharingan desa tumbang malahoi	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
659	2623467	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata)	Pembuatan Homestay	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
660	2623478	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Bedah Rumah Gakin	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
661	2623481	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Perekonomian dan Pembangunan)	Pemasangan Listrik untuk Keluarga Miskin	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Proposal usulan diajukan ke Dinas EDSM Provinsi Kalteng	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
662	2623503	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	pengandaan alat kesenian budaya lokal	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
663	2623552	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	pelatihan keterampilan perempuan/ibu rumah tangga	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Usulan ini mendukung indikator IDG dan IKG dalam peningkatan Pemberdayaan perempuan dengan sasaran perempuan dan Ibu-ibu	-	100	0rang	35000000	-	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota
664	2623557	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Program Administrasi Pemerintahan Desa)	Pelatihan manajemen BUMDesa dan Unit Usaha Desa	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai Arah Kebijaka, dan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
665	2623571	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Program Administrasi Pemerintahan Desa)	peningkatan kapasitas aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sesuai Arah Kebijaka, dan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
666	2623576	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	perahu evakuasi banjir dan pelampung	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	1 buah perahu karet	-	1	buah	35000000	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
667	2623584	31-12-2025	YOPHAE, A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perlu Rehap Rumah Dinas sebanyak 3 Unit	Puskesmas Tumbang Miri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
668	2623615	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	bantuan bencana alam & kerawanan sosial	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Akan dilakukan penyediaan makanan untuk masyarakat yang terkena banjir.	-	100	keluarga	30000000	-	Penyediaan Makanan
669	2623624	31-12-2025	ISESKAR, S.Pd.SD	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	bantuan darurat bagi warga terdampak bencana	desa tumbang malahoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Malahoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
670	2623727	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Meubelier Ruang Kelas 30 Kursi 15 meja SMPn 2 SATAP RUNGAN	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
671	2623739	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan WC SMP SATAP 2 RUNGAN	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
672	2623748	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Penambahan Ruang Belajar SMPN SATAP 2 Rungn	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
673	2623751	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Gedung Lab SMP Satap 2 Rungan	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
674	2623756	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jalan Desa (Peningkatan Jalan Desa) 1000 Meter	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
675	2623761	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Gorong Gorong Jalan Desa 3 Unit	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
676	2623764	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Gorong Gorong Jenis NF 1 Unit	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
677	2623772	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Siring Beton jalan Desa panjang 314 Meter	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
678	2623774	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Paving Halaman Sekolah SDN Bereng Malaka	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
679	2623793	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Laptop 5 Unit Sekolah SDN Bereng Malaka	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
680	2623799	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Laptop 5 Unit Untuk SMP Satap 2 Rungan	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
681	2623802	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penambahan Tenaga Pengajar Guru PJOK dan dan Guru IPS di SMP Satap 2 Rungan	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
682	2623809	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penambahan Tenaga Guru Olaharga, Guru Agama Islam, Guru Agama Kristen dan Guru Kelas di SDN Bereng Malaka	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
683	2623815	31-12-2025	DARGO, A.Md.Kep	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Penambahan Tenaga Kesehatan / Bidan	Desa Bereng Malaka, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Malaka	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
684	2625548	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	JALAN CAKRA ALAM JAKATAN RAYA, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
685	2625562	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jalan Cilik Riwut RT.VIII/RW.04 Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
686	2625665	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor Beton Jalan Cilik Riwut RT.VIII/RW.04 Kelurahan Jakatan Raya Kecamatan Rungan	Jalan Cilik Riwut RT.VIII Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
687	2625767	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perbaikan Atap dan Plafon Kantor Camat Rungan	Jalan Cakra Alam No.01 Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
688	2625788	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor Beton Jalan Hendrik Timang	Jalan Hendrik Timang Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
689	2625802	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Pengadaan Tong Sampah Organik,Anorganik dan B3	Jalan Cakra Alam Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Bisa diproses dengan ketersediaan anggaran	-	10	Unit	50000000	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
690	2625805	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Pembangunan Bangunan Bank Sampah Umum (BSU)	Jalan Cakra Alam Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Bisa diproses dengan ketersediaan anggaran	-	1	Unit	20000000	-	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan
691	2625823	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Renovasi Total Gedung Rawat Jalan Puskesmas Tumbang Jutuh (560M2)	Jalan Cilik Riwut RT.02 Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
692	2625832	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penambahan Ruang Rapat Internal Puskesmas Tumbang Jutuh	Jalan Cilik Riwut RT.02 Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
693	2625833	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Pengadaan Kulkas Penyimpan Vaksin (1 Unit) di Puskesmas Tumbang Jutuh	Jalan Cilik Riwut RT.02 Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
694	2625835	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan Tower Tandon Air di Puskesmas Tumbang Jutuh	Jalan Cilik Riwut Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
695	2625840	02-01-2026	TAUFIK, SP	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Penanggulangan Bencana)	Pembangunan Triple Box	Jalan Hendrik Mangkin Kelurahan Jakatan Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Jakatan Raya	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
696	2626011	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Renovasi Rumah/dan Bangun Baru Rumah Bagi Masyarakat Miskin 25 Unit	Jl. Matan Duhuk Rt.01 s/d Rt.04 Desa Tumbang Lapan kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
697	2626021	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN I Rungan Hulu di Desa Tumbang Lapan	Jl. Guhung Baringin Rt.01/Rw.01 Desa Tumbang Lapan Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Jenjang SMA/SLTA Bukan Kewenangan Kabupaten, usulkan ke Provinsi Kalimantan Tengah	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
698	2626025	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jembatan Gantung Ukuran 4 x 50 Meter di Wiayah Rt. 03 Desa Tumbang Lapan	Jl. Matan Duhuk Rt.03/Rw.01 Desa Tumbang Lapan kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
699	2626032	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Rumah Dinas Pukesmas Tumbang Lapan 4 (Empat) Kopel Ukuran Tipe 3 x 6 perkopel	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Rt.01/rw.01 Desa Tumbang Lapan Kecamatan Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
700	2626037	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Rumah Dinas SMPN 2 Rungan Hulu di Desa Tumbang Lapan 4 (Empat) Kopel Ukuran Tipe 3 x 6 perkopel	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Rt.01/rw.01 Desa Tumbang Lapan Kecamatan Rungan Hulu, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
701	2626043	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penyelenggaraan Paket C Bagi Anak Putus Sekolah di Desa Tumbang Lapan	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
702	2626044	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Siring Lahan SMPN 2 Rungan Hulu Ukuran 3 x 75 Meter	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Desa Rt.01/Rw.01 Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
703	2626053	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan Lanjutan Rumah Ibadah Balai Hindu Kaharingan, Pembangunan Gereja Kerasulan Baru Indonesia (GKBI), Pembangunan Lanjutan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) dan Pembangunan GKE Desa Tumbang Lapan	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan Balai Hindu Kaharingan, Gereja Kerasulan Baru Indonesia (GKBI), Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI) dan Gereja GKE Desa Tumbang Lapan	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
704	2626056	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelatihan Tata Rias dan Menjahit untuk Kelompok Perempuan Desa Tumbang Lapan	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Tata Rias dan Menjahit	-	20	orang	66000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
705	2626061	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Penyuluhan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Bagi Masyarakat Desa Tumbang Lapan	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	30000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
706	2626062	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Peningkatan Kapasitan Pengurus Koperasi Desa Merah Putih	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dimasukan dalam usulan di mesrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
707	2626063	02-01-2026	SULIANTO L.LIMIN, SE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Jl. Lintas Kecamatan Tumbang Rahuyan - Tbg Jutuh Desa Tumbang Lapan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dimasukan dalam usulan di mesrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Pengurus BUMDesa	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
708	2635102	06-01-2026	DONI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jembatan Sahai berbahan dasar kayu banyak berlubang dan kayu banyak rapuh.	jalan suka Maju RT.01, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
709	2635392	06-01-2026	DONI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	SDN 2 Hurung Bunut belum terpenuhinya ruang belajar peserta didik karena keterbatasan ruangan bahkan ada kelas yg belum tersedia dan satu ruangan dengan pembatas yang tempati untuk dua kelas	Desa Hurung Bunut RT.04, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
710	2635485	06-01-2026	DONI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	SDN 2 Hurung Bunut membutuhkan sarana prasarana peserta didik berupa meja dan kursi belajar.	Desa Hurung Bunut RT.04, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
711	2635611	06-01-2026	DONI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	untuk meningkatkan SDM masyarakat perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi kesehatan.	Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
712	2635676	06-01-2026	DONI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Pendidikan PAUD di Desa perlu adanya pengembangan kualitas SDM	Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
713	2635717	06-01-2026	DONI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	masyarakat masih belum sadar akan pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan sekitar sampah rumah tangga sering di buang di sembarangan tempat.	Desa Hurung Bunut, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Hurung Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Bisa di proses dengan ketersediaan anggaran	-	1	Kegiatan	20000000	-	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
714	2659718	09-01-2026	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Lampu Penerangan Jalan Tenaga Surya di lingkungan Kelurahan Kampuri saat ini belum berfungsi karena masih menggunakan penerangan lampu rumah dari masyarakatbelum mencukupi untuk menerangi seluruh area jalan dan akses lingkungan, menyebabkan kondisi penerangan kurang memadai dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan.	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
715	2660018	09-01-2026	HEDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Warga yang tinggal di area Mantaha KM. 1 s.d. KM. 7 jalan lintas ke arah Desa Tumbang Empas sampai saat ini belum menikmati aliran listrik untuk keperluan rumah tangga karena belum ada tiang dan kabel aliran listrik. Jumlah rumah yang ada di sepanjang jalan tersebut sekitar 70 rumah	Area Mantaha KM 1. s.d. KM. 7 Desa Pilang Munduk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Mangajukan usulan (proposal) ke PT. PLN Kuala Kurun	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
716	2661823	09-01-2026	WARTEL S. SINDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Timbunan jalan RT. 02 (Aset PU), Jalan desa yang selalu terendam banjir pada saat air sungai kahayan naik dan berlumpur apabila tergenang air	Jl. Sombin R. Rawan RT. 02 Desa Tanjung Riu (Bantuk Hurung), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
717	2661845	09-01-2026	WARTEL S. SINDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Timbunan dan siring halaman Puskesdes, Puskesdes yang tidak memiliki halaman yang layak karena longsor dan berlubang	Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
718	2661861	09-01-2026	WARTEL S. SINDI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Penikatan Jalan Lintas Kabupaten Tampang Tumbang Anjir-Desa Tanjung Riu, Meningkatan Jalan Lintas Desa yang berlubang parah dan kondisi hujan jalan yang berlubang terendam air	Jl. Lintas Kabupaten Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	2661866	09-01-2026	WARTEL S. SINDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Mobil Ambulance, Memberikan pertolongan pertama pada masyarakat dalam kondisi darurat yang ada didesa	Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	2661886	09-01-2026	WARTEL S. SINDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat)	Pengadaan benih lombok/cabe dan pupuk, Untuk membantu meningkatkan usaha kelompok petani desa	Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	100000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
721	2661891	09-01-2026	WARTEL S. SINDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat)	Pengadaan bibit singkong dan pupuk, Untuk membantu meningkatkan usaha kelompok petani desa	Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	2661897	09-01-2026	WARTEL S. SINDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran, Bantuan Untuk Penanggulangan Bencana Masyarakat Desa	Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tanjung Riu	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
723	2662174	09-01-2026	PANCASONA, S.Pd	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Kurangnya ketersediaan air di musim kemarau sehingga perlu pengeboran air	Rt 5, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tewang Pajangan	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-
724	2662657	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Belum adanya masyarakat yang mengelola bidang budidaya perikanan	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	2662685	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan)	Karena tidak adanya imprastruktur yang memadai	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	2662699	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	2662719	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Tidak adanya penyuluhan	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
728	2662734	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Tidak ada penyuluhan	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	2662747	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Penanggulangan Bencana)	Tidak ada penyuluhan kepada masyarakat	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	2662771	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya penyelenggaraan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK)	Terkendala jaringan yang belum lancar	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	2662827	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan)	Belum dipasang keramik pada Bangunan Puatu Penda Pilang	Pustu Jl. gang siswa RT,002 Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
732	2662874	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Belum adanya Rumah Dinas Guru-guru di SMPN SATU ATAP-1 KURUN	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Belum adanya Rumah Dinas Guru-guru di SMPN SATU ATAP-1 KURUN	-	-	-	-	-	-	-
733	2662886	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum tersedianya bangunan WC untuk guru-guru SDN Penda Pilang	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
734	2662894	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Masih kurangnya laptop di SDN Penda Pilang terutama untuk Laptop Dapodik Sekolah	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
735	2662903	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Belum adanya Rehap/Perbaikan bangunan gedung kelas 4 dan 5 di SDN Penda Pilang yang rusak	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
736	2662907	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Kurangnya tenaga pengajar di TK Mufakat Desa Penda Pilang terutama yang PNS	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
737	2662933	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Belum terbangunnya gedung Gereja GKE KAPAKAT di Penda Pilang Seberang	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat dilanjutkan ke Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan proposal usulan GKE KAPAKAT di Penda Pilang Seberang	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
738	2662942	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Tidak adanya penyuluhan bagi masyarakat tentang pengembangan usaha UMKM bagi ibu PKK Desa Penda Pilang	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dimasukan dalam usulan di mesrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan bagi pelaku usaha UMKM	-	10	orang	30000000	-	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha
739	2662947	09-01-2026	JHONEDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Tidak adanya bibit sapi untuk masyarakat Desa Penda Pilang	Desa Penda Pilang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Penda Pilang	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
740	2662959	09-01-2026	HEDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Keadaan sekarang SD Negeri Pilang Munduk 1 kekurangan ruang kelas untuk belajar sebanyak 3 ruang kelas belajar.	Jalan Pelajar R.T. 01 Desa Pilang Munduk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
741	2662970	09-01-2026	HEDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Keadaan sekarang SD Negeri Pilang Munduk 1 kekurangan 60 meja belajar dan 60 kursi belajar untuk belajar.	Jalan Pelajar R.T. 01 Desa Pilang Munduk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
742	2662980	09-01-2026	HEDI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Keadaan sekarang SD Negeri Pilang Munduk 1 kekurangan Rumah Dinas untuk Guru tinggal menetap yaitu sebanyak 2 rumah dinas guru.	Jalan Pelajar R.T. 01 Desa Pilang Munduk, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Pilang Munduk	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
743	2663090	09-01-2026	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Akses air bersih melalui jaringan PDAM di Jl.Lintas Provinsi Kelurahan Kampuri belum tersedia atau belum berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut disebabkan belum adanya penyambungan pipa PDAM ke bangunan/fasilitas yang ada, sehingga kebutuhan air bersih masih mengandalkan sumber alternatif yang terbatas dan tidak selalu memenuhi standar kesehatan. Selain itu, jaringan pipa yang ada belum menjangkau seluruh area,mengakibatkan distribusi air tidak merata dan sering mengalami kekurangan pasokan.	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
744	2663096	09-01-2026	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Kondisi jalan di lingkungan Kelurahan Kampuri khususnya Jl. Damai (RT.05), Gang Hapakat (RT.06), Jl. Lingkar Luar (RT.06) dan Jl. AAB (RT.06) saat ini mengalami kerusakan dan belum memenuhi standar kelayakan. Permukaan jalan berlubang, retak, bergelombang dan masih berupa tanah liat sehingga mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat serta meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada musim hujan. Selain itu,sistem drainase di sekitar jln juga belum berfungsi optimal sehingga adanya	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
745	2663115	10-01-2026	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangunan Rumah Dinas SDN 2 Kampuri saat ini berada dalam kondisi kurang layak huni dan belum mendukung kebutuhan tempat tinggal bagi guru/tenaga pendidik.	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
746	2663129	10-01-2026	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kondisi bangunan Kantor Kelurahan Kampuri sudah mengalami penurunan kualitas dan belum mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara optimal. Beberapa bagian bangunan mengalami kerusakan sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan aparatur kelurahan maupun masyarakat. Selain itu, keterbatasan jumlah dan luas ruangan menyebabkan aktivitas kerja pegawai, pelayanan publik, serta penyimpanan arsip tidak tertata dengan baik dan sering terjadi penumpukan ruang.	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
747	2663141	10-01-2026	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Saluran drainase yang ada saat ini belum berfungsi secara optimal dalam mengalirkan air, terutama pada saat curah hujan tinggi. Kondisi saluran masih berupa tanah atau bangunan lama yang sudah rusak dan tidak mampu menampung debit air, sehingga sering terjadi genangan dan banjir di sekitar jalan serta permukiman warga. leh karena itu, diperlukan pembangunan saluran permanen berupa cor beton box culvert guna meningkatkan kapasitas dan kelancaran aliran air serta menjaga ketahanan infrastruktur.	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
748	2663158	10-01-2026	JUNJUNG TUAH, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Sebagian masyarakat kelurahan kampuri, khususnya usia produktif, belum memiliki keterampilan kerja yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Keterbatasan akses terhadap pelatihan dan peningkatan kompetensi menyebabkan rendahnya daya saing tenaga kerja lokal, sehingga tingkat pengangguran dan pekerjaan informal masih cukup tinggi. Selain itu, kurangnya keterampilan praktis dan kewirausahaan menghambat masyarakat untuk mengembangkan usaha mandiri dan meningkatkan pendapatan	Kelurahan Kampuri, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dimasukan dalam usulan di mesrenbang kecamatan	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	Pelatihan Tenaga Kerja	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
749	2675526	12-01-2026	MELIN A. BOHOI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Belum adanya pemeliharaan penghubung jalan antar Desa Karya Bhakti - Tumbang Bunut (1 Paket)	Desa Tumbang Bunut, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Bunut	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
750	2681435	12-01-2026	IPNO I	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	kendaraan Operasional Pustu	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
751	2681462	12-01-2026	IPNO I	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehab Pustu Tumbang Baringei	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
752	2681473	12-01-2026	IPNO I	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Aspal Jalan Desa	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
753	2681491	12-01-2026	IPNO I	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penggandaan Pustu Set dan Alat-Alat Mebeler	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
754	2681559	12-01-2026	IPNO I	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	1.Pelatihan Tata Boga 2.Pelatihan Menjahit dan Tata Busana	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dimasukan dalam usulan di mesrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Tata Boga, Menjahit dan Tata Busana	-	30	orang	150000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
755	2681585	12-01-2026	IPNO I	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	pendidikan Eklusif Untuk Berkebutuhan Khusus / Disabilitas Fisik	Desa Tumbang Baringei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Baringei	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut. Lengkapi informasi jenjang pendidikannya.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
756	2681661	12-01-2026	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jembatan Sei Malut Penghubung Karya Bhakti - Tumbang Bunut	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
757	2681677	12-01-2026	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Ruang Bermain dan Ruang Tunggu TK Negeri Tunas Harapan	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
758	2681753	12-01-2026	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Mueble Air, Listrik, Pustu Kit, Bidan Kit (1 Set)	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
759	2681764	12-01-2026	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Laptop/PC SMPN 3 Rungan (5 Unit)	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
760	2681772	12-01-2026	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Laptop dan Printer TK Tunas Harapan (2 Unit)	RT.06 Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
761	2681896	12-01-2026	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan Perbengkelan dan Bantuan Alat Bengkel	Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Dapat dimasukan dalam usulan di mesrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Perbengkelan	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
762	2681898	12-01-2026	MUBARIK	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Bantuan Mesin Jahit	Desa Karya Bhakti, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Karya Bhakti	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Bantuan Mesin Jahit	-	5	unit	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
763	2682238	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pemasangan 20 titik lampu untuk jalan, dikarenakan masih banyak jalan yang tidak terdapat penerangan di Desa Tumbang Tambirah	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
764	2682295	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan 1 Mobil Ambulan, karena di desa belum ada mobil ambulan	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
765	2682324	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Mohon bantuan beasiswa bagi siswa yang kurang mampu di SD Negeri 1 Tumbang Tambirah	Jl. Perjuangan Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut. Lengkapi data penerima beasiswanya.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
766	2682338	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Mohon bantuan untuk pengadaan buku-buku pelajaran untuk siswa belajar di SD Negeri 1 Tumbang Tambirah	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
767	2682395	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Relokasi Gedung Pustu	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
768	2682410	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan meubelair Pustu	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
769	2682495	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan jalan lingkungan ujung Desa Tumbang Tambirah menuju Desa Tumbang Manyangan	Ujung Desa Tumbang Tambirah menuju Desa Tumbang Manyangan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
770	2682519	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan Jembatan Layang di Sei Manyangan	Sei Manyangan Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
771	2682648	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Butuh Bantuan Bibit Jagung untuk kelompok tani sebanyak 150 Kg Bibit Jagung	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	100000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
772	2682779	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan mengemudi buat 20 pemuda non skill agar mereka nantinya punya keahlian mengemudi	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Mengemudi	-	20	orang	40000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
773	2682797	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Pelatihan mekanik/perbengkelan buat 10 pemuda non skill agar mereka nantinya punya keahlian mekanik/perbengkelan	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Perbengkelan	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
774	2682926	12-01-2026	IPONG IWAN SAGI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Perlu adanya pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat	Desa Tumbang Tambirah, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Tambirah	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
775	2697532	13-01-2026	YUDIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Bantuan Bedah Rumah (BPSP) (10 kk)	Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
776	2697558	13-01-2026	YUDIE	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pemeliharaan Jembatan Gantung Sei Rungan	Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
777	2697644	13-01-2026	YUDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Plang Postu, dan Pagar Postu, (1 paket)	Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
778	2697663	13-01-2026	YUDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Rumah Dinas Guru (1 unit)	SDN 1 Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
779	2697695	13-01-2026	YUDIE	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)	Program Keluarga Harapan (PKH) (10 KK)	Desa Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Tumbang Jutuh	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Akan diusulkan di DTSEN untuk pengecekan desil 1 sampai 5 agar nantinya disulkan mendapatkan bantuan sosial program keluarga harapan.	-	10	KPM	5000000	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
780	2698324	13-01-2026	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	(10 Unit Rumah) Masih terdapat rumah warga di desa yang belum memenuhi standar rumah layak huni, ditandai dengan kondisi bangunan yang tidak aman dan tidak sehat, seperti atap bocor, dinding rapuh, lantai tanah/rusak, ventilasi tidak memadai, serta sanitasi yang belum layak. Kondisi tersebut berpotensi membahayakan keselamatan penghuni dan berdampak negatif terhadap kesehatan keluarga.	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
781	2698338	13-01-2026	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	(2 Guru SD) Jumlah guru Sekolah Dasar (SD) yang ada saat ini belum sebanding dengan jumlah peserta didik dan rombongan belajar, sehingga proses pembelajaran belum dapat berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan beban mengajar guru menjadi tinggi, keterbatasan pendampingan siswa, serta belum terpenuhinya standar rasio guru dan murid.+ – Leaflet | © OpenStreetMap Alamat Lokasi	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
782	2698360	13-01-2026	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	(2 Perlengkapan Kesehatan) Ketersediaan perlengkapan kesehatan di Pustu saat ini belum lengkap dan sebagian sudah tidak layak pakai, sehingga pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Keterbatasan alat kesehatan menyebabkan petugas kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, pelayanan ibu dan anak, serta penanganan awal penyakit. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat.	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah terkait memeriksa/menelaah/menganalisis usulan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
783	2698385	13-01-2026	ESTORINA, S.Pi (Pj.KADES)	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	(1 Paket Lapangan sepak bola) Lapangan sepak bola yang ada belum memenuhi standar, baik dari segi ukuran, permukaan lapangan, maupun sarana pendukung. Kondisi tersebut berisiko terhadap keselamatan pemain dan menghambat penyelenggaraan kegiatan olahraga, turnamen, serta pembinaan atlet desa. Selain itu, keterbatasan lapangan standar menyebabkan minimnya ruang rekreasi dan aktivitas olahraga masyarakat.	Desa Bereng Baru, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Bereng Baru	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
784	2699769	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehab berat 2 ruang Kelas SDN - 1 Desa Tumbang Empas	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
785	2699805	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Rehab berat rumah dinas 3 ruang SDN-1 Desa Tumbang Empas	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Rehab berat rumah dinas 3 ruang SDN-1 Desa Tumbang Empas	-	-	-	-	-	-	-
786	2699857	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Rehab 2 ruang kelas SPMN Satu Atap-1 Mihing Raya	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
787	2699880	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Mobiler perlengkapan ruang Kepala Sekolah 1 set SMPN Satu Atap-1 Mihing Raya	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
788	2699908	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Mobiler Perlengkapan Ruang Guru 1 Set SMPN Satu Atap-1 Mihing Raya	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
789	2699953	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penambahan Kursi siswa sebanyak 120 unit SMPN Satu Atap-1 Mihing Raya	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
790	2699973	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Mobiler perlengkapan perpustakaan 1 set SMPN Satu Atap-1 Mihing Raya	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
791	2699992	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan rambu - rambu jalan lintas simpang 4 Trans Kuala Kurun - Sepang di Desa Tumbang Empas	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	Bisa diproses sesuai ketersediaan anggaran	-	1	Paket	400000000	-	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
792	2700007	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Lampu penerangan jalan 20 unit	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
793	2700019	13-01-2026	BENNY RIANTO. A.Md	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM REHABILITASI SOSIAL)	1 unit kursi roda untuk siswa penyandang disabilitas	Desa Tumbang Empas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Tumbang Empas	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Diproses lebih lanjut sesuai dengan hasil musrenbang Kecamatan	Akan di proses dan tindaklanjuti oleh Bidang Rehabilitasi Sosial	-	1	Buah	4000000	-	Penyediaan Alat Bantu
794	2716460	14-01-2026	UKU J.GANI	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	belum adanya ambulan desa	desa linau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Linau	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
795	2716563	14-01-2026	UKU J.GANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	banyak rusak kursi meja di SDN 1 linau	desa linau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Linau	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
796	2716646	14-01-2026	UKU J.GANI	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	tidak ada bantuan dari pemerintah untuk kegitan mapas lewu	desa linau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Rungan	Linau	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
797	2739624	15-01-2026	SIUN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembanguna Air Bersih Karena mata Air banyak tercemar oleh aktivitasi masyarakat dan Perusahaan	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Sangat dibutuhkan masyarakat, karena selama ini kualitas air sangat memperihatinkan	-	-	-	-	-	-	-
798	2739646	15-01-2026	SIUN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan akses Jalan Dari Tumbang Mahuroi Ke Tumbang Marikoi karena merupakan hal yang paling penting bagi masyarakat desa Tumbang Mahuroi,mengakut hasil petani dan lain sebagainya untuk di perjualkan atau memasarkan hasil bumi kedaerah lain	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Perlu adanya peningkatan kualitas jalan	-	-	-	-	-	-
799	2739662	15-01-2026	SIUN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Akses Jalan dari Tumbang Mahuroi Ke Karetau Sarian karena merupakan akses utama bagi anak sekolah SMP dan masyarakat dan Tumbang Mahuroi Ke Karetau Sarian putus akses jalan sehingga membuat anak sekolah SMP dan masyarakat melalui jalan darat	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Sebagai akses satu satunya bagi masyarakat	-	-	-	-	-	-
800	2739845	15-01-2026	SIUN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penambahan Tenaga Pendidik (Guru) SMP Karena kekurangan Guru Pak maka oleh karena itu dimainta penambahan Guru SMP yaitu Guru Matematika, Guru Agama Kristen, Guru IPA dan Guru OLahraga	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	2739859	15-01-2026	SIUN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan)	Peningkatan Pembangunan Prasaran olahraga ditanah yang disediakan oleh desa	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
802	2739878	15-01-2026	SIUN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengelolaan Perikanan Budidaya)	Bantuan Bibit Ikan Kerana Merupakan hal untuk peningkatan berbagai aspek perekonomian pendesaan	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Kabupaten / Kota	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	Verifikasi Kecamatan	-	Dapat dibahas pada Musrenbang Tk. Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
803	2739913	15-01-2026	SIUN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Pembangunan listrik kerana sudah era teknologi maka dibutuhkan pasokan listrik yang memadai dan keperluan masyarakat untuk berbagai keperluan yang dibutuhkan	Desa Tumbang Mahuroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Diproses lebih lanjut	-	Sangat dibutuhkan oleh kedua 2 desa di ujung sungai kahayan	Ditindaklanjuti dengan menyurati PT. PLN Persero untuk percepatan pembangunan/pemasangan jaringan listrik PLN	-	-	-	-	-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
804	2741375	16-01-2026	YANTO B. SOEPA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Gedung Perpustakaan SD tidak ada, untuk sementara ruang perpustakaan hanya menggunakan ruang guru.	Jl. Singa Ulang Rt. 01 Rw. 01 Tumbang Samui, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
805	2741395	16-01-2026	YANTO B. SOEPA	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Gedung sanggar seni tidak ada, kelompok pecinta seni ada, sementara untuk kegiatan hanya menggunakan rumah warga anggota kelompok pecinta seni.	Jl. Patahu Rt.01 Rw.01 Desa Tumbang Samui Kec. Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat dibahas di musrenbang kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
806	2741569	16-01-2026	YANTO B. SOEPA	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengaspalan jalan dari Desa Tumbang Mantuhe s/d Luwuk Tukau sepanjang kurang lebih 20 km belum ada, timbunan base jalan yang pernah dilakukan sudah terkikis hujan. Sebanyak 8 titik perbukitan selalu licin dan 10 titik banjir saat hujan. Akses ke ibukota kecamatan harus melewati kecamatan Rungan Barat saat titik air tinggi di beberapa titik jalan Tumbang Samui - Tumbang Oroi- Luwuk Tukau	Jl. Kabupaten, Tumbang Samui - Tumbang Oroi- Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
807	2741781	16-01-2026	YANTO B. SOEPA	Kelurahan / Desa	belum optimalnya rehabilitasi sosial	Terdapat sebanyak 10 bangunan tidak layak huni didesa, telah diusulkan sejak tahun 2018 namun belum terealisasi. Sebagian besar pemilik adalah Karuta Perempuan dan lanjut usia.	Tumbang samui, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Samui	Provinsi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dikembalikan	Permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan Kabupaten Gunung Mas	Usulan dikembalikan karena permasalahan tidak sesuai dengan kamus usulan Kabupaten Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
808	2745152	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Penanggulangan Bencana)	longsor yang semakin melebar di das miri,pelu pembuatan beronjong 600 m	Desa Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
809	2745198	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Penambahan Guru agama kristen sd penda rangas 1 orang	Desa Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
810	2745213	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu Pembangunan I Unit Perumahan Guru SDN Penda Rangas	Desa Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
811	2745257	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Perlu Pembangunan WC SDN Penda Rangas Yang Sudah Rusak Berat	Desa Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
812	2745312	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Perlu Pengadaan Hand Tractor.Bibit Sayuran, Pupuk Organik Dan Anorganik Untuk Petani Pekebun	Desa Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pengadaan Handtraktor tidak dapat direkomendasikan, karena sudah brigade alsintan di tiap BPP. Yang bisa diberikan bantuan hanya pengadaan saprodi	-	1	Paket	50000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
813	2745330	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan & Pengembangan Sarana Pertanian)	Perlu Pengadaan Bantuan BiBIt Padi Gunung Dan Bibir Jorak Unggul	Desa Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	75000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
814	2745367	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Perlu Pengadaan I Unit Sepeda Motor Dinas	Desa Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut. Lengkapi detail permasalahan.	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
815	2745403	16-01-2026	BERKAT	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Perlu Pengadaan 1 Unit Perahu Karet	Penda Rangas, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Penda Rangas	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
816	2751055	17-01-2026	SUHARDI S. MAHAR	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Jembatan Gantung Lantai Rusa dan pagar jembatan dengan ukuran Panjang Jembatan 97 m.	Putat Durei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Putat Durei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
817	2751088	17-01-2026	SUHARDI S. MAHAR	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengaspalan Jalan Antar Desa dari Tumbang Mantuhe s/d Luwuk Tukau	Desa Putat Durei s/d Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Putat Durei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
818	2751132	17-01-2026	SUHARDI S. MAHAR	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Pembangunan Baru Perpustakaan SDN Putat Durei	Putat Durei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Putat Durei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
819	2751212	17-01-2026	SUHARDI S. MAHAR	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Desa Putat Durei, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Putat Durei	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
820	2752585	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	RUSAKNYA AKSES JALAN DARI DESA TUMBANG MANTUHE SAMPAI DESA LUWUK TUKAU SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS MASYARAKAT, SEHINGGA DI BUTUHKAN PERBAIKAN JALAN SEKITAR 20 KM	Jl Lintas Kecamatan Tumbang Talaken-Tehang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
821	2752619	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	DI BUTUHKAN TAMBAHAN MEJA-KURSI UNTUK SDN 1 TUMBANG MANTUHE SEBAGAI PENUNJANG DALAM KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEBANYAK 80 BUAH	SD N 1 TUMBANG MANTUHE, RT 002/RW 001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
822	2752637	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	PEMBANGUNAN WC MURID, GEDUNG LABORATORIUM, DAN GEDUNG UKS UNTUK SD N 1 TUMBANG MANTUHE	SD N 1 TUMBANG MANTUHE, RT 002/RW 001, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
823	2752649	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	PEMBANGUNAN KANTOR KEPALA SEKOLAH 1 UNIT, PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH UNTUK SMPN 1 ATAP SATU MANUHING RAYA	RT 002/RW 001 DESA TUMBANG MANTUHE, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
824	2752743	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	PENAMBAHAN MEJA DAN KURSI SEBANYAK 50 BUAH DAN PERANGKAT KOMPUTER UNTUK ANBK SEBANYAK 30 PAKET UNTUK SMPN 1 ATAP SATU MANUHING RAYA	RT 002/RW 001 DESA TUMBANG MANTUHE, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
825	2752786	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyuluhan Pertanian)	PELATIHAN BAGI KELOMPOK TANI YANG ADA DI DESA	RT 002/RW 001 DESA TUMBANG MANTUHE, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	30000000	-	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
826	2752803	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	DI BUTUHKANNYA BANTUAN BIBIT BUAH-BUAHAN SEBANYAK 1000 BIBIT	RT 002/RW 001 DESA TUMBANG MANTUHE, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai arah kebijakan, setuju dilanjutkan pembahasan pada Musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	50000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
827	2752845	17-01-2026	DARSILO	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	PERLU ADANYA PELATIHAN MENJAHIT BAGI IBU-IBU YANG ADA DI DESA DAN JUGA PELATIHAN PERBENGKELAN(OTOMOTIF) BAGI MASYARAKAT DESA YANG MEMILIKI POTENSI	RT 002/RW 001 DESA TUMBANG MANTUHE, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Mantuhe	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Menjahit dan Perbengkelan	-	20	orang	60000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi
828	2854971	22-01-2026	HARYUYU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengaspalan Jalan	JL.PEMBANGUNAN INDUK RT.02/RW.01 DESA TAKARAS , Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di forum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-
829	2856355	22-01-2026	HARYUYU	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	BOX CULVERT Yang sudah rusak Dengan ukuran 20 M2	JL. PEMBANGUNAN INDUK (RT.02/RW.01 DESA TAKARAS), Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di forum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
830	2856670	22-01-2026	HARYUYU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan)	Kurangnya Tenaga pengajar GURU BHS.INGGRIS, PPKN,PJOK, AGAMA ISLAM, BK, BHS.INDONESIA. SMPN 2 MANUHING.	JL.PEMBANGUNAN INDUK RT.03/RW.01 DESA TAKARAS, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut.	-	Diproses lebih lanjut di forum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-
831	2856981	22-01-2026	HARYUYU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Kurang Mobiler Meja,Kursi, dan Kipas. CCTV, Instalasi LIstrik, dan Rumah Dinas SMPN 2 Manuhing	JL.PEMBANGUNAN INDUK RT.03/RW.01 DESA TAKARAS, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut. Tambah detail jumlah mobiler yang diperlukan.	-	Diproses lebih lanjut di forum perangkat daerah	-	-	-	-	-	-	-
832	2857709	22-01-2026	HARYUYU	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL)	Sosialisasi BPJS warga tidak mampu (JKN)	JL. Pembangunan Induk DESA TAKARAS, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	usulan dilanjutkan ke Perangkat Daerah terkait	-	Diproses lebih lanjut di forum perangkat daerah	Di lakukan penginputan data dari usulan penerima bantuan iuran jamkesda yang diberikan usulan dari kecamatan manuhing	-	50	Orang	5000000	-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
833	2937386	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembangunan Jalan Karya sepanjang 3 KM	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
834	2937564	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Tambah Ruang Kantor Kelurahan / Aula dengan ukuran 10 x 6 meter	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
835	2937637	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehab Berat Kantor Kelurahan Tumbang Talaken	Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
836	2937759	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program perumahaan dan kawasan permukiman kumuh)	Bedah Rumah 10 unit	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
837	2937935	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Perbaikan 1 unit Jembatan Kayu	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
838	2938477	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rehab Lantai Rumah Dinas Guru SMPN 1 Manuhing 3 Ruang	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
839	2940114	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Tambah Ruang belajar 3 Ruang Belajar SDN 1 Tbg. Talaken	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
840	2940681	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangun Baru 1 unit WC di SDN 1 Tumbang Talaken	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
841	2942435	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Penambahan Ruang Belajar SDN 2 Tumbang Talaken	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
842	2942814	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Peningkatan Halaman Rumah Sakit Pratama Tumbang Talaken	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
843	2943006	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Peningkatan Kapasitas Halaman Puskesmas Tumbang Talaken	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
844	2943063	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Rehab Gedung Puskesmas Tumbang Talaken	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
845	2943968	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Pengelolaan Persampahan)	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan ke Musrenbang Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	Bisa diproses dengan catatan kemana arah pengangkutan dan pembuangannya apabila TPS di bangun, karena mengingat jarak Tumbang Talaken ke TPA Kuala Kurun Jauh.	-	1	Unit	20000000	-	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
846	2944101	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup (Program Penanggulangan Bencana)	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan diproses dan dilanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
847	2944222	27-01-2026	GUSTI RAY NOVHANDA, S.Pi, M.Si	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pengaspalan Jalan Masuk Ke SMAN 1 Manuhing sepanjang 100 Meter	SMAN 1 Manuhing di Kelurahan Tumbang Talaken, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Diproses lebih lanjut di Forum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
848	2947374	27-01-2026	RAMULEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Kantor dan Rehab Berat Gedung SDN Tumbang Oroi	Jl. Patahu RT. 01 Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
849	2947485	27-01-2026	RAMULEN	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Jalan Kabupaten Tumbang Mantuhe - Luwuk Tukau	Ruas Jalan Tumbang Mantuhe - Luwuk Tukau, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan diproses berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
850	2947866	27-01-2026	RAMULEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	Masih kurangnya SDM untuk Perbengkelan	Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Pelatihan Perbengkelan	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
851	2947990	27-01-2026	RAMULEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian)	Petani masih kekurangan alat sarana prasarana Alat TTG dan bahan pupuk bagi perani	Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Kabupaten / Kota	DINAS PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	Verifikasi TAPD	-	Sudah sesuai dengan Arah Kebijakan dan dapat diteruskan untuk dibahas di Musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Rekomendasi ini diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta pemenuhan persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan yang berlaku.	-	1	Paket	25000000	-	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
852	2948070	27-01-2026	RAMULEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM REHABILITASI SOSIAL)	Warga Agama Hindu Kaharingan mengharapkan pelaksanaan Tiwah Masal	Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Warga Agama Hindu Kaharingan mengharapkan pelaksanaan Tiwah Masal	-	-	-	-	-	-	-
853	2948219	27-01-2026	RAMULEN	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan perekonomian pada sektor unggulan daerah (Program Pengembangan Kebudayaan)	Sanggar Budaya Desa perlu Peralatan Sanggar	Desa Tumbang Oroi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tumbang Oroi	Kabupaten / Kota	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dibahas ke musrenbang kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
854	2949970	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan Gedung Gereja GKE Induk Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan diproses dan dilanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	Sebagai upaya untuk rekomendasi sebagai penyelenggara PESPARAWI tingkat Kabupaten Gunung mas	Buatkan proposal usulan Gereja GKE Induk Tumbang Marikoi	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
855	2950073	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pembangunan Pagar Puskemas Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	2950166	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan)	Pembangunan Gedung Posyandu Baru	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	2950273	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan Sumber Daya Air)	Pembangunan Fasilitas Air Bersih	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
858	2950319	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembukaan Jalan Baru	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	2950362	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	'Peningkatan Jalan Nyai Bonyi Lanjutan	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	2950407	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Jalan Leon D. Mahis	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
861	2950455	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	'Peningkatan Gang Rumpah	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	2950496	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Jalan Rasa Riso	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Karena kondisi sekarang ini sangat memperihatinkan	-	-	-	-	-	-	-
863	2950548	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	'Peningkatan Gang Baru Arah Balai	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	2950686	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Gang Muris A. Landuk	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865	2950765	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pergantian Nama Jalan Gang Balai Menjadi Jalan Gang Rawing	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Dapat dilaksanakan dengan dana yang tersedia pada DPA Kelurahan Tumbang marikoi	-	-	-	-	-	-	-
866	2951019	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Penggusuran Lokasi Pembangunan gereja Induk	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan diproses dan dilanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	Sangat dibutuhkan untuk lokasi pembangunan Gereja Induk	Buatkan proposal usulan Pembangunan gereja Induk Tumbang Marikoi	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
867	2951184	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Peningkatan sarana Ibadah (Pengadaan Proyektor LCD Gereja TV LCD)	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan diproses dan dilanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	sangat dibutuhkan karena anggaran yang dimiliki sangat tidak memungkinkan untuk pembelian alat dimaksud	Buatkan proposal usulan Peningkatan sarana Ibadah (Pengadaan Proyektor LCD Gereja TV LCD) Tumbang Marikoi	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
868	2951255	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Pembuatan Badan Jalan Baru (Jalan Enus)	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	2951329	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor Beton Box Culvert Jalan Nyai Bonyi Perbatasan RT.02 dengan RT 03	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Karena kebutuhan akan pembangunan jembatan yang berkualitas	-	-	-	-	-	-	-
870	2951393	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Rehap Jembatan Kayu Perbatasan RT 04 dengan RT 05	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	2951419	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Peningkatan Lanjutan Jalan Karigas	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
872	2951483	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan Gedung Gereja GPT Efata Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan diproses dan dilanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	Meningkatkan kualitas bangunan dari semi permanen menjadi permanen	Buatkan proposal usulan Gereja GPT Efata Tumbang Marikoi	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
873	2951538	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah)	Pembangunan/ Rehab Jembatan/Gorong-gorong DI RT. 05 Kel. Tehang	DI RT. 05 Kel. Tehang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
874	2951624	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor Beton Lokasi Parkir Gereja GKE Pandohop	Tumnbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Kecamatan	-	Diproses lebih lanjut	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	2951710	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum)	Pembangunan sarana air bersih/PDAM	RT 01 - 09, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
876	2951779	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum meratanya pembangunan dan pemenuhan infrastruktur dan aksesibilitas antar wilayah (Program Penyelenggaraan Jalan)	Cor Beton Lanjutan Jalan Lingkungan dan Gorong-gorong	RT 01 - 09, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM	DINAS PEKERJAAN UMUM	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
877	2951842	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Pembangunan Pagar Bumi SDN 1Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan diproses dan dilanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	2951943	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	'Pengadaan Kursi, Meja, Lemari Guru SDN-1 Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Perlunya penambahan sarana dan prasarana pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
879	2951987	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	'Pengadaan Kursi, Meja Guru SDN-2 Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Perlunya penambahan sarana dan prasarana pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
880	2952072	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	'Pengadaan Kursi Meja Siswa SDN-2 Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Perlunya penambahan sarana dan prasarana pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
881	2952089	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangun Baru Lab Komputer + perangkat Komputer, Bangun Baru ruang Kantor , Bangun WC, Rehab Ruang Kelas 3 (Tiga) Ruang Kelas SDN 1 Tehang	SDN 1 Tehang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
882	2952108	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Bangun Baru Ruang Kelas 6 (Enam) ruang SDN 2 tehang	SDN 2 Tehang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
883	2952135	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	Pembangunan Pagar Lingkungan Sekolah, Bangun Baru Gedung Kantor, Bangun Baru Ruang Laboratorium SMPN 1 Manuhing Raya	SMPN 1 Manuhing Raya, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
884	2952141	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	'Pengadaan Kursi Meja Guru SDN-1 Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Perlunya penambahan sarana dan prasarana pendidikan	-	-	-	-	-	-	-
885	2952216	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat)	Bantuan Rumah Ibadah	Kelurahan Tehang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan diproses dan dilanjutkan ke tahap musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Buatkan porposal usulan dan harus jelas nama rumah ibadah di Kelurahan Tehang	-	-	-	-	-	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
886	2952250	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	'Pengadaan Lemari Arsip(Lemari Besi) SDN 1 Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Perlunya Pengadaan Lemari Arsip	-	-	-	-	-	-	-
887	2952275	27-01-2026	ANDI LALA, S.Sos	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan (PROGRAM PENANGANAN BENCANA)	Bantuan Bencana Banjir	RT. 01 - 09 Kelurahan Tehang, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Mahuning Raya	Tehang	Kabupaten / Kota	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Usulan dilanjutkan ke forum Perangkat Daerah, berdasarkan hasil musrenbang tingkat kecamatan	Akan dilakukan penyediaan makanan untuk masyarakat yang terkena banjir.	-	100	keluarga	30000000	-	Penyediaan Makanan
888	2952282	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pengelolaan Pendidikan)	'Pengadaan Lemari Arsip(Lemari Besi) SDN 2 Tumbang Marikoi	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Dapat diproses lebih lanjut	-	Perlunya Pengadaan Lemari Arsip	-	-	-	-	-	-	-
889	2952450	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Mobil Ambulance	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Kebutuhan menyesuaikan perkembangan desa dan jumlah penduduk	-	-	-	-	-	-	-
890	2952482	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Rehap Berat Gedung Puskesmas (Atap dan Lantai)	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Kondisi bangunan tidak memnuhi standar tempat pelayanan kesehatan	-	-	-	-	-	-	-
891	2952498	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Pengadaan Mobil Jenazah	Tumba ng Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Kecamatan	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	2952519	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Penambahan Rumah Dinas Kesehatan	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	sangat dibutuhkan, tetapi diharuskan menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan	-	-	-	-	-	-	-
893	2952530	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat)	Rehap Berat Rumah Dinas Paramedis	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	Verifikasi Perangkat Daerah	-	Usulan dapat diteruskan untuk dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	Bangunan rumah dinas cukup memperihatinkan	-	-	-	-	-	-	-
894	2952570	27-01-2026	KASUMA, S.Hut	Kelurahan / Desa	Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM (Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja)	'Pelatihan Perbengkelan/Otomotif , Pelatihan Komputer, Pelatihan Anyaman dan Pelatihan Pemijahan Ikan Lelel	Tumbang Marikoi, Kab. Gunung Mas	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Kabupaten / Kota	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diteruskan dan dibahas pada musrenbang Kecamatan	-	pengembangan kualitas SDM	Pelatihan Perbengkelan	-	10	orang	30000000	-	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
895	3159760	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diakomodir diteruskan ke OPD tujuan dengan melengkapi proposal dan foto lokasi	-	-	Usulan ini dapat diakomodir pelaksanaan kegiatan difasilitasi melalui dukungan Narasumber, Koordinasi dan Konsultasi dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan kecukupan APBD TA 2027 Prov. Kalteng serta mekanisme perencaaan dan penganggaran yang berlaku	-	15	orang	5000000	-	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota
896	3160095	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Kegiatan Seminar Pendewasaan Usia Perkawinan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Verifikasi TAPD	-	Usulan dapat diakomodir diteruskan ke OPD tujuan dengan melengkapi proposal dan foto lokasi	-	-	Usulan ini dapat diakomodir pelaksanaan kegiatan difasilitasi melalui dukungan Narasumber, Koordinasi dan Konsultasi dengan tetap memperhatikan ketersediaan dan kecukupan APBD TA 2027 Prov. Kalteng serta mekanisme perencaaan dan penganggaran yang berlaku	-	1	Laporan	5000000	-	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi
897	3161628	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih rendahnya tingkat Produktivitas Koperasi	Kegiatan Pengembangan Kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Gunung Mas untuk 254 orang	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Mengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Verifikasi TAPD	-	Diterima,menyesuaikan anggaran	-	-	Disesuaikan dengan Pagu Anggaran Tahun 2027	-	-	-	-	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
898	3161668	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih rendahnya tingkat Produktivitas Koperasi	Peningkatan Bantuan Modal Usaha bagi Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 127 unit usaha	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Mengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dikembalikan	Sertakan Proposal	Diterima,menyesuaikan anggaran dan melengkapi data dukung seperti proposal dll	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	3164679	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya pemberdayaan sosial	Peninggkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Pendapatan Masyarakat yang masih minim/Keluarga tidak mampu (Desil 1-5) sebanyak 57 UEP	Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Sosial	Dinas Sosial	Dikembalikan	agar dilengkapi persyaratan pengusulan bantuan dan berkoordinasi dengan bidang terkait	Usulan diakomodir diteruskan ke OPD tujuan dengan melengkapi proposal dan foto kegiatan	-	-	Usulan agar dilengkapi dengan persyaratan dan dikoordinasikan dengan dinas sosial kabupaten/kota serta menyesuaikan ketersediaan anggaran di Provinsi	-	1	Keluarga	5000000	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
900	3165125	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan Ternak Sapi di Demplot Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebanyak 20 Ekor bertujuan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis	Dinas Pertanian, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Verifikasi TAPD	-	Usulan diterima dan volume menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	-	-	Disetujui, menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	-	20	Ekor	360000000	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
901	3165231	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit Ayam Petelor Dan Pakan sebanyak 2000 Ekor sebagai Dukungan program Makan Bergizi Gratis Desa Pamatang Limau, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas	Dinas Pertanian, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Verifikasi TAPD	-	Usulan diterima dan volume menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	-	-	Disetujui, menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	-	2000	Ekor	44000000	-	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain
902	3165471	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pembangunan Jalan Produksi untuk kegiatan tanaman perkebunan seluas 2,5 Km	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dikembalikan	Usulan kegiatan kewenangan dari Dinas Perkebunan, agar berkoordinasi dengan dinas terkait provinsi	Usulan kegiatan kewenangan dari Dinas Perkebunan, agar berkoordinasi dengan dinas terkait provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	3165485	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan bibit sayur mayur sebanyak 5000 bungkus	Desa Fajar Harapan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Fajar Harapan	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Verifikasi TAPD	-	Usulan diterima dan volume menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	-	-	Disetujui, menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	-	5000	bungkus	175000000	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
904	3165507	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan bibit kelapa sawit di masyarakat sebanyak 3600 bibit	Desa Bereng Jun, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Bereng Jun	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dikembalikan	Usulan kegiatan kewenangan dari Dinas Perkebunan, agar berkoordinasi dengan dinas terkait provinsi	Usulan kegiatan kewenangan dari Dinas Perkebunan, agar berkoordinasi dengan dinas terkait provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	3165538	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Bantuan bibit tanaman pangan Sayur-sayuran lengkap sebanyak 100 Bungkus	Kelurahan Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Verifikasi TAPD	-	Usulan diterima dan volume menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	-	-	Disetujui, menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	-	100	bungkus	3500000	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi
906	3165571	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit karet unggul/Karet Kolasi sebanyak 1000 Batang	Desa Sandung Tambun, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Tewah	Sandung Tambun	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dikembalikan	Usulan kegiatan kewenangan dari Dinas Perkebunan, agar berkoordinasi dengan dinas terkait provinsi	sulan kegiatan kewenangan dari Dinas Perkebunan, agar berkoordinasi dengan dinas terkait provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	3165599	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Bantuan bibit sayuran sebanyak 192 Bungkus	Desa Teluk Kanduri, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kahayan Hulu Utara	Teluk Kanduri	Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Verifikasi TAPD	-	Usulan diterima dan volume menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran	-	-	Disetujui, menyesuaikan dengan kemampuan Anggaran Perangkat Daerah, Data dukung proposal dan Foto Lokasi bisa dilengkapi	-	192	Bungkus	6720000	-	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
908	3165791	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pembuatan pagar/tembok SMA (Untuk keamanan sekolah) di Tumbang Hakau	Desa Tumbang Hakau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Melengkapi Proposal dan File-file yang belum ada	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Mohon kiranya dapat melengkapi data pendukung yang terperinci sebagai bahan kelengkapan usulan.	-	1	Paket	400000000	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
909	3165797	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pembuatan Gorong - gorong SMAN 2 Kurun sebanyak 2 buah	Desa Tumbang Hakau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Tumbang Hakau	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Melengkapi Proposal dan File-file yang belum ada	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Mohon kiranya dapat melengkapi data pendukung yang terperinci sebagai bahan kelengkapan usulan.	-	1	Paket	150000000	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
910	3165803	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pembangunan Tembok/Pagar SMKN 1 Rungan Hulu	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Melengkapi Proposal dan File-file yang belum ada	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Mohon kiranya dapat melengkapi data pendukung yang terperinci sebagai bahan kelengkapan usulan.	-	1	Paket	400000000	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
911	3165811	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Relokasi 3 unit Rumah Dinas Guru SMKN 1 Rungan Hulu karena banjir	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Melengkapi Proposal dan File-file yang belum ada	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Bila memenuhi kriteria, akan di masukkan sebagai usulan program revitalisasi. Mohon kiranya dapat melengkapi data pendukung yang terperinci sebagai bahan kelengkapan	-	1	Kegiatan	500000000	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
912	3165822	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Bangun baru 2 (dua) unit Rumah Dinas Guru SMKN 1 Rungan Hulu	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Melengkapi Proposal dan File-file yang belum ada	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Bila memenuhi kriteria, akan di masukkan sebagai usulan program revitalisasi. Mohon kiranya dapat melengkapi data pendukung yang terperinci sebagai bahan kelengkapan	-	1	Paket	400000000	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
913	3165827	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN I Rungan Hulu di Desa Tumbang Lapan	Desa Takaras, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Dikoordinasikan lagi dengan Dinas Pendidikan, lengkapi proposal dan file-file yang diperlukan	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan alokasi anggaran. Usulan USB memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Bila memenuhi kriteria,dimasukkan sebagai usulan program revitalisasi.	-	1	Unit	7000000000	-	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
914	3165832	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	PEMANGUNAN SEKOLAH (SMK)	Desa Takaras, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Takaras	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Dikoordinasikan lagi dengan Dinas Pendidikan, lengkapi proposal dan file-file yang diperlukan	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan alokasi anggaran. Usulan USB memerlukan studi kelayakan terlebih dahulu. Bila memenuhi kriteria,dimasukkan sebagai usulan program revitalisasi.	-	1	Unit	7000000000	-	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
915	3165836	09-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pembuatan Pagar Keliling SMAN 1 Manuhing sepannjang 700 meter	Kelurahan Tumbang Talaken, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tumbang Talaken	Provinsi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	Verifikasi TAPD	-	Agar Melengkapi Proposal dan File-file yang belum ada	-	-	usulan akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Mohon kiranya dapat melengkapi data pendukung yang terperinci sebagai bahan kelengkapan usulan.	-	1	Paket	400000000	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
916	3181831	10-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance untuk Puskesmas Rabambang	Puskesmas Rabambang, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan Barat	Rabambang	Provinsi	Dinas Kesehatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	3181837	10-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Lapan	Puskesmas Tumbang Lapan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Rungan Hulu	Tumbang Lapan	Provinsi	Dinas Kesehatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	3181857	10-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Mahuroi	Puskesmas Tumbang Mahuroi , Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	Provinsi	Dinas Kesehatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	PROFIL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	USULAN KE	OPD TUJUAN AWAL	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI KELURAHAN/DESA	REKOMENDASI KECAMATAN	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	JENIS BELANJA	SUB KEGIATAN
919	3181862	10-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Masukih	Puskesmas Tumbang Masukih, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Miri Manasa	Tumbang Masukih	Provinsi	Dinas Kesehatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	3181867	10-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Marikoi	Puskesmas Tumbang Marikoi, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Provinsi	Dinas Kesehatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	3181875	10-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Kampuri	Puskesmas Kampuri, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Mihing Raya	Kampuri	Provinsi	Dinas Kesehatan	-	Dibatalkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	3194328	11-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Rekonstruksi Jalan Bawan - Kuala Kurun seluas 64,23 Km	Ruas Jalan Provinsi Bawan - Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi TAPD	-	disetujui dengan menyesuaikan anggaran, melengkapi RC/Dokumen Teknis dan mempertimbangkan kewenangan	-	-	Kewenangan Provinsi	-	5	KM	5000000000	-	Rekonstruksi Jalan
923	3194335	11-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun - Linau seluas 45 Km	Ruas Jalan Provinsi Kuala Kurun - Linau, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Kurun	Kuala Kurun	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Verifikasi TAPD	-	disetujui dengan menyesuaikan anggaran, melengkapi RC/Dokumen Teknis dan mempertimbangkan kewenangan	-	-	Kewenangan Provinsi	-	5	KM	5000000000	-	Rekonstruksi Jalan
924	3194398	11-02-2026	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	Bappeda Kab/Kota	belum optimalnya kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Manuhing sebanyak 68 Unit	Desa Tangki Dahuyan, Desa Bereng Belawan, Dan Desa Tumbang Sepan, Provinsi Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	Manuhing	Tangki Dahuyan	Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dikembalikan	Tujuannya agar disesuaikan ke Dinas Perkim	disetujui dengan menyesuaikan anggaran, melengkapi RC/Dokumen Teknis dan mempertimbangkan kewenangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.7 USULAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DARI KABUPATEN GUNUNG MAS KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kabupaten Gunung Mas, sebagai bagian integral dari Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini mengajukan usulan perencanaan pembangunan untuk tahun 2027. Usulan ini merupakan hasil dari proses perencanaan partisipatif di tingkat lokal, yang mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta potensi dan tantangan spesifik daerah. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah, sejalan dengan prioritas nasional.

Berikut ini adalah daftar usulan perencanaan pembangunan dari Kabupaten Gunung Mas ke Provinsi Kalimantan Tengah:`

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Brigjen Katamso Nomor 99, Kuala Kurun (74511) Kalimantan Tengah
Telp/Fax. (0537) – 3032766 Email/Website : www.gunungmaskab.go.id

Kuala Kurun, 13 Februari 2026

Nomor : 000.7.2/20/BAPPERIDA/II/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : **Usulan Program/Kegiatan Kabupaten Gunung Mas melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.**

Yth. **DAFTAR TERLAMPIR**
di –
Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 000.7.2.6/11/II/Bapperida/2026, Tanggal : 12 Januari 2026, Hal : Percepatan Penyiapan Data dan Informasi Rancangan Awal RKPD dan RENJA Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 Pada SIPD. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyusun 50 usulan Program dan Kegiatan Prioritasi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi pada Kabupaten/Kota.

Berkenaan dengan hal diatas, berikut disampaikan usulan program/kegiatan prioritas Kabupaten Gunung Mas yang merupakan kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (*daftar terlampir*), mohon kiranya dapat diterima dan diakomodir pada APBD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2027.

Demikian surat ini disampaikan untuk bahan lebih lanjut, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan,

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev.
Pembina Utama Muda
NIP. 197801192006041013

Tembusan :
1. Bupati Gunung Mas sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas; dan
3. Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 000.7.2/20/BAPPERIDA/II/2026
Tanggal : 13 Februari 2026
Hal : **Usulan Program/Kegiatan Kabupaten Gunung Mas melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.**

DAFTAR LAMPIRAN SURAT

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah
8. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 000.7.2/20/BAPPERIDA/II/2026
Tanggal : 13 Februari 2026
Hal : **Usulan Program/Kegiatan Kabupaten Gunung Mas melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027.**

DAFTAR USULAN PROGRAM/KEGIATAN KEWENANGAN PROVINSI DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2027

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	OPD TUJUAN AWAL
1	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya tingkat layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Bimbingan Teknis SDM Perpustakaan dan Kearsipan serta sekretariat untuk 20 Orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya tingkat layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Sosialisasi Naskah Kuno untuk 50 orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Kegiatan Seminar Pendewasaan Usia Perkawinan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdaayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih rendahnya tingkat Produktivitas Koperasi	Kegiatan Pengembangan Kapasitas pengurus Koperasi Merah Putih di Kabupaten Gunung Mas untuk 254 orang	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Mengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih rendahnya tingkat Produktivitas Koperasi	Peningkatan Bantuan Modal Usaha bagi Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Gunung Mas sebanyak 127 unit	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Mengah , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			usaha		
7	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengadaan Perahu Karet sebanyak 12 unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
8	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengadaan Tenda Pengungsi 6 m x 12 m sebanyak 2 unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Provinsi Kalimantan Tengah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
9	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya pemberdayaan sosial	Peninggkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk Pendapatan Masyarakat yang masih minim/Keluarga tidak mampu (Desil 1-5) sebanyak 57 UEP	Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Sosial
10	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya pemberdayaan sosial	Pembuatan Rumah Singgah untuk Masyarakat Terlantar sebelum dikembalikan ketempat asal, Kekerasan dalam rumah tangga dan orang dengan gangguan jiwa	Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Sosial
11	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan Ternak Sapi di Demplot Hijauan Pakan Ternak (HPT) sebanyak 20 Ekor bertujuan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis	Dinas Pertanian, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
12	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit Ayam Petelor Dan Pakan sebanyak 2000 Ekor sebagai Dukungan program Makan Bergizi Gratis Desa Pamatang Limau, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas	Dinas Pertanian, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
13	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas) di Demplot Hijauan Pakan Ternak (HPT)	Desa Tumbang Tambirah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
14	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pembangunan Unit Olahan Pakan Ternak (Ruminansia dan Unggas)	Desa Tumbang Tambirah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
15	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan	Pembangunan Renovasi Unit Produksi	Desa Tumbang Tambirah, Provinsi	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Kualitas Sarana Pertanian	Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Sarana Pendukungnya	Kalimantan Tengah	Peternakan
16	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan bibit sayur mayur sebanyak 5000 bungkus	Desa Fajar Harapan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
17	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan bibit kelapa sawit di masyarakat sebanyak 3600 bibit	Desa Bereng Jun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
18	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Bantuan bibit tanaman pangan Sayur-sayuran lengkap sebanyak 100 Bungkus	Kelurahan Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
19	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Pengadaan Bibit karet unggul/Karet Kolasi sebanyak 1000 Batang	Desa Sandung Tambun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
20	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Bantuan bibit sayuran sebanyak 192 Bungkus	Desa Teluk Kanduri, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
21	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Sarana perbengkelan Gudang Alsintan	Kelurahan Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
22	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	masih belum optimalnya tingkat Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Sarana perbengkelan Gudang Alsintan	Kelurahan Tewah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
23	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pembuatan Gorong - gorong SMAN 2 Kurun sebanyak 2 buah	Desa Tumbang Hakau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan
24	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Relokasi 3 unit Rumah Dinas Guru SMKN 1 Rungan Hulu karena banjir	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan
25	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Bangun baru 2 (dua) unit Rumah Dinas Guru SMKN 1 Rungan Hulu	Kelurahan Tumbang Rahuyan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan
26	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN I Rungan Hulu di Desa Tumbang Lapan	Desa Takaras, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan
27	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya peningkatan Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	PEMANGUNAN SEKOLAH (SMK)	Desa Takaras, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pendidikan
28	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat	Pengadaan Ambulance untuk Puskesmas	Puskesmas Rabambang, Provinsi	Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		kesehatan, dan makanan minuman	Rabambang	Kalimantan Tengah	
29	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Lapan	Puskesmas Tumbang Lapan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
30	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Mahuroi	Puskesmas Tumbang Mahuroi , Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
31	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Masukih	Puskesmas Tumbang Masukih, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
32	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Tumbang Marikoi	Puskesmas Tumbang Marikoi, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
33	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Ambulance Puskesmas Kampuri	Puskesmas Kampuri, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
34	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Vaccine Refrigerator (Kulkas Vaksin) 1 Unit untuk Puskesmas Tumbang Jutuh	Puskesmas Tumbang Jutuh, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
35	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Vaccine Refrigerator (Kulkas Vaksin) 1 Unit untuk Puskesmas Tumbang Miri	Puskesmas Tumbang Miri, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
36	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Vaccine Refrigerator (Kulkas Vaksin) 1 Unit untuk Puskesmas Tumbang Mahuroi	Puskesmas Tumbang Mahuroi, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
37	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Vaccine Refrigerator (Kulkas Vaksin) 1 Unit untuk Puskesmas Tumbang Talaken	Puskesmas Tumbang Talaken, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
38	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan Vaccine Refrigerator (Kulkas Vaksin) 1 Unit Puskesmas Tumbang Napoi	Puskesmas Tumbang Napoi, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
39	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Pengadaan kegiatan Untuk Operasi Katarak Berjumlah 30 Orang	Dinas Kesehatan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan
40	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya Aksesibilitas	Rekonstruksi Jalan Bawan -	Ruas Jalan Provinsi Bawan -	Dinas Pekerjaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Kuala Kurun seluas 64,23 Km	Kuala Kurun, Provinsi Kalimantan Tengah	Umum dan Penataan Ruang
41	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Rekonstruksi Jalan Kuala Kurun - Linau seluas 45 Km	Ruas Jalan Provinsi Kuala Kurun - Linau, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
42	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Rekonstruksi Tumbang Talaken - Tumbang Jutuh seluas 22 Km	Ruas Jalan Nasional Tbg.Talaken- Tbg Jutuh, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
43	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Rekonstruksi Tumbang Jutuh - Tewah seluas 46,7 Km	Ruas Jalan Nasional Tbg.Jutuh - Tewah, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Ruas Jalan Nasional Tbg.Jutuh - Tewah seluas 10 Ltr/Detik	Kecamatan Manuhing Raya, Kelurahan Tehang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
45	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman	Pembangunan Jembatan Sei Kahayan di Sepang Kota kelas A seluas 305 Meter	Kecamatan Sepang Kelurahan Sepang Kota, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kahayan Hulu Utara sebanyak 45 Unit	Desa Dandang, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
47	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Manuhing sebanyak 68 Unit	Desa Tangki Dahuyan, Desa Bereng Belawan, Dan Desa Tumbang Sepan, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Tewah sebanyak 93 Unit	Desa Sandung Tambun, Desa Sei Riang, Desa Taja Urap, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya kualitas infrastruktur permukiman	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Manuhing Raya sebanyak 31 Unit	Desa Tumbang Mantuhe, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
50	YANTRIO AULIA, M.Ec.Dev.	belum optimalnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Pengadaan Ambulance desa sebanyak 114 unit (untuk mendukung Program Kesehatan "Betang Sehat" Satu Desa Satu	114 Desa di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Kesehatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Ambulance Penyediaan sarana rujukan medis cepat)		

Kepala Badan,

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev.
Pembina Utama Muda
NIP. 197801192006041013

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.8 KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026 DAN KESELARASAN PRO-SN TEMATIK PEMBANGUNAN

Arah kebijakan pembangunan pada setiap urusan pemerintahan diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai upaya pencapaian visi dan agenda prioritas pembangunan nasional, yang mencakup upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan berdaulat. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas menyusun rencana program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai outcome prioritas dalam rangka mendukung Asta Cita.

Berikut ini adalah hasil Rakortekbang Tahun 2026 dan Keselarasan Pro-SN Tematik Pembangunan:`

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Senin** Tanggal **27** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Govinda Arundhati, S.Si., M.Si**	**198305292009032001**	**Surveyor Pemetaan Ahli Muda**	**Bapperida Prov. Kalimantan Tengah**
2	**Wahyu Hidayat, S.M**	**199107012022031003**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Kalimantan Tengah**
3	**Octo Habriandy R, ST.,MAP**	**197810052010011018**	**Perencana Ahli Muda**	**Bapperida Kab. Gunung Mas**
4	**Pitra Asi, ST.,M.AP**	**197702012006042024**	**Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda**	**Dinas PU Kab. Gunung Mas**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	209537	-	100
Catatan Kesepakatan : sesuai hasil pembahasan, target berubah menjadi 100 bidang tanah							
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	312600	-	100
Catatan Kesepakatan : sesuai hasil pembahasan, target berubah menjadi 100 KK penerima akses Reforma Agraria							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET

1.	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kegiatan yang mendukung percepatan Reforma Agraria berdasarkan Perpres 62 Tahun 2023. Pada tahun 2027 Sekretariat Daerah Kab. Gunung Mas melaui Bagian Pemerintahan akan menganggarkan sub kegiatan yang mendukung capaian target indikator sebesar Rp. 60.000.000					
2.	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1
Catatan Pembahasan : Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kegiatan yang mendukung percepatan Reforma Agraria berdasarkan Perpres 62 Tahun 2023. Pada tahun 2027 Sekretariat Daerah Kab. Gunung Mas melaui Bagian Pemerintahan akan menganggarkan sub kegiatan yang mendukung capaian target indikator sebesar Rp. 50.000.000					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA
.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Data GTRA Provinsi	Kegiatan	34
2.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Data GTRA Kabupaten/Kota	Kegiatan	317
3.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	SK Redistribusi Tanah Kategori Jawa-Bali	Bidang Tanah	18225
4.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	SK Redistribusi Tanah Kategori Luar Jawa-Bali	Bidang Tanah	191312
5.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Akses Reforma Agraria Kategori Jawa-Bali	Kepala Keluarga	43000
6.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Akses Reforma Agraria Kategori Luar Jawa-Bali	Kepala Keluarga	269600

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**1**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**2**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**6**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MANTIKEI, SE	198403142009031004	Perencana Ahli Muda	Dinas pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga
2	NENENG RAHAYU, ST	198008062009032008	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kab. Gunung Mas
3	SALLYDIN DAMANIK	197402061994031002	Perencana Ahli Muda	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALTENG
4	NUR HASANAH	197905162012122002	Perencana Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	88,49	95.17
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	100	99,91	99.49
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100	97,84	98.41
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73.03	0,0	
Catatan Kesepakatan :							
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	%	100	0,0	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Keamanan SMP	Nilai	72.17	75,43	72.44
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	67.72	70,47	63.77
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	68.37	74.37	67.83
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	60.72	61,31	56.33
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	62.41	64,62	61.16
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklim Keamanan SD	Nilai	75.04	71,54	63.77
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	60.86	56,99	51.45
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
13.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	53.41	53,14	44.8
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
14.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71.86	66,93	66.92
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
15.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64.99	62,05	60.62
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
16.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	67.46	50,45	39.49
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							
17.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	84.23	50,45	54.09
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100
Catatan Pembahasan : Target 100 orang, Pagu Rp. 300.000.000 kegiatan Fasilitasi Pelatihan penguatan kompetensi kepala Sekolah dan Guru terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning) jenjang SD					
2.	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50
Catatan Pembahasan : Target 50 orang, Pagu Rp. 200.000.000 kegiatan Fasilitasi Pelatihan penguatan kompetensi kepala Sekolah dan Guru terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), Pelatihan CAKEP jenjang SMP.					
3.	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30
Catatan Pembahasan : Target 30 orang anggaran Rp 148.036.400 Kegiatan berupa pelatihan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD Negeri dan Swasta					
4.	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1
Catatan Pembahasan : target 1 paket anggaran Rp. 200.064.180 kegiatan berupa pengadaan APE dalam dan APE luar					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan	Lembaga	775
2.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Produk Kamus dan Pedoman Kebahasaan bagi Pelajar	Dokumen	2
3.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina	Lembaga	764
4.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Instrumen Kemahiran Bahasa Indonesia yang Tersusun	Dokumen	7
5.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penutur Bahasa Terbina	Orang	8625
6.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Penutur Bahasa Teruji	Orang	186638
7.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Generasi Muda Terbina Program Literasi	Orang	18020
8.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Komunitas Literasi yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Kelompok Masyarakat	110
9.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Komunitas Sastra yang Difasilitasi dan Diapresiasi	Orang	125
10.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Peserta didik yang difasilitasi karir belajar untuk pengembangan prestasi	Orang	3000
11.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Korpus Kebahasaan yang Dikembangkan	Dokumen	32
12.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Produk Kodifikasi dan Pembakuan Bahasa	Dokumen	84
13.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Manajemen Talenta yang dikembangkan untuk Menjaring Minat, Bakat dan Prestasi	Orang	15750
14.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Fasilitasi Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Dokumen	32
15.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	331 Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMP	Lembaga	514
16.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Sains, Riset, Teknologi, dan Inovasi	Orang	6448
17.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Siswa PAUD Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	888000
18.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	338 Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum yang berlaku jenjang SMP	Lembaga	514
19.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Seni, Budaya, dan Literasi	Orang	4762
20.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	380 Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMP	Lembaga	514
21.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Peserta Didik yang dikembangkan prestasinya di bidang Vokasi dan Kewirausahaan	Orang	1691

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
22.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	381 SMP yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran	Lembaga	43520
23.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	103 Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang PAUD	Lembaga	514
24.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Peserta Didik yang dikembangkan Prestasinya Tahap Lanjut	Orang	229
25.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	103141
26.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	194 Sarana dan Peralatan Pembelajaran PAUD	Unit	675
27.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Guru Dikmen Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	4269
28.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Peserta Didik yang mengikuti Pelatihan Ketalentaan	Orang	720
29.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikmen Non-ASN yang Menerima Insentif	Orang	61448
30.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	191 Satuan PAUD yang Direvitalisasi	Unit	3865
31.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	Orang	1600
32.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	008 Pemandu Talenta yang ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	480
33.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikmen dan Diksus yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	1700
34.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi bidang Pengembangan Talenta dan Prestasi	Sistem Informasi	19
35.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru Dikmen dan Diksus yang Memperoleh Penghargaan	Orang	514
36.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti pengembangan kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	Orang	18045
37.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	192 Unit Sekolah Baru Satuan PAUD yang Dibangun	Unit	50
38.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru Dikmen dan Diksus yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV	Orang	15777
39.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	143 Satuan PAUD Menyelenggarakan Pendekatan Holistik Integratif	Lembaga	10000
40.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru dan Tenaga Kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	27714
41.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikmen dan Diksus yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	Orang	4320
42.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	751 Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	Lembaga	554
43.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah	Orang	24310
44.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penataan Guru Dikmen dan Diksus	Daerah	38
45.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi	Orang	29171
46.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Isu Strategis Pendidikan	Rekomendasi	16
47.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Fasilitasi Pemerataan Guru Dikmen dan Diksus	Daerah	38
48.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Rapor Pendidikan yang dikembangkan	Rekomendasi	4
49.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikdas yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	Orang	1200
50.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	431 Prov/Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMA	Lembaga	74
51.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Standar Nasional Pendidikan yang Dikembangkan	Rekomendasi	10
52.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru Dikdas yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	1700
53.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	438 Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum yang berlaku jenjang SMA	Lembaga	74
54.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Guru Dikdas yang Memperoleh Penghargaan	Orang	76
55.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Siswa SD/Paket A Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	10360614
56.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	480 Prov/Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SMA	Lembaga	74
57.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru Dikdas yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV	Orang	73350
58.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	481 SMA yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran	Lembaga	14829

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
59.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Siswa SMP/Paket B Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	4369968
60.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Guru Dikdas yang mendapatkan bimtek pendampingan pembelajaran	Orang	4398
61.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	050 SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	Lembaga	72
62.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	313 Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SMP	Lembaga	514
63.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	051 SMK yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran	Lembaga	11697
64.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	394 Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jenjang SMP	Orang	56013
65.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penataan Guru Dikdas	Daerah	38
66.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	040 Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	Orang	250000
67.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	394 Sarana dan Peralatan Pembelajaran SMP	Unit	150
68.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Fasilitasi Pemerataan Guru Dikdas	Daerah	38
69.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	042 SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	Lembaga	250
70.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	391 SMP yang Direvitalisasi	Unit	2011
71.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Fasilitasi pengembangan model model inovasi PPG	Rekomendasi	2
72.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	051 SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (Teaching Factory)	Lembaga	750
73.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	203 Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SD	Lembaga	514
74.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru yang difasilitasi proses Sertifikasi	Orang	41692
75.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Kompetensi SMK yang Selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Dokumen	10
76.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Tenaga Kependidikan yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	1500
77.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	294 Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jenjang SD	Orang	76884
78.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	053 Sarana dan Peralatan Pembelajaran SMK	Unit	50
79.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	294 Sarana dan Peralatan Pembelajaran SD	Unit	545
80.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Kepala sekolah, Pengawas sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang Memperoleh Penghargaan	Orang	335
81.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	Rekomendasi	14
82.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	291 SD yang Direvitalisasi	Unit	3884
83.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Kepemimpinan	Orang	5150
84.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	Kesepakatan	105
85.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	011 Tenaga Kependidikan yang mendapatkan bimtek pengembangan kompetensi	Orang	4500
86.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	233 Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SD	Lembaga	514
87.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	Lembaga	3754
88.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	333 Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SMP	Lembaga	514
89.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Paket	16
90.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Penataan kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga kependidikan	Provinsi	38
91.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Siswa SMA/Paket C Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1935774
92.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Prasarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	Unit	5
93.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	231 Kab/Kota yang Mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SD	Lembaga	514
94.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Siswa SMK Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar	Orang	1928271
95.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	Orang	6072

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
96.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	Orang	17623
97.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Siswa Penerima Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)	Orang	5519
98.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	238 Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum yang berlaku jenjang SD	Lembaga	514
99.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	405 Prov/Kab/Kota yang mendapatkan dukungan pelaksanaan program afirmasi pada jenjang SMA	Lembaga	74
100.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	280 Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang SD	Lembaga	514
101.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	281 SD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran	Lembaga	514
102.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	494 Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di jenjang SMA	Orang	58800
103.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	494 Sarana dan Peralatan Pembelajaran SMA	Unit	190
104.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	413696
105.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	491 SMA yang Direvitalisasi	Unit	962
106.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Hasil Asesmen Pendidikan	Rekomendasi	6
107.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	538 Satuan Pendidikan Khusus Yang Menerapkan Kurikulum dan Model Pembelajaran Yang Berlaku	Lembaga	38
108.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	492 Unit Sekolah Baru SMA yang Dibangun	Unit	34
109.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Soal yang Dikembangkan	Rekomendasi	31860
110.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	433 Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SMA	Lembaga	74
111.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Model Asesmen Pendidikan	Rekomendasi	5
112.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	022 Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SMK	Lembaga	72
113.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	580 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu	Lembaga	38
114.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Peserta Pengujian Pendidikan yang Terlayani	Orang	3508000
115.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	581 SLB yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran	Lembaga	2360
116.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	052 SMK yang di Revitalisasi	Unit	635
117.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Asesmen	Lembaga	497138
118.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru TK/TKLB Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	71624
119.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	503 Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Program Afirmasi dan Layanan Khusus	Lembaga	360
120.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Asesmen	Sistem Informasi	1
121.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Guru TK/TKLB Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	891
122.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	540 Sekolah Yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Inklusif	Lembaga	376
123.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Sistem Informasi Pengelolaan Pengujian	Sistem Informasi	1
124.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	009 Guru TK/TKLB/Dikmas Non-ASN yang Menerima Insentif	Orang	55102
125.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	582 Sarana dan Peralatan Pembelajaran SLB	Unit	290
126.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Akreditasi Lembaga	Lembaga	99235
127.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 SLB yang di Revitalisasi	Unit	238
128.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Kurikulum yang esensial	Rekomendasi	10
129.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang difasilitasi kompetensi Pengajaran dan Pembelajaran	Orang	1250
130.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Unit Sekolah Baru SLB yang di Bangun	Unit	5
131.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Difasilitasi dalam Pengembangan Karir	Orang	1500
132.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	533 Prov/Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang SLB	Lembaga	38

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
133.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Model Kurikulum yang adaptif dan kontekstual	Rekomendasi	289
134.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru PAUD dan Pendidikan NonFormal yang difasilitasi Kualifikasi S1/DIV	Orang	61338
135.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Perangkat pembelajaran yang adaptif dan kontekstual	Rekomendasi	616
136.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Fasilitasi Pemerataan Guru PAUD	Daerah	38
137.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Penataan Guru PAUD dan Pendidikan Nonformal	Daerah	38
138.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Tim Pengembang Kurikulum yang berkompeten	Orang	140
139.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	582 Lembaga yang Menyelenggarakan Program Pendidikan Jarak Jauh	Lembaga	35
140.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	138 Kab/Kota yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum dan Model Pembelajaran yang berlaku jenjang PAUD	Lembaga	514
141.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Kurikulum	Sistem Informasi	1
142.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	583 Peserta Didik yang Mendapatkan bantuan Community Learning Center (CLC)	Orang	21518
143.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	145 Kab/Kota yang melaksanakan program UKS pada jenjang PAUD	Lembaga	514
144.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Bahan Kebijakan Perbukuan yang Dikembangkan	Rekomendasi	1
145.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	180 Kab/kota yang mendapatkan pendampingan peningkatan mutu pada jenjang PAUD	Lembaga	514
146.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	585 Sarana dan Peralatan Pembelajaran Satuan Pendidikan Nonformal	Unit	335
147.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Satuan Pendidikan Nonformal yang di Revitalisasi	Unit	60
148.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	181 Satuan PAUD yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran	Lembaga	64191
149.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	041 Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Akses Kebekerjaan Luar Negeri	Orang	8000
150.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	583 Lembaga PNFI yang mendapat pembinaan Tata Kelola	Lembaga	514
151.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Buku Pendidikan yang Disusun, Dikembangkan dan Dinilai	Rekomendasi	2200
152.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	584 Satuan Pendidikan Nonformal yang Mendapatkan Pendampingan Digitalisasi Pembelajaran	Lembaga	3000
153.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Kerja Sama antara SMK dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Kesepakatan	166
154.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Data dan Informasi Telusur Alumni (Tracer Study) SMK	Dokumen	1
155.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	002 Guru Dikdas Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	160493
156.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	005 Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	Layanan	4
157.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 SDM Perbukuan yang Terbina	Orang	125
158.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Kepala Sekolah Non-ASN yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	57612
159.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	531 Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan Penguatan Pendidikan Karakter	Lembaga	38
160.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Pengawasan Pemanfaatan Buku Di Satuan Pendidikan	Lembaga	105
161.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Layanan Penguatan Karakter Inklusivitas Satuan Pendidikan	Layanan	3
162.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	006 Guru Dikdas Non ASN yang Menerima Tunjangan Khusus	Orang	23341
163.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	008 Kepala Sekolah Non ASN yang menerima Tunjangan Khusus	Orang	391
164.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Perbukuan	Sistem Informasi	1
165.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Sistem Informasi Standar dan Kebijakan Pendidikan	Sistem Informasi	1
166.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	010 Guru Dikdas Non-ASN Yang Menerima Insentif	Orang	260593
167.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Produk Pengayaan Pendukung Literasi	Dokumen	620
168.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Layanan Penguatan Karakter Peserta Didik	Layanan	8
169.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	004 Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Peserta Didik Terbina Program Literasi Kebahasaan	Orang	21000

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
170.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan Terfasilitasi Layanan Pembinaan Bahasa	Lembaga	750
171.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Karya Sastra yang Dialihwahanakan	Dokumen	50
172.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	003 Produk Penerjemahan	Dokumen	1833
173.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Mitra Layanan Platform Teknologi Sektor Pendidikan yang difasilitasi	Kesepakatan	8
174.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Pengguna Layanan Platform Teknologi Pendidikan Terintegrasi yang di Bina	Orang	105000
175.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	007 Platform Digital Pendidikan	Sistem Informasi	5
176.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	001 Satuan Pendidikan yang di kembangkan prestasinya dalam kerangka MTN	Lembaga	500

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

CATATAN UMUM PEMBAHASAN DESK URUSAN PENDIDIKAN
1. Pemda diharapkan dapat melakukan analisis identifikasi capaian indikator prioritas SPM bidang pendidikan, analisis akar masalah atas capaian indikator SPM tersebut, serta melakukan intervensi melalui pemanfaatan sub-kegiatan yang sesuai akar masalah dari masing-masing Pemerintah Daerah sehingga indikator prioritas SPM bidang pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan. Terkait hal ini, Pemda dapat memanfaatkan data dan pemetaan yang disajikan melalui lampiran pada surat Mendikdasmen Nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 tanggal 9 Februari 2026 terkait indikator kinerja daerah maupun Rapor Pendidikan.
2. Indikator prioritas SPM yang terkait APS, literasi dan numerasi, kekhususan PAUD, dan iklim (Keamanan, Kebinekaan, dan Inklusivitas) yang secara rinci tercantum dalam lampiran surat Mendikdasmen, perlu menjadi acuan pemda untuk mengawal ke seluruh dokumen perencanaan serta target indikator mengacu pada lampiran surat mendikdasmen.
3. Pemerintah daerah dapat memilih subkegiatan diluar pembahasan rakortekrenbang dengan menyesuaikan permasalahan di masing-masing daerah dengan mengacu pada Pemetaan Subkegiatan Prioritas dalam Surat Mendikdasmen.
4. Program-program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Mendikdasmen yang perlu didukung bersama antara pusat dan daerah antara lain:
a. Wajib Belajar 13 Tahun termasuk pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah (PPATS) dan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);
b. Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan; .
c. Program Digitalisasi Pembelajaran;
d. Sekolah Terintegrasi;
e. Penguatan Kemampuan Literasi, Numerasi, Sains, Teknologi, Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial
f. Penyelenggaraan Asesmen Nasional dan Tes Kemampuan Akademik (TKA);
g. Penguatan pendidikan karakter melalui gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, dan bimbingan konseling;
h. Penguatan prestasi dan talenta
i. Pemenuhan, distribusi, dan redistribusi, serta profesionalisme, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
j. Restrukturisasi Kewenangan Pengelolaan Guru;
k. Revitalisasi Bahasa Daerah dan kedaulatan Bahasa Indonesia;
l. Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
m. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi di Satuan Pendidikan
5. Dalam rangka melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan (PPKPSP), pemerintah daerah dapat melakukan aktivitas seperti membina dan mendampingi satuan pendidikan dalam implementasi pembiasaan karakter minimal melalui Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), Pertemuan/Pagi Ceria, serta Gerakan Kepanduan dan ekstrakurikuler, dengan mengoptimalkan peran catur pusat pendidikan (sekolah, orang tua, masyarakat, media). Pemerintah daerah juga dapat menyusun regulasi turunan untuk mendorong implementasi program, memperkuat pelaksanaan PPKPSP melalui intra, ko, dan ekstrakurikuler (termasuk mendorong Kepanduan sebagai ekstrakurikuler wajib ada di setiap sekolah), meningkatkan kapasitas pembina pramuka melalui modul penguatan 7KAIH dalam kepramukaan, mendiseminasikan panduan/modul pendukung (panduan untuk pendidik dan orang tua, panduan kokurikuler, modul kepramukaan, pedoman karakter dalam MBG, materi penguatan karakter, serta materi 7 Jurus BK Hebat), dan melakukan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan PPKPSP minimal 1 kali setahun.
6. Dalam rangka menyelenggarakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN), pemerintah daerah dapat membentuk Pokja BSAN dan memastikan program BSAN terintegrasi dalam perencanaan serta penganggaran daerah; menyusun kebijakan daerah berbasis asas humanis, partisipatif, nondiskriminatif, inklusif, kesetaraan gender, dan kepentingan terbaik bagi anak menjalankan pembinaan; melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dan melibatkan catur pusat pendidikan (sekolah, orang tua, masyarakat, media); melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi berkala; serta memastikan p
enguatan Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebinekaan melalui dukungan tata tertib/SOP dan deteksi dini, akomodasi layak dan layanan bagi kebutuhan khusus, pencegahan intoleransi dan ruang perjumpaan, termasuk penguatan kanal aduan dan mekanisme penanganan kasus.
7. Dalam rangka melaksanakan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD), pemerintah daerah dapat melalui aktivitas seperti mengiventarisasi dan mendokumentasi kosakata bahasa daerah, menyusun kamus bahasa daerah dan bahan ajar berbahasa daerah serta mengintegrasikan bahasa daerah dalam kurikulum muatan lokal, mengarsipkan dan mendigitalkan bahasa daerah, menginisiasi dan menetapkan peraturan daerah tentang pelindungan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, menyelenggarakan festival tunas bahasa ibu di tingkat provinsi;
8. Dalam rangka mendukung dan melaksanakan kedaulatan Bahasa Indonesia, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan seperti menyusun atau menyesuaikan peraturan kepala daerah atau regulasi turunan terkait pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia dan memasukkan aspek pengawasan bahasa dalam standar operasional prosedur (SOP) pelayanan publik, membentuk tim/unit pengawas penggunaan BI di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan menunjuk pejabat atau unit kerja yang bertanggungjawab, memetakan penggunaan BI di ruang publik kemudian mengidentifikasi pelanggaran/ketidaksesuaian untuk selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut perbaikan secara bertahap, mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran dalam dokumen perencanaan daerah terkait dengan pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
9. Berdasarkan SE Mendagri Nomor 600.4/2851/ST tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal di Daerah tanggal 28 Mei 2025, target-target sub kegiatan yang telah disepakati melalui forum rakortekrenbang tahun 2026 dalam rangka pencapaian target SPM 100% ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

CATATAN KHUSUS GUNUNG MAS
Berdasarkan capaian indikator SPM tahun 2025, tiga indikator dengan capain teratas meliputi: Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 â€“ 15, Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD dan Iklim Keamanan SMP
Meskipun demikian, indikator angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan, capaian terendah. Sehingga, fokus intervensi dapat diarahkan pada indikator ini.
Pemkab perlu melakukan identifikasi dan analisis akar masalah pada indikator kritis tersebut, sehingga dapat menentukan intervensi yang tepat.
Beberapa potensi akar masalah rendahnya kompetensi numerasi siswa meliputi: pemenuhan dan distribusi PTK, PTK belum melakukan kegiatan refleksi dan perbaikan pembelajaran, belum tersedianya konten pendidikan yang relevan, belum tersedianya pembinaan PTK dalam bidang numerasi, PM, AI, STEM, belum tersedianya sarana prasarana pembelajaran seperti buku teks non teks yang memadai, alat praktik, dan sebagainya
Setelah melakukan identifikasi akar masalah, Pemkab dapat merujuk surat Mendikdasmen nomor 3101/B/MDM.A/PR.07.05/2026 perihal Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota serta menggunakan Rapor Pendidikan untuk memetakan subkegiatan sebagai intervensi indikator kritis

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	:	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	:	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	:	**17**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	:	**1**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	:	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	:	**176**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Febriyan Usman Rijali**	**198002102010011008**	**Perencana Ahli Muda**	**Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah**
2	**Dessy Katherina**	**199010172015032001**	**Perencana Ahli Muda**	**Dinsos Prov. Kalteng**
3	**Evellyn, S.P.**	**197108082006042024**	**Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial**	**Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas**
4	**Neneng Rahayu, S.T.**	**198008062009032008**	**Perencana Ahli Muda**	**Bapperida Kabupaten Gunung Mas**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	120	120
Catatan Kesepakatan : Keaktifan pendamping PKH melakukan Pemutakhiran Data							
2.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Disabilitas dimasukkan ke aplikasi DTSEN							
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Lanjut Usia dimasukkan ke aplikasi DTSEN							
4.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Anak Terlantar Dimasukkan ke Aplikasi DTSEN							
5.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Gelandangan Pengemis Dimasukkan ke Aplikasi DTSEN							
6.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Korban Bencana yang Ditargetkan di Tahun 2027 sebanyak 100 orang							
7.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	120	120
Catatan Kesepakatan : Keaktifan pendamping PKH melakukan Pemutakhiran Data							
8.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Disabilitas dimasukkan ke aplikasi DTSEN							
9.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Lanjut Usia dimasukkan ke aplikasi DTSEN							
10.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Anak Terlantar Dimasukkan ke Aplikasi DTSEN							
11.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Data Penerima Bantuan Gelandangan Pengemis Dimasukkan ke Aplikasi DTSEN							
12.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100
Catatan Kesepakatan : Korban Bencana yang Ditargetkan di Tahun 2027 sebanyak 100 orang							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET

1.	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1
Catatan Pembahasan : Pemberian Bantuan Hibah Uang untuk Karang Taruna Kabupaten					
2.	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	1
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan akan di usulkan di Renja 2027 dengan Pagu Rp. 20.000.000					

2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350
Catatan Pembahasan : Bantuan Stimulan Sembako untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita					
2.	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4
Catatan Pembahasan : Pemutakhiran Data Dilakukan Per Triwulan, sehingga ada Perbaikan Target Pagu, Dari 600 (usulan) menjadi 4 (usulan)					

IV. RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**9**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Febriyan Usman Rijali	198002102010011008	Perencana Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	Hendro, S.H., M.H.	196910041991031003	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah
3	Dody Hartito, S.Pd. M.Si	197509032006041017	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunung Mas
4	Rosiana Lorensa,S.IP	199611162022022001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	75	70	70
Catatan Kesepakatan : Sepakat Target Provinsi 35 %							
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	3	2	0.7
Catatan Kesepakatan : Sepakat Target Provinsi 0,9							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	75	70	70
Catatan Kesepakatan : Sepakat Target Provinsi 35 %							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	3	2	0.7
Catatan Kesepakatan : Sepakat Target Provinsi 0,9							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0
Catatan Pembahasan : Sepakat Dianggarkan untuk 2027 berupa insentif kepada Mantir Damang dan Sekretaris Kedemangan sebanyak 441 orang serta 1 lembaga adat senilai 1,8 M didalam Sub Kegiatan yang lain yaitu Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisonal					
2.	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : Sepakat PPKD baru diupdate tahun 2025 sehingga tidak dianggarkan kembali					

2. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	4
Catatan Pembahasan : Sepakat Akan mengusulkan 4 objek usulan Warisan Budaya Tak Benda dengan anggaran Rp 100.000.000,-					
2.	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	14
Catatan Pembahasan : Sepakat Pada tahun 2027 akan dianggarkan Rp.150.000.000 dengan rencana kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Cagar Budaya					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**5**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	VUJI ERVINA, S.STP., M.IP.	198702042006022001	PKPM AHLI MUDA	DPMPTSP PROVINSI KALTENG
2	TONIE, S.E.	198311232010011003	PERENCANA AHLI PERTAMA	BAPPERIDA PROVINSI KALTENG
3	FERRY MAIGRIT,S.E.	196805171999031007	SEKRETARIS	DPMPTSP KAB. GUNUNG MAS
4	IKHLAS, S.T.	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KAB. GUNUNG MAS
5	ANTUNG ARIF MAULANA,S.Sos	198905202020121010	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DPMPTSP PROVINSI KALTENG

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	2.567	0,944	0.944
Catatan Kesepakatan : Input target indikator outcome daerah telah sesuai							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	14
Catatan Pembahasan : Target Kinerja dan Pagu Anggaran indikatif telah sesuai Rp. 78.952.684					
2.	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	2
Catatan Pembahasan : untuk target dan pagu dapat disepakati Rp. 33.435.554					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal	Dokumen	1

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

Forum Rakortekrenbang Tahun 2026 antara DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah, DPMPTSP Kab. Gunung Mas dan Bapperida Kab. Gunung Mas telah bersama-sama melakukan pembahasan dan menyepakati atas target kinerja dan Sub Kegiatan pendukung. Adapun hasil kesepakatan pembahasan sebagai berikut:
1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyampaikan Surat melalui Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM No : B-56.S/KL.00/A.10/2026 tanggal 20 Februari 2026 terkait Penyampaian Target Realisasi Investasi Tahun 2026 bahwa Target Nilai Realisasi Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 26,75 T;
2. Berdasarkan hal tersebut DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan surat No : 570/173/B.IV/DPMPTSP-2026 tanggal 26 Februari 2026, Hal : Target Realisasi Investasi Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, yang mana surat tersebut juga menjadi dasar untuk pengisian target tahun 2027;
3. DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Gunung Mas tahun 2025;
4. Target Nilai Realisasi Penanaman Modal DPMPTSP Kab. Gunung Mas tahun 2027 yang diinput pada aplikasi E-Rakortek telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebesar Rp. 0.944 T ;
5. Untuk mendukung pencapaian tersebut didukung dangan Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dan Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya. Sub Kegiatan tersebut telah mendukung Outcome Prioritas Pencapaian Target Realisasi Investasi Nasional Tahun 2027;
6. Target Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal tahun 2027 DPMPTSP Kab. Gunung Mas telah sesuai dengan data yang diinput;
7. Target Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya tahun 2027 DPMPTSP Kab. Gunung Mas telah sesuai dengan data yang diinput;
8. Berdasarkan keterangan dari DPMPTSP Kab. Gunung Mas untuk Tahun 2025 tidak terdapat kendala yang signifikan dan dapat diselesaikan;
10. Adapun untuk Target Nilai Realisasi Penanaman Modal secara nasional Tahun 2026 adalah Sebesar Rp.2.041,3 - 2.125,15 Triliun.

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**1**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**2**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**1**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Febriyan Usman Rijali**	**198002102010011008**	**Perencana Ahli Muda**	**Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah**
2	**Hendro, S.H., M.H.**	**196910041991031003**	**Perencana Ahli Muda**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah**
3	**Dody Hartito, S.Pd. M.Si**	**197509032006041017**	**Perencana Ahli Muda**	**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas**
4	**Rosiana Lorensa,S.IP**	**199611162022022001**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**Bapperida Kabupaten Gunung Mas**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	4.8	3	2
Catatan Kesepakatan : Sepakat Target PDRB Provinsi 2,16							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1
Catatan Pembahasan : Sepakat Perubahan target dikarenakan di awal dianggap satuan sub kegiatan adalah persentase. Direncanakan akan melaksanakan promosi pariwisata melalui keikutsertaan di Expo baik tingkat Provinsi ataupun Kabupaten					
2.	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	0
Catatan Pembahasan : Sepakat Belum ada rencana penguatan promosi akibat keterbatasan anggaran					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0
Catatan Pembahasan : Sepakat Di Kabupaten Gunung Mas belum memiliki sarana prasarana Kota kreatif					
2.	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	0
Catatan Pembahasan : Sepakat Untuk tahun 2027 tidak dianggarkan karena keterbatasan anggaran					

IV. RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	YERI , A.Md	197905152009031000	Plt. Kasubbag Penyusunan Program	Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Tengah
2	JUNIDY ARDIANSON, S.Hut	197503062006041012	Kepala Sub Bag Penyusunan Program	BPB-PK Provinsi Kalimantan Tengah
3	MUHAMMAD FADLI AKBAR, ST	199002192025211025	Penata Layanan Operasional	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
4	ROSIANA LORENSA, S.IP	199611162022022001	Penalaah Teknis Kebijakan	Bapperida Kabupaten Gunung Mas
5	RYAN ABDUL MALIK, S.E	199702022022021001	Penalaah Teknis Kebijakan	BPBD Kabupaten Gunung Mas
6	TIMOTIUS NOPI SUBEKTI	199711012025060009	Satpol -Ahli Pratama	Satpol PP Kabupaten Gunung Mas
7	HABRIANDY RASAN, ST.,MAP	197810052010011018	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas
8	NAFTALI S.T.,M.Si	197507212006041009	Kasat Satpol PP	Satpol PP Kabupaten Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	80	73,91	80
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	80	100	75

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
3.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	80	100	75
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	80	73,91	80
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
5.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	80	100	75
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
6.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	80	100	75
Catatan Kesepakatan : Sepakat							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Target 1 Dokumen (12 Laporan) per Tahun di atas akan dilaksanakan apabila dana anggaran tersedia, dan diharapakan dukungan dari TAPD Kabupaten Gunung Mas, 1 Target kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 100.000.000					
2.	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12
Catatan Pembahasan : Target di Naikan menjadi 12 Laporan , Pagu Anggaran di Renja 2027 Rp. 43.615.800					

2. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET

1.	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	1000
Catatan Pembahasan : Target dinaikan menjadi 1000 orang					
2.	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1
Catatan Pembahasan : Target 1 Kegiatan di atas akan dilaksanakan apabila dana anggaran tersedia, dan diharapakan dukungan dari TAPD Kabupaten Gunung Mas, 1 Target kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 20.000.000					
3.	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	250
Catatan Pembahasan : Target dinaikan menjadi 250 orang					
4.	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	12
Catatan Pembahasan : Target 12 Kawasan di atas akan dilaksanakan apabila dana anggaran tersedia, dan diharapakan dukungan dari TAPD Kabupaten Gunung Mas, 12 Target Kawasan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 100.000.000					

3. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12
Catatan Pembahasan : Target 12 Laporan per Tahun di atas akan dilaksanakan apabila dana anggaran tersedia, dan diharapakan dukungan dari TAPD Kabupaten Gunung Mas, 1 Target kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 45.000.000					
2.	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Target 1 Dokumen di atas akan dilaksanakan apabila dana anggaran tersedia, dan diharapakan dukungan dari TAPD Kabupaten Gunung Mas, 1 Target Dokumen (RISPKP) dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 400.000.000					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	:	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	:	**2**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	:	**3**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	:	**3**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	:	**8**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	:	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	AKWILA TRIFENA A. AWAN, S.STP., M.AP	199311132016092001	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAPPERIDA PROVINSI KALTENG
2	ELSYE KUSUMAWATI, ST., M.Eng	198208142006042010	PERENCANA AHLI MUDA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3	OLLYFIA VIOLETTA, S.T	199507142019032018	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4	VERY SANDY, S.SOS	197602292007011006	KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNG MAS
5	IKHLAS, S.T	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	Daerah	365	-	1
Catatan Kesepakatan : Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sepakat Berkategori "Sangat Baik".							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1

Catatan Pembahasan : Sepakat Target 1 Laporan.					
2.	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Sepakat Target 2 Laporan.					

2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Sepakat Target 2 Laporan.					
2.	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	2
Catatan Pembahasan : Sepakat Target 2 Laporan.					

IV. RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**5**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Eri Sriwahyuni, SKM	198201052006042019	Penelaah Teknis Kebijakan	DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
2	Kris Natalia, S.STP, M.IP	198912272010102001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
3	dr. Rina Sari, M.M	197709252005012012	Kepala Dinas	DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas
4	Rosiana Lorensa	199611162022022001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85	70	90
Catatan Kesepakatan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Capaian 2025 100% karena kasus terlayani semua. - Target 2027 90 % DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Kabupaten Gunung Mas menargetkan sebesar 70% tetapi pada capaian 2025 sudah sebesar 100%, sehingga Kabupaten Gunung Mas menyesuaikan target tahun 2027 sebesar 90% sama dengan target Provinsi.							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	70	90

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Target 2027 90 % - Triwulan 1 tahun 2026 sudah ada korban 3 anak dan 1 perempuan. DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Kabupaten Gunung Mas menargetkan sebesar 70% tetapi pada capaian 2025 sudah sebesar 100%, sehingga Kabupaten Gunung Mas menyesuaikan target tahun 2027 sebesar 90% sama dengan target Provinsi.							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	15
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 15 orang dengan pagu Rp 15.000.000,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					
2.	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	5
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 5 lembaga dengan pagu Rp 25.000.000,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					

2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	13
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 13 orang dengan pagu Rp 17.000.000,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					
2.	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	3
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 3 lembaga dengan pagu Rp 25.000.000,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Layanan Terpadu Sesuai Standar	Daerah	38
2.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan Rujukan Akhir Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	Orang	180
3.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan Rujukan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Perlakuan Salah Lainnya	Orang	550
4.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan Pengaduan Korban KtPA melalui SAPA 129	Layanan	1

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	:	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	:	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	:	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	:	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	:	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	:	**4**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Eri Sriwahyuni, SKM**	**198201052006042019**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah**
2	**Kris Natalia, S.STP, M.IP**	**198912272010102001**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah**
3	**dr. Rina Sari, M.M**	**197709252005012012**	**Kepala Dinas**	**DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas**
4	**Rosiana Lorensa**	**199611162022022001**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**Bapperida Kabupaten Gunung Mas**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67.5	65,6	65.6
Catatan Kesepakatan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Target 2027 65,6 indeks DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas sebesar 65,6%							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	85.9	94,4	94.4
Catatan Kesepakatan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Target 2027 94,4 % - Capain 2025 sebesar 87,5 % DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Kabupaten Gunung Mas optimis menaikkan target 2027 sebesar 94,4 % - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	1
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 1 kegiatan dengan pagu Rp 15.000.000,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - kegiatan ini sudah terakomodir pada sub kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - bersedia mengakomodir sub kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					
2.	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 12 laporan dengan pagu Rp 22.858.604,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan / Dokumen	1
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 1 laporan/dokumen dengan pagu Rp 19.904.091,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					
2.	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1
Catatan Pembahasan : DP2KBP3A Kabupaten Gunung Mas: - Tahun 2027 target 1 laporan dengan pagu Rp 15.000.000,- DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah : - Menyepakati target 2027 Kabupaten Gunung Mas dengan menyesuaikan kemampuan daerah					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kesertaan KBPP	Orang	2879517
2.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Fasyankes yang mendapat pemenuhan ketersediaan alokon	Lembaga	22105
3.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang KBKR	Kabupaten/Kota	508
4.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Fasilitasi dan pembinaan fasilitas kesehatan yang siap melakukan pelayanan KB	Faskes	22105

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
5.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam peningkatan KB Pascapersalinan, pendampingan ibu hamil dan ibu pascapersalinan	Kabupaten/Kota	508
6.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan peningkatan Peserta KB Aktif penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kabupaten/Kota	508
7.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi Penggarapan Pelayanan KB Wilayah Khusus	Kabupaten/Kota	206
8.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dalam bidang penggerakan dan peran serta masyarakat	Kabupaten/Kota	508
9.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah daerah yang melaksanakan promosi Program bangga kencana melalui media lini bawah oleh pengelola program, petugas dan kader	Provinsi	37
10.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pengelolaan Sistem dan informasi keluarga yang berkualitas	Sistem Informasi	32
11.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan Pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	Kabupaten/Kota	508
12.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Laporan	37
13.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	SDM Eksternal yang mendapatkan pelatihan Program Kependudukan, Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana tingkat provinsi	Orang	1016
14.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA)	Kabupaten/Kota	508
15.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Pemerintah Daerah yang mendapatkan bimbingan teknis dalam bidang pembangunan keluarga	Kabupaten/Kota	508
16.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	Keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pengasuhan 1000 HPK	Keluarga	7976954
17.	KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja	Kelompok Masyarakat	34289

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	:	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	:	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	:	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	:	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	:	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	:	**17**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Erawati, S.Gz**	**198109232005012011**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah**
2	**Jubel Kristiono Simanungkalit, SE1**	**198306122014021001**	**Perencana Ahli Pertama**	**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**
3	**Hardede, S.P**	**198412252024211001**	**Perencana Ahli Pertama**	**Bapperida Kab. Gunung Mas**
4	**Meldawatie. Tjildon, S.Pd., M.AP**	**198802132010012003**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**Disdikpora Kab. Gunung Mas**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	69.23	52.18	69.23
Catatan Kesepakatan : Sepakat untuk menyesuaikan dengan target daerah							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	80	79.18	79.18
Catatan Kesepakatan : Sepakat untuk menyesuaikan dengan target daerah							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50

Catatan Pembahasan : pelatihan wirausaha pemuda perlu diperluas jumlah cakupannya dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah					
2.	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1
Catatan Pembahasan : perlu adanya dukungan berupa alokasi anggaran dari TAPD Kab Gumas kepada OKP di tingkat kabupaten (KNPI) melalui Disdikpora Kab. Gumas					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	30
Catatan Pembahasan : perlu adanya inisiasi untuk mendirikan pusat pelatihan olahraga pelajar di kab. Gumas dengan mempertimbangkan jumlah atlet dan potensi prestasi yang mampu diperoleh.					
2.	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	30
Catatan Pembahasan : Sepakat untuk menyesuaikan dengan target dan keuangan daerah					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA
.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	SYAHRUDINNOR	197004152008011016	PENELAHAN TEKNIS KEBIJAKAN	BAPPERIDA PROVINSI KALTENG
2	FIRMANTO	198201172010011008	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP PROVINSI KALTENG
3	SEPTIANI	197809282009032005	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNG MAS

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73	62	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71	61	
Catatan Kesepakatan :							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73	62	
Catatan Kesepakatan :							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71	61	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5
Catatan Pembahasan : Menaikan target semula 0 Unit Perpustakaan diubah menjadi 5 unit Perpustakaan dengan Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 20.000.000					
2.	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5
Catatan Pembahasan : Menaikan target semula 0 Unit Perpustakaan diubah menjadi 5 unit Perpustakaan dengan Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 15.000.000					

2. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	1
Catatan Pembahasan : target semula 5 diubah menjadi 1 mengingat pada saat ini masih melakukan penelusuran dan inventarisasi					
2.	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1
Catatan Pembahasan : target semula 0 diubah menjadi 1 mengingat pada saat ini masih melakukan penelusuran dan inventarisasi. dengan Kebutuhan Pagu Usulan anggaran sebesar Rp. 20.000.000					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Perpustakaan	2500
2.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Umum	Lembaga	10267
3.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan Khusus	Lembaga	210
4.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Akreditasi Perpustakaan Umum	Perpustakaan	1000
5.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Akreditasi Perpustakaan Khusus	Perpustakaan	50
6.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Akreditasi Perpustakaan Sekolah/Madrasah	Perpustakaan	4280
7.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pendaftaran dan Penghargaan Naskah Kuno Nusantara	naskah	5000
8.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pembinaan dan Pelestarian Naskah Kuno	Lembaga	31
9.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Naskah Kuno Nusantara yang Dikonservasi	Eksemplar	7644
10.	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Naskah Kuno Nusantara yang Dialih media	Eksemplar	6760

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**10**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Neneng Rahayu, ST**	**198008062009032008**	**Perencana Ahli Muda**	**Bapperida Kab.Gunung Mas**
2	**Marini, S.Sos**	**198302082996042011**	**Arsiparis Ahli Muda**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsip Kab.Gunung Mas**
3	**Isabella Damayanti, S.S.I**	**200006252022032002**	**Arsiparis Ahli Pertama**	**Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah**
4	**Noor Mahmudah, S.Kom**	**199503122025212024**	**Penata Layanan Operasional**	**Bapperida Prov. Kalteng**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70.45	65,25	65.25
Catatan Kesepakatan : Target nilai pengawasan kearsipan tahun 2027 sejumlah 65.25							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	27
Catatan Pembahasan : Perubahan target laporan hasil pengawasan dari 10 laporan mejadi 27 laporan					
2.	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10
Catatan Pembahasan : Penambahan pagu anggaran sejumlah Rp. 30.000.000 karena target jumlah layanan JIKN bertambah					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Informasi Arsip yang Tersedia di JIKN	Arsip	148612

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
2.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Diawasi	Lembaga	147
3.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Arsip Terjaga dan Arsip Statis yang didigitalisasi	Arsip	617000
4.	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	Pengguna Layanan Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	Orang	606686

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

1. Penambahan pagu Anggaran sejumlah Rp.30.000.000 untuk pelayanan JIKN
2. Target 2027 hasil Pengawasan Kearsipan sejumlah 65,25
3. Target pengguna JIKN tahun 2027 yaitu 10 pengguna

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**1**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**2**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**4**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	AGUSTINI PANDANG, S. Sos	197408292006042017	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	BADAN KESBANGPOL KAB. GUNUNG MAS
2	IKHLAS, S.T	197811282006041004	Analis Keuangan Riset dan Daerah Ahli Muda	BAPPERIDA KAB. GUNUNG MAS
3	LISAMSON, S.Sos	196907272007011024	Perencana Ahli Muda	BADAN KESBANGPOL PROV. KALTENG
4	M. RACHMANI, S. Kom	198301012009011006	Penelaah Teknis Kebijakan	BAPPERIDA PROV. KALTENG

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	100	0
Catatan Kesepakatan : Pengukuran hanya ditingkat Provinsi							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	77
Catatan Kesepakatan : Sepakat							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	100	0
Catatan Kesepakatan : Pengukuran hanya ditingkat Provinsi							
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	77
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
5.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	79.95	100	0
Catatan Kesepakatan : Pengukuran hanya ditingkat Provinsi							
6.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	77	77	77
Catatan Kesepakatan : Sepakat							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	0
Catatan Pembahasan : 1.Kegiatan untuk kegiatan pendidikan politik sudah dianggarkan pada sub kegiatan penyusunan program kerja di bidang politik dengan nomor rekening 8.01.03.02.01.0001 dan rekening kegiatan nomor 8.01.03.02.01.0002.					

2.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	70
Catatan Pembahasan : Kegiatan untuk mendukung pendidikan politik melalui rapat-rapat pembinaan partai dengan peserta 70 orang dan bantuan hibah kepada 9 partai politik.					

2. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	100
Catatan Pembahasan : Sepakat					
2.	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	40
Catatan Pembahasan : Kegiatan Sosialisasi Kewaspadaan Dini untuk generasi muda sebesar Rp.40.299.650,- dengan peserta 40 Orang.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**3**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	YOHANNA ENDANG SUPRAPTININGSIH, S.T., M.T	197102071997032002	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	MUHAMAD ANSORI, S.T., M.T	197410052002121005	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
3	HAYATUN NAIMAH	198207162005012010	Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan, Cipta Karya	Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah
4	MARKUS WIRO, S.T	198703022011011002	Kabid Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan	Bapperida Kab. Gunung Mas
5	INDRA SENTOZA	198002232007011001	Perencana Ahli Muda	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50	5	0
Catatan Kesepakatan : Ada kasus terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, namun belum bisa ditindaklanjuti karena elum ada Perda yang mengatur sanksi administratif.							
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1059	2	2
Catatan Kesepakatan : Sedang diajukan untuk pengusulan bantek RDTR di tahun 2026 untuk 2 Kecamatan, yaitu : 1. RDTR Kecamatan Rungan 2. RDTR Kecamatan Manuhing Jika Bantek disetujui di tahun 2026, maka RDTR dapat di Perda kan di Tahun 2027							
3.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21	5	5
Catatan Kesepakatan : Sepakat							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
4.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	31	15	0.15
Catatan Kesepakatan : Tahun 2025, capaian 0,1 %							
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase kondisi mantap jalan	%	73	39,65	36.20
Catatan Kesepakatan : koreksi target tahun 2027							
6.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	38	13	13
Catatan Kesepakatan : sepakat							
7.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	%	64	50	50
Catatan Kesepakatan : sepakat							
8.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13440	100	100
Catatan Kesepakatan : sepakat							
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50	5	0
Catatan Kesepakatan : Ada kasus terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, namun belum bisa ditindaklanjuti karena elum ada Perda yang mengatur sanksi administratif.							
10.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1059	2	2
Catatan Kesepakatan : Sedang diajukan untuk pengusulan bantek RDTR di tahun 2026 untuk 2 Kecamatan, yaitu : 1. RDTR Kecamatan Rungan 2. RDTR Kecamatan Manuhing Jika Bantek disetujui di tahun 2026, maka RDTR dapat di Perda kan di Tahun 2027							
11.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21	5	5
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
12.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	31	15	0.15
Catatan Kesepakatan : Tahun 2025, capaian 0,1 %							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
13.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase kondisi mantap jalan	%	73	39,65	36.20
Catatan Kesepakatan : koreksi target tahun 2027							
14.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	38	13	13
Catatan Kesepakatan : sepakat							
15.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	%	64	50	50
Catatan Kesepakatan : sepakat							
16.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13440	100	100
Catatan Kesepakatan : sepakat							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0
Catatan Pembahasan : tidak ada kegiatan, tetapi tetap melakukan operasi dan pemeliharaan sungai					
2.	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	0
Catatan Pembahasan : tidak dianggarkan, tetapi fokus pembuatan kanal banjir					

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : sudah dilakukan review RISPAM di tahun 2026. sebaiknya, tahun 2027 dilakukan review JAKSTRADA SPAM					
2.	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	70
Catatan Pembahasan : dengan anggaran Rp. 600.000.000,-					

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0
Catatan Pembahasan : bukan kewenangan PU, kewenangan DLH					

2.	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	0
Catatan Pembahasan : akan dianggarkan melalui mekanisme TSLP (CSR)					

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1
Catatan Pembahasan : dengan anggaran Rp. 300.000.000,-					
2.	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : belum diperlukan penyusunan dokumen limbah yang baru					

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0
Catatan Pembahasan : fokus pada kegiatan rekonstruksi					
2.	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	1.2
Catatan Pembahasan : dengan anggaran Rp. 6.000.000.000,-					

6. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	25
Catatan Pembahasan : koreksi target, dengan anggaran Rp. 176.000.000,-					
2.	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	0
Catatan Pembahasan : sebaiknya, dianggarkan untuk pembinaan lembaga jasa konstruksi					

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	
Catatan Pembahasan :					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota (level prop)	Dokumen	2
2.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level prop)	Materi Teknis	5
3.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Prov/Kab/Kota (level kab/kota)	Dokumen	1059
4.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level kab/kota)	Materi Teknis	82

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
5.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level kab/kota)	Materi Teknis	65
6.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota (level kab/kota)	Dokumen	39
7.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**8**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**7**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**14**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**36**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	CLARA MONISSA, ST., M.Si	198306092015032001	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	BAPPERIDA PROV. KALTENG
2	INDRA SENTOZA, ST	198002232004011005	Perencana Ahli Muda	DPU Kab. Gunung Mas
3	MARKUS WIRO, ST	198703022011011002	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	BAPPERIDA Kab. gunung Mas
4	ITA ABYTA SARI	199204022019032028	Penata Ruang Ahli Pertama	DPUPR PROV. KALTENG

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50	5	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1059	2	
Catatan Kesepakatan :							
3.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21	5	
Catatan Kesepakatan :							
4.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	31	15	
Catatan Kesepakatan :							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase kondisi mantap jalan	%	73	39,65	
Catatan Kesepakatan :							
6.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	38	13	
Catatan Kesepakatan :							
7.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	%	64	50	
Catatan Kesepakatan :							
8.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13440	100	
Catatan Kesepakatan :							
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50	5	
Catatan Kesepakatan :							
10.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1059	2	
Catatan Kesepakatan :							
11.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21	5	
Catatan Kesepakatan :							
12.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	31	15	
Catatan Kesepakatan :							
13.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase kondisi mantap jalan	%	73	39,65	
Catatan Kesepakatan :							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
14.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	38	13	
Catatan Kesepakatan :							
15.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	%	64	50	
Catatan Kesepakatan :							
16.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13440	100	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	
Catatan Pembahasan :					

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	
Catatan Pembahasan :					

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	
Catatan Pembahasan :					

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET

1.	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	
Catatan Pembahasan :					

6. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	
Catatan Pembahasan :					

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2
Catatan Pembahasan : Sepakat, sedang diajukan untuk pengusulan bantek RDTR di tahun 2026 untuk 2 Kecamatan, yaitu : 1. RDTR Kecamatan Rungan 2. RDTR Kecamatan Manuhing Jika Bantek disetujui di tahun 2026, maka RDTR dapat di Perda kan di Tahun 2027					
2.	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	0
Catatan Pembahasan : Belum ada Perda yang mengatur sanksi administrasi					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota (level prop)	Dokumen	2
2.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level prop)	Materi Teknis	5
3.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Prov/Kab/Kota (level kab/kota)	Dokumen	1059
4.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level kab/kota)	Materi Teknis	82
5.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level kab/kota)	Materi Teknis	65
6.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota (level kab/kota)	Dokumen	39
7.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

Belum ada Perda yang mengatur sanksi administrasi

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	:	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	:	**2**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	:	**8**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	:	**7**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	:	**14**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	:	**36**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Retno Nurhayati U	196902021994032010	Sekretaris	TPHP Provinsi Kalimantan Tengah
2	Khairudin	197211102007011030	Pelaksana	TPHP Provinsi Kalimantan Tengah
3	Siti Aminah, S.TP	198103123201001 2013	Perencana Ahli Muda	Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas
4	Dada Ryadi	198508302010011014	Analis Kebijakan	Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas
5	Novarina, SP	197511102008012020	Perencana Ahli Muda	Bapperida Prov. Kalteng

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Padi	Ton	55273025	1,359.73	1.359
Catatan Kesepakatan : 1. Realisasi tahun 2025 sebesar 806,48 ton (padi ladang dan padi sawah) 2. Target 2027 sebesar 1.359,73 ton merupakan target dinas yang sudah termuat dalam Renstra 3. Upaya pencapaian mengingat ada program cetak sawah rakyat dengan target 600 ha dan yang baru dibuka seluas 50 ha Provinsi : Capaian tahun 2025 143,12 ton GKG							
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	5981316	1.324,13	1.324
Catatan Kesepakatan : 1. Perda LP2B masih dalam proses perbaikan dari biro hukum provinsi 2. Target 1.324,13 merupakan target LP2B dan tidak termasuk lahan cadangan 3. KP2B yang masuk dalam SK Bupati 13.801,42 ha							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET

1.	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2
Catatan Pembahasan : 1. Untuk tahun 2026 kegiatan adalah saprodi padi sawah + ladang, serta jagung hibrida dilahan yang sudah eksis serta pengadaan sarana pendukung dengan pagu Rp. 499,1 juta 2. Tahun 2027 kegiatan merupakan lanjutan tahun 2026					
2.	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0
Catatan Pembahasan : Belum ada benih padi, tetapi ada kegiatan pengadaan SDG tanaman berkejasama dengan Brin					

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Kegiatan berupa sosialisasi Perda, monitoring dan pengawasan alih fungsi lahan sampai kepada tindak lanjut terhadap alih fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat					
2.	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Tahun 2027 untuk penyusunan peta dilakukan kerjasama dengan dinas Pekerjaan Umum dan Bapperida Kabupaten					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Kawasan Padi	Ha	2900000
2.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Rekomendasi Perlindungan LP2B dan Pengendalian alih Fungsi Lahan Pertanian	Rekomendasi	52
3.	KEMENTERIAN PERTANIAN	Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Tanaman Pangan	Unit	34120

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**3**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Eigh Manto	197909102005011009	Kepala Dinas	Dinas PKP Kabupaten Gunung Mas
2	Sepriati, S.Kom	197709182009032001	Penelaah Teknis kebijakan	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah
3	Bob harris satrio	19891221025211098	Penata Layanan Operasional	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
4	Frinetha	197812192005012012	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas PKP Kabupaten Gunung Mas
5	Widiastuti	197803302011012002	Analis Ketahanan Pangan	Dinas PKP Kabupaten Gunung Mas
6	Neneng Rahayu	198008062009032008	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	77.5	58.07	58.07
Catatan Kesepakatan : Disesuaikan dengan Renstra tahun 2025-2029							
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan ketentuan yang berlaku	%	50	100	55.65
Catatan Kesepakatan : Disesuaikan dengan target Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0

Catatan Pembahasan : terakomodir sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pagu renja tahun 2027 Rp. 6.102.400,- target 1 lokasi, dengan kegiatan berupa Sosialisasi B2SA dan pengolahan pangan lokal berbasis B2SA					
2.	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	0
Catatan Pembahasan : terakomodir pada sub kegiatan penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, pagu Rp 354.067.373 target 1 laporan, kegiatan berupa Gerakan Pangan Murah (GPM)					

2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Pagu renja tahun 2027 sebesar Rp. 12.809.829,- target 1 dokumen, berupa kegiatan penyaluran bantuan cadangan pangan					
2.	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3
Catatan Pembahasan : pagu renja tahun 2027 Rp. 14.559.350,- target 3 laporan dengan kegiatan kawasan mandiri pangan, lumbung pangan, dan penyaluran bantuan pangan					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	BADAN PANGAN NASIONAL	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Rekomendasi	1
2.	BADAN PANGAN NASIONAL	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	Data	1

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027 ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Govinda Arundhati, S.Si., M.Si	198305292009032001	Surveyor Pemetaan Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah
2	Ir. Agus Vriono, ST., MT	197608212010011005	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
3	Octo Habriandy Rasan, S.T., M.A.P	197810052010011018	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kab. Gunung Mas
4	Pitra Asi, S.T., M.A.P	197702012006042024	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda	Dinas Pekerjaan Umum Kab. Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	70	50	60
Catatan Kesepakatan : - Dilakukan penyesuaian target capaian.							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	70
Catatan Pembahasan : - Target capaian tahun 2027 sejumlah 70 unit rumah dengan pagu Rp 1.836.641.205 - Agar Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melakukan sosialisasi intensif terkait kebijakan PBG dan BPHTB					
2.	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0
Catatan Pembahasan : Fokus pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni.					

2. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0
Catatan Pembahasan : Fokus pada kegiatan penyediaan PSU					
2.	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1
Catatan Pembahasan : - Lokasi kegiatan di Kelurahan Kuala Kurun					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perdesaan	Unit	5709
2.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh dan Sanitasi Perdesaan	Hektar	66
3.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.006 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	Unit	83125
4.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	83125
5.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Hektar	66
6.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.001 Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	Unit	5708
7.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.001 PSU Perumahan Tapak Perkotaan	Unit	5708
8.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.008 Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Unit	83750
9.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.009 PSU Rumah Susun Perkotaan	Unit	3250
10.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.005 Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	68
11.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.004 PSU Hunian Vertikal di Kawasan Permukiman	Unit	500
12.	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	RBB.007 PSU Rumah Susun Perdesaan	Unit	1250

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**12**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Meiyori Sinthia Vini, S.T**	**197905232008032003**	**Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset**	**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah**
2	**Hardede, S.P**	**198412252024211001**	**Perencana Ahli Pertama**	**Bapperida Kabupaten Gunung Mas**
3	**Tete, SP**	**197907062007012023**	**Kabid Perindustrian**	**Disperindag Kabupaten Gunung Mas**
4	**Sekar Anggraesih, S.Pi**	**196905281996032005**	**Perencana Ahli Muda**	**Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	19,15	7,66	8.45
Catatan Kesepakatan : berdasarkan indikator tujuan RENSTRA dinas teknis kab. terkait							
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	%	7,95	-0,70	1.5
Catatan Kesepakatan : berdasarkan kesepakatan dengan PD kabupaten							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Pagu anggaran 2027 disepakati : Rp. 15.000.000,-					
2.	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2
Catatan Pembahasan : pagu anggaran 2027 sepakat, untuk target disepakati dari 100 dokumen menjadi 2 dokumen					

2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Pagu anggaran 2027 disepakati : Rp. 10.000.000					
2.	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	10
Catatan Pembahasan : Pagu anggaran 2027 : sepakat, revisi target dari 100 dokumen menjadi 10 dokumen					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**4**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	CLARA MONISSA, ST., M.Si	198306092015032001	Penata Ruang Ahli Pertama	BAPPERIDA PROV. KALTENG
2	INDRA SENTOZA, ST	198002232004011005	Perencana Ahli Muda	DPU Kab. Gunung Mas
3	MARKUS WIRO, ST	198703022011011002	Kabid Infrastruktur, SDA dan Kewilayahan	BAPPERIDA Kab. gunung Mas
4	ITA ABYTA SARI	199204022019032028	Penata Ruang Ahli Pertama	DPUPR PROV. KALTENG

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50	5	0
Catatan Kesepakatan : Ada kasus terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, namun belum bisa ditindaklanjuti karena elum ada Perda yang mengatur sanksi administratif.							
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1059	2	2
Catatan Kesepakatan : Sedang diajukan untuk pengusulan bantek RDTR di tahun 2026 untuk 2 Kecamatan, yaitu : 1. RDTR Kecamatan Rungan 2. RDTR Kecamatan Manuhing Jika Bantek disetujui di tahun 2026, maka RDTR dapat di Perda kan di Tahun 2027							
3.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21	5	5
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
4.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	31	15	0.15

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan : Tahun 2025, capaian 0,1 %							
5.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase kondisi mantap jalan	%	73	39,65	36.20
Catatan Kesepakatan : koreksi target tahun 2027							
6.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	38	13	13
Catatan Kesepakatan : sepakat							
7.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	%	64	50	50
Catatan Kesepakatan : sepakat							
8.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13440	100	100
Catatan Kesepakatan : sepakat							
9.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50	5	0
Catatan Kesepakatan : Ada kasus terkait pelanggaran pemanfaatan ruang, namun belum bisa ditindaklanjuti karena elum ada Perda yang mengatur sanksi administratif.							
10.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	1059	2	2
Catatan Kesepakatan : Sedang diajukan untuk pengusulan bantek RDTR di tahun 2026 untuk 2 Kecamatan, yaitu : 1. RDTR Kecamatan Rungan 2. RDTR Kecamatan Manuhing Jika Bantek disetujui di tahun 2026, maka RDTR dapat di Perda kan di Tahun 2027							
11.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	21	5	5
Catatan Kesepakatan : Sepakat							
12.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	31	15	0.15
Catatan Kesepakatan : Tahun 2025, capaian 0,1 %							
13.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Persentase kondisi mantap jalan	%	73	39,65	36.20

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan : koreksi target tahun 2027							
14.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	38	13	13
Catatan Kesepakatan : sepakat							
15.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	%	64	50	50
Catatan Kesepakatan : sepakat							
16.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	Ha	13440	100	100
Catatan Kesepakatan : sepakat							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	
Catatan Pembahasan :					

2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	
Catatan Pembahasan :					

3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	
Catatan Pembahasan :					

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	
Catatan Pembahasan :					

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	
Catatan Pembahasan :					

6. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	
Catatan Pembahasan :					
2.	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	
Catatan Pembahasan :					

7. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2
Catatan Pembahasan : Sepakat, sedang diajukan untuk pengusulan bantek RDTR di tahun 2026 untuk 2 Kecamatan, yaitu : 1. RDTR Kecamatan Rungan 2. RDTR Kecamatan Manuhing Jika Bantek disetujui di tahun 2026, maka RDTR dapat di Perda kan di Tahun 2027					
2.	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	0
Catatan Pembahasan : Belum ada Perda yang mengatur sanksi administrasi					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota (level prop)	Dokumen	2
2.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level prop)	Materi Teknis	5
3.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RDTR Prov/Kab/Kota (level kab/kota)	Dokumen	1059
4.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level kab/kota)	Materi Teknis	82
5.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Materi Teknis dan Ranperda RTRW Prov/Kab/Kota Hasil Bimbingan Teknis (level kab/kota)	Materi Teknis	65
6.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Dokumen Persetujuan Substansi RTRW Prov/Kab/Kota (level kab/kota)	Dokumen	39

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
7.	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	50

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

Sepakat, sedang diajukan untuk pengusulan bantek RDTR di tahun 2026 untuk 2 Kecamatan, yaitu :
1. RDTR Kecamatan Rungan
2. RDTR Kecamatan Manuhing

Jika Bantek disetujui di tahun 2026, maka RDTR dapat di Perda kan di Tahun 2027

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**8**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**7**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**14**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**36**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **23** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	EDI JUARDI	196907041997031010	KABID PKP	DISKOMINFOSANTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2	VINNA LIANA	199002132025212014	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
3	IKHLAS, S.T	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS
4	ROY LERRY SUSANTO, S.T	198010032009031002	PERENCANA AHLI MUDA	DISKOMINFOSANTIK KABUPATEN GUNUNG MAS

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	73	55	65
Catatan Kesepakatan : Target Daerah KPIP Tahun 2027 sebesar 65 (belum pernah mengisi Indeks KPIP)							
2.	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	1.8	1,6	1.6
Catatan Kesepakatan : Target Daerah Pemdi 1.6 (sesuai target RENSTRA PD)							
3.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	Nilai	73	55	65
Catatan Kesepakatan : Target Daerah KPIP Tahun 2027 sebesar 65 (belum pernah mengisi Indeks KPIP)							
4.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	1.8	1,6	1.6
Catatan Kesepakatan : Target Daerah Pemdi 1.6 (sesuai target RENSTRA PD)							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	86877
Catatan Pembahasan : Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik menjadi 86.877 orang yang mendapatkan informasi melalui website, media online dan media social, dll dengan Pagu Anggaran Tahun 2027 Rp. 2.913.582.382,- (sesuai dengan RENSTRA PD)					
2.	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Jumlah Target Strakom Tahun 2027 sebesar 1 Dokumen dengan Pagu Anggaran Tahun 2027 Rp. 10.000.000,-					

2. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	28
Catatan Pembahasan : Target Akses Internet Tahun 2027 sebanyak 28 (27 OPD, 1 UPTD) dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.804.074.289,- (sesuai dengan RENJA 2027 PD)					
2.	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1
Catatan Pembahasan : Target Tahun 2027 sebesar 1 Layanan dengan Pagu Anggaran Rp. 48.855.868,- (sesuai RENJA 2027)					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Unggulan Garuda	Lembaga	10
2.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Fasilitasi Dukungan Layanan Jaringan untuk Sekolah Rakyat	Lembaga	100
3.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Fasilitasi dan Dukungan Penyediaan Akses Internet Fixed Broadband untuk Koperasi Desa Merah Putih	Desa	246
4.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Fasilitasi Penyediaan Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Wilayah Swasembada Pangan	Badan Usaha	2
5.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Fasilitasi Penyediaan Layanan 4G pada wilayah Koperasi Merah Putih	Desa	450
6.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	BTS 4G	Titik	670
7.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	OM BTS 4G/Lastmile	Titik	3761
8.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	OM Akses Internet	Titik	32618
9.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	OM BTS 4G/Lastmile Papua dan Papua Barat	Titik	3539
10.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	OM Akses Internet Papua dan Papua Barat	Titik	4812
11.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Informasi	1
12.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	OM Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)	Unit	1
13.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Portal Pelayanan Publik	Sistem Informasi	1
14.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Portal Layanan Administrasi	Sistem Informasi	1
15.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Pengelolaan krisis komunikasi nasional	Kegiatan	50
16.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Pengelolaan komunikasi publik Makan Bergizi Gratis	Orang	13818750
17.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Pengelolaan Komunikasi Publik Program Direktif Presiden	Orang	112522900
18.	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	Rencana komunikasi strategis pemerintah tahunan	Dokumen	10

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	2
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	7
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	18

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **23** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	YOSEPH YULIAN, S.IP., M.A	198007312009031001	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2	TITIK SUMARNY, S.KOM	198210152006042020	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROV. KALTENG
3	IKHLAS, S.T	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS
4	ROY LERRY SUSANTO, S.T	198010032009031002	PERENCANA AHLI MUDA	DISKOMINFOSANTIK KABUPATEN GUNUNG MAS

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	50	48	52
Catatan Kesepakatan : sepakat target sebesar 52%							
2.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	50	48	52
Catatan Kesepakatan : sepakat target sebesar 52%							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET

1.	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	2
Catatan Pembahasan : sepakat target sebanyak 2 dokumen. usul pagu indikatif 2027 Rp.40.000.000					
2.	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	4
Catatan Pembahasan : sepakat target 4 laporan. usul pagu indikatif 2027 Rp. 15.000.000					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Pembinaan Kematangan Keamanan Siber Sektor Administrasi Pemerintahan: Pemerintah Daerah	Lembaga	38
2.	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	Penguatan Ekosistem Keamanan Siber dan Sandi pada Provinsi Baru	Lembaga	4

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**1**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**2**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Persandian pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Marinie Siwuh, SE**	**197803192009032001**	**Kassubag Penyusunan Program**	**Dinas Koperasi dan UMKM Prov Kalteng**
2	**Rosiana Lorensa**	**199611162022022001**	**Penelaah Teknis Kebijakan**	**Bapperida Kab Gumas**
3	**Andrey**	**197702072009031003**	**Perencana Ahli Muda**	**DTTKKUKM Kab. Gumas**
4	**Rahman Safari, ST**	**198610222025211021**	**Penata Layanan Operasional**	**Bapperida Prov Kalteng**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1.15	0,25	0.25
Catatan Kesepakatan : Disesuaikan volume koperasi di tahun 2027							
2.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3.30	0,55	0.55
Catatan Kesepakatan : Disesuaikan dengan jumlah pelaku usaha di tahun 2027							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET

1.	2.17.06.2.01.00 05	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	30
Catatan Pembahasan : Sub kegiatan ini tidak di anggarkan di Renja tahun 2027, karena target 2 indikator urusan koperasi dan UMKM tersebut bisa di capai dari sub kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sumber SDM Koperasi dengan pagu sebesar RP 42.840.296.					

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.17.07.2.01.00 18	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	30
Catatan Pembahasan : Sub kegiatan ada di renja 2027 dengan pagu sebesar RP. 42.840.296 Pekerjaan pelatihan UMKM					
2.	2.17.07.2.01.00 23	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan	1
Catatan Pembahasan : Akan dimasukan di renja perubahan dengan pagu sebesar RP. 50.000.000 Pekerjaan pendataan dan pembaharuan data UMKM					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Fasilitasi dan Pembinaan bagi Daerah untuk Pengembangan UMKM	Daerah	70
2.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Integrasi Data UMKM	Dokumen	3
3.	KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	Pemeliharaan Data UMKM	Daerah	70

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**3**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**3**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	MEIYORI SINTHIA VINI, ST	197905232008032003	PLT. KASUBBAG KEUANGAN DAN ASET	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROV. KALTENG
2	HARDEDE, S.P	198412252024211001	PERENCANA AHLI PERTAMA	BAPPERIDA GUNUNG MAS
3	TETE, SP	197907062007012023	PLT. KABID PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	DISPERINDAG KAB GUNUNG MAS
4	YUNIKE RAYA, SE	197306032006042016	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	BAPPERIDA PROV. KALTENG

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PERTUMBUHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (PBE) DI KAB/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU	triliun rupiah	15.50	15,50	0.0986
Catatan Kesepakatan : Berdasarkan data BPS Kab. Gunung Mas							
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	PRESENTASE PELAKU USAHA YANG MENJADI EKSPORTIR BARU	%	3.1	-	5
Catatan Kesepakatan : bertambah 1 pelaku usaha eksportir							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	100
Catatan Pembahasan : sepakat					

2. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1
Catatan Pembahasan : Pagu anggaran 2027 disepakati : Rp. 25.000.000					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**2**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	DIANA KARTIKA, SE	198512122014022002	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalteng
2	LIFRINA, ST	197602162005012008	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Prov. Kalteng
3	KRISTRIANTONI, SE., M.A.P	197612252007011011	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Aset	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Gunung Mas
4	NENENG RAYAHU, ST	198008062009032008	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kab. Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	24.55	14.04	4.39
Catatan Kesepakatan : Sepakat 5 Desa mandiri untuk tahun 2027 setara dengan 4,39 persen							
2.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	8.5		
Catatan Kesepakatan : Akan diperbaharui setelah mendapatkan Juknis terkait indikator yang dimaksud sambil menunggu regulasi dari pusat.							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Desa Mandiri	%	24.55	14.04	4.39
Catatan Kesepakatan : Sepakat 5 Desa mandiri untuk tahun 2027 setara dengan 4,39 persen							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	%	8.5		
Catatan Kesepakatan : Akan diperbaharui setelah mendapatkan Juknis terkait indikator yang dimaksud sambil menunggu regulasi dari pusat.							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Sub Kegiatan belum termuat dalam Renja 2027 namun apabila ada perubahan anggaran akan menjadi pertimbangan dilaksanakan sesuai dengan prioritas daerah.					
2.	2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Dokumen	0
Catatan Pembahasan : Pelaksanaan Pembinaan Umum dan Koordinasi Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan tidak direncanakan, karena di masing-masing sub kegiatan sudah termasuk kegiatan pembinaan dan koordinasi, sehingga sub kegiatan ini tidak dilaksanakan oleh OPD.					

2. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	114
Catatan Pembahasan : 1. Sub kegiatan berisikan pembayaran BPJS untuk perangkat desa. Namun hal tersebut akan disesuiakan kembali dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang tepat. 2. Pekerjaan untuk peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa ditargetkan 1 desa 1 orang dengan total peserta 114 Orang. 3. Pagu anggaran akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Kabupaten Gunung Mas.					
2.	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Rencana Pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp 216.865.776,70 yang digunakan untuk memfasilitasi Bimtek, Sosialisasi, Pelatihan tentang manajemen pemerintahan desa.					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	2
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	0

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Heru Setiawan, SP	197510162008021001	Perencana Ahli Muda	Disnakertrans Prov. kalteng
2	Dini fatimi, S.Hut	198309292025212011	Penata Layanan Operasional	Bapperida Prov. kalteng
3	Andrey	197702072009031003	Perencana Ahli Muda	DTTKKUKM Kab. Gumas
4	Octo Habriandy Rasan, St., M.AP	197810052010011018	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kab. Gumas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	5748850	12200	12200
Catatan Kesepakatan : Perlu adanya dukungan dari media sosial, Website dll							
2.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	orang	10288	5	37
Catatan Kesepakatan : Dilaksanakan di DTTKKUKM Kab. Gumas							
3.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	orang	2452337	100	9836
Catatan Kesepakatan : 1. Berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan jumlah pekerja 8836 2. Target Peningkatan sebesar 1000 sehingga total peserta jamsos ketenagakerjaan 9836 3. Perlu kegiatan pendukung jamsos ketenagakerjaan dan hubungan industrial							
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	5748850	12200	12200

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan : Perlu adanya dukungan dari media sosial, Website dll							
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	orang	10288	5	37
Catatan Kesepakatan : Dilaksanakan di DTTKKUKM Kab. Gumas							
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	orang	2452337	100	9836
Catatan Kesepakatan : 1. Berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan jumlah pekerja 8836 2. Target Peningkatan sebesar 1000 sehingga total peserta jamsos ketenagakerjaan 9836 3. Perlu kegiatan pendukung jamsos ketenagakerjaan dan hubungan industrial							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	37
Catatan Pembahasan : Dilaksanakan di DTTKKUKM Kab. Gumas					

2. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	10
Catatan Pembahasan : Perlu ada kegiatan pendukung hubungan industrial					
2.	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	9836
Catatan Pembahasan : 1. Berdasarkan wajib lapor ketenagakerjaan jumlah pekerja 8836 2. Target Peningkatan sebesar 1000 sehingga total peserta jamsos ketenagakerjaan 9836 3. Perlu kegiatan pendukung jamsos ketenagakerjaan dan hubungan industrial					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pelatihan Vokasi di Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan/atau OPD	Orang	10288
2.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	5748850
3.	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	Pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	Orang	2452337

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

1. Sepakat atas semua target dalam pembahasan
2. Perlu adanya data dari kedua belah pihak

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**5**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**3**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**3**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Heru Setiawan, SP	197510162008021001	Perencana Ahli Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Tengah
2	Andrey, ST.,M.Si	197702072009031003	Perencana Ahli Muda	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Gunung Mas
3	Noventy Ruryanti, ST	198611272025212025	Penata Layanan Operasional	Bapperida Prov. Kalimantan Tengah
4	Octo Habriandy Rasan, ST.,MT	197810052010011018	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kab. Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	83	37	37
Catatan Kesepakatan : perlu adanya kegiatan pendukung avokasi							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0
Catatan Pembahasan : perlu adanya kegiatan pendukung di kawasan transmigrasi					
2.	3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0
Catatan Pembahasan : tidak ada penempatan transmigrasi di kawasan transmigrasi					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Pengembangan SDM Transmigrasi	Orang	4955
2.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Penguatan Kapasitas Masyarakat Transmigrasi	Orang	500
3.	KEMENTERIAN TRANSMIGRASI	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat	23

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

1. Sepakat atas semua target dalam pembahasan
2. Perlu adanya data dari kedua belah pihak

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**1**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**2**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**3**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

https://sipd.kemendagri.go.id/rakortek/
DOK ID : 0891b623fb3c2a3a0b96e66cd5d19dd7
Sesuai dengan hasil Pembahasan Desk
Tanggal : 21 April 2026
Jam : 4:46:23 PM

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Tri Minarni	198810092010012001	Perencana Ahli Muda	Bapperida Prov Kalteng
2	Tifa Trikarini, ST	198211282009032001	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalteng
3	Rosiana Lorensa, S.IP	199611162022022001	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Kab Gunung Mas
4	Rambatomi, S.Pt	197411172005011009	Kabid PPKL	DLHK Kab Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	45	25	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.84	78.68	
Catatan Kesepakatan :							
3.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	%	45	25	
Catatan Kesepakatan :							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
4.	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.84	78.68	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	9
Catatan Pembahasan : a. Target IKLH Tahun 2025 sebesar 78,26, capaian IKLH Tahun 2025 sebesar 76,09 dengan rincian : - IKA target 74,70 capaian 67,89 - IKU target 79,50 capaian 81,75 - IKL target 82,06 capaian 79,71 b. Target IKLH pada Tahun 2027 yakni sebesar 78,68 Poin, dengan rincian - IKA 75,10 poin yang dipantau pada 4 lokasi (12 Titik dengan 2x Pemantauan/tahun) - IKU 80,10 poin yang dipantau pada 4 lokasi (4 Titik dengan 2x Pemantauan/tahun) - IKL 82,20 poin yang dipantau pada 1 lokasi (1 Titik dengan 1x Pemantauan/tahun) c. Lokasi pemantauan - IKA = Sungai Kahayan, Sungai Miri, Sungai Rungan dan Sungai Manuhing dengan metode pengambilan langsung ke lapangan - IKU = Perkantoran, Permukiman, Industri dan Transportasi dengan metode Passive Sampler - IKL = Kabupaten Gunung Mas - Pagu anggaran pemantauan kualitas lingkungan Hidup berada di Sub Kegiatan Pegambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan. Agar pagu anggaran tersebut disesuaikan ke Sub kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				
2.	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1
Catatan Pembahasan : Pemda Wajib Menyusun Dokumen SLHD dengan anggaran Rp 28.771.510,00 Dokumen RPPLH belum disusun dan kabupaten wajib menyusun sesuai dengan PP No 26 Tahun 2025					

2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	16
Catatan Pembahasan : Jumlah rekomendasi/persetujuan lingkungan/pertek yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir yakni sebanyak 16 (meliputi AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH, Addendum Amdal) dengan rincian - 2021 : Amdal â€¦.. UKL-UPL â€¦ Addendum â€¦ DELH â€¦. DPLH â€¦. Total â€¦.. - 2022 : Amdal 2 UKL-UPL â€¦ Addendum â€¦ DELH â€¦. DPLH â€¦. Total 2 - 2023 : Amdal â€¦.. UKL-UPL 2 Addendum â€¦ DELH â€¦. DPLH â€¦. Pertek 1 Total 3 - 2024 : Amdal 1 UKL-UPL 1 Addendum â€¦ DELH â€¦. DPLH â€¦. Pertek 7 Total 9 - 2025 : Amdal â€¦.. UKL-UPL â€¦ Addendum â€¦ DELH â€¦. DPLH â€¦. Pertek 2 Total 2 Pagu anggaran diusulkan sebesar Rp 10.000.000,00 Proses penilaian persetujuan lingkungan pendanaannya dari pihak pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan				
2.	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	19
Catatan Pembahasan : - Jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sebanyak 2 Orang - Jumlah PPNS sebanyak 0 Orang - Target badan usaha yang menaati persetujuan lingkungan hidup yakni 60% (9 Badan usaha) - Pengawasan dilakukan secara langsung (15 Badan usaha) dan tidak langsung (4 Badan Usaha) - Pagu anggaran sebesar Rp 104.206.941,00				

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Kualitas Air di Sungai dan Danau	Data	374
2.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Perhitungan Status Mutu Air	Data	374
3.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis yang dirawat dan dipelihara	Unit	374
4.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)	Unit	1
5.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Kualitas Udara Ambien	Data	514
6.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Stasiun pemantauan kualitas udara ambien (SPKUA) yang dirawat dan dipelihara	Unit	133
7.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Data dan Informasi Kualitas Tutupan Lahan	Data	514
8.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Lahan Rusak yang dipulihkan	Hektar	30
9.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Kebijakan dan regulasi pengurangan sampah	Rekomendasi	1
10.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular pengelolaan sampah	Kab/Kota	4
11.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi dan pembinaan bank sampah & kelompok masyarakat pengelola sampah	Kelompok Masyarakat	300
12.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha dalam menerapkan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah	Badan Usaha	250
13.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Fasilitas Bank Sampah Induk	Unit	3
14.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Aduan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang ditangani	Badan Usaha	160
15.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LH	Badan Usaha	160
16.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap sanksi administratif lingkungan hidup	Badan Usaha	300
17.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi kesiapsiagaannya dalam pengendalian kebakaran lahan	Badan Usaha	20
18.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Lembaga yang difasilitasi implementasi NDC	Lembaga	6
19.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan Konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO)	Lembaga	3
20.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Penurunan Konsumsi Hidroflurokarbon (HFC)	Lembaga	2
21.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Perhitungan capaian mitigasi perubahan iklim sektor limbah	Dokumen	3
22.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Aksi Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan	1
23.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Komunitas untuk Iklim	Kelompok Masyarakat	183
24.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Data inventarisasi GRK dan verifikasi serta registri yang termutakhirkan	Laporan	2
25.	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelenggaraan Sertifikasi Penurunan Emisi GRK Indonesia	Layanan	2

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	2
2.	JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3.	JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4.	JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5.	JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6.	JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	25

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Rabu** Tanggal **22** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	**Dimas Singgih, S.A, S.St.Pi**	**197812252010011003**	**JFT Perencana Ahli Muda**	**Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng**
2	**M. Tito Wijaya**	**200010142025041003**	**Penata Kelola Kelautan dan Perikanan**	**Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng**
3	**Eigh Manto, S.SPi., M.Si**	**19790902005011009**	**Kepala Dinas**	**Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Gunung Mas**
4	**Ikhlas, ST**	**197811282006041004**	**Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda**	**Bapperida Prov. Kalteng**
5	**Emellya Cintami, AMG**	**198604212025212005**	**Pengelola Layanan Operasional**	**Bapperida Prov. Kalteng**
6	**Maria Apriana**	**198304232009012003**	**Pengadministrasi Perkantoran**	**Bapperida Prov. Kalteng**

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	20410000	1.355	1330
Catatan Kesepakatan : Menyesuaikan target produksi budidaya produksi tahun 2027							
2.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	84	70	84
Catatan Kesepakatan : Sepakat menyesuaikan target nasional							
3.	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	Miliar Rupiah	657020	54	0
Catatan Kesepakatan : Data BPS Gunung Mas PDRB hanya menghitung data kompilasi sektor tidak menghitung masing-masing sektor khususnya sektor perikanan							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2
Catatan Pembahasan : Menyesuaikan Renstra 2025-2029 Kabupaten Gunung Mas					
2.	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	3
Catatan Pembahasan : Menyesuaikan Renstra 2025-2029 Kabupaten Gunung Mas					

2. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	8
Catatan Pembahasan : Menyesuaikan dengan target Renja 2027 dan berkolaborasi dengan sub kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat					
2.	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	3
Catatan Pembahasan : Menyesuaikan Renja 2027 Kabupaten Gunung Mas dan berkolaborasi dengan sub kegiatan pengolahan data statistik					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	Unit	100
2.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prasarana produksi perikanan budi daya ikan air tawar	Unit	3
3.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Revitalisasi Tambak Budi Daya Ikan Air Payau yang dibangun	Unit	75
4.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sarana budi daya ikan air payau yang disalurkan ke masyarakat	Unit	960
5.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat	Unit	1050
6.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Operasi Kapal Pengawas	Operasi	720
7.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Operasi Pesawat Patroli	Operasi	600
8.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Operasi Speedboat Pengawas	Operasi	210
9.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Unit usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	Lembaga	3912
10.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Laut	Rekomendasi	10
11.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Payau	Rekomendasi	10
12.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rekomendasi Tata Kelola Bidang Budi Daya Ikan Air Tawar	Rekomendasi	10
13.	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rekomendasi bidang lahan budi daya yang akan disertipikasi	Orang	2000

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**3**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**13**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **23** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Yoseph Yulian, S.IP., M.A	198007312009031001	Perencana Ahli Muda	Bapperida Provinsi Kalteng
2	Joko Tri Wahyono, SE	197706241997031006	Kasubbag Penyusunan Program	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah
3	Wiwin Eka Sinta	198509082010012020	Perencana Ahli Muda	Bapperida Kabupaten Gunung Mas
4	Sandra Cipta, S,Tr	198106392006041007	Kabid Perhubungan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	99.99	85	98
Catatan Kesepakatan : 1. Perlu dipastikan pelaksanaan FKLLAJ pada tingkat Kabupaten, terkoordinasi dengan baik sesuai dengan 5 Pilar RUNK 2. Untuk Segera menyusun Dokumen RAKLLAJ yang memuat pemetaan Daerah rawan Laka dan pengendalian lainnya yang menjadi pedoman masing-masing Pokja dalam pencapaian target QPI di daerah. 3. Mensosialisasikan secara masif kampanya aksi keselamatan mendukung sasaran meningkatnya keselamatan transportasi daerah.							
2.	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	Rasio	0.723	0,40	0.40

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
Catatan Kesepakatan : 1. untuk dapat menganggarkan sub kegiatan untuk mendukung peningkatan konektivitas transportasi dan peningkatan keselamatan di daerah yang mendukung outcome nasional, Dalam mendukung indikator kinerja urusan outcome nasional untuk dapat menyiapkan data dukung, realisasi dari target yang telah disampaikan. 2. Perlunya dukungan anggaran yang disesuaikan dengan demand dan kebutuhan daerah mendukung konektivitas transportasi , memperhatikan target prioritas daerah mendukung hilirisasi seperti KI/KEK/PKN 3. Untuk segera menyusun studi kebutuhan angkutan umum yang menjadi satu kesatuan dengan TATRALOK							
3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	%	99.99	85	98
Catatan Kesepakatan : 1. Perlu dipastikan pelaksanaan FKLLAJ pada tingkat Kabupaten, terkoordinasi dengan baik sesuai dengan 5 Pilar RUNK 2. Untuk Segera menyusun Dokumen RAKLLAJ yang memuat pemetaan Daerah rawan Laka dan pengendalian lainnya yang menjadi pedoman masing-masing Pokja dalam pencapaian target QPI di daerah. 3. Mensosialisasikan secara masif kampanya aksi keselamatan mendukung sasaran meningkatnya keselamatan transportasi daerah.							
4.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	Rasio	0.723	0,40	0.40
Catatan Kesepakatan : 1. untuk dapat menganggarkan sub kegiatan untuk mendukung peningkatan konektivitas transportasi dan peningkatan keselamatan di daerah yang mendukung outcome nasional, Dalam mendukung indikator kinerja urusan outcome nasional untuk dapat menyiapkan data dukung, realisasi dari target yang telah disampaikan. 2. Perlunya dukungan anggaran yang disesuaikan dengan demand dan kebutuhan daerah mendukung konektivitas transportasi , memperhatikan target prioritas daerah mendukung hilirisasi seperti KI/KEK/PKN 3. Untuk segera menyusun studi kebutuhan angkutan umum yang menjadi satu kesatuan dengan TATRALOK							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200
Catatan Pembahasan : 1. Tidak tersedianya anggaran untuk penyediaan perlengkapan jalan 2. Untuk dapat menyampaikan hasil rekomendasi FKLLAJ untuk mendapatkan dukungan anggaran berdasarkan skala prioritas 3. Perlu penyesuaian target dan pagu anggaran (review Renstra)					
2.	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0
Catatan Pembahasan : Tidak terdapat Terminal Tipe C					

2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0
Catatan Pembahasan : Tidak terdapat pelabuhan yang di kelola oleh Pemkab					
2.	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	30
Catatan Pembahasan : Untuk dapat menyediaakan pemenuhan SPM angkutan sungai dan fasilitas lainnya di Pelabuhan					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Perlengkapan Jalan (LRK)	Paket	550
2.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Perlengkapan Jalan Dukungan Zona Selamat Sekolan (ZoSS)	Paket	104
3.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Perlengkapan Jalan Dukungan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Paket	9
4.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Pekan Keselamatan Jalan (PKJ)	Promosi	33
5.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Sadar Lalu Lintas Anak Usia Dini (SALUD)	Promosi	34
6.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Penanganan Perlintasan Sebidang	Paket	8
7.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Taman Edukasi Lalu Lintas	Paket	1
8.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Unit	7688
9.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	27
10.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Unit	27
11.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor	Unit	34
12.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Jalan	Layanan	9
13.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Layanan Angkutan Jalan Perintis	Layanan	319
14.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis	Layanan	281
15.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Layanan Angkutan Barang Wilayah DTPK dan KSPP	Layanan	14
16.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Layanan Angkutan Kawasan Strategis Nasional (KSN)	Layanan	52
17.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Unit	3
18.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Pembangunan/Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	Unit	166
19.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Pembangunan/Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B	Unit	166
20.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Sungai	Unit	3
21.	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Perlengkapan Jalan	Unit	48935

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**2**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**2**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**21**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Selasa** Tanggal **21** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	HARMITA, S.K.M., M.M	197702071999032003	PERENCANA AHLI MUDA	BAPPERIDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2	FRAN YULIANO, S.K.M	196707271988031015	KETUA TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM	DINAS KESEHATAN PROVIINSI KALIMANTAN TENGAH
3	MARKUS TAPPANG, SKM	197711272000031004	KASUBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNG MAS

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	97	108.95	1
Catatan Kesepakatan : Target disepakati 1. Indikator yang dipakai oleh Kabupaten/Kota berubah dari Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi Jumlah Kematian Ibu							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98.8	100	100
Catatan Kesepakatan : Target disepakati 100 % dengan keaktivan peserta diatas 80%. Capaian pada tahun 2025 adalah 100.29 % dengan keaktivan peserta tahun 2025 adalah 87.49%.							
3.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Penemuan Kasus TBC	%	90	90	90
Catatan Kesepakatan : Sepakat 90% sesuai target provinsi							

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
4.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	16.3	11.3	11.3
Catatan Kesepakatan : Sepakat target sama dengan provinsi 11,3. Agar kabupaten dapat memaksimalkan dana BOK, Dana Desa, CSR dan sumber lainnya yang tidak mengikat							
5.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	60	50	50
Catatan Kesepakatan : Sepakat target 50 dibawah target provinsi 94,20 (dibawah target nasional 60). Gumas memiliki 2 RSUD(RSUD Kuala Kurun dan RS Pratama tumbang talaken)							
6.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	55	55	55
Catatan Kesepakatan : Sepakat target kabupaten 55 diatas provinsi 45. Agar kabupaten memastikan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2
Catatan Pembahasan : kegiatan mencakup relokasi puskemas sepang dan rehab puskesmas tumbang talaken Rp. 3.750.073.722 Agar kabupaten maksimalkan pengajuan Dana DAK untuk fasilitas kesehatan serta untuk alat kesehatan dan sarana penunjang melalui SOPHI dan alat kesehatan melalui INPULs					
2.	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	2
Catatan Pembahasan : Sepakat 2 unit yaitu operasional rumah sakit dan perbaikan sarana prasarana RSUD Kuala Kurun dan RSUD Tumbang Talaken Agar kabupaten juga maksimalkan pengajuan Dana DAK untuk fasilitas kesehatan serta untuk alat kesehatan dan sarana penunjang melalui SIHREN. Serta prioritaskan usulan KJSU-KIA (Kanker, Jantung, Stroke, Urinefro, Kesehatan Ibu dan Anak). untuk RE-akreditasi tahun 2028 pada RSUD Tbg.Talaken diupayakan menjadi paripurna sehingga target RS terakreditasi paripurna menjadi 100% bisa juga mengusulkan penugasan khusus untuk pemenuhan Nakes di RSUD tbg.Talaken					
3.	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3
Catatan Pembahasan : sepakat 3 paket Rp.7.474.549.180, kegiatan mencakup pengadaan obat jaminan kesehatan, BMHP CKG juga ada untuk Pengadaan obat bersumber dana DAK non Fisik. Kabupaten agar memastikan paket yang ada memuat 40 jenis obat esensial (100%). Optimalkan laporan LPLPO (Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat)					

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	40

Catatan Pembahasan : sepakat 40 orang Rp2.880.000.000 (15orang dokter internship +25 penugasan khusus) untuk pembayaran insentif nakes (belanja jasa)
untuk pelatihan/peningkatan kapasitas bisa menggunakan sub kegiatan peningkatan kapasitas SDMK, mendapatkan penugasan khusus dari kemenkes sebanyak 25 orang (Usulan 2026) Untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan penugasan khusus agar kedepannya tetap memaksimalkan pengajuan usulan untuk tenaga kesehatan penugasan khusus ke Kemenkes.
untuk penggajian P3K paruh waktu/outsourcing/PTT nakes agar menggunakan subkegiatan yang ada di program penunjang (Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor)

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

.

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pendayagunaan SDM Kesehatan di Puskesmas	Orang	6216
2.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pendayagunaan SDM Kesehatan di RS	Orang	530
3.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Penduduk penerima bantuan iuran PBI JK	Orang	96800000
4.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) penerima kontribusi bantuan iuran	Orang	49603175
5.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	60
6.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Pembangunan Peningkatan RS Berkualitas di Kab/Kota (Pemenuhan PHTC Bidang Kesehatan)	Angka	56
7.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	76
8.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kab/kota dengan pemenuhan obat dan vaksin tepat waktu dan tepat jumlah	%	76
9.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengendalian faktor risiko PTM	Kab/Kota	360
10.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Kabupaten/Kota yang mencapai target skrining PTM prioritas	Kab/Kota	360
11.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Penduduk yang mendapatkan pelayanan skrining dan deteksi dini PTM	%	60
12.	KEMENTERIAN KESEHATAN	Penduduk yang terdeteksi kasus PTM prioritas mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	45

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

Harmita, SKM, MM

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**6**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**2**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**4**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**12**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2027
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KABUPATEN GUNUNG MAS

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **23** Bulan **April** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

1. UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
2. UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
3. KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
4. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5. DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK KABUPATEN GUNUNG MAS

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	YOHANNA ENDANG S, S.T., M.T	197102071997032002	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	BAPPERIDA PROV. KALTENG
2	CHARLY L. ILLEM	198109122011011004	PLT. KASIE PENGELOLAAN STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI	DISKOMINFOSANTIK PROV. KALTENG
3	IKHLAS, S.T	197811282006041004	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	BAPPERIDA KAB. GUNUNG MAS
4	ROY LERRY SUSANTO, S.T	19801003200931002	PERENCANA AHLI MUDA	DISKOMINFOSANTIK KAB. GUNUNG MAS
5	ARIS SANDRO, S.E	199005152025211043	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	BAPPERIDA PROV. KALTENG

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	3	2.65	2.7
Catatan Kesepakatan : sepakat target sebesar 2,7 poin							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	84
Catatan Pembahasan : sepakat target sebesar 84%					
2.	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	25
Catatan Pembahasan : sepakat target sebesar 25% dengan usulan pagu indikatif 2027 Rp. 25.000.000					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
	N I H I L			

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1.	**JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG**	**:**	**1**
2.	**JUMLAH OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
3.	**JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS**	**:**	**1**
4.	**JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG**	**:**	**1**
5.	**JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME**	**:**	**2**
6.	**JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG**	**:**	**0**

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Gunung Mas** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.

KESELARASAN OUTCOME PRIORITAS MENDUKUNG ASTA CITA
HASIL KESEPAKATAN DESK URUSAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal									
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	14	14.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	2	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global									
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
							3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	100	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

3.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional									
					3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
							3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
							3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	10	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang									
					1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
							1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
				Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan									
					1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
							1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
							1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	70	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							
							1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
							1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
							1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	1.2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
							1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
					2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
							2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200	200.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
							2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6.	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya ketahanan pangan									
					2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							

							2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	0	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
							2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7.	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan									
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
							3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	3	3.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
							3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	8		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	3		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8.	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										

				Meningkatnya Produksi Pertanian									
					3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
							3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
							3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
9.	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										
				Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah									
					2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
							2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	4	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

10.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Lingkungan Hidup Berkualitas									
					2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
							2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	9	9.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
							2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	16	16.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	19	19.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
					1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							

							1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	70	70.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
							1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	5.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
12.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor									
					3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
							3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
13.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial									
					1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
							1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
							1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
14.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan									
					2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
							2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	37	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
							2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	9836	20.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

15.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa									
					2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
							2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabu	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
							2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	114	114.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
16.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)									
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
							2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	84	84.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

17.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).										
				Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah									
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
							2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	86877	80.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
							2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	28	38.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
18.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional									
					8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							

							8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Orang	70	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
							8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang	100	15.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	40	15.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
19.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah									

					2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
							2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
20.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM									
					2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
							2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	30		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
							2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
21.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional									
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							

							3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
							3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
22.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)									
					2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
							2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	14		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

23.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan									
					1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
							1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	58.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
24.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Kesehatan Untuk Semua									
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
							1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	17.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
							1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	40	0.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
25.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya								
					2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
							2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	15	15.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	5		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
							2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	13	13.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	3	3.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
26.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										

				Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital									
					2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
							2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
							2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d	Laporan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
27.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas									
					2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
							2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							

							2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan / Dokumen	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
28.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga									
					2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
							2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	50.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
							2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
29.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										

				Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat									
					2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
							2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
							2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	1	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
30.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.									
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
							1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	1000	1000.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	250	250.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	12	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
							1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
							1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
31.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa									
					2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							

							2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	27	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

Kabupaten Gunung Mas, 12 Juni 2026

Kepala BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 197801192006041013

KESELARASAN PRO-SN/TEMATIK PEMBANGUNAN
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	155	155.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	58	58.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2.	EKONOMI SYARIAH									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	86		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	12		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)								
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	33	33.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	600	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	25		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	1	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	25	20.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								

			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	30		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8.	MASYARAKAT ADAT									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)								

			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	300		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM									
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	9.500		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11.	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

12.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	30	0.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
13.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah								
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	50	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
14.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis								

			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	25		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
15.	PENANGGULANGAN BENCANA									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	4	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
16.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING									
	Kesehatan untuk Semua	Stunting								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	30		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	18	18.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	10	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
17.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN									
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian								
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Unit	6	6.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	Unit	6	6.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
18.	PENGARUSUTAMAAN GENDER									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	18	18.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	58	58.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
19.	PENGENDALIAN INFLASI									

	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
20.	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1739	310.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	25		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	347	310.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
21.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
22.	PERLINDUNGAN ANAK									

										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	9	5.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	20		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	7.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
23.	SEKOLAH RAKYAT									
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	710	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	16.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

Kabupaten Gunung Mas, 12 Juni 2026

Kepala BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 197801192006041013

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Pembangunan RPJMD dan Target Capaian Tahun 2027

Sesuai dengan kebijakan umum pembangunan daerah seperti yang dinyatakan pada sub bab maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah merupakan upaya lebih jauh untuk mencapai sasaran pembangunan dimaksud, pengelompokan bidang-bidang pembangunan dalam uraian mengenai arah kebijakan pembangunan daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada perumpunan urusan pemerintahan seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan nama-nama program disesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 dan pemutahirannya.

Program pembangunan Daerah berdasarkan urusan wajib dan pilihan adalah sebagai berikut :

I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:

1. Pendidikan, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Pendidikan;
   b. Program Pengembangan Kurikulum;
   c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;
   d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
   e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra.
2. Kesehatan, meliputi :
   a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
   b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
   c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
   d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
   b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
   c. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional;

d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
f. Program Pengembangan Permukiman;
g. Program Penataan Bangunan Gedung;
h. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya;
i. Program Penyelenggaraan Jalan;
j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, meliputi :
   a. Program Pengembangan Perumahan;
   b. Program Kawasan Permukiman;
   c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh;
   d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU);
   e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, meliputi :
   a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
   b. Program Penanggulangan Bencana;
   c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.
6. Sosial, meliputi :
   a. Program Pemberdayaan Sosial;
   b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
   c. Program Rehabilitasi Sosial;
   d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
   e. Program Penanganan Bencana;
   f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja, meliputi :
   a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
   b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
   c. Program Penempatan Tenaga Kerja;

d. Program Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi :
   a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
   b. Program Perlindungan Perempuan;
   c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
   d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak;
   e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
   f. Program Perlindungan Khusus Anak.
3. Pangan, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
   b. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
   c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
   d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.
4. Pertanahan, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Izin Lokasi;
   b. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
   c. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
   d. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee;
   e. Program Penetapan Tanah Ulayat;
   f. Program Pengelolaan Tanah Kosong;
   g. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah;
   h. Program Penatagunaan Tanah;
   i. Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah;
   j. Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan;
   k. Program Pengembangan Dan Pembinaan Sdm Dan Kelembagaan Pertanahan;
   l. Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan;
   m. Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan.
5. Lingkungan Hidup, meliputi :
   a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
   b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH;
g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
j. Program Pengelolaan Persampahan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :
   a. Program Pendaftaran Penduduk;
   b. Program Pencatatan Sipil;
   c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
   d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, meliputi :
   a. Program Penataan Desa;
   b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
   c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
   d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, meliputi :
   a. Program Pengendalian Penduduk;
   b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
   c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
9. Perhubungan, meliputi :
   a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
   b. Program Pengelolaan Pelayaran;
   c. Program Pengelolaan Penerbangan.
10. Komunikasi dan Informatika
   a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
   b. Program Aplikasi Informatika;

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi :
    a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
    b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
    c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
    d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
    e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
    f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
    g. Program Pengembangan UMKM.
12. Penanaman Modal, meliputi :
    a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    b. Program Promosi Penanaman Modal
    c. Program Pelayanan Penanaman Modal
    d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
    e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olah Raga, meliputi :
    a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
    b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
    c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
14. Statistik, meliputi :
    a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
15. Persandian, meliputi :
    a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
16. Kebudayaan, meliputi :
    a. Program Pengembangan Kebudayaan;
    b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
    c. Program Pembinaan Sejarah;
    d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
17. Perpustakaan, meliputi :
    a. Program Pembinaan Perpustakaan;
    b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.
18. Kearsipan, meliputi :
    a. Program Pengelolaan Arsip;
    b. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip;
    c. Program Perizinan Penggunaan Arsip.

III. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
   b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
   c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan;
   d. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
2. Pariwisata, meliputi :
   a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
   b. Program Pemasaran Pariwisata;
   c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
   d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
3. Pertanian, meliputi :
   a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
   b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
   c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
   d. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
   e. Program Perizinan Usaha Pertanian;
   f. Program Penyuluhan Pertanian.
4. Kehutanan, meliputi :
   a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
5. Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.
6. Perdagangan, meliputi :
   a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan;
   b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
   c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
   d. Program Pengembangan Ekspor;
   e. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
   f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
7. Perindustrian, meliputi :
   a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;
   b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota;

c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

8. Transmigrasi, meliputi :
   a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
   b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
   c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

IV. UNSUR PENDUKUNG

1. Sekretariat Daerah, meliputi :
   a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
   b. Program Perekonomian Dan Pembangunan.
2. Sekretariat Dewan, meliputi :
   a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

V. UNSUR PENUNJANG

1. Perencanaan, meliputi :
   a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
   b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Keuangan, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
   b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
   c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
3. Kepegawaian, meliputi :
   a. Program Kepegawaian Daerah.
4. Pendidikan dan Pelatihan, meliputi :
   a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
   a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
6. Pengelolaan Perbatasan, meliputi :
   a. Program Pengelolaan Perbatasan.

VI. UNSUR PENGAWASAN

1. Inspektorat Daerah, meliputi :
   a. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
   b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

1. Kecamatan, meliputi :
   a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
   b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
   c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
   d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
   e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

1. Kesatuan Bangsa Dan Politik, meliputi :
   a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
   b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
   c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
   d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya;
   e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Target capaian pembangunan Tahun 2027 yang telah ditetapkan di RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
Indikator Tujuan					
1	Indeks Infrastruktur	Indek	65.13	72.63	72.63
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2 eq	NA	974,049.19	974,049.19
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indek	73.88	75.12	75,12
4	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5,40	5,40
5	PDRB per Kapita	Rp. Juta /Kapita	67.08	72.00	72.00
6	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.21	4,90
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek	58.35	64.00	64.00
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indek	3.27	3.52	3.52

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2024	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
Indikator Sasaran					
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	54.75	54.75
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Poin	80.12	82.56	82.56
3	Persentase Desa Mandiri	%	8.77	14.04	14.04
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	69.33	78.68	78.68
5	Indeks Risiko Bencana	Poin	121.85	120.14	120.14
6	Indeks Pendidikan	Poin	64.84	67.66	67.66
7	Indeks Kesehatan	Poin	82.43	83.01	83.01
8	Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0.570	0.54	0.54
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	58.24	59.12	59.12
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61.74	65.60	65.60
11	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2.18	6.54	6.54
12	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	3.77	3.77
13	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	%	4.38	4.39	4.39
14	Gini Rasio	Poin	0.25	0.23	0,23
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	2.58	2,80
16	Nilai SAKIP	Poin	61.63	65.82	65.82
17	Indeks Pelayanan Publik	Poin	2.09	2.75	2.75
18	Indeks Integritas Nasional	Poin	71.53	76.75	76.75

Tabel 5.2. Target Indikator Kinerja Daerah Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**				
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	121,85	120,14	120,14
2	Kepadatan Penduduk	Orang/km 2	15,62	16,49	16,49
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,33	0,48	0,48
4	Jumlah Penduduk	Ribu Orang	145,54	153,61	153,61
5	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	-	22,00	22,00
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69,33	78,68	78,68
7	Persentase kondisi mantap jalan	%	34,65	39,65	39,65
8	Rasio Penduduk	%	110,49	109,69	109,69
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TON CO2 EQ	761.073,91	974.049,19	974.049,19
10	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	-	2,80	2,80
11	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	35,00	37,00	37,00
12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,81	4,75	4,75

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
13	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	53,48	54,49	54,49
14	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase	52,55	54,75	54,75
15	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	14,00	16,40	16,40
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,89	1,77	1,77
17	% RT Pengguna Listrik PLN	%	82,27	85,75	85,75
18	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	34,65	39,65	39,65
19	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,04	0,14	0,14
20	Persentase jumlah Rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	53,48	54,49	54,49
21	Meningkatnya Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN	Rasio	82,27	85,75	85,75
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
1	Indeks Kesehatan	Indeks	82,43	83,01	83,01
2	Indeks Pendidikan	poin	64,84	67,66	67,66
3	Persentase Kegiatan Forum Musyawarah di Tingkat Desa/Kelurahan	Angka	2,34	2,32	2,32
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,53	59,12	59,12
5	Kemampuan Literasi SD	%	49,49	56,99	56,99
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	58,53	58,82	58,82
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100,00	100,00	100,00
8	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	48,45	50,45	50,45
9	Capaian Kabupaten Layak Anak	Angka	500,00	541,00	541,00
10	Indeks Modal Manusia	Angka	73,88	75,12	75,12
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka	98,97	100,00	100,00
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	51,07	62,00	62,00
13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,70	65,60	65,60
14	Indeks Gini	Angka	0,25	0,23	0,23
15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	14,10	11,30	11,30
16	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	90,00	91,30	91,30
17	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	110,00	108,95	108,95
18	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	51,37	56,10	56,10

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	9,69	9,69
20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Angka	2,30	3,83	3,83
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	68,72	71,88	71,88
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48	5,40	5,40
23	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100,00	100,00	100,00
24	Indeks Literasi Digital	Angka	0,00	0,00	0,00
25	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,10	12,74	12,74
26	Tingkat Kemiskinan	(%)	5,68	4,21	4,21
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,58	73,95	73,95
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	0,00	52,18	52,18
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,57	0,54	0,54
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,12	2,58	2,58
31	Kemampuan Numerasi SMP	%	57,55	62,05	62,05
32	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	33,97	66,94	66,94
33	Kemampuan Literasi SMP	%	63,63	66,93	66,93
34	Kemampuan Numerasi SD	%	44,44	53,14	53,14
35	PDRB per kapita	Rp. Juta Per Tahun	67,08	72,00	72,00
36	indeks pembangunan manusia	Angka	73,88	75,12	75,12
37	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka	79,59	88,49	88,49
38	Pengeluaran Per Kapita	Angka	11,90	12,14	12,14
39	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,40	92,71	92,71
40	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	62,71	54,09	54,09
41	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	%	79,59	95,17	95,17
42	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	4,50	2,20	2,20
43	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	0,00	77,34	77,34
44	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	0,00	39,34	39,34
45	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	0,00	2,00	2,00
46	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	0,00	6,02	6,02
47	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	33,97	39,49	39,49
48	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	0,00	79,18	79,18
49	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	67,47	63,77	63,77

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
50	Iklim Keamanan SMP	Indeks	70,93	72,44	72,44
51	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,10	11,30	11,30
52	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	0,00	24,34	24,34
53	Meningkatnya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional	%	100,00	100,00	100,00
54	Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	71,37	67,83	67,83
55	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,63	66,92	66,92
56	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,55	60,62	60,62
57	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	44,44	44,80	44,80
58	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	53,81	56,33	56,33
59	Demand Satisfied (Kepuasan Keluarga)	%	94,10	94,40	94,40
60	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57,42	61,16	61,16
61	KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan)	%	8,30	5,60	5,60
62	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Indeks	62,20	79,60	79,60
63	Iklim Keamanan SD	Nilai	68,84	69,19	69,19
64	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%	96,29	97,75	97,75
65	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,97	99,14	99,14
66	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	79,59	95,17	95,17
67	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	2,30	6,40	6,40
68	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00
69	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	71,37	67,83	67,83
70	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00
71	Meningkatnya penanganan pasca bencana	%	100,00	100,00	100,00
72	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,93	72,44	72,44
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**				
1	Indeks Konektivitas Wilayah	Angka	80,12	82,56	82,56
2	Persentase Desa Mandiri	%	8,77	14,04	14,04
3	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	8,28	13,64	13,64
4	Indeks Infrastruktur	Angka	65,13	72,63	72,63
5	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,22	0,00	0,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	-	54,75	54,75
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,54	3,77	3,77
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,18	6,54	6,54
9	Angka Ketergantungan	%	44,13	44,32	44,32
10	Skor dan Predikat Inovasi Daerah	Angka	50,54	60,00	60,00
11	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Angka	25.011,00	27.506,00	27.506,00
12	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,65	1,71	1,71
13	Indeks Harga Konsumen	Indeks	0,00	0,00	0,00
14	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	33,05	33,25	33,25
15	Rasio Elektrifikasi	%	95,55	97,10	97,10
16	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,98	9,99	9,99
17	Kontribusi PDRB Kab. Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	%	4,38	4,39	4,39
18	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,28	8,45	8,45
19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,98	10,27	10,27
20	Meningkatnya kinerja BUMD yang optimal	Rasio	-0,17	0,5	0,5
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,35	64,00	64,00
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,27	3,52	3,52
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	61,63	65,82	65,82
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,09	2,75	2,75
5	Indeks Integritas Nasional	Persentase	0,00	76,75	76,75
6	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,23	3,38	3,38
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	76,58	87,08	87,08
8	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang	%	100,00	100,00	100,00
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**				
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,30	6,40	6,40
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,97	99,14	99,14
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				
1	Angka Kesakitan	Per 1000	401,1	405,00	405,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	4,90	10,97	10,97
AC	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota	%	23,38	23,38	23,38

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
	yang dilayani oleh jaringan irigasi				
2	Rasio rumah layak huni	%	0,19	0,18	0,18
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	36,78	38,81	38,81
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	3,32	6,07	6,07
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	7,95	11,14	11,14
AD	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	64,29	71,34	71,34
2	Cakupan pelayanan kebakaran	%	30,00	40,00	40,00
3	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100,00	100,00	100,00
7	Terselesaikannya konflik antar kelompok/umat beragama/suku dan lainnya	Skor	81,68	82,00	82,00
8	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00
AE	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				
1	Tingkat penurunan jumlah PPKS	%	90,00	90,00	90,00
2	Persentase penanganan PPKS	%	81,42	90,00	90,00
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00
AF	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				
1	Persentase penempatan tenaga kerja	%	96,68	96,85	96,85
2	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	%	0,35	0,40	0,40
3	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	8,00	3,40	3,40
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,31	1,40	1,40
AG	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	89,43	89,74	89,74
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,049	0,076	0,076

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
3	Persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,72	71,88	71,88
5	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase ARG Pada belanja Langsung	%	2,26	2,30	2,30
7	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	0,00	14,00	14,00
AH	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	0,00	75,00	75,00
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	12,00	20,00	20,00
AI	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,75	80,10	80,10
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,90	75,10	75,10
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	72,48	82,20	82,20
4	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	%	9,96	18,00	18,00
5	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	95,74	100,00	100,00
6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	79,03	80,00	80,00
AJ	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	85,39	92,00	92,00
2	Persentase penduduk usia di bawah 17 tahun yang wajib memiliki KIA	%	67,56	85,00	85,00
3	Pengguna Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Angka	3,00	20,00	20,00
4	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	40,00	55,00	55,00
5	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	96,41	98,25	98,25
AK	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	2,95	3,50	3,50
2	Terbinanya Masyarakat Desa mendapat Pelatihan Ekonomi Produktif	Orang	50,00	75,00	75,00
3	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	114,00	114,00	114,00
AL	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				
1	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,31	2,27	2,27
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	73,18	73,60	73,60

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun(Age Spesicifik Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	56,00	52,30	52,30
4	Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi(Unmet need)	%	4,87	4,57	4,57
5	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	49,05	56,25	56,25
6	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	59,00	63,80	63,80
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,10	88,90	88,90
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	10,90	14,70	14,70
AM	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				
1	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	60,00	75,00	75,00
2	Tingkat penurunan jumlah kecelakaan	%	40,00	70,00	70,00
AN	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96,70	97,10	97,10
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	0,00	25,00	25,00
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,74	0,00	0,00
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	71,00	76,32	76,32
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	87,50	87,80	87,80
7	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96,70	97,10	97,10
8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	26,30	35,25	35,25
9	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	0,00	1,82	1,82
AO	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				
1	Persentase UMKM yang naik skala usaha	%	36,00	38,00	38,00
2	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	0,00	100,00	100,00
AP	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				
1	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Angka	530.880.000 .000,00	642.364.800. 000,00	642.364.800 .000,00
2	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Kegiatan	379,00	417,00	417,00
3	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (TKI) dan (TKA) melalui Investasi Daerah	Orang	194,00	232,00	232,00
AQ	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,16	2,65	2,65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
AR	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	80,00	54,00	54,00
AS	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				
1	Persentase pelestarian warisan budaya	%	17,00	15,00	15,00
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	4,60	10,80	10,80
AT	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,17	61,00	61,00
2	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Orang	6.704,00	10.637,00	10.637,00
AU	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				
1	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	84,71	84,81	84,81
2	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan	Angka	63,62	65,25	65,25
3	Jumlah dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	Angka	8.993,00	9.200,00	9.200,00
AV	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	34,30	38,00	38,00
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.312,00	1.355,00	1.355,00
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	170,00	190,00	190,00
AW	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				
1	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1,12	1,12	1,12
AX	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				
1	LPE Sektor Pertanian	%	1,92	3,42	3,42
2	PDRB Sektor Pertanian	%	30,38	31,88	31,88
AY	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				
1	Indeks Perkembangan Harga	%	0,79	0,79	0,79
2	Pertumbuhan nilai neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa)	%	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	%	25,00	17,50	17,50
AZ	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				
1	Jumlah Kewirausahaan IKM Daerah	Wirausaha	402,00	456,00	456,00
2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Unit Usaha	402,00	456,00	456,00
BA	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				
1	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	75,00	75,00	75,00
2	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kepala Keluarga	300,00	400,00	400,00
BB	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**				
1	Capaian penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah	Nilai	90,84	90,92	90,92
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat	%	96,94	98,5	98,5
3	Persentase Reformasi Hukum	Indeks	87,36	87,50	87,50
4	Meningkatnya nilai belanja pengadaan barang dan jasa	%	91,03	96,0	96,0

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
5	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	87,00	87,10	87,10
BC	**5.01 - PERENCANAAN**				
1	Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00
BD	**5.02 - KEUANGAN**				
1	Rasio PAD	%	3,84	8,40	8,40
2	Meningkatnya tata kelola aset daerah	%	0,00	3,00	3,00
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP
4	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	97,125	98,025	98,025
BE	**5.03 - KEPEGAWAIAN**				
1	Indeks Merit Sistem	Angka	180,00	280,00	280,00
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40,00	58,00	58,00
BF	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70,71	80,00	80,00
2	Indeks Profesionalitas PPPK	Indeks	74,80	78,00	78,00
3	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	%	8,23	12,00	12,00
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Permintaan PD)	%	28,00	45,00	45,00
BG	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				
1	Meningkatnya Inovasi Daerah	Angka	5.054,00	60,00	60,00
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,54	60,00	60,00
3	Persentanse Hasil Riset Yang Diimplementasikan Dalam Kebijakan Daerah (Perda/Perkada/Inovasi/Program/Kegiatan)	%	0,00	100,00	100,00
BH	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**				
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	Skor	3,00	3,50	3,50
BI	**7.01 - KECAMATAN**				
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,15	87,05	87,05
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,15	87,05	87,05
3	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00
4	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	%	85,00	85,20	85,20
5	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00
6	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	%	85,00	85,25	85,25

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
7	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	%	85,73	100,00	100,00
8	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	85,00	86,00	86,00
9	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	95,00	95,00	95,00
11	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90,00	90,00	90,00
12	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	90,00	90,00	90,00
13	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	90,00	90,80	90,80
14	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	81,50	87,05	87,05
15	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00
16	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00
17	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi	%	100,00	100,00	100,00
18	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00	100,00
19	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90,00	90,00	90,00
20	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00	100,00
21	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90,00	90,00	90,00
22	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	90,00	100,00	100,00
23	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00
24	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	85,73	100,00	100,00
25	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00
26	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	100,00
27	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00
28	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik	%	90,00	90,00	90,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE DATA (2024)	Target 2027 (RPJMD 2025-2029)	Target 2027 (RKPD 2027)
29	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik	%	90,50	90,80	90,80
30	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00
31	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00
BJ	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	58,53	58,82	58,82
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		90,00	90,00	90,00
3	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,13	6,70	6,70
4	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	71,64	69,00	69,00
5	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	76,83	77,00	77,00
6	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	90,00	90,00	90,00
7	Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat	%	90,00	90,00	90,00

5.2. Rencana Kerja RKPD Tahun 2027

Program dan kegiatan prioritas Tahun 2027 berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan adalah seperti yang disajikan dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. GUNUNG MAS
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						**343.151.675.370,84**							**40.554.924.094,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**340.223.123.835,84**							**39.854.924.094,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**340.223.123.835,84**							**39.854.924.094,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**294.848.859.743,84**							**39.632.094,00**	
		Meningkatnya kinerja urusan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga						***294.848.859.743,84***							***39.632.094,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	294.848.859.743,84						100 %	39.632.094,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						123.189.000,00					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		50.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						123.189.000,00					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	83.190.600,00						5 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						83.190.600,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	83.190.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		5 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						9.999.600,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						9.999.600,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.999.600,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.999.600,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						290.767.385.650,24					ASN pada Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		29.632.094,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						290.767.385.650,24					ASN pada Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		29.632.094,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.582.943,00						12 Laporan	29.632.094,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2461 Orang/bulan		2461 Orang/bulan	2461 Orang/bulan	290.737.802.707,24						2461 Orang/bulan	0,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						290.737.802.707,24							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2461 Orang/bulan		2461 Orang/bulan	2246 Orang/bulan	290.737.802.707,24	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		2461 Orang/bulan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						29.582.943,00							29.632.094,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	16 Laporan	29.582.943,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		12 Laporan	29.632.094,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						53.673.054,00					SKPD, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						53.673.054,00					SKPD, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	33.791.400,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	9.940.827,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	9.940.827,00						0 Laporan	0,00	
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						33.791.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	33.791.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		0 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.940.827,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	9.940.827,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		0 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.940.827,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	9.940.827,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		0 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						267.327.000,00					Perangkat daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						267.327.000,00					Perangkat daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen		10 Dokumen	15 Dokumen	17.173.000,00						15 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang		9 Orang	10 Orang	250.154.000,00						11 Orang	0,00	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						17.173.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	20 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	17.173.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		15 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						250.154.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13 Orang		9 Orang	30 Orang	250.154.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		11 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.350.179.960,00					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
		Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.350.179.960,00					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.248.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.248.520,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	200 Laporan	404.293.000,00						200 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	141.085.440,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	136.200.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	450.105.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	85.000.000,00						1 Paket	0,00	
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						450.105.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	450.105.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						85.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						136.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	20 Paket	136.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						13.248.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	13.248.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		4 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						141.085.440,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	141.085.440,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						120.248.520,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.248.520,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						404.293.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan		200 Laporan	500 Laporan	404.293.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		200 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41.847.000,00					Perangkat daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah						41.847.000,00					Perangkat daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	4 Unit	41.847.000,00						5 Unit	0,00	
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.847.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	1 Unit	41.847.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		5 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.832.246.774,00					Perangkat Daerah , UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	192.720.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	332.161.950,00						12 Laporan	0,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						192.720.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	192.720.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		24 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						332.161.950,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	332.161.950,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		12 Laporan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						452.950.932,60					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah						452.950.932,60					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	216.216.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	14.490.000,00						22 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	0,00						22 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit		22 Unit	23 Unit	222.244.932,60						24 Unit	0,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	24 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		22 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14.490.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	10 Unit	14.490.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		22 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						222.244.932,60							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit		22 Unit	50 Unit	222.244.932,60	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		24 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						216.216.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	3 Unit	216.216.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.832.246.774,00					Perangkat Daerah , UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
		Persentase pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.832.246.774,00					Perangkat Daerah , UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.307.364.824,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.307.364.824,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.307.364.824,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**41.614.253.610,00**							**34.975.292.000,00**	
		Meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah						***41.614.253.610,00***							***34.975.292.000,00***	
			1.Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	99.17 %		99.13 %	99.14 %	41.614.253.610,00						99.15 %	34.975.292.000,00	
			2.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	96.43 %		94.66 %	95.17 %	41.614.253.610,00						95.63 %	34.975.292.000,00	
			3.Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	25.02 Persentase		3.25 Persentase	6.4 Persentase	41.614.253.610,00						12.39 Persentase	34.975.292.000,00	
		Persentase meningkatnya pengelolaan pendidikan tingkat sekolah dasar						25.047.399.070,00					Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar		27.160.561.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	227.000.000,00						3 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	5 Paket	250.154.000,00						5 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		60 Orang	60 Orang	299.470.200,00						70 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1333 Paket		1333 Paket	1333 Paket	1.999.672.000,00						1333 Paket	2.056.656.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	204.095.700,00						100 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		5 Ruang	5 Ruang	300.094.000,00						5 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.094.000,00						2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.094.000,00						2 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.094.000,00						2 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	168 Satuan Pendidikan		168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	201.576.000,00						168 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	168 Satuan Pendidikan		168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	300.387.470,00						168 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	168 Satuan Pendidikan		168 Satuan Pendidikan	168 Satuan Pendidikan	19.303.905.000,00						168 Satuan Pendidikan	19.303.905.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik		100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	105.880.700,00						100 Peserta Didik	200.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	168 Orang		168 Orang	168 Orang	100.000.000,00						168 Orang	200.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						300.094.000,00							400.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		2 Unit	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						300.094.000,00							500.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	1 Unit	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		2 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						300.094.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		2 Unit	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						250.154.000,00							300.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	1 Paket	250.154.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		5 Paket	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						105.880.700,00							200.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik		100 Peserta Didik	50 Peserta Didik	105.880.700,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		100 Peserta Didik	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						299.470.200,00							300.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	70 Orang		60 Orang	100 Orang	299.470.200,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		70 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						300.387.470,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	168 Satuan Pendidikan		168 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	300.387.470,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		168 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						19.303.905.000,00							19.303.905.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	168 Satuan Pendidikan		168 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	19.303.905.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		168 Satuan Pendidikan	19.303.905.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	168 Orang		168 Orang	177 Orang	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		168 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.999.672.000,00							2.056.656.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1333 Paket		1333 Paket	1333 Paket	1.999.672.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1333 Paket	2.056.656.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						204.095.700,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	204.095.700,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		100 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						201.576.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	168 Satuan Pendidikan		168 Satuan Pendidikan	177 Satuan Pendidikan	201.576.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		168 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						300.094.000,00							500.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang		5 Ruang	2 Ruang	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		5 Ruang	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						227.000.000,00							300.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	1 Paket	227.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		3 Paket	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar						13.637.713.840,00					Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		12.014.731.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.559.940,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket		5 Paket	7 Paket	300.094.000,00						7 Paket	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang		75 Orang	75 Orang	237.447.100,00						75 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	50 Paket	1.003.342.000,00						50 Paket	1.005.156.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	302.364.000,00						2 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.852.180,00						2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	301.002.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		5 Unit	5 Unit	302.364.000,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.094.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	58 Satuan Pendidikan		58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	9.609.575.000,00						58 Satuan Pendidikan	9.609.575.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Peserta Didik		50 Peserta Didik	50 Peserta Didik	50.000.000,00						50 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	58 Orang		58 Orang	58 Orang	90.000.000,00						58 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						300.852.180,00							500.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	1 Unit	300.852.180,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		2 Unit	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						302.364.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit		5 Unit	2 Unit	302.364.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		5 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						302.364.000,00							0,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	302.364.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		2 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						301.002.000,00							0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	2 Unit	301.002.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		3 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						300.094.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		2 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						300.094.000,00							0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	10 Paket		5 Paket	1 Paket	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		7 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						50.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	75 Peserta Didik		50 Peserta Didik	20 Peserta Didik	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		50 Peserta Didik	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						237.447.100,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	75 Orang		75 Orang	50 Orang	237.447.100,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		75 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						9.609.575.000,00							9.609.575.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	58 Satuan Pendidikan		58 Satuan Pendidikan	58 Satuan Pendidikan	9.609.575.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		58 Satuan Pendidikan	9.609.575.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						90.000.000,00							0,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	58 Orang		58 Orang	58 Orang	90.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		58 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						199.559.940,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	199.559.940,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						1.003.342.000,00							1.005.156.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	666 Paket	1.003.342.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		50 Paket	1.005.156.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						5.769.466.880,00					Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini		600.000.000,00	
		Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini						5.769.466.880,00					Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini		600.000.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	50 Paket	200.064.180,00						50 Paket	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.274.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	299.844.300,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	50 Paket	204.300.000,00						50 Paket	0,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	170 Satuan Pendidikan		170 Satuan Pendidikan	170 Satuan Pendidikan	102.150.000,00						170 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	150 Satuan Pendidikan		150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	2.797.950.000,00						150 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	148.036.400,00						30 Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		50 Orang	50 Orang	100.334.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	454.000.000,00						3 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit		4 Unit	4 Unit	300.094.000,00						4 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		2 Unit	3 Unit	503.940.000,00						3 Unit	0,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						300.094.000,00							600.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	4 Unit		4 Unit	2 Unit	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		4 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						204.300.000,00							0,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	2 Paket	204.300.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						148.036.400,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang		30 Orang	100 Orang	148.036.400,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		30 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						102.150.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	170 Satuan Pendidikan		170 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	102.150.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		170 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						2.797.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	150 Satuan Pendidikan		150 Satuan Pendidikan	155 Satuan Pendidikan	2.797.950.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		150 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						150.274.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	150.274.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						299.844.300,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	299.844.300,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						100.334.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		50 Orang	155 Orang	100.334.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		50 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						503.940.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		2 Unit	3 Unit	503.940.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		3 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						200.064.180,00							0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	50 Paket		50 Paket	2 Paket	200.064.180,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		50 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						454.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	4 Ruang	454.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		3 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						670.760.000,00					Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		0,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan		3 Satuan Pendidikan	3 Satuan Pendidikan	141.700.000,00						3 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75 Orang		75 Orang	75 Orang	28.752.000,00						75 Orang	0,00	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						141.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	3 Satuan Pendidikan		3 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	141.700.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		3 Satuan Pendidikan	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						28.752.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	75 Orang		75 Orang	5 Orang	28.752.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		75 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						25.047.399.070,00					Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar		27.160.561.000,00	
		Persentase meningkatnya pengelolaan pendidikan tingkat sekolah dasar						25.047.399.070,00					Usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar		27.160.561.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	100.788.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	300.094.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	-	454.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						100.788.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	2 Dokumen	100.788.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						300.094.000,00							500.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	1 Ruang	300.094.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						454.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-		-	3 Unit	454.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						13.637.713.840,00					Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		12.014.731.000,00	
		Persentase warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar						13.637.713.840,00					Usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		12.014.731.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	123.155.440,00						-	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	200.064.180,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	317.800.000,00						-	500.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						200.064.180,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	-		-	155 Orang	200.064.180,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						317.800.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	1 Ruang	317.800.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						123.155.440,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	58 Orang	123.155.440,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Persentase warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini						5.769.466.880,00					Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini		600.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	-	454.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	-	54.480.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						54.480.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	-		-	155 Orang	54.480.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						454.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	-		-	2 Ruang	454.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						670.760.000,00					Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		0,00	
		Persentase Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						670.760.000,00					Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	-		-	-	500.308.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal						500.308.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	-		-	1 unit	500.308.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**96.654.825,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan						***50.512.330,00***							***0,00***	
			1.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	50.512.330,00						100 Persentase	0,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						50.512.330,00					satuan pendidikan		0,00	
		Dokumen Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						50.512.330,00					satuan pendidikan		0,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.512.330,00						25 Orang	0,00	
		Kurikulum Muatan Lokal pendidikan yang ditetapkan						50.512.330,00					satuan pendidikan		0,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.512.330,00						25 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						50.512.330,00							0,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	25 Orang		25 Orang	10 Orang	50.512.330,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		25 Orang	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***50.512.330,00***							***0,00***	
			Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	-		-	100 %	46.142.495,00						-	0,00	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						46.142.495,00					-		0,00	
		-						46.142.495,00					-		0,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	-		-	-	46.142.495,00						-	0,00	
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						46.142.495,00							0,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	-		-	2 Dokumen	46.142.495,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**112.329.850,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan						***112.329.850,00***							***0,00***	
			1.Indeks Pemerataan Guru	100 Rasio		100 Rasio	100 Rasio	112.329.850,00						100 Rasio	0,00	
			1.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	112.329.850,00						100 Persentase	0,00	
			2.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	112.329.850,00						100 Persentase	0,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						112.329.850,00					guru		0,00	
		Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						112.329.850,00					guru		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	112.329.850,00						1 Dokumen	0,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						112.329.850,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	112.329.850,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Dokumen	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.888.466.660,00**							**700.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**2.888.466.660,00**							**700.000.000,00**	
5.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1.013.627.779,00**							**300.000.000,00**	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						***1.013.627.779,00***							***300.000.000,00***	
			1.Rasio Wirausaha Pemuda	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.013.627.779,00						100 Persentase	300.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						809.267.779,00					Pemuda dan Kepemudaan		250.000.000,00	
		Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor ,Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Tingkat Daerah						809.267.779,00					Pemuda dan Kepemudaan		250.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	172.887.369,00						-	0,00	
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	-	284.560.000,00						-	0,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	151.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	200.020.410,00						-	250.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						200.020.410,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	10 Orang	200.020.410,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						151.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	50 Orang	151.800.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota						284.560.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-		-	30 Orang	284.560.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						172.887.369,00							0,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	1 Dokumen	172.887.369,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						204.360.000,00					Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah		50.000.000,00	
		Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						204.360.000,00					Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah		50.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						154.360.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	1 Organisasi	154.360.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
6.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**1.624.838.881,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga						***1.624.838.881,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.624.838.881,00						100 Persentase	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						0,00					-		0,00	
		Jumlah Prasarana dan Sarana Olahraga kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan						0,00					-		0,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						4 Unit	0,00	
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						0,00							0,00	
		Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	5 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		4 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						118.960.000,00					Kejuaraan dan cabang olahraga		150.000.000,00	
		jumlah kejuaraan yang diselenggarakan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan.						118.960.000,00					Kejuaraan dan cabang olahraga		150.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	118.960.000,00						-	150.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						118.960.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	20 Orang	118.960.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						505.878.881,00					atlet		0,00	
		persentase atlet berprestasi						505.878.881,00					atlet		0,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	151.800.000,00						-	0,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	150.300.000,00						-	0,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	203.778.881,00						-	0,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						150.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	30 Orang	150.300.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						203.778.881,00							0,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	10 Orang	203.778.881,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						151.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	30 Orang	151.800.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						1.000.000.000,00					atlet		0,00	
		peningkatan prestasi, daya saing, dan partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta pengembangan industri keolahragaan dan pemanfaatan sarana prasarana.						1.000.000.000,00					atlet		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	1.000.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					1.000.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	3 Kerja Sama	1.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
7.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan						***250.000.000,00***							***250.000.000,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	250.000.000,00						100 Persentase	250.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						250.000.000,00					masyarakat dalam kepramukaan		250.000.000,00	
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya						250.000.000,00					masyarakat dalam kepramukaan		250.000.000,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00						1 Organisasi	250.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	250.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Organisasi	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	X							**40.084.875,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**40.084.875,00**							**0,00**	
8.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**40.084.875,00**							**0,00**	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	40.084.875,00						-	0,00	
			Persentase Capaian Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	-		-	100 %	40.084.875,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.084.875,00					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
		Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.084.875,00					Perangkat Daerah, UPTD dan Satuan Pendidikan		0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.084.875,00						1 Paket	0,00	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						40.084.875,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.084.875,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan serta penyediaan infrastruktur pendidikan yang merata dan memadai		1 Paket	0,00	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
		DINAS KESEHATAN						**154.852.424.783,24**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**154.852.424.783,24**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**154.852.424.783,24**							**0,00**	
9.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**87.522.497.710,24**							**0,00**	
		Presentase Cakupan Layanan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten						***87.522.497.710,24***							***0,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	87.522.497.710,24						100 %	0,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						264.455.700,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						264.455.700,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	26.640.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	237.815.700,00						4 Dokumen	0,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						237.815.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	237.815.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						26.640.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	26.640.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						82.846.287.244,24					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersusunya dokumen Keuangan Perangkat Daerah						82.846.287.244,24					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	68.052.200,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1123 Orang/bulan		1113 Orang/bulan	1115 Orang/bulan	82.778.235.044,24						1120 Orang/bulan	0,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						82.778.235.044,24							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1123 Orang/bulan		1113 Orang/bulan	1.115 Orang/bulan	82.778.235.044,24	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1120 Orang/bulan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						68.052.200,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	68.052.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						132.170.300,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		peningkatan Administrasi Aset yang tercatat dengan baik pada Perangkat daerah						132.170.300,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	132.170.300,00						2 Laporan	0,00	
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						132.170.300,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	132.170.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						52.720.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kinerja ASN pada Perangkat daerah						52.720.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	52.720.000,00						30 Orang	0,00	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						52.720.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	15 Orang	52.720.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.190.107.150,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Umum perangkat Daerah						1.190.107.150,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.660.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.712.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	831.214.150,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.810.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	260.546.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	31.165.000,00						1 Paket	0,00	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						260.546.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	260.546.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.165.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	31.165.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.810.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.810.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.660.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.660.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						26.712.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.712.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						831.214.150,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	831.214.150,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.246.697.316,00					-		0,00	
		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan						2.246.697.316,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	748.900.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.452.797.316,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00						2 Laporan	0,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						748.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	748.900.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.452.797.316,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.452.797.316,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						790.060.000,00					-		0,00	
		Terpeliharanya Fasilitas Penunjang Kinerja perangkat daerah						790.060.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	83.400.000,00						4 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	655.570.000,00						27 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	51.090.000,00						4 Unit	0,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						51.090.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	2 Unit	51.090.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						655.570.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	655.570.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		27 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						83.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	83.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
10.	1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**62.656.822.673,00**							**0,00**	
		Meningkatnyanya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***62.656.822.673,00***							***0,00***	
			1.Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	8.85 %		12.4 %	11.3 %	62.656.822.673,00						10.2 %	0,00	
			2.Angka Kematian Ibu	69 per 100.000 penduduk		109 per 100.000 penduduk	97 per 100.000 penduduk	62.656.822.673,00						86 per 100.000 penduduk	0,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						11.051.743.000,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah Kabupaten/ Kota						11.051.743.000,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19 Unit		19 Unit	19 Unit	109.650.000,00						19 Unit	0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	45 Unit		30 Unit	35 Unit	843.400.000,00						37 Unit	0,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	513.970.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit		6 Unit	7 Unit	2.222.850.000,00						7 Unit	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.050.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	17 Unit		17 Unit	17 Unit	2.894.873.000,00						17 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	25 Unit		19 Unit	20 Unit	417.000.000,00						22 Unit	0,00	
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.222.850.000,00							0,00	
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	7 Unit		6 Unit	2 Unit	2.222.850.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		7 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						2.894.873.000,00							0,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	17 Unit		17 Unit	17 Unit	2.894.873.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						417.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	25 Unit		19 Unit	3 Unit	417.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		22 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						843.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	45 Unit		30 Unit	35 Unit	843.400.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		37 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						109.650.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	19 Unit		19 Unit	17 Unit	109.650.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		19 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						4.050.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.050.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						513.970.000,00							0,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	513.970.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Paket	0,00	DINAS KESEHATAN
		Tercapainya Standar Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.096.970.073,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25525 Orang		24553 Orang	24796 Orang	493.000.000,00						25039 Orang	0,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9018 Orang		8678 Orang	8763 Orang	65.171.200,00						8848 Orang	0,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2382 Orang		2302 Orang	2322 Orang	565.263.600,00						2342 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	51.428.400,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	32.744.476.800,00						25 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	977.568.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	325.856.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.958.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.181.300,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.234.710.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	977.568.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	977.568.000,00						17 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	586.540.800,00						18 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	137.142.400,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	23.880.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.313.200.000,00						17 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.986.100.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1899 Orang		1819 Orang	1839 Orang	369.750.000,00						1859 Orang	0,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2515 Orang		2415 Orang	2440 Orang	685.100.000,00						2465 Orang	0,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	219 Orang		358 Orang	310 Orang	57.986.400,00						269 Orang	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2141 Orang		2318 Orang	2275 Orang	65.171.200,00						2231 Orang	0,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	219 Orang		358 Orang	310 Orang	586.540.800,00						269 Orang	0,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	710 Orang		690 Orang	695 Orang	24.201.600,00						700 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	170 Orang		220 Orang	215 Orang	33.127.573,00						200 Orang	0,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang		102 Orang	107 Orang	68.571.200,00						112 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57972 Orang		60412 Orang	59802 Orang	75.630.000,00						59192 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11611 Orang		11171 Orang	11281 Orang	31.800.000,00						11391 Orang	0,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64072 Orang		61632 Orang	62242 Orang	54.060.000,00						62852 Orang	0,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	153 Orang		213 Orang	198 Orang	119.800.000,00						183 Orang	0,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						685.100.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2515 Orang		2415 Orang	2.440 Orang	685.100.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2465 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						369.750.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1899 Orang		1819 Orang	1.839 Orang	369.750.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1859 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						565.263.600,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2382 Orang		2302 Orang	2.322 Orang	565.263.600,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2342 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						65.171.200,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9018 Orang		8678 Orang	8.763 Orang	65.171.200,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		8848 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						493.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25525 Orang		24553 Orang	24.796 Orang	493.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		25039 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						54.060.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	64072 Orang		61632 Orang	62.242 Orang	54.060.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		62852 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						31.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11611 Orang		11171 Orang	11.281 Orang	31.800.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		11391 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						75.630.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	57972 Orang		60412 Orang	59.802 Orang	75.630.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		59192 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						68.571.200,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	122 Orang		102 Orang	107 Orang	68.571.200,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		112 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						33.127.573,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	170 Orang		220 Orang	215 Orang	33.127.573,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		200 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						586.540.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	219 Orang		358 Orang	310 Orang	586.540.800,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		269 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						65.171.200,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	2141 Orang		2318 Orang	2.275 Orang	65.171.200,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2231 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						325.856.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	325.856.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						2.958.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.958.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						1.234.710.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.234.710.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						977.568.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	977.568.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						977.568.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	977.568.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						119.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	153 Orang		213 Orang	198 Orang	119.800.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		183 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						32.744.476.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	32.744.476.800,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		25 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						137.142.400,00							0,00	
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	137.142.400,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						3.986.100.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.986.100.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						3.313.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	17 Dokumen		17 Dokumen	17 Dokumen	3.313.200.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						23.880.000,00							0,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	23.880.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah						51.428.400,00							0,00	
		Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	51.428.400,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						57.986.400,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	219 Orang		358 Orang	310 Orang	57.986.400,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		269 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						24.201.600,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	710 Orang		690 Orang	695 Orang	24.201.600,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		700 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						586.540.800,00							0,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	586.540.800,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		18 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						977.568.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	977.568.000,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						22.181.300,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.181.300,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						114.957.600,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						114.957.600,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	114.957.600,00						19 Dokumen	0,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						114.957.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	114.957.600,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		19 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.096.970.073,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tercapainya Standar Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.096.970.073,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	463.284.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	2.022.292.800,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						463.284.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	463.284.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						2.022.292.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	2.022.292.800,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	DINAS KESEHATAN
11.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**567.013.200,00**							**0,00**	
		Meningkatkan mutu dan distribusii tenaga kesehatan						***567.013.200,00***							***0,00***	
			1.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %		100 %	100 %	567.013.200,00						100 %	0,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						359.998.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Merencanakan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						359.998.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	359.998.800,00						2 Dokumen	0,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						359.998.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	359.998.800,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						207.014.400,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tigkat Daerah Kabupaten/ Kota						207.014.400,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	207.014.400,00						50 Orang	0,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						207.014.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	30 Orang	207.014.400,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Orang	0,00	DINAS KESEHATAN
12.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**430.167.600,00**							**0,00**	
		Meningkatmya kualitas dan distribusisediaan farmasi,alat kesehatan, dan makanan minuman						***430.167.600,00***							***0,00***	
			1.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	430.167.600,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						164.410.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksanananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						164.410.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	164.410.800,00						4 Dokumen	0,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						164.410.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	164.410.800,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						97.756.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						97.756.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	97.756.800,00						2 Dokumen	0,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						97.756.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	97.756.800,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						168.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						168.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	65 Unit		53 Unit	55 Unit	168.000.000,00						60 Unit	0,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					168.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	65 Unit		53 Unit	55 Unit	168.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		60 Unit	0,00	DINAS KESEHATAN
13.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**1.069.075.600,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***1.069.075.600,00***							***0,00***	
			1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.069.075.600,00						100 Persentase	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						456.198.400,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Ko						456.198.400,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	456.198.400,00						4 Dokumen	0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						456.198.400,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	456.198.400,00	Kab. Gunung Mas	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						612.877.200,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						612.877.200,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	612.877.200,00						4 Dokumen	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						612.877.200,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	612.877.200,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	0,00	DINAS KESEHATAN
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN						**60.640.813.777,68**							**60.640.813.777,68**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.640.813.777,68**							**60.640.813.777,68**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**60.640.813.777,68**							**60.640.813.777,68**	
14.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.685.115.445,27**							**52.685.115.445,27**	
			-	-		-	-	52.685.115.445,27						-	52.685.115.445,27	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81.412.152,19					-		81.412.152,19	
		-						81.412.152,19					-		81.412.152,19	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	1.545.000,00						-	1.545.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	5.294.700,00						-	5.294.700,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	2.417.902,19						-	2.417.902,19	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	1.638.200,00						-	1.638.200,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.530.600,00						-	3.530.600,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	-	37.783.650,00						-	37.783.650,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	29.202.100,00						-	29.202.100,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.294.700,00							5.294.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	10 Dokumen	5.294.700,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	5.294.700,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						37.783.650,00							37.783.650,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	37.783.650,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	37.783.650,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.530.600,00							3.530.600,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	0 Dokumen	3.530.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	3.530.600,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.545.000,00							1.545.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.545.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	1.545.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.638.200,00							1.638.200,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	1.638.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	1.638.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						29.202.100,00							29.202.100,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	29.202.100,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	29.202.100,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						2.417.902,19							2.417.902,19	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	3 Dokumen	2.417.902,19	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	2.417.902,19	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						30.900.787.320,08					-		30.900.787.320,08	
		-						30.900.787.320,08					-		30.900.787.320,08	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	30.006.982,40						-	30.006.982,40	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	-	22.161.800,00						-	22.161.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	30.848.618.537,68						-	30.848.618.537,68	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						30.848.618.537,68							30.848.618.537,68	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	276 Orang/bulan	30.848.618.537,68	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	30.848.618.537,68	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						30.006.982,40							30.006.982,40	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	1 Dokumen	30.006.982,40	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	30.006.982,40	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						22.161.800,00							22.161.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-	1 Laporan	22.161.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	22.161.800,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		250.000.000,00	
		-						250.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	15 Orang	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	250.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						460.243.750,00					-		460.243.750,00	
		-						460.243.750,00					-		460.243.750,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	4.968.000,00						-	4.968.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	99.989.300,00						-	99.989.300,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	337.282.400,00						-	337.282.400,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	18.004.050,00						-	18.004.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						337.282.400,00							337.282.400,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	337.282.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	337.282.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.968.000,00							4.968.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	4.968.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	4.968.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						18.004.050,00							18.004.050,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	18.004.050,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	18.004.050,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						99.989.300,00							99.989.300,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	99.989.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	99.989.300,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.050.000.000,00					-		3.050.000.000,00	
		-						3.050.000.000,00					-		3.050.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	3.050.000.000,00						-	3.050.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.050.000.000,00							3.050.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	3.050.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	3.050.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.664.672.684,00					-		2.664.672.684,00	
		-						2.664.672.684,00					-		2.664.672.684,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.657.672.684,00						-	2.657.672.684,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	12 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	7.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.657.672.684,00							2.657.672.684,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.657.672.684,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	2.657.672.684,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						418.999.539,00					-		418.999.539,00	
		-						418.999.539,00					-		418.999.539,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	170.543.136,00						-	170.543.136,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	20.798.733,00						-	20.798.733,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	227.657.670,00						-	227.657.670,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.798.733,00							20.798.733,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	20.798.733,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	20.798.733,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						170.543.136,00							170.543.136,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	12 Unit	170.543.136,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	170.543.136,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						227.657.670,00							227.657.670,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	160 Unit	227.657.670,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	227.657.670,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						14.850.000.000,00					-		14.850.000.000,00	
		-						14.850.000.000,00					-		14.850.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	14.850.000.000,00						-	14.850.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						14.850.000.000,00							14.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	14.850.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	14.850.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.01.2.13	Penataan Organisasi						9.000.000,00					-		9.000.000,00	
		-						9.000.000,00					-		9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	-	9.000.000,00						-	9.000.000,00	
	1.02.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		-	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	9.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
15.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**2.503.165.276,41**							**2.503.165.276,41**	
		-	-	-		-	-	2.503.165.276,41						-	2.503.165.276,41	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.033.650.300,10					-		2.033.650.300,10	
		-						2.033.650.300,10					-		2.033.650.300,10	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	304.733.000,00						-	304.733.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	1.200.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-		-	-	297.463.000,00						-	297.463.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	-		-	-	37.454.150,00						-	37.454.150,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	-	194.000.150,10						-	194.000.150,10	
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						194.000.150,10							194.000.150,10	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-		-	20 Unit	194.000.150,10	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	194.000.150,10	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan						37.454.150,00							37.454.150,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	-		-	16 Unit	37.454.150,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	37.454.150,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.200.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	20 Unit	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	1.200.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						297.463.000,00							297.463.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	-		-	300 Unit	297.463.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	297.463.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						304.733.000,00							304.733.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	300 Unit	304.733.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	304.733.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						239.254.476,31					-		239.254.476,31	
		-						239.254.476,31					-		239.254.476,31	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	-	12.538.736,31						-	12.538.736,31	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	-	56.000.000,00						-	56.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	-	170.715.740,00						-	170.715.740,00	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.538.736,31							12.538.736,31	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-		-	1 Dokumen	12.538.736,31	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	12.538.736,31	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						56.000.000,00							56.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	56.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	56.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						170.715.740,00							170.715.740,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit	170.715.740,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	170.715.740,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						156.084.460,00					-		156.084.460,00	
		-						156.084.460,00					-		156.084.460,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	-	156.084.460,00						-	156.084.460,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						156.084.460,00							156.084.460,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-		-	1 Dokumen	156.084.460,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	156.084.460,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						74.176.040,00					-		74.176.040,00	
		-						74.176.040,00					-		74.176.040,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	-	74.176.040,00						-	74.176.040,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						74.176.040,00							74.176.040,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	-		-	1 Unit	74.176.040,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	74.176.040,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
16.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**5.452.533.056,00**							**5.452.533.056,00**	
		-	-	-		-	-	5.452.533.056,00						-	5.452.533.056,00	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						5.302.317.136,00					-		5.302.317.136,00	
		-						5.302.317.136,00					-		5.302.317.136,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	-	1.735.372.736,00						-	1.735.372.736,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	3.566.944.400,00						-	3.566.944.400,00	
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan						1.735.372.736,00							1.735.372.736,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-		-	1 Dokumen	1.735.372.736,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	1.735.372.736,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						3.566.944.400,00							3.566.944.400,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	164 Orang	3.566.944.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	3.566.944.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.215.920,00					-		150.215.920,00	
		-						150.215.920,00					-		150.215.920,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	-	150.215.920,00						-	150.215.920,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						150.215.920,00							150.215.920,00	
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-		-	62 Orang	150.215.920,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	150.215.920,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
17.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**0,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUALA KURUN
		DINAS PEKERJAAN UMUM						**61.180.247.450,36**							**183.696.589.273,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**61.180.247.450,36**							**183.696.589.273,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**50.425.247.450,36**							**170.522.089.273,00**	
18.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.318.247.450,36**							**22.331.089.273,00**	
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						***13.318.247.450,36***							***22.331.089.273,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	13.318.247.450,36						100 %	22.331.089.273,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						125.000.000,00					-		201.500.000,00	
		Meningkatnya keterpaduan Perencanaan, penganggaran & realisasi Anggaran						125.000.000,00					-		201.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00							5 Dokumen	6.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00							4 Dokumen	77.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00							5 Dokumen	6.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00							5 Dokumen	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00							5 Dokumen	5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00							14 Laporan	102.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							77.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	77.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.000.000,00							102.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		14 Laporan	102.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.814.597.450,36					-		11.586.747.863,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		meningkatnya pengelolaan keuangan SKPD						9.814.597.450,36					-		11.586.747.863,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	66.600.000,00						12 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan		120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	9.744.997.450,36						120 Orang/bulan	11.480.747.863,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.744.997.450,36							11.480.747.863,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan		120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	9.744.997.450,36	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		120 Orang/bulan	11.480.747.863,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.000.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	3.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						66.600.000,00							102.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	16 Laporan	66.600.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	102.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						72.000.000,00					-		120.500.000,00	
		Meningkatnya Tertib BMD Perangkat Daerah						72.000.000,00					-		120.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.000.000,00						2 Laporan	90.500.000,00	
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						52.000.000,00							90.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	90.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						306.000.000,00					-		557.600.000,00	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN						306.000.000,00					-		557.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00						1 Dokumen	73.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.000.000,00						10 Orang	204.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	150.000.000,00						2 Paket	250.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						36.000.000,00							73.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	73.100.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						100.000.000,00							204.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Orang	204.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						831.462.820,00					-		724.700.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik						831.462.820,00					-		724.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00						4 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	230.000.000,00						2 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	452.642.820,00						3 Paket	365.700.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	81.825.000,00						2 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	26.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.995.000,00						1 Paket	26.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.995.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.995.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	26.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						452.642.820,00							365.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	452.642.820,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	365.700.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						81.825.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	81.825.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	35.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						230.000.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	20 Laporan	230.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						507.362.180,00					-		6.750.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah						507.362.180,00					-		6.750.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	5 Unit	0,00						10 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	5.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	437.340.000,00						1 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		5 Unit	5 Unit	70.022.180,00						25 Unit	500.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						437.340.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	437.340.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar						0,00							5.600.000.000,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	5.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.022.180,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		5 Unit	2 Unit	70.022.180,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Unit	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						941.650.000,00					-		951.650.000,00	
		meningkatnya jasa penunjang urusan perangkat daerah						941.650.000,00					-		951.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	331.000.000,00						3 Laporan	331.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	610.000.000,00						1 Laporan	610.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	650.000,00						1 Laporan	10.650.000,00	
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						650.000,00							10.650.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	650.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	10.650.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						331.000.000,00							331.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	331.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	331.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						610.000.000,00							610.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	610.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	610.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						982.175.000,00					-		1.535.391.410,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Perangkat Daerah Dalam Kondisi Baik						982.175.000,00					-		1.535.391.410,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit		3 Unit	6 Unit	338.175.000,00						6 Unit	835.891.410,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	350.000.000,00						40 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	72.000.000,00						2 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit		59 Unit	59 Unit	72.000.000,00						59 Unit	74.500.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						72.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	72.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						350.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	350.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		40 Unit	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						338.175.000,00							835.891.410,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	6 Unit		3 Unit	4 Unit	338.175.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Unit	835.891.410,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.000.000,00							74.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit		59 Unit	64 Unit	72.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		59 Unit	74.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
19.	1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**4.600.000.000,00**							**8.000.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***4.600.000.000,00***							***8.000.000.000,00***	
			1.Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	14,33 %		10,07 %	11,14 %	4.600.000.000,00						12,20 %	8.000.000.000,00	
			2.Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	23,38 %		23,38 %	23,38 %	4.600.000.000,00						23,38 %	8.000.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.100.000.000,00					Masyarakat pada kawasan rawan banjir		2.950.000.000,00	
		meningkatnya luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota						1.100.000.000,00					Masyarakat pada kawasan rawan banjir		2.950.000.000,00	
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	1.700.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.500 KM		0.500 KM	0.500 KM	750.000.000,00						0.600 KM	900.000.000,00	
			Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM		5 KM	5 KM	350.000.000,00						5 KM	350.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	5 KM		5 KM	6 KM	350.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		5 KM	350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku						0,00							1.700.000.000,00	
		Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Unit	1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0113	Pembangunan Kanal Banjir						750.000.000,00							900.000.000,00	
		Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	0.500 KM		0.500 KM	0.5 KM	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		0.600 KM	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.500.000.000,00					Masyarakat Pengguna Air		5.050.000.000,00	
		luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi						3.500.000.000,00					Masyarakat Pengguna Air		5.050.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 KM		33 KM	33 KM	1.400.000.000,00						33 KM	1.600.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.750 KM		0.400 KM	0.200 KM	1.300.000.000,00						0.200 KM	1.300.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.200 KM		0.200 KM	0.200 KM	800.000.000,00						0.200 KM	800.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM		0.100 KM	0.100 KM	0,00						0.100 KM	1.350.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa						0,00							1.350.000.000,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	0 KM		0.100 KM	0.1 KM	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		0.100 KM	1.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						800.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.200 KM		0.200 KM	0.2 KM	800.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		0.200 KM	800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						1.300.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.750 KM		0.400 KM	0.4 KM	1.300.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		0.200 KM	1.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						1.400.000.000,00							1.600.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	33 KM		33 KM	33 KM	1.400.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		33 KM	1.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
20.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**6.600.000.000,00**							**8.700.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***6.600.000.000,00***							***8.700.000.000,00***	
			1.Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	55.50 %		54.15 %	54.49 %	6.600.000.000,00						54.83 %	8.700.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						6.600.000.000,00					-		8.700.000.000,00	
		meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						6.600.000.000,00					-		8.700.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	120 SR		120 SR	120 SR	600.000.000,00						120 SR	1.100.000.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik		5 Liter/Detik	5 Liter/Detik	5.000.000.000,00						5 Liter/Detik	5.100.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik		1 Liter/Detik	1 Liter/Detik	0,00						1 Liter/Detik	1.500.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						0,00							1.500.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	1 Liter/Detik		1 Liter/Detik	1.5 Liter/Detik	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Liter/Detik	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						5.000.000.000,00							5.100.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	5 Liter/Detik		5 Liter/Detik	2 Liter/Detik	5.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		5 Liter/Detik	5.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						600.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	120 SR		120 SR	10 SR	600.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		120 SR	1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
21.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.800.000.000,00**							**3.475.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						***1.800.000.000,00***							***3.475.000.000,00***	
			1.Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	40,83 %		38,13 %	38,81 %	1.800.000.000,00						39,48 %	3.475.000.000,00	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman dan layak						1.800.000.000,00					-		3.475.000.000,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	525.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						0,00							150.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Unit	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						300.000.000,00							525.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Unit	525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.800.000.000,00					-		3.475.000.000,00	
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman dan layak						1.800.000.000,00					-		3.475.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	1.500.000.000,00						-	2.800.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						1.500.000.000,00							2.800.000.000,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	200 Rumah Tangga	1.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		-	2.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
22.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**3.169.000.000,00**							**9.373.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung						***3.169.000.000,00***							***9.373.000.000,00***	
			1.Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.169.000.000,00						2 Unit	9.373.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						3.169.000.000,00					-		9.373.000.000,00	
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan						3.169.000.000,00					-		9.373.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	169.000.000,00						10 Dokumen	173.000.000,00	
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota						3.169.000.000,00					-		9.373.000.000,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	169.000.000,00						10 Dokumen	173.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						169.000.000,00							173.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	169.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		10 Dokumen	173.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		Jumlah bangunan gedung yang dibangun dan ditingkatkan						3.169.000.000,00					-		9.373.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.000.000.000,00						-	9.200.000.000,00	
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota						3.169.000.000,00					-		9.373.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.000.000.000,00						-	9.200.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000.000,00							9.200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Bangunan Gedung	3.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		-	9.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
23.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**0,00**							**500.000.000,00**	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata						***0,00***							***500.000.000,00***	
			1.Jumlah Bangunan Beserta Lingkungannya yang terbangun dan tekelola dengan baik	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	500.000.000,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						0,00					-		500.000.000,00	
		Jumlah bangunan gedung dan lingkungannya yang tertata dengan baik						0,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						0,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
24.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**19.750.000.000,00**							**117.200.000.000,00**	
		Meningkatnya aksebilitas masyarakat yang nyaman dan aman						***19.750.000.000,00***							***117.200.000.000,00***	
			1.Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	44,39 %		37,62 %	39,65 %	19.750.000.000,00						41,68 %	117.200.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						19.750.000.000,00					-		117.200.000.000,00	
		meningkatnya tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota						19.750.000.000,00					-		117.200.000.000,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan		1 Jembatan	1 Jembatan	1.000.000.000,00						1 Jembatan	1.000.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	738 KM		738 KM	738 KM	500.000.000,00						738 KM	500.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	10 KM		10 KM	10 KM	3.500.000.000,00						10 KM	24.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM		2 KM	2 KM	3.932.111.330,00						2 KM	5.700.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM		5 KM	5 KM	6.317.888.670,00						5 KM	37.500.000.000,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	60 Meter		30 Meter	60 Meter	4.500.000.000,00						60 Meter	47.000.000.000,00	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	50 Meter		50 Meter	50 Meter	0,00						50 Meter	0,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	30 Meter		30 Meter	30 Meter	0,00						30 Meter	1.500.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0043					Survey Kondisi Jalan/Jembatan					500.000.000,00							500.000.000,00	
						Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	738 KM		738 KM	738 KM	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		738 KM	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0051					Pemeliharaan Rutin Jalan					3.932.111.330,00							5.700.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2 KM		2 KM	10 KM	3.932.111.330,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		2 KM	5.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0053					Pembangunan Jalan					3.500.000.000,00							24.000.000.000,00	
						Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	10 KM		10 KM	1 KM	3.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		10 KM	24.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0057					Penggantian Jembatan					0,00							0,00	
						Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	50 Meter		50 Meter	50 Meter	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		50 Meter	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0058					Rehabilitasi Jembatan					0,00							1.500.000.000,00	
						Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	30 Meter		30 Meter	20 Meter	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		30 Meter	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0059					Rekonstruksi Jalan					6.317.888.670,00							37.500.000.000,00	
						Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	5 KM		5 KM	1 KM	6.317.888.670,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		5 KM	37.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0067					Pemeliharaan Rutin Jembatan					1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
						Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	1 Jembatan		1 Jembatan	1 Jembatan	1.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		1 Jembatan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						4.500.000.000,00							47.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	60 Meter		30 Meter	30 Meter	4.500.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		60 Meter	47.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
25.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**511.000.000,00**							**511.000.000,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***511.000.000,00***							***511.000.000,00***	
			1.Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	42,11 %		18,18 %	24,16 %	511.000.000,00						30,14 %	511.000.000,00	
			2.Jumlah Ketersediaan Data layanan Jasa Konstruksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	511.000.000,00						1 Dokumen	511.000.000,00	
			3.Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %		100 %	100 %	511.000.000,00						100 %	511.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	25 Orang		25 Orang	25 Orang	100.000.000,00						25 Orang	100.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	25 Orang		25 Orang	25 Orang	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Orang	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						235.000.000,00					-		235.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan						235.000.000,00					-		235.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	85.000.000,00						1 Layanan Informasi	85.000.000,00	
		Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya						235.000.000,00					-		235.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	85.000.000,00						1 Layanan Informasi	85.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi		1 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	85.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Layanan Informasi	85.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						176.000.000,00					-		176.000.000,00	
		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan						176.000.000,00					-		176.000.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	-	176.000.000,00						-	176.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						176.000.000,00							176.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	-		-	25 Paket Pekerjaan	176.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	176.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
26.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**415.000.000,00**							**335.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***415.000.000,00***							***335.000.000,00***	
			1.Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	95 %		95 %	95 %	415.000.000,00						95 %	335.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						80.000.000,00					-		0,00	
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota						80.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						80.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		1 Dokumen	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						135.000.000,00					-		135.000.000,00	
		Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang						135.000.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10 Layanan		10 Layanan	10 Layanan	75.000.000,00						10 Layanan	75.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	10 Layanan		10 Layanan	1 Layanan	75.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		10 Layanan	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
		Jumlah rencana pemanfaatan ruang yang dimohonkan						150.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**10.755.000.000,00**							**13.174.500.000,00**	
27.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**235.000.000,00**							**241.500.000,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***235.000.000,00***							***241.500.000,00***	
			1.Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0,17 %		0,18 %	0,18 %	235.000.000,00						0,18 %	241.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						50.000.000,00					-		51.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi						50.000.000,00					-		51.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	51.500.000,00	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							51.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	51.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						185.000.000,00					-		190.000.000,00	
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi						185.000.000,00					-		190.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah		4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	185.000.000,00						4 Unit Rumah	190.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						185.000.000,00							190.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	4 Unit Rumah		4 Unit Rumah	4 Unit Rumah	185.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		4 Unit Rumah	190.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
28.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**2.200.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***2.200.000.000,00***							***2.200.000.000,00***	
			1.Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	8.81 %		5.15 %	6.07 %	2.200.000.000,00						6.98 %	2.200.000.000,00	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						2.200.000.000,00					-		2.200.000.000,00	
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki						2.200.000.000,00					-		2.200.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	70 Unit Rumah		70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	2.200.000.000,00						70 Unit Rumah	2.200.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						2.200.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	70 Unit Rumah		70 Unit Rumah	70 Unit Rumah	2.200.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		70 Unit Rumah	2.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
29.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**8.320.000.000,00**							**10.733.000.000,00**	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***8.320.000.000,00***							***10.733.000.000,00***	
			1.Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,24 %		0,10 %	0,14 %	8.320.000.000,00						0,17 %	10.733.000.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						8.320.000.000,00					-		10.733.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						8.320.000.000,00					-		10.733.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	113.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	4.000.000.000,00						1 Lokasi	6.000.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	4.200.000.000,00						1 Lokasi	4.500.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						0,00							113.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Dokumen	113.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Laporan	120.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						4.000.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		1 Lokasi	2 Lokasi	4.000.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Lokasi	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						4.200.000.000,00							4.500.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1 Lokasi		1 Lokasi	5 Lokasi	4.200.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan akses perumahan dan permukiman layak huni dan penyediaan infrastruktur layanan dasar kewilayahan		1 Lokasi	4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**15.758.824.329,08**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.758.824.329,08**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.758.824.329,08**							**0,00**	
30.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.917.037.449,08**							**0,00**	
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						***14.917.037.449,08***							***0,00***	
			1.Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	14.917.037.449,08						100 %	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						87.000.000,00					masyarakat kabupaten gunung mas		0,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						87.000.000,00					masyarakat kabupaten gunung mas		0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	87.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						87.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	87.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.295.797.713,78					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						13.295.797.713,78					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	16.900.000,00						100 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	13.278.897.713,78						104 Orang/bulan	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.278.897.713,78							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	224 Orang/bulan	13.278.897.713,78	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		104 Orang/bulan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						16.900.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	16.900.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						34.233.200,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah padaPD						34.233.200,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	34.233.200,00						100 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						34.233.200,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan		100 Laporan	4 Laporan	34.233.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						549.730.866,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						549.730.866,00					Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	549.730.866,00						100 Dokumen	0,00	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						549.730.866,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100 Dokumen		100 Dokumen	12 Dokumen	549.730.866,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						511.785.078,00					satuan polisi pamong praja kab. gunung mas		0,00	
		Persentase penyediaan bahan/barang administrasi umum						511.785.078,00					satuan polisi pamong praja kab. gunung mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.555.500,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.747.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.440.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	230.169.527,10						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	192.504.800,00						4 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.750.900,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.660.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.957.350,90						1 Paket	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						23.957.350,90							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	23.957.350,90	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						192.504.800,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	192.504.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.660.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	6.660.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.555.500,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	7.555.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06.0007					Penyediaan Bahan/Material						15.750.900,00							0,00	
						Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	10 Paket	15.750.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008					Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.440.000,00							0,00	
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	20 Laporan	4.440.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						230.169.527,10							0,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	60 Laporan	230.169.527,10	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.747.000,00							0,00	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.747.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						94.672.530,00					instansi Satpol PP kab.Gunung Mas		0,00	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						94.672.530,00					instansi Satpol PP kab.Gunung Mas		0,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	79.250.000,00						2 Laporan	0,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.422.530,00						1 Laporan	0,00	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.08.0001					Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							0,00	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						79.250.000,00							0,00	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	79.250.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.422.530,00							0,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	5.422.530,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						343.818.061,30					Aset Satpol PP Kabupaten Gunung Mas		0,00	
						Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						343.818.061,30					Aset Satpol PP Kabupaten Gunung Mas		0,00	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	163.508.980,00						4 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	28.392.988,00						15 Unit	0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						163.508.980,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	15 Unit	163.508.980,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						28.392.988,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	25 Unit	28.392.988,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						343.818.061,30					Aset Satpol PP Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	151.916.093,30						-	0,00	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						151.916.093,30							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	151.916.093,30	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
31.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**612.978.600,00**							**0,00**	
		Persentase Penanganan Gangguan Trantibum						***612.978.600,00***							***0,00***	
			1.Indeks Pelayanan Publik.	3.12 Indeks		2.62 Indeks	2.75 Indeks	612.978.600,00						2.87 Indeks	0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						397.263.400,00					masyarakat kabupaten gunung mas		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	97.417.900,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	220.942.500,00						1 laporan	0,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						97.417.900,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	97.417.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						220.942.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 laporan		1 laporan	20 laporan	220.942.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						215.715.200,00					masyarakat kab. Gunung Mas		0,00	
		Terselenggaranya Penegakan Perda dn Perkada						215.715.200,00					masyarakat kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	68.668.600,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	71.087.400,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan		1 laporan	1 laporan	32.343.400,00						1 laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.615.800,00						1 Laporan	0,00	
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						32.343.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan		1 laporan	12 laporan	32.343.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						71.087.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	71.087.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						43.615.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	43.615.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						68.668.600,00							0,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	68.668.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						397.263.400,00					masyarakat kabupaten gunung mas		0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						397.263.400,00					masyarakat kabupaten gunung mas		0,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	-	37.565.000,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	21.184.800,00						-	0,00	
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	-		-	-	20.153.200,00						-	0,00	
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan						20.153.200,00							0,00	
		meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	-		-	3 Orang	20.153.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						21.184.800,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	12 Dokumen	21.184.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0026	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional						37.565.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	10 Orang	37.565.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
32.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**228.808.280,00**							**0,00**	
		Responsef Time Rate (Tingkat Waktu Tanggap) Penangganan Kebakaran						***228.808.280,00***							***0,00***	
			1.Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100 Menit		100 Menit	100 Menit	228.808.280,00						100 Menit	0,00	
			2.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	228.808.280,00						100 Persentase	0,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						228.808.280,00					masyarakat kabupaten gunung mas		0,00	
		Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran serta Non Kebakaran						228.808.280,00					masyarakat kabupaten gunung mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	111.656.280,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.880.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	105.272.000,00						3 Dokumen	0,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						105.272.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	105.272.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						111.656.280,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	111.656.280,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						11.880.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	11.880.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**7.275.543.304,20**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.275.543.304,20**							**0,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**7.275.543.304,20**							**0,00**	
33.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.937.078.393,20**							**0,00**	
		TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN						***5.937.078.393,20***							***0,00***	
			5.Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	5.937.078.393,20						100 %	0,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						117.421.636,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						117.421.636,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.697.100,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.697.100,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.404.100,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.623.336,00						12 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.404.100,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.404.100,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.697.100,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.697.100,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6.697.100,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.697.100,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						99.623.336,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	99.623.336,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.514.116.645,20					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.514.116.645,20					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.999.200,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.503.117.445,20						40 Orang/bulan	0,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.503.117.445,20							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan		40 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.503.117.445,20	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Orang/bulan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.999.200,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.999.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						97.499.220,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						97.499.220,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	6 Orang	43.855.140,00						6 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket		66 Paket	66 Paket	53.644.080,00						66 Paket	0,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						53.644.080,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	66 Paket		66 Paket	54 Paket	53.644.080,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		66 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						43.855.140,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang		6 Orang	5 Orang	43.855.140,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						379.955.650,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah						379.955.650,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1460 Dokumen		1460 Dokumen	1460 Dokumen	11.182.140,00						1460 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.356.600,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	193.025.600,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	35.778.000,00						4 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.055.400,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	31.420.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.024.190,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.113.720,00						4 Paket	0,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.024.190,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	13.024.190,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.113.720,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	55.113.720,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.778.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	35.778.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.420.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	31.420.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						11.182.140,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1460 Dokumen		1460 Dokumen	1460 Dokumen	11.182.140,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1460 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.055.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.055.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						193.025.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	193.025.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.356.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.356.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						451.800.712,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tercapainya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						451.800.712,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	152.690.500,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	289.110.212,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						152.690.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	152.690.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						289.110.212,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	289.110.212,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						382.981.630,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						382.981.630,00					Kantor BPBD Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	288.375.520,00						21 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		29 Unit	29 Unit	23.787.000,00						29 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.819.110,00						1 Unit	0,00	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						288.375.520,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	19 Unit	288.375.520,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		21 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.787.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	29 Unit		29 Unit	29 Unit	23.787.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		29 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						70.819.110,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.819.110,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1.331.767.811,00**							**0,00**	
		Terlaksananya pemulihan Sarana dan prasarana umum pasca bencana, meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, penanganan serta pemulihan bencana, melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan						***1.331.767.811,00***							***0,00***	
			1.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.331.767.811,00						100 Orang	0,00	
			2.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.331.767.811,00						100 Orang	0,00	
			3.Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 Orang		10 Orang	100 Orang	1.331.767.811,00						100 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		4.Jumlah Aparatur BPBD Kab/Kota dan lintas perangkat daerah Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.331.767.811,00						100 Orang	0,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					41.716.600,00						Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terwujudnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten					41.716.600,00						Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	170 Orang		170 Orang	170 Orang	41.716.600,00							170 Orang	0,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					41.716.600,00								0,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	170 Orang		170 Orang	1000 Orang	41.716.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		170 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					548.969.961,00						Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan		1 laporan	1 laporan	79.038.700,00						1 laporan	0,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	201.035.000,00						25 Unit	0,00	
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang		35 Orang	35 Orang	13.621.800,00						35 Orang	0,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	18.799.500,00						100 Orang	0,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					201.035.000,00								0,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	25 Unit		25 Unit	4 Unit	201.035.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		25 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota					18.799.500,00								0,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	250 Orang	18.799.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					13.621.800,00								0,00	
		Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	35 Orang		35 Orang	35 Orang	13.621.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		35 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					79.038.700,00								0,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan		1 laporan	1 laporan	79.038.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 laporan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					422.478.790,00						Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	2 Orang		2 Orang	2 Orang	65.795.600,00						2 Orang	0,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.783.800,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang		600 Orang	600 Orang	25.557.600,00						600 Orang	0,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang		0 Orang	0 Orang	102.281.140,00						0 Orang	0,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					38.783.800,00								0,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.783.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						102.281.140,00							0,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 Orang		0 Orang	0 Orang	102.281.140,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota						65.795.600,00							0,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	2 Orang		2 Orang	20 Orang	65.795.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						25.557.600,00							0,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	600 Orang		600 Orang	200 Orang	25.557.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		600 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						318.602.460,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terwujudnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						318.602.460,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	4 Orang		4 Orang	4 Orang	32.914.960,00						4 Orang	0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.122.300,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	249.565.200,00						2 Kegiatan	0,00	
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						36.122.300,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.122.300,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						32.914.960,00							0,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	4 Orang		4 Orang	10 Orang	32.914.960,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Orang	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						249.565.200,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	249.565.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Kegiatan	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						548.969.961,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terwujudnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						548.969.961,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	-	174.086.461,00						-	0,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	20.029.500,00						-	0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	42.359.000,00						-	0,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						20.029.500,00							0,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	20.029.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						174.086.461,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	25 Kawasan	174.086.461,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						42.359.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	200 Orang	42.359.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						422.478.790,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terwujudnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						422.478.790,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	-	190.060.650,00						-	0,00	
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						190.060.650,00							0,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	-		-	1 Laporan	190.060.650,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL						**9.892.823.546,36**							**10.007.137.278,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.892.823.546,36**							**10.007.137.278,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**9.892.823.546,36**							**10.007.137.278,00**	
35.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.691.876.901,76**							**6.769.604.307,00**	
		Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						***6.691.876.901,76***							***6.769.604.307,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	6.691.876.901,76						100 %	6.769.604.307,00	
		Persentase Terlaksannya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73.628.400,00					Dinas Sosial dan OPD Terkait		30.940.953,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	12.799.800,00						6 Dokumen	13.055.855,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.294.200,00						12 Laporan	0,00	
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						12.799.800,00							13.055.855,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	12.799.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	13.055.855,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						43.294.200,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	43.294.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.551.998.241,76					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan OPD Terkait		5.666.068.217,00	
		Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah						5.551.998.241,76					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan OPD Terkait		5.666.068.217,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.228.600,00						1 Laporan	2.957.796,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	30.094.300,00						16 Laporan	30.696.186,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.518.675.341,76						59 Orang/bulan	5.632.414.235,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.518.675.341,76							5.632.414.235,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		58 Orang/bulan	58/14 Orang/bulan	5.518.675.341,76	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		59 Orang/bulan	5.632.414.235,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.228.600,00							2.957.796,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.228.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	2.957.796,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						30.094.300,00							30.696.186,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan		16 Laporan	12 Laporan	30.094.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Laporan	30.696.186,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.944.000,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan OPD Terkait		1.982.880,00	
		Persentase Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah						1.944.000,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan OPD Terkait		1.982.880,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.944.000,00						12 Laporan	1.982.880,00	
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.944.000,00							1.982.880,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.944.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	1.982.880,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						26.180.760,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan OPD Terkait		26.704.375,00	
		Persentase Aparatur Yang Bersertifikasi						26.180.760,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas dan OPD Terkait		26.704.375,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		5 Orang	6 Orang	26.180.760,00						7 Orang	26.704.375,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		58 Paket	58 Paket	0,00						58 Paket	0,00	
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		58 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		58 Paket	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						26.180.760,00							26.704.375,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		5 Orang	2 Orang	26.180.760,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Orang	26.704.375,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						357.701.500,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		374.040.222,00	
		Persentase Tersediannya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum						357.701.500,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		374.040.222,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan		190 Laporan	200 Laporan	291.263.500,00						210 Laporan	306.273.462,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket		30 Paket	32 Paket	26.851.000,00						34 Paket	27.388.020,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		16 Paket	17 Paket	21.977.000,00						18 Paket	22.416.540,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	7 Paket	11.600.000,00						8 Paket	11.832.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		8 Paket	10 Paket	6.010.000,00						12 Paket	6.130.200,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.010.000,00							6.130.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		8 Paket	7 Paket	6.010.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Paket	6.130.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.851.000,00							27.388.020,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket		30 Paket	16 Paket	26.851.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		34 Paket	27.388.020,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.600.000,00							11.832.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		6 Paket	2 Paket	11.600.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Paket	11.832.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						21.977.000,00							22.416.540,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	20 Paket		16 Paket	13 Paket	21.977.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		18 Paket	22.416.540,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						291.263.500,00							306.273.462,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan		190 Laporan	310 Laporan	291.263.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		210 Laporan	306.273.462,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.907.500,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		72.325.650,00	
		Persentase Peningkatan Barang Milik Daerah						70.907.500,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		72.325.650,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	70.907.500,00						6 Unit	72.325.650,00	
	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						70.907.500,00							72.325.650,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	4 Unit	70.907.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Unit	72.325.650,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						296.287.500,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		302.213.250,00	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah						296.287.500,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		302.213.250,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	73.996.500,00						12 Laporan	75.476.430,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	220.791.000,00						12 Laporan	225.206.820,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		150 Laporan	170 Laporan	1.500.000,00						180 Laporan	1.530.000,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							1.530.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		180 Laporan	1.530.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						73.996.500,00							75.476.430,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	73.996.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	75.476.430,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						220.791.000,00							225.206.820,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	220.791.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	225.206.820,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						308.057.000,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		296.858.760,00	
		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan						308.057.000,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		296.858.760,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit		25 Unit	26 Unit	224.738.000,00						26 Unit	229.232.760,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		33 Unit	35 Unit	17.019.000,00						38 Unit	0,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						224.738.000,00							229.232.760,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit		25 Unit	22 Unit	224.738.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		26 Unit	229.232.760,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.019.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit		33 Unit	25 Unit	17.019.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		38 Unit	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi						6.672.000,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Persentase Penataan Organisasi						6.672.000,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60 Dokumen		58 Dokumen	58 Dokumen	6.672.000,00						58 Dokumen	0,00	
	1.06.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						6.672.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	60 Dokumen		58 Dokumen	58 Dokumen	6.672.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		58 Dokumen	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73.628.400,00					Dinas Sosial dan OPD Terkait		30.940.953,00	
		Persentase Terlaksannya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						73.628.400,00					Dinas Sosial dan OPD Terkait		30.940.953,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	14.234.400,00						-	14.519.098,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	-	3.300.000,00						-	3.366.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.234.400,00							14.519.098,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	6 Dokumen	14.234.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	14.519.098,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.300.000,00							3.366.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		-	2 Laporan	3.300.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	3.366.000,00	DINAS SOSIAL
		Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan						308.057.000,00					Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas		296.858.760,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	64.800.000,00						-	66.096.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	-	1.500.000,00						-	1.530.000,00	
	1.06.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.500.000,00							1.530.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-		-	25 Unit	1.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	1.530.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						64.800.000,00							66.096.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	8 Unit	64.800.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	66.096.000,00	DINAS SOSIAL
36.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**529.038.800,00**							**539.619.576,00**	
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kompentensinya Dalam Pelayanan Sosial						***529.038.800,00***							***539.619.576,00***	
			2.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	90 %		90 %	90 %	529.038.800,00						90 %	539.619.576,00	
		Persentase Terlaksananya kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						529.038.800,00					Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Relawan Sosial, dan Potensi Kesejahteraan Sosial Lainnya.		539.619.576,00	
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Keluarga		9 Keluarga	9 Keluarga	34.496.000,00						9 Keluarga	35.185.920,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	21.056.000,00						1 Lembaga	21.477.120,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	133 Orang		133 Orang	133 Orang	406.328.000,00						133 Orang	414.454.560,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	12 orang		12 orang	12 orang	67.158.800,00						12 orang	68.501.976,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						34.496.000,00							35.185.920,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Keluarga		9 Keluarga	120 Keluarga	34.496.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Keluarga	35.185.920,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						21.056.000,00							21.477.120,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	21.056.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Lembaga	21.477.120,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						406.328.000,00							414.454.560,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	133 Orang		133 Orang	12 Orang	406.328.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		133 Orang	414.454.560,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						67.158.800,00							68.501.976,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	12 orang		12 orang	12 orang	67.158.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 orang	68.501.976,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						529.038.800,00					Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Relawan Sosial, dan Potensi Kesejahteraan Sosial Lainnya.		539.619.576,00	
		Persentase Terlaksananya kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						529.038.800,00					Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Relawan Sosial, dan Potensi Kesejahteraan Sosial Lainnya.		539.619.576,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	1 Orang	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS SOSIAL
37.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**305.562.654,60**							**288.151.574,00**	
		persentase penyadang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya						***305.562.654,60***							***288.151.574,00***	
			3.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	305.562.654,60						100 %	288.151.574,00	
		Persentase Tercapainya pemenuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						251.911.254,60					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		229.516.874,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		22 Orang	24 Orang	17.426.600,00						26 Orang	17.775.132,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang		9 Orang	10 Orang	8.794.600,00						11 Orang	8.970.492,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		30 Orang	35 Orang	56.456.670,60						40 Orang	57.585.803,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang		280 Orang	310 Orang	36.673.200,00						340 Orang	38.406.664,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang		8 Orang	10 Orang	12.939.900,00						12 Orang	13.198.698,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang		10 Orang	12 Orang	3.833.600,00						14 Orang	3.910.272,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang		15 Orang	18 Orang	24.041.500,00						21 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang		140 Orang	150 Orang	63.877.175,00						160 Orang	65.154.718,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang		30 Orang	40 Orang	5.002.700,00						50 Orang	5.102.754,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang		10 Orang	12 Orang	3.833.600,00						14 Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang		11 Orang	13 Orang	8.016.800,00						15 Orang	8.177.136,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		7 Orang	9 Orang	3.933.600,00						11 Orang	4.012.270,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						63.877.175,00							65.154.718,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang		140 Orang	105 Orang	63.877.175,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		160 Orang	65.154.718,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						5.002.700,00							5.102.754,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang		30 Orang	20 Orang	5.002.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		50 Orang	5.102.754,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						56.456.670,60							57.585.803,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		30 Orang	20 Orang	56.456.670,60	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		40 Orang	57.585.803,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						24.041.500,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Orang		15 Orang	0 Orang	24.041.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		21 Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						8.016.800,00							8.177.136,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang		11 Orang	7 Orang	8.016.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Orang	8.177.136,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						3.933.600,00							4.012.270,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		7 Orang	5 Orang	3.933.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		11 Orang	4.012.270,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						8.794.600,00							8.970.492,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	13 Orang		9 Orang	8 Orang	8.794.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		11 Orang	8.970.492,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						36.673.200,00							38.406.664,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	380 Orang		280 Orang	400 Orang	36.673.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		340 Orang	38.406.664,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						12.939.900,00							13.198.698,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 Orang		8 Orang	6 Orang	12.939.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Orang	13.198.698,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						3.833.600,00							3.910.272,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang		10 Orang	6 Orang	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		14 Orang	3.910.272,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						17.426.600,00							17.775.132,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		22 Orang	18 Orang	17.426.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		26 Orang	17.775.132,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						3.833.600,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang		10 Orang	0 Orang	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		14 Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						57.485.000,00					Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		58.634.700,00	
		Persentase Tercapainya pemenuhan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						57.485.000,00					Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti		58.634.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.794.600,00						12 Dokumen	4.890.492,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		40 Orang	50 Orang	0,00						60 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang		150 Orang	160 Orang	32.991.200,00						170 Orang	33.651.024,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang		25 Orang	30 Orang	19.699.200,00						35 Orang	20.093.184,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						32.991.200,00							33.651.024,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang		150 Orang	50 Orang	32.991.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		170 Orang	33.651.024,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						19.699.200,00							20.093.184,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Orang		25 Orang	20 Orang	19.699.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		35 Orang	20.093.184,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		40 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Orang	0,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						4.794.600,00							4.890.492,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.794.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	4.890.492,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						251.911.254,60					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		229.516.874,00	
		Persentase Tercapainya pemenuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						251.911.254,60					Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		229.516.874,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	-	7.081.309,00						-	7.222.935,00	
	1.06.04.2.01.0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan						7.081.309,00							7.222.935,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	-		-	25 Orang	7.081.309,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	7.222.935,00	DINAS SOSIAL
38.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**2.223.038.940,00**							**2.267.499.718,00**	
		Persentase Tercapainya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota						***2.223.038.940,00***							***2.267.499.718,00***	
			4.Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	90 %		90 %	90 %	2.223.038.940,00						90 %	2.267.499.718,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						2.223.038.940,00					Masyarakat Miskin dan Rentan Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota		2.267.499.718,00	
		Persentase Tercapainya pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kab/kota						2.223.038.940,00					Masyarakat Miskin dan Rentan Sosial di Tingkat Kabupaten/Kota		2.267.499.718,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9500 Orang		9500 Orang	9500 Orang	2.150.816.900,00						9500 Orang	2.193.833.238,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang		360 Orang	370 Orang	23.138.040,00						380 Orang	23.600.800,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	750 Usulan		550 Usulan	600 Usulan	49.084.000,00						650 Usulan	50.065.680,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						2.150.816.900,00							2.193.833.238,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	9500 Orang		9500 Orang	9500 Orang	2.150.816.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9500 Orang	2.193.833.238,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						23.138.040,00							23.600.800,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang		360 Orang	350 Orang	23.138.040,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		380 Orang	23.600.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						49.084.000,00							50.065.680,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	750 Usulan		550 Usulan	4 Usulan	49.084.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		650 Usulan	50.065.680,00	DINAS SOSIAL
39.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**137.972.650,00**							**140.732.103,00**	
		Persentase KLB yang tertangani						***137.972.650,00***							***140.732.103,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			S.Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	90 %		90 %	90 %	137.972.650,00						90 %	140.732.103,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						25.415.150,00					Masyarakat Umum di Wilayah Kabupaten/Kota Terutama Yang Berada di Daerah Rawan Bencana		25.923.453,00	
		Persentase Korban Bencana Alam,Sosial dan/atau Non Alam Yang Terpenuhinya Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana						25.415.150,00					Masyarakat Umum di Wilayah Kabupaten/Kota Terutama Yang Berada di Daerah Rawan Bencana		25.923.453,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		400 Orang	450 Orang	25.415.150,00						500 Orang	25.923.453,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						25.415.150,00							25.923.453,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		400 Orang	100 Orang	25.415.150,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		500 Orang	25.923.453,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						112.557.500,00					Masyarakat Umum di Wilayah Kabupaten/Kota Terutama Yang Berada di Daerah Rawan Bencana		114.808.650,00	
		Persentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiaagaan Bencana Kabupaten/Kota						112.557.500,00					Masyarakat Umum di Wilayah Kabupaten/Kota Terutama Yang Berada di Daerah Rawan Bencana		114.808.650,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang		9 Orang	9 Orang	112.557.500,00						9 Orang	114.808.650,00	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						112.557.500,00							114.808.650,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Orang		9 Orang	8 Orang	112.557.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Orang	114.808.650,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**8.537.515.812,56**							**8.813.720.555,98**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.537.515.812,56**							**8.813.720.555,98**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**6.692.697.509,56**							**6.732.370.423,98**	
40.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.692.013.889,56**							**5.644.498.423,98**	
		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						***5.692.013.889,56***							***5.644.498.423,98***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	5.692.013.889,56						100 %	5.644.498.423,98	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.343.390,00					Perangkat Daerah		40.000.000,00	
		Terlaksannya Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						37.343.390,00					Perangkat Daerah		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.262.600,00						1 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.806.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.002.590,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	31.272.200,00						1 Laporan	33.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.002.590,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.002.590,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.262.600,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.262.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	2.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.806.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.806.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						31.272.200,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	31.272.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.648.140.930,92					Perangkat Daerah		4.648.140.930,92	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.648.140.930,92					Perangkat Daerah		4.648.140.930,92	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.200.000,00						2 Laporan	8.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		42 Orang/bulan	44 Orang/bulan	4.638.940.930,92						45 Orang/bulan	4.638.940.930,92	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.638.940.930,92							4.638.940.930,92	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		42 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.638.940.930,92	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		45 Orang/bulan	4.638.940.930,92	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.200.000,00							8.200.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.200.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	8.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						44.027.279,77					Perangkat Daerah		75.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						44.027.279,77					Perangkat Daerah		75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		6 Orang	7 Orang	30.192.760,00						8 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		55 Paket	57 Paket	13.834.519,77						58 Paket	30.000.000,00	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						13.834.519,77							30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		55 Paket	1 Paket	13.834.519,77	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		58 Paket	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						30.192.760,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9 Orang		6 Orang	2 Orang	30.192.760,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Orang	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						276.511.600,00					Perangkat Daerah		381.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						276.511.600,00					Perangkat Daerah		381.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.176.000,00						4 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	206.758.500,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.279.500,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	13.347.600,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.950.000,00						1 Paket	8.500.000,00	
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.950.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.950.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	8.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.347.600,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	13.347.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.176.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	7.176.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						41.279.500,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.279.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						206.758.500,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	206.758.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						105.760.810,00					Perangkat Daerah		113.000.000,00	
		Meningkatnya Kebutuhan Barang Milik Daerah yang diadakan						105.760.810,00					Perangkat Daerah		113.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.400.000,00						1 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	35.360.810,00						5 Unit	68.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						70.400.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	70.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.360.810,00							68.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	35.360.810,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	68.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						359.738.312,00					Perangkat Daerah		194.550.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						359.738.312,00					Perangkat Daerah		194.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	132.156.000,00						1 Laporan	13.250.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	226.382.312,00						1 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00						1 Laporan	1.300.000,00	
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.200.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	1.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						132.156.000,00							13.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	132.156.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	13.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						226.382.312,00							180.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	226.382.312,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	180.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.491.566,87					Perangkat Daerah		237.307.493,06	
						Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						220.491.566,87					Perangkat Daerah		237.307.493,06	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.184.073,81						1 Unit	60.000.000,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	119.814.894,74						29 Unit	119.814.894,74	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	42.072.900,00						2 Unit	42.072.900,00	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		15 Unit	16 Unit	15.419.698,32						17 Unit	15.419.698,32	
	2.08.01.2.09.0001					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.072.900,00							42.072.900,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	42.072.900,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	42.072.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						119.814.894,74							119.814.894,74	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		29 Unit	35 Unit	119.814.894,74	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		29 Unit	119.814.894,74	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.419.698,32							15.419.698,32	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 Unit		15 Unit	10 Unit	15.419.698,32	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		17 Unit	15.419.698,32	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						43.184.073,81							60.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	43.184.073,81	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
41.	**2.08.02**					**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**311.771.900,00**							**85.000.000,00**	
						Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***300.000.000,00***							***65.000.000,00***	
							999.Persentase anggaran responsif gender (ARG)	100 %		100 %	100 %	300.000.000,00						100 %	65.000.000,00	
							-	-		-	-	11.771.900,00						-	20.000.000,00	
	2.08.02.2.01					Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		70.000.000,00	
						Terlaksananya Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	35.000.000,00	
		Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	25.000.000,00						-	35.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota					25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	10 Lembaga	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0016	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	53 Orang	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						300.000.000,00					Masyarakat		65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						300.000.000,00					Masyarakat		65.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	275.000.000,00						-	35.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	100 Orang	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						275.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	4 Lembaga	275.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota						11.771.900,00					-		20.000.000,00	
		-						11.771.900,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	11.771.900,00						-	20.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						11.771.900,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	5 Lembaga	11.771.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
42.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**183.124.060,00**							**150.492.500,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***149.244.460,00***							***150.492.500,00***	
			999.Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %		100 %	100 %	149.244.460,00						100 %	150.492.500,00	
			Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	-		-	100 Persen	33.879.600,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.2.01					Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						33.879.600,00					Masyarakat		50.000.000,00	
						-						33.879.600,00					Masyarakat		50.000.000,00	
							Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	33.879.600,00						-	50.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0009					Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						33.879.600,00							50.000.000,00	
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	1 Kegiatan	33.879.600,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						149.244.460,00					Masyarakat		150.492.500,00	
						Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						149.244.460,00					Masyarakat		150.492.500,00	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	-	11.329.600,00						-	11.329.600,00	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	-	47.464.000,00						-	47.464.000,00	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	-	5.625.000,00						-	5.625.000,00	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	16.153.900,00						-	16.153.900,00	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	13.800.000,00						-	13.800.000,00	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	48.751.960,00						-	50.000.000,00	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	-	6.120.000,00						-	6.120.000,00	
	2.08.03.2.02.0010					Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						16.153.900,00							16.153.900,00	
						Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	15 Orang	16.153.900,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	16.153.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0011					Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						47.464.000,00							47.464.000,00	
						Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	47.464.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	47.464.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0012					Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						13.800.000,00							13.800.000,00	
						Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	13.800.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	13.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0013					Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						11.329.600,00							11.329.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	11.329.600,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	11.329.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						48.751.960,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	48.751.960,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						5.625.000,00							5.625.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	5.625.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	5.625.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						6.120.000,00							6.120.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	15 Orang	6.120.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	6.120.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
43.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**107.588.100,00**							**169.360.000,00**	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						***107.588.100,00***							***169.360.000,00***	
			999.Pembelajaran Keluarga(PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	20 Indeks		12 Indeks	14 Indeks	107.588.100,00						16 Indeks	169.360.000,00	
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						107.588.100,00					Masyarakat		169.360.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	38.228.100,00						1 Lembaga	100.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						38.228.100,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	38.228.100,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		1 Lembaga	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						107.588.100,00					Masyarakat		169.360.000,00	
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						107.588.100,00					Masyarakat		169.360.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	-	69.360.000,00						-	69.360.000,00	
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						69.360.000,00							69.360.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	-		-	2 Lembaga	69.360.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	69.360.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
44.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**25.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya peningkatan data gender dan anak						***25.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.530 Indeks		0.555 Indeks	0.546 Indeks	25.000.000,00						0.540 Indeks	30.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	-	25.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0008	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	4 Lembaga	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**50.000.000,00**							**100.000.000,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***50.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			999.Indeks Perlindungan Anak (IPA)	60.00 Indeks		55.10 Indeks	56.10 Indeks	50.000.000,00						57.10 Indeks	100.000.000,00	
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
46.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**248.199.560,00**							**258.019.500,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dam perlakuan salah lainnya terhadap anak						***248.199.560,00***							***258.019.500,00***	
			999.Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	0.108 %		0.065 %	0.076 %	248.199.560,00						0.086 %	258.019.500,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						68.120.400,00					Masyarakat		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						68.120.400,00					Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	68.120.400,00						-	100.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						68.120.400,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	3 Kegiatan	68.120.400,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						130.079.160,00					Masyarakat		143.019.500,00	
		Persentase Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						130.079.160,00					Masyarakat		143.019.500,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	34.615.000,00						-	34.615.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	8.692.100,00						-	8.692.100,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	3.750.000,00						-	3.750.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	9.681.500,00						-	16.997.800,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	44.375.960,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	5.210.000,00						-	5.210.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	13.554.600,00						-	13.554.600,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	10.200.000,00						-	10.200.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						9.681.500,00							16.997.800,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	13 Orang	9.681.500,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	16.997.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						44.375.960,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	44.375.960,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						34.615.000,00							34.615.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	34.615.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	34.615.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						3.750.000,00							3.750.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	3.750.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	3.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.2.02.0020					Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						8.692.100,00							8.692.100,00	
						Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	8.692.100,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	8.692.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0021					Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						10.200.000,00							10.200.000,00	
						Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	10.200.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	10.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0022					Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						5.210.000,00							5.210.000,00	
						Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	5.210.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	5.210.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0023					Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						13.554.600,00							13.554.600,00	
						Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	15 Orang	13.554.600,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	13.554.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		115.000.000,00	
						Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		115.000.000,00	
							Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	38.261.800,00						-	100.000.000,00	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	11.738.200,00						-	15.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015					Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						11.738.200,00							15.000.000,00	
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	3 Lembaga	11.738.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0018					Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota						38.261.800,00							100.000.000,00	
						Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	1 Laporan	38.261.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14					**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**1.844.818.303,00**							**2.081.350.132,00**	
47.	**2.14.02**					**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**351.500.000,00**							**376.900.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						***351.500.000,00***							***376.900.000,00***	
			999.TFR (Total Fertility Rate)	2.24 %		2.28 %	2.27 %	351.500.000,00						2.26 %	376.900.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						129.000.000,00					Masyarakat		168.900.000,00	
		Tersedianya data terpilah kependudukan cakupan daerah						129.000.000,00					Masyarakat		168.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.400.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						26.400.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.400.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						222.500.000,00					Masyarakat		208.000.000,00	
		Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						222.500.000,00					Masyarakat		208.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	172.500.000,00						-	148.000.000,00	
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	-	50.000.000,00						-	60.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						172.500.000,00							148.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	23 Kampung KB Kelompok	172.500.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	148.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	23 Kampung KB	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tersedianya data terpilah kependudukan cakupan daerah						129.000.000,00					Masyarakat		168.900.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-		-	-	30.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	72.600.000,00						-	88.900.000,00	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	-		-	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						72.600.000,00							88.900.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	72.600.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	88.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
48.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**513.439.025,00**							**601.582.927,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***513.439.025,00***							***601.582.927,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		999.Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	74.02 %		73.46 %	73.60 %	513.439.025,00						73.74 %	601.582.927,00	
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					346.000.000,00					Masyarakat		412.400.000,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB					346.000.000,00					Masyarakat		412.400.000,00	
		Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	381 Orang		381 Orang	381 Orang	96.000.000,00						381 Orang	102.400.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)					96.000.000,00							102.400.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	381 Orang		381 Orang	381 Orang	96.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		381 Orang	102.400.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					70.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota					167.439.025,00					Masyarakat		189.182.927,00	
		Tercukupinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB					167.439.025,00					Masyarakat		189.182.927,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15 Orang		15 Orang	15 Orang	122.641.000,00						15 Orang	134.905.100,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	200 Orang		160 Orang	170 Orang	2.000.000,00						180 Orang	5.500.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)					122.641.000,00							134.905.100,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	15 Orang		15 Orang	350 Orang	122.641.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Orang	134.905.100,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB					2.000.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	200 Orang		160 Orang	0 Orang	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		180 Orang	5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Meningkatnya kapasitas SDM tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB					346.000.000,00					Masyarakat		412.400.000,00	
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-		-	-	180.000.000,00						-	210.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					180.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	-		-	127 Organisasi	180.000.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	210.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Tercukupinya Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB						167.439.025,00					Masyarakat		189.182.927,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	-	3.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	-	9.249.600,00						-	10.174.560,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	4.998.025,00						-	5.497.827,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	25.550.400,00						-	28.105.440,00	
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	-		-	1 Kegiatan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0028	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))						9.249.600,00							10.174.560,00	
		Terlaksananya dukungan operasional pelayanan KB Bergerak (Tim pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	0 Layanan	9.249.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	10.174.560,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						25.550.400,00							28.105.440,00	
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	5 Laporan	25.550.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	28.105.440,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						4.998.025,00							5.497.827,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	4.998.025,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	5.497.827,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**979.879.278,00**							**1.102.867.205,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta massyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***979.879.278,00***							***1.102.867.205,00***	
			999.Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	58.82 %		53.33 %	56.25 %	979.879.278,00						56.45 %	1.102.867.205,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						126.601.516,00					Masyarakat		155.847.205,00	
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						126.601.516,00					Masyarakat		155.847.205,00	
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	15 Orang		15 Orang	15 Orang	55.669.183,00						15 Orang	61.236.101,00	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.273.570,00						1 Laporan	4.700.927,00	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.149.189,00						1 Laporan	82.749.646,00	
						Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						126.601.516,00					Masyarakat		155.847.205,00	
							Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	15 Orang		15 Orang	15 Orang	55.669.183,00						15 Orang	61.236.101,00	
							Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.273.570,00						1 Laporan	4.700.927,00	
							Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.149.189,00						1 Laporan	82.749.646,00	
	2.14.04.2.01.0017					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))						60.149.189,00							82.749.646,00	
						Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	60.149.189,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	82.749.646,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0019					Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						55.669.183,00							61.236.101,00	
						Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	15 Orang		15 Orang	150 Orang	55.669.183,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Orang	61.236.101,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0021					Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						4.273.570,00							4.700.927,00	
						Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.273.570,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	4.700.927,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						853.277.762,00					Masyarakat		947.020.000,00	
						Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						853.277.762,00					Masyarakat		947.020.000,00	
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan		2 laporan	2 laporan	190.500.000,00						2 laporan	209.550.000,00	
	2.14.04.2.02.0005					Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						190.500.000,00							209.550.000,00	
						Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2 laporan		2 laporan	10 laporan	190.500.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 laporan	209.550.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						126.601.516,00					Masyarakat		155.847.205,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	6.509.574,00						-	7.160.531,00	
		Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						126.601.516,00					Masyarakat		155.847.205,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	6.509.574,00						-	7.160.531,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						6.509.574,00							7.160.531,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	2 Laporan / Dokumen	6.509.574,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	7.160.531,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang berperan dalam pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						853.277.762,00					Masyarakat		947.020.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	647.700.000,00						-	712.470.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	15.077.762,00						-	25.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						15.077.762,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	1 Laporan	15.077.762,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						647.700.000,00							712.470.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	8011 Keluarga	647.700.000,00	Kab. Gunung Mas	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	712.470.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN						**15.133.365.176,12**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.789.365.176,12**							**0,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**14.539.338.276,12**							**0,00**	
50.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.558.604.994,12**							**0,00**	
		Meningkatnya PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						***8.558.604.994,12***							***0,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	8.558.604.994,12						100 %	0,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						799.564.248,00					Kelompok sasaran utama kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, termasuk unsur pimpinan, sekretariat, dan bidang/seksi		0,00	
		Meningkatnya capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						799.564.248,00					Kelompok sasaran utama kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan, termasuk unsur pimpinan, sekretariat, dan bidang/seksi		0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	799.564.248,00						7 Laporan	0,00	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						799.564.248,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	799.564.248,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.364.340.746,12					Kelompok sasaran utama kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah aparatur sipil negara (ASN/PNS) dan pegawai di lingkungan satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.364.340.746,12					Kelompok sasaran utama kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah adalah aparatur sipil negara (ASN/PNS) dan pegawai di lingkungan satuan kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.300.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		73 Orang/bulan	75 Orang/bulan	6.353.040.746,12						75 Orang/bulan	0,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.353.040.746,12							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan		73 Orang/bulan	50 Orang/bulan	6.353.040.746,12	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		75 Orang/bulan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						11.300.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.300.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						31.134.285,70					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						31.134.285,70					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	31.134.285,70						1 Laporan	0,00	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						31.134.285,70							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	31.134.285,70	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						152.186.600,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						152.186.600,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	3 Orang	50.000.000,00						3 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	102.186.600,00						1 Paket	0,00	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						102.186.600,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	50 Paket	102.186.600,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		3 Orang	10 Orang	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Orang	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						649.938.820,30					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						649.938.820,30					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.210.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.689.374,30						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.947.150,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	383.100.174,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.348.016,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	73.070.856,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.511.250,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	49.062.000,00						1 Paket	0,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						16.511.250,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	16.511.250,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						49.062.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	49.062.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						73.070.856,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	73.070.856,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.210.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.210.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						80.348.016,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.348.016,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						13.947.150,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.947.150,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						383.100.174,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	383.100.174,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						27.689.374,30							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.689.374,30	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						347.314.160,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						347.314.160,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	293.973.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	41.341.160,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						12.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						293.973.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	293.973.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						41.341.160,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	41.341.160,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						214.126.134,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						214.126.134,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Perhubungan		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	15.857.335,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		2 Unit	3 Unit	137.409.719,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	60.859.080,00						3 Unit	0,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						137.409.719,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		2 Unit	2 Unit	137.409.719,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.859.080,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	60.859.080,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.857.335,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	15.857.335,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
51.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**117.021.549,00**							**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP						***117.021.549,00***							***0,00***	
			1.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	80 Persentase		85 Persentase	80 Persentase	117.021.549,00						80 Persentase	0,00	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						117.021.549,00					kelompok sasaran kegiatan adalah pemerintah daerah OPD terkait		0,00	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						117.021.549,00					kelompok sasaran kegiatan adalah pemerintah daerah OPD terkait		0,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	117.021.549,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						117.021.549,00							0,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	117.021.549,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
52.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**558.721.510,00**							**0,00**	
		Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup						***558.721.510,00***							***0,00***	
			1.Indeks Kualitas Air	75.70 Indeks		74.90 Indeks	75.10 Indeks	558.721.510,00						75.30 Indeks	0,00	
			2.Indeks Kualitas Udara	81.00 Indeks		79.80 Indeks	80.10 Indeks	558.721.510,00						80.40 Indeks	0,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						558.721.510,00					Kelompok sasaran kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kabupaten/kota meliputi ada 4 DAS yaitu Kahayan, Miri, Rungan dan Manuhing		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						558.721.510,00					Kelompok sasaran kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kabupaten/kota meliputi ada 4 DAS yaitu Kahayan, Miri, Rungan dan Manuhing		0,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi		0 Lokasi	9 Lokasi	13.750.000,00						9 Lokasi	0,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.771.510,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.363.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	117.774.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	42.563.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						49.500.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						13.750.000,00							0,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	9 Lokasi		0 Lokasi	9 Lokasi	13.750.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Lokasi	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						28.771.510,00							0,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.771.510,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan						117.774.000,00							0,00	
		Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket		1 Paket	40 Paket	117.774.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						6.363.000,00							0,00	
		Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.363.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota						42.563.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	42.563.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		Meningkatnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						558.721.510,00					Kelompok sasaran kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di kabupaten/kota meliputi ada 4 DAS yaitu Kahayan, Miri, Rungan dan Manuhing		0,00	
			Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.03.2.01.0017	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya						300.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
53.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**10.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***10.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase RTH	30 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	10.000.000,00						20 Persentase	0,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Kelompok sasaran kegiatan Keanekaragaman Hayati meliputi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan konservasi atau bergantung pada sumber daya alam, pemangku kepentingan seperti Pemerintah, LSN industri dan organisasi lainnya terkait dengan pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Kelompok sasaran kegiatan Keanekaragaman Hayati meliputi masyarakat lokal yang tinggal di sekitar kawasan konservasi atau bergantung pada sumber daya alam, pemangku kepentingan seperti Pemerintah, LSN industri dan organisasi lainnya terkait dengan pengelolaan Keanekaragaman Hayati		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 Unit		1 Unit	2 Unit	10.000.000,00						2 Unit	0,00	
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati						10.000.000,00							0,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	2 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
54.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**64.706.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)						***64.706.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	90 Persentase		75 Persentase	80 Persentase	64.706.000,00						85 Persentase	0,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						64.706.000,00					Kelompok sasaran kegiatan perusahaan-perusahaan yang rincian teknis penyimpanan LB3 kewenangan kabupaten		0,00	
		Tersedianya penyimpanan sementara B3						64.706.000,00					Kelompok sasaran kegiatan perusahaan-perusahaan yang rincian teknis penyimpanan LB3 kewenangan kabupaten		0,00	
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.706.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						64.706.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.706.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
55.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**104.206.941,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						***104.206.941,00***							***0,00***	

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							1.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	90 %		50 %	60 %	104.206.941,00						75 %	0,00	
	2.11.06.2.01					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						104.206.941,00					10 Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas		0,00	
						Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						104.206.941,00					10 Perusahaan di Kabupaten Gunung Mas		0,00	
							Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	19 Badan Usaha		30 Badan Usaha	19 Badan Usaha	94.206.941,00						19 Badan Usaha	0,00	
							Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	10.000.000,00						16 Dokumen	0,00	
	2.11.06.2.01.0001					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						10.000.000,00							0,00	
						Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.06.2.01.0009					Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						94.206.941,00							0,00	
						Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	19 Badan Usaha		30 Badan Usaha	19 Badan Usaha	94.206.941,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		19 Badan Usaha	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
56.	**2.11.07**					**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**						**60.000.000,00**							**0,00**	
						Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH						***60.000.000,00***							***0,00***	
							1.Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Persentase		65 Persentase	70 Persentase	60.000.000,00						75 Persentase	0,00	
	2.11.07.2.01					Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH						60.000.000,00					kelompok sasaran kegiatan adalah ada 2 kelembagaan MHA (masyarakat hukum adat) yang ada di kabupaten gunung mas		0,00	
						Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH						60.000.000,00					kelompok sasaran kegiatan adalah ada 2 kelembagaan MHA (masyarakat hukum adat) yang ada di kabupaten gunung mas		0,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.07.2.01.0001					Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH						60.000.000,00							0,00	
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
57.	**2.11.08**					**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**35.294.000,00**							**0,00**	
						Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup						***35.294.000,00***							***0,00***	
							1.Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	75 Persentase		65 Persentase	65 Persentase	35.294.000,00						70 Persentase	0,00	
	2.11.08.2.01					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						35.294.000,00					kelompok sasaran kegiatan adalah sekolah- sekolah yang ada di kabupaten gunung mas		0,00	
						Meningkatnya lembaga Pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunikasi/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH						35.294.000,00					kelompok sasaran kegiatan adalah sekolah- sekolah yang ada di kabupaten gunung mas		0,00	
							Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	35.294.000,00						1 Lembaga	0,00	
	2.11.08.2.01.0005					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						35.294.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	35.294.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Lembaga	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
58.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**5.030.783.282,00**							**0,00**	
		Meningkatnya tata kelola persampahan						***5.030.783.282,00***							***0,00***	
			1.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	75 poin		40 poin	50 poin	5.030.783.282,00						65 poin	0,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						5.030.783.282,00					Kelompok sasaran pengelolaan persampahan meliputi rumah tangga, masyarakat umum, kelompok masyarakat berbasis lingkungan seperti bank sampah , sekolah, pelaku usaha/industri, dan kawasan khusus		0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah						5.030.783.282,00					Kelompok sasaran pengelolaan persampahan meliputi rumah tangga, masyarakat umum, kelompok masyarakat berbasis lingkungan seperti bank sampah , sekolah, pelaku usaha/industri, dan kawasan khusus		0,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.798.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1 Ton		1 Ton	1 Ton	49.795.018,00						1 Ton	0,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9 Ton		9 Ton	9 Ton	1.293.978.780,00						9 Ton	0,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	8 Ton		6 Ton	6 Ton	31.635.000,00						7 Ton	0,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3577 Ton		3577 Ton	3577 Ton	1.097.874.000,00						3577 Ton	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit		2 Unit	2 Unit	341.400.000,00						2 Unit	0,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	3.10 Persentase		3.2 Persentase	3.5 Persentase	2.016.302.484,00						3.7 Persentase	0,00	
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						341.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit		2 Unit	1 Unit	341.400.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota						199.798.000,00							0,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.798.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						1.097.874.000,00							0,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	3577 Ton		3577 Ton	3577 Ton	1.097.874.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3577 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						2.016.302.484,00							0,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	3.10 Persentase		3.2 Persentase	0 Persentase	2.016.302.484,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3.7 Persentase	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						31.635.000,00							0,00	
		Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	8 Ton		6 Ton	5 Ton	31.635.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						1.293.978.780,00							0,00	
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	9 Ton		9 Ton	0 Ton	1.293.978.780,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.11.11.2.01.0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah						49.795.018,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	1 Ton		1 Ton	1 Ton	49.795.018,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**250.026.900,00**							**0,00**	
59.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**180.026.800,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***180.026.800,00***							***0,00***	
			1.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	100 Persentase		65 Persentase	75 Persentase	180.026.800,00						85 Persentase	0,00	
			2.Konektivitas Darat	99 Persentase		98.4 Persentase	98.6 Persentase	180.026.800,00						98.8 Persentase	0,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Ruas Jalan Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia						10.000.000,00					Ruas Jalan Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit		200 Unit	200 Unit	10.000.000,00						200 Unit	0,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit		200 Unit	200 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		200 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						69.072.500,00					Kelompok sasaran kegiatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tresedia						69.072.500,00					Kelompok sasaran kegiatan masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	69.072.500,00						10 Unit	0,00	
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						69.072.500,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	10 Unit		10 Unit	9 Unit	69.072.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						100.954.300,00					Kelompok sasaran utama pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten/kota adalah seluruh pengguna jalan (pengendara kendaraan pribadi, angkutan umum, angkutan barang), pejalan kaki, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar jaringan jalan tersebut.		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						100.954.300,00					Kelompok sasaran utama pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten/Kota adalah seluruh pengguna jalan (pengendara kendaraan pribadi, angkutan umum, angkutan barang), pejalan kaki, dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar jaringan jalan tersebut.		0,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.954.300,00						1 Laporan	0,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						100.954.300,00							0,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.954.300,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
60.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**70.000.100,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi laut						***60.000.100,00***							***0,00***	
			1.Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan Angkutan Sungai	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	60.000.100,00						1 Kasus	0,00	
	2.15.03.2.03	Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha						60.000.100,00					Masyarakat Kabupaten Gunung mas		0,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian rutin LLASP						60.000.100,00					Masyarakat Kabupaten Gunung mas		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.100,00						1 Laporan	0,00	
	2.15.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						60.000.100,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.000.100,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
			Penurunan Jumlah Angka Kecelakaan Angkutan Sungai	-		-	1 Kasus	10.000.000,00						-	0,00	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau						10.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						10.000.000,00							0,00	
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	-		-	30 Unit	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**344.000.000,00**							**0,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**344.000.000,00**							**0,00**	
61.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**344.000.000,00**							**0,00**	
		meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya						***344.000.000,00***							***0,00***	
			1.Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0.55 Poin		0.55 Poin	0.55 Poin	344.000.000,00						0.55 Poin	0,00	
		meningkatnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						344.000.000,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum dan wisatawan		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.709.511,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan		1 Permohonan	1 Permohonan	79.000.000,00						1 Permohonan	0,00	
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	30 Ha		30 Ha	30 Ha	69.008.489,00						30 Ha	0,00	
			Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	30 Ha		30 Ha	30 Ha	115.000.000,00						30 Ha	0,00	
	3.28.04.2.01.0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota						79.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan		1 Permohonan	1 Permohonan	79.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Permohonan	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA						53.709.511,00							0,00	
		Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.709.511,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota						115.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	30 Ha		30 Ha	1 Ha	115.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Ha	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota						69.008.489,00							0,00	
		Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	30 Ha		30 Ha	5 Ha	69.008.489,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Ha	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						344.000.000,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum dan wisatawan		0,00	
		meningkatnya Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota						344.000.000,00					Kelompok sasaran kegiatan ini adalah masyarakat umum dan wisatawan		0,00	
			Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	-		-	-	27.282.000,00						-	0,00	
	3.28.04.2.01.0018	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota						27.282.000,00							0,00	
		Peningkatan pendapatan Usaha Ekonomi produktif masyarakat	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	-		-	4 Kelompok Masyarakat	27.282.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**7.036.043.805,40**							**7.161.115.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.036.043.805,40**							**7.161.115.000,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**7.036.043.805,40**							**7.161.115.000,00**	
62.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.648.434.625,40**							**6.753.865.000,00**	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						***6.648.434.625,40***							***6.753.865.000,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	6.648.434.625,40						100 %	6.753.865.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.232.600,00					-		9.230.000,00	
		Jumlah Dokumen Penunjang Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun						8.232.600,00					-		9.230.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	2.211.600,00						15 Dokumen	2.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.730.400,00						15 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.519.800,00						15 Dokumen	1.650.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.171.800,00						15 Dokumen	1.780.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.599.000,00						1 Laporan	1.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.171.800,00							1.780.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.171.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Dokumen	1.780.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						1.519.800,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.519.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Dokumen	1.650.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.211.600,00							2.300.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	2.211.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Dokumen	2.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.730.400,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.730.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Dokumen	1.800.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.599.000,00							1.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.599.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	1.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.882.711.925,40					Laporan Keuangan, Laporan realisasi anggaran dan Pegawai penerima gaji		4.909.700.000,00	
		Jumlah Administrasi Keuangan yang dilaporkan						4.882.711.925,40					Laporan Keuangan, Laporan realisasi anggaran dan Pegawai penerima gaji		4.909.700.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00						1 Laporan	1.700.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	17.040.000,00						18 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	4.864.071.925,40						63 Orang/bulan	4.900.000.000,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.864.071.925,40							4.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	56 Orang/bulan	4.864.071.925,40	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		63 Orang/bulan	4.900.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.600.000,00							1.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	1.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						17.040.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	16 Laporan	17.040.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		18 Laporan	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						85.181.420,00					Jumlah Paket Pakaian Dinas yang diadakan		84.000.000,00	
		Jumlah Administrasi Kepegawaian yang disediakan						85.181.420,00					Jumlah Paket Pakaian Dinas yang diadakan		84.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	20.000.000,00						2 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket		68 Paket	68 Paket	65.181.420,00						68 Paket	59.000.000,00	
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						65.181.420,00							59.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket		68 Paket	56 Paket	65.181.420,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		68 Paket	59.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	5 Orang	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Orang	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						444.264.350,00					Jumlah administrasi umum pererangkat daerah		806.235.000,00	
		Jumlah Penyediaan Penunjang Administrasi Umum yang diadakan						444.264.350,00					Jumlah administrasi umum pererangkat daerah		806.235.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.452.000,00						3 Dokumen	8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	980.000,00						5 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.223.000,00						1 Laporan	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan		165 Laporan	165 Laporan	138.225.600,00						165 Laporan	188.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.244.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	63.252.000,00						3 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	83.942.430,00						4 Paket	156.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.946.000,00						4 Paket	12.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	115.440.000,00						5 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.559.320,00						4 Paket	10.235.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.946.000,00							12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	11.946.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	12.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						115.440.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	115.440.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Paket	350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.559.320,00							10.235.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.559.320,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	10.235.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.244.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	5.244.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						83.942.430,00							156.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	83.942.430,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	156.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.452.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.452.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	8.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						63.252.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	63.252.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	65.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						8.223.000,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.223.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	9.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						138.225.600,00							188.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 Laporan		165 Laporan	150 Laporan	138.225.600,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		165 Laporan	188.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						980.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	980.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	1.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						722.812.410,00					Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		516.200.000,00	
		Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di laporkan						722.812.410,00					Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		516.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	148.168.500,00						3 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	389.387.910,00						12 Laporan	138.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	179.256.000,00						5 Laporan	142.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	6.000.000,00						500 Laporan	6.200.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.000.000,00							6.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		500 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		500 Laporan	6.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						148.168.500,00							230.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	148.168.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						179.256.000,00							142.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	2 Laporan	179.256.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	142.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						389.387.910,00							138.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	389.387.910,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	138.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						504.031.920,00					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		429.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan, Peralatan dan Gedung yang dipelihara						504.031.920,00					Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara		429.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	172.582.800,00						1 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	118.474.000,00						1 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.674.600,00						1 Unit	38.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	149.387.720,00						15 Unit	155.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	25.912.800,00						5 Unit	26.000.000,00	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						149.387.720,00							155.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	12 Unit	149.387.720,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Unit	155.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.674.600,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.674.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.912.800,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	30 Unit	25.912.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						172.582.800,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	172.582.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	120.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						118.474.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	118.474.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi						1.200.000,00					Laporan Kinerja Dinas		1.200.000,00	
		Jumlah Penataan Organisasi disampaikan dan dilaporkan						1.200.000,00					Laporan Kinerja Dinas		1.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00						1 Dokumen	1.200.000,00	
	2.12.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						1.200.000,00							1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.200.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	1.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
63.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**146.039.500,00**							**156.500.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk						***146.039.500,00***							***156.500.000,00***	
			1.Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	100 Persentase		97.50 Persentase	98.25 Persentase	146.039.500,00						99 Persentase	156.500.000,00	
			2.Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	100 Persentase		80 Persentase	85 Persentase	146.039.500,00						90 Persentase	156.500.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						71.532.600,00					Penduduk di bawah usia 17 Tahun dan penduduk yang belum rekam		78.000.000,00	
		Jumlah Pelayanan terhadap Pendaftaran Penduduk						71.532.600,00					Penduduk di bawah usia 17 Tahun dan penduduk yang belum rekam		78.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	750 Dokumen		750 Dokumen	750 Dokumen	25.726.800,00						750 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	750 Dokumen		750 Dokumen	750 Dokumen	7.667.200,00						750 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.138.600,00						12 Laporan	40.000.000,00	
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						7.667.200,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	750 Dokumen		750 Dokumen	750 Dokumen	7.667.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		750 Dokumen	8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						25.726.800,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	750 Dokumen		750 Dokumen	750 Dokumen	25.726.800,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		750 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						38.138.600,00							40.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.138.600,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						74.506.900,00					Penduduk di bawah usia 17 Tahun dan penduduk yang belum rekam		78.500.000,00	
		umlah Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						74.506.900,00					Penduduk di bawah usia 17 Tahun dan penduduk yang belum rekam		78.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	750 Dokumen		750 Dokumen	750 Dokumen	34.662.500,00						750 Dokumen	36.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.551.600,00						2 Laporan	24.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.292.800,00						1 Laporan	17.500.000,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						16.292.800,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.292.800,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	17.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						34.662.500,00							36.500.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	750 Dokumen		750 Dokumen	25 Dokumen	34.662.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		750 Dokumen	36.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						23.551.600,00							24.500.000,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	23.551.600,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	24.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
64.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**139.688.600,00**							**143.700.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pencataran Sipil						***139.688.600,00***							***143.700.000,00***	
			1.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	2 Persentase		2 Persentase	2 Persentase	139.688.600,00						2 Persentase	143.700.000,00	
			2.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		99.05 Persentase	99.25 Persentase	139.688.600,00						99.50 Persentase	143.700.000,00	
			3.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	139.688.600,00						100 Persentase	143.700.000,00	
			4.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	139.688.600,00						100 Persentase	143.700.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						22.929.800,00					Penduduk yang melaporkan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		23.900.000,00	
		Jumlah Pelayanan Pencatatan Sipil						22.929.800,00					Penduduk yang melaporkan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		23.900.000,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	22.929.800,00						5 Layanan	23.900.000,00	
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						22.929.800,00							23.900.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan		5 Layanan	6 Layanan	22.929.800,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Layanan	23.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						110.486.400,00					Laporan hasil koordinasi, pelayanan aktif pendaftaran peristiwa penting dan fasilitasi pencatan sipil		113.300.000,00	
		Jumlah Penyelenggaraan Pendukung Pelayanan Pencatatan Sipil						110.486.400,00					Laporan hasil koordinasi, pelayanan aktif pendaftaran peristiwa penting dan fasilitasi pencatan sipil		113.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.502.800,00						12 Laporan	48.600.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.047.600,00						2 Laporan	26.700.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	37.936.000,00						5 Laporan	38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						25.047.600,00							26.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.047.600,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	26.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						37.936.000,00							38.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	37.936.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	38.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						47.502.800,00							48.600.000,00	
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	47.502.800,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	48.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						6.272.400,00					Kelompok pasangan penduduk		6.500.000,00	
		Jumlah kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang dilaporkan						6.272.400,00					Kelompok pasangan penduduk		6.500.000,00	
			Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	-		-	-	6.272.400,00						-	6.500.000,00	
	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil						6.272.400,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	-		-	3 Laporan	6.272.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	6.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
65.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**90.317.200,00**							**92.750.000,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan						***90.317.200,00***							***92.750.000,00***	
			1.Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	90.317.200,00						100 Persentase	92.750.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						90.317.200,00					Data yang diolah dan pengguna data		92.750.000,00	
		Jumlah Penyajian Database Kependudukan yang sajikan dapat dimanfaatkan						90.317.200,00					Data yang diolah dan pengguna data		92.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	750 Dokumen		750 Dokumen	750 Dokumen	81.371.800,00						750 Dokumen	83.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	39 Dokumen		11 Dokumen	20 Dokumen	8.945.400,00						25 Dokumen	9.750.000,00	
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan						81.371.800,00							83.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	750 Dokumen		750 Dokumen	1 Dokumen	81.371.800,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		750 Dokumen	83.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						8.945.400,00							9.750.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	39 Dokumen		11 Dokumen	15 Dokumen	8.945.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Dokumen	9.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
66.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**11.563.880,00**							**12.600.000,00**	
		Meningkatnya kualitas profil Kependudukan						***11.563.880,00***							***12.600.000,00***	
			1.Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	11.563.880,00						100 Persentase	12.600.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						11.563.880,00					Data Konsolidasi Bersih Semester satu dan Semester dua		12.600.000,00	
		Jumlah Data dan Profil Kependudukan yang dapat disajikan						11.563.880,00					Data Konsolidasi Bersih Semester satu dan Semester dua		12.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	11.563.880,00						16 Dokumen	12.600.000,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						11.563.880,00							12.600.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	16 Dokumen		16 Dokumen	15 Dokumen	11.563.880,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Dokumen	12.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**8.554.608.016,00**							**9.519.517.470,06**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.554.608.016,00**							**9.519.517.470,06**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**8.554.608.016,00**							**9.519.517.470,06**	
67.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.451.210.035,31**							**6.335.465.061,83**	
		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan administrasi sarana dan prasarana dalam kondisi pegawai aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis laporan kinerja dan keuangan yang selesai tepat Minat Pengunjung Pameran Pembangunan						***5.451.210.035,31***							***6.335.465.061,83***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	5.451.210.035,31						100 %	6.335.465.061,83	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.354.148.029,83					Pegawai ASN di Lingkup DPMD Kabupaten Gunung Mas		4.424.441.057,03	
		Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Bulanan						4.354.148.029,83					Pegawai ASN di Lingkup DPMD Kabupaten Gunung Mas		4.424.441.057,03	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	7.713.996,83						5 Laporan	8.950.527,63	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.346.434.033,00						50 Orang/bulan	4.415.490.529,40	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.346.434.033,00							4.415.490.529,40	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	53 Orang/bulan	4.346.434.033,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		50 Orang/bulan	4.415.490.529,40	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						7.713.996,83							8.950.527,63	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan		5 Laporan	14 Laporan	7.713.996,83	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		5 Laporan	8.950.527,63	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						40.232.266,00					Pegawai ASN di Lingkup DPMD Kabupaten Gunung Mas		42.083.867,16	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pakaian PDH untuk ASN dan Hitam Putih untuk PTT serta ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bimtek pada DPMD Kab. Gunung Mas						40.232.266,00					Pegawai ASN di Lingkup DPMD Kabupaten Gunung Mas		42.083.867,16	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	20.117.008,00						10 Orang	21.042.848,66	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		2 Orang	2 Orang	20.115.258,00						3 Orang	21.041.018,50	
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.115.258,00							21.041.018,50	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		2 Orang	2 Orang	20.115.258,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		3 Orang	21.041.018,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						20.117.008,00							21.042.848,66	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	20.117.008,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		10 Orang	21.042.848,66	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						529.528.919,01					-		1.285.830.386,56	
		Terlaksananya Kebutuhan Administrasi dalam mendukung Tupoksi pada DPMD Kab. Gunung Mas						529.528.919,01					-		1.285.830.386,56	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.858.298,00						6 Dokumen	11.385.027,72	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		305 Laporan	305 Laporan	376.157.199,95						305 Laporan	173.932.899,69	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket		65 Paket	65 Paket	30.000.000,00						65 Paket	31.380.682,60	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.360.886,00						1 Paket	23.389.995,58	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	24.467.730,00						3 Paket	15.690.341,30	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.241.305,00						1 Paket	966.690.748,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	56.443.500,06						7 Paket	63.360.691,67	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.241.305,00							966.690.748,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.241.305,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Paket	966.690.748,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						56.443.500,06							63.360.691,67	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	56.443.500,06	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		7 Paket	63.360.691,67	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							31.380.682,60	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	65 Paket		65 Paket	65 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		65 Paket	31.380.682,60	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.467.730,00							15.690.341,30	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	24.467.730,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		3 Paket	15.690.341,30	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.858.298,00							11.385.027,72	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.858.298,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		6 Dokumen	11.385.027,72	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						22.360.886,00							23.389.995,58	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.360.886,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Paket	23.389.995,58	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						376.157.199,95							173.932.899,69	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		305 Laporan	305 Laporan	376.157.199,95	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		305 Laporan	173.932.899,69	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						208.395.152,49					-		402.890.379,58	
		Terlaksananya Kebutuhan dan Administrasi DPMD Kab. Gunung Mas						208.395.152,49					-		402.890.379,58	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	74.880.000,00						3 Laporan	73.221.592,73	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	123.037.450,49						8 Laporan	318.708.871,23	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	10.477.702,00						9 Laporan	10.959.915,62	
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10.477.702,00							10.959.915,62	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	10.477.702,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		9 Laporan	10.959.915,62	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						74.880.000,00						73.221.592,73	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	74.880.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		3 Laporan	73.221.592,73	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						123.037.450,49						318.708.871,23	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	123.037.450,49	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		8 Laporan	318.708.871,23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.905.667,98					-	180.219.371,50	
		Terlaksananya Pemeliharaan gedung Peralatan mesin kendaraan dinas dan operasional dalam mendukung pelaksanaan tugas DPMD Kab. Gunung Mas						318.905.667,98					-	180.219.371,50	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.609.440,00						1 Unit	47.071.023,90	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	114.759.903,98						14 Unit	52.742.251,99	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	139.382.730,00						2 Unit	59.324.977,70	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.153.594,00						4 Unit	21.081.117,91	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						139.382.730,00						59.324.977,70	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	139.382.730,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		2 Unit	59.324.977,70	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						114.759.903,98						52.742.251,99	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	114.759.903,98	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		14 Unit	52.742.251,99	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						44.609.440,00						47.071.023,90	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	44.609.440,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Unit	47.071.023,90	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.153.594,00						21.081.117,91	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.153.594,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		4 Unit	21.081.117,91	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
68.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**40.000.000,00**						**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Desa						***40.000.000,00***						***0,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Penataan Desa	0 Persentase		96 Persentase	97 Persentase	40.000.000,00						98 Persentase	0,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						40.000.000,00					Pemerintahan Desa		0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa						40.000.000,00					Pemerintahan Desa		0,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0 Desa		0 Desa	114 Desa	40.000.000,00						0 Desa	0,00	
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	0 Desa		0 Desa	114 Desa	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		0 Desa	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
69.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**2.588.370.980,69**						**2.792.942.408,02**	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						***2.588.370.980,69***						***2.792.942.408,02***	
			1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100 Persentase		96 Persentase	97 Persentase	2.588.370.980,69						98 Persentase	2.792.942.408,02	
			2.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 Persentase		96 Persentase	97 Persentase	2.588.370.980,69						98 Persentase	2.792.942.408,02	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		3.Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		96 %	97 %	2.588.370.980,69							98 %	2.792.942.408,02	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2.588.370.980,69						Pemerintahan Desa		2.792.942.408,02	
		Terlaksana Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					2.588.370.980,69						Pemerintahan Desa		2.792.942.408,02	
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114 Orang		114 Orang	114 Orang	1.801.565.232,00							114 Orang	1.908.057.750,09	
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	114 Desa		114 Desa	114 Desa	36.163.740,58							114 Desa	38.036.481,82	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.678.672,00							1 Dokumen	47.781.024,84	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	216.865.776,70							1 Dokumen	235.355.119,49	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	98.998.528,10							114 Dokumen	94.142.047,80	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	144.999.728,00							114 Dokumen	209.204.550,66	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	40.000.000,00							114 Dokumen	41.840.910,13	
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.322.500,00							1 Dokumen	83.099.182,78	
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	86.714.017,00							114 Dokumen	99.372.161,56	
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	38.052.927,20							114 Dokumen	26.630.596,50	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	114 Laporan		114 Laporan	114 Laporan	9.009.859,11							114 Laporan	9.422.582,35	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa					86.714.017,00								99.372.161,56	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	86.714.017,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Dokumen	99.372.161,56	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa					40.000.000,00								41.840.910,13	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Dokumen	41.840.910,13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa					144.999.728,00								209.204.550,66	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	144.999.728,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Dokumen	209.204.550,66	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa					1.801.565.232,00								1.908.057.750,09	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	114 Orang		114 Orang	114 Orang	1.801.565.232,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Orang	1.908.057.750,09	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa					70.322.500,00								83.099.182,78	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.322.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Dokumen	83.099.182,78	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa					9.009.859,11								9.422.582,35	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	114 Laporan		114 Laporan	114 Laporan	9.009.859,11	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Laporan	9.422.582,35	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					38.052.927,20								26.630.596,50	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	38.052.927,20	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Dokumen	26.630.596,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa					216.865.776,70								235.355.119,49	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	216.865.776,70	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Dokumen	235.355.119,49	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa					98.998.528,10								94.142.047,80	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	98.998.528,10	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Dokumen	94.142.047,80	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						36.163.740,58							38.036.481,82	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	114 Desa		114 Desa	114 Desa	36.163.740,58	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Desa	38.036.481,82	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						45.678.672,00							47.781.024,84	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.678.672,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Dokumen	47.781.024,84	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
70.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**425.027.000,00**							**391.110.000,21**	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan						***425.027.000,00***							***391.110.000,21***	
			1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100 Persentase		96 Persentase	97 Persentase	425.027.000,00						98 Persentase	391.110.000,21	
			2.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100 Persentase		96 Persentase	97 Persentase	425.027.000,00						98 Persentase	391.110.000,21	
			3.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		96 %	97 %	425.027.000,00						98 %	391.110.000,21	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						475.027.000,00					Kelompok Masyarakat di Desa		391.110.000,21	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						475.027.000,00					Kelompok Masyarakat di Desa		391.110.000,21	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	51.152.605,48	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	300.026.200,00						114 Dokumen	209.204.550,56	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	52.301.137,67	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	114 Lembaga		114 Lembaga	114 Lembaga	75.000.800,00						114 Lembaga	78.451.706,50	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						75.000.800,00							78.451.706,50	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	114 Lembaga		114 Lembaga	114 Lembaga	75.000.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Lembaga	78.451.706,50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						50.000.000,00							51.152.605,48	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Dokumen	51.152.605,48	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						50.000.000,00							52.301.137,67	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Laporan	52.301.137,67	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						300.026.200,00							209.204.550,56	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	114 Dokumen		114 Dokumen	114 Dokumen	300.026.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		114 Dokumen	209.204.550,56	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**11.673.882.360,76**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.577.784.260,76**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**11.358.250.260,76**							**0,00**	
71.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.673.823.452,11**							**0,00**	
		Meningkatnya Pelaksanaan Adminsitrasi dan Pelayanan Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran						***5.636.937.619,11***							***0,00***	
			1.Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan	100 %		100 %	100 %	5.636.937.619,11						100 %	0,00	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.645.044.125,11					Terwujudnya tata kelola keuangan yang		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.645.044.125,11					Terwujudnya tata kelola keuangan yang		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	31.200.000,00						3 Laporan	0,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	4.610.844.125,11						59 Orang/bulan	0,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.610.844.125,11							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		59 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.610.844.125,11	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		59 Orang/bulan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						31.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	31.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						96.764.600,00					Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai separuh waktu dan Pegawai outsourcing pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						96.764.600,00					Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai separuh waktu dan Pegawai outsourcing pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	56.764.600,00						2 Paket	0,00	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		6 Orang	6 Orang	40.000.000,00						6 Orang	0,00	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						56.764.600,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	56.764.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		6 Orang	9 Orang	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						300.472.650,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah						300.472.650,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	9.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	0,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000,00						3 Paket	0,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.000.000,00						2 Paket	0,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	0,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						3 Paket	0,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	241.472.650,00						4 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						241.472.650,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	5 Paket	241.472.650,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						429.175.244,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
		Terselenggaranya Pelayanan Operasional dan Administratif Perkantoran						429.175.244,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	95.404.500,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	286.786.062,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	44.984.682,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.000.000,00						2 Laporan	0,00	
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						95.404.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	95.404.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.984.682,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	44.984.682,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						286.786.062,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	286.786.062,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						175.481.000,00					Sarana, prasarana, aset tetap, dan kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional perkantoran		0,00	
		Tersedianya Laporan Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset Properti Pemerintah Daerah						175.481.000,00					Sarana, prasarana, aset tetap, dan kendaraan dinas yang digunakan untuk operasional perkantoran		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.708.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		8 Unit	9 Unit	155.773.000,00						10 Unit	0,00	
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.773.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		8 Unit	33 Unit	155.773.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						19.708.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	19.708.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.13	Penataan Organisasi						5.000.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya Dokumen Penyusunan dan Penetapan Tata Kerja Organisasi						5.000.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
	2.16.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Mewujudkan Kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, relevan, dan dapat dievaluasi dengan hasil yang jelas dan terukur.						***28.385.833,00***							***0,00***	
			1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	75 Predikat		71 Predikat	72 Predikat	28.385.833,00						73 Predikat	0,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						28.385.833,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Unit Kerja di lingkungan Internal Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan EValuasi Kinerja Perangkat Daerah						28.385.833,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Unit Kerja di lingkungan Internal Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.095.210,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.057.035,00						1 Dokumen	0,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.033,00						1 Dokumen	0,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.202.255,00						2 Dokumen	0,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	8.281.300,00						8 Laporan	0,00	
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					10.202.255,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.202.255,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.750.033,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.750.033,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					4.095.210,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.095.210,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					3.057.035,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.057.035,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					8.281.300,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		8 Laporan	6 Laporan	8.281.300,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan	-		-	100 Persen	8.500.000,00						-	0,00	
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.500.000,00						Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		0,00	
		-					8.500.000,00						Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		0,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	8.500.000,00							-	0,00	
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					8.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	1 Laporan	8.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
72.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.859.358.552,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Pubik Pemerintah Daerah						***1.859.358.552,00***							***0,00***	
		1.Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	73.60 %		73 %	73.10 %	1.859.358.552,00						73.20 %	0,00	
		3.Nilai Keterbukaan Informasi Publik	88.10 Nilai		87.70 Nilai	87.80 Nilai	1.859.358.552,00						87.90 Nilai	0,00	
		3.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	50 %		20 %	25 %	1.859.358.552,00						30 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						1.859.358.552,00					Masyarakat umum, kelompok informasi masyarakat (KIM), media massa, komunitas, serta instansi pemerintah.		0,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.627.655.484,00						2 Laporan	0,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						1.627.655.484,00							0,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.627.655.484,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.859.358.552,00					Masyarakat umum, kelompok informasi masyarakat (KIM), media massa, komunitas, serta instansi pemerintah.		0,00	
		Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						1.859.358.552,00					Masyarakat umum, kelompok informasi masyarakat (KIM), media massa, komunitas, serta instansi pemerintah.		0,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	142.107.880,00						-	0,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	27.936.318,00						-	0,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	61.658.870,00						-	0,00	
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						61.658.870,00							0,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	40 %	61.658.870,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						142.107.880,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	80 Orang	142.107.880,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						27.936.318,00							0,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	1 Komunitas	27.936.318,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
73.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**3.810.068.256,65**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika						***3.810.068.256,65***							***0,00***	
			1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 Indeks		0 Indeks	0 Indeks	3.810.068.256,65						0 Indeks	0,00	
			2.Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	84.21 %		73.68 %	76.32 %	3.810.068.256,65						78.95 %	0,00	
			3.Cakupan Layanan Telekomunikasi	97.60 %		97 %	97.10 %	3.810.068.256,65						97.30 %	0,00	
			4.Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	35.55 %		35.15 %	35.25 %	3.810.068.256,65						35.35 %	0,00	
			5.Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	2.0 Nilai		1.80 Nilai	1.82 Nilai	3.810.068.256,65						1.85 Nilai	0,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						11.719.600,00					Perangkat Daerah dan Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.		0,00	
		Terselenggaranya Penyediaan Nama Domain Resmi dan Sub-Domain untuk Instansi Pemerintah Daerah						11.719.600,00					Perangkat Daerah dan Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.719.600,00						1 Dokumen	0,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						11.719.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.719.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						3.798.348.656,65					Perangkat Daerah dan Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.		0,00	
		Terselenggaranya Layanan Publik Berbasis Elektronik yang mempermudah akses masyarakat kepada layanan pemerintahan						3.798.348.656,65					Perangkat Daerah dan Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.		0,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.548.118,00						2 Laporan	0,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						27.548.118,00							0,00	
		Terlaksanaya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	27.548.118,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Terselenggaranya Layanan Publik Berbasis Elektronik yang mempermudah akses masyarakat kepada layanan pemerintahan						3.798.348.656,65					Perangkat Daerah dan Instansi di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.		0,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	85.705.431,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	27.917.800,00						-	0,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	48.855.868,00						-	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	2.804.074.289,65						-	0,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	804.247.150,00						-	0,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						2.804.074.289,65							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	38 Titik	2.804.074.289,65	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						27.917.800,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	2 Dokumen	27.917.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						48.855.868,00							0,00	
		Terlaksanannya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	1 Layanan	48.855.868,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						804.247.150,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	38 Titik	804.247.150,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0044	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						85.705.431,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	1 Aplikasi	85.705.431,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**100.000.000,00**							**0,00**	
74.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**100.000.000,00**							**0,00**	
		Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***100.000.000,00***							***0,00***	
			1.Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3 Poin		2.6 Poin	2.65 Poin	100.000.000,00						2.7 Poin	0,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), Walidata (Diskominfo/Bappeda), Pembina Data (Badan Pusat Statistik - BPS Kabupaten/Kota), dan Pengguna Data (Stakeholder)		0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik yang akurat dan terperinci untuk sektor-sektor tertentu, yang mendukung Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.						100.000.000,00					Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), Walidata (Diskominfo/Bappeda), Pembina Data (Badan Pusat Statistik - BPS Kabupaten/Kota), dan Pengguna Data (Stakeholder)		0,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang		75 Orang	75 Orang	22.579.200,00						78 Orang	0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	95 %		82 %	84 %	47.534.800,00						88 %	0,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	80 %		56 %	57 %	29.886.000,00						70 %	0,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						47.534.800,00							0,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	95 %		82 %	84 %	47.534.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		88 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						22.579.200,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	80 Orang		75 Orang	76 Orang	22.579.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		78 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						29.886.000,00							0,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	80 %		56 %	80 %	29.886.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		70 %	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Terlaksananya Pengumpulan dan Penyajian Data Statistik yang akurat dan terperinci untuk sektor-sektor tertentu, yang mendukung Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Daerah.						100.000.000,00					Produsen Data (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), Walidata (Diskominfo/Bappeda), Pembina Data (Badan Pusat Statistik - BPS Kabupaten/Kota), dan Pengguna Data (Stakeholder)		0,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						0,00							0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	25 %	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**119.534.000,00**							**0,00**	
75.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**119.534.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***119.534.000,00***							***0,00***	
			1.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	60 %		52 %	54 %	119.534.000,00						56 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						119.534.000,00					Seluruh Perangkat Daerah (OPD/Dinas/Kecamatan/Kelurahan) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Sistem Keamanan untuk Pengamanan Data Elektronik Pemerintah Daerah						119.534.000,00					Seluruh Perangkat Daerah (OPD/Dinas/Kecamatan/Kelurahan) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	98.522.400,00						1 Laporan	0,00	
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						98.522.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	98.522.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		Terselenggaranya Pengembangan Sistem Keamanan untuk Pengamanan Data Elektronik Pemerintah Daerah						119.534.000,00					Seluruh Perangkat Daerah (OPD/Dinas/Kecamatan/Kelurahan) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	11.421.200,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	9.590.400,00						-	0,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						11.421.200,00							0,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	2 Dokumen	11.421.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						9.590.400,00							0,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	9.590.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	X							**96.098.100,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**96.098.100,00**							**0,00**	
76.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**96.098.100,00**							**0,00**	
			1.Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan	-		-	100 %	96.098.100,00						-	0,00	
			Persentase pelaksanaan administrasi dan operasional yang dapat diselesaikan dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan	-		-	100 Persen	96.098.100,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						96.098.100,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah						96.098.100,00					Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	96.098.100,00						6 Laporan	0,00	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						96.098.100,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	48 Laporan	96.098.100,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						**8.090.806.911,36**							**8.252.622.969,59**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.059.077.487,34**							**8.164.297.386,41**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**7.600.607.879,84**							**7.559.885.564,21**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
77.	2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.374.921.515,84**							**7.191.396.112,85**	
		Terselenggaranya program penunjang urusan pemerintah daerah						***7.374.921.515,84***							***7.191.396.112,85***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	7.374.921.515,84						100 %	7.191.396.112,85	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.694.594,00					Perangkat Daerah		42.216.971,76	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20.694.594,00					Perangkat Daerah		42.216.971,76	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.061.060,00						2 Dokumen	2.164.562,40	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.113.884,00						2 Dokumen	36.952.323,36	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	529.650,00						1 Dokumen	1.080.486,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	494.450,00						1 Dokumen	1.008.678,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	495.550,00						2 Dokumen	1.010.922,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						18.113.884,00							36.952.323,36	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.113.884,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	36.952.323,36	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						495.550,00							1.010.922,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	495.550,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	1.010.922,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						494.450,00							1.008.678,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	494.450,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	1.008.678,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.061.060,00							2.164.562,40	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.061.060,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	2.164.562,40	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						529.650,00							1.080.486,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	529.650,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	1.080.486,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.008.189.954,86					Perangkat Daerah		6.148.941.637,45	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.008.189.954,86					Perangkat Daerah		6.148.941.637,45	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	898.099,50						1 Dokumen	1.832.122,98	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.811.900,00						1 Laporan	26.136.276,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.674.200,00						1 Laporan	29.731.368,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.971.805.755,36						58 Orang/bulan	6.091.241.870,47	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.971.805.755,36							6.091.241.870,47	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan		58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	5.971.805.755,36	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		58 Orang/bulan	6.091.241.870,47	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12.811.900,00							26.136.276,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.811.900,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	26.136.276,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						22.674.200,00							29.731.368,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.674.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	29.731.368,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						898.099,50							1.832.122,98	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	898.099,50	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	1.832.122,98	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.249.651,00					Perangkat Daerah		61.709.208,04	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.249.651,00					Perangkat Daerah		61.709.208,04	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.801.126,00						1 Dokumen	5.714.297,04	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	27.448.525,00						10 Orang	55.994.911,00	
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.801.126,00							5.714.297,04	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.801.126,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	5.714.297,04	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						27.448.525,00							55.994.911,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	5 Orang	27.448.525,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Orang	55.994.911,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						895.720.916,98					Perangkat Daerah		535.988.702,40	
		Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah						895.720.916,98					Perangkat Daerah		535.988.702,40	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.320.002,00						3 Dokumen	11.546.402,04	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.699,00						1 Dokumen	3.000.225,96	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	817.016.445,98						1 Laporan	409.184.663,70	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	48.299.580,00						1 Paket	83.532.614,40	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.547.375,00						1 Paket	21.516.645,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.066.815,00						1 Paket	7.208.151,30	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.066.815,00							7.208.151,30	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.066.815,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	7.208.151,30	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.547.375,00							21.516.645,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.547.375,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	21.516.645,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						11.320.002,00							11.546.402,04	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.320.002,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	11.546.402,04	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						48.299.580,00							83.532.614,40	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	48.299.580,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	83.532.614,40	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						817.016.445,98							409.184.663,70	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	817.016.445,98	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	409.184.663,70	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						1.470.699,00							3.000.225,96	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.470.699,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	3.000.225,96	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.146.820,00					Perangkat Daerah		33.809.756,40	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						33.146.820,00					Perangkat Daerah		33.809.756,40	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	33.146.820,00						2 Unit	33.809.756,40	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						33.146.820,00							33.809.756,40	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	33.146.820,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	33.809.756,40	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.446.152,00					Perangkat Daerah		259.031.088,96	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						318.446.152,00					Perangkat Daerah		259.031.088,96	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	104.083.212,00						1 Laporan	106.164.876,24	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	211.052.940,00						1 Laporan	149.490.012,72	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.310.000,00						1 Laporan	3.376.200,00	
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.310.000,00							3.376.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.310.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	3.376.200,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						104.083.212,00							106.164.876,24	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	104.083.212,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	106.164.876,24	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						211.052.940,00							149.490.012,72	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	211.052.940,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	149.490.012,72	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						67.275.227,00					Perangkat Daerah		107.254.419,84	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						67.275.227,00					Perangkat Daerah		107.254.419,84	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	22.895.824,00						8 Unit	41.457.582,78	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	24.971.118,00						2 Unit	46.000.386,36	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	19.408.285,00						12 Unit	19.796.450,70	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						24.971.118,00							46.000.386,36	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	24.971.118,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	46.000.386,36	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						22.895.824,00							41.457.582,78	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	22.895.824,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Unit	41.457.582,78	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.408.285,00							19.796.450,70	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	19.408.285,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Unit	19.796.450,70	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.01.2.13	Penataan Organisasi						1.198.200,00					Perangkat Daerah		2.444.328,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						1.198.200,00					Perangkat Daerah		2.444.328,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.198.200,00						1 Dokumen	2.444.328,00	
	2.07.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						1.198.200,00							2.444.328,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.198.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	2.444.328,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
78.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**22.012.275,00**							**54.711.973,80**	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja						***22.012.275,00***							***54.711.973,80***	
			1.Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %		100 %	100 %	22.012.275,00						100 %	54.711.973,80	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						22.012.275,00					Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait		54.711.973,80	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)						22.012.275,00					Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait		54.711.973,80	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.012.275,00						1 Dokumen	54.711.973,80	
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						22.012.275,00							54.711.973,80	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.012.275,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Dokumen	54.711.973,80	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
79.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**118.732.400,00**							**150.697.248,00**	
		Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja						***118.732.400,00***							***150.697.248,00***	
			1.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	1.5 %		1.38 %	1.40 %	118.732.400,00						1.45 %	150.697.248,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						118.732.400,00					Masyarakat		150.697.248,00	
		Meningkatnya minat tenaga kerja untuk mengikuti Pelatihan						118.732.400,00					Masyarakat		150.697.248,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	118.732.400,00						-	150.697.248,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						118.732.400,00							150.697.248,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	30 Orang	118.732.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	150.697.248,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
80.	2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**6.600.400,00**							**15.300.000,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***6.600.400,00***							***15.300.000,00***	
			1.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	96.99 Persentase		96.81 Persentase	96.85 Persentase	6.600.400,00						96.90 Persentase	15.300.000,00	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						6.600.400,00					Masyarakat		15.300.000,00	
		Terkelolanya informasi pasar kerja						6.600.400,00					Masyarakat		15.300.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	35 Orang		25 Orang	27 Orang	6.600.400,00						30 Orang	15.300.000,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						6.600.400,00							15.300.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	35 Orang		25 Orang	27 Orang	6.600.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		30 Orang	15.300.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
81.	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**73.341.289,00**							**137.580.229,56**	
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi						***73.341.289,00***							***137.580.229,56***	
			1.Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	12800 Orang		12000 Orang	12200 Orang	73.341.289,00						12400 Orang	137.580.229,56	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						32.464.864,00					Pekerja dan Perusahaan		54.192.322,56	
		Pemberdayaan sarana kesejahteraan pekerja						32.464.864,00					Pekerja dan Perusahaan		54.192.322,56	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.464.864,00						1 Laporan	43.992.322,56	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan		10 Perusahaan	10 Perusahaan	5.000.000,00						10 Perusahaan	10.200.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						5.000.000,00							10.200.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan		10 Perusahaan	10 Perusahaan	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		10 Perusahaan	10.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						27.464.864,00							43.992.322,56	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.464.864,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Laporan	43.992.322,56	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						45.876.425,00					Pekerja dan Perusahaan		93.587.907,00	
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis pada Perusahaan						45.876.425,00					Pekerja dan Perusahaan		93.587.907,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	11.801.060,00						5 Perkara	24.074.162,40	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	29.075.365,00						5 Perkara	59.313.744,60	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 Orang		20 Orang	20 Orang	5.000.000,00						20 Orang	10.200.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						29.075.365,00							59.313.744,60	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	29.075.365,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		5 Perkara	59.313.744,60	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						11.801.060,00							24.074.162,40	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	5 Perkara		5 Perkara	5 Perkara	11.801.060,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		5 Perkara	24.074.162,40	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						5.000.000,00							10.200.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 Orang		20 Orang	20 Orang	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		20 Orang	10.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**458.469.607,50**							**604.411.822,20**	
82.	2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**36.280.305,00**							**74.011.822,20**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***36.280.305,00***							***74.011.822,20***	
			1.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	36.280.305,00						20 Persentase	74.011.822,20	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						36.280.305,00					Koperasi		74.011.822,20	
		Terselenggaranya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi						36.280.305,00					Koperasi		74.011.822,20	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	36.280.305,00						10 Unit Usaha	74.011.822,20	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						36.280.305,00							74.011.822,20	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha		10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	36.280.305,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		10 Unit Usaha	74.011.822,20	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
83.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**334.036.500,00**							**408.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						***334.036.500,00***							***408.000.000,00***	
			1.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	334.036.500,00						100 Persentase	408.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						334.036.500,00					Pengurus Koperasi		408.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						334.036.500,00					Pengurus Koperasi		408.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang		54 Orang	50 Orang	334.036.500,00						50 Orang	408.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						334.036.500,00							408.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang		54 Orang	50 Orang	334.036.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		50 Orang	408.000.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
84.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**5.000.000,00**							**10.200.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas koperasi						***5.000.000,00***							***10.200.000,00***	
			1.Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	8 %		6 %	6.5 %	5.000.000,00						7 %	10.200.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00					Kelompok Masyarkat		10.200.000,00	
		Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						5.000.000,00					Kelompok Masyarkat		10.200.000,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00						5 Kelompok Masyarakat	10.200.000,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						5.000.000,00							10.200.000,00	
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat		5 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		5 Kelompok Masyarakat	10.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
85.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**83.152.802,50**							**112.200.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***83.152.802,50***							***112.200.000,00***	
			1.Pertumbuhan Wirausaha	0.9 Persentase		0.5 Persentase	0.6 Persentase	83.152.802,50						0.7 Persentase	112.200.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						83.152.802,50					Pelaku UMKM		112.200.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pendataan dan pembinaan UMKM						83.152.802,50					Pelaku UMKM		112.200.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	53.898.252,50						-	35.700.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	-	29.254.550,00						-	76.500.000,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						53.898.252,50							35.700.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	30 Orang	53.898.252,50	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	35.700.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0019	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha						29.254.550,00							76.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	10 Unit Usaha	29.254.550,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	76.500.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**31.729.424,02**							**88.325.583,18**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**31.729.424,02**							**88.325.583,18**	
86.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**19.125.841,44**							**61.570.920,96**	
		Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi						***19.125.841,44***							***61.570.920,96***	
			1.Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	75 Persentase		75 Persentase	75 Persentase	19.125.841,44						75 Persentase	61.570.920,96	
	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						19.125.841,44					Perangkat Daerah		61.570.920,96	
		Terlaksananya pencadangan tanah kawasan transmigrasi						19.125.841,44					Perangkat Daerah		61.570.920,96	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.723.884,00						1 Dokumen	31.328.076,00	
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi		1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	9.401.957,44						1 Kawasan Transmigrasi	30.242.844,96	
	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						9.723.884,00							31.328.076,00	
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.723.884,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Desa Tumbang Kajuei || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Dokumen	31.328.076,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						9.401.957,44							30.242.844,96	
		Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi		1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	9.401.957,44	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Desa Tumbang Kajuei || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Kawasan Transmigrasi	30.242.844,96	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
87.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**2.831.965,50**							**10.200.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembangunan di kawasan transmigrasi						***2.831.965,50***							***10.200.000,00***	
			1.Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	75 Persentase		75 Persentase	75 Persentase	2.831.965,50						75 Persentase	10.200.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.831.965,50					Transmigran		10.200.000,00	
		Terwujudnya penataan persebaran penduduk						2.831.965,50					Transmigran		10.200.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	2.831.965,50						1 Lokasi	10.200.000,00	
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi						2.831.965,50							10.200.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi		1 Lokasi	1 Lokasi	2.831.965,50	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Desa Tumbang Kajuei || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Lokasi	10.200.000,00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
88.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**9.771.617,08**							**16.554.662,22**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi						***9.771.617,08***							***16.554.662,22***	
			1.Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	75 Persentase		75 Persentase	75 Persentase	9.771.617,08						75 Persentase	16.554.662,22	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian						9.771.617,08					Transmigran		16.554.662,22	
		Terselenggaranya kegiatan satuan pemukiman						9.771.617,08					Transmigran		16.554.662,22	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	400 Kepala Keluarga		400 Kepala Keluarga	400 Kepala Keluarga	9.771.617,08						400 Kepala Keluarga	16.554.662,22	
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						9.771.617,08							16.554.662,22	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	400 Kepala Keluarga		400 Kepala Keluarga	400 Kepala Keluarga	9.771.617,08	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Desa Tumbang Kajuei || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		400 Kepala Keluarga	16.554.662,22	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**6.243.180.609,36**							**6.253.070.609,35**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.243.180.609,36**							**6.253.070.609,35**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**6.243.180.609,36**							**6.253.070.609,35**	
89.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.382.566.464,36**							**5.323.110.609,35**	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas						***5.382.566.464,36***							***5.323.110.609,35***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	94.50 %		92.90 %	93 %	5.382.566.464,36						93.50 %	5.323.110.609,35	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.480.000,00					Perangkat Daerah		25.725.000,00	
		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah						25.480.000,00					Perangkat Daerah		25.725.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00						1 Dokumen	2.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	4.160.000,00						3 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00						1 Dokumen	2.550.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00						1 Dokumen	1.800.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000,00						1 Dokumen	3.418.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.420.000,00						3 Laporan	6.234.500,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.180.000,00						2 Laporan	4.122.500,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4.160.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	4.160.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.580.000,00							3.418.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.580.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	3.418.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.380.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.380.000,00							2.600.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.380.000,00							2.550.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.380.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.550.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.420.000,00							6.234.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.420.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	6.234.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.180.000,00							4.122.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	4.180.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	4.122.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.063.389.878,36					PNS, CPNS, PPPK - Paruh Waktu -Pegawai ASN		3.782.412.627,35	
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu						4.063.389.878,36					PNS, CPNS, PPPK - Paruh Waktu -Pegawai ASN		3.782.412.627,35	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.940.000,00						1 Laporan	1.800.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.940.000,00						2 Laporan	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.059.509.878,36						32 Orang/bulan	3.772.812.627,35	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.059.509.878,36							3.772.812.627,35	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		32 Orang/bulan	38 Orang/bulan	4.059.509.878,36	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		32 Orang/bulan	3.772.812.627,35	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.940.000,00							1.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.940.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.940.000,00							7.800.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.940.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	7.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.940.000,00					SKPD Perangat Daerah		1.800.000,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat SKPD						1.940.000,00					SKPD Perangat Daerah		1.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.940.000,00						2 Laporan	1.800.000,00	
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.940.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.940.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	1.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.856.000,00					SKPD Perangkat Daerah		102.228.000,00	
		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat SKPD						91.856.000,00					SKPD Perangkat Daerah		102.228.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.400.000,00						1 Paket	6.930.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		13 Orang	2 Orang	41.456.000,00						3 Orang	95.298.000,00	
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						50.400.000,00							6.930.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	6.930.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						41.456.000,00							95.298.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		13 Orang	7 Orang	41.456.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Orang	95.298.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						317.186.800,00					SKPD Perangkat Daerah		462.127.786,00	
		Persentase pelaksaanaan pelayanan administrasi umum SKPD						317.186.800,00					SKPD Perangkat Daerah		462.127.786,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	690.000,00						4 Dokumen	6.831.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	17.710.000,00						0 Dokumen	17.710.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.320.000,00						4 Laporan	12.906.100,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	144.460.200,00						55 Laporan	284.995.686,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	74.696.000,00						1 Paket	71.547.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.091.200,00						1 Paket	11.983.500,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.285.200,00						1 Paket	6.865.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.934.200,00						1 Paket	49.289.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.285.200,00							6.865.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.285.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	6.865.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						45.934.200,00							49.289.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	45.934.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	49.289.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.091.200,00							11.983.500,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.091.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	11.983.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						690.000,00							6.831.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	690.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	6.831.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						74.696.000,00							71.547.300,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	74.696.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	71.547.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.320.000,00							12.906.100,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.320.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	12.906.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						144.460.200,00							284.995.686,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	111 Laporan	144.460.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		55 Laporan	284.995.686,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						17.710.000,00							17.710.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	17.710.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		0 Dokumen	17.710.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						130.841.000,00					Gedung MPP Kabupaten Gunung Mas		551.983.896,00	
		Jumlah paket unit pengadaan sarana prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya						130.841.000,00					Gedung MPP Kabupaten Gunung Mas		551.983.896,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	130.841.000,00						3 Unit	551.983.896,00	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						130.841.000,00							551.983.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	130.841.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	551.983.896,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						418.134.186,00					SKPD Perangkat Daerah		91.399.500,00	
		Jumlah Laporan terpenuhinya pelayanan jasa penunjang SKPD						418.134.186,00					SKPD Perangkat Daerah		91.399.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	67.750.500,00						2 Laporan	67.750.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	333.255.156,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	17.128.530,00						3 Laporan	23.649.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						67.750.500,00							67.750.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	67.750.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	67.750.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.128.530,00							23.649.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	17.128.530,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	23.649.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						333.255.156,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	333.255.156,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						342.378.600,00					SKPD Perangkat Daerah		309.033.800,00	
		Jumlah paket pemeliharaan/Rehabilitasi Sapras Gendung Kantor atau Bangunan Lainnya						342.378.600,00					SKPD Perangkat Daerah		309.033.800,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	272.878.600,00						14 Unit	202.359.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	69.500.000,00						2 Unit	106.674.000,00	
		Jumlah unit kendaraan yang dipelihara dan dilunasi pajaknya						342.378.600,00					SKPD Perangkat Daerah		309.033.800,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	272.878.600,00						14 Unit	202.359.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	69.500.000,00						2 Unit	106.674.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						272.878.600,00							202.359.800,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	16 Unit	272.878.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		14 Unit	202.359.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						69.500.000,00							106.674.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	69.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	106.674.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13	Penataan Organisasi						3.880.000,00					SKPD Perangkat Daerah		3.600.000,00	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						3.880.000,00					SKPD Perangkat Daerah		3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.000,00						1 Dokumen	1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.000,00						1 Dokumen	1.800.000,00	
	2.18.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						1.940.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						1.940.000,00							1.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.940.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
90.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**177.120.100,00**							**334.500.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						***177.120.100,00***							***334.500.000,00***	
			1.Realisasi Total terhadap Target Investasi	93.50 Persentase		91.90 Persentase	92 Persentase	177.120.100,00						92.50 Persentase	334.500.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.918.900,00					Pelaku Usaha,PMA/PMDN		31.500.000,00	
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah						50.918.900,00					Pelaku Usaha,PMA/PMDN		31.500.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.918.900,00						1 Dokumen	31.500.000,00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						50.918.900,00							31.500.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.918.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	31.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						126.201.200,00					-		303.000.000,00	
		Realisasi Total terhadap Target Investasi						126.201.200,00					-		303.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	93.428.800,00						-	28.500.000,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	32.772.400,00						-	274.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						32.772.400,00							274.500.000,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	32.772.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	274.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						93.428.800,00							28.500.000,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	93.428.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	28.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
91.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**216.331.640,00**							**180.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						***216.331.640,00***							***180.000.000,00***	
			1.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	95.50 Persentase		93.98 Persentase	94 Persentase	216.331.640,00						94.50 Persentase	180.000.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						216.331.640,00					-		180.000.000,00	
		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi						216.331.640,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	216.331.640,00						1 Dokumen	180.000.000,00	
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						216.331.640,00							180.000.000,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	216.331.640,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
92.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**253.885.900,00**							**198.490.000,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko						***253.885.900,00***							***198.490.000,00***	
			1.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	91.50 Persentase		89.98 Persentase	90 Persentase	253.885.900,00						90.50 Persentase	198.490.000,00	
		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan						253.885.900,00					-		198.490.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4 Pelaku Usaha		4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	55.135.200,00						4 Pelaku Usaha	36.800.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha	150 Pelaku Usaha	130.038.000,00						150 Pelaku Usaha	110.890.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						130.038.000,00							110.890.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	150 Pelaku Usaha		150 Pelaku Usaha	200 Pelaku Usaha	130.038.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		150 Pelaku Usaha	110.890.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						55.135.200,00							36.800.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	4 Pelaku Usaha		4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	55.135.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Pelaku Usaha	36.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						253.885.900,00					-		198.490.000,00	
		Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan						253.885.900,00					-		198.490.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	68.712.700,00						-	50.800.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						68.712.700,00							50.800.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	25 Kegiatan Usaha	68.712.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	50.800.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
93.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**174.838.105,00**							**181.170.000,00**	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						***174.838.105,00***							***181.170.000,00***	
			1.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	98.90 Persentase		97 Persentase	97.50 Persentase	174.838.105,00						98 Persentase	181.170.000,00	
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha						174.838.105,00					-		181.170.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	14 Kegiatan Usaha		14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	76.463.600,00						14 Kegiatan Usaha	75.970.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	65.508.905,00						100 Pelaku Usaha	72.500.000,00	
		Pengawasan Penanaman Modal						174.838.105,00					-		181.170.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	14 Kegiatan Usaha		14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	76.463.600,00						14 Kegiatan Usaha	75.970.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	65.508.905,00						100 Pelaku Usaha	72.500.000,00	
		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha					174.838.105,00					-		181.170.000,00	
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	14 Kegiatan Usaha		14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	76.463.600,00						14 Kegiatan Usaha	75.970.000,00	
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	65.508.905,00						100 Pelaku Usaha	72.500.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha					65.508.905,00							72.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	140 Pelaku Usaha	65.508.905,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		100 Pelaku Usaha	72.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal					76.463.600,00							75.970.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	14 Kegiatan Usaha		14 Kegiatan Usaha	14 Kegiatan Usaha	76.463.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		14 Kegiatan Usaha	75.970.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					174.838.105,00						-	181.170.000,00	
		Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha					174.838.105,00						-	181.170.000,00	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	32.865.600,00							32.700.000,00	
		Pengawasan Penanaman Modal					174.838.105,00						-	181.170.000,00	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	32.865.600,00							32.700.000,00	
		Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam membuka usaha					174.838.105,00						-	181.170.000,00	
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	32.865.600,00							32.700.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya					32.865.600,00							32.700.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	8 Kegiatan Usaha	32.865.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	32.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
94.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**25.918.400,00**							**28.600.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						***25.918.400,00***							***28.600.000,00***	
			1.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	96.50 Persentase		94.50 Persentase	95 Persentase	25.918.400,00						95.50 Persentase	28.600.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25.918.400,00					-		28.600.000,00	
		Jumlah data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelauanan Perizinan Berusaha yang Terintegrasi secara Elekstronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan						25.918.400,00					-		28.600.000,00	
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.918.400,00						3 Dokumen	28.600.000,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						25.918.400,00							28.600.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.918.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	28.600.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**7.788.650.072,20**							**8.483.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.788.650.072,20**							**8.483.000.000,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**7.338.650.072,20**							**8.008.000.000,00**	
95.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.988.650.072,20**							**7.364.000.000,00**	
		Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah yang berkualitas						***6.988.650.072,20***							***7.364.000.000,00***	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	6.988.650.072,20						100 %	7.364.000.000,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						87.704.370,00					dokumen		105.000.000,00	
		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						87.704.370,00					dokumen		105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.185.425,00						6 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	85.518.945,00						6 Laporan	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.185.425,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.185.425,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						85.518.945,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	85.518.945,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.130.617.678,57					keuangan SKPD		6.512.000.000,00	
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.130.617.678,57					keuangan SKPD		6.512.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.640.249,00						1 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		31 Orang/bulan	32 Orang/bulan	6.115.977.429,57						34 Orang/bulan	6.500.000.000,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.115.977.429,57							6.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		31 Orang/bulan	58 Orang/bulan	6.115.977.429,57	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		34 Orang/bulan	6.500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						14.640.249,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14.640.249,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						33.424.779,00					barang milik daerah		50.000.000,00	
		Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						33.424.779,00					barang milik daerah		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.424.779,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						33.424.779,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.424.779,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.180.141,00					kepegawaian SKPD		56.000.000,00	
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.180.141,00					kepegawaian SKPD		56.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.222.775,00						2 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.438.226,00						2 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		13 Orang	14 Orang	25.519.140,00						16 Orang	50.000.000,00	
	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						2.222.775,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.222.775,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						2.438.226,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.438.226,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						25.519.140,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang		13 Orang	10 Orang	25.519.140,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Orang	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						337.558.399,63					rutin kantor		442.000.000,00	
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah						337.558.399,63					rutin kantor		442.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.700.400,00						3 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	102 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	7.186.201,00						100 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan		114 Laporan	114 Laporan	199.999.960,00						115 Laporan	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.583.401,00						2 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	26.004.969,00						42 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.493.610,00						1 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.083.018,63						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.487.360,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.019.480,00						1 Paket	25.000.000,00	
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.083.018,63							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.083.018,63	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						23.487.360,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.487.360,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						23.019.480,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.019.480,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.583.401,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.583.401,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.493.610,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.493.610,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						7.700.400,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.700.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						26.004.969,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	1 Paket	26.004.969,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		42 Paket	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						199.999.960,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115 Laporan		114 Laporan	100 Laporan	199.999.960,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		115 Laporan	240.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.186.201,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	102 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	7.186.201,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.994.104,00					laporan		323.000.000,00	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						273.994.104,00					laporan		323.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	206.000.000,00						2 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.494.104,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	2.500.000,00						150 Laporan	3.000.000,00	
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 Laporan		150 Laporan	10 Laporan	2.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		150 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						206.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	206.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						65.494.104,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.494.104,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.170.600,00					barang milik daerah		130.000.000,00	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						95.170.600,00					barang milik daerah		130.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	31.762.950,00						6 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	41.441.850,00						4 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	21.965.800,00						2 Unit	40.000.000,00	
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						41.441.850,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	2 Unit	41.441.850,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Unit	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31.762.950,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	31.762.950,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Unit	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21.965.800,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	4 Unit	21.965.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
96.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**237.360.000,00**							**265.000.000,00**	
		Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan						***237.360.000,00***							***265.000.000,00***	
			1.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	237.360.000,00						100 Nilai	265.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						131.414.800,00					perpustakaan kabupaten/kota		145.000.000,00	
		Persentase Progrram Pembinaan Perpustakaan						131.414.800,00					perpustakaan kabupaten/kota		145.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	11 Eksemplar		10 Eksemplar	11 Eksemplar	47.144.200,00						11 Eksemplar	55.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.270.600,00						1 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	5 Perpustakaan	0,00						1 Perpustakaan	0,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	5 Perpustakaan	0,00						1 Perpustakaan	0,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Perpustakaan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Perpustakaan	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						84.270.600,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.270.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						47.144.200,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	11 Eksemplar		10 Eksemplar	10 Eksemplar	47.144.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		11 Eksemplar	55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						105.945.200,00					Siswa / masyarakat gemar membaca		120.000.000,00	
		Persentase Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						105.945.200,00					Siswa / masyarakat gemar membaca		120.000.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6 Orang		6 Orang	6 Orang	78.575.800,00						6 Orang	85.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang		20 Orang	25 Orang	27.369.400,00						25 Orang	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						78.575.800,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	6 Orang		6 Orang	6 Orang	78.575.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Orang	85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						27.369.400,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	25 Orang		20 Orang	20 Orang	27.369.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Orang	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
97.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**112.640.000,00**							**125.000.000,00**	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***112.640.000,00***							***125.000.000,00***	
			2.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	112.640.000,00						100 Persentase	125.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						73.870.670,00					masyarakat pemilik naskah kuno		80.000.000,00	
		Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						73.870.670,00					masyarakat pemilik naskah kuno		80.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	06 Orang		04 Orang	01 Orang	73.870.670,00						05 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0 Eksemplar		0 Eksemplar	1 Eksemplar	0,00						0 Eksemplar	0,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						73.870.670,00							80.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	06 Orang		04 Orang	10 Orang	73.870.670,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		05 Orang	80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	0 Eksemplar		0 Eksemplar	1 Eksemplar	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		0 Eksemplar	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						38.769.330,00					koleksi etnis		45.000.000,00	
		Persentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						38.769.330,00					koleksi etnis		45.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	120 Eksemplar		100 Eksemplar	110 Eksemplar	38.769.330,00						110 Eksemplar	45.000.000,00	
	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						38.769.330,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	120 Eksemplar		100 Eksemplar	100 Eksemplar	38.769.330,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		110 Eksemplar	45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**450.000.000,00**							**475.000.000,00**	
98.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**450.000.000,00**							**475.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***450.000.000,00***							***475.000.000,00***	
			2.Tingkat Ketersediaan Arsip	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	450.000.000,00						100 Persentase	475.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						416.918.700,00					arsip		425.000.000,00	
		Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						416.918.700,00					arsip		425.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Laporan		10 Laporan	27 Laporan	225.991.340,00						27 Laporan	235.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	310 Berkas		300 Berkas	310 Berkas	154.706.950,00						310 Berkas	160.000.000,00	
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	310 Berkas		300 Berkas	300 Berkas	36.220.410,00						310 Berkas	30.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						154.706.950,00							160.000.000,00	
		Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	310 Berkas		300 Berkas	300 Berkas	154.706.950,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		310 Berkas	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis						36.220.410,00							30.000.000,00	
		Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	310 Berkas		300 Berkas	300 Berkas	36.220.410,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		310 Berkas	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						225.991.340,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	27 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	225.991.340,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		27 Laporan	235.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						33.081.300,00					arsip statis daerah		50.000.000,00	
		Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						33.081.300,00					arsip statis daerah		50.000.000,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip		200 Arsip	250 Arsip	33.081.300,00						250 Arsip	50.000.000,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						33.081.300,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	300 Arsip		200 Arsip	200 Arsip	33.081.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		250 Arsip	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						0,00					Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		0,00	
		Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						0,00					Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		0,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						0,00							0,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	10 Pengguna	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN						**9.224.643.143,60**							**48.554.978,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.141.015.118,22**							**48.554.978,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**8.141.015.118,22**							**48.554.978,00**	
99.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.582.603.318,22**							**48.554.978,00**	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	7.582.603.318,22						-	48.554.978,00	
			PERSENTASE PELAKSANAAN PELAYANAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	100 %	7.582.603.318,22						-	48.554.978,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.657.155,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		48.554.978,00	
		Terlaksananya dan Tersusunnya Kegiatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						39.657.155,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		48.554.978,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	22.968.850,00						6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	16.688.305,00						18 Laporan	48.554.978,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						22.968.850,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	22.968.850,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		6 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.688.305,00							48.554.978,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan		18 Laporan	6 Laporan	16.688.305,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		18 Laporan	48.554.978,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.982.455.221,71					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya dan Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.982.455.221,71					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	28.616.700,00						18 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.953.838.521,71						55 Orang/bulan	0,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.953.838.521,71							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.953.838.521,71	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		55 Orang/bulan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						28.616.700,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	2 Laporan	28.616.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		18 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.174.380,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.174.380,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.174.380,00						1 Laporan	0,00	
	2.09.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						1.174.380,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.174.380,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		1 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						46.683.775,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						46.683.775,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	13.043.400,00						10 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	33.640.375,00						8 Orang	0,00	
	2.09.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						13.043.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	13.043.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		10 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						33.640.375,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		8 Orang	5 Orang	33.640.375,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		8 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						531.816.943,61					-		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						531.816.943,61					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	9.000.000,00						10 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	31.163.950,00						4 Laporan	0,00		
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	184.042.315,00						30 Laporan	0,00		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	0,00		
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	57.938.047,00						2 Paket	0,00		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	16.350.990,00						6 Paket	0,00		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	0,00		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	218.321.641,61						4 Paket	0,00		
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor					5.000.000,00							0,00		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		2 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						218.321.641,61							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	218.321.641,61	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		4 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		4 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.350.990,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	2 Paket	16.350.990,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		6 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						9.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		10 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						57.938.047,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	57.938.047,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		2 Paket	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						31.163.950,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	31.163.950,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		4 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						184.042.315,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	184.042.315,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		30 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.000.000,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.000.000,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	285.000.000,00						1 Unit	0,00	
	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						285.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	285.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		1 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						498.500.371,90					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						498.500.371,90					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.035.750,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	422.204.621,90						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.260.000,00						4 Laporan	0,00	
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.260.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.260.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		4 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						72.035.750,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.035.750,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		12 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						422.204.621,90							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	422.204.621,90	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		12 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.315.471,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
		Tersedia dan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.315.471,00					ASN DPKP Kab. Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	100.764.711,00						21 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit		21 Unit	21 Unit	23.000.000,00						21 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	73.550.760,00						1 Unit	0,00	
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.764.711,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	100.764.711,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		21 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						23.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	21 Unit		21 Unit	23 Unit	23.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		21 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						73.550.760,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	73.550.760,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		1 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
100.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**69.569.575,00**							**0,00**	
		Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkualitas						***69.569.575,00***							***0,00***	
			1.Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	100 poin		86.2 poin	88.9 poin	69.569.575,00						91.7 poin	0,00	
			2.Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	100 poin		95 poin	95 poin	69.569.575,00						96 poin	0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Daerah Kabupaten						62.049.150,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.215.650,00						12 Laporan	0,00	
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						5.215.650,00							0,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	5.215.650,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		12 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						7.520.425,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang berkualitas						7.520.425,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	7.520.425,00						20 Laporan	0,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						7.520.425,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20 Laporan		20 Laporan	2 Laporan	7.520.425,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		20 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						62.049.150,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Gerakan Pangan Murah di Daerah Kabupaten						62.049.150,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	-	56.833.500,00						-	0,00	
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						56.833.500,00							0,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	-		-	2 laporan	56.833.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
101.	2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**27.369.179,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan						***27.369.179,00***							***0,00***	
			1.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	28 %		17 %	20 %	27.369.179,00						23 %	0,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						27.369.179,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan						27.369.179,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	14.559.350,00						8 Laporan	0,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.809.829,00						8 Dokumen	0,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						12.809.829,00							0,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	12.809.829,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		8 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						14.559.350,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	14.559.350,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		8 Laporan	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
102.	2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**461.473.046,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan						***461.473.046,00***							***0,00***	
			1.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	90 Persentase		60 Persentase	75 Persentase	461.473.046,00						80 Persentase	0,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						461.473.046,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah						461.473.046,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	461.473.046,00						1 Dokumen	0,00	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						461.473.046,00							0,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	461.473.046,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		1 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.083.628.025,38**							**0,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.083.628.025,38**							**0,00**	
103.	3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**122.108.870,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap						***122.108.870,00***							***0,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	220 Ton		180 Ton	190 Ton	122.108.870,00						200 Ton	0,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						44.461.260,00					Masyarakat Perikanan Tangkap Kabupaten Gunung MAs		0,00	
		Meningkatnya Tangkapan Ikan di Wilayah PUD						44.461.260,00					Masyarakat Perikanan Tangkap Kabupaten Gunung MAs		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	44.461.260,00						30 Dokumen	0,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						44.461.260,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	44.461.260,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		30 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil						77.647.610,00					Masyarakat Perikanan Tangkap Kabupaten Gunung MAs		0,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	43.498.560,00						50 Orang	0,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						43.498.560,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	20 Orang	43.498.560,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		50 Orang	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						77.647.610,00					Masyarakat Perikanan Tangkap Kabupaten Gunung MAs		0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil						77.647.610,00					Masyarakat Perikanan Tangkap Kabupaten Gunung MAs		0,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	-	34.149.050,00						-	0,00	
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						34.149.050,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	-		-	4 Kelompok	34.149.050,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
104.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**799.692.455,38**							**0,00**	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya						***799.692.455,38***							***0,00***	
			1.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1430 Ton		1330 Ton	1355 Ton	799.692.455,38						1380 Ton	0,00	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya						799.692.455,38					Masyarakat Perikanan Pembudidaya Ikan Kabupaten Gunung MAs		0,00	
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	262.267.149,88						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	35.652.050,00						30 Dokumen	0,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	140.668.103,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	337.376.997,00						2 Unit	0,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						35.652.050,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	35.652.050,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		30 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						140.668.103,00							0,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	140.668.103,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		2 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						337.376.997,00							0,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit		2 Unit	2 Unit	337.376.997,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		2 Unit	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						262.267.149,88							0,00	
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	262.267.149,88	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		3 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						799.692.455,38					Masyarakat Perikanan Pembudidaya Ikan Kabupaten Gunung MAs		0,00	
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya						799.692.455,38					Masyarakat Perikanan Pembudidaya Ikan Kabupaten Gunung MAs		0,00	
			Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	23.728.155,50						-	0,00	
	3.25.04.2.04.0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						23.728.155,50							0,00	
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	23.728.155,50	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
105.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**161.826.700,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat						***121.826.700,00***							***0,00***	
			1.Angka Konsumsi Ikan	41 Kg/KAP/TH		37 Kg/KAP/TH	38 Kg/KAP/TH	121.826.700,00						39 Kg/KAP/TH	0,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						14.407.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Meningkatnya Produksi Hasil Usaha Perikanan						14.407.800,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	14.407.800,00						30 Dokumen	0,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						14.407.800,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	14.407.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		30 Dokumen	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						107.418.900,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Meningkatnya Konsumsi Olahan Ikan untuk Masyarakat						107.418.900,00					Masyarakat Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Ton		36 Ton	37 Ton	107.418.900,00						38 Ton	0,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						107.418.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 Ton		36 Ton	36 Ton	107.418.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		38 Ton	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
				-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						40.000.000,00					-		0,00	
		-						40.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	-		-	2 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		-	0,00	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						**9.532.817.776,68**							**12.367.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.082.646.426,68**							**11.807.500.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**9.082.646.426,68**							**11.807.500.000,00**	
106.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.088.742.728,68**							**6.264.500.000,00**	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan						***6.088.742.728,68***							***6.264.500.000,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	6.088.742.728,68						100 %	6.264.500.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.499.200,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	1.999.800,00						100 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	9.500.400,00						100 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	5.999.800,00						100 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	2.999.600,00						100 Dokumen	4.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.999.600,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	2.999.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						5.999.800,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	5.999.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.999.800,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	1.999.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.500.400,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	9.500.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.927.045.070,68					Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		5.045.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	12.168.000,00						100 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	4.900.007.270,68						12 Orang/bulan	5.000.000.000,00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.900.007.270,68							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	60 Orang/bulan	4.900.007.270,68	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Orang/bulan	5.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						12.168.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	12.168.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						136.024.000,00					Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		170.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						136.024.000,00					Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	77.302.000,00						100 Orang	100.000.000,00	
	2.22.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						77.302.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	10 Orang	77.302.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						377.656.600,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		474.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						377.656.600,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		474.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	6.955.200,00						100 Dokumen	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	264.765.800,00						100 Laporan	320.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	55.833.000,00						100 Paket	95.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	40.123.600,00						100 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	9.979.000,00						100 Paket	12.000.000,00	
	2.22.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.979.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	5 Paket	9.979.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Paket	12.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.833.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	30 Paket	55.833.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Paket	95.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.123.600,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	2 Paket	40.123.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Paket	40.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						6.955.200,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100 Dokumen		100 Dokumen	4 Dokumen	6.955.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	7.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						264.765.800,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	80 Laporan	264.765.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Laporan	320.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						94.500.000,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						94.500.000,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	94.500.000,00						100 Unit	150.000.000,00	
	2.22.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						94.500.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	12 Unit	94.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Unit	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						231.560.058,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		193.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						231.560.058,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		193.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	55.038.000,00						100 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	35.533.394,00						100 Laporan	68.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	140.988.664,00						100 Laporan	70.000.000,00	
	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						140.988.664,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	140.988.664,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Laporan	70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						55.038.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	55.038.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Laporan	55.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.533.394,00							68.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	35.533.394,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Laporan	68.500.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294.759.200,00					Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		290.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294.759.200,00					Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		290.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	29.885.000,00						100 Unit	30.000.000,00	
	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						29.885.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	1 Unit	29.885.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Unit	30.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.13	Penataan Organisasi						6.698.200,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		4.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Organisasi						6.698.200,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	6.698.200,00						100 Dokumen	4.000.000,00	
	2.22.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						6.698.200,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	6.698.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	4.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.499.200,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		21.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						23.499.200,00					Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	-	2.999.600,00						-	4.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.999.600,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-		-	1 Laporan	2.999.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	4.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.927.045.070,68					Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		5.045.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.927.045.070,68					Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		5.045.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	-	14.869.800,00						-	20.000.000,00	
	2.22.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						14.869.800,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-		-	12 Dokumen	14.869.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	20.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						136.024.000,00					Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		170.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	58.722.000,00						-	70.000.000,00	
	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						58.722.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	58 Paket	58.722.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						294.759.200,00					Aset Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Mas		290.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	264.874.200,00						-	260.000.000,00	
	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						264.874.200,00							260.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	10 Unit	264.874.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	260.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
107.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**2.027.354.318,00**							**2.200.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						***2.027.354.318,00***							***2.200.000.000,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.027.354.318,00						100 Persentase	2.200.000.000,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.090.991.500,00					Masyarakat Terhadap Pelaku Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas		2.000.000.000,00	
		Meningkatnya presentasi pelaku kebudayaan Dalam Daerah						1.090.991.500,00					Masyarakat Terhadap Pelaku Pengembangan Kebudayaan Kabupaten Gunung Mas		2.000.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	15 Objek		15 Objek	15 Objek	1.090.991.500,00						15 Objek	2.000.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						1.090.991.500,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	15 Objek		15 Objek	15 Objek	1.090.991.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Objek	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						936.362.818,00					Pelaku Seni Kabupaten Gunung Mas		2.200.000.000,00	
		Meningkatnya presentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						936.362.818,00					Pelaku Seni Kabupaten Gunung Mas		2.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	936.362.818,00						100 Laporan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 Objek		100 Objek	100 Objek	0,00						100 Objek	200.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	100 Objek		100 Objek	1 Objek	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Objek	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						936.362.818,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	936.362.818,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
108.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**242.579.900,00**							**350.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						***242.579.900,00***							***350.000.000,00***	
			1.Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	100 %		100 %	100 %	242.579.900,00						100 %	350.000.000,00	
		Presentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						242.579.900,00					Pelaku Seni di Kabupaten Gunung Mas		350.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang		100 Orang	100 Orang	192.143.900,00						100 Orang	200.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						192.143.900,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100 Orang		100 Orang	80 Orang	192.143.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						242.579.900,00					Pelaku Seni di Kabupaten Gunung Mas		350.000.000,00	
		Presentase Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						242.579.900,00					Pelaku Seni di Kabupaten Gunung Mas		350.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	50.436.000,00						-	150.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						50.436.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	1 Lembaga	50.436.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	150.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
109.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**141.054.900,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah						***141.054.900,00***							***100.000.000,00***	
			4.Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	141.054.900,00						100 Persentase	100.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						141.054.900,00					Masyarakat Umum, Pelajar/Mahasiswa dan Komunitas Budaya/Sejarah		100.000.000,00	
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Akses Masyarakat terhadap data dan Informasi Sejara						141.054.900,00					Masyarakat Umum, Pelajar/Mahasiswa dan Komunitas Budaya/Sejarah		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	141.054.900,00						100 Dokumen	100.000.000,00	
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						141.054.900,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	141.054.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
110.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**503.159.380,00**							**600.000.000,00**	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						***103.402.100,00***							***100.000.000,00***	
			5.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	103.402.100,00						100 Persentase	100.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						103.402.100,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Yang Berperan Dalam Proses Identifikasi, Pengkajian, Penetapan dan Pelesatarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda		200.000.000,00	
		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan						103.402.100,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Yang Berperan Dalam Proses Identifikasi, Pengkajian, Penetapan dan Pelesatarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda		200.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	100 Objek		100 Objek	100 Objek	47.351.900,00						100 Objek	100.000.000,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	100 Objek		100 Objek	100 Objek	56.050.200,00						100 Objek	100.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						56.050.200,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	100 Objek		100 Objek	10 Objek	56.050.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Objek	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						47.351.900,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	100 Objek		100 Objek	4 Objek	47.351.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Objek	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-		-	-		399.757.280,00						-	500.000.000,00	
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						399.757.280,00					Situs Cagar Budaya Kabupaten Gunung Mas		500.000.000,00	
		-						399.757.280,00					Situs Cagar Budaya Kabupaten Gunung Mas		500.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	-	149.999.680,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	-	249.757.600,00						-	300.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						249.757.600,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	-		-	14 Objek	249.757.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	300.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						149.999.680,00							200.000.000,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	-		-	1 Objek	149.999.680,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	200.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
111.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**76.755.600,00**							**110.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola museum						***76.755.600,00***							***110.000.000,00***	
			6.Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	76.755.600,00						100 Persentase	110.000.000,00	
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						76.755.600,00					Museum Mini dan Museum TMII Anjungan Kalimanten Tengah Kabup[aten Gunung Mas		110.000.000,00	
		Terpeliharanya Museum yang dikelola						76.755.600,00					Museum Mini dan Museum TMII Anjungan Kalimanten Tengah Kabup[aten Gunung Mas		110.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	48.315.000,00						100 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.440.600,00						100 Orang	50.000.000,00	
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						28.440.600,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	4 Orang	28.440.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						48.315.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	100 Unit		100 Unit	1 Unit	48.315.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Unit	60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**450.171.350,00**							**560.000.000,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**450.171.350,00**							**560.000.000,00**	
112.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**122.000.800,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***90.210.000,00***							***50.000.000,00***	
			7.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	90.210.000,00						100 Persentase	50.000.000,00	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						90.210.000,00					Kawasan/Objek Wisata di Kabupaten Gunung Mas		50.000.000,00	
		Persentase Pengalolaan Kawasan Strategis Pariwisata						90.210.000,00					Kawasan/Objek Wisata di Kabupaten Gunung Mas		50.000.000,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Lokasi		100 Lokasi	100 Lokasi	90.210.000,00						100 Lokasi	50.000.000,00	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						90.210.000,00							50.000.000,00	
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100 Lokasi		100 Lokasi	2 Lokasi	90.210.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Lokasi	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	-		-	100 %	31.790.800,00						-	50.000.000,00	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						31.790.800,00					Air Terjun Batu Bahasur dan DAM Sakata Juri		50.000.000,00	
		-						31.790.800,00					Air Terjun Batu Bahasur dan DAM Sakata Juri		50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	-	31.790.800,00						-	50.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						31.790.800,00							50.000.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	-		-	1 Unit	31.790.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
113.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**268.208.150,00**							**310.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						***268.208.150,00***							***310.000.000,00***	
			9.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	268.208.150,00						100 Persentase	310.000.000,00	
		Promosi Pariwisata yang berkelanjutan						268.208.150,00					Wisatawan Domestik dan Internasional		310.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Kegiatan		100 Kegiatan	100 Kegiatan	218.229.750,00						100 Kegiatan	250.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						218.229.750,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	100 Kegiatan		100 Kegiatan	2 Kegiatan	218.229.750,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Kegiatan	250.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						268.208.150,00					Wisatawan Domestik dan Internasional		310.000.000,00	
		Promosi Pariwisata yang berkelanjutan						268.208.150,00					Wisatawan Domestik dan Internasional		310.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-		-	-	49.978.400,00						-	60.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						49.978.400,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-		-	1 Dokumen	49.978.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
114.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**59.962.400,00**							**80.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif						***59.962.400,00***							***80.000.000,00***	
			10.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	59.962.400,00						100 Persentase	80.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						59.962.400,00					Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf), UMKM dan Startup Kreatif, Komunitas Kreatif		80.000.000,00	
		Presentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						59.962.400,00					Pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf), UMKM dan Startup Kreatif, Komunitas Kreatif		80.000.000,00	
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	100 Promosi		100 Promosi	100 Promosi	59.962.400,00						100 Promosi	80.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif						59.962.400,00							80.000.000,00	
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	100 Promosi		100 Promosi	1 Promosi	59.962.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Promosi	80.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
115.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**0,00**							**70.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						***0,00***							***70.000.000,00***	
			1.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	60.00 Persentase		50.45 Persentase	50.50 Persentase	0,00						50.55 Persentase	70.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						0,00					Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		70.000.000,00	
		Terlaksanannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						0,00					Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-		-	5 Laporan	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	70.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		DINAS PERTANIAN						**15.331.135.637,04**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.044.354.282,19**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**15.044.354.282,19**							**0,00**	
116.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.102.448.682,19**							**0,00**	
		TERPENUHINYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						***13.102.448.682,19***							***0,00***	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	13.102.448.682,19						100 %	0,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.669.000,00					Seluruh PD		0,00	
		Persentase Terlaksananya Kegiatan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dilaksanakan						67.669.000,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	59.669.000,00						7 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						59.669.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	59.669.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		7 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		4 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		4 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.049.392.959,04					Seluruh PD		0,00	
		Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan						11.049.392.959,04					Seluruh PD		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.463.400,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/bulan		131 Orang/bulan	136 Orang/bulan	11.016.929.559,04						139 Orang/bulan	0,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.016.929.559,04							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	145 Orang/bulan		131 Orang/bulan	76 Orang/bulan	11.016.929.559,04	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		139 Orang/bulan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						32.463.400,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	32.463.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						43.637.800,00					Seluruh PD		0,00	
		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						43.637.800,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.637.800,00						1 Laporan	0,00	
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						43.637.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.637.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						47.520.000,00					Seluruh PD		0,00	
		Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						47.520.000,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	47.520.000,00						1 Paket	0,00	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						47.520.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	47.520.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Paket	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						217.437.134,31					Seluruh PD		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						217.437.134,31					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.918.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	99.793.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.398.675,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.660.018,97						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	49.667.440,34						1 Paket	0,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						49.667.440,34							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	49.667.440,34	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Paket	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						99.793.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	99.793.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Paket	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.660.018,97							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.660.018,97	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Paket	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						19.918.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	19.918.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		3 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.398.675,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.398.675,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Paket	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.240.500,00					Seluruh PD		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						61.240.500,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	11 Unit	61.240.500,00						11 Unit	0,00	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						61.240.500,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		10 Unit	6 Unit	61.240.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		11 Unit	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						906.298.993,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						906.298.993,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	147.300.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan		27 Laporan	28 Laporan	753.998.993,00						29 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						147.300.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	147.300.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		3 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						753.998.993,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan		27 Laporan	1 Laporan	753.998.993,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		29 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						714.252.295,84					Seluruh PD		0,00	
		Tersedia dan Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						714.252.295,84					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	118.406.100,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		25 Unit	27 Unit	258.768.300,00						27 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		20 Unit	21 Unit	37.077.895,84						21 Unit	0,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						258.768.300,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		25 Unit	20 Unit	258.768.300,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		27 Unit	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						300.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	10 Unit	300.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Unit	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.077.895,84							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit		20 Unit	20 Unit	37.077.895,84	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		21 Unit	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						118.406.100,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	118.406.100,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		1 Unit	0,00	DINAS PERTANIAN
117.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**232.165.591,00**							**0,00**	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS SARANA PERTANIAN						***232.165.591,00***							***0,00***	
			1.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1562,48 Persentase		1336,45 Persentase	1390,31 Persentase	232.165.591,00						1446,33 Persentase	0,00	
			2.Peningkatan Produksi Hortikultura	826,59 Persentase		420,71 Persentase	497,10 Persentase	232.165.591,00						588,18 Persentase	0,00	
			3.Peningkatan Produksi Peternakan	1249.34 Ton		1110.02 Ton	1143.32 Ton	232.165.591,00						1177.62 Ton	0,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						182.085.291,00					Seluruh PD		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						182.085.291,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	12.085.291,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00						3 Laporan	0,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						170.000.000,00							0,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	170.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		3 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						12.085.291,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.085.291,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		2 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						50.080.300,00					-		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						50.080.300,00					-		0,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	1 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.080.300,00						1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman						50.080.300,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	2 Varietas Unggul Baru (VUB)		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	50.080.300,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	DINAS PERTANIAN
118.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**452.007.225,00**							**0,00**	
		MENINGKATNYA DISTRIBUSI DAN KUALITAS PRASARANA PERTANIAN						***452.007.225,00***							***0,00***	
			1.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	1377.90 Ha		1324.13 Ha	1337.37 Ha	452.007.225,00						1350.75 Ha	0,00	
			1.Persentase Terlaksananya Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100 %		100 %	100 %	452.007.225,00						100 %	0,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						477.007.225,00					Seluruh PD		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian						477.007.225,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	276.657.725,00						6 Laporan	0,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						276.657.725,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	276.657.725,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		6 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota						25.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		2 Dokumen	0,00	DINAS PERTANIAN
		Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian						477.007.225,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	-	150.349.500,00						-	0,00	
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						25.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian						150.349.500,00							0,00	
		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	-		-	0 Dokumen	150.349.500,00	Kab. Gunung Mas	DBH Sawit	-	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		-	0,00	DINAS PERTANIAN
119.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**520.000.000,00**							**0,00**	
		PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						***520.000.000,00***							***0,00***	
			1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (Phms)	100 %		90 %	100 %	520.000.000,00						100 %	0,00	
			2.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	520.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						419.749.535,00					-		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						419.749.535,00					-		0,00	
			Jumlah kader zoonosis	3 Orang		2 Orang	2 Orang	100.053.235,00						2 Orang	0,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	319.696.300,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis						100.053.235,00							0,00	
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	3 Orang		2 Orang	1 Orang	100.053.235,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		2 Orang	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						319.696.300,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	319.696.300,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		4 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						100.250.465,00					Seluruh PD		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						100.250.465,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	57 Orang		50 Orang	52 Orang	100.250.465,00						53 Orang	0,00	
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan						100.250.465,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	57 Orang		50 Orang	15 Orang	100.250.465,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		53 Orang	0,00	DINAS PERTANIAN
120.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**68.321.759,00**							**0,00**	
		MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						***68.321.759,00***							***0,00***	
			1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 Persentase		75 Persentase	80 Persentase	68.321.759,00						85 Persentase	0,00	
			2.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100 Persentase		70 Persentase	75 Persentase	68.321.759,00						85 Persentase	0,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						68.321.759,00					-		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						68.321.759,00					-		0,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	7 Ha		5 Ha	6 Ha	28.346.075,00						6 Ha	0,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15 Ha		10 Ha	10 Ha	39.975.684,00						12 Ha	0,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						39.975.684,00							0,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15 Ha		10 Ha	5 Ha	39.975.684,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		12 Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						28.346.075,00							0,00	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	7 Ha		5 Ha	1 laporan Ha	28.346.075,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		6 Ha	0,00	DINAS PERTANIAN
121.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**104.888.400,00**							**0,00**	
		MENINGKATNYA KUALITAS DAN KEMUDAHAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN						***104.888.400,00***							***0,00***	
			1.Persentase Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	100 %		100 %	100 %	104.888.400,00						100 %	0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						104.888.400,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.788.400,00						1 Laporan	0,00	
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						32.788.400,00							0,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	32.788.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		1 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						104.888.400,00					Seluruh PD		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						104.888.400,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	-	72.100.000,00						-	0,00	
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian						72.100.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	-		-	0 Dokumen	72.100.000,00	Kab. Gunung Mas	DBH Sawit	-	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		-	0,00	DINAS PERTANIAN
122.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**494.522.625,00**							**0,00**	
		MENINGKATNYA KAPASITAS SDM BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN						***494.522.625,00***							***0,00***	
			1.Persentase SDM Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan	100 %		100 %	100 %	494.522.625,00						100 %	0,00	
			2.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	100 %		75 %	80 %	494.522.625,00						85 %	0,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						534.522.625,00					-		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						534.522.625,00					-		0,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	-	454.522.625,00						-	0,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	-	40.000.000,00						-	0,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						454.522.625,00							0,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	1 Dokumen	454.522.625,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Sawit	-	7. Penguatan hilirisasi perekonomian berbasis potensi agro (pertanian dalam arti luas)		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	6 Unit	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa						40.000.000,00							0,00	
		Tersedia Sarana dan prasarana serta Terpeliharanya sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	-		-	6 Unit	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		-	0,00	DINAS PERTANIAN
	X							**286.781.354,85**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**286.781.354,85**							**0,00**	
123.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**286.781.354,85**							**0,00**	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	286.781.354,85						-	0,00	
			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 Persentase	286.781.354,85						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						286.781.354,85					Seluruh PD		0,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						286.781.354,85					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		100 Laporan	110 Laporan	286.781.354,85						110 Laporan	0,00	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						286.781.354,85							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	286.781.354,85	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	6. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian berkualitas, khususnya produksi, pengolahan dan pemasaran		110 Laporan	0,00	DINAS PERTANIAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**5.660.943.098,60**							**5.727.605.588,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.743.330.744,00**							**1.853.605.588,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**1.307.583.858,00**							**1.419.045.588,00**	
124.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**360.537.900,00**							**299.500.000,00**	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						***345.161.500,00***							***295.500.000,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	345.161.500,00						100 %	295.500.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.342.600,00					-		67.500.000,00	
		Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.342.600,00					-		67.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	3.500.400,00						100 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	3.500.400,00						100 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	0,00						100 Laporan	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	0,00						100 Laporan	3.500.000,00	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.500.400,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	3.500.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.500.400,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	3.500.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Dokumen	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Laporan	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Laporan	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						314.495.300,00					-		280.000.000,00	
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah						314.495.300,00					-		280.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	314.495.300,00						Laporan	280.000.000,00	
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						314.495.300,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	22 Laporan	314.495.300,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		Laporan	280.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			-	-		-	-	15.376.400,00						-	16.000.000,00	
		Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						21.342.600,00					-		67.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	-	10.992.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	-	0,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	-	3.349.800,00						-	3.500.000,00	
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.349.800,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		-	1 Dokumen	3.349.800,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		-	0 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							3.500.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-		-	1 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.01.2.01.0009					Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							3.500.000,00	
						Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0010					Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							12.000.000,00	
						Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0011					Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							12.000.000,00	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	-		-	4 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0013					Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						10.992.000,00							12.000.000,00	
						Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	-		-	12 Berita Acara	10.992.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.824.000,00					-		12.000.000,00	
						Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.824.000,00					-		12.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	-	12.824.000,00						-	12.000.000,00	
	3.30.01.2.02.0003					Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.824.000,00							12.000.000,00	
						Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-		-	12 Dokumen	12.824.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.376.400,00					-		16.000.000,00	
						-						15.376.400,00					-		16.000.000,00	
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	11.326.400,00						-	12.000.000,00	
							Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	-	4.050.000,00						-	4.000.000,00	
	3.30.01.2.03.0004					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						11.326.400,00							12.000.000,00	
						Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	5 Laporan	11.326.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.050.000,00							4.000.000,00	
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-		-	5 Laporan	4.050.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
125.	**3.30.02**					**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**41.652.200,00**							**41.652.200,00**	
						Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian						***22.006.000,00***							***22.006.000,00***	
							1.Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	22.006.000,00						100 Persentase	22.006.000,00	
							-	-		-	-	19.646.200,00						-	19.646.200,00	
	3.30.02.2.01					Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						2.076.000,00					-		2.076.000,00	
						Terpenuhinya Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						2.076.000,00					-		2.076.000,00	
							Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	2.076.000,00						-	2.076.000,00	
	3.30.02.2.01.0001					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						2.076.000,00							2.076.000,00	
						Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	35 Dokumen	2.076.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.076.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.05					Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						19.930.000,00					-		19.930.000,00	
						Terpenuhinya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat						19.930.000,00					-		19.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	-	19.930.000,00						-	19.930.000,00	
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C						19.930.000,00							19.930.000,00	
		Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-		-	50 Dokumen	19.930.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	19.930.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						19.646.200,00					-		19.646.200,00	
		-						19.646.200,00					-		19.646.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	-	19.646.200,00						-	19.646.200,00	
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)						19.646.200,00							19.646.200,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-		-	1 Laporan	19.646.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	19.646.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
126.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**669.432.088,00**							**669.432.088,00**	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***646.910.188,00***							***646.909.788,00***	
			1.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	646.910.188,00						100 Persentase	646.909.788,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						21.909.698,00					-		21.909.700,00	
		Persentase Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						21.909.698,00					-		21.909.700,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	21.909.698,00						100 Laporan	21.909.700,00	
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						21.909.698,00							21.909.700,00	
		Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	21.909.698,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	21.909.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						625.000.490,00					-		625.000.088,00	
		Persentase Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						625.000.490,00					-		625.000.088,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	600.000.488,00						100 Laporan	600.000.088,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	25.000.002,00						100 Laporan	25.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						25.000.002,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	25.000.002,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						600.000.488,00							600.000.088,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	600.000.488,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Laporan	600.000.088,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		-	-	-		-	-	22.521.900,00						-	22.522.300,00	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22.521.900,00					-		22.522.300,00	
		-						22.521.900,00					-		22.522.300,00	
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-		-	-	17.015.900,00						-	17.016.300,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-		-	-	5.506.000,00						-	5.506.000,00	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan						17.015.900,00							17.016.300,00	
		Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	-		-	6 Dokumen	17.015.900,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	17.016.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						5.506.000,00							5.506.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-		-	12 Laporan	5.506.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.506.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
127.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**199.999.980,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						***199.999.980,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase penanganan pengaduan konsumen	100 %		100 %	100 %	199.999.980,00						100 %	150.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						199.999.980,00					-		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit		100 Unit	100 Unit	99.999.980,00						100 Unit	150.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						99.999.980,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100 Unit		100 Unit	12 Unit	99.999.980,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Unit	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						199.999.980,00					-		300.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						199.999.980,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	-	100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	-		-	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
128.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**32.461.290,00**							**32.461.300,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						***32.461.290,00***							***32.461.300,00***	
			1.Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	32.461.290,00						100 Persentase	32.461.300,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						32.461.290,00					-		32.461.300,00	
		Terpenuhinya Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						32.461.290,00					-		32.461.300,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	32.461.290,00						-	32.461.300,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						32.461.290,00							32.461.300,00	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 UMKM	32.461.290,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	32.461.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**435.746.886,00**							**434.560.000,00**	
129.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**296.281.180,00**							**295.892.530,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri						***296.281.180,00***							***295.892.530,00***	
			1.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	296.281.180,00						100 Persentase	295.892.530,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						296.281.180,00					-		295.892.530,00	
		Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						296.281.180,00					-		295.892.530,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	44.000.480,00						100 Dokumen	44.000.480,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00						100 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	46.784.700,00						100 Dokumen	46.746.750,00	
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100 Dokumen		100 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						44.000.480,00							44.000.480,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	44.000.480,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	44.000.480,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						46.784.700,00							46.746.750,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100 Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	46.784.700,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	46.746.750,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						296.281.180,00					-		295.892.530,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	-	5.496.000,00						-	5.145.300,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						5.496.000,00							5.145.300,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-		-	1 Dokumen	5.496.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.145.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
130.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**12.695.554,00**							**12.550.226,00**	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						***12.695.554,00***							***12.550.226,00***	
			1.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	12.695.554,00						100 Persentase	12.550.226,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						12.695.554,00					-		12.550.226,00	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						12.695.554,00					-		12.550.226,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	7.293.000,00					100 Dokumen	7.149.337,00	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						7.293.000,00							7.149.337,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	7.293.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	7.149.337,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						12.695.554,00					-		12.550.226,00	
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	-	5.402.554,00						-	5.400.889,00	
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						5.402.554,00							5.400.889,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-		-	1 Dokumen	5.402.554,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	5.400.889,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
131.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**126.770.152,00**							**126.117.244,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						***126.770.152,00***							***126.117.244,00***	
			1.Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %		100 %	100 %	126.770.152,00						100 %	126.117.244,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						126.770.152,00					-		126.117.244,00	
		Persentase Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						126.770.152,00					-		126.117.244,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	54.334.552,00						100 Dokumen	54.113.746,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	40.928.500,00						100 Dokumen	40.494.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	31.507.100,00						100 Dokumen	31.509.098,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						40.928.500,00							40.494.400,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 Dokumen		100 Dokumen	2 Dokumen	40.928.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	40.494.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas						54.334.552,00							54.113.746,00	
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	100 Dokumen		100 Dokumen	3 Dokumen	54.334.552,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	54.113.746,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						31.507.100,00							31.509.098,00	
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	31.507.100,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Dokumen	31.509.098,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X							**3.917.612.354,60**							**3.874.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**3.917.612.354,60**							**3.874.000.000,00**	
132.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.913.612.154,60**							**3.706.000.000,00**	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	3.913.612.154,60						-	3.706.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.512.020.654,60					-		2.897.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.512.020.654,60					-		2.897.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	-	4.020.000,00						-	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	4.000.200,00						100 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	4.000.200,00						100 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	3.500.000.254,60						100 Orang/bulan	2.885.000.000,00	
	X.XX.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.500.000.254,60							2.885.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.500.000.254,60	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Orang/bulan	2.885.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.000.200,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	4.000.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.000.200,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	4.000.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						4.020.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-		-	1 Dokumen	4.020.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	4.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						92.597.700,00					-		100.000.000,00	
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						92.597.700,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	42.684.000,00						100 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	49.913.700,00						-	50.000.000,00	
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						49.913.700,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	49.913.700,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						42.684.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	10 Orang	42.684.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Orang	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.334.600,00					-		183.500.000,00	
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.334.600,00					-		183.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	8.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	14.000.400,00						100 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	0,00						100 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	8.200.000,00						100 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	71.134.200,00						-	60.000.000,00	
	X.XX.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.200.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	8.200.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Paket	9.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						71.134.200,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	71.134.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	8.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Paket	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						14.000.400,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	14.000.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Laporan	14.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		190.000.000,00	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		190.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	70.000.000,00	
	X.XX.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Unit	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.809.400,00					-		323.500.000,00	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.809.400,00					-		323.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	0,00						100 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.809.400,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	0,00						-	3.500.000,00	
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	3.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Laporan	70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.809.400,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	30.809.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						176.850.000,00					-		180.000.000,00	
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						176.850.000,00					-		180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	100 Unit	176.850.000,00						100 Unit	150.000.000,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	30.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					176.850.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit		100 Unit	20 Unit	176.850.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Unit	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	20 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		100 Unit	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**38.244.899.109,56**							**41.743.546.300,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.289.999.900,00**							**1.955.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**1.289.999.900,00**							**1.955.000.000,00**	
133.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**675.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan						***675.000.000,00***							***1.000.000.000,00***	
			1.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %		100 %	100 %	675.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						675.000.000,00					Masyarakat		1.000.000.000,00	
		Jumlah dokumen ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						675.000.000,00					Masyarakat		1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	675.000.000,00						2 Dokumen	1.000.000.000,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						675.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	675.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		2 Dokumen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
134.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**239.999.900,00**							**305.000.000,00**	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee						***239.999.900,00***							***305.000.000,00***	
			1.Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	90 %		90 %	90 %	239.999.900,00						90 %	305.000.000,00	
		Jumlah bidang tanah yang menjadi subjek dan objek redistribusi tanah						239.999.900,00					Masyarakat		455.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	65.000.000,00						1 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.999.500,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah						64.999.500,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	30 Dokumen	64.999.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.06.2.01.0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						65.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	65.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Berita Acara	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						239.999.900,00					Masyarakat		455.000.000,00	
		Jumlah bidang tanah yang menjadi subjek dan objek redistribusi tanah						239.999.900,00					Masyarakat		455.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	-		-	-	50.000.000,00						-	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	60.000.400,00						-	75.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						60.000.400,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	60.000.400,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	75.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						50.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	-		-	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
135.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**						**375.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen fasilitasi koordinasi dan sinkronisasi izin membuka tanah						***375.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			0.Persentase Terkelolanya Izin Membuka Tanah	100 %		100 %	100 %	375.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah						375.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		500.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah						375.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	375.000.000,00						30 Dokumen	500.000.000,00	
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah						375.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	30 Dokumen		30 Dokumen	20 Dokumen	375.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		30 Dokumen	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**36.954.899.209,56**							**39.788.546.300,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**36.954.899.209,56**							**39.788.546.300,00**	
136.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**27.235.118.809,56**							**27.288.829.300,00**	
		Persentase terselenggaranya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten						***27.235.118.809,56***							***27.288.829.300,00***	
			0.Persentase Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	98 %		97.17 %	98 %	27.235.118.809,56						98 %	27.288.829.300,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						326.810.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		348.760.000,00	
		Dokumen perencanaan, anggaran dan realisasi belanja pemerintah daerah						326.810.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		348.760.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00						1 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	58.700.000,00						4 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00						1 Dokumen	6.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.500.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.850.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	245.460.000,00						12 Laporan	245.460.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						58.700.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	58.700.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.850.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.850.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						7.500.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.800.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.800.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	4.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.500.000,00							6.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	6.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						245.460.000,00							245.460.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	245.460.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	245.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.198.554.609,56					SKPD Sekretariat Daerah		13.897.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah						13.198.554.609,56					SKPD Sekretariat Daerah		13.897.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.550.000,00						2 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	84.000.000,00						2 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan		110 Orang/bulan	114 Orang/bulan	13.106.004.609,56						117 Orang/bulan	13.800.000.000,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.106.004.609,56							13.800.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan		110 Orang/bulan	130 Orang/bulan	13.106.004.609,56	Kab. Gunung Mas	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		117 Orang/bulan	13.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.550.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	8.550.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	12.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						84.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	84.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						66.340.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		67.600.000,00	
		Meningkatnya tata kelola administrasi Barang Milik Daerah						66.340.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		67.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.140.000,00						3 Dokumen	26.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.100.000,00						1 Laporan	15.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.100.000,00						1 Laporan	26.100.000,00	
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						25.140.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	25.140.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	26.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						15.100.000,00							15.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.100.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	15.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						26.100.000,00							26.100.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.100.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	26.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						331.300.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		468.300.000,00	
		Meningkatnya tatakelola dan administrasi kepegawaian perangkat daerah						331.300.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		468.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	60.000.000,00						15 Orang	120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	32.800.000,00						40 Orang	32.800.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	223.000.000,00						2 Paket	300.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						223.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	223.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						5.500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						32.800.000,00							32.800.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	32.800.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Orang	32.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						60.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	10 Orang	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Orang	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.461.927.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		4.903.777.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						4.461.927.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		4.903.777.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	145.600.000,00						4 Dokumen	145.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	621.400.000,00						1 Laporan	621.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	1.650.000.000,00						120 Laporan	1.800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.660.000.000,00						2 Paket	1.800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	38.150.000,00						3 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	98.000.000,00						2 Paket	98.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	33.777.000,00						1 Paket	33.777.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	200.000.000,00						2 Paket	350.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						33.777.000,00							33.777.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	33.777.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	33.777.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	350.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.660.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.660.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						98.000.000,00							98.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	98.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	98.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						145.600.000,00							145.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	145.600.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	145.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						38.150.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	38.150.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						621.400.000,00							621.400.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	621.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	621.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.650.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	1.650.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		120 Laporan	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						740.000.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		1.850.000.000,00	
		Tersedianya kendaraan dinas dan operasional perangkat daerah sebagai penunjang urusan perangkat daerah dan pemerintah daerah						740.000.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		1.850.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	150.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	500.000.000,00						5 Unit	900.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	90.000.000,00						2 Unit	450.000.000,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						90.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	90.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						500.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.740.779.400,00					SKPD Sekretariat Daerah		2.740.779.400,00	
		Meningkatnya Pelayanan Jasa Penunjangan Urusan Perangkat Daerah						2.740.779.400,00					SKPD Sekretariat Daerah		2.740.779.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	698.792.400,00						3 Laporan	698.792.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.021.587.000,00						12 Laporan	2.021.587.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.400.000,00						2 Laporan	20.400.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						20.400.000,00							20.400.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	20.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						698.792.400,00							698.792.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	698.792.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	698.792.400,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.021.587.000,00							2.021.587.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.021.587.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	2.021.587.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.987.418.300,00					SKPD Sekretariat Daerah		2.271.418.300,00	
		Terpeliharanya Aset Perangkat Daerah						1.987.418.300,00					SKPD Sekretariat Daerah		2.271.418.300,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	730.000.000,00						4 Unit	900.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	886.000.000,00						60 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	269.018.300,00						10 Unit	269.018.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit		75 Unit	75 Unit	102.400.000,00						75 Unit	102.400.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						269.018.300,00							269.018.300,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	269.018.300,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	269.018.300,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						886.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	886.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Unit	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						102.400.000,00							102.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit		75 Unit	75 Unit	102.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		75 Unit	102.400.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						730.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	730.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.236.000.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		1.236.000.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.236.000.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		1.236.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	916.000.000,00						2 Orang/Bulan	916.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	240.000.000,00						2 Orang	240.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	80.000.000,00						2 Paket	80.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						916.000.000,00							916.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	916.000.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Orang/Bulan	916.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	80.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						240.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	240.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Orang	240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.374.094.600,00					SKPD Sekretariat Daerah		1.374.094.600,00	
		Efektivitas Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.374.094.600,00					SKPD Sekretariat Daerah		1.374.094.600,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	636.384.800,00						12 Paket	636.384.800,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	160.800.000,00						12 Paket	160.800.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	576.909.800,00						12 Paket	576.909.800,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						636.384.800,00							636.384.800,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	636.384.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	636.384.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						576.909.800,00							576.909.800,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	576.909.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	576.909.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah						160.800.000,00							160.800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	160.800.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	160.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						697.419.900,00					SKPD Sekretariat Daerah		770.800.000,00	
		Nilai SAKIP						697.419.900,00					SKPD Sekretariat Daerah		770.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	87.499.900,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	365.955.000,00						3 Dokumen	410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	83.465.000,00						1 Dokumen	95.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	160.500.000,00						3 Laporan	170.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						365.955.000,00							410.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	365.955.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	410.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						160.500.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	160.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						83.465.000,00							95.800.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	83.465.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	95.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						87.499.900,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	87.499.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						579.975.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		582.300.000,00	
		Meningkatnya Layanan dan Fasilitasi Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan						579.975.000,00					SKPD Sekretariat Daerah		582.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.975.000,00						12 Laporan	82.300.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						79.975.000,00							82.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.975.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	82.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
137.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**7.859.475.200,00**							**7.872.400.000,00**	
		Efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat						***7.859.475.200,00***							***7.872.400.000,00***	
			2.Efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat	97.25 %		97.25 %	97.25 %	7.859.475.200,00						97.25 %	7.872.400.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						1.735.000.000,00					Pemerintah Daerah		1.740.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan						1.735.000.000,00					Pemerintah Daerah		1.740.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.320.000.000,00						5 Dokumen	1.320.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	290.000.000,00						3 Dokumen	295.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						290.000.000,00							295.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	290.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						125.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						1.320.000.000,00							1.320.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1.320.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	1.320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						5.546.675.200,00					Pemerintahan dan masyarakat		5.554.300.000,00	
		Efiktifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat						5.546.675.200,00					Pemerintahan dan masyarakat		5.554.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	4.502.000.000,00						5 Dokumen	4.502.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	270.075.000,00						4 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.600.000,00						1 Dokumen	57.300.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga		10 Keluarga	10 Keluarga	720.000.200,00						10 Keluarga	720.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						4.502.000.000,00							4.502.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	4.502.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		5 Dokumen	4.502.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						54.600.000,00							57.300.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.600.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		1 Dokumen	57.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						270.075.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	270.075.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Dokumen	275.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing						720.000.200,00							720.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10 Keluarga		10 Keluarga	70 Keluarga	720.000.200,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		10 Keluarga	720.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						467.400.000,00					Pemerintah daerah dan masyarakat		467.400.000,00	
		Meningkatnya efektivitas dan aksesibilitas dalam pengelolaan dokumen peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta fasilitasi bantuan hukum						467.400.000,00					Pemerintah daerah dan masyarakat		467.400.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	151.200.000,00						4 Kasus	151.200.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	292.300.000,00						45 Dokumen	292.300.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	23.900.000,00						45 Dokumen	23.900.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						292.300.000,00							292.300.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	45 Dokumen		45 Dokumen	400 Dokumen	292.300.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		45 Dokumen	292.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						151.200.000,00							151.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4 Kasus		4 Kasus	2 Kasus	151.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Kasus	151.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						23.900.000,00							23.900.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	45 Dokumen		45 Dokumen	250 Dokumen	23.900.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		45 Dokumen	23.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						110.400.000,00					Pemerintah Daerah		110.700.000,00	
		Meningkatnya kerjasama antar daerah yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan daerah.						110.400.000,00					Pemerintah Daerah		110.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.400.000,00						1 Dokumen	110.700.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						110.400.000,00							110.700.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		1 Dokumen	110.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
138.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**1.309.205.200,00**							**1.405.317.000,00**	
		Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***1.309.205.200,00***							***1.405.317.000,00***	
			-1.Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	97.75 %		97.75 %	97.75 %	1.309.205.200,00						97.75 %	1.405.317.000,00	
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pertumbuhan perekonomian serta pengendalian distribusi perekonomian						470.688.200,00					Pemerintah daerah dan masyarakat		501.820.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.288.200,00						1 Dokumen	78.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99.820.000,00						1 Dokumen	99.820.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	82.580.000,00						1 Laporan	83.700.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						99.820.000,00							99.820.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	99.820.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Dokumen	99.820.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						82.580.000,00							83.700.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	82.580.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Laporan	83.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)						78.288.200,00							78.300.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	78.288.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Dokumen	78.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						138.800.000,00					Pemerintah daerah dan masyarakat		151.200.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan dan fasilitasi administrasi pembangunan yang merata dan berkeadilan						138.800.000,00					Pemerintah daerah dan masyarakat		151.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.200.000,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.600.000,00						1 Laporan	56.200.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						93.200.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Dokumen	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						45.600.000,00							56.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.600.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Laporan	56.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						593.017.000,00					Pemerintah daerah dan penyedia barang dan jasa		593.497.000,00	
		Tingkat kematangan UKPBJ						593.017.000,00					Pemerintah daerah dan penyedia barang dan jasa		593.497.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	155 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	299.520.000,00						155 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	14 Orang		14 Orang	14 Orang	293.497.000,00						14 Orang	293.497.000,00	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						299.520.000,00							300.000.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	155 Dokumen		150 Dokumen	5 Dokumen	299.520.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		155 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						293.497.000,00							293.497.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	14 Orang		14 Orang	14 Orang	293.497.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Orang	293.497.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						152.300.000,00					Masyarakat		158.800.000,00	
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.						152.300.000,00					Masyarakat		158.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	95.00 Dokumen		85.75 Dokumen	89.50 Dokumen	45.600.000,00						90.00 Dokumen	52.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	106.700.000,00						1 Dokumen	106.700.000,00	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						106.700.000,00							106.700.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	106.700.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		1 Dokumen	106.700.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						45.600.000,00							52.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	95.00 Dokumen		85.75 Dokumen	1 Dokumen	45.600.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		90.00 Dokumen	52.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						470.688.200,00					Pemerintah daerah dan masyarakat		501.820.000,00	
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan monitoring pertumbuhan perekonomian serta pengendalian distribusi perekonomian						470.688.200,00					Pemerintah daerah dan masyarakat		501.820.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-		-	-	210.000.000,00						-	240.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD						210.000.000,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-		-	1 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	240.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**38.000.000.000,00**							**38.863.618.624,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**38.000.000.000,00**							**38.863.618.624,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**38.000.000.000,00**							**38.863.618.624,00**	
139.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**25.910.846.247,00**							**26.495.775.167,00**	
		Terlaksanannya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						***25.910.846.247,00***							***26.495.775.167,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	25.910.846.247,00						100 %	26.495.775.167,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					49.166.407,00					-		50.299.796,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.832.351,00						2 Dokumen	9.035.955,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	24.775.216,00						5 Dokumen	25.346.337,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.896.285,00						2 Dokumen	7.055.259,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					24.775.216,00							25.346.337,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	24.775.216,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	25.346.337,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						6.896.285,00							7.055.259,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.896.285,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	7.055.259,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.832.351,00							9.035.955,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8.832.351,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	9.035.955,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.426.581.618,56					-		4.528.616.688,00	
		Presentase ASN yang terlayani						4.426.581.618,56					-		4.528.616.688,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.194.911,00						1 Laporan	70.790.000,00	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.124.476,00						12 Laporan	92.202.035,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	4.267.262.231,56						70 Orang/bulan	4.365.624.653,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.267.262.231,56							4.365.624.653,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	4.267.262.231,56	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		70 Orang/bulan	4.365.624.653,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						69.194.911,00							70.790.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	69.194.911,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.790.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						90.124.476,00							92.202.035,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.124.476,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	92.202.035,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						231.043.979,00					-		236.370.030,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						231.043.979,00					-		236.370.030,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	69.692.094,00						25 Orang	71.298.644,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	161.351.885,00						3 Paket	165.071.386,00	
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						161.351.885,00							165.071.386,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	161.351.885,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	165.071.386,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						69.692.094,00							71.298.644,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	69.692.094,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Orang	71.298.644,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.167.242.144,00					-		1.194.149.538,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						1.167.242.144,00					-		1.194.149.538,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	271.242.989,00						22 Dokumen	277.495.712,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	48.380.514,00						13 Dokumen	49.495.787,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	69.855.632,00						3 Laporan	71.465.952,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	547.895.456,00						3 Laporan	560.525.602,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	17.959.295,00						22 Paket	18.373.295,00	
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	126.187.163,00						5 Paket	129.096.043,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	11.322.940,00						5 Paket	11.583.958,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	19.003.206,00						3 Paket	19.441.270,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	55.394.949,00						2 Paket	56.671.919,00	
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.003.206,00							19.441.270,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	19.003.206,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	19.441.270,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.394.949,00							56.671.919,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	55.394.949,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	56.671.919,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.959.295,00							18.373.295,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	17.959.295,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Paket	18.373.295,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.322.940,00							11.583.958,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	11.322.940,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Paket	11.583.958,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						271.242.989,00							277.495.712,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	271.242.989,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Dokumen	277.495.712,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						126.187.163,00							129.096.043,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	126.187.163,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Paket	129.096.043,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						69.855.632,00							71.465.952,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	69.855.632,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	71.465.952,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						547.895.456,00							560.525.602,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	547.895.456,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	560.525.602,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						48.380.514,00							49.495.787,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	48.380.514,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		13 Dokumen	49.495.787,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.753.631.738,00					-		1.794.056.649,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						1.753.631.738,00					-		1.794.056.649,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	341.742.085,00						3 Laporan	349.619.961,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	1.402.559.610,00						14 Laporan	1.434.891.568,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	9.330.043,00						5 Laporan	9.545.120,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.330.043,00							9.545.120,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	9.330.043,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	9.545.120,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						341.742.085,00							349.619.961,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	341.742.085,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	349.619.961,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.402.559.610,00							1.434.891.568,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		14 Laporan	15 Laporan	1.402.559.610,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		14 Laporan	1.434.891.568,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.541.753.651,50					-		1.564.923.460,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						1.541.753.651,50					-		1.564.923.460,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	185.854.555,00						22 Unit	190.138.895,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	316.468.537,00						22 Unit	323.763.804,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit		104 Unit	104 Unit	90.524.884,50						106 Unit	92.611.602,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		3 Unit	4 Unit	536.642.795,00						4 Unit	536.642.795,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		5 Unit	5 Unit	412.262.880,00						5 Unit	421.766.364,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					316.468.537,00							323.763.804,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	316.468.537,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Unit	323.763.804,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					185.854.555,00							190.138.895,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	185.854.555,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Unit	190.138.895,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					90.524.884,50							92.611.602,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	110 Unit		104 Unit	106 Unit	90.524.884,50	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		106 Unit	92.611.602,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					536.642.795,00							536.642.795,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		3 Unit	4 Unit	536.642.795,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Unit	536.642.795,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					412.262.880,00							421.766.364,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		5 Unit	5 Unit	412.262.880,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	421.766.364,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					337.146.665,00						-	344.918.607,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah					337.146.665,00						-	344.918.607,00	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	337.146.665,00							3 Laporan	344.918.607,00	
	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan					337.146.665,00							344.918.607,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	337.146.665,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	344.918.607,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					14.651.439.984,94						-	14.989.186.885,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah					14.651.439.984,94						-	14.989.186.885,00	
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan		25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	13.756.814.045,00							25 Orang/Bulan	14.073.937.631,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		25 Orang	25 Orang	557.325.904,00							25 Orang	570.173.301,00	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	3 Paket	337.300.035,94							3 Paket	345.075.953,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					13.756.814.045,00								14.073.937.631,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan		25 Orang/Bulan	25 Orang/Bulan	13.756.814.045,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Orang/Bulan	14.073.937.631,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					337.300.035,94							345.075.953,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	3 Paket	337.300.035,94	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	345.075.953,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					557.325.904,00							570.173.301,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		25 Orang	25 Orang	557.325.904,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Orang	570.173.301,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					1.317.943.681,00						-	1.348.331.857,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah					1.317.943.681,00						-	1.348.331.857,00	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	223.829.521,00							2 Laporan	228.990.343,00	
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	4 Paket	1.094.114.160,00							4 Paket	1.119.341.514,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					223.829.521,00								228.990.343,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	223.829.521,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	228.990.343,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					1.094.114.160,00								1.119.341.514,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	4 Paket	1.094.114.160,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	1.119.341.514,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49.166.407,00					-		50.299.796,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						49.166.407,00					-		50.299.796,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	-	8.662.555,00						-	8.862.245,00	
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						8.662.555,00							8.862.245,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		-	2 Dokumen	8.662.555,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	8.862.245,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						434.896.378,00					-		444.921.657,00	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						434.896.378,00					-		444.921.657,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	434.896.378,00						-	444.921.657,00	
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						434.896.378,00							444.921.657,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	6 Unit	434.896.378,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	444.921.657,00	SEKRETARIAT DPRD
140.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**11.630.327.921,00**							**11.898.440.722,00**	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						***11.630.327.921,00***							***11.898.440.722,00***	
			2.Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota	85.71 %		83.33 %	85.71 %	11.630.327.921,00						85.71 %	11.898.440.722,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						1.266.787.588,00					-		1.295.998.922,00	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						1.266.787.588,00					-		1.295.998.922,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen		16 Dokumen	17 Dokumen	318.630.212,00						18 Dokumen	325.975.311,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.612.469,00						2 Dokumen	10.866.316,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	458.046.012,00						4 Dokumen	468.604.939,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	479.498.895,00						2 Dokumen	490.552.356,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						10.612.469,00							10.866.316,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.612.469,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	10.866.316,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						318.630.212,00							325.975.311,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen		16 Dokumen	17 Dokumen	318.630.212,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		18 Dokumen	325.975.311,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						479.498.895,00							490.552.356,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	479.498.895,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	490.552.356,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						458.046.012,00							468.604.939,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	458.046.012,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	468.604.939,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						203.669.877,00					-		208.364.897,00	
		ersedianya Rencana Kerja Tahuan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						203.669.877,00					-		208.364.897,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.852.163,00						1 Dokumen	92.946.497,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.427.012,00						1 Dokumen	51.589.461,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.831.223,00						2 Dokumen	19.265.322,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.931.547,00						1 Dokumen	24.483.220,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.627.932,00						2 Dokumen	20.080.397,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						18.831.223,00							19.265.322,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	18.831.223,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	19.265.322,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						19.627.932,00							20.080.397,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.627.932,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	20.080.397,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						90.852.163,00							92.946.497,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.852.163,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	92.946.497,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						50.427.012,00							51.589.461,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.427.012,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	51.589.461,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						23.931.547,00							24.483.220,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.931.547,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	24.483.220,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						1.487.864.537,00					-		1.522.162.953,00	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahuan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						1.487.864.537,00					-		1.522.162.953,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.045.481,00						1 Dokumen	32.784.197,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	511.885.809,00						12 Laporan	523.685.857,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	458.825.832,00						12 Laporan	469.402.735,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	458.825.832,00						12 Laporan	469.402.735,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.281.583,00						1 Dokumen	26.887.429,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						458.825.832,00							469.402.735,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	458.825.832,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	469.402.735,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						511.885.809,00							523.685.857,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	511.885.809,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	523.685.857,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						458.825.832,00							469.402.735,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	458.825.832,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	469.402.735,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						32.045.481,00							32.784.197,00	
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.045.481,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	32.784.197,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						26.281.583,00							26.887.429,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.281.583,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	26.887.429,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						4.283.076.512,00					-		4.381.810.462,00	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						4.283.076.512,00					-		4.381.810.462,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.923.585.672,00						6 Dokumen	1.967.928.380,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	22 Dokumen		18 Dokumen	19 Dokumen	54.743.765,00						20 Dokumen	56.005.724,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	59 Dokumen		55 Dokumen	56 Dokumen	2.071.704.996,00						57 Dokumen	2.119.462.167,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.121.064,00						1 Dokumen	9.331.324,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang		6 Orang	6 Orang	223.921.015,00						6 Orang	229.082.867,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.923.585.672,00							1.967.928.380,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1.923.585.672,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	1.967.928.380,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						223.921.015,00							229.082.867,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang		6 Orang	6 Orang	223.921.015,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Orang	229.082.867,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						54.743.765,00							56.005.724,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	22 Dokumen		18 Dokumen	19 Dokumen	54.743.765,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Dokumen	56.005.724,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						9.121.064,00							9.331.324,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.121.064,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	9.331.324,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						2.071.704.996,00							2.119.462.167,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	59 Dokumen		55 Dokumen	56 Dokumen	2.071.704.996,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		57 Dokumen	2.119.462.167,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						1.354.043.292,00					-		1.385.256.846,00	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahuan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						1.354.043.292,00					-		1.385.256.846,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	801.557.500,00						3 Dokumen	820.035.091,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.437.155,00						1 Dokumen	40.346.265,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	513.048.637,00						12 Laporan	524.875.490,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						513.048.637,00							524.875.490,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	513.048.637,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	524.875.490,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						39.437.155,00							40.346.265,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.437.155,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	40.346.265,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						801.557.500,00							820.035.091,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	801.557.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	820.035.091,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						72.559.883,00					-		74.232.541,00	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						72.559.883,00					-		74.232.541,00	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.811.799,00						1 Dokumen	64.259.743,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.748.084,00						12 Laporan	9.972.798,00	
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						62.811.799,00							64.259.743,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.811.799,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	64.259.743,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						9.748.084,00							9.972.798,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.748.084,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	9.972.798,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						3.421.152.064,00					-		3.500.016.836,00	
		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kab/Kota						3.421.152.064,00					-		3.500.016.836,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	12.936.342,00						48 Dokumen	13.234.552,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	343.974.219,00						3 Dokumen	351.903.550,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.064.241.503,00						12 Dokumen	3.134.878.734,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						3.064.241.503,00							3.134.878.734,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.064.241.503,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	3.134.878.734,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						12.936.342,00							13.234.552,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	12.936.342,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		48 Dokumen	13.234.552,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						343.974.219,00							351.903.550,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	343.974.219,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	351.903.550,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**10.470.878.156,49**							**932.026.312,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**10.470.878.156,49**							**932.026.312,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**9.718.560.199,49**							**932.026.312,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
141.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.784.714.580,99**							**0,00**	
		Terlaksananya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah						***6.784.714.580,99***							***0,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	6.784.714.580,99						100 %	0,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.391.422,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah						75.391.422,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.708.504,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.627.680,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.989.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.672.870,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.393.368,00						12 Laporan	0,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.627.680,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	6 Dokumen	25.627.680,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.708.504,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.708.504,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.989.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.989.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.672.870,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.672.870,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.393.368,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	18 Laporan	16.393.368,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.448.781.950,86					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah						4.448.781.950,86					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.757.508,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.998.500,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.411.025.942,86						35 Orang/bulan	0,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.411.025.942,86							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan		35 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.411.025.942,86	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		35 Orang/bulan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.757.508,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.757.508,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						26.998.500,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.998.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.057.600,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah pada PD						9.057.600,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.057.600,00						1 Laporan	0,00	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.057.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.057.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						324.350.112,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah						324.350.112,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	12.242.400,00						48 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	238.826.400,00						10 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	73.281.312,00						100 Paket	0,00	
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						73.281.312,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100 Paket		100 Paket	53 Paket	73.281.312,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						12.242.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	12.242.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		48 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						238.826.400,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	238.826.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Orang	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						756.523.918,13					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya kegiatan administrasi umum PD						756.523.918,13					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.263.060,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.650.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.707.060,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	504.575.720,00						110 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	5.490.525,00						9 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	93.279.027,00						9 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	49.506.000,00						9 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.052.526,13						12 Paket	0,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						66.052.526,13							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.052.526,13	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.490.525,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	5.490.525,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						49.506.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	49.506.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.263.060,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.263.060,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						93.279.027,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	93.279.027,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Paket	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.707.060,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.707.060,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						504.575.720,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	504.575.720,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		110 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						16.650.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.650.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						266.862.648,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						266.862.648,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	180.497.988,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	86.364.660,00						5 Unit	0,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						180.497.988,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	180.497.988,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						86.364.660,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	86.364.660,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						328.742.240,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						328.742.240,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	138.165.240,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	183.577.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00						3 Laporan	0,00	
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						138.165.240,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	138.165.240,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						183.577.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	183.577.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						575.004.690,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	311.049.660,00						21 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.637.010,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	79.999.920,00						25 Unit	0,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						46.637.010,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.637.010,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						311.049.660,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	311.049.660,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		21 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						79.999.920,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	79.999.920,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Unit	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						575.004.690,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						575.004.690,00					Lingkup Bapperida Kabupaten Gunung Mas		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	137.318.100,00						-	0,00	
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						137.318.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	137.318.100,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
142.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.043.131.886,50**							**932.026.312,00**	
		Meningkatnya sinergi perencanaan pembangunan daerah						***1.043.131.886,50***							***932.026.312,00***	
			1.Persentase Dokumen Perencanaan Daerah dan perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada selesai tepat waktu	100 %		100 %	100 %	1.043.131.886,50						100 %	932.026.312,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						864.416.005,30					Seluruh PD		772.319.157,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA						864.416.005,30					Seluruh PD		772.319.157,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.438.976,10						1 Berita Acara	40.438.960,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	17.571.122,10						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	48.853.342,20						1 Berita Acara	48.851.425,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	189.398.648,40						2 Dokumen	189.398.822,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	456.095.050,10						4 Dokumen	456.095.400,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	37.534.583,40						2 Dokumen	37.534.550,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1128 Usulan		1128 Usulan	1128 Usulan	74.524.283,00						1128 Usulan	0,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						456.095.050,10							456.095.400,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	456.095.050,10	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	456.095.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						37.534.583,40							37.534.550,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	37.534.583,40	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	37.534.550,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						17.571.122,10							0,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	17.571.122,10	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Berita Acara	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						40.438.976,10							40.438.960,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	40.438.976,10	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Berita Acara	40.438.960,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						48.853.342,20							48.851.425,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	48.853.342,20	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Berita Acara	48.851.425,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						74.524.283,00							0,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1128 Usulan		1128 Usulan	1128 Usulan	74.524.283,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1128 Usulan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						189.398.648,40							189.398.822,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	189.398.648,40	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	189.398.822,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						44.004.830,00					Seluruh PD		25.000.000,00	
		Tersedianya data/informasi perencanaan pembangunan daerah						44.004.830,00					Seluruh PD		25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	703 Orang		703 Orang	703 Orang	44.004.830,00						703 Orang	25.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						44.004.830,00							25.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	703 Orang		703 Orang	127 Orang	44.004.830,00	Kab. Gunung Mas	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		703 Orang	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						111.919.071,20					Seluruh PD		111.919.615,00	
		Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah						111.919.071,20					Seluruh PD		111.919.615,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	40.000.125,00						3 Laporan	40.000.125,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	71.918.946,20						6 Laporan	71.919.490,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						71.918.946,20							71.919.490,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	71.918.946,20	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	71.919.490,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						40.000.125,00							40.000.125,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	40.000.125,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	40.000.125,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						22.791.980,00					Seluruh PD		22.787.540,00	
		Terlaksananya implementasi sistem informasi pemerintahan daerah di bidang pembangunan manusia						22.791.980,00					Seluruh PD		22.787.540,00	
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.791.980,00						2 Dokumen	22.787.540,00	
	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						22.791.980,00							22.787.540,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.791.980,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	22.787.540,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
143.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.890.713.732,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Sinergi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan SDA						***1.890.713.732,00***							***0,00***	
			1.Persentanse Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.890.713.732,00						100 %	0,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						910.099.370,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan bidang pembangunan manusia yang disusun						910.099.370,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	679.427.850,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	230.671.520,00						6 Laporan	0,00	
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						230.671.520,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	230.671.520,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						679.427.850,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	679.427.850,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						470.575.546,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan bidang SDA yang disusun						470.575.546,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.615.426,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	289.960.120,00						4 Laporan	0,00	
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						180.615.426,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	180.615.426,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						289.960.120,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	289.960.120,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						510.038.816,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan bidang kewilayahan yang disusun						510.038.816,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	266.511.846,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	243.526.970,00						4 Laporan	0,00	
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						266.511.846,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	266.511.846,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						243.526.970,00							0,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	243.526.970,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**752.317.957,00**							**0,00**	
144.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**752.317.957,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah						***752.317.957,00***							***0,00***	
			1.Persentase hasil Penelitian yang di tindak lanjuti	100 %		100 %	100 %	752.317.957,00						100 %	0,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						8.895.600,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						8.895.600,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.895.600,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						8.895.600,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.895.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						102.562.200,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						102.562.200,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	102.562.200,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						102.562.200,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	102.562.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						359.626.000,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedianya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						359.626.000,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	359.626.000,00						1 Dokumen	0,00	
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						359.626.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	359.626.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						281.234.157,00					Seluruh PD		0,00	
		Tersedia Pengembangan Inovasi dan Teknologi						281.234.157,00					Seluruh PD		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	264.476.157,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	16.758.000,00						3 Laporan	0,00	
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						264.476.157,00							0,00	
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	264.476.157,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						16.758.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	16.758.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**181.747.431.520,61**							**351.498.041.267,51**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**181.747.431.520,61**							**351.498.041.267,51**	
	5.02	**KEUANGAN**						**181.747.431.520,61**							**351.498.041.267,51**	
145.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.214.480.204,00**							**11.644.559.747,09**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan						***10.214.480.204,00***							***11.644.559.747,09***	
			1.Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %		90 %	90 %	10.214.480.204,00						90 %	11.644.559.747,09	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.248.416,00					-		19.858.900,00	
		Terlaksanaya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.248.416,00					-		19.858.900,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.110.210,00						1 Dokumen	6.675.200,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.981.144,00						1 Dokumen	6.681.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.157.062,00						3 Laporan	6.502.700,00	
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.110.210,00							6.675.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.110.210,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Dokumen	6.675.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6.981.144,00							6.681.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.981.144,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Dokumen	6.681.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.157.062,00							6.502.700,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.157.062,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		3 Laporan	6.502.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.771.786.362,20					-		7.685.132.893,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.771.786.362,20					-		7.685.132.893,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	344.427.690,00						12 Dokumen	3.238.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.906.030,00						1 Laporan	5.366.800,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.917.000,00						1 Laporan	47.486.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan		66 Orang/bulan	66 Orang/bulan	7.380.535.642,20						66 Orang/bulan	7.629.040.793,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.380.535.642,20							7.629.040.793,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan		66 Orang/bulan	50 Orang/bulan	7.380.535.642,20	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		66 Orang/bulan	7.629.040.793,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.906.030,00							5.366.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.906.030,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Laporan	5.366.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						40.917.000,00							47.486.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.917.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Laporan	47.486.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						344.427.690,00							3.238.500,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	344.427.690,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		12 Dokumen	3.238.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23.653.680,00					-		295.644.160,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23.653.680,00					-		295.644.160,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	12 Orang	23.653.680,00						12 Orang	138.272.800,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	157.371.360,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							157.371.360,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Paket	157.371.360,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						23.653.680,00							138.272.800,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang		12 Orang	5 Orang	23.653.680,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		12 Orang	138.272.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						925.167.697,80					-		1.804.723.775,60	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						925.167.697,80					-		1.804.723.775,60	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	18.643.800,00						6 Dokumen	18.388.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500000 Dokumen		1500000 Dokumen	1500000 Dokumen	343.856.117,80						1500000 Dokumen	807.034.002,60	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.124.300,00						1 Laporan	36.363.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	256.554.200,00						10 Laporan	373.339.700,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.392.890,00						1 Paket	45.008.835,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.010.100,00						1 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.460.630,00						2 Paket	22.252.725,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.877.110,00						1 Paket	18.984.663,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	201.248.550,00						1 Paket	453.351.750,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.877.110,00							18.984.663,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.877.110,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Paket	18.984.663,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						201.248.550,00							453.351.750,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	201.248.550,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Paket	453.351.750,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.392.890,00							45.008.835,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.392.890,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Paket	45.008.835,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.460.630,00							22.252.725,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.460.630,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		2 Paket	22.252.725,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						18.643.800,00							18.388.500,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	18.643.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		6 Dokumen	18.388.500,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						1.010.100,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.010.100,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Paket	30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.124.300,00							36.363.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.124.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	36.363.600,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						256.554.200,00							373.339.700,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	256.554.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		10 Laporan	373.339.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						343.856.117,80							807.034.002,60	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1500000 Dokumen		1500000 Dokumen	1500000 Dokumen	343.856.117,80	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1500000 Dokumen	807.034.002,60	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						515.151.000,00					-		500.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						515.151.000,00					-		500.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	12 Unit	515.151.000,00						12 Unit	500.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						515.151.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		12 Unit	1 Unit	515.151.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		12 Unit	500.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						402.258.228,00					-		398.213.918,02	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						402.258.228,00					-		398.213.918,02	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	353.652.720,00						8 Laporan	338.880.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.281.508,00						2 Laporan	50.009.918,02	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.324.000,00						1 Laporan	9.324.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.324.000,00							9.324.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.324.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Laporan	9.324.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						353.652.720,00							338.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	353.652.720,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		8 Laporan	338.880.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						39.281.508,00							50.009.918,02	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	39.281.508,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-		2 Laporan	50.009.918,02	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						557.214.820,00					-		940.986.100,47	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	91.447.350,00						4 Unit	179.683.200,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	346.963.000,00						30 Unit	639.316.675,47	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						346.963.000,00							639.316.675,47	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	346.963.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		30 Unit	639.316.675,47	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						91.447.350,00							179.683.200,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	91.447.350,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		4 Unit	179.683.200,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						557.214.820,00					-		940.986.100,47	
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						557.214.820,00					-		940.986.100,47	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	118.804.470,00						-	121.986.225,00	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						118.804.470,00							121.986.225,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	11 Unit	118.804.470,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		-	121.986.225,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
146.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**170.696.345.170,11**							**338.406.764.073,42**	
		.Meningktnya tata kelola keuangan daerah						***170.696.345.170,11***							***338.406.764.073,42***	
			1.Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %		90 %	90 %	170.696.345.170,11						90 %	338.406.764.073,42	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.123.918.082,11					-		1.120.321.386,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						1.123.918.082,11					-		1.120.321.386,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	21.595.184,00						42 Dokumen	21.595.184,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.652.097,00						2 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.913.248,00						2 Dokumen	21.500.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	66.266.778,00						2 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	66.326.385,00						2 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.306.186,00						4 Dokumen	131.000.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	19.879.323,00						39 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	349.978.627,11						10 Orang	207.226.202,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	176.767.871,00						2 Dokumen	231.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.139.857,00						2 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	35.162.201,00						42 Dokumen	31.000.000,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	49.671.168,00						42 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	28.259.157,00						42 Dokumen	30.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						66.266.778,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	66.266.778,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		2 Dokumen	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						66.326.385,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	66.326.385,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		2 Dokumen	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						28.259.157,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		42 Dokumen	39 Dokumen	28.259.157,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		42 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						49.671.168,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		42 Dokumen	39 Dokumen	49.671.168,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		42 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						19.879.323,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	19.879.323,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		39 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						35.162.201,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	42 Dokumen		42 Dokumen	39 Dokumen	35.162.201,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		42 Dokumen	31.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						176.767.871,00							231.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	176.767.871,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		2 Dokumen	231.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						175.139.857,00							220.000.000,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.139.857,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		2 Dokumen	220.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						112.306.186,00							131.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	112.306.186,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		4 Dokumen	131.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						10.913.248,00							21.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.913.248,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		2 Dokumen	21.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						21.595.184,00							21.595.184,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	42 Dokumen		42 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	21.595.184,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		42 Dokumen	21.595.184,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						11.652.097,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	2 Dokumen		2 Dokumen	39 Dokumen	11.652.097,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		2 Dokumen	22.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						349.978.627,11							207.226.202,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	349.978.627,11	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		10 Orang	207.226.202,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						722.029.606,00					-		1.011.827.694,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						722.029.606,00					-		1.011.827.694,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	59.175.932,00						24 Dokumen	135.188.374,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	60.600.684,00						10 Dokumen	84.768.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	0,00						39 Dokumen	8.074.140,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.738.000,00						5 Dokumen	19.320.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	16.436.436,00						39 Dokumen	16.314.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	143.536.854,00						39 Dokumen	194.503.941,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	86.182.300,00						10 Laporan	135.525.555,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang		39 Orang	39 Orang	345.359.400,00						39 Orang	418.132.590,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						59.175.932,00								135.188.374,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	59.175.932,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		24 Dokumen	135.188.374,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						16.436.436,00								16.314.114,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	16.436.436,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		39 Dokumen	16.314.114,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						60.600.684,00								84.768.280,00	
		Terlaksanaya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	60.600.684,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		10 Dokumen	84.768.280,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						0,00								8.074.140,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		39 Dokumen	8.074.140,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						86.182.300,00								135.525.555,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	86.182.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Laporan	135.525.555,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						10.738.000,00								19.320.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.738.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		5 Dokumen	19.320.700,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						143.536.854,00								194.503.941,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	143.536.854,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		39 Dokumen	194.503.941,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						345.359.400,00								418.132.590,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	39 Orang		39 Orang	39 Orang	345.359.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		39 Orang	418.132.590,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						582.369.320,00					-		672.837.649,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						582.369.320,00					-		672.837.649,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	50.413.500,00						39 Dokumen	52.805.400,00	
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.162.270,00						1 Dokumen	13.197.423,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.426.700,00						1 Dokumen	52.141.660,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	77.299.560,00						39 Laporan	161.999.949,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.968.300,00						4 Laporan	30.761.352,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	265.275.710,00						100 Orang	156.974.710,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	116.240.285,00						4 Dokumen	178.598.845,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.582.995,00						1 Dokumen	26.358.310,00	
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban						50.413.500,00								52.805.400,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	50.413.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		39 Dokumen	52.805.400,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						10.968.300,00							30.761.352,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.968.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		4 Laporan	30.761.352,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						77.299.560,00							161.999.949,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	77.299.560,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		39 Laporan	161.999.949,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						116.240.285,00							178.598.845,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	116.240.285,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		4 Dokumen	178.598.845,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD						15.162.270,00							13.197.423,00	
		Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.162.270,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		1 Dokumen	13.197.423,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						31.426.700,00							52.141.660,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	31.426.700,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		1 Dokumen	52.141.660,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						15.582.995,00							26.358.310,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.582.995,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		1 Dokumen	26.358.310,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						265.275.710,00							156.974.710,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	265.275.710,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Pajak Daerah	-	-		100 Orang	156.974.710,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						168.053.378.360,00					-		335.554.687.954,42	
		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						168.053.378.360,00					-		335.554.687.954,42	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	165.301.988.977,21	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.595.600.000,00						1 Laporan	4.750.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						0,00							165.301.988.977,21	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	165.301.988.977,21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						6.595.600.000,00							4.750.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.595.600.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	4.750.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						214.649.802,00					-		117.089.390,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						214.649.802,00					-		117.089.390,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	214.649.802,00						4 Dokumen	117.089.390,00	
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						214.649.802,00							117.089.390,00	
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	214.649.802,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	-	-		4 Dokumen	117.089.390,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						168.053.378.360,00					-		335.554.687.954,42	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	-	1.800.000.000,00						-	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	-	159.636.178.360,00						-	165.301.098.977,21	
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	-	21.600.000,00						-	21.600.000,00	
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						1.800.000.000,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	-		-	1 Laporan	1.800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	180.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						21.600.000,00							21.600.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	1 Laporan	21.600.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	21.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						159.636.178.360,00							165.301.098.977,21	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-		-	4 Laporan	159.636.178.360,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Desa	-	-		-	165.301.098.977,21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
147.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**836.606.146,50**							**1.376.717.447,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah						***836.606.146,50***							***1.376.717.447,00***	
			1.Proporsi dokumen penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %		90 %	90 %	836.606.146,50						90 %	1.376.717.447,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						836.606.146,50					-		1.376.717.447,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah						836.606.146,50					-		1.376.717.447,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	91.504.660,00						5 Dokumen	108.631.255,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.167.452,00						1 Laporan	114.635.863,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	358.434.100,00						39 Laporan	541.845.356,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.666.954,50						1 Laporan	109.825.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.739.880,00						1 Laporan	188.203.650,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.639.300,00						1 Laporan	106.773.132,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.242.300,00						5 Dokumen	17.091.944,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.274.200,00						1 Dokumen	64.830.522,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						30.274.200,00							64.830.522,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.274.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	-	-		1 Dokumen	64.830.522,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						10.242.300,00							17.091.944,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10.242.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		5 Dokumen	17.091.944,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						19.639.300,00							106.773.132,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.639.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Laporan	106.773.132,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						70.666.954,50							109.825.300,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.666.954,50	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Laporan	109.825.300,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						358.434.100,00							541.845.356,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	358.434.100,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		39 Laporan	541.845.356,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						91.504.660,00							108.631.255,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	91.504.660,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		5 Dokumen	108.631.255,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						78.739.880,00							188.203.650,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78.739.880,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Laporan	188.203.650,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						73.167.452,00							114.635.863,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.167.452,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		1 Laporan	114.635.863,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah						836.606.146,50					-		1.376.717.447,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	-	103.937.300,00						-	124.880.425,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						103.937.300,00							124.880.425,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	-		-	1 Laporan	103.937.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pajak Daerah	-	-		-	124.880.425,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**14.713.117.862,92**							**14.713.117.862,92**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.713.117.862,92**							**14.713.117.862,92**	
	5.02	**KEUANGAN**						**14.713.117.862,92**							**14.713.117.862,92**	
148.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.367.462.258,92**							**12.366.401.982,92**	
		Peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan dalam mendukung peningkatan PAD						***12.367.462.258,92***							***12.366.401.982,92***	
			1.Persentase Capaian Target Kinerja	100 %		100 %	100 %	12.367.462.258,92						100 %	12.366.401.982,92	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						96.089.896,00					Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah		96.083.125,00	
		Dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja						96.089.896,00					Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah		96.083.125,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.939.278,00						1 Dokumen	4.939.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	29.674.878,00						4 Dokumen	29.674.545,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.309.242,00						1 Dokumen	4.308.465,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.717.500,00						1 Dokumen	4.717.500,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.939.278,00						1 Dokumen	4.939.500,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	47.509.720,00						5 Laporan	47.503.615,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29.674.878,00							29.674.545,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	29.674.878,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	29.674.545,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						4.939.278,00							4.939.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.939.278,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	4.939.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						4.717.500,00							4.717.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.717.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	4.717.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.939.278,00							4.939.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.939.278,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	4.939.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.309.242,00							4.308.465,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.309.242,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	4.308.465,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						47.509.720,00							47.503.615,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	47.509.720,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	47.503.615,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.193.936.473,92					Dokumen Adminsitrasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah		10.194.050.475,92	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.193.936.473,92					Dokumen Adminsitrasi Keuangan Badan Pendapatan Daerah		10.194.050.475,92	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	149.547.100,00						24 Dokumen	149.558.980,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.222.662,00						1 Laporan	4.222.440,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.273.278,00						1 Laporan	4.273.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	10.035.893.433,92						60 Orang/bulan	10.035.995.555,92	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.035.893.433,92							10.035.995.555,92	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	10.035.893.433,92	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Orang/bulan	10.035.995.555,92	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						149.547.100,00							149.558.980,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	149.547.100,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		24 Dokumen	149.558.980,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.222.662,00							4.222.440,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.222.662,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	4.222.440,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						4.273.278,00							4.273.500,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.273.278,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	4.273.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						43.740.753,00					pejabat dan aparatur pada Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan dan penatausahaan BMD Bapenda		43.737.534,00	
		Dokumen Administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah						43.740.753,00					pejabat dan aparatur pada Perangkat Daerah yang terlibat dalam pengelolaan dan penatausahaan BMD Bapenda		43.737.534,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	41.476.020,00						1 Laporan	41.472.690,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.264.733,00						2 Dokumen	2.264.844,00	
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.264.733,00							2.264.844,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.264.733,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	2.264.844,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						41.476.020,00							41.472.690,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	41.476.020,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	41.472.690,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						195.754.752,00					seluruh ASN (PNS dan PPPK), tenaga non-ASN, serta pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Bapenda		195.864.975,00	
		Fasilitas administrasi kepegawaian perangkat daerah						195.754.752,00					seluruh ASN (PNS dan PPPK), tenaga non-ASN, serta pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Bapenda		195.864.975,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	47.459.640,00						5 Orang	47.459.640,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	148.295.112,00						60 Paket	148.405.335,00	
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						148.295.112,00							148.405.335,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		60 Paket	1 Paket	148.295.112,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Paket	148.405.335,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						47.459.640,00							47.459.640,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	47.459.640,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Orang	47.459.640,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						813.230.290,00					Seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan Bapenda		813.298.233,00	
		Fasilitas Pendukung Administrasi Umum Perangkat Daerah						813.230.290,00					Seluruh pegawai dan unit kerja di lingkungan Bapenda		813.298.233,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	17.629.500,00						5 Dokumen	17.629.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	23.548.868,00						10 Dokumen	23.549.090,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	321.171.598,00						50 Laporan	321.176.815,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.356.822,00						1 Paket	154.358.376,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.005.390,00						1 Paket	38.019.720,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.196.680,00						1 Paket	12.196.680,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	246.321.432,00						1 Paket	246.368.052,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						38.005.390,00							38.019.720,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.005.390,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	38.019.720,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12.196.680,00							12.196.680,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	12.196.680,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	12.196.680,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						246.321.432,00							246.368.052,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	246.321.432,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	246.368.052,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						17.629.500,00							17.629.500,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	17.629.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	17.629.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						154.356.822,00							154.358.376,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	154.356.822,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	154.358.376,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						321.171.598,00							321.176.815,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	321.171.598,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		50 Laporan	321.176.815,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						23.548.868,00							23.549.090,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	23.548.868,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Dokumen	23.549.090,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.963.750,00					Pegawai (ASN dan Non-ASN) pengguna barang milik daerah Bapenda		308.634.240,00	
		Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						285.963.750,00					Pegawai (ASN dan Non-ASN) pengguna barang milik daerah Bapenda		308.634.240,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	71.928.000,00						5 Unit	71.611.500,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	214.035.750,00						5 Unit	237.022.740,00	
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						71.928.000,00							71.611.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	71.928.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	71.611.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						214.035.750,00							237.022.740,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	214.035.750,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	237.022.740,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.195.000,00					Gedung/kantor yang dilayani pada Bapenda		331.696.500,00	
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						325.195.000,00					Gedung/kantor yang dilayani pada Bapenda		331.696.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	308.695.000,00						4 Laporan	315.196.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00						1 Laporan	16.500.000,00	
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.500.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.500.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	16.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						308.695.000,00							315.196.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	308.695.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	315.196.500,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						402.057.042,00					ASN pengguna BMD pada Bapenda		371.542.820,00	
		Laporan Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						402.057.042,00					ASN pengguna BMD pada Bapenda		371.542.820,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.714.500,00						1 Unit	7.742.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	328.950.000,00						29 Unit	298.336.100,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		120 Unit	120 Unit	65.392.542,00						120 Unit	65.464.470,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						328.950.000,00							298.336.100,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit		29 Unit	29 Unit	328.950.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		29 Unit	298.336.100,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						65.392.542,00							65.464.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit		120 Unit	120 Unit	65.392.542,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		120 Unit	65.464.470,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.714.500,00							7.742.250,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.714.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	7.742.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.13	Penataan Organisasi						16.433.580,00					ASN terdampak penataan organisasi pada Bapenda		16.433.580,00	
		Susunan struktur organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah						16.433.580,00					ASN terdampak penataan organisasi pada Bapenda		16.433.580,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.433.580,00						3 Dokumen	16.433.580,00	
	5.02.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						16.433.580,00							16.433.580,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.433.580,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	16.433.580,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
149.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.340.716.326,00**							**2.341.776.380,00**	
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah						***2.340.716.326,00***							***2.341.776.380,00***	
			1.Persentase Pertumbuhan PAD	3 %		3 %	3 %	2.340.716.326,00						3 %	2.341.776.380,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.340.716.326,00					Wajib pajak dan retribusi daerah serta aparatur pengelola PAD yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah.		2.341.776.380,00	
		Penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah						2.340.716.326,00					Wajib pajak dan retribusi daerah serta aparatur pengelola PAD yang mendukung optimalisasi pendapatan daerah.		2.341.776.380,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	65.474.072,00						22 Dokumen	65.474.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	205.982.033,00						22 Dokumen	205.982.265,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	289.263.250,00						22 Dokumen	289.263.250,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	76.478.676,00						22 Dokumen	76.479.120,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70.166.042,00						2 Dokumen	70.166.375,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	38.944.400,00						22 Dokumen	38.944.400,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	186.965.400,00						5 Dokumen	186.965.545,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	79.535.876,00						4 Laporan	79.536.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	96.721.200,00						22 Laporan	96.742.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	334.379.700,00						22 Laporan	334.379.700,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	122.331.400,00						3 Laporan	122.331.400,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.978.000,00						1 Laporan	55.988.325,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan		7 Layanan	7 Layanan	123.596.300,00						7 Layanan	123.735.600,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	37500 Obyek Pajak		35500 Obyek Pajak	36000 Obyek Pajak	267.094.200,00						36500 Obyek Pajak	267.981.200,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit		5 Unit	5 Unit	327.805.777,00						5 Unit	327.806.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						186.965.400,00							186.965.545,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	186.965.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	186.965.545,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						205.982.033,00							205.982.265,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	205.982.033,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Dokumen	205.982.265,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						122.331.400,00							122.331.400,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	122.331.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	122.331.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						327.805.777,00							327.806.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit		5 Unit	5 Unit	327.805.777,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	327.806.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						96.721.200,00							96.742.400,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	96.721.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Laporan	96.742.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						334.379.700,00							334.379.700,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	334.379.700,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Laporan	334.379.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						267.094.200,00							267.981.200,00	
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	37500 Obyek Pajak		35500 Obyek Pajak	40000 Obyek Pajak	267.094.200,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		36500 Obyek Pajak	267.981.200,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						38.944.400,00							38.944.400,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	38.944.400,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Dokumen	38.944.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						123.596.300,00							123.735.600,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	7 Layanan		7 Layanan	7 Layanan	123.596.300,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Layanan	123.735.600,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						65.474.072,00							65.474.400,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	65.474.072,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Dokumen	65.474.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						289.263.250,00							289.263.250,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	289.263.250,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Dokumen	289.263.250,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						70.166.042,00							70.166.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	22 Dokumen	70.166.042,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	70.166.375,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						76.478.676,00							76.479.120,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	22 Dokumen		22 Dokumen	22 Dokumen	76.478.676,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Dokumen	76.479.120,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						79.535.876,00							79.536.400,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	79.535.876,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	79.536.400,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						55.978.000,00							55.988.325,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.978.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	55.988.325,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**7.618.979.898,60**							**6.854.205.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.613.804.898,60**							**6.848.705.000,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**7.257.347.898,60**							**6.761.205.000,00**	
150.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.372.267.098,00**							**5.560.500.000,00**	
		Terlaksanannya Kebutuhan Adminitrasi Penunjang Pemerintah Daerah						***6.372.267.098,00***							***5.560.500.000,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95 %		88 %	90 %	6.372.267.098,00						90 %	5.560.500.000,00	
			2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	82 Predikat		70 Predikat	75 Predikat	6.372.267.098,00						78 Predikat	5.560.500.000,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						184.017.984,00					ASN		215.000.000,00	
		Terlaksannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						184.017.984,00					ASN		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	41.503.500,00						2 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	32.514.484,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						41.503.500,00							90.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	41.503.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Dokumen	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						35.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						35.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						32.514.484,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	32.514.484,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						40.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Laporan	55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.130.000.305,00					ASN		4.380.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.130.000.305,00					ASN		4.380.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4.100.000.305,00						48 Orang/bulan	4.300.000.000,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.100.000.305,00							4.300.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		48 Orang/bulan	55 Orang/bulan	4.100.000.305,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		48 Orang/bulan	4.300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Laporan	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	18 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		12 Laporan	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						10.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		12 Dokumen	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						30.280.040,00					ASN		22.500.000,00	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						30.280.040,00					ASN		22.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.280.040,00						2 Laporan	22.500.000,00	
	5.03.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						30.280.040,00							22.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	30.280.040,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Laporan	22.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						281.200.000,00					ASN		265.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						281.200.000,00					ASN		265.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00						1 Dokumen	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	69.200.000,00						15 Orang	65.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						103.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Dokumen	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						60.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Dokumen	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						69.200.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		15 Orang	10 Orang	69.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		15 Orang	65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						473.541.754,00					ASN		481.200.000,00	
		Tersedianya Barang Perlengkapan Perkantoran						473.541.754,00					ASN		481.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	326.204.754,00						50 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	21.100.000,00						3 Paket	11.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	67.687.000,00						1 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	51.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.550.000,00						1 Paket	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.550.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	8.550.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Paket	9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.100.000,00							11.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	21.100.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		3 Paket	11.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							51.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Paket	51.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						67.687.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	67.687.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Paket	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						326.204.754,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	30 Laporan	326.204.754,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		50 Laporan	350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.662.200,00					-		238.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Gedung kantor, Kendaraan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						333.662.200,00					-		238.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	194.410.000,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	131.052.200,00						1 Laporan	140.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	8.200.000,00						5 Laporan	8.500.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.200.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	8.200.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		5 Laporan	8.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						194.410.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	194.410.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		3 Laporan	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						131.052.200,00							140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	131.052.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Laporan	140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						155.691.100,00					Barang Milik Daerah		160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						155.691.100,00					Barang Milik Daerah		160.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		2 Unit	2 Unit	127.737.100,00						2 Unit	130.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	27.954.000,00						2 Unit	30.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						127.737.100,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit		2 Unit	4 Unit	127.737.100,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Unit	130.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.954.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	10 Unit	27.954.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Unit	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.13	Penataan Organisasi						9.300.000,00					ASN		9.300.000,00	
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						9.300.000,00					ASN		9.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00						1 Dokumen	9.300.000,00	
	5.03.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						9.300.000,00							9.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Dokumen	9.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						281.200.000,00					ASN		265.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	49.000.000,00						-	30.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						49.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	49.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						829.573.715,00					ASN		39.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						829.573.715,00					ASN		39.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	790.980.715,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	38.593.000,00						-	39.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						790.980.715,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	790.980.715,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						38.593.000,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	38.593.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	39.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
151.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**830.080.800,60**							**700.705.000,00**	
		Terlaksananya Program Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunung Mas						***830.080.800,60***							***700.705.000,00***	
			1.Indeks Profesionalitas ASN	89 Indeks		77 Indeks	80 Indeks	830.080.800,60						82 Indeks	700.705.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						196.256.400,00					ASN		195.705.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	73.869.500,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						73.869.500,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	73.869.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						251.522.600,00					ASN		260.000.000,00	
		Jumlah Pegawai yang Mutasi dan Promosi ASN						251.522.600,00					ASN		260.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.709.000,00						5 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 Dokumen		450 Dokumen	350 Dokumen	70.813.600,00						360 Dokumen	75.000.000,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						30.709.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	30.709.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		5 Dokumen	35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						70.813.600,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	450 Dokumen		450 Dokumen	1 Dokumen	70.813.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		360 Dokumen	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						150.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						254.082.800,00					ASN		355.000.000,00	
		Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya						254.082.800,00					ASN		355.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang		3 Orang	3 Orang	126.550.000,00						5 Orang	220.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang		50 Orang	50 Orang	83.317.600,00						30 Orang	85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.215.200,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						83.317.600,00							85.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	20 Orang		50 Orang	35 Orang	83.317.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		30 Orang	85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						126.550.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	6 Orang		3 Orang	5 Orang	126.550.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		5 Orang	220.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						44.215.200,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.215.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						128.219.000,60					ASN		140.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur						128.219.000,60					ASN		140.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	120 Orang		200 Orang	200 Orang	35.511.000,00						150 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang		4 Orang	6 Orang	45.076.000,00						3 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.632.000,60						1 Laporan	50.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						35.511.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	120 Orang		200 Orang	30 Orang	35.511.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		150 Orang	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						45.076.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5 Orang		4 Orang	20 Orang	45.076.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		3 Orang	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						47.632.000,60							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.632.000,60	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		1 Laporan	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						196.256.400,00					ASN		195.705.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						196.256.400,00					ASN		195.705.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	-	69.820.900,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	-	21.861.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	-	30.705.000,00						-	30.705.000,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						30.705.000,00							30.705.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	-		-	2 Dokumen	30.705.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	30.705.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						69.820.900,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-		-	2 Dokumen	69.820.900,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						21.861.000,00							15.000.000,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	-		-	1 Dokumen	21.861.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**356.457.000,00**							**87.500.000,00**	
152.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**356.457.000,00**							**87.500.000,00**	
		Terlaksananya program Pengembangan Sumber Daya Manusia						***356.457.000,00***							***87.500.000,00***	
			1.Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	86 Indeks		72 Indeks	75 Indeks	356.457.000,00						78 Indeks	87.500.000,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						356.457.000,00					ASN		87.500.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						356.457.000,00					ASN		87.500.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	356.457.000,00						2 Dokumen	87.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						356.457.000,00							87.500.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	356.457.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		2 Dokumen	87.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	X							**5.175.000,00**							**5.500.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**5.175.000,00**							**5.500.000,00**	
153.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.175.000,00**							**5.500.000,00**	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	90 %	5.175.000,00						-	5.500.000,00	
			2.Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	-		-	75 Predikat	5.175.000,00						-	5.500.000,00	
			Terlaksanannya Kebutuhan Adminitrasi Penunjang Pemerintah Daerah	-		-	90 Persen	5.175.000,00						-	5.500.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5.175.000,00					ASN		5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Perlengkapan Perkantoran						5.175.000,00					ASN		5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.175.000,00						12 Dokumen	5.500.000,00	
	X.XX.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.175.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	5.175.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		12 Dokumen	5.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**17.546.420.820,32**							**5.960.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.536.927.820,32**							**5.950.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**17.536.927.820,32**							**5.950.000.000,00**	
154.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.078.895.820,32**							**1.150.000.000,00**	
		Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah						***15.078.895.820,32***							***1.150.000.000,00***	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	15.078.895.820,32						100 %	1.150.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi						154.080.000,00					Perangkat Daerah		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	128.400.000,00						5 Laporan	100.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						128.400.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	128.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.482.420.508,32					Perangkat Daerah		1.100.000.000,00	
		Persentase efesiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi keuangan						10.482.420.508,32					Perangkat Daerah		1.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	34.240.000,00						6 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.448.180.508,32						90 Orang/bulan	1.000.000.000,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.448.180.508,32							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.448.180.508,32	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		90 Orang/bulan	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						34.240.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	34.240.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.815.264.000,00					Perangkat Daerah		1.100.000.000,00	
		Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapabilitas APIP						1.815.264.000,00					Perangkat Daerah		1.100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		50 Orang	50 Orang	751.776.000,00						60 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang		70 Orang	70 Orang	1.063.488.000,00						80 Orang	1.000.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						1.063.488.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang		70 Orang	90 Orang	1.063.488.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		80 Orang	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						751.776.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang		50 Orang	90 Orang	751.776.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Orang	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.180.627.912,00					Perangkat Daerah		600.000.000,00	
		Persentase efesiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi umum						1.180.627.912,00					Perangkat Daerah		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	12.633.900,00						40 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	203.153.500,00						30 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	86.164.500,00						20 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	44.850.000,00						30 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	53.256.012,00						10 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	780.570.000,00						3 Paket	100.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						780.570.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	780.570.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						86.164.500,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	5 Paket	86.164.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Paket	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						53.256.012,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	3 Paket	53.256.012,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Paket	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12.633.900,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	12.633.900,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		40 Dokumen	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						44.850.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	44.850.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Paket	100.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						203.153.500,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	20 Laporan	203.153.500,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						131.745.900,00					Perangkat Daerah		1.000.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						131.745.900,00					Perangkat Daerah		1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	131.745.900,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						131.745.900,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	131.745.900,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.603.500,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.603.500,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22 Laporan		22 Laporan	22 Laporan	79.623.500,00						22 Laporan	100.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						79.623.500,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	22 Laporan		22 Laporan	3 Laporan	79.623.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		22 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.185.154.000,00					Perangkat Daerah		400.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.185.154.000,00					Perangkat Daerah		400.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	579.967.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	225.078.000,00						25 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	343.875.000,00						6 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	36.234.000,00						30 Unit	100.000.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						343.875.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	343.875.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						225.078.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	30 Unit	225.078.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.234.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	40 Unit	36.234.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						579.967.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	579.967.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						154.080.000,00					Perangkat Daerah		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi						154.080.000,00					Perangkat Daerah		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	25.680.000,00						-	100.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.680.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	30 Dokumen	25.680.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	100.000.000,00	INSPEKTORAT
		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						129.603.500,00					Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	49.980.000,00						-	50.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						49.980.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	2 Laporan	49.980.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	50.000.000,00	INSPEKTORAT
155.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**1.840.766.000,00**							**100.000.000,00**	
		Menurutnya penyelewenangan atau penyimpangan, baik yang bersifat angaran ataupun proses dan kewenangan						***1.840.766.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	95 Persentase		90 Persentase	95 Persentase	1.840.766.000,00						95 Persentase	100.000.000,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						1.466.260.000,00					-		700.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Program Penyelenggaraan Pengawasan						1.466.260.000,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	179.760.000,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	94.160.000,00						2 Kesepakatan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	627.380.000,00						60 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	102.720.000,00						37 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	196.880.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	94.160.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	171.200.000,00						6 Laporan	100.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						196.880.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan		1 Laporan	5 Laporan	196.880.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						102.720.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	102.720.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		37 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						171.200.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	171.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						94.160.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	94.160.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						627.380.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	627.380.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						94.160.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	94.160.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Kesepakatan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						179.760.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	179.760.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						468.666.000,00					-		200.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						468.666.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	395.712.000,00						30 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	72.954.000,00						10 Laporan	100.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						72.954.000,00							100.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	10 Laporan		10 Laporan	5 Laporan	72.954.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						395.712.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	395.712.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
156.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**523.106.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						***523.106.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terdefinisi Level		Berkembang Level	Berkembang Level	523.106.000,00						Berkembang Level	100.000.000,00	
			2.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Dikelola (Managed) Level		Terintegrasi (Integrated) Level	Terintegrasi (Integrated) Level	523.106.000,00						Terintegrasi (Integrated) Level	100.000.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						57.330.000,00					-		100.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						57.330.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	57.330.000,00						2 Rekomendasi	100.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						57.330.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	57.330.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Rekomendasi	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						465.776.000,00					Perangkat Daerah		400.000.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pendampingan dan Asistensi						465.776.000,00					Perangkat Daerah		400.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	222.560.000,00						3 Kegiatan	100.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	59.920.000,00						38 perangkat daerah	100.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	106.256.000,00						38 perangkat daerah	100.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	77.040.000,00						38 perangkat daerah	100.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						77.040.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	77.040.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		38 perangkat daerah	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						106.256.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	106.256.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		38 perangkat daerah	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						222.560.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan		3 Kegiatan	4 Kegiatan	222.560.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Kegiatan	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						59.920.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38 perangkat daerah		38 perangkat daerah	38 perangkat daerah	59.920.000,00	Kab. Gunung Mas	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		38 perangkat daerah	100.000.000,00	INSPEKTORAT
	X							**9.493.000,00**							**10.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**9.493.000,00**							**10.000.000,00**	
157.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.493.000,00**							**10.000.000,00**	
			1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	9.493.000,00						-	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.493.000,00					Perangkat Daerah		10.000.000,00	
		Persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapabilitas APIP						9.493.000,00					Perangkat Daerah		10.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket		90 Paket	90 Paket	9.493.000,00						90 Paket	10.000.000,00	
	X.XX.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						9.493.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket		90 Paket	1 Paket	9.493.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		90 Paket	10.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN KURUN						**4.625.069.416,64**							**4.621.868.858,64**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**4.625.069.416,64**							**4.621.868.858,64**	
	7.01	**KECAMATAN**						**4.625.069.416,64**							**4.621.868.858,64**	
158.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.239.703.060,64**							**4.239.168.858,64**	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Profisional, Bersih dan Akuntabel						***4.239.703.060,64***							***4.239.168.858,64***	
			S.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	4.239.703.060,64						100 %	4.239.168.858,64	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						32.295.378,00					-		32.904.385,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						32.295.378,00					-		32.904.385,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.552,00						2 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.386,00						2 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.386,00						2 Dokumen	2.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.052,00						2 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.794.002,00						5 Laporan	21.404.385,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.500.052,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.500.052,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.500.386,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.500.386,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.000.552,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	3.000.552,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.500.386,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.500.386,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	2.500.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.794.002,00							21.404.385,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	20.794.002,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	21.404.385,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.498.386.184,64					-		3.498.366.206,64	
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkualitas						3.498.386.184,64					-		3.498.366.206,64	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.442,00						1 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	15.504.480,00						17 Laporan	15.485.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	3.480.881.262,64						38 Orang/bulan	3.480.881.206,64	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.480.881.262,64							3.480.881.206,64	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan		38 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.480.881.262,64	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		38 Orang/bulan	3.480.881.206,64	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.442,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.442,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.504.480,00							15.485.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	15.504.480,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		17 Laporan	15.485.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.127.200,00					-		15.000.000,00	
		Terwujudnya Administrasi Kepegawaian yang berkualitas						15.127.200,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	15.127.200,00						2 Orang	15.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						15.127.200,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	4 Orang	15.127.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						252.332.274,00					-		252.849.241,00	
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkayt Daerah yang Berkualitas						252.332.274,00					-		252.849.241,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.043.900,00						3 Dokumen	5.043.900,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	127.038.300,00						6 Laporan	129.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	83.043.540,00						20 Paket	81.505.341,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.684.960,00						1 Paket	21.800.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.521.574,00						6 Paket	15.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						83.043.540,00							81.505.341,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	5 Paket	83.043.540,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Paket	81.505.341,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.521.574,00							15.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	3 Paket	15.521.574,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Paket	15.500.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						5.043.900,00							5.043.900,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.043.900,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	5.043.900,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						21.684.960,00							21.800.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.684.960,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	21.800.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						127.038.300,00							129.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	127.038.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	129.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						231.190.400,00					-		234.000.000,00	
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						231.190.400,00					-		234.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	84.996.000,00						6 Laporan	87.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	141.192.000,00						12 Laporan	142.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.002.400,00						3 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.002.400,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	5.002.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						84.996.000,00							87.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	84.996.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	87.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						141.192.000,00							142.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	141.192.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	142.000.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						157.816.010,00					-		158.549.026,00	
		Terwujudnya Administrasi Barang Milik yang Berkualitas						157.816.010,00					-		158.549.026,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	77.055.300,00						2 Unit	78.843.633,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	61.809.680,00						7 Unit	60.749.701,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	18.951.030,00						30 Unit	18.955.692,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						61.809.680,00							60.749.701,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	5 Unit	61.809.680,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Unit	60.749.701,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						77.055.300,00							78.843.633,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	77.055.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	78.843.633,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.951.030,00							18.955.692,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	18.951.030,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Unit	18.955.692,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						55.056.000,00					-		50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan						55.056.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	55.056.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						55.056.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	55.056.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	50.000.000,00	KECAMATAN KURUN
159.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**330.079.590,00**							**326.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						***330.079.590,00***							***326.000.000,00***	
			1.Presentase Kegiatan Forum Musyawarah di Ttingkat Desa/Kelurahan	100 %		100 %	100 %	330.079.590,00						100 %	326.000.000,00	
			2.Presentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Program Desa/Kelurahan	100 %		100 %	100 %	330.079.590,00						100 %	326.000.000,00	
			3.Presentase Kinerja keterlibatan organisasi, kelompok, keagaman dan masyarakat dalam peningkatan kapasitas lembaga masyarakat	100 %		100 %	100 %	330.079.590,00						100 %	326.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						330.079.590,00					-		326.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						330.079.590,00					-		326.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	330.079.590,00						-	326.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						330.079.590,00							326.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	330.079.590,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	326.000.000,00	KECAMATAN KURUN
160.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**52.786.380,00**							**54.200.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan						***52.786.380,00***							***54.200.000,00***	
			1.Presentase Efisiensi Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi, Koordinasi, dan Pembinaan yang tertib	100 %		100 %	100 %	52.786.380,00						100 %	54.200.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						52.786.380,00					-		54.200.000,00	
		Meningkatnya Efisiensi Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi, Koordinasi, dan Pembinaan						52.786.380,00					-		54.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.584.400,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	49.201.980,00						13 Dokumen	49.200.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						49.201.980,00							49.200.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Dokumen		13 Dokumen	1 Dokumen	49.201.980,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		13 Dokumen	49.200.000,00	KECAMATAN KURUN
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.584.400,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.584.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN KURUN
		KELURAHAN KURUN						**525.000.000,00**							**525.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**525.000.000,00**							**525.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**525.000.000,00**							**525.000.000,00**	
161.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**235.721.383,30**							**235.721.383,30**	
			-	-		-	-	235.721.383,30						-	235.721.383,30	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17.213.880,00					-		17.213.880,00	
		-						17.213.880,00					-		17.213.880,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	10.176.480,00						-	10.176.480,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	7.037.400,00						-	7.037.400,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						7.037.400,00							7.037.400,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	10 Paket	7.037.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	7.037.400,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.176.480,00							10.176.480,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	3 Orang	10.176.480,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	10.176.480,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						91.266.772,00					-		91.266.772,00	
		-						91.266.772,00					-		91.266.772,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	1.821.600,00						-	1.821.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	38.114.800,00						-	38.114.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	39.810.372,00						-	39.810.372,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	11.520.000,00						-	11.520.000,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						39.810.372,00							39.810.372,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	5 Paket	39.810.372,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	39.810.372,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.520.000,00							11.520.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	11.520.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	11.520.000,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1.821.600,00							1.821.600,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	12 Dokumen	1.821.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	1.821.600,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38.114.800,00							38.114.800,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	24 Laporan	38.114.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	38.114.800,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						48.635.760,00					-		48.635.760,00	
		-						48.635.760,00					-		48.635.760,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	48.635.760,00						-	48.635.760,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.635.760,00							48.635.760,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	48.635.760,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	48.635.760,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.445.491,30					-		51.445.491,30	
		-						51.445.491,30					-		51.445.491,30	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	29.310.000,00						-	29.310.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	18.914.400,00						-	18.914.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	3.221.091,30						-	3.221.091,30	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.221.091,30							3.221.091,30	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	3.221.091,30	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.221.091,30	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.310.000,00							29.310.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	24 Laporan	29.310.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	29.310.000,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						18.914.400,00							18.914.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	18.914.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	18.914.400,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.159.480,00					-		27.159.480,00	
		-						27.159.480,00					-		27.159.480,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	5.714.280,00						-	5.714.280,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	12.187.800,00						-	12.187.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	9.257.400,00						-	9.257.400,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.714.280,00							5.714.280,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	5.714.280,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.714.280,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.187.800,00							12.187.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	14 Unit	12.187.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	12.187.800,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.257.400,00							9.257.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	9.257.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	9.257.400,00	KELURAHAN KURUN
162.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**289.278.616,70**							**289.278.616,70**	
		-	-	-		-	-	289.278.616,70						-	289.278.616,70	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						203.885.000,00					-		203.885.000,00	
		-						203.885.000,00					-		203.885.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	3.885.000,00						-	3.885.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						3.885.000,00							3.885.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.885.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.885.000,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	2 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	-		-	200.000.000,00	KELURAHAN KURUN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						85.393.616,70					-		85.393.616,70	
		-						85.393.616,70					-		85.393.616,70	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	85.393.616,70						-	85.393.616,70	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						85.393.616,70							85.393.616,70	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	85.393.616,70	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	85.393.616,70	KELURAHAN KURUN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR						**525.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**525.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**525.000.000,00**							**0,00**	
163.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**218.078.800,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	218.078.800,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						17.968.680,00					-		0,00	
		-						17.968.680,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	10.176.480,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	7.792.200,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						7.792.200,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	7.792.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						10.176.480,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Orang	10.176.480,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						105.878.650,00					-		0,00	
		-						105.878.650,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	2.484.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	47.674.420,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	27.627.789,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	14.133.081,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	13.959.360,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.959.360,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	13.959.360,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						27.627.789,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	27.627.789,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.133.081,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	2 Paket	14.133.081,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.484.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	1 Dokumen	2.484.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						47.674.420,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	47.674.420,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						23.088.000,00					-		0,00	
		-						23.088.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	23.088.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						23.088.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	23.088.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.110.000,00					-		0,00	
		-						20.110.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.620.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	9.990.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.500.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.620.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	2 Laporan	7.620.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.990.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	9.990.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						51.033.470,00					-		0,00	
		-						51.033.470,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	5.689.970,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	7.542.450,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	37.801.050,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						5.689.970,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	1 Unit	5.689.970,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.542.450,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	12 Unit	7.542.450,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						37.801.050,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	37.801.050,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
164.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**306.921.200,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	306.921.200,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						226.921.200,00					-		0,00	
		-						226.921.200,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.264.400,00						-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	224.656.800,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.264.400,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.264.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Tumbang Anjir || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						224.656.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	224.656.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Tumbang Anjir | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						80.000.000,00					-		0,00	
		-						80.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						80.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	2 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Tumbang Anjir | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Penyediaan fasilitas transportasi publik yang berkualitas dan merata, jaringan logistik, dan infrastruktur jalan dan jembatan yang handal		-	0,00	KELURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR
		KECAMATAN TEWAH						**3.697.445.941,72**							**3.696.687.405,72**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.697.445.941,72**							**3.696.687.405,72**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.697.445.941,72**							**3.696.687.405,72**	
165.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.305.817.071,30**							**3.308.835.667,72**	
		Meningkatnya Layanan Administrasi Kantor						***3.305.817.071,30***							***3.308.835.667,72***	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98 %		98 %	98 %	3.305.817.071,30						98 %	3.308.835.667,72	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.787.200,00					-		13.976.200,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.787.200,00					-		13.976.200,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.743.400,00						1 Dokumen	1.769.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.838.400,00						3 Dokumen	2.896.600,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2.370.400,00						2 Dokumen	2.372.600,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.259.200,00						2 Dokumen	2.294.100,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.633.000,00						1 Dokumen	2.669.200,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.942.800,00						6 Laporan	1.974.200,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.838.400,00							2.896.600,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 dokumen Dokumen	2.838.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	2.896.600,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						2.633.000,00							2.669.200,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.633.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	2.669.200,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2.259.200,00							2.294.100,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.259.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	2.294.100,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.743.400,00							1.769.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1.743.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	1.769.500,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.370.400,00							2.372.600,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	2.370.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	2.372.600,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.942.800,00							1.974.200,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 laporan Laporan	1.942.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	1.974.200,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.525.169.617,72					-		2.525.174.329,72	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						2.525.169.617,72					-		2.525.174.329,72	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 Dokumen		86 Dokumen	87 Dokumen	21.638.600,00						88 Dokumen	21.641.700,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan		16 Laporan	16 Laporan	15.527.388,00						16 Laporan	15.529.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.488.003.629,72						24 Orang/bulan	2.488.003.629,72	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.488.003.629,72							2.488.003.629,72	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan		24 Orang/bulan	24 Orang/bulan	2.488.003.629,72	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		24 Orang/bulan	2.488.003.629,72	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						21.638.600,00							21.641.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90 Dokumen		86 Dokumen	95 Dokumen	21.638.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		88 Dokumen	21.641.700,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						15.527.388,00							15.529.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan		16 Laporan	18 Laporan	15.527.388,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Laporan	15.529.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						6.857.680,00					-		6.869.400,00	
		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah						6.857.680,00					-		6.869.400,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.857.680,00						12 Dokumen	6.869.400,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						6.857.680,00							6.869.400,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen Dokumen	6.857.680,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	6.869.400,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						43.796.468,00					-		43.797.023,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) dan Pakaian Putih Hitam untuk Pegawai Kantor Kecamatan						43.796.468,00					-		43.797.023,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.667.200,00						12 Dokumen	7.667.200,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	11.038.384,00						2 Orang	11.038.384,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32 Unit		32 Unit	32 Unit	25.090.884,00						32 Unit	25.091.439,00	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						25.090.884,00							25.091.439,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	32 Unit		32 Unit	2 Unit	25.090.884,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		32 Unit	25.091.439,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						7.667.200,00							7.667.200,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen Dokumen	7.667.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	7.667.200,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						11.038.384,00							11.038.384,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	11.038.384,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Orang	11.038.384,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						197.656.952,58					-		191.926.654,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						197.656.952,58					-		191.926.654,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.571.800,00						1 Laporan	7.582.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		160 Laporan	165 Laporan	88.680.360,00						170 Laporan	83.888.360,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		8 Paket	9 Paket	71.186.056,00						10 Paket	71.189.500,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.087.300,00						1 Paket	20.003.750,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.369.436,58						2 Paket	3.393.544,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.762.000,00						12 Paket	5.869.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.762.000,00							5.869.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	5.762.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Paket	5.869.500,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						71.186.056,00							71.189.500,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		8 Paket	4 Paket	71.186.056,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Paket	71.189.500,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.369.436,58							3.393.544,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	3.369.436,58	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	3.393.544,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						21.087.300,00							20.003.750,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.087.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	20.003.750,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.571.800,00							7.582.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	7.571.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	7.582.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						88.680.360,00							83.888.360,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180 Laporan		160 Laporan	137 Laporan	88.680.360,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		170 Laporan	83.888.360,00	KECAMATAN TEWAH
		Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2						149.803.926,00					-		154.508.670,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	5 Unit	3.304.026,00						5 Unit	3.330.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	108.879.900,00						4 Unit	109.331.670,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						3.304.026,00							3.330.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit		3 Unit	2 Unit	3.304.026,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	3.330.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						108.879.900,00							109.331.670,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	7 Unit	108.879.900,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Unit	109.331.670,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						252.816.852,00					-		256.198.312,00	
		Tersedianya Materai						252.816.852,00					-		256.198.312,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	47.028.000,00						5 Laporan	47.028.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	204.598.852,00						13 Laporan	207.050.312,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.190.000,00						2 Laporan	2.120.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.190.000,00							2.120.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.190.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	2.120.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						47.028.000,00							47.028.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	47.028.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	47.028.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						204.598.852,00							207.050.312,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	204.598.852,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		13 Laporan	207.050.312,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.928.375,00					-		116.385.079,00	
		Tersedianya Jasa Service, Pergantian Suku Cadang dan Oil Mesin, dan Pajak Kendaraan						115.928.375,00					-		116.385.079,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	22.680.630,00						3 Unit	22.710.600,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	46.022.265,00						3 Unit	46.422.897,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		9 Unit	10 Unit	40.198.280,00						10 Unit	40.207.432,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	7.027.200,00						15 Unit	7.044.150,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.198.280,00							40.207.432,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		9 Unit	6 Unit	40.198.280,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	40.207.432,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						46.022.265,00							46.422.897,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	46.022.265,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	46.422.897,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.027.200,00							7.044.150,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	6 Unit	7.027.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Unit	7.044.150,00	KECAMATAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						22.680.630,00							22.710.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	2 Unit	22.680.630,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Tewah || Kelurahan Tewah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	22.710.600,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						149.803.926,00					-		154.508.670,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2						149.803.926,00					-		154.508.670,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	37.620.000,00							41.847.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.620.000,00							41.847.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	37.620.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Tewah || Kelurahan Tewah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	41.847.000,00	KECAMATAN TEWAH
166.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**3.033.440,00**							**3.109.300,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan PublikUrusan Pemerintah Umum						***3.033.440,00***							***3.109.300,00***	
			1.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	98.00 Persentase		98.00 Persentase	98.00 Persentase	3.033.440,00						98.00 Persentase	3.109.300,00	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.033.440,00					-		3.109.300,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						3.033.440,00					-		3.109.300,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.033.440,00						1 Laporan	3.109.300,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						3.033.440,00							3.109.300,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	35 Laporan	3.033.440,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	3.109.300,00	KECAMATAN TEWAH
167.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**169.891.880,42**							**168.112.909,00**	
		Terpenuhinya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***169.891.880,42***							***168.112.909,00***	
			1.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	98.00 %		98.00 %	98.00 %	169.891.880,42						98.00 %	168.112.909,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						169.891.880,42					-		168.112.909,00	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						169.891.880,42					-		168.112.909,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	169.891.880,42						4 Lembaga Kemasyarakatan	168.112.909,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						169.891.880,42							168.112.909,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	169.891.880,42	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Lembaga Kemasyarakatan	168.112.909,00	KECAMATAN TEWAH
168.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**8.567.200,00**							**8.588.100,00**	
		Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						***8.567.200,00***							***8.588.100,00***	
			1. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	98.00 %		98.00 %	98.00 %	8.567.200,00						98.00 %	8.588.100,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.567.200,00					-		8.588.100,00	
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.567.200,00					-		8.588.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.567.200,00						4 Laporan	8.588.100,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.567.200,00							8.588.100,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	8.567.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	8.588.100,00	KECAMATAN TEWAH
169.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**84.379.500,00**							**82.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum						***84.379.500,00***							***82.000.000,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98.00 %		98.00 %	98.00 %	84.379.500,00						98.00 %	82.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						84.379.500,00					-		82.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan 17 Agustus untuk Paskibra dan Pramuka di Kecamatan						84.379.500,00					-		82.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang		2 Orang	2 Orang	84.379.500,00						2 Orang	82.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						84.379.500,00							82.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang		2 Orang	22 Orang	84.379.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Tewah || Kelurahan Tewah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Orang	82.000.000,00	KECAMATAN TEWAH
170.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**125.756.850,00**							**126.041.429,00**	
		Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan desa						***125.756.850,00***							***126.041.429,00***	
			1.Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	98.00 %		98.00 %	98.00 %	125.756.850,00						98.00 %	126.041.429,00	
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						125.756.850,00					-		126.041.429,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.932.000,00						12 Dokumen	5.940.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	39.878.950,00						15 Dokumen	40.000.715,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	76.614.700,00						15 Dokumen	76.764.400,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						39.878.950,00							40.000.715,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	39.878.950,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Dokumen	40.000.715,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						76.614.700,00							76.764.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	76.614.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		15 Dokumen	76.764.400,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						5.932.000,00							5.940.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	15 Dokumen	5.932.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	5.940.000,00	KECAMATAN TEWAH
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						125.756.850,00					-		126.041.429,00	
		Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						125.756.850,00					-		126.041.429,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	3.331.200,00						-	3.336.314,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						3.331.200,00							3.336.314,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	15 Dokumen	3.331.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	3.336.314,00	KECAMATAN TEWAH
		KELURAHAN TEWAH						**525.000.000,00**							**675.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**525.000.000,00**							**675.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**525.000.000,00**							**675.000.000,00**	
171.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**243.896.950,00**							**246.849.922,50**	
		-	-	-		-	-	243.896.950,00						-	246.849.922,50	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						13.283.703,00					-		15.884.100,00	
		-						13.283.703,00					-		15.884.100,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	-	13.283.703,00						-	15.884.100,00	
	7.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						13.283.703,00							15.884.100,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-		-	3 Unit	13.283.703,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Tewah || Kelurahan Tewah || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	15.884.100,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						163.542.547,00					-		99.814.639,97	
		-						163.542.547,00					-		99.814.639,97	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	22.543.200,00						-	72.592.700,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	136.238.000,00						-	21.812.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	1.975.347,00						-	3.120.639,97	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.786.000,00						-	2.289.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.786.000,00							2.289.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.786.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Tewah || Kelurahan Tewah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	2.289.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						136.238.000,00							21.812.300,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	6 Paket	136.238.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Tewah || Kelurahan Tewah || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	21.812.300,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.975.347,00							3.120.639,97	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	1.975.347,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	3.120.639,97	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						22.543.200,00							72.592.700,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	38 Laporan	22.543.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	72.592.700,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.576.850,00					-		69.019.800,00	
		-						17.576.850,00					-		69.019.800,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	30.081.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	17.576.850,00						-	38.938.800,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							30.081.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	30.081.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.576.850,00							38.938.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	17.576.850,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	38.938.800,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25.654.000,00					-		22.144.000,00	
		-						25.654.000,00					-		22.144.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	24.654.000,00						-	21.144.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	1.000.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.654.000,00							21.144.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	24.654.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	21.144.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.839.850,00					-		39.987.382,53	
		-						23.839.850,00					-		39.987.382,53	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.028.850,00						-	6.580.882,53	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	10.517.000,00						-	15.517.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	3.294.000,00						-	17.889.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.517.000,00							15.517.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	3 Unit	10.517.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	15.517.500,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.294.000,00							17.889.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	3 Unit	3.294.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	17.889.000,00	KELURAHAN TEWAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.028.850,00							6.580.882,53	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.028.850,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Tewah | | Kelurahan Tewah | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	6.580.882,53	KELURAHAN TEWAH
172.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**281.103.050,00**							**428.150.077,50**	
			-	-		-	-	281.103.050,00						-	428.150.077,50	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						281.103.050,00					-		428.150.077,50	
		-						281.103.050,00					-		428.150.077,50	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	-	3.573.000,00						-	3.995.600,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	8.134.400,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	277.530.050,00						-	416.020.077,50	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0,00							8.134.400,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	8.134.400,00	KELURAHAN TEWAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						277.530.050,00							416.020.077,50	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	4 Pokmas / Ormas	277.530.050,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	416.020.077,50	KELURAHAN TEWAH
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						3.573.000,00							3.995.600,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	-		-	6 Laporan	3.573.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	3.995.600,00	KELURAHAN TEWAH
		KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA						**3.025.674.573,28**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.025.674.573,28**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.025.674.573,28**							**0,00**	
173.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.642.220.377,28**							**0,00**	
		Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah						***2.642.220.377,28***							***0,00***	
			1.Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.20 %		87 %	87.5 %	2.642.220.377,28						87.10 %	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.359.826,00					Kantor Kecamatan kahayan Hulu Utara		0,00	
		&Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah&						29.359.826,00					Kantor Kecamatan kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.792.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.833.600,00						6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.833.600,00						6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.833.600,00						6 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	8.275.026,00						20 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.792.000,00						8 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.833.600,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						3.833.600,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						3.833.600,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.833.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.792.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.792.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						8.275.026,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	8.275.026,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.792.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	4.792.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.907.883.313,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kantor Kelurahan Tumbang Miri		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan&						1.907.883.313,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kantor Kelurahan Tumbang Miri		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.400.000,00						Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.899.483.313,00						12 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.899.483.313,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.899.483.313,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.375.150,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri		0,00	
		&Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan&						9.375.150,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri		0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.375.150,00						9 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.375.150,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.375.150,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						40.093.200,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri		0,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						40.093.200,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara dan Kelurahan Tumbang Miri		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		25 Paket	Paket	40.093.200,00						Paket	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						40.093.200,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		25 Paket	20 Paket	40.093.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		Paket	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						288.601.719,28					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah						288.601.719,28					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146 Laporan		146 Laporan	146 Laporan	180.063.700,00						146 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	76.274.491,00						16 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	7.168.945,00						16 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.094.583,28						2 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.094.583,28							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	8 Paket	25.094.583,28	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						76.274.491,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	10 Paket	76.274.491,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Paket	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.168.945,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	8 Paket	7.168.945,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Paket	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		1 Paket	8 Paket	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		Paket	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						180.063.700,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	146 Laporan		146 Laporan	121 Laporan	180.063.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		146 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.239.730,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
		&Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah&						30.239.730,00					Kantor Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		7 Unit	8 Unit	30.239.730,00						8 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.239.730,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		7 Unit	8 Unit	30.239.730,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Unit	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						257.215.560,00					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah						257.215.560,00					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	29.132.300,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	225.583.260,00						9 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan		450 Laporan	450 Laporan	2.500.000,00						450 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450 Laporan		450 Laporan	250 Laporan	2.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		450 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.132.300,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	3 Laporan	29.132.300,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						225.583.260,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	225.583.260,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						91.911.079,00					Kantor Kecamatan Kahayan hulu Utara		0,00	
		&Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah&						91.911.079,00					Kantor Kecamatan Kahayan hulu Utara		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	11.227.713,00						4 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	48.084.430,00						10 Unit	0,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.039.848,00						1 Unit	0,00	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	19.559.088,00						30 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					13.039.848,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13.039.848,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					48.084.430,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	8 Unit	48.084.430,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					19.559.088,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	22 Unit	19.559.088,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Unit	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					11.227.713,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	3 Unit	11.227.713,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Unit	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		&Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah&					91.911.079,00						Kantor Kecamatan Kahayan hulu Utara		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
174.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**231.293.678,78**							**0,00**	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***231.293.678,78***							***0,00***	
			3.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	231.293.678,78						100 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						0,00					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
		"Presentase efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan Desa "						0,00					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00						4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						0,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						231.293.678,78					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
		Presentase kinerja, keterlibatan masyarakat, dan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat						231.293.678,78					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	220.751.278,78						3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.542.400,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						220.751.278,78							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	3 Lembaga Kemasyarakatan		4 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	220.751.278,78	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						10.542.400,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.542.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
175.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**125.325.317,22**							**0,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						***125.325.317,22***							***0,00***	
			5.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	125.325.317,22						100 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						125.325.317,22					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
		Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai dengan target kinerja						125.325.317,22					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.324.820,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00						6 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	108.000.497,22						60 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						108.000.497,22							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	60 Orang		60 Orang	60 Orang	108.000.497,22	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Orang	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6 Orang		6 Orang	5 Orang	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Orang	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						17.324.820,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.324.820,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
176.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**14.376.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						***14.376.000,00***							***0,00***	
			6.Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 %		85 %	85 %	14.376.000,00						85 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						14.376.000,00					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
		Persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, serta persentase Pemerintahan Desa yang tertib administrasi						14.376.000,00					Kecamatan Kahayan Hulu Utara		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	14.376.000,00						6 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						14.376.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	14.376.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	0,00	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA
		KELURAHAN TUMBANG MIRI						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
177.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**241.320.516,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-		-	87,05 undefined	101.976.642,08						-	0,00		
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	-		-	87,05 %	139.343.873,92							-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.976.642,08					-		0,00	
		-						101.976.642,08					-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-		33.343.267,20						-	0,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-		57.909.699,00						-	0,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-		5.260.255,88						-	0,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-		5.463.420,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.463.420,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	8 Paket	5.463.420,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						57.909.699,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	8 Paket	57.909.699,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.260.255,88							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	8 Paket	5.260.255,88	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						33.343.267,20							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	25 Laporan	33.343.267,20	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-		0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						121.335.600,00					-		0,00	
		-						121.335.600,00					-		0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-		8.335.600,00						-	0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-		111.000.000,00						-	0,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-		2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	200 Laporan	2.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.335.600,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	8.335.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						111.000.000,00							0,00	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	25 Laporan	111.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.008.273,92						-	0,00	
						-						18.008.273,92						-	0,00	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	6.017.310,00						-	0,00	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	5.910.970,00						-	0,00	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	6.079.993,92						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.910.970,00							0,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	2 Unit	5.910.970,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.09.0006					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.079.993,92							0,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	8 Unit	6.079.993,92	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.01.2.09.0009					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						6.017.310,00							0,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	6.017.310,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
178.	**7.01.03**					**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**258.679.484,00**							**0,00**	
							Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	-		-	100 %	258.679.484,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						258.679.484,00						-	0,00	
						-						258.679.484,00						-	0,00	
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	0,00						-	0,00	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	54.202.055,00						-	0,00	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	204.477.429,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						0,00							0,00	
						Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	4 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.03.2.02.0002					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						204.477.429,00							0,00	
						Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	3 Unit	204.477.429,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
	7.01.03.2.02.0003					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						54.202.055,00							0,00	
						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	10 Pokmas / Ormas	54.202.055,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kahayan Hulu Utara || Kelurahan Tumbang Miri || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MIRI
						KECAMATAN SEPANG						**3.432.492.595,96**							**0,00**	
	7					**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.432.492.595,96**							**0,00**	
	7.01					**KECAMATAN**						**3.432.492.595,96**							**0,00**	
179.	**7.01.01**					**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.066.033.522,96**							**0,00**	
						Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel						***3.066.033.522,96***							***0,00***	
							1.Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %		90 %	90 %	3.066.033.522,96						90 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						27.025.500,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						27.025.500,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.612.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.612.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.205.800,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.900.200,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.695.500,00						1 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.612.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.612.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.900.200,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.900.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.612.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.612.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						5.205.800,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.205.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.695.500,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.695.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.410.888.439,96					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkaulitas						2.410.888.439,96					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.916.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.373.572.439,96						26 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.373.572.439,96							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.373.572.439,96	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		26 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						28.916.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.916.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.400.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						5.612.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan						5.612.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.612.000,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.612.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.612.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						5.612.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Terwujudnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pendapatan Daerah						5.612.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.612.000,00						12 Dokumen	0,00	
	7.01.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						5.612.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.612.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						365.094.300,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas						365.094.300,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.134.300,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.060.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.900.000,00						1 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.900.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.134.300,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.134.300,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.060.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.060.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						49.520.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan						49.520.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	49.520.000,00						2 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						49.520.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	49.520.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						145.734.583,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						145.734.583,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.644.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.121.156,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.469.427,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.644.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.644.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.469.427,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.469.427,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						122.121.156,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.121.156,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						76.382.700,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Barang Milik yang berkualitas						76.382.700,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	44.200.800,00						7 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	32.181.900,00						1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						32.181.900,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	6 Unit	32.181.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.200.800,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	2 Unit	44.200.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Unit	0,00	KECAMATAN SEPANG
180.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**13.051.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik						***13.051.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik	90 %		90 %	90 %	13.051.000,00						90 %	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.106.000,00					Lintas Sektor		0,00	
		Pelaksanaan monitoring dan koordinasi antar perangkat daerah di Kecamatan						7.106.000,00					Lintas Sektor		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.106.000,00						12 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						7.106.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.106.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						5.945.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.945.000,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.945.000,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.945.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.945.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
181.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**164.829.400,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						***164.829.400,00***							***0,00***	
			1.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 %		90 %	90 %	164.829.400,00						90 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.029.400,00					Kelurahan/Desa		0,00	
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan Desa						10.029.400,00					Kelurahan/Desa		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.029.400,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.029.400,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.029.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN SEPANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						154.800.000,00					Lembaga Masyarakat		0,00	
		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan						154.800.000,00					Lembaga Masyarakat		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	144.800.000,00						7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						144.800.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan		7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	144.800.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						10.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN SEPANG
182.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**107.542.673,00**							**0,00**	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah						***107.542.673,00***							***0,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %		90 %	90 %	107.542.673,00						90 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						107.542.673,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
		Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan						107.542.673,00					Kantor Kecamatan Sepang		0,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.542.673,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34 Orang		34 Orang	34 Orang	100.000.000,00						34 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	34 Orang		34 Orang	34 Orang	100.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		34 Orang	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						7.542.673,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.542.673,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
183.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**55.200.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa						***55.200.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 %		90 %	90 %	55.200.000,00						90 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						61.200.000,00					Kelurahan/Desa		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, serta Pembinaan Pemerintahan Desa						61.200.000,00					Kelurahan/Desa		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	49.200.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						49.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	49.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN SEPANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN SEPANG
		KELURAHAN SEPANG SIMIN						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
184.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**213.200.000,00**							**0,00**	
			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		-	90 %	213.200.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						149.319.102,00					-		0,00	
		-						149.319.102,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	15.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	85.095.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	7.580.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.085.247,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	15.858.855,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	-	18.700.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.085.247,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.085.247,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.858.855,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	15.858.855,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.700.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-		-	1 Paket	18.700.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						85.095.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	85.095.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.580.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.580.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						11.700.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						11.700.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	11.700.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.700.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	11.700.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Sepang Simin | | Kelurahan Sepang Simin | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.784.000,00					-		0,00	
		-						5.784.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	2.784.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	4 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Sepang Simin | | Kelurahan Sepang Simin | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.784.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.784.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Sepang Simin | | Kelurahan Sepang Simin | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Sepang Simin | | Kelurahan Sepang Simin | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						46.396.898,00					-		0,00	
		-						46.396.898,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	13.111.898,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	33.285.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13.111.898,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	3 Unit	13.111.898,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Sepang Simin | | Kelurahan Sepang Simin | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						33.285.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	33.285.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Sepang Simin | | Kelurahan Sepang Simin | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
185.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**286.800.000,00**							**0,00**	
			Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		-	90 %	286.800.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						204.000.000,00					-		0,00	
		-						204.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	4.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						4.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Sepang Simin | | Kelurahan Sepang Simin | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						82.800.000,00					-		0,00	
		-						82.800.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	82.800.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						82.800.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	82.800.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Sepang Simin || Kelurahan Sepang Simin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN SEPANG SIMIN
		KECAMATAN MANUHING						**3.398.612.418,88**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.280.772.618,88**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.280.772.618,88**							**0,00**	
186.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.982.939.906,88**							**0,00**	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel						***2.982.939.906,88***							***0,00***	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	2.982.939.906,88						100 %	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.076.284,00					-		0,00	
		Persentase terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah						13.076.284,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	10.897.918,00						100 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	2.178.366,00						100 Dokumen	0,00	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.897.918,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	10.897.918,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.178.366,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	1 Dokumen	2.178.366,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Dokumen	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.280.264.364,88					-		0,00	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel						2.280.264.364,88					-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	10.625.996,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	2.269.638.368,88						100 Orang/bulan	0,00	
		Persentasi terlaksananya Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD						2.280.264.364,88					-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	10.625.996,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	2.269.638.368,88						100 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.269.638.368,88							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	26 Orang/bulan	2.269.638.368,88	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.625.996,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.625.996,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.989.060,00					-		0,00	
		Pesentase Tersediannya Inventirisasi barang milik daerah di Kecamatan Manuhing&						8.989.060,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	8.989.060,00						10 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.989.060,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan		10 Laporan	2 Laporan	8.989.060,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Laporan	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						57.719.806,00					-		0,00	
		Persentase terlaksananya Bimbingan Teknis Bagi ASN/PTT Kantor Kecamatan Manuhing dan Kel. Tumbang Talaken						57.719.806,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		10 Orang	11 Orang	27.595.960,00						12 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	Paket	30.123.846,00						Paket	0,00	
		Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran lebih berkualitas						57.719.806,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		10 Orang	11 Orang	27.595.960,00						12 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	Paket	30.123.846,00						Paket	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						30.123.846,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket	1 Paket	30.123.846,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		Paket	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						27.595.960,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang		10 Orang	5 Orang	27.595.960,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Orang	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						313.672.720,00					-		0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor kecamatan dan kelurahan						313.672.720,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	66.847.086,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	112.884.669,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.651.055,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.986.650,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	3 Paket	103.303.260,00						4 Paket	0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan bahan/material						313.672.720,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	66.847.086,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	112.884.669,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.651.055,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.986.650,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	3 Paket	103.303.260,00						4 Paket	0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan kantor kecamatan dan kelurahan						313.672.720,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	66.847.086,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	112.884.669,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.651.055,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.986.650,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	3 Paket	103.303.260,00						4 Paket	0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan dan kelurahan						313.672.720,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	66.847.086,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	112.884.669,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.651.055,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.986.650,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	3 Paket	103.303.260,00						4 Paket	0,00	
		persentase terlaksananya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd						313.672.720,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	66.847.086,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	112.884.669,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.651.055,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.986.650,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	3 Paket	103.303.260,00						4 Paket	0,00	
		Persentase Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor						313.672.720,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	66.847.086,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	2 Paket	112.884.669,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	12.651.055,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.986.650,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	3 Paket	103.303.260,00						4 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.986.650,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.986.650,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Manuhing || Kelurahan Tumbang Talaken || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						103.303.260,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	1 Paket	103.303.260,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						66.847.086,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	66.847.086,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.651.055,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	12.651.055,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Manuhing || Kelurahan Tumbang Talaken || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						112.884.669,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	112.884.669,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	0,00	KECAMATAN MANUHING
		Tersedianya jasa penunjang kantor						191.593.325,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	21.018.065,00						60 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.018.065,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	5 Laporan	21.018.065,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Manuhing || Kelurahan Tumbang Talaken || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Laporan	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						117.624.347,00					-		0,00	
		persentase terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya						117.624.347,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	Unit	18.190.680,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		11 Unit	12 Unit	89.714.729,00						14 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		6 Unit	7 Unit	9.718.938,00						8 Unit	0,00	
		Persentase terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas						117.624.347,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	Unit	18.190.680,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		11 Unit	12 Unit	89.714.729,00						14 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		6 Unit	7 Unit	9.718.938,00						8 Unit	0,00	
		Tersedianya dan terpelihara prasarana kantor						117.624.347,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	Unit	18.190.680,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		11 Unit	12 Unit	89.714.729,00						14 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		6 Unit	7 Unit	9.718.938,00						8 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						89.714.729,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16 Unit		11 Unit	15 Unit	89.714.729,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		14 Unit	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.718.938,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		6 Unit	8 Unit	9.718.938,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Unit	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.190.680,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	18.190.680,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Manuhing || Kelurahan Tumbang Talaken || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		Unit	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						191.593.325,00					-		0,00	
		Tersedianya jasa penunjang kantor						191.593.325,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	170.575.260,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						170.575.260,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	5 Laporan	170.575.260,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KECAMATAN MANUHING
187.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**113.429.375,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						***113.429.375,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		1.Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik	100 %		90.7 %	90.8 %	113.429.375,00						90.9 %	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan					113.429.375,00					-		0,00	
		persentase terlaksananya peningkatan efektifitas kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan					113.429.375,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	113.429.375,00						5 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						113.429.375,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	113.429.375,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	0,00	KECAMATAN MANUHING
188.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**104.257.337,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaran Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***104.257.337,00***							***0,00***	
		1.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		90.6 %	90.8 %	104.257.337,00						90.9 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						15.000.431,00					-		0,00	
		Persentase terlaksananya peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musrengbang di Desa						15.000.431,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.431,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						15.000.431,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	15.000.431,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN MANUHING
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						89.256.906,00					-		0,00	
		persentase terlaksananya penyelengaraan lembaga kemasyarakatan						89.256.906,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	89.256.906,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						89.256.906,00							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	89.256.906,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN MANUHING
189.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**80.146.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						***80.146.000,00***							***0,00***	
		1.Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		90.6 %	100 %	80.146.000,00						100 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						80.146.000,00					-		0,00	
		persentase terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayaguna aset desa						80.146.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	80.146.000,00						5 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						80.146.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	80.146.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	0,00	KECAMATAN MANUHING
	X							**117.839.800,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**117.839.800,00**							**0,00**	
190.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**117.839.800,00**							**0,00**	
		1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-		-	100 %	117.839.800,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						117.839.800,00					-		0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor kecamatan dan kelurahan						117.839.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		100 Laporan	120 Laporan	117.839.800,00						130 Laporan	0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan bahan/material						117.839.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		100 Laporan	120 Laporan	117.839.800,00						130 Laporan	0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengandaan kantor kecamatan dan kelurahan						117.839.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		100 Laporan	120 Laporan	117.839.800,00						130 Laporan	0,00	
		persentase terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan dan kelurahan						117.839.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		100 Laporan	120 Laporan	117.839.800,00						130 Laporan	0,00	
		persentase terlaksananya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd						117.839.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		100 Laporan	120 Laporan	117.839.800,00						130 Laporan	0,00	
		Persentase Tersedianya komponen intalasi listrik/penerangan bangunan kantor						117.839.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		100 Laporan	120 Laporan	117.839.800,00						130 Laporan	0,00	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						117.839.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		100 Laporan	60 Laporan	117.839.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		130 Laporan	0,00	KECAMATAN MANUHING
		KELURAHAN TUMBANG TALAKEN						**500.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**442.043.570,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**442.043.570,00**							**0,00**	
191.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**272.424.465,00**							**0,00**	
		-	-		-	-	-	272.424.465,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						38.168.320,00					-		0,00	
		-						38.168.320,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	38.168.320,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						38.168.320,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Orang	38.168.320,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						234.256.145,00					-		0,00	
		-						234.256.145,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	111.428.300,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	75.606.693,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	9.073.632,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	38.147.520,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.147.520,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	38.147.520,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						75.606.693,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	75.606.693,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						9.073.632,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	9.073.632,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						111.428.300,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	50 Laporan	111.428.300,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
192.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**169.619.105,00**							**0,00**	
		-	-		-	-	-	169.619.105,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						169.619.105,00					-		0,00	
		-						169.619.105,00					-		0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	169.619.105,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						169.619.105,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	169.619.105,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
	X							**57.956.430,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**57.956.430,00**							**0,00**	
193.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**57.956.430,00**							**0,00**	
		-	-		-	-	-	57.956.430,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57.956.430,00					-		0,00	
		-						57.956.430,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	57.956.430,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						57.956.430,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	57.956.430,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Manuhing | | Kelurahan Tumbang Talaken | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG TALAKEN
		KECAMATAN RUNGAN						**3.722.207.677,20**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.722.207.677,20**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01	**KECAMATAN**						**3.722.207.677,20**							**0,00**	
194.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.464.626.877,20**							**0,00**	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel						***3.464.626.877,20***							***0,00***	
			-1.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	3.464.626.877,20						100 %	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.671.400,00					Pegawai Kantor Camat Rungan		0,00	
		Persentase Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.671.400,00					Pegawai Kantor Camat Rungan		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	1.916.800,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.916.800,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.837.800,00						2 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						1.916.800,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.916.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Dokumen	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.916.800,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.916.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.837.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.837.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.870.096.007,20					Pegawai Kantor Camat Rungan		0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.870.096.007,20					Pegawai Kantor Camat Rungan		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	4.792.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		30 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.865.304.007,20						31 Orang/bulan	0,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.870.096.007,20					Pegawai Kantor Camat Rungan		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	4.792.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		30 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.865.304.007,20						31 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.865.304.007,20							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan		30 Orang/bulan	31 Orang/bulan	2.865.304.007,20	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		31 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.792.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	4.792.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						19.902.080,00					Pegawai Kantor Camat Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						19.902.080,00					Pegawai Kantor Camat Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	10.360.000,00						30 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang		9 Orang	9 Orang	9.542.080,00						9 Orang	0,00	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						19.902.080,00					Pegawai Kantor Camat Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	10.360.000,00						30 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang		9 Orang	9 Orang	9.542.080,00						9 Orang	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						10.360.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	10.360.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		30 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						9.542.080,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang		9 Orang	9 Orang	9.542.080,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Orang	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						403.371.190,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu						403.371.190,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.275.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	79.062.000,00						10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	960.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.074.190,00						12 Paket	0,00	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor						403.371.190,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.275.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	79.062.000,00						10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	960.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.074.190,00						12 Paket	0,00	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						403.371.190,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.275.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	79.062.000,00						10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	960.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.074.190,00						12 Paket	0,00	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						403.371.190,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.275.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	79.062.000,00						10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	960.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.074.190,00						12 Paket	0,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						403.371.190,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.275.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	79.062.000,00						10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	960.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.074.190,00						12 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.074.190,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.074.190,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						79.062.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	79.062.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						960.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	960.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	500 Laporan	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						265.275.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	220 Laporan	265.275.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						73.300.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						73.300.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	48.200.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.100.000,00						1 Unit	0,00	
		Pengadaan Mebel						73.300.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	48.200.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.100.000,00						1 Unit	0,00	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						73.300.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	48.200.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.100.000,00						1 Unit	0,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						73.300.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	48.200.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.100.000,00						1 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						48.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	48.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						1.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	24.100.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.600.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.600.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	19.550.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.200.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	850.000,00						50 Laporan	0,00	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						21.600.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	19.550.000,00						3 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.200.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	850.000,00						50 Laporan	0,00	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						21.600.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	19.550.000,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.200.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	850.000,00						50 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						850.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	850.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		50 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.550.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	19.550.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						68.603.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						68.603.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	32.800.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	34.489.000,00						7 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.314.000,00						7 Unit	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						68.603.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	32.800.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	34.489.000,00						7 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.314.000,00						7 Unit	0,00	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						68.603.000,00					Kantor Kecamatan Rungan dan Kelurahan Jakatan Raya		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	32.800.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	34.489.000,00						7 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.314.000,00						7 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						34.489.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	34.489.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.314.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1.314.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						32.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	32.800.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN
195.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.550.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						***5.550.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	5.550.000,00						100 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5.550.000,00					Masyarakat Desa dan Kelurahan		0,00	
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						5.550.000,00					Masyarakat Desa dan Kelurahan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Lembaga Kemasyarakatan		150 Lembaga Kemasyarakatan	150 Lembaga Kemasyarakatan	5.550.000,00						150 Lembaga Kemasyarakatan	0,00		
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					5.550.000,00							0,00		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	150 Lembaga Kemasyarakatan		150 Lembaga Kemasyarakatan	150 Lembaga Kemasyarakatan	5.550.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		150 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN RUNGAN
196.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**240.030.000,00**							**0,00**	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah						***240.030.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	240.030.000,00						100 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						240.030.000,00					PNS, TNI, POLRI, Pelajar dan Masyarakat Umum		0,00	
		Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						240.030.000,00					PNS, TNI, POLRI, Pelajar dan Masyarakat Umum		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Orang		4 Orang	4 Orang	180.500.000,00						4 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang		1 Orang	1 Orang	59.530.000,00						1 Orang	0,00	
		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						240.030.000,00					PNS, TNI, POLRI, Pelajar dan Masyarakat Umum		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Orang		4 Orang	4 Orang	180.500.000,00						4 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang		1 Orang	1 Orang	59.530.000,00						1 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						59.530.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang		1 Orang	45 Orang	59.530.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Orang	0,00	KECAMATAN RUNGAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						180.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	4 Orang		4 Orang	300 Orang	180.500.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Orang	0,00	KECAMATAN RUNGAN
197.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**10.084.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa						***10.084.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	10.084.000,00						100 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						10.084.000,00					Kantor Kecamatan Rungan		0,00	
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						10.084.000,00					Kantor Kecamatan Rungan		0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.084.000,00						12 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						10.084.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.084.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN RUNGAN
		KELURAHAN JAKATAN RAYA						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**415.173.315,80**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**415.173.315,80**							**0,00**	
198.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**131.510.102,40**							**0,00**	
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	-		-	100 persen	131.510.102,40						-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						110.944.500,00					-		0,00	
		-						110.944.500,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	110.944.500,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						110.944.500,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	220 Laporan	110.944.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.565.602,40					-		0,00	
		-						20.565.602,40					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	20.565.602,40						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.565.602,40							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	20.565.602,40	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
199.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**283.663.213,40**							**0,00**	
			Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	-		-	100 persen	283.663.213,40						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						283.663.213,40					-		0,00	
		-						283.663.213,40					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	2.269.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	110.094.462,40						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	171.299.751,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						2.269.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	150 Lembaga Kemasyarakatan	2.269.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						171.299.751,00							0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	8 Unit	171.299.751,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						110.094.462,40							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	110.094.462,40	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	8 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	-	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
	X							**84.826.684,20**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**84.826.684,20**							**0,00**	
200.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**84.826.684,20**							**0,00**	
			Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	-		-	100 persen	84.826.684,20						-	0,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.168.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						9.168.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	9.168.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						9.168.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	9 Orang	9.168.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						75.658.684,20					-		0,00	
		-						75.658.684,20					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	75.658.684,20						-	0,00	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						75.658.684,20							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	75.658.684,20	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan || Kelurahan Jakatan Raya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN JAKATAN RAYA
		KECAMATAN MIHING RAYA						**3.137.044.461,52**							**3.138.900.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**3.137.044.461,52**							**3.138.900.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**3.137.044.461,52**							**3.138.900.000,00**	
201.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.736.090.641,52**							**2.728.900.000,00**	
		Terlaksananya urusan pemerintahan daerah						***2.736.090.641,52***							***2.728.900.000,00***	
			1.Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah	100 %		100 %	100 %	2.736.090.641,52						100 %	2.728.900.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.077.200,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		11.500.000,00	
		Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.077.200,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	6.143.600,00						3 Dokumen	5.800.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.933.600,00						6 Dokumen	5.700.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.143.600,00							5.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	6.143.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	5.800.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						5.933.600,00							5.700.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5.933.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	5.700.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.051.654.781,52					Kantor Kecamatan Mihing Raya		2.052.400.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.051.654.781,52					Kantor Kecamatan Mihing Raya		2.052.400.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.600.000,00						12 Laporan	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	2.043.054.781,52						21 Orang/bulan	2.044.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.043.054.781,52							2.044.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan		21 Orang/bulan	20 Orang/bulan	2.043.054.781,52	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		21 Orang/bulan	2.044.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.600.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		12 Laporan	14 Laporan	8.600.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	8.400.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.492.000,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		8.100.000,00	
		Terlaksananya administrasi Barang Milik Daerah						8.492.000,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		8.100.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.492.000,00						12 Laporan	8.100.000,00	
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.492.000,00							8.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.492.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	8.100.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
		Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah						88.272.160,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		89.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	64.345.000,00						5 Orang	64.500.000,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						64.345.000,00							64.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	64.345.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Orang	64.500.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						247.130.700,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		261.100.000,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Administrasi umum perangkat daerah						247.130.700,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		261.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	141.383.700,00						60 Laporan	127.800.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	23 Paket	5.520.000,00						23 Paket	27.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	20.185.600,00						18 Paket	25.700.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	16.050.600,00						3 Paket	16.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	4.850.000,00						6 Paket	4.600.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.100.000,00						12 Paket	36.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	24.040.800,00						2 Paket	24.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.850.000,00							4.600.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	5 Paket	4.850.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Paket	4.600.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.100.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	35.100.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Paket	36.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						24.040.800,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	24.040.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Paket	24.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.520.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	23 Paket		23 Paket	2 Paket	5.520.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		23 Paket	27.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.050.600,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	16.050.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	16.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.185.600,00							25.700.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	18 Paket		18 Paket	12 Paket	20.185.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		18 Paket	25.700.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						141.383.700,00							127.800.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	141.383.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		60 Laporan	127.800.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						64.348.900,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		61.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						64.348.900,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		61.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	15.582.000,00						4 Unit	16.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	48.766.900,00						2 Unit	45.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						15.582.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	5 Unit	15.582.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Unit	16.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.766.900,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	48.766.900,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	45.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165.798.700,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		167.100.000,00	
		Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						165.798.700,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		167.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.600.200,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	144.182.500,00						12 Laporan	144.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.016.000,00						12 Laporan	3.100.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.016.000,00							3.100.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	3.016.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	3.100.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						18.600.200,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	18.600.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						144.182.500,00							144.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	144.182.500,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	144.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						98.316.200,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		94.200.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah						98.316.200,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		94.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	70.270.200,00						10 Unit	69.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	10.730.000,00						3 Unit	8.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	17.316.000,00						10 Unit	17.200.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						70.270.200,00							69.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	12 Unit	70.270.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	69.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.730.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	2 Unit	10.730.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.316.000,00							17.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	17.316.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	17.200.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						88.272.160,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		89.500.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah						88.272.160,00					Kantor Kecamatan Mihing Raya		89.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	23.927.160,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						23.927.160,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	21 Paket	23.927.160,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	25.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
202.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**115.845.100,00**							**115.000.000,00**	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***115.845.100,00***							***115.000.000,00***	
			1.Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	115.845.100,00						100 %	115.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						115.845.100,00					Desa dan Kelurahan		115.000.000,00	
		Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyrakatan Tingkat Kecamatan						115.845.100,00					Desa dan Kelurahan		115.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	115.845.100,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						115.845.100,00							115.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	115.845.100,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Lembaga Kemasyarakatan	115.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
203.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**180.058.170,00**							**178.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						***180.058.170,00***							***178.000.000,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	180.058.170,00						100 %	178.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						180.058.170,00					Masyarakat dan Desa		178.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						180.058.170,00					Masyarakat dan Desa		178.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang		35 Orang	35 Orang	23.860.550,00						35 Orang	21.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang		35 Orang	35 Orang	54.722.000,00						35 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17 Orang		17 Orang	17 Orang	86.444.000,00						35 Orang	87.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35 Orang		35 Orang	35 Orang	15.031.620,00						35 Orang	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						15.031.620,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35 Orang		35 Orang	35 Orang	15.031.620,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		35 Orang	15.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						23.860.550,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	35 Orang		35 Orang	45 Orang	23.860.550,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		35 Orang	21.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						86.444.000,00							87.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17 Orang		17 Orang	21 Orang	86.444.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		35 Orang	87.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						54.722.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	35 Orang		35 Orang	35 Orang	54.722.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		35 Orang	55.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
204.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**105.050.550,00**							**89.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						***105.050.550,00***							***89.000.000,00***	
			1.Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	105.050.550,00						100 %	89.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						105.050.550,00					Desa		101.000.000,00	
		Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dan pengawasan di Bidang Pemerintahan Desa						105.050.550,00					Desa		101.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	Dokumen	12.540.750,00						5 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.005.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	11.942.800,00						5 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	70.562.000,00						5 Dokumen	67.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						11.942.800,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	11.942.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						70.562.000,00							67.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	70.562.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	67.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						10.005.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	10.005.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa						12.540.750,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	12.540.750,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	12.000.000,00	KECAMATAN MIHING RAYA
		KELURAHAN KAMPURI						**500.000.000,00**							**521.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**500.000.000,00**							**521.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**500.000.000,00**							**521.000.000,00**	
205.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**274.000.000,00**							**292.000.000,00**	
			Persentase Terlaksananya urusan pemerintahan daerah	-		-	100 %	61.000.000,00						-	66.000.000,00	
			-	-		-	-	213.000.000,00						-	226.000.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.000.000,00					-		37.000.000,00	
		-						35.000.000,00					-		37.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	23.000.000,00						-	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	12.000.000,00						-	13.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						12.000.000,00							13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	13 Paket	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	13.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						23.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	2 Orang	23.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	24.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						213.000.000,00					-		226.000.000,00	
		-						213.000.000,00					-		226.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	70.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	60.000.000,00						-	61.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	83.000.000,00						-	90.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						83.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	83.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	90.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.000.000,00							61.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	20 Paket	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	61.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	50 Laporan	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	75.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						7.500.000,00					-		8.000.000,00	
		-						7.500.000,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	7.500.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						7.500.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	24 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	8.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.500.000,00					-		21.000.000,00	
		-						18.500.000,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	9.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	8.000.000,00						-	9.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						9.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	5 Unit	9.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	10.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	5 Unit	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	9.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	2.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
206.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**218.000.000,00**							**220.000.000,00**	
			Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	-		-	100 %	218.000.000,00						-	220.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						218.000.000,00					-		220.000.000,00	
		-						218.000.000,00					-		220.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	218.000.000,00						-	220.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						218.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	8 Pokmas / Ormas	218.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	220.000.000,00	KELURAHAN KAMPURI
207.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**4.000.000,00**							**4.500.000,00**	
			Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-		-	100 %	4.000.000,00						-	4.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						4.000.000,00					-		4.500.000,00	
		-						4.000.000,00					-		4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	-	4.000.000,00						-	4.500.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-		-	35 Orang	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	4.500.000,00	KELURAHAN KAMPURI
208.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**4.000.000,00**							**4.500.000,00**	
			Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-		-	100 %	4.000.000,00						-	4.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.000.000,00					-		4.500.000,00	
		-						4.000.000,00					-		4.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	-	4.000.000,00						-	4.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa						4.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-		-	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mihing Raya || Kelurahan Kampuri || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	4.500.000,00	KELURAHAN KAMPURI
		KECAMATAN RUNGAN HULU						**2.989.273.655,03**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.878.753.363,03**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.878.753.363,03**							**0,00**	
209.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.464.749.013,03**							**0,00**	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel						***2.464.749.013,03***							***0,00***	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi	100 %		100 %	100 %	2.464.749.013,03						100 %	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						31.323.700,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						31.323.700,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00						10 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.323.700,00						12 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						12.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						12.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Dokumen	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.323.700,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.323.700,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.908.285.447,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkaulitas						1.908.285.447,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.899.885.447,00						12 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.899.885.447,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.899.885.447,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						41.634.600,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan						41.634.600,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	23.859.000,00						18 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang		16 Orang	16 Orang	17.775.600,00						16 Orang	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						23.859.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket		18 Paket	18 Paket	23.859.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		18 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						17.775.600,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang		16 Orang	16 Orang	17.775.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Orang	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						95.966.058,03					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas						95.966.058,03					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	12.684.818,03						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.514.840,00						5 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	27.766.400,00						5 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.766.400,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	27.766.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	50.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.514.840,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.514.840,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Paket	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.684.818,03							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	12.684.818,03	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						39.927.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		& Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan &						39.927.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	19.927.000,00						10 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.927.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	19.927.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						239.612.208,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		& Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah &						239.612.208,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.944.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	216.668.208,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	3.000.000,00						25 Laporan	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	3.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.944.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.944.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						216.668.208,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	216.668.208,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						120.000.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		& Terwujudnya Administrasi Barang Milik yang berkualitas &						120.000.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	115.000.000,00						12 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00						3 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						115.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	115.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
210.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**34.816.650,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik						***34.816.650,00***							***0,00***	
			1.Efektifitas pelaksanaan tata kelola pemerintahan dan kebijakan kesejahteraan rakyat	80 %		80 %	80 %	34.816.650,00						80 %	0,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						34.816.650,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						34.816.650,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.816.650,00						3 Dokumen	0,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						34.816.650,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	34.816.650,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Dokumen	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
211.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**15.630.400,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						***15.630.400,00***							***0,00***	
			1.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	15.630.400,00						100 %	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						7.420.000,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
		Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan Desa						7.420.000,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.420.000,00						3 Laporan	0,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						7.420.000,00							0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.420.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						8.210.400,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
		Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan						8.210.400,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	8.210.400,00						3 Unit	0,00	
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan						8.210.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	8.210.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
212.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**10.961.500,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						***10.961.500,00***							***0,00***	
			1. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	10.961.500,00						100 %	0,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.961.500,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
		Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10.961.500,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.961.500,00						1 Laporan	0,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						10.961.500,00							0,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.961.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
213.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**267.395.800,00**							**0,00**	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah						***267.395.800,00***							***0,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %		90 %	90 %	267.395.800,00						90 %	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						267.395.800,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
		Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan						267.395.800,00					Masyarakat Desa Dan Kelurahan		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 Orang		90 Orang	90 Orang	267.395.800,00						90 Orang	0,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						267.395.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 Orang		90 Orang	80 Orang	267.395.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		90 Orang	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
214.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**73.200.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan pemerintahan desa						***73.200.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	73.200.000,00						100 %	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						73.200.000,00					Pemerintahan Desa		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Kegiatan fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi, serta Pembinaan Pemerintahan Desa						73.200.000,00					Pemerintahan Desa		0,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.200.000,00						12 Dokumen	0,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						73.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	73.200.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
	X							**110.520.292,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**110.520.292,00**							**0,00**	
215.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**110.520.292,00**							**0,00**	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi	-		-	100 %	110.520.292,00						-	0,00	
			Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi (%)	-		-	100 %	110.520.292,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						110.520.292,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas						110.520.292,00					Kantor Kecamatan Rungan Hulu		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	110.520.292,00						80 Laporan	0,00	
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						110.520.292,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	110.520.292,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		80 Laporan	0,00	KECAMATAN RUNGAN HULU
		KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN						**500.000.000,00**							**221.654.309,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**500.000.000,00**							**221.654.309,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**500.000.000,00**							**221.654.309,00**	
216.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**187.200.000,00**							**96.932.534,00**	
		-	-	-	-	-	-	187.200.000,00						-	96.932.534,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						166.378.466,00					-		80.000.000,00	
		-						166.378.466,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	15.007.800,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	46.003.200,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	42.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	4.367.466,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	51.000.000,00						-	23.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						51.000.000,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	10 Paket	51.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Hulu || Kelurahan Tumbang Rahuyan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	23.000.000,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	15 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Hulu || Kelurahan Tumbang Rahuyan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	42.000.000,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						4.367.466,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	10 Paket	4.367.466,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Hulu || Kelurahan Tumbang Rahuyan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						15.007.800,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	5 Laporan	15.007.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Hulu || Kelurahan Tumbang Rahuyan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	15.000.000,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						46.003.200,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	0 Laporan	46.003.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Hulu || Kelurahan Tumbang Rahuyan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.379.534,00					-		16.932.534,00	
		-						20.379.534,00					-		16.932.534,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	20.379.534,00						-	16.932.534,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.379.534,00							16.932.534,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	0 Laporan	20.379.534,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Hulu || Kelurahan Tumbang Rahuyan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	16.932.534,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						442.000,00					-		0,00	
		-						442.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	442.000,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						442.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	442.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Hulu | | Kelurahan Tumbang Rahuyan | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Hulu | | Kelurahan Tumbang Rahuyan | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
217.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**312.800.000,00**							**124.721.775,00**	
		-	-	-		-	-	312.800.000,00						-	124.721.775,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						12.000.000,00					-		7.100.000,00	
		-						12.000.000,00					-		7.100.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	12.000.000,00						-	7.100.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						12.000.000,00							7.100.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	0 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Hulu | | Kelurahan Tumbang Rahuyan | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	7.100.000,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						300.800.000,00					-		117.621.775,00	
		-						300.800.000,00					-		117.621.775,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	100.800.000,00						-	87.419.925,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	200.000.000,00						-	30.201.850,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						200.000.000,00							30.201.850,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	0 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Hulu | | Kelurahan Tumbang Rahuyan | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	30.201.850,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						100.800.000,00							87.419.925,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	0 Pokmas / Ormas	100.800.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Hulu | | Kelurahan Tumbang Rahuyan | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	87.419.925,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
	X							**0,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**0,00**							**0,00**	
218.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**0,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	4 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Hulu | | Kelurahan Tumbang Rahuyan | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN
		KECAMATAN DAMANG BATU						**2.771.701.808,00**							**3.590.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.771.701.808,00**							**3.590.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.771.701.808,00**							**3.590.000.000,00**	
219.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.580.857.758,00**							**3.070.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kantor						***2.536.258.918,00***							***3.070.000.000,00***	
			1.Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	95 %		95 %	95 %	2.536.258.918,00						95 %	3.070.000.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.695.458.978,00					ASN Kantor Kecamatan Damang Batu/Kelurahan Tumbang Marikoi		1.800.000.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan						1.695.458.978,00					ASN Kantor Kecamatan Damang Batu/Kelurahan Tumbang Marikoi		1.800.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.695.458.978,00						16 Orang/bulan	1.800.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.695.458.978,00							1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.695.458.978,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Orang/bulan	1.800.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						344.333.940,00					-		1.095.000.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelayanan						344.333.940,00					-		1.095.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.166.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.735.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.250.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	79.957.750,00						12 Paket	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	13.769.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.956.190,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.500.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.956.190,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.956.190,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.500.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	55.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.250.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	50.250.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	55.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.769.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	13.769.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	20.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						79.957.750,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	5 Paket	79.957.750,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Paket	600.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.166.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.166.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						165.735.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	165.735.000,00	Kab. Gunung Mas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						295.280.000,00					-		160.000.000,00	
		Persentase jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah						295.280.000,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	36.392.000,00						24 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	48.888.000,00						24 Laporan	20.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						48.888.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan		24 Laporan	2 Laporan	48.888.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		24 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.392.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	2 Laporan	36.392.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		24 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						210.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	210.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah						201.186.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	3.315.000,00						7 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.860.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						7.860.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	2 Unit	7.860.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						3.315.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit		7 Unit	14 Unit	3.315.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		7 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
			Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan	-		-	undefined undefined	44.598.840,00						-	55.000.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						44.598.840,00					-		110.000.000,00	
		-						44.598.840,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	-	25.578.840,00						-	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	19.020.000,00						-	55.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						19.020.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	60 Paket	19.020.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	55.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						25.578.840,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-		-	10 Orang	25.578.840,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	55.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						201.186.000,00					-		130.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah						201.186.000,00					-		130.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	134.411.000,00						-	90.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	55.600.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						134.411.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	10 Unit	134.411.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	90.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						55.600.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	55.600.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	25.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
220.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**136.844.050,00**							**220.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						***134.294.050,00***							***155.000.000,00***	
			999.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	134.294.050,00						100 %	155.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						134.294.050,00					Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat kelurahan		155.000.000,00	
		Presentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang efektif						134.294.050,00					Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat kelurahan		155.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.409.050,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	114.885.000,00						5 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						19.409.050,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	19.409.050,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						114.885.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas		5 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	114.885.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Pokmas / Ormas	150.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
				-		-		2.550.000,00						-	65.000.000,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						2.550.000,00					TP-PKK Kecamatan Damang Batu		65.000.000,00	
		-						2.550.000,00					TP-PKK Kecamatan Damang Batu		65.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	-	2.550.000,00						-	65.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						2.550.000,00							65.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	2.550.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	65.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
221.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**54.000.000,00**							**75.000.000,00**	
		Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						***54.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			999.Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	54.000.000,00						100 %	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						54.000.000,00					Pemerintahan Desa		75.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						54.000.000,00					Pemerintahan Desa		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	54.000.000,00						10 Dokumen	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						54.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	54.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Dokumen	75.000.000,00	KECAMATAN DAMANG BATU
		KELURAHAN TUMBANG MARIKOI						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
222.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**113.380.300,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	113.380.300,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						103.576.500,00					-		0,00	
		-						103.576.500,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	-	11.344.200,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	46.003.200,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	46.229.100,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						46.229.100,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	4 Paket	46.229.100,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.344.200,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-		-	12 Laporan	11.344.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						46.003.200,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	24 Laporan	46.003.200,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.803.800,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						9.803.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	8.250.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.553.800,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.553.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	2 Laporan	1.553.800,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.250.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	8.250.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
223.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**386.619.700,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	386.619.700,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						386.619.700,00					-		0,00	
		-						386.619.700,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	12.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	127.619.700,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	247.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						12.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	3 Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						247.000.000,00							0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	5 Unit	247.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						127.619.700,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	3 Pokmas / Ormas	127.619.700,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Damang Batu | | Kelurahan Tumbang Marikoi | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG MARIKOI
		KECAMATAN MANUHING RAYA						**2.535.015.778,08**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.535.015.778,08**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.535.015.778,08**							**0,00**	
224.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.137.015.778,08**							**0,00**	
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel						***2.112.015.778,08***							***0,00***	
			1.Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.20 %		87.00 %	87.05 %	2.112.015.778,08						85.10 %	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.400.000,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60.400.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	60.400.000,00						5 Dokumen	0,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60.400.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	60.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Dokumen	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.576.615.778,08					-		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Keuangan yang berkaulitas						1.576.615.778,08					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.576.615.778,08						20 Orang/bulan	0,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.576.615.778,08							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan		20 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.576.615.778,08	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Orang/bulan	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						185.000.000,00					-		0,00	
		Terwujudnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Berkualitas						185.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32000 Paket		32000 Paket	32000 Paket	185.000.000,00						32000 Paket	0,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						185.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32000 Paket		32000 Paket	6 Paket	185.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		32000 Paket	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan						181.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	56.000.000,00						3 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						56.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	5 Unit	56.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Unit	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan						109.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	109.000.000,00						20 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						109.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	5 Unit	109.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Unit	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
			-	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						25.000.000,00					-		0,00	
		-						25.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	25.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						181.000.000,00					-		0,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibutuhkan						181.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	125.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						125.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	125.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
225.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**150.000.000,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					-		0,00	
		-						150.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	-		-	11 Laporan	150.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
226.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**230.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial						***230.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	90 %		90 %	90 %	230.000.000,00						90 %	0,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						230.000.000,00					-		0,00	
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						230.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	230.000.000,00						Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						230.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan	230.000.000,00						Lembaga Kemasyarakatan	0,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						230.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	4 Lembaga Kemasyarakatan	230.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		Lembaga Kemasyarakatan	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
227.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**18.000.000,00**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						18.000.000,00					-		0,00	
		-						18.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						18.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	2 Laporan	18.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KECAMATAN MANUHING RAYA
		KELURAHAN TEHANG						**500.000.000,00**							**502.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**500.000.000,00**							**502.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**500.000.000,00**							**502.000.000,00**	
228.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**185.000.000,00**							**197.000.000,00**	
		-	-	-		-	-	185.000.000,00						-	197.000.000,00	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						8.000.000,00					-		8.000.000,00	
		-						8.000.000,00					-		8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	-	8.000.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-	1 Paket	8.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	8.000.000,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						161.500.000,00					-		173.500.000,00	
		-						161.500.000,00					-		173.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	90.000.000,00						-	102.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	41.500.000,00						-	41.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	30.000.000,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.500.000,00							41.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	41.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	41.500.000,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						90.000.000,00							102.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	4 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	102.000.000,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						4.000.000,00					-		4.000.000,00	
		-						4.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	4.000.000,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.500.000,00					-		1.500.000,00	
		-						1.500.000,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	1.500.000,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
		-						10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	9. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan lapangan kerja berkualitas		-	10.000.000,00	KELURAHAN TEHANG
229.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**315.000.000,00**							**305.000.000,00**	
			-	-		-	-	315.000.000,00						-	305.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					-		0,00	
		-						10.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						10.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Mahuning Raya | | Kelurahan Tehang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	0,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						305.000.000,00					-		305.000.000,00	
		-						305.000.000,00					-		305.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	185.000.000,00						-	185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	120.000.000,00						-	120.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mahuning Raya || Kelurahan Tehang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan kemandirian dan produktivitas perdesaan dalam pembangunan ekonomi dan sarana prasarana kewilayahan		-	120.000.000,00	KELURAHAN TEHANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						185.000.000,00							185.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	185.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Mahuning Raya || Kelurahan Tehang || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	8. Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal		-	185.000.000,00	KELURAHAN TEHANG
		KECAMATAN MIRI MANASA						**2.850.979.412,16**							**3.016.079.648,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.850.979.412,16**							**3.016.079.648,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.850.979.412,16**							**3.016.079.648,00**	
230.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.434.340.851,16**							**2.684.604.851,00**	
		Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan						***2.434.340.851,16***							***2.684.604.851,00***	
			1.Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90 %		90 %	90 %	2.434.340.851,16						90 %	2.684.604.851,00	
			2.Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	98 %		98 %	98 %	2.434.340.851,16						98 %	2.684.604.851,00	
			3.Persentase Pengelolaan dan Administrasi Pendapatan Restribusi Daerah	90 %		90 %	90 %	2.434.340.851,16						90 %	2.684.604.851,00	
			4.Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.434.340.851,16						100 %	2.684.604.851,00	
			5.Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95 %		95 %	95 %	2.434.340.851,16						95 %	2.684.604.851,00	
			6.Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	2.434.340.851,16						100 %	2.684.604.851,00	
			7.Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98 %		98 %	98 %	2.434.340.851,16						98 %	2.684.604.851,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.629.906.282,36					Pegawai Kecamatan		1.467.456.187,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.629.906.282,36					Pegawai Kecamatan		1.467.456.187,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.434.896,00						4 Laporan	40.434.663,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan		11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.589.471.386,36						11 Orang/bulan	1.427.021.524,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.589.471.386,36							1.427.021.524,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan		11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.589.471.386,36	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		11 Orang/bulan	1.427.021.524,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						40.434.896,00							40.434.663,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.434.896,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	40.434.663,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						6.185.400,00					-		6.248.775,00	
		Tersedianya Data Pendapatan Daerah Lingkup Kecamatan						6.185.400,00					-		6.248.775,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.185.400,00						5 Laporan	6.248.775,00	
	7.01.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						6.185.400,00							6.248.775,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.185.400,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	6.248.775,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						53.243.564,00					Pegawai Kecamatan		35.305.029,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						53.243.564,00					Pegawai Kecamatan		35.305.029,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		3 Orang	3 Orang	43.281.092,00						3 Orang	35.305.029,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	Paket	9.962.472,00						1 Paket	0,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						9.962.472,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.962.472,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	0,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						43.281.092,00							35.305.029,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		3 Orang	3 Orang	43.281.092,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Orang	35.305.029,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						182.447.650,00					Pegawai Kecamatan		374.121.778,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						182.447.650,00					Pegawai Kecamatan		374.121.778,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	17.510.250,00						10 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	112.849.800,00						110 Laporan	228.134.304,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	47.045.600,00						1 Paket	47.214.784,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.042.000,00						1 Paket	28.772.690,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						47.045.600,00							47.214.784,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	47.045.600,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	47.214.784,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.042.000,00							28.772.690,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.042.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Paket	28.772.690,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						17.510.250,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	17.510.250,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						112.849.800,00							228.134.304,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	112.849.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		110 Laporan	228.134.304,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						76.771.800,00					Kantor Kecamatan		172.086.796,00	
		Tersedianya Sarana menunjang urusan Pemerintah Daerah yang memadai						76.771.800,00					Kantor Kecamatan		172.086.796,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	Unit	0,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	76.771.800,00						2 Unit	172.086.796,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	0,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						76.771.800,00							172.086.796,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	76.771.800,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	172.086.796,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	0,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						366.280.528,00					Masyarakat		455.683.562,00	
		Tersedianya Jasa menunjang urusan Kecamatan						366.280.528,00					Masyarakat		455.683.562,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.148.380,00						2 Laporan	17.164.247,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	350.132.148,00						4 Laporan	438.519.315,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						16.148.380,00							17.164.247,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.148.380,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	17.164.247,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						350.132.148,00							438.519.315,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	350.132.148,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	438.519.315,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						119.505.626,80					Operasional Kantor Kecamatan		173.702.724,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						119.505.626,80					Operasional Kantor Kecamatan		173.702.724,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.850.000,00						1 Unit	43.771.939,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	45.519.760,00						5 Unit	43.392.711,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	39.959.866,80						2 Unit	70.700.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.176.000,00						5 Unit	15.838.074,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.959.866,80							70.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	39.959.866,80	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Unit	70.700.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.519.760,00							43.392.711,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	45.519.760,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	43.392.711,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.176.000,00							15.838.074,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	13.176.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	15.838.074,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.850.000,00							43.771.939,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.850.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	43.771.939,00	KECAMATAN MIRI MANASA
231.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**14.997.848,00**							**15.150.000,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						***14.997.848,00***							***15.150.000,00***	
			1.Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik	100 %		100 %	100 %	14.997.848,00						100 %	15.150.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						14.997.848,00					Masyarakat		15.150.000,00	
		Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat						14.997.848,00					Masyarakat		15.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.997.848,00						1 Dokumen	15.150.000,00	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan						14.997.848,00							15.150.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.997.848,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	15.150.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
232.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**148.618.540,00**							**157.253.734,00**	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						***148.618.540,00***							***157.253.734,00***	
			1.Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	148.618.540,00						100 %	157.253.734,00	
			2.Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	148.618.540,00						100 %	157.253.734,00	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						148.618.540,00					Masyarakat		157.253.734,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan						148.618.540,00					Masyarakat		157.253.734,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.098.480,00						2 Laporan	8.253.734,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	140.520.060,00						1 Lembaga Kemasyarakatan	149.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						140.520.060,00							149.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	140.520.060,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Lembaga Kemasyarakatan	149.000.000,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						8.098.480,00							8.253.734,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.098.480,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	8.253.734,00	KECAMATAN MIRI MANASA
233.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**30.252.000,00**							**4.310.846,00**	
		Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						***30.252.000,00***							***4.310.846,00***	
			1. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	30.252.000,00						100 %	4.310.846,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						30.252.000,00					Masyarakat		4.310.846,00	
		Terlaksananya Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum						30.252.000,00					Masyarakat		4.310.846,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.252.000,00						1 Laporan	4.310.846,00	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						30.252.000,00							4.310.846,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.252.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	4.310.846,00	KECAMATAN MIRI MANASA
234.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**71.666.883,00**							**73.320.677,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						***71.666.883,00***							***73.320.677,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	71.666.883,00						100 %	73.320.677,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						71.666.883,00					Masyarakat		73.320.677,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan Umum						71.666.883,00					Masyarakat		73.320.677,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 Orang		17 Orang	17 Orang	71.666.883,00						17 Orang	73.320.677,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						71.666.883,00							73.320.677,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 Orang		17 Orang	17 Orang	71.666.883,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		17 Orang	73.320.677,00	KECAMATAN MIRI MANASA
235.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**151.103.290,00**							**81.439.540,00**	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						***151.103.290,00***							***81.439.540,00***	
			1.Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	151.103.290,00						100 %	81.439.540,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						151.103.290,00					Seluruh Pemerintahan Desa Kecamatan Miri Manasa		81.439.540,00	
		Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						151.103.290,00					Seluruh Pemerintahan Desa Kecamatan Miri Manasa		81.439.540,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	55.966.200,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.078.470,00						1 Dokumen	7.151.319,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.540.000,00						1 Dokumen	8.628.771,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.378.120,00						1 Dokumen	9.492.730,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	70.140.500,00						10 Dokumen	56.166.720,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					70.140.500,00							56.166.720,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	70.140.500,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		10 Dokumen	56.166.720,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa						8.540.000,00							8.628.771,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.540.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	8.628.771,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						55.966.200,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	55.966.200,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		Dokumen	0,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa						7.078.470,00							7.151.319,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.078.470,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	7.151.319,00	KECAMATAN MIRI MANASA
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif						9.378.120,00							9.492.730,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.378.120,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Dokumen	9.492.730,00	KECAMATAN MIRI MANASA
		KELURAHAN TUMBANG NAPOI						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**500.000.000,00**							**0,00**	
236.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**190.529.201,50**							**0,00**	
		-	-	-		-	-	190.529.201,50						-	0,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						153.207.691,50					-		0,00	
		-						153.207.691,50					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	91.601.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	33.206.691,50						-	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	28.400.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	28.400.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.206.691,50							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	33.206.691,50	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						91.601.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	1 Laporan	91.601.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19.416.000,00					-		0,00	
		-						19.416.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	19.416.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.416.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	19.416.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.912.000,00					-		0,00	
		-						6.912.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	6.912.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.912.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	80 Laporan	6.912.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.993.510,00					-		0,00	
		-						10.993.510,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	10.993.510,00						-	0,00		
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.993.510,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	10.993.510,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
237.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**309.470.798,50**							**0,00**	
		-	-	-	-	-	-	309.470.798,50						-	0,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						309.470.798,50					-		0,00	
		-						309.470.798,50					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	8.126.754,00						-	0,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	136.894.124,50						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	164.449.920,00						-	0,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						8.126.754,00							0,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	1 Lembaga Kemasyarakatan	8.126.754,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						164.449.920,00							0,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	1 Unit	164.449.920,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						136.894.124,50							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	136.894.124,50	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Miri Manasa | | Kelurahan Tumbang Napoi | | 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		-	0,00	KELURAHAN TUMBANG NAPOI
		KECAMATAN RUNGAN BARAT						**2.912.162.615,40**							**2.912.162.615,40**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.912.162.615,40**							**2.912.162.615,40**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.912.162.615,40**							**2.912.162.615,40**	
238.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.709.386.107,90**							**2.716.691.765,40**	
		Meningkatnya tata kelola administrasi kantor						***2.709.386.107,90***							***2.716.691.765,40***	
			1.Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %		90 %	90 %	2.709.386.107,90						90 %	2.716.691.765,40	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.766.771.355,90					kantor kecamatan rungan barat		1.772.377.418,40	
		Terwujudnya administrasi keuangan yang berkualitas						1.766.771.355,90					kantor kecamatan rungan barat		1.772.377.418,40	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	8.400.000,00						19 Laporan	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	1.758.371.355,90						19 Orang/bulan	1.763.977.418,40	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.758.371.355,90							1.763.977.418,40	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.758.371.355,90	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		19 Orang/bulan	1.763.977.418,40	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						8.400.000,00							8.400.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	8 Laporan	8.400.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		19 Laporan	8.400.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.050.000,00					pegawai kantor kecamatan rungan barat		9.657.000,00	
		Meningkatnya Penguatan Kapasitas SDM Pegawai Kantor Kecamatan Rungan Barat						10.050.000,00					pegawai kantor kecamatan rungan barat		9.657.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket		16 Paket	6 Paket	10.050.000,00							16 Paket	9.657.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					10.050.000,00								9.657.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket		16 Paket	1 Paket	10.050.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		16 Paket	9.657.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						436.986.494,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		437.821.374,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik						436.986.494,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		437.821.374,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	28.360.500,00						5 Laporan	28.360.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179 Laporan		179 Laporan	179 Laporan	209.757.000,00						179 Laporan	209.757.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket		63 Paket	63 Paket	55.910.000,00						63 Paket	56.507.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	19.870.000,00						9 Paket	19.626.890,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	11.963.709,00						6 Paket	11.963.709,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	12.111.285,00						4 Paket	12.111.285,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	45 Paket	99.014.000,00						45 Paket	99.494.990,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.111.285,00							12.111.285,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	5 Paket	12.111.285,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	12.111.285,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						99.014.000,00							99.494.990,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	8 Paket	99.014.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		45 Paket	99.494.990,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						55.910.000,00							56.507.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	63 Paket		63 Paket	7 Paket	55.910.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Barat || Kelurahan Rabambang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		63 Paket	56.507.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.963.709,00							11.963.709,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	2 Paket	11.963.709,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Paket	11.963.709,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						19.870.000,00							19.626.890,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	1 Paket	19.870.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Paket	19.626.890,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						28.360.500,00							28.360.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	360 Laporan	28.360.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Barat || Kelurahan Rabambang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Laporan	28.360.500,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						209.757.000,00							209.757.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179 Laporan		179 Laporan	150 Laporan	209.757.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		179 Laporan	209.757.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						113.600.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		113.600.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah						113.600.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		113.600.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	113.600.000,00						1 Unit	113.600.000,00	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						113.600.000,00							113.600.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	3 Unit	113.600.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	113.600.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						336.944.258,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		337.672.052,00	
		tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						336.944.258,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		337.672.052,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00						4 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	319.807.258,00						46 Laporan	319.807.258,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.137.000,00						4 Laporan	7.864.794,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.000.000,00						2 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Barat || Kelurahan Rabambang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		2 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Barat || Kelurahan Rabambang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.137.000,00							7.864.794,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.137.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Barat || Kelurahan Rabambang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	7.864.794,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						319.807.258,00							319.807.258,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	46 Laporan		46 Laporan	15 Laporan	319.807.258,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Rungan Barat || Kelurahan Rabambang || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		46 Laporan	319.807.258,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.034.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		45.563.921,00	
		Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah kantor Kecamatan Rungan Barat						45.034.000,00					Kantor Kecamatan Rungan Barat		45.563.921,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	45.034.000,00						8 Unit	45.563.921,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						45.034.000,00							45.563.921,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	6 Unit	45.034.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		8 Unit	45.563.921,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
239.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**29.702.560,00**							**30.536.300,00**	
		Meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						***29.702.560,00***							***30.536.300,00***	
			1. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %		100 %	100 %	29.702.560,00						100 %	30.536.300,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						29.702.560,00					Seluruh Lurah dan Kepala Desa		30.536.300,00	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						29.702.560,00					Seluruh Lurah dan Kepala Desa		30.536.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	29.702.560,00						4 Laporan	30.536.300,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						29.702.560,00							30.536.300,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		4 Laporan	8 Laporan	29.702.560,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Laporan	30.536.300,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
240.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**173.073.947,50**							**164.934.550,00**	
		Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah						***173.073.947,50***							***164.934.550,00***	
			1.Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	173.073.947,50						100 %	164.934.550,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						173.073.947,50					Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		164.934.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						173.073.947,50					Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		164.934.550,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang		25 Orang	25 Orang	76.945.450,00						25 Orang	76.945.450,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32 Orang		32 Orang	32 Orang	96.128.497,50						32 Orang	87.989.100,00	
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						96.128.497,50							87.989.100,00	
		Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32 Orang		32 Orang	32 Orang	96.128.497,50	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		32 Orang	87.989.100,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						76.945.450,00							76.945.450,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25 Orang		25 Orang	50 Orang	76.945.450,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		25 Orang	76.945.450,00	KECAMATAN RUNGAN BARAT
		KELURAHAN RABAMBANG						**500.000.000,00**							**494.350.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**422.303.460,00**							**347.800.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**422.303.460,00**							**347.800.000,00**	
241.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**222.299.935,00**							**137.800.000,00**	
		-	-	-		-	-	222.299.935,00					-	-	137.800.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						179.943.545,00					-		105.200.000,00	
		-						179.943.545,00					-		105.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	-	69.952.500,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	4.000.000,00						-	4.100.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	105.991.045,00						-	31.100.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						105.991.045,00							31.100.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	105.991.045,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	31.100.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							4.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	24 Paket	4.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	4.100.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						69.952.500,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-		-	35 Laporan	69.952.500,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	70.000.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						25.968.450,00					-		15.000.000,00	
		-						25.968.450,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	-	25.968.450,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						25.968.450,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-	7 Unit	25.968.450,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	15.000.000,00	KELURAHAN RABAMBANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.450.000,00					-		5.600.000,00	
		-						5.450.000,00					-		5.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	3.450.000,00						-	3.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	200 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.000.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.450.000,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	12 Laporan	3.450.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	3.600.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						10.937.940,00					-		12.000.000,00	
		-						10.937.940,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	10.937.940,00						-	12.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.937.940,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	5 Unit	10.937.940,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	12.000.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
242.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**200.003.525,00**							**210.000.000,00**	
				-		-	-	200.003.525,00						-	210.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						200.003.525,00					-		210.000.000,00	
		-						200.003.525,00					-		210.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	200.003.525,00						-	210.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						200.003.525,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	1 Pokmas / Ormas	200.003.525,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	210.000.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
	X							**77.696.540,00**							**146.550.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**77.696.540,00**							**146.550.000,00**	
243.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**77.696.540,00**							**146.550.000,00**	
		-	-	-		-	-	77.696.540,00						-	146.550.000,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						77.696.540,00					-		146.550.000,00	
		-						77.696.540,00					-		146.550.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	77.696.540,00						-	146.550.000,00	
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						77.696.540,00							146.550.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	12 Paket	77.696.540,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Rungan Barat | | Kelurahan Rabambang | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	146.550.000,00	KELURAHAN RABAMBANG
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**8.661.141.398,36**							**10.655.103.600,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**8.661.141.398,36**							**10.655.103.600,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**8.661.141.398,36**							**10.655.103.600,00**	
244.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.240.103.600,36**							**6.645.603.600,00**	
		Persentase kebutuhan Administrasi penunjang urusan Pemerintahan daerah						***5.240.103.600,36***							***6.645.603.600,00***	
			1.Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	5.240.103.600,36						100 %	6.645.603.600,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.500.000,00					-		30.500.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.500.000,00					-		30.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	40.500.000,00						6 Dokumen	30.500.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.500.000,00							30.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	40.500.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah | | Kab. Gunung Mas | | Kecamatan Kurun | | Kelurahan Kuala Kurun | | 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		6 Dokumen	30.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.250.551.400,36					-		5.030.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						4.250.551.400,36					-		5.030.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.551.400,00						12 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.220.000.000,36						45 Orang/bulan	5.000.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						4.250.551.400,36					-		5.030.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.551.400,00						12 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	4.220.000.000,36						45 Orang/bulan	5.000.000.000,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.220.000.000,36							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	50 Orang/bulan	4.220.000.000,36	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		45 Orang/bulan	5.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						30.551.400,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.551.400,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						20.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00						24 Laporan	30.000.000,00	
	8.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan		24 Laporan	0 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		24 Laporan	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket		45 Paket	45 Paket	30.000.000,00						45 Paket	30.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket		45 Paket	50 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		45 Paket	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						406.813.000,00					-		630.000.000,00	
		Tercapainya administrasi umum PD						406.813.000,00					-		630.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	250.000.000,00						250 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.000.000,00						5 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	45 Paket	50.000.000,00						45 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.000.000,00						4 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	10.000.000,00						3 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	26.813.000,00						5 Paket	30.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Paket	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						26.813.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	15 Paket	26.813.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Paket	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Paket	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Paket	40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen		4 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		4 Dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	45 Paket		45 Paket	17 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		45 Paket	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		250 Laporan	56 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		250 Laporan	450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					-		45.000.000,00	
		Tercapainya pengadaan Barang Milik Daerah						30.000.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30.000.000,00						5 Unit	45.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	6 Unit	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						374.891.600,00					-		263.000.000,00	
		Tercapainya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						374.891.600,00					-		263.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	148.923.600,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	220.968.000,00						11 Laporan	168.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Laporan	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						148.923.600,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	148.923.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		3 Laporan	90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						220.968.000,00							168.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan		11 Laporan	5 Laporan	220.968.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		11 Laporan	168.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						237.347.600,00					-		697.103.600,00	
		Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						237.347.600,00					-		697.103.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	123.314.000,00						13 Unit	117.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.930.000,00						1 Unit	63.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	17.103.600,00						5 Unit	17.103.600,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						46.930.000,00							63.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	46.930.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	5. Peningkatan akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi yang merata dan berkualitas		1 Unit	63.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						123.314.000,00							117.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	12 Unit	123.314.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		13 Unit	117.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.103.600,00							17.103.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	6 Unit	17.103.600,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		5 Unit	17.103.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		1 Unit	500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
245.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**1.465.000.000,00**							**1.465.000.000,00**	
		Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						***1.465.000.000,00***							***1.465.000.000,00***	
			1.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.465.000.000,00						100 Persentase	1.465.000.000,00	
			2.Indeks Harmoni Indonesia	0 Indeks		0 Indeks	0 Indeks	1.465.000.000,00						0 Indeks	1.465.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.465.000.000,00					-		1.465.000.000,00	
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						1.465.000.000,00					-		1.465.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	65.000.000,00						20 Dokumen	65.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	200.000.000,00						200 Orang	200.000.000,00	
		Jumlah Paskibraka	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.200.000.000,00						100 Orang	1.200.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	20 Dokumen		20 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Dokumen	65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang		200 Orang	6 Orang	200.000.000,00	Kab. Gunung Mas	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		200 Orang	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka					1.200.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	100 Orang		100 Orang	60 Orang	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	1.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
246.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**980.000.000,00**							**1.687.500.000,00**	
		Persentase pendidikan Politik pada kader Partai Politik						***980.000.000,00***							***1.687.500.000,00***	
			1.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	980.000.000,00						100 Persentase	1.687.500.000,00	
			2.Indeks Demokrasi Indonesia	100 indeks		100 indeks	100 indeks	980.000.000,00						100 indeks	1.687.500.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					980.000.000,00						-	1.687.500.000,00	
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					980.000.000,00						-	1.687.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	35.000.000,00						9 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	45.000.000,00						9 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	900.000.000,00						100 Orang	1.650.500.000,00	
	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					35.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	6 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					45.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	9 Dokumen		9 Dokumen	5 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		9 Dokumen	12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					900.000.000,00							1.650.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	1.650.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
247.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**149.037.798,00**							**80.000.000,00**	
		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktip						***149.037.798,00***							***80.000.000,00***	
			1.Indeks Kinerja Ormas	100 Nilai		100 Nilai	100 Nilai	149.037.798,00						100 Nilai	80.000.000,00	
			1.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	149.037.798,00						100 Persentase	80.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						149.037.798,00					-		160.000.000,00	
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						149.037.798,00					-		160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	84.037.798,00						20 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	65.000.000,00						100 Orang	80.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						65.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	25 Orang	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						84.037.798,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 Laporan		20 Laporan	12 Laporan	84.037.798,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		20 Laporan	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
248.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**270.000.000,00**							**165.000.000,00**	
		Persentase kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan						***270.000.000,00***							***165.000.000,00***	
			1.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	100 (%)		100 (%)	100 (%)	270.000.000,00						100 (%)	165.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						270.000.000,00					-		165.000.000,00	
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						270.000.000,00					-		165.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	70.000.000,00						100 Orang	65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	200.000.000,00						100 Orang	100.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	20 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						70.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	25 Orang	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
249.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**347.000.000,00**							**422.000.000,00**	
		Persentase konflik sosial yang di selesaikan						***347.000.000,00***							***422.000.000,00***	
			1.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	347.000.000,00						100 Persentase	422.000.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						407.000.000,00					-		422.000.000,00	
		Tercapainya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						407.000.000,00					-		422.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	230.000.000,00						12 Dokumen	230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00						12 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.000.000,00						12 Laporan	17.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	40.000.000,00						100 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	60.000.000,00						100 Orang	80.000.000,00	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						60.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	15 Orang	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						40.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksanaanya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	15 Orang	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		100 Orang	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksanaanya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	17.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Laporan	17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						230.000.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	230.000.000,00	Provinsi Kalimantan Tengah || Kab. Gunung Mas || Kecamatan Kurun || Kelurahan Kuala Kurun || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	10. Digitalisasi pelayanan publik yang inovatif		12 Dokumen	230.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							**1.128.170.000.000,00**							**856.660.533.396,85**	

Dalam upaya menjaga kesinambungan dan efektivitas pembangunan, RKPD Tahun 2027 telah disusun dengan mengintegrasikan prinsip konsistensi dan keselarasan berikut:

- Konsistensi terhadap RPJMD: RKPD disusun sebagai penjabaran operasional dari target dan arah kebijakan dalam RPJMD, memastikan bahwa seluruh sasaran makro dan indikator kinerja tahunan tetap berada dalam koridor rencana strategis lima tahunan.
- Keselarasan terhadap Asta Cita: Program kerja dalam RKPD telah diselaraskan dengan visi nasional *Asta Cita* untuk memastikan pembangunan di tingkat daerah tetap mendukung agenda prioritas nasional dan memperkuat kemandirian bangsa.
- Keselarasan terhadap ProSN/Tematik: RKPD telah mengadopsi pendekatan tematik sebagai fokus pembangunan daerah, yang disinergikan dengan Prioritas Strategis Nasional (ProSN) untuk menjawab tantangan spesifik di wilayah Gunung Mas secara terpadu.
- Keselarasan terhadap Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan: Intervensi pembangunan diarahkan secara kewilayahan berbasis karakteristik dan potensi lokal (seperti nilai *Huma Betang*), sehingga pemerataan akses layanan dan pengembangan pusat ekonomi dapat tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
- Keselarasan terhadap PKPN (Prioritas Kebijakan Pembangunan Nasional): Seluruh rencana kegiatan telah diselaraskan dengan sasaran PKPN, guna menjamin sinergi pendanaan, kebijakan, dan hasil pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Konsistensi dan keselarasan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD TAHUN 2025-2029 DAN RKPD TAHUN 2027

PROVINSI / KABUPATEN / KOTA : KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2027	JUMLAH PROGRAM RKPD TAHUN 2027	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
3.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10	9	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3	3	1.03.1.04.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	1.05.2.11.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5	5	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	2.17.2.07.3.32.12.0000 - DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
9.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
10.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4	4	3.25.2.09.0.00.03.0000 - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

11.	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	4.01.2.10.3.29.04.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
12.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	9	9	2.11.3.28.2.15.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
13.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	2.12.0.00.0.00.03.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
14.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	4	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
15.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
16.	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	2.11.3.28.2.15.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
17.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	2.16.2.20.2.21.02.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
18.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5	4	2.17.2.07.3.32.12.0000 - DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
19.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
20.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3	3	1.01.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
21.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	2.16.2.20.2.21.02.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
22.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	2.16.2.20.2.21.02.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
23.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	6	6	3.26.2.22.0.00.02.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

24.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
25.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	1	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
26.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	3	3.25.2.09.0.00.03.0000 - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
27.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	4	4	3.26.2.22.0.00.02.0000 - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
28.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7	7	3.27.0.00.0.00.03.0000 - DINAS PERTANIAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
29.	3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	2.11.3.28.2.15.12.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN, DAN PERHUBUNGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
30.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
31.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3.31.3.30.0.00.02.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
32.	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	3	3	2.17.2.07.3.32.12.0000 - DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
33.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	3	3	4.01.2.10.3.29.04.0000 - SEKRETARIAT DAERAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
34.	4.02 - SEKRETARIAT DPRD	2	2	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
35.	5.01 - PERENCANAAN	3	3	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
36.	5.02 - KEUANGAN	3	3	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

37.	5.02 - KEUANGAN	2	2	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
38.	5.03 - KEPEGAWAIAN	2	2	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
39.	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
40.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	1	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
41.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	3	3	6.01.0.00.0.00.06.0000 - INSPEKTORAT	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
42.	7.01 - KECAMATAN	3	3	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN KURUN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
43.	7.01 - KECAMATAN	6	6	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN TEWAH	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
44.	7.01 - KECAMATAN	6	4	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
45.	7.01 - KECAMATAN	5	5	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN SEPANG	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
46.	7.01 - KECAMATAN	4	4	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN MANUHING	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
47.	7.01 - KECAMATAN	4	4	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN RUNGAN	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
48.	7.01 - KECAMATAN	4	4	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN MIHING RAYA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
49.	7.01 - KECAMATAN	6	6	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN RUNGAN HULU	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

50.	7.01 - KECAMATAN	3	3	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN DAMANG BATU	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
51.	7.01 - KECAMATAN	4	4	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN MANUHING RAYA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
52.	7.01 - KECAMATAN	6	6	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN MIRI MANASA	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
53.	7.01 - KECAMATAN	5	3	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN RUNGAN BARAT	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
54.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	1.05.8.01.0.00.04.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

Kabupaten Gunung Mas, 12 Juni 2026
Kepala BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 197801192006041013

KESELARASAN OUTCOME PRIORITAS MENDUKUNG ASTA CITA
HASIL KESEPAKATAN DESK URUSAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal									
					2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL							
							2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	14	14.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha	2	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global									
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING							
							3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	100	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							
							3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

3.	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.										
				Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional									
					3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							
							3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI							
							3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang u	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi,	Dokumen	10	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4.	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang									
					1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG							
							1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
				Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan									
					1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)							
							1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM							
							1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	70	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL							
							1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							
							1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN							
							1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	1.2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

					1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI							
							1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan									
					2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)							
							2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	200	200.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN							
							2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6.	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Meningkatnya ketahanan pangan									
					2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							

							2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	0	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
							2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7.	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										
				Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan									
					3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
							3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	3	3.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN							
							3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	8		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	3		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8.	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru										

				Meningkatnya Produksi Pertanian									
					3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							
							3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN							
							3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
9.	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										
				Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah									
					2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							
							2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	4	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

10.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Lingkungan Hidup Berkualitas									
					2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
							2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	9	9.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
							2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	16	16.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	19	19.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan									
					1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							

							1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	70	70.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)							
							1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	1	5.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
12.	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.										
				Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor									
					3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI							
							3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.32.03.2.01.0006	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
13.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial									
					1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							
							1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							
							1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	4	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
14.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan									
					2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA							
							2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	37	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL							
							2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	9836	20.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

15.	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa									
					2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA							
							2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.13.03.3.01.0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabu	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							
							2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	114	114.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
16.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.										
				Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)									
					2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							
							2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	84	84.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	%	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

17.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).										
				Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah									
					2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK							
							2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	Orang	86877	80.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA							
							2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Titik	28	38.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
18.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional									
					8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							

							8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol	Orang	70	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							
							8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Orang	100	15.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik	Orang	40	15.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
19.	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah									

					2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE							
							2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
20.	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM									
					2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
							2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	30		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							
							2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Orang	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kegiatan	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
21.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
				Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional									
					3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA							

							3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
							3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
22.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)									
					2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							
							2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA							
							2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek	14		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

23.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan									
					1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN							
							1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	50	58.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
24.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Kesehatan Untuk Semua									
					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
							1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	2	17.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p	Unit	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							
							1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	40	0.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
25.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya								
					2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
							2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang	15	15.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	5		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
							2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	Orang	13	13.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	3	3.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
26.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										

				Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital									
					2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							
							2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL							
							2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan d	Laporan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
27.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas									
					2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)							
							2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)							

							2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan / Dokumen	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
28.	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.										
				Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga									
					2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN							
							2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	50	50.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN							
							2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Orang	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	Orang	30	30.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
29.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										

				Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat									
					2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN							
							2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	5	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO							
							2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	1	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
30.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.									
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA							
							1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	1000	1000.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

							1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	250	250.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	12	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
				Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar									
					1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
							1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
					1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN							
							1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
31.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.										
				Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa									
					2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP							

							2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	27	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
							2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

Kabupaten Gunung Mas, 12 Juni 2026

Kepala BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 197801192006041013

KESELARASAN PRO-SN/TEMATIK PEMBANGUNAN
HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG TAHUN 2026
DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

NO	PRO-SN/ TEMATIK PEMBANGUNAN	PROYEK/ KEGIATAN	BIDANG URUSAN	KODE SUBKEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR SUBKEGIATAN	SATUAN	TARGET HASIL KESEPAKATAN RAKORTEKBANG 2026	TARGET RKPD 2027	KET.
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1.	DIGITALISASI PEMBELAJARAN									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	155	155.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	58	58.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
2.	EKONOMI SYARIAH									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	4	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	Pelaku Usaha	86		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Unit Usaha	12		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

3.	IRIGASI YANG MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN									
	Ketahanan Pangan	Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)								
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.01.0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	33	33.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
4.	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)									
	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	600	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	25		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
5.	KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH									
	Ketahanan Pangan	Kampung Nelayan Merah Putih								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	1	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	25	20.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
6.	KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH									
	Pertumbuhan Ekonomi	Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih								

			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	30		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
7.	MAKAN BERGIZI GRATIS									
	Perluasan Akses Pendidikan	Makan Bergizi Gratis								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100	100.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
8.	MASYARAKAT ADAT									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	4		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
9.	MENCETAK DAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN (SAWAH/LUMBUNG PANGAN/FOOD ESTATE)									
	Ketahanan Pangan	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)								

			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	300		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
10.	OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM									
	Pengentasan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	8.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	70		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	9.500		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
11.	PANGAN AKUATIK									
	Ketahanan Pangan	Pangan Akuatik								
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

12.	PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT LENGKAP BERKUALITAS DI KABUPATEN/KOTA									
	Kesehatan untuk Semua	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	30	0.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
13.	PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH									
	Pengentasan Kemiskinan	Pembangunan 3 Juta Rumah								
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, da	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	50	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	0		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
14.	PEMERIKSAAN KESEHATAN GRATIS									
	Kesehatan untuk Semua	Pemeriksaan Kesehatan Gratis								

			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	25	25.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Laporan	12	12.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	25		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
15.	PENANGGULANGAN BENCANA									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang	4	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	-		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
16.	PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING									
	Kesehatan untuk Semua	Stunting								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga	30		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	18	18.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	10	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
17.	PENDAYAGUNAAN PENYULUH PERTANIAN									
	Ketahanan Pangan	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian								
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	Unit	6	6.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07.2.01.0016	Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Kecamatan/BPP dan Desa yang tersedia dan terpelihara	Unit	6	6.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
18.	PENGARUSUTAMAAN GENDER									
										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Orang			PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	18	18.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	58	58.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	10		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Lembaga	10	10.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
19.	PENGENDALIAN INFLASI									

	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi								
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	2	1.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
20.	PENUNTASAN TUBERKULOSIS (TBC)									
	Kesehatan untuk Semua	Penuntasan TBC								
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	1739	310.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	25		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	347	310.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
21.	PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH									
	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah								
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	2	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
22.	PERLINDUNGAN ANAK									

										PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	9	5.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	Orang	20		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			5.01 PERENCANAAN	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	2.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	1		PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	13	7.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
23.	SEKOLAH RAKYAT									
	Pengentasan Kemiskinan	Sekolah Rakyat								
			1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan	710	4.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :
			2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	1	16.00	PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP :

Kabupaten Gunung Mas, 12 Juni 2026

Kepala BAPPERIDA KABUPATEN GUNUNG MAS

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev

Pembina Utama Muda

NIP. 197801192006041013

DAFTAR KESELARASAN INTERVENSI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

No	RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
	Lokasi Prioritas	Highlight Intervensi	Lokasi Prioritas	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6
1	Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas	Penuntasan Missing Link Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Kec. Kurun	**Program Penyelenggaraan Jalan**	
			Kec. Sepang	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			Kec. Mihing Raya	Pembangunan Jalan	
			Kec. Tewah	Rekonstruksi Jalan	
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	
				Pembangunan Jembatan	

Kepala BAPPERIDA,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

Yantrio Aulia, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda
NIP. 197601192006041013

Keselarasan Program Kerja Prioritas Nasional dengan RKPD Tahun 2027

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	RKPD Tahun 2027
Prioritas Nasional 4	FP: Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, Dan Inovasi	Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).
		Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah	
		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas	
		Sekolah Garuda Baru, Sekolah Garuda Transformasi	
		Sekolah Rakyat	Fasilitasi Sekolah Rakyat (SR).
		Rumah Sakit Upgrade	
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
		Penuntasan Tuberkolosis	Penuntasan Tuberkolosis.
		Digitalisasi Pendidikan (Papan Interaktif Digital)	
		Studio Guru	
		Bantuan Perlengkapan Sekolah	Bantuan Perlengkapan Sekolah.
		Lulusan SMK Go Global	
		Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM	
		Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional	
		Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)	Sekolah Terintegrasi.
		Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan	Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan.
Prioritas Nasional 6 Prioritas Nasional 8	FP: Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat	PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi	
		PRO-KESRA Penduduk Berusaha dan Bekerja	
		Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
		Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng	
		Program 3 Juta Rumah	
		Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera	
Prioritas Nasional 3	FP: Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola	Pusat Data Nasional (Enabler)	Pemanfaatan SDI.
			Pemanfaatan DSSD.
Prioritas Nasional 7 Prioritas Nasional 4	FP: Regulasi dan Hukum	Pemberantasan Judi Online (Enabler)	
		Pemberantasan Narkoba (Enabler)	Pemberantasan Narkoba.
		Pemberantasan Penyelundupan (Enabler)	
		Perlindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas	

Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan	Program Kerja Prioritas Nasional	RKPD Tahun 2027
Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 6	FP: Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Elektrifikasi Desa	Elektrifikasi Desa.
		Percepatan Pembangunan Daerah 3T	
		Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional	
Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 5	FP: Industri Nasional	Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu	Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu.
		Pengelolaan Sampah menjadi PSEL	
		Konversi Unit Motor BBM ke Motor Listrik	
		Mobil Nasional	
		Motor Nasional	
		Pengembangan Industri Semikonduktor	
		Ekosistem Industri Kedirgantaraan	
Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 5	FP: Hilirisasi SDA Strategis	Kawasan sentra industri garam nasional	
		Hilirisasi Industri Strategis	Hilirisasi Industri Strategis (hilirisasi berbasis produk agro).
Prioritas Nasional 2	FP: Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Mandatori biodiesel 50 persen (B50)	
		Mandatori bioetanol 20 persen (E20)	
		Program PLTS 100 GW	
		PLTA Skala Besar Terintegrasi	
		Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
		Pengembangan kawasan pangan terintegrasi	Pengembangan kawasan pangan terintegrasi.
		Pengembangan Kawasan Perkebunan	Pengembangan Kawasan Perkebunan.
		Giant Sea Wall	
		Kampung Nelayan Merah Putih	
		Revitalisasi Tambak Nila Salin	
		Modeling dan Replikasi Tambak Udang Teritegrasi	
		Budidaya Ikan Darat Tematik	
		Kapal Ikan Modern	
		Peningkatan produksi daging, susu, dan telur	Peningkatan produksi daging, susu, dan telur.
		Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi	
		Eksplorasi Blok Migas Baru	
		Optimalisasi Sumur Minyak Masyarakat	
		Optimalisasi Lifting Sumur Minyak Tua	
		Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas)	
		Small Scale Green Modular Refinery and Storage (Deployable Mass Model)	
		Kompor Listrik untuk Rumah Tangga	
		Swasembada Air	
		Gerakan ASRI: Penghijauan	Gerakan ASRI: Penghijauan.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2027.

Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang berfokus pada sasaran strategis atau sejauh mana Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah telah tercapai ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini disajikan IKU sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 :

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD
INDIKATOR TUJUAN									
1	Indeks Infrastruktur	Indek	65.13	67.63	70.13	72.63	75.13	77.63	80.13
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton Co2 eq	NA	761,073.91	974,049.19	974,049.19	1,107,517.29	1,236,278.60	1,384,322.50
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indek	73.88	74.17	74.64	75.12	75.59	76.06	76.53
4	Laju pertumbuhan Ekonomi	%	4.48	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80	6.00
5	PDRB per Kapita	Rp. Juta /Kapita	67.08	70.00	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00
6	Tingkat Kemiskinan	%	5.68	4.61	4.41	4.21	4.00	3.80	3.60
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indek	58.35	60.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00
8	Indeks Daya Saing Daerah	Indek	3.27	3.35	3.43	3.52	3.60	3.68	3.76
INDIKATOR SASARAN									
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	NA	52.55	53.65	54.75	55.85	56.95	58.05
2	Indeks Konektivitas Wilayah	Indek	80.12	80.93	81.75	82.56	83.37	84.19	85.00
3	Persentase Desa Mandiri	%	8.77	14.04	14.04	14.04	14.04	14.04	14.04

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASE LINE (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
				RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD	RPJMD
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indek	69.33	78.26	78.47	78.68	78.89	79.10	79.30
5	Indeks Risiko Bencana	Indek	121.85	123.56	121.85	120.14	118.42	116.71	115.00
6	Indeks Pendidikan	Indek	64.84	65.78	66.72	67.66	68.60	69.53	70.47
7	Indeks Kesehatan	Indek	82.43	82.54	82.78	83.01	83.25	83.49	83.72
8	Indeks Ketimpangan Gender	Indek	0.570	0.560	0.555	0.546	0.540	0.534	0.530
9	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indek	58.24	58.53	58.82	59.12	59.41	59.71	60.00
10	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indek	61.74	62.36	62.98	63.61	64.25	64.89	65.84
11	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2.18	6.50	6.52	6.54	6.56	6.58	6.60
12	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1.54	2.28	3.03	3.77	4.51	5.26	6.00
13	Kontribusi PDRB Gunung Mas terhadap PDRB Kalimantan Tengah	%	4.38	4.33	4.36	4.39	4.42	4.45	4.47
14	Gini Rasio	Poin	0.25	0.244	0.238	0.232	0.226	0.220	0.214
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.12	2.94	2.76	2.58	2.40	2.22	2.04
16	Nilai SAKIP	Poin	61.63	63.03	64.42	65.82	67.21	68.61	70.00
17	Indeks Pelayanan Publik	Indek	2.09	2.50	2.62	2.75	2.87	3.00	3.12
18	Indeks Integritas Nasional	Indek	71.53	74.59	75.67	76.75	77.84	78.92	80.00

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk menggambarkan capaian kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. IKD berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pencapaian target pembangunan tahunan. Ada pun indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan ditetapkan

Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK lebih berfokus pada aspek teknis operasional dari pelaksanaan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Penetapan indikator kinerja daerah beserta targetnya dalam RPJMD Kabupaten Gunung Mas diuraikan dalam tabel berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	121,85	123,56	121,85	120,14	118,42	116,71	115,00
2	Kepadatan Penduduk	Orang/ km2	15,62	15,91	16,20	16,49	16,77	17,05	17,33
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,33	0,38	0,43	0,48	0,53	0,58	0,63
4	Jumlah Penduduk	Ribu Orang	145,54	148,23	150,94	153,61	156,26	158,87	161,46
5	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	-	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	69,33	78,26	78,47	78,68	78,89	79,10	79,30
7	Persentase kondisi mantap jalan	%	34,65	36,00	37,62	39,65	41,68	43,04	44,39
8	Rasio Penduduk	%	110,49	110,21	109,99	109,69	109,42	109,22	108,93
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	TON CO2 EQ	761.073,91	761.073,91	974.049,19	974.049,19	1.107.517,29	1.236.278,60	1.384.322,50
10	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	-	3,00	2,90	2,80	2,70	2,60	2,50
11	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	35,00	35,00	36,00	37,00	38,00	39,00	40,00
12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	5,81	5,43	5,08	4,75	4,42	4,10	3,79
13	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	53,48	53,82	54,15	54,49	54,83	55,17	55,50
14	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase	52,55	52,55	53,65	54,75	55,85	56,95	58,05
15	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	14,00	14,00	15,20	16,40	17,60	18,80	20,00
16	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,89	1,85	1,83	1,77	1,73	1,67	1,63
17	% RT Pengguna Listrik PLN	%	82,27	83,00	83,45	85,75	89,50	90,00	95,00
18	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	%	34,65	36,00	37,62	39,65	41,68	43,04	44,39
19	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	0,04	0,07	0,10	0,14	0,17	0,21	0,24

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)								
20	Persentase jumlah Rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	53,48	53,82	54,15	54,49	54,83	55,17	55,50
21	Meningkatnya Rumah Tangga yang menggunakan Listrik PLN	Rasio	82,27	83,00	83,45	85,75	89,5	90,00	95,00
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Indeks Kesehatan	Indeks	82,43	82,54	82,78	83,01	83,25	83,49	83,72
2	Indeks Pendidikan	poin	64,84	65,78	66,72	67,66	68,60	69,53	70,47
3	Persentase Kegiatan Forum Musyawarah di Tingkat Desa/Kelurahan	Angka	2,34	2,34	2,33	2,32	2,31	2,30	2,29
4	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	58,53	58,53	58,82	59,12	59,41	59,71	60,00
5	Kemampuan Literasi SD	%	49,49	51,99	54,49	56,99	59,49	61,99	64,49
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	58,53	58,53	58,53	58,82	59,12	59,41	59,71
7	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	48,45	48,45	49,45	50,45	51,45	52,45	53,45
9	Capaian Kabupaten Layak Anak	Angka	500,00	501,00	521,00	541,00	561,00	581,00	601,00
10	Indeks Modal Manusia	Angka	73,88	74,17	74,64	75,12	75,59	76,06	76,53
11	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	Angka	98,97	99,32	99,66	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	51,07	60,00	60,00	62,00	64,00	66,00	67,00
13	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61,70	63,10	64,40	65,60	66,80	67,90	69,00
14	Indeks Gini	Angka	0,25	0,24	0,23	0,23	0,22	0,22	0,21
15	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	14,10	13,50	12,40	11,30	10,20	9,10	8,85
16	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	90,00	90,00	90,65	91,30	91,95	92,60	93,25
17	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000	110,00	109,65	109,30	108,95	108,60	108,25	107,90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		kelahiran hidup)							
18	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	51,37	55,00	55,10	56,10	57,10	58,10	60,00
19	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,37	9,48	9,58	9,69	9,79	9,90	10,00
20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Angka	2,30	2,81	3,32	3,83	4,33	4,84	5,35
21	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	68,72	70,84	71,47	71,88	71,92	72,34	72,56
22	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,48	5,00	5,20	5,40	5,60	5,80	6,00
23	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	Indeks Literasi Digital	Angka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,10	12,31	12,52	12,74	12,95	13,16	13,37
26	Tingkat Kemiskinan	(%)	5,68	4,61	4,41	4,21	4,00	3,80	3,60
27	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73,58	73,65	73,80	73,95	74,11	74,26	74,42
28	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	0,00	51,00	52,00	52,18	52,36	52,54	52,72
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,57	0,56	0,55	0,54	0,54	0,53	0,53
30	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,12	2,94	2,76	2,58	2,40	2,22	2,04
31	Kemampuan Numerasi SMP	%	57,55	59,04	60,55	62,05	63,55	65,05	66,55
32	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	33,97	41,47	52,38	66,94	85,13	100,00	100,00
33	Kemampuan Literasi SMP	%	63,63	64,73	65,03	66,93	68,03	69,13	70,23
34	Kemampuan Numerasi SD	%	44,44	47,34	50,24	53,14	56,04	58,94	61,84
35	PDRB per kapita	Rp. Juta Per Tahun	67,08	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	75,00
36	indeks pembangunan manusia	Angka	73,88	74,17	74,64	75,12	75,59	76,06	76,53
37	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Angka	79,59	82,56	85,52	88,49	91,46	94,01	96,56
38	Pengeluaran Per Kapita	Angka	11,90	11,98	12,06	12,14	12,22	12,30	12,38
39	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,40	92,41	92,49	92,71	92,93	93,15	93,37
40	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	62,71	48,45	52,01	54,09	55,98	57,66	59,10
41	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi	%	79,59	82,56	94,66	95,17	95,63	96,05	96,43

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dalam pendidikan anak usia dini								
42	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	4,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80
43	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persentase	0,00	76,00	77,00	77,34	77,68	78,02	78,36
44	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	0,00	38,00	39,00	39,34	39,68	40,02	40,36
45	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
46	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	Persentase	0,00	5,00	5,51	6,02	6,53	7,04	7,55
47	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	33,97	41,47	35,48	39,49	43,40	47,20	50,92
48	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	Persentase	0,00	78,00	79,00	79,18	79,36	79,54	79,72
49	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	67,47	68,47	62,77	63,77	64,77	65,77	66,77
50	Iklim Keamanan SMP	Indeks	70,93	72,43	71,24	72,44	73,64	74,84	76,04
51	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	%	14,10	13,50	12,40	11,30	10,20	9,10	8,50
52	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	0,00	23,00	24,00	24,34	24,68	25,02	25,36
53	Meningkatnya akses masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Iklim Kebinekaan SMP	Indeks	71,37	72,37	66,83	67,83	68,83	69,83	70,83
55	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,63	64,73	66,42	66,92	67,42	67,92	68,42
56	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	57,55	59,05	59,62	60,62	61,62	62,62	63,62

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
57	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	44,44	47,34	42,55	44,80	47,05	49,30	51,55
58	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	53,81	56,31	54,83	56,33	57,83	59,33	60,83
59	Demand Satisfied (Kepuasan Keluarga)	%	94,10	94,20	94,30	94,40	94,50	94,60	94,70
60	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	57,42	59,82	59,66	61,16	62,66	64,16	65,66
61	KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan)	%	8,30	7,10	6,20	5,60	5,20	4,80	4,60
62	IPBK (Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan)	Indeks	62,20	70,90	76,20	79,60	81,60	82,90	83,70
63	Iklim Keamanan SD	Nilai	68,84	69,74	67,99	69,19	70,39	71,59	72,79
64	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%	96,29	97,75	97,75	97,75	97,75	97,75	97,75
65	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,97	99,32	99,13	99,14	99,15	99,16	99,17
66	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	79,59	100,00	94,66	95,17	95,63	96,05	96,43
67	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	2,30	2,81	3,25	6,40	12,39	23,24	25,02
68	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	71,37	72,37	66,83	67,83	68,83	69,83	70,83
70	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
71	Meningkatnya penanganan pasca bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,93	72,43	71,24	72,44	73,64	74,84	76,04
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Indeks Konektivitas Wilayah	Angka	80,12	80,93	81,75	82,56	83,37	84,19	85,00
2	Persentase Desa Mandiri	%	8,77	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04
3	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	%	8,28	10,07	11,85	13,64	15,43	17,21	19,00
4	Indeks Infrastruktur	Angka	65,13	67,63	70,13	72,63	75,13	77,63	80,13

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	-	52,55	53,65	54,75	55,85	56,95	58,05
7	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	1,54	2,28	3,03	3,77	4,51	5,26	6,00
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	2,18	6,50	6,52	6,54	6,56	6,58	6,60
9	Angka Ketergantungan	%	44,13	44,15	44,22	44,32	44,43	44,60	44,77
10	Skor dan Predikat Inovasi Daerah	Angka	50,54	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
11	jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara	Angka	25.011,00	25.843,00	26.674,00	27.506,00	28.337,00	29.169,00	30.000,00
12	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	1,65	1,68	1,70	1,71	1,73	1,74	1,75
13	Indeks Harga Konsumen	Indeks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	33,05	33,12	33,18	33,25	33,32	33,38	33,45
15	Rasio Elektrifikasi	%	95,55	96,00	96,55	97,10	97,65	98,20	98,75
16	Kontribusi PDRB Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	9,98	9,98	9,99	9,99	9,99	10,00	10,00
17	Kontribusi PDRB Kab. Gunung Mas terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah	%	4,38	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45	4,47
18	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,28	8,35	8,40	8,45	8,50	8,55	8,60
19	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	9,98	9,99	10,00	10,27	10,54	10,81	10,90
20	Meningkatnya kinerja BUMD yang optimal	Rasio	-0,17	0,30	0,3	0,5	0,5	0,7	0,9
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,35	60,00	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,27	3,35	3,43	3,52	3,60	3,68	3,76
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Angka	61,63	63,03	64,42	65,82	67,21	68,61	70,00
4	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,09	2,50	2,62	2,75	2,87	3,00	3,12
5	Indeks Integritas Nasional	Persentase	0,00	74,59	75,67	76,75	77,84	78,92	80,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,23	3,31	3,34	3,38	3,42	3,46	3,48
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	76,58	76,78	81,78	87,08	92,48	97,98	100,00
8	Persentase pelaksanaan pelayanan penunjang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**								
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**								
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	2,30	2,81	3,25	6,40	12,39	23,24	25,02
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,97	99,32	99,13	99,14	99,15	99,16	99,17
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**								
1	Angka Kesakitan	Per 1000	401,1	402,00	403,00	405,00	406,2	407,00	409,00
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	4,90	11,63	11,63	10,97	10,46	9,96	9,29
AC	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**								
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
2	Rasio rumah layak huni	%	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,17	0,17
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	36,78	37,46	38,13	38,81	39,48	40,16	40,83
4	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	3,32	4,24	5,15	6,07	6,98	7,89	8,81
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	7,95	9,01	10,07	11,14	12,20	13,27	14,33
AD	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**								
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	64,29	66,64	68,99	71,34	73,69	76,04	78,39
2	Cakupan pelayanan kebakaran	%	30,00	30,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Meningkatkan kualitas penanganan bencana kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Terselesaikannya konflik antar kelompok/umat beragama/suku dan lainnya	Skor	81,68	81,68	81,68	82,00	81,36	81,68	82,00
8	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase Penegakan Perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AE	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**								
1	Tingkat penurunan jumlah PPKS	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
2	Persentase penanganan PPKS	%	81,42	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasamya di luar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AF	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**								
1	Persentase penempatan tenaga kerja	%	96,68	96,70	96,81	96,85	96,90	96,95	97,10
2	Tingkat Produktivitas tenaga kerja	%	0,35	0,37	0,39	0,40	0,42	0,44	0,46
3	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	8,00	3,70	3,50	3,40	3,30	3,20	3,10
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,31	1,35	1,38	1,40	1,45	1,48	1,50
AG	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	89,43	89,56	89,62	89,74	89,81	89,95	90,02
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	%	0,049	0,06	0,065	0,076	0,086	0,097	0,108
3	Persentase anak korban kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang mendapat layanan komprehensif								
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68,72	70,84	71,47	71,88	71,92	72,34	72,56
5	Persentase Perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase ARG Pada belanja Langsung	%	2,26	2,27	2,28	2,30	2,32	2,34	2,36
7	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	0,00	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00
AH	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**								
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	0,00	40,00	60,00	75,00	80,00	85,00	90,00
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	12,00	15,00	17,00	20,00	23,00	25,00	28,00
AI	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**								
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	83,75	79,50	79,80	80,10	80,40	80,70	81,00
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	52,90	74,70	74,90	75,10	75,30	75,50	75,70
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	72,48	82,06	82,13	82,20	82,27	82,34	82,41
4	Persentase timbulan sampah yang terangkut ke TPA	%	9,96	13,00	15,00	18,00	20,00	23,00	25,3
5	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	95,74	95,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	79,03	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00
AJ	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	85,39	87,05	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00
2	Persentase penduduk usia di bawah 17 tahun yang wajib memiliki KIA	%	67,56	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00
3	Pengguna Akses Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Angka	3,00	3,00	11,00	20,00	25,00	30,00	39,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	40,00	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00
5	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	96,41	97,00	97,50	98,25	99,00	99,50	100,00
AK	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	2,95	3,39	3,44	3,50	3,67	4,80	5,33
2	Terbinanya Masyarakat Desa mendapat Pelatihan Ekonomi Produktif	Orang	50,00	50,00	55,00	75,00	85,00	95,00	100,00
3	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
AL	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**								
1	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,31	2,29	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)	%	73,18	74,83	73,46	73,60	73,74	73,88	74,02
3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun(Age Spesicifik Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	56,00	54,70	53,50	52,30	51,20	50,10	49,10
4	Persentase kebutuhan ber -KB yang tidak terpenuhi(Unmet need)	%	4,87	4,77	4,67	4,57	4,47	4,38	4,29
5	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	49,05	51,72	53,33	56,25	56,45	57,57	58,82
6	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	59,00	60,70	62,30	63,80	65,20	66,60	67,80
7	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	86,10	87,10	88,10	88,90	89,70	90,50	91,20
8	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	10,90	12,30	13,60	14,70	15,80	16,80	17,80
AM	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**								
1	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	60,00	62,00	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00
2	Tingkat penurunan jumlah kecelakaan	%	40,00	52,50	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
AN	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96,70	96,70	97,00	97,10	97,30	97,40	97,60
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat	%	0,00	0,00	20,00	25,00	30,00	35,00	50,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah								
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,74	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	71,00	71,00	73,68	76,32	78,95	81,58	84,21
6	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	87,50	87,60	87,70	87,80	87,90	88,00	88,10
7	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	96,70	96,70	97,00	97,10	97,30	97,40	97,60
8	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	26,30	35,00	35,15	35,25	35,35	35,45	35,55
9	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Nilai	0,00	0,00	1,80	1,82	1,85	1,95	2,00
AO	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**								
1	Persentase UMKM yang naik skala usaha	%	36,00	37,00	37,50	38,00	38,40	39,00	39,40
2	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Persentase	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
AP	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**								
1	Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Angka	530.880.000,00	557.424.000,00	583.968.000,00	642.364.800,00	706.601.280,00	777.261.408,00	854.987.548,80
2	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	Kegiatan	379,00	387,00	397,00	417,00	438,00	460,00	483,00
3	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja (TKI) dan (TKA) melalui Investasi Daerah	Orang	194,00	202,00	212,00	232,00	253,00	275,00	298,00
AQ	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**								
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,16	2,19	2,60	2,65	2,70	2,80	3,00
AR	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**								
1	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	80,00	50,00	52,00	54,00	56,00	58,00	60,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
AS	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**								
1	Persentase pelestarian warisan budaya	%	17,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
2	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	4,60	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
AT	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,17	60,00	60,00	61,00	63,00	64,00	65,00
2	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	Orang	6.704,00	7.700,00	9.250,00	10.637,00	12.232,00	13.455,00	14.800,00
AU	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**								
1	Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Indeks	84,71	84,75	84,79	84,81	84,85	85,01	85,54
2	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan	Angka	63,62	64,05	65,01	65,25	65,51	65,65	65,75
3	Jumlah dokumen yang telah diarsipkan dengan baik	Angka	8.993,00	8.998,00	9.000,00	9.200,00	9.500,00	9.600,00	9.700,00
AV	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**								
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	34,30	37,00	37,00	38,00	39,00	40,00	41,00
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.312,00	1.305,00	1.330,00	1.355,00	1.380,00	1.405,00	1.430,00
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	170,00	175,00	180,00	190,00	200,00	210,00	220,00
AW	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**								
1	Pertumbuhan PAD Sektor Pariwisata	%	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
AX	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**								
1	LPE Sektor Pertanian	%	1,92	2,42	2,92	3,42	3,92	4,42	4,92
2	PDRB Sektor Pertanian	%	30,38	30,88	31,38	31,88	32,38	32,88	33,38
AY	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**								
1	Indeks Perkembangan Harga	%	0,79	0,78	0,77	0,79	0,20	0,21	0,22
2	Pertumbuhan nilai neraca perdagangan daerah (Net Ekspor Barang dan Jasa)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Jumlah komoditas kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga	%	25,00	22,50	20,00	17,50	15,00	12,50	10,00
AZ	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**								
1	Jumlah Kewirausahaan IKM Daerah	Wirausaha	402,00	404,00	436,00	456,00	476,00	496,00	516,00
2	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	Unit Usaha	402,00	404,00	436,00	456,00	476,00	496,00	516,00
BA	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Kepala Keluarga	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
BB	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**								
1	Capaian penerapan standar pelayanan minimal pemerintah daerah	Nilai	90,84	90,85	90,87	90,92	91,00	91,05	91,10
2	Meningkatnya capaian pelaksanaan urusan kesejahteraan rakyat	%	96,94	97,5	98,00	98,5	98,5	99,00	100,00
3	Persentase Reformasi Hukum	Indeks	87,36	87,50	87,50	87,50	87,50	90,00	90,00
4	Meningkatnya nilai belanja pengadaan barang dan jasa	%	91,03	93,0	95,0	96,0	96,0	97,0	98,0
5	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Nilai	87,00	87,05	87,05	87,10	87,15	87,20	87,25
BC	**5.01 - PERENCANAAN**								
1	Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Keselarasan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BD	**5.02 - KEUANGAN**								
1	Rasio PAD	%	3,84	6,01	8,16	8,40	8,65	8,91	9,18
2	Meningkatnya tata kelola aset daerah	%	0,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
3	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase BMD dalam kondisi baik	%	97,125	97,131	97,578	98,025	98,354	99,025	100,00
BE	**5.03 - KEPEGAWAIAN**								
1	Indeks Merit Sistem	Angka	180,00	250,00	260,00	280,00	290,00	300,00	310,00
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40,00	0,00	40,53	58,00	60,00	65,00	70,00
BF	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**								
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70,71	75,63	78,00	80,00	85,00	88,00	90,00
2	Indeks Profesionalitas PPPK	Indeks	74,80	74,54	75,00	78,00	82,00	86,00	88,00
3	Persentase pemenuhan kebutuhan diklat	%	8,23	0,00	10,00	12,00	16,00	20,00	30,00
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan	%	28,00	0,00	35,00	45,00	55,00	65,00	75,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pelatihan formal (Permintaan PD)								
BG	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**								
1	Meningkatnya Inovasi Daerah	Angka	5.054,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
2	Indeks Inovasi Daerah	Angka	50,54	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
3	Persentanse Hasil Riset Yang Diimplementasikan Dalam Kebijakan Daerah (Perda/Perkada/Inovasi/Program/Kegiatan)	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BH	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**								
1	Meningkatnya kapabilitas APIP	Skor	3,00	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25
BI	**7.01 - KECAMATAN**								
1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,15	85,00	87,00	87,05	87,10	87,15	87,20
2	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Angka	84,15	85,00	87,00	87,05	87,10	87,15	87,20
3	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti	%	85,00	85,05	85,10	85,20	85,25	85,30	85,35
5	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	%	85,00	85,10	85,20	85,25	85,30	85,35	85,40
7	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditinjaklanjuti	%	85,73	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	%	85,00	85,10	85,35	86,00	86,10	86,20	86,25
9	Persentase Penunjang Urusan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
10	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
11	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
12	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
13	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	90,00	90,50	90,60	90,80	90,90	100,00	100,00
14	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	81,50	86,00	87,00	87,05	85,10	87,15	87,20
15	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Persentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dipenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
20	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
22	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	90,00	90,50	90,60	100,00	100,00	100,00	100,00
23	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE DATA (2024)	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
24	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	85,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Persentase hasil Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
29	Persentase terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanaan publik	%	90,50	90,60	90,70	90,80	90,90	100,00	100,00
30	Persentase Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BJ	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**								
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	58,53	58,53	58,53	58,82	59,12	59,41	59,71
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00
3	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7,13	6,50	6,60	6,70	6,80	6,90	7,00
4	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	71,64	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00
5	Indeks Kewaspadaan Nasional	Nilai	76,83	75,00	76,00	77,00	78,00	80,00	81,00
6	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7	Meningkatnya rasa kesatuan dan wawasan kebangsaan masyarakat	%	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	100,00

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Permendagri 59/2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah daerah wajib menyusun dan menetapkan SPM untuk setiap urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan SPM harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah harus melaksanakan SPM secara optimal. Evaluasi pencapaian SPM dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

SPM memiliki peran penting dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan bagi setiap warga negara. SPM juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SPM bertujuan untuk :

- Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkeadilan bagi setiap warga negara.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
PENDIDIKAN			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam Pendidikan kesataraan	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%
KESEHATAN			
	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
PEKERJAAN UMUM			
	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
PERUMAHAN RAKYAT			
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%
TRANTIBUMLINMAS			
	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten	100%
	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
SOSIAL			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%
	Perlindungan dan jaminan sosial padasaat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100%

BAB VII

P E N U T U P

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 merupakan pedoman penyusunan APBD Tahun 2027, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan serta telah dibahas dalam forum MUSRENBANG Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026 sehingga dengan demikian RKPD Tahun 2027 adalah komitmen seluruh Pemangku Kepentingan di daerah yang berisi rincian program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada pembangunan Kabupaten Gunung Mas untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2027.

Mengingat RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 merupakan Komitmen Pemangku Kepentingan di daerah, maka dokumen RKPD dimaksud harus menjadi acuan masing-masing Perangkat Daerah serta acuan bagi partisipasi masyarakat termasuk LSM dan dunia usaha dalam proses pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas, terlebih dahulu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2027 merupakan rencana program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2027 dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
2. RKPD Tahun 2027 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027.

3. RKPD Tahun 2027 juga merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam menyusun KUA dan PPAS serta APBD Tahun Anggaran 2027.
4. RKPD Tahun 2027 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas dengan memperhatikan saran-saran dan masukan-masukan dari seluruh Pemangku Kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Gunung Mas pada saat Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten pada Tahun 2026.
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program-program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas, Bupati Gunung Mas berkewajiban untuk melakukan pengendalian, monitoring serta melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan RKPD khususnya yang terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari APBD dan APBN.
6. Untuk itu bagi setiap pelaksanaan program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Gunung Mas Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan (RAKORDAL) dan menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

RKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2027 berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Bupati Gunung Mas tentang RKPD sampai dengan 31 Desember 2027. Untuk itu agar semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi atau memaduserasikan Rencana Kerja hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2027 Kabupaten Gunung Mas ini tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku pembangunan serta Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gunung Mas.

Perlu kesungguhan dari semua pihak terutama harus adanya satu kesatuan langkah dan semangat dalam menyikapi tujuan serta arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2027 sehingga

sasaran yang menjadi target pembangunan dapat memberikan manfaat dan hasil yang optimal untuk dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata di Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau.

BUPATI GUNUNG MAS,

ttd

JAYA SAMAYA MONONG